PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

RENCANA KERJA PERMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026

"INOVASI DAN HILIRISASI EKONOMI UNGGULAN SECARA BERKELANJUTAN"

email : bappeda@bangka.go.id
website : https://www.bangka.go.id

BAPPEDA. 2025

BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah dan program nasional;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor Seri D);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Aparat Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkay APIP adalah Inspektorat Kabupaten Bangka.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (Dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara menimal.
18. Indikator Kinerja adalah alat ukur menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
19. Penganggaran berbasis program adalah konsep pendekatan penganggaran yang fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
20. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya singkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016-2030.

BAB II

PENETAPAN RKPD

Pasal 2

RKPD ini ditetapkan untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistic-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi rencana pembangunan dalam menentukan isu strategis daerah, berpedoman terhadap pencapaian sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, SPM, TPB/SDGs, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 serta mengacu kepada Prioritas Nasional.

(2) Rincian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MATERI RKPD TAHUN 2026

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, kebijakan percepatan pembangunan ekonomi inklusif, serta rencana kerja pendanaan yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi, RKP dan Program Strategis Provinsi dan Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) Materi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan

b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Tahun Tahun 2026.

BAB IV

PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026.

(2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan mempedomani RKPD Tahun 2026.

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksanaan rencana kerja yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2026.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Bangka paling lama 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tahun bersangkutan.

(3) Laporan evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Kepala Bappeda menelaah terhadap sinkronisasi, relevansi dan harmonisasi antara RKPD Tahun 2026 dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

(2) APIP melakukan reviu terhadap RKPD Tahun 2026.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Juli 2025
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TANGGAL : 9 Juli 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026 telah selesai disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyesuaian dilakukan dalam rangka mencapai keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 selanjutnya akan dirumuskan menjadi Rancangan Akhir setelah melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bangka, selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka yang akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bangka Tahun 2026.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini, Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Perangkat Daerah dan seluruh stakeholder pembangunan atas sinergi, kerjasama dan kontribusi positif selama proses penyusunannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini diharapkan pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2026 dapat berjalan lebih baik, lebih focus dan selaras dengan Pembangunan Nasional.

Sungailiat, 9 Juli 2025

Pj. BUPATI BANGKA,

JANTANI ALI

DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR GRAFIK xii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-17
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-22
1.4. Maksud dan Tujuan I-26
1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-27

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1. Aspek Geografi II-1
2.1.2. Kondisi Penggunaan Lahan II-14
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah II-19
2.1.4. Wilayah Rawan Bencana II-25
2.1.5. Aspek Demografi II-26
2.1.6. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-32
2.1.7. Aspek Pelayanan Umum II-53
2.1.8. Aspek Daya Saing Daerah II-103
2.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah II-111
2.2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Per Urusan II-279
2.2.2. Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals (SDG's)* II-282
2.2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-287
2.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis II-296
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah II-296
2.3.2. Isu Strategis II-308

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024 dan 2025 ..... III-2
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan 2026 ..... III-20
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-35
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-35
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-43
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-48

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tema Pembangunan Daerah IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-40

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... IV-46
4.4. Inovasi Daerah IV-240

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan..... V-1
5.2. Pendanaan Perangkat Daerah (PD) Dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 ..... V-34

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama..... VI-1
6.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci..... VI-10
6.3. Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal VI-39
6.4 Penetapan Sasaran Pokok, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045… VI-46

BAB VII PENUTUP VII-1

LAMPIRAN VIII

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

2.1. Jumlah Kecamatan, Luas dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-2
2.2. Sungai di Kabupaten Bangka Menurut Kecamatan II-7
2.3. Nama dan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bangka II-9
2.4. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Depati Amir Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-13
2.5. Perubahan Tutupan lahan di Kabupaten Bangka dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ..... II-15
2.6. Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Eksisting Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-17
2.7. Penggunaan Lahan Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Eksisting Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-18
2.8. Jumlah Industri Besar, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-23
2.9. Jumlah Industri Menengah, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-23
2.10. Jumlah Industri Kecil, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-24
2.11. Destinasi Wisata di Kabupaten Bangka II-25
2.12. Jumlah Kejadian Bencana Alam, Korban dan Kerugian Tahun 2020 – 2024 ..... II-26
2.13. Indikator Kependudukan Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2024 ..... II-28
2.14. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Km 2 Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2020– 2024 ..... II-28
2.15. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-29
2.16. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 (%) II-30
2.17. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-31
2.18. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah) II-33
2.19. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) II-34
2.20. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-40
2.21. Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2020– 2024 ..... II-42
2.22. Prevalensi Stunting Kabupaten Bangka Berdasarkan SSGI Tahun 2022-2024 ..... II-44
2.23. Prevalensi Stunting Kabupaten Bangka Berdasarkan EPPGBM Tahun 2020-2024 ..... II-44
2.24. Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-45
2.25. Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-46

2.26. Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-47
2.27. Perkembangan Kinerja Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-48
2.28. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangka Tahun 2020– 2024 ..... II-48
2.29. Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2024 ..... II-50
2.30. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-52
2.31. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-54
2.32. Perkembangan Kinerja Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-54
2.33. Perkembangan Anak Putus Sekolah (APUS) Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-56
2.34. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-56
2.35. Perkembangan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-57
2.36. Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-58
2.37. Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-59
2.38. Capaian Intervensi Tuberkulosis Tahun 2024 ..... II-60
2.39. Jumlah kasus HIV di Kabaputen Bangka Tahun 2024 ..... II-61
2.40. Jumlah Kasus Malaria Tahun 2024 ..... II-62
2.41. Kondisi Jalan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-64
2.42. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-65
2.43. Akses Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-65
2.44. Proporsi Kawasan Kumuh Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-66
2.45. Luas Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-67
2.46. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-68
2.47. Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-68
2.48. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-69
2.49. Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-69
2.50. Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-71
2.51. Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tahun 2020–2024 ..... II-71
2.52. Jumlah Penduduk Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-72
2.53. Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-74
2.54. Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-75

2.55. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2024 ..... II-76
2.56. Perkembangan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-78
2.57. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024 ..... II-79
2.58. Perkembangan Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-80
2.59. Perkembangan Rata - Rata Indeks Desa Membangun dan Persentase Desa Swasembada Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-81
2.60. Perkembangan Indikator Kinerja Bidang PEMDES Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-82
2.61. Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-82
2.63. Jumlah Angkutan Umum dan Uji KIR Tahun 2020-2024 ..... II-83
2.64 Kontribusi Sektor Transportasi Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-83
2.65. Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-84
2.66. Jenis dan Jumlah Koperasi, Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-84
2.67. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-86
2.68. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-87
2.69. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-87
2.70. Jumlah Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-88
2.71. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kearsipan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-88
2.72. Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024 ..... II-90
2.73. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Spending of Money Tourism Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024 ..... II-91
2.74. Luas Produksi, Jumlah Produksi dan Jumlah Konsumsi Tanaman Padi, Jagung dan Singkong Kabupaten Bangka Tahun 2019–2024 ..... II-91
2.75. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024 ..... II-93
2.76. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024 ..... II-93
2.77. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024 ..... II-94
2.78. Perkembangan Hasil EKPPD Terhadap LPPD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024 ..... II-95
2.79. Hasil Penilaian Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024 ..... II-95
2.80. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Komponen Perencanaan Kinerja)Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024 ..... II-96

2.81. Opini Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024 ..... II-96
2.82. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 ..... II-97
2.83. Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Bangka Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) Tahun 2019-2024 ..... II-98
2.84. Pengeluaran Per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita dan Pengeluaran Konsumsi Makanan Per Kapita Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2024 ..... II-103
2.85. Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-104
2.86. Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-105
2.87. Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-105
2.88. Evaluasi Terhadap Hasil Rkpd Kabupaten Bangka Triwulan IV Tahun 2024 ..... II-113
2.88. Skala Nilai Predikat Kinerja II-279
2.89. Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dan Prediksi Target Akhir RPJMD Tahun 2019-2023 ..... II-280
2.90. Bidang dan Tujuan Utama Sustainable Development Goals (SDG's), Capaian Kinerja Daerah Tahun 2024 dan Target RAD SDG's Tahun 2024 ..... II-282
2.91. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-287
2.92. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-288
2.93. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-289
2.94. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-290
2.95. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-291
2.96. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... II-292
2.97. Status Capaian SPM terhadap Prediksi Akhir RPJMD Tahun 2019-2023 ..... II-292
2.98. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan dari Hasil Capaian Kinerja Per Urusan, Capaian SDG's dan Capaian SPM II-297
2.99. Konsistensi Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis II-309
3.1. Proyeksi Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Dan 2026 ..... III-6
3.2. Kebutuhan Pendanaan Belanja K/L Tahun 2025–2029 ..... III-7
3.3. Proyeksi Ekonomi Bangka Belitung Tahun 2025 Dan 2026 ..... III-9
3.4. Distribusi PDRB Kabupaten Bangka Menurut Sektor Tahun 2018-2024 ..... III-11
3.5. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bangka Tahun 2024 Dan Proyeksi Tahun 2025-2026 ..... III-14
3.6. Analisis Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangka Tahun 2026 ..... III-17
3.7. Realisasi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bangka 2023-2024 Dan Proyeksi Tahun 2025 – 2026 ..... III-18
3.8. Prediksi Kondisi Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2025 Dan Tahun 2026 ..... III-25
3.9. Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 S/D 2026 ..... III-35

3.10. Pagu Dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 S.D. 2026 ..... III-47
3.11. Pagu Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 S.D. 2026 ..... III-48
4.1. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 – 2045 ..... IV-13
4.2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ..... IV-21
4.3. Matriks Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ..... IV-41
4.4. Matriks Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ..... IV-42
4.5. Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 ..... IV-44
4.6. Keterkaitan antara Prioritas, Tema dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-47
4.7. Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 ..... IV-48
4.8. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD 2024-2026 dengan Prioritas RKPD 2026 ..... IV-49
4.9. Keselaraan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka dalam RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RKPD Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026 ..... IV-53
4.10. Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka dalam RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RKPD Tahun 2026 dan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 ..... IV-55
4.11. Keselarasan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... IV-59
4.12. Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Penguatan Kapasitas Birokrasi" dengan Program Prioritas Nasional dan Program Daerah Tahun 2026 ..... IV-63
4.13. Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)" dengan Program Daerah Tahun 2026 ..... IV-75
4.14. Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial" dengan Program Daerah Tahun 2026 ..... IV-87
4.15. Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Pembangunan SDM" dengan Program Daerah Tahun 2026 ..... IV-92

4.16. Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Pengelolaan Lingkungan Hidup" dengan Program Daerah Tahun 2026 ..... IV-101
4.17. Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Program Prioritas Daerah IV-105
4.18 Target Cakupan Layanan Indikator Stunting Tahun 2026 ... . IV-151
4.19. Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 selaras dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional 2026 ..... IV-179
4.20. Program Prioritas RKPD 2026 dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM Bidang Pendidikan IV-188
4.21. Program Prioritas RKPD 2026 dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM Urusan Bidang Kesehatan IV-189
4.22. Program Prioritas RKPD 2026 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum IV-190
4.23. Program Prioritas RKPD 2026 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM Urusan Bidang Perumahan Rakyat IV-191
4.24. Program Prioritas RKPD 2026 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) IV-192
4.25. Program Prioritas RKPD 2026 Dalam Rangka Mendukung Target Pencapaian SPM Urusan Bidang Sosial IV-193
4.26. Program Daerah Mendukung Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangka Tahun 2026 ..... IV-195
4.27. Program Daerah Tahun 2026 Mendukung Penanggulangan Bencana, Perubahan Iklim, Peningkatan Karbon dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) IV-198
4.28. Keselarasan Pembangunan Kewilayahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten IV-211
4.29. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Sungailiat IV-224
4.30. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Belinyu IV-226
4.31. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Mendo Barat IV-228
4.32. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Merawang IV-230
4.33. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Pemali IV-232
4.34. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Riau Silip IV-234
4.35. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Bakam IV-236
4.36. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Puding Besar IV-238
4.37. Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2024 ..... IV-242
4.38. Keterkaitan dan Supporting antara Inovasi Daerah Kabupaten Bangka dengan Prioritas Kabupaten Bangka, Prioritas Provinsi dan RKP 2026 ..... IV-261
5.1. Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2026 ..... V-14
5.2. Besaran Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... V-34
5.3. Rumusan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 ..... V-37
6.1. Penetapan Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tahun 2026 ..... VI-4
6.2. Penetapan Target Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2026 ..... VI-14

6.3. Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2026 ..... VI-41
6.4. Sasaran Pokok, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2026 yang Berpedoman Pada RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 ..... VI-46

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka I-16
1.2. Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-23
1.3. Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran I-25
2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bangka II-1
2.2. Peta Topografi Kabupaten Bangka II-4
2.3. Peta Kelerengan Kabupaten Bangka II-5
2.4. Peta Geologi Kabupaten Bangka II-6
2.5. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bangka Tahun 2022 ..... II-12
2.6. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bangka II-16
2.7. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Bangka II-16
2.8. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka II-19
2.9. Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) II-282
3.1. Proyeksi Ekonomi Dunia World Economic Forum 2024 & 2025 ..... III-2
3.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 3 Tahun 2024 ..... III-5
3.3. Distribusi Ekonomi Indonesia Triwulan 3 Tahun 2024 ..... III-6
3.4. Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2025–2029 ..... III-8
3.5. Struktur dan Pertumbuhan PDRB sektor Triwulan 3 tahun 2024 ..... III-9
3.6. Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2019– 2024 ..... III-10
3.7. Peranan Sektoral PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tahun 2024 ..... III-12
3.8. Kerangka Pemikiran Kebutuhan Pendanaan Tahun 2026 ..... III-16
3.9. Proprosi Kebutuhan Pendanaan Kab. Bangka Tahun 2026 Menurut Pelaku Ekonomi (Milyar Rp. & Persentase) III-18
3.10. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Trend Pertumbuhan Ekonomi yang terus Melambat III-28
4.1. Dasar Penentuan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-3
4.2. Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 ..... IV-4
4.3. Misi Pembangunan Indonesia 2045 dalam RPJPN Tahun 2025-2045 ..... IV-5
4.4. Misi RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 ..... IV-9
4.5. Tema Pembangunan Dua Puluh Tahunan IV-12
4.6. Posisi RKPD 2026 dalam RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 ..... IV-15
4.7. Tema Fokus Pembangunan pada RPD Tahun 2024-2026 ..... IV-23
4.8. Komponen Utama Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 ..... IV-39
4.9. Intergrasi dan Sinkronisasi Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 ..... IV-40
4.10. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2026 ..... IV-46
4.11. Program Pemerintah Kabupaten Bangka untuk Meningkatkan IPM IV-145
4.12. Program Unggulan untuk Menekan Eksploitasi Ekonomi di Kabupaten Bangka IV-175
4.13. Program Pemerataan Infrastruktur di Kabupaten Bangka IV-176

4.14. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Sungailiat Tahun 2026.....IV-223
4.15. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Belinyu Tahun 2026.....IV-225
4.16. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Mendo Barat Tahun 2026 .....IV-227
4.17. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Merawang Tahun 2026.....IV-229
4.18. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Pemali Tahun 2026.....IV-231
4.19. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Riau Silip Tahun 2026.....IV-233
4.20. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Bakam Tahun 2026.....IV-235
4.21. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Puding Besar Tahun 2026 .....IV-237

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik

2.1. Piramida Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2024 (%) II-31
2.2. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-33
2.3. PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-36
2.4. Laju Inflasi Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-37
2.5. Gini Ratio Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-38
2.6. Indeks Williamson Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-39
2.7. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-41
2.8. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-41
2.9. Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-42
2.10. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bangka tahun 2020-2024 ..... II-45
2.11. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-49
2.12. Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-60
2.13. Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Tahun 2018-2023 ..... II-63
2.14. Ketersediaan Beras (Ton) dan Jumlah Konsumsi Beras (Ton) Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-76
2.15. Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024 ..... II-77
2.16. Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-79
2.17. Nilai Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 ..... II-85

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan amanah Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyusunan RKPD ini juga diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Amanah Undang-Undang di atas maka Pemerintah Kabupaten Bangka harus menyusun RKPD Kabupaten Bangka tahun 2026. Berkaitan dengan penyusunan dokumen RKPD ini kami sampaikan terlebih dahulu kondisi eksisting pada Pemerintah Kabupaten Bangka saat ini sebagai berikut :

1. Kabupaten Bangka masuk ke dalam daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2023 bersamaan dengan selesainya periode RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023, maka sebagaimana ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangka telah memiliki Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman bagi Penjabat Bupati Bangka dalam melaksanakan pembangunan pada periode pembangunan tersebut hingga Kepala Daerah terpilih dilantik. Pelantikan Kepala Daerah terpilih dijadwalkan pada Bulan Februari Tahun 2025;
2. Dengan berakhirnya periode perencanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka Pemerintah Kabupaten Bangka telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 tanggal 24 Oktober 2024;

3. Dengan berakhirnya periode perencanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tanggal 12 Juni 2024 perihal Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 maka Pemerintah Kabupaten Bangka telah menyusun dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan telah diselesaikan pada Bulan Juli tahun 2024. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 telah menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi dan program prioritas calon Kepala Daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.
4. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024. Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka pada bulan November 2024 yang dimenangkan oleh Kotak Kosong, sehingga pelantikan Kepala Daerah terpilih yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2025 tidak dapat

dilakukan. Dalam kondisi ini pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bangka akan tetap dipimpin oleh Penjabat Bupati sampai dilantiknya Kepala Daerah terpilih.

5. Dengan kondisi ini Pemerintah Kabupaten Bangka harus melakukan Pemilihan Kepala Daerah kembali yang rencananya akan dijadwalkan pada bulan Agustus atau September Tahun 2025 dan hal ini berarti penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2025-2029 menjadi tertunda .

Dalam kondisi normal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKPD disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD.

Namun berkenaan dengan kondisi di atas maka penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 masih disusun berpedoman pada dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan RPJPD Kabupaten Bangka tahun 2025-2045, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD. Perlu diketahui bahwa dokumen RPD Tahun 2024-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana layaknya dokumen RPJMD, karena RPD hanya merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi untuk periode 3 (tiga) tahun dan hanya untuk memastikan perencanaan daerah tetap dilaksanakan secara berkesinambungan.

Selain itu, penyusunan RKPD juga memperhatikan pelaksanaan pembangunan kabupaten dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan

beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan/kewilayahan dalam perencanaan.

Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. RKPD Tahun 2026 yang disusun memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPD dan dokumen RKPD tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian berkeadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan. Selain itu juga memperhatikan capaian dan kendala dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2024, dinamika lingkungan strategis yang berkembang saat ini dan tantangan yang akan datang, hasil review rencana tata ruang dan wilayah dan prinsip *Sustainable Development Goals*/SDGs Tahun 2016- 2030.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 masih akan dipegaruhi oleh kondisi pembangunan pada tahun sebelumnya, dimana terdapat 3 (tiga) peristiwa besar yang berdampak kepada dinamika pembangunan yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD tahun 2026, yaitu:

1. Pemilihan Umum serentak yang dilaksanakan Tahun 2024, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.
   - Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Bangka memberikan kemenangan pada kotak kosong yang berimplikasi pada kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sampai dengan terpilih dan dilantiknya Kepala Daerah definitive akan tetap dipimpin oleh seorang Penjabat Bupati Bangka.

- Konsekuensi dari kondisi ini adalah akan dilakukan Pemilihan Kepala Daerah kembali di Kabupaten Bangka pada sekitar bulan Agustus -September 2025. Selanjutnya pelantikan Kepala Daerah terpilih akan dilaksanakan pada akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026.

Dengan demikian akan berpengaruh secara nyata dalam penyusunan RKPD tahun 2026 yang harus mengakomodir beberapa kebijakan terkait persiapan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang baru.

2. Kebijakan nasional yang berimplikasi dengan kondisi keuangan dan program daerah, seperti terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
3. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah kondisi perekonomian dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Seperti kebijakan perekonomian Amerika Serikat yang mempengaruhi perekonomian global, kondisi perekonomian Negara China yang masih mengalami perlambatan. Hal ini akan mempengaruhi kebijakan keuangan nasional terhadap daerah termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka. Kebijakan pembangunan nasional tahun 2026 terhadap kondisi ini akan menjadi acuan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2026.
4. Kondisi lingkungan seperti kondisi perubahan iklim, cuaca ekstrem serta bencana alam dan sosial yang semakin sering terjadi akan mempengaruhi kebijakan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan Kabupaten Bangka.

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan untuk memastikan agar tujuan pembangunan tahun berkenaan serta seluruh target

pembangunan yang ditetapkan dapat dicapai. Pada kondisi dimana gap yang terjadi antara target dan capaian terlalu besar maka dibutuhkan strategi percepatan pencapaian target dan tujuan tersebut, salah satunya dengan berinovasi. Inovasi harus dilakukan sebagai strategi yang efisien untuk mencapai target yang masih jauh dari jangkauan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target tahun sebelumnya. Karenanya inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi tersebut. Pasal 386 menyatakan bahwa ”dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi pada lingkungan pemerintah daerah sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan Musrenbang;

e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Dalam pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD, penyusunan Rancangan Akhir RKPD dan penetapan RKPD. Prosesnya sendiri melibatkan unsur masyarakat baik melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten serta melalui penyertaan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RPD.

RKPD merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh Kepala Daerah atau Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA). Agar penyusunan RKPD Tahun 2026 memenuhi kaidah-kaidah perencanaan, dilakukan penelaahan berbagai sektor dan dokumen yang meliputi hal – hal sebagai berikut:

1. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
3. Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
4. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
5. Penelaahan capaian kinerja tahun sebelumnya;
6. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
7. Penelaahan terhadap sasaran RPD;
8. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPD;
9. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan RKPD Provinsi;
10. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
11. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan

12. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkesinambungan, terencana dan sistematis, dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan, maka RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika pembangunan daerah dan nasional.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2026, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan menerapkan beberapa pendekatan. Ditinjau dari orientasi prosesnya, penyusunan RKPD Tahun 2026 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Masing-masing pendekatan memiliki tujuan berbeda sebagai berikut adalah :

1. *Pendekatan Teknokratik*, dengan pendekatan ini penyusunan RKPD 2026 dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah termasuk didalamnya melakukan proses analisis sektoral dan spasial untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. *Pendekatan Partisipatif*, dengan pendekatan ini penyusunan RKPD 2026 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan strategis melalui forum konsultasi publik dan

musrenbang. Musrenbang secara partisipatif mulai dilakukan dari tingkat desa/kelurahan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai prosedur yang berlaku, forum partisipatif ini dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan hasilnya diformulasikan dalam forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghimpun usulan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di tengah masyarakat.

Di sisi lain untuk menjaring informasi dan masukan masyarakat, Penjabat Bupati Bangka melakukan kegiatan "Bupati Anjangsana ke Kampong (Bujang Kampong)" yaitu agenda kunjungan Penjabat Bupati ke desa/kelurahan untuk bersilaturahmi secara langsung dengan masyarakat, berdiskusi terkait aspirasi masyarakat terhadap pembangunan di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bangka yang kemudian hasilnya akan menjadi bahan dalam perumusan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD. Kegiatan yang dilaksanakan pada program Bujang Kampong adalah:

- Penyelenggaraan pelayanan Publik On The Spot berupa Pelayanan SIM, Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pelayanan Perizinan, Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan kesejahteraan Sosial, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan BPJS Kesehatan, Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan Donor Darah,
- Silaturrahmi, Perkenalan, Evakuasi, Motivasi, Perhatian, Pencarian Informasi, Pemeriksaan Kondisi,
- Bersih-bersih Masjid, dan
- Olahraga Bersama dan Sembako Murah.

Hasil Bujang Kampong akan menjadi masukan yang terhimpun dalam Musrenbang RKPD Kabupaten. Dengan demikian, berdasarkan usulan-usulan tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat di level dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing OPD

sesuai program prioritas yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan.

3. *Pendekatan atas-bawah* (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan/desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi hingga ke tingkat nasional.

Penyusunan RKPD 2026 tidak dilakukan dengan pendekatan politis dikarenakan penyusunannya yang didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang tidak mengakomodir visi misi Kepala Daerah sebagaimana arahan penyusunan RPD menurut Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022. Sebagaimana dinyatakan dalam Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 bahwa RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan oleh Penjabat Kepala Daerah hingga pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Namun karena hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Bangka dimenangkan oleh Kotak Kosong, maka akan dilakukan pemilihan Kepala Daerah Kembali di Kabupaten Bangka pada tahun 2025.

Selain itu dari orientasi substansinya penyusunan RKPD Tahun 2026 menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Penguatan pendekatan Holistik-Tematik ini dilakukan melalui penanganan secara menyeluruh, terfokus dan tuntas pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Penguatan pendekatan integratif dilakukan melalui keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional. Penguatan pendekatan

spasial dilakukan melalui perencanaan kegiatan prioritas yang berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Penyusunan RKPD 2026 juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 dinyatakan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan dilakukan dengan pendekatan *Money Follows Program* melalui penganggaran berbasis kinerja. Penguatan implementasi *Money Follows Program* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan penajaman integrasi sumber pendanaan dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Namun bila ditinjau lebih jauh berdasarkan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformarsi Birokrasi, saat ini pendekatan *Money Follows Program* tidaklah cukup. Bila menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, hal mendasar yang menjadi amanat dalam ketiga undang-undang tersebut adalah perlu adanya upaya untuk menekan berbagai celah dan potensi tindakan koruptif dalam penggunaan anggaran negara serta memastikan penggunaannya mampu menciptakan kesejahteraan dan kemasalahatan bagi masyarakat. Oleh karenanya, salah satu asas yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara adalah asas akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara yang berorientasi pada hasil.

Sumber keuangan negara maupun daerah yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan menuntut pemerintah dan pemerintah daerah lebih cermat dalam memilih kegiatan-kegiatan prioritas**,** yang memiliki efek ungkit

yang signifikan pada sektor atau aspek lainnya, sehingga pendekatan perencanaan guna penganggaran ini tidak hanya *Money Follows Program* namun harus ditambah dengan *Program Follows Impact/Result*. Anggaran tidak hanya sekedar dialokasikan secara merata kepada setiap struktur atau fungsi organisasi, tetapi dialokasikan secara proporsional untuk membiayai program-program yang dianggap berdampak signifikan terhadap pencapaian dampak atau hasil.

Dokumen RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD Tahun 2026 yang berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan–undangan yang berlaku.

Selanjutnya sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka proses penyusunan RKPD 2026 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Rancangan Awal RKPD 2026

   Penyusunan Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPD Kabupaten Bangka 2024-2026, RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045, Rancangan Awal RKPD Provinsi Tahun 2026, Rancangan Awal RKP 2026, Program Strategis Nasional 2026, dan Pedoman Penyusunan RKPD, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024. Rancangan Awal RKPD berisikan panduan dan koridor perencanaan pembangunan untuk tahun 2026 dan disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

2. Musrenbang Desa/Kelurahan

   Musrenbang Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dilaksanakan pada bulan Januari yaitu hingga 24 Januari 2025. Musrenbang Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa yang dalam pelaksanaannya didampingi oleh Perangkat Daerah Teknis Kabupaten dan Camat.

3. Musrenbang RKPD 2026 di Kecamatan

   Musrenbang RKPD di Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan. Musrenbang RKPD 2026 di Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 3 – 13 Februari 2025 pada 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Bangka. Penetapan agenda pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan ini menimbang pelaksanaan musrenbang desa dan musrenbang RKPD di kabupaten, diatur sedemikian rupa sesuai dengan agenda penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

4. Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026

   Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Konsultasi publik dilaksanakan pada minggu ke 4 (empat) Bulan Februari 2025, tepatnya tanggal 14 Februari setelah agenda musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan. Rancangan Awal RKPD yang sudah diperbaiki disampaikan kepada Perangkat Daerah pada minggu ke 1 (satu) Bulan Maret 2025 sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

5. Forum Perangkat Daerah

   Merupakan forum yang memfasilitasi pembahasan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan pertimbangan. Selain itu dalam Forum Perangkat Daerah dilakukan *desk* Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah untuk menyepakati prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dan menyelaraskan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat *Top Down* maupun *Bottom Up* dari desa/kelurahan dan kecamatan dan dari agenda Bujang Kampong Kepala Daerah. Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan paling lambat pada minggu ke 1 (satu) bulan Maret Tahun 2025. Untuk pelaksanaan Forum Perangkat daerah RKPD tahun 2026 ini akan dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan 27 Februari 2025. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang sudah disempurnakan berdasarkan saran dan masukan Forum Perangkat Daerah disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan Rancangan Awal RKPD.

6. Rancangan RKPD 2026

   Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD bedasarkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang sudah diverifikasi, hasil telaah terhadap RKPD Provinsi, RKP dan Program Strategis Nasional. Penyusunan Rancangan RKPD 2026 dilaksanakan pada awal bulan Maret 2026. Rancangan RKPD akan menjadi bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

7. Musrenbang RKPD Kabupaten 2026

   Musrenbang RKPD di Kabupaten Bangka dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 14 Maret 2026 melalui pembahasan *desk* untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program kegiatan pagu indikatif indikator dan target kinerja serta lokus kegiatan. Penyelarasan program dan kegiatan kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan kewenangan desa yang diusulkan berdasarkan musrenbang kecamatan. Seluruh proses musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2026 dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dengan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan menteri dalam negeri Nomor 90 tahun 2019.

8. Rancangan Akhir RKPD Kabupaten 2026

   Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kabupaten. Rancangan Akhir RKPD dibahas bersama Sekretaris Daerah dan seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah sudah diakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 dilaksanakan paling lambat bulan Mei 2024.

9. Penetapan RKPD Kabupaten 2026

   Rancangan Akhir RKPD yang sudah dibahas bersama Sekretaris Daerah dan seluruh Perangkat Daerah menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) tentang RKPD 2026. Rancangan PERKADA diajukan ke

Gubernur untuk difasilitasi. Rancangan PERKADA yang sudah disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi oleh Gubernur disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dan diundangkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi Tahun 2026 ditetapkan.

Secara lengkap proses dan tahapan pelaksanaan penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka

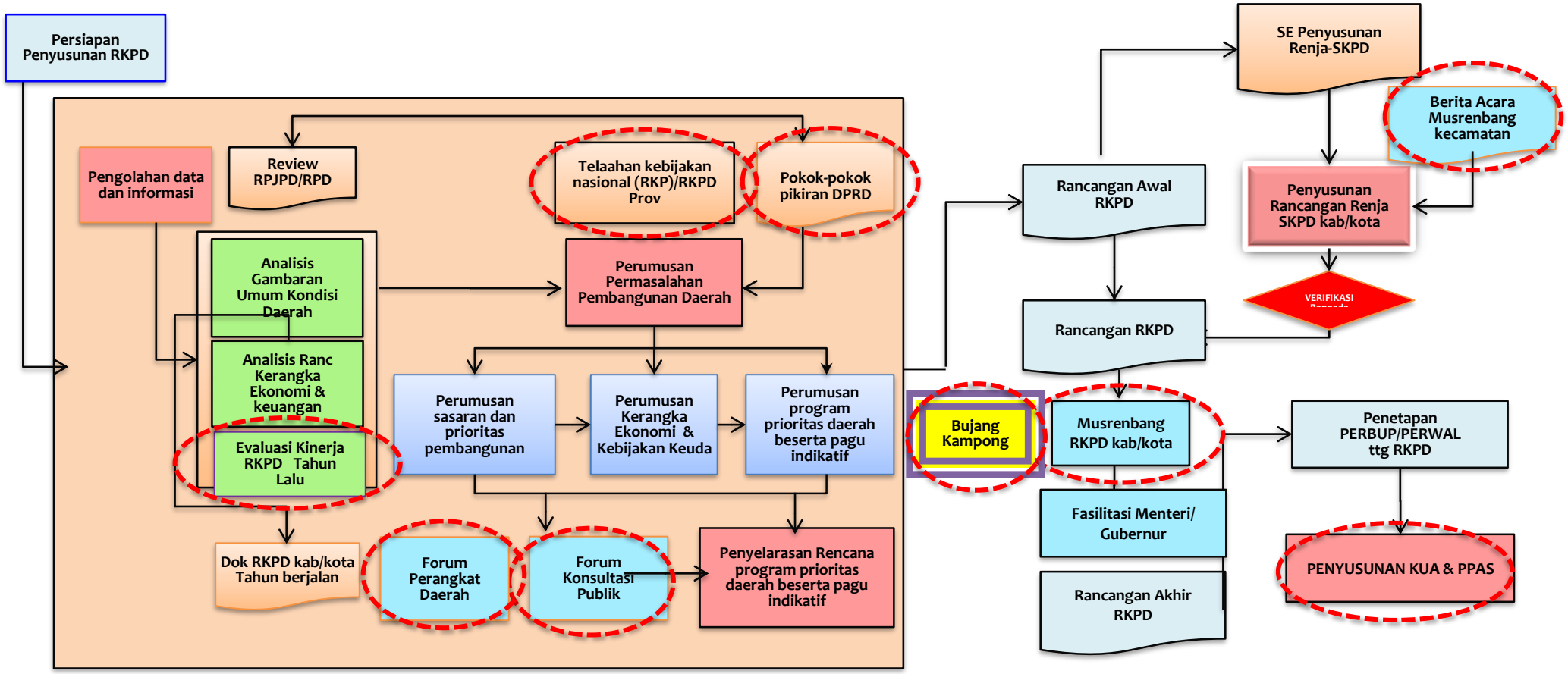

Secara umum Dokumen RKPD Tahun 2026 secara umum mempunyai nilai strategis dan penting diantaranya :

1. RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026, secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 tahun ke-3 (tiga).
2. RKPD Tahun 2026 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2026 bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026.
3. RKPD Tahun 2026 merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui capaian kinerja RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga Tahun berkenaan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomro 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
22. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
32. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 43 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kawasan Industri Jelitik Sungailiat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
35. Peraturan Daerah Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168);

36. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
38. Peraturan Daerah Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangka Pinang Tahun 2019 Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor

297);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
48. Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 4);
49. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 4);
50. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya RKPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RKPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berikut ini disampaikan diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

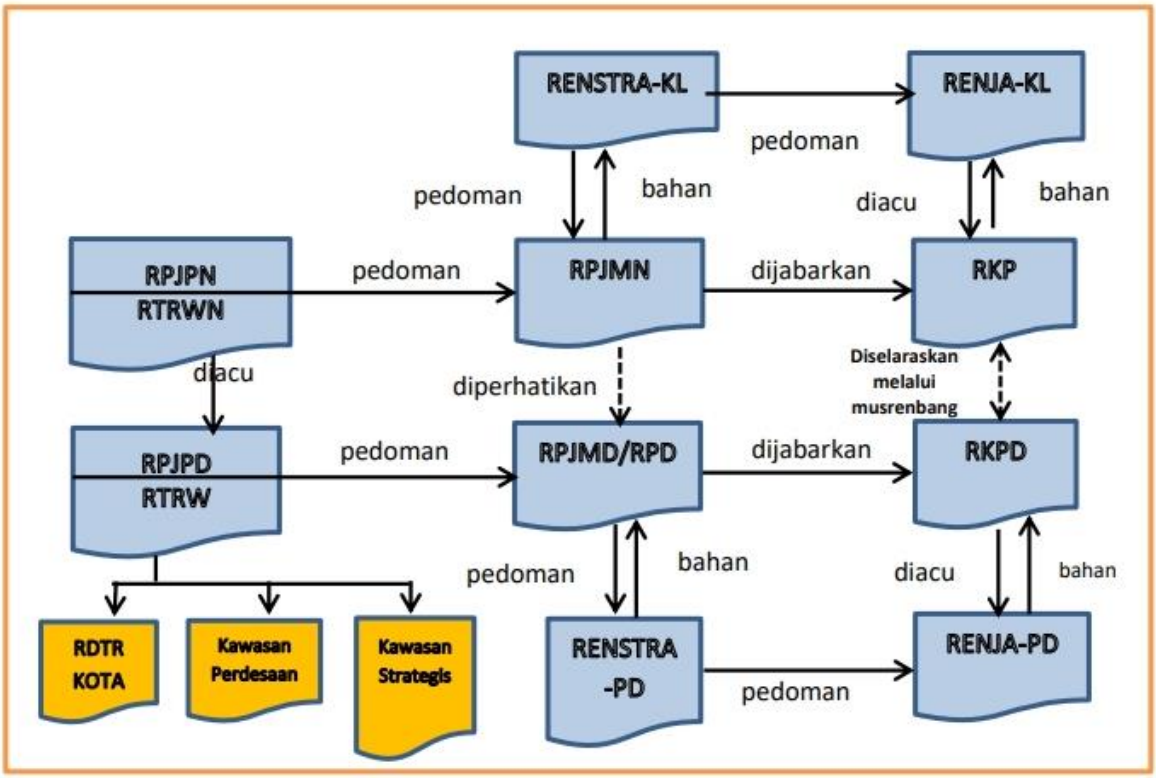

Sebagaimana diagram alur diatas maka dapat dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ketiga dokumen nasional diatas menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD/RPD Provinsi dan RKPD Provinsi, dan selanjutnya juga menjadi acuan penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD/RPD Kabupaten dan RKPD Kabupaten. Selanjutnya secara berjenjang sesuai hirarkinya RPJMD/RPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD, sedangkan RKPD akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja-PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra-PD dan Renja-PD juga akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD/RPD dan RKPD.

Sementara hubungan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP dan Renstra-PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat dimana penyusunan

rencana tahunan harus berpedoman pada rencana 5 (lima) tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra-PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra-PD harus memperhatikan Renstra K/L.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun mengacu pada Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Karenanya Pemerintah Kabupaten Bangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 dan turunannya berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kabupaten Bangka sampai dengan Tahun 2025 sudah memiliki 2 (dua) RDTR yaitu RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 dan RDTR Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2021-2041. Selain itu dokumen keruangan yang akan menjadi perhatian dan acuan adalah dokumen perencanaan Kawasan Industri Jelitik Sungailiat, Kawasan Industri Perikanan Terpadu Teluk Kelabat Belinyu dan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Keterkaitan lainnya dari dokumen perencanaan RKPD ini adalah hubungannya dengan penganggaran. Bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan tidak akan terlepas dari penganggaran. Perencanaan yang baik akan memberikan hasil penggunaan anggaran yang efektif dan efisien dalam pembangunan. Dalam pengelolaan pemerintahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran dijelaskan pada pasal 25 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan RAPBN dan RAPBD.

Selain itu dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 Ayat 3 juga menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras/konsisten, dan RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan KUA, PPAS serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu

penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus disertai indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran ini dijelaskan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.3
Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran

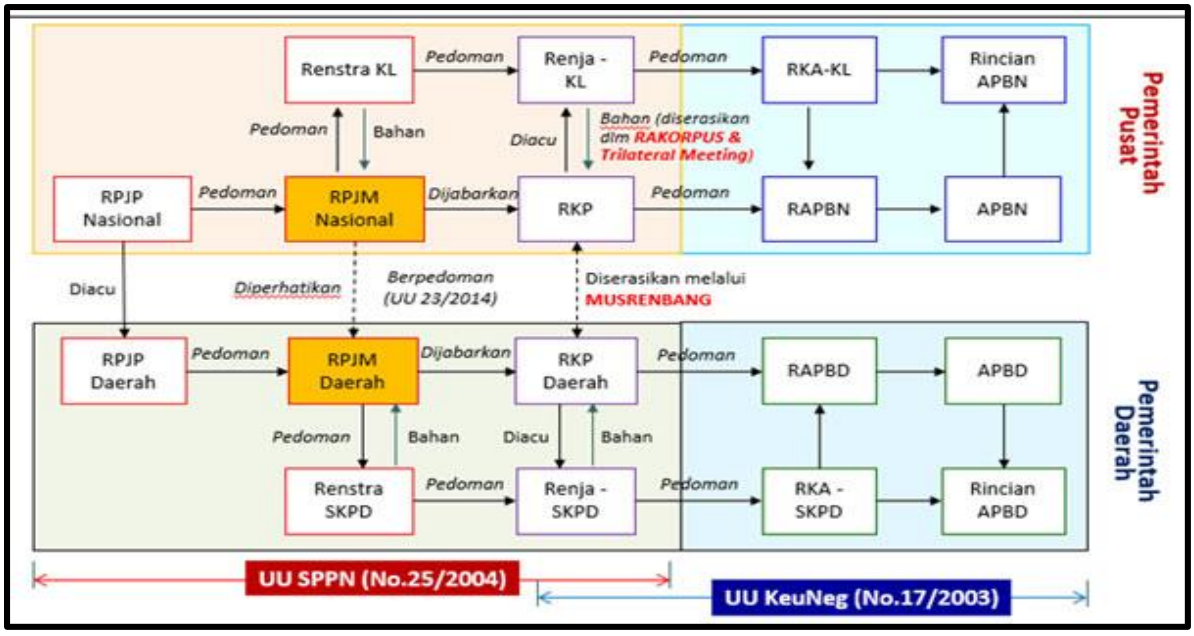

Tahun 2024 merupakan tahun yang sangat bersejarah di Indonesia, dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia. Untuk persiapan tersebut Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan berbagai regulasi yang terkait dengan agenda penyusunan dokumen perencanaan yang telah habis masa berlakunya sebagai pedoman bagi Presiden dan Kepala Daerah terpilih Tahun 2024 dalam menyusun APBN maupun APBD tahun 2025.

Berkenaan dengan agenda nasional Pilkada serentak kaitannya dengan penyusunan dokumen perencanaan pada tingkat nasional maupun daerah, pada

tahun 2024 baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah di Indonesia telah menyusun dan menetapkan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Tahun 2025-2045. Pada tahun 2024 Pemerintah maupun Pemerintah Daerah juga sudah harus menyusun rancangan teknokratik RPJMN dan rancangan teknokratik RPJMD yang selanjutnya diproses dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Presiden dan Kepala Daerah yaitu pada akhir tahun 2024 atau pada awal tahun 2025. Namun berkenaan dengan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dikarenakan Kabupaten Bangka dimenangkan oleh Kotak Kosong maka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 belum bisa dilanjutkan ke tahapan rancangan awal dan seterusnya mengingat belum Kepala Daerah terpilih belum ada. Sampai dengan tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangka akan dipimpin oleh Penjabat Bupati hingga dilakukan pemilihan kepala Daerah kembali pada tahun 2025 dan dilantiknya Kepala Daerah terpilih. Sementara itu untuk dokumen perencanaan tahunannya secara reguler Pemerintah Kabupaten Bangka tetap menyusun RKPD tahun 2026 dengan tahapan dan jadwal pentapannya sebagaimana peraturan yang belaku.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026 ini dimaksudkan :

a. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan Nasional dan Daerah, dan;
c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berupa :

1. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangka dan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2026;
2. Pedoman bagi PD dalam menyusun Renja-PD, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026;
3. Sebagai pedoman bagi berbagai potensi sumberdaya masyarakat atau swasta atau institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2026.
4. Sebagai instrument evaluasi terhadap keterkaitan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD Tahun rencana dalam periode dokumen RPJPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal serta Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara

penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang RKPD.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti RPJMD/RPD Provinsi, RKP/program strategis nasional dan RKPD Provinsi serta RPJMD Kabupaten Kota sekitar yang berbatasan untuk penyusunan RKPD Kabupaten serta keterkaitan antara RKPD dengan penganggaran.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD bagi Kabupaten Bangka.

1.5 Sistematika RKPD

Mengemukakan struktur penyusunan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar setiap bab di dalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan kondisi umum Kabupaten Bangka, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu, hasil evaluasi RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menguraikan gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Uraian evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun lalu, Tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menguraikan tentang rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

a. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun rencana.

b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan tema, program prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capain kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi beserta kerangka pendanaan.

a. Tema Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang tema pembangunan tahun 2026 serta pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi penetapan tema pembangunan tahun 2026.

b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan untuk tahun 2026 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, dan mengacu pada RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dan pembangunan provinsi.

c. Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Mengemukakan bahwa suatu prioritas pembangunan daerah tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Tahun rencana yang mengacu pada RPD Tahun rencana.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan secara eksplisit rencana program prioritas pembangunan dan pendanaan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja

Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

Bagian ini memuat arahan Bupati bagi PD dalam rangka menyusun dokumen Renja-PD.

Bagian ini dapat memuat antara lain :

1. Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan RKPD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam RKPD.
2. Penyimpulan atas tema pembangunan beserta prioritas pembangunan dalam mendukung pencapaian tujuan dan target pembangunan yang direncanakan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sungailiat sebagai ibukota kabupaten. Kabupaten Bangka daratan memiliki luas kurang lebih sebesar **302.093,675 Ha** sedangkan jumlah luas Kabupaten Bangka keseluruhan yaitu mencakup wilayah daratan, perairan dan pulau pulau kecil yang berjumlah 48 pulau adalah ± **4.984,29 Km²**, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat, Teluk Kelabat, dan Selat Bangka.

Berikut peta administrasi wilayah Kabupaten Bangka disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bangka

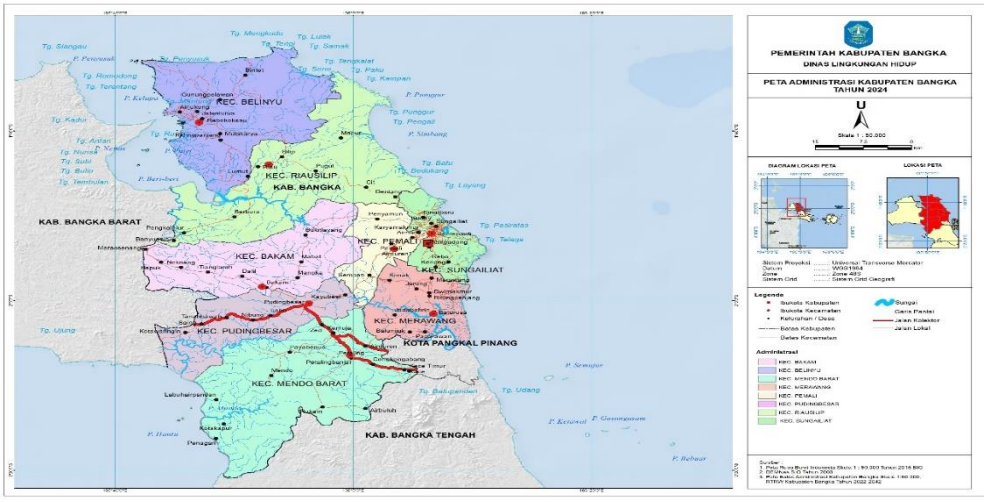

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2024

Secara administratif, Kabupaten Bangka terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, 62 (enam puluh dua) desa dan 19 (sembilan belas) kelurahan, dengan pembagian kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Luas dan Desa/Kelurahan
di Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Kelurahan	Desa
1	Mendo Barat	65.176,376	12	1
2	Merawang	21.784,430	-	9
3	Puding Besar	30.034,228	-	6
4	Sungailiat	14.110,560	-	10
5	Pemali	15.785,055	-	7
6	Bakam	41.265,944	-	15
7	Belinyu	52.941,396	7	5
8	Riau Silip	60.995,681	-	9
	Jumlah	**302.093,67**	**19**	**62**

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044

2.1.1.1. Letak dan Kondisi Geografi

Secara geografis, Kabupaten Bangka terletak di bagian utara pulau Bangka pada posisi antara $105^0$38'-$106^0$18' Bujur Timur dan $1^0$3'00"-$2^0$21' Lintang Selatan. Kabupaten Bangka terdiri dari 2 kategori daerah, yaitu :

a. Daerah Pantai, yang meliputi wilayah Kecamatan Sungailiat, sebagian wilayah Kecamatan Merawang, sebagian wilayah Kecamatan Riau Silip, sebagian wilayah Kecamatan Belinyu, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Mendo Barat; dan

b. Daerah Dataran Rendah, yang meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Mendo Barat, wilayah Kecamatan Pemali, wilayah Kecamatan Puding Besar, dan wilayah Kecamatan Bakam.

2.1.1.2. Kondisi Topografis

Secara umum wilayah Kabupaten Bangka didominasi oleh topografi yang relatif bergelombang dengan ketinggian wilayah sekitar 100-500 MDPL, dimana kondisi morfologi dalam bentuk dataran bergelombang ini mendominasi di seluruh wilayah. Sebagian besar wilayah dalam bentuk dataran bergelombang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan kering dan beberapa wilayah dalam bentuk semak belukar.

Di Kabupaten Bangka juga terdapat beberapa dataran tinggi perbukitan yang berada di bagian utara dan tengah dari wilayah tersebut, seperti di Kecamatan Belinyu, Kecamatan Bakam, Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Pemali dengan ketinggian lokasi mencapai 500 MDPL, dimana pemanfaatan lahan di wilayah tersebut digunakan untuk budidaya kawasan hutan lahan kering dan perkebunan. Selain itu, terdapat beberapa wilayah dalam bentuk dataran yang tersebar hampir di seluruh dataran pantai dan outlet dari sungai-sungai besar, dimana dataran ini cukup bervariasi seperti hutan *mangrove*, pertambangan dan pertanian lahan keringTanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH rata-rata di bawah 5, didalamnya mengandung mineral bijih timah dan bahan galian lainnya seperti: pasir kwarsa, kaolin, batu gunung dan lain-lain. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut :

- 4% berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 meter, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah komplek Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dan Litosol berasal dari Batuan Plutonik Masam.
- 51% berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu Pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam.
- 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi Podsolik berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit.
- 25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial Hedromotif dan Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

Berikut gambar kondisi topografi di Kabupaten Bangka.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Bangka

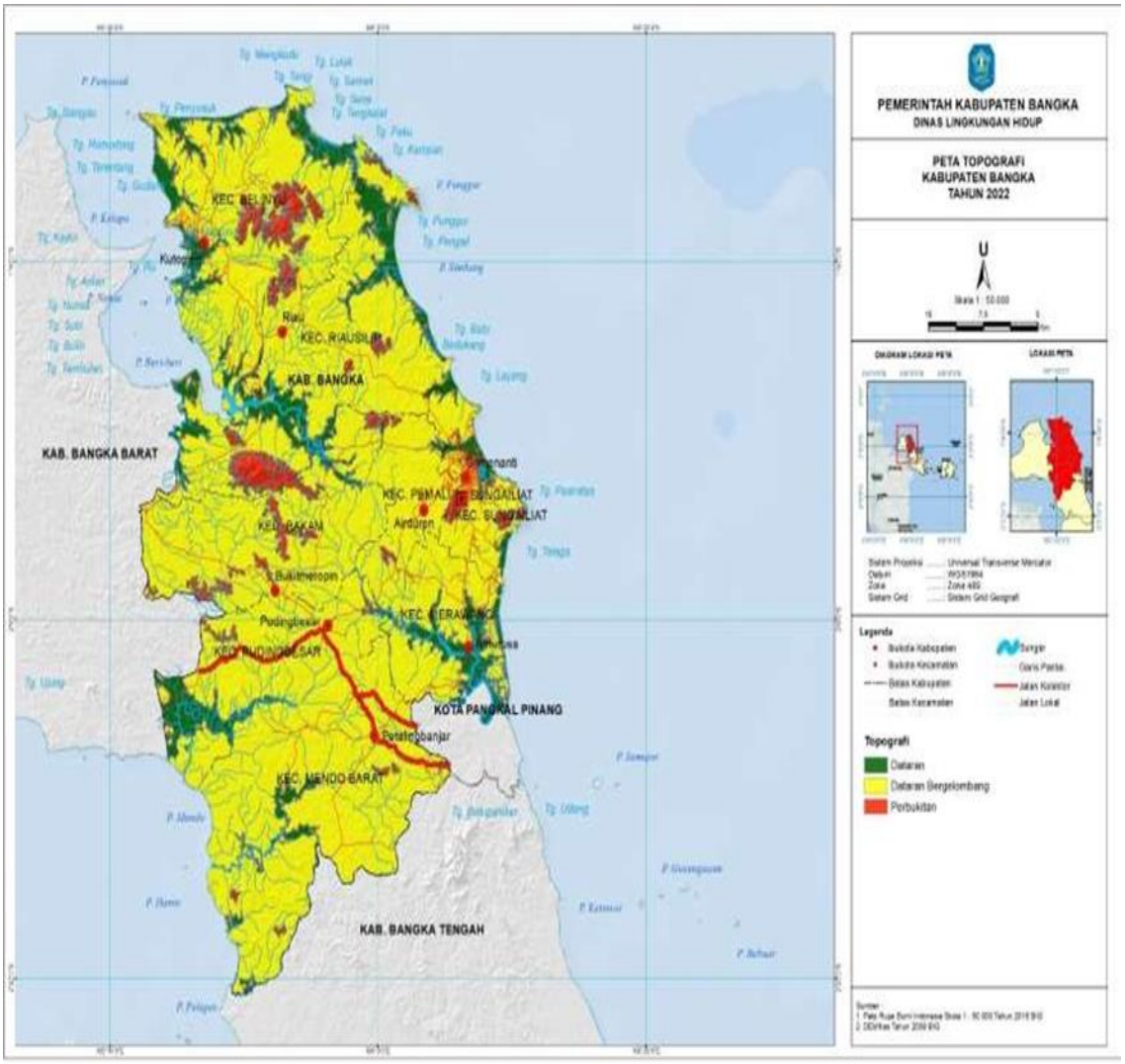

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2024

Berdasarkan kemiringan lerengnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Bangka memiliki kelas kelerengan datar di bagian tengah dan utara dengan kemiringan lereng sekitar 0-8%, sedangkan untuk wilayah bagian selatan relatif landai dengan kemiringan lereng sekitar 8-15%. Selanjutnya terdapat beberapa wilayah dengan kelerengan agak curam sampai dengan curam dengan kemiringan lereng 15-25% dan 25-45%, beberapa wilayah dengan kelerengan tersebut merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian berkiasar 400-500 MPDL. Kondisi kelerengan di wilayah Kabupaten Bangka dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.3
Peta Kelerengan Kabupaten Bangka

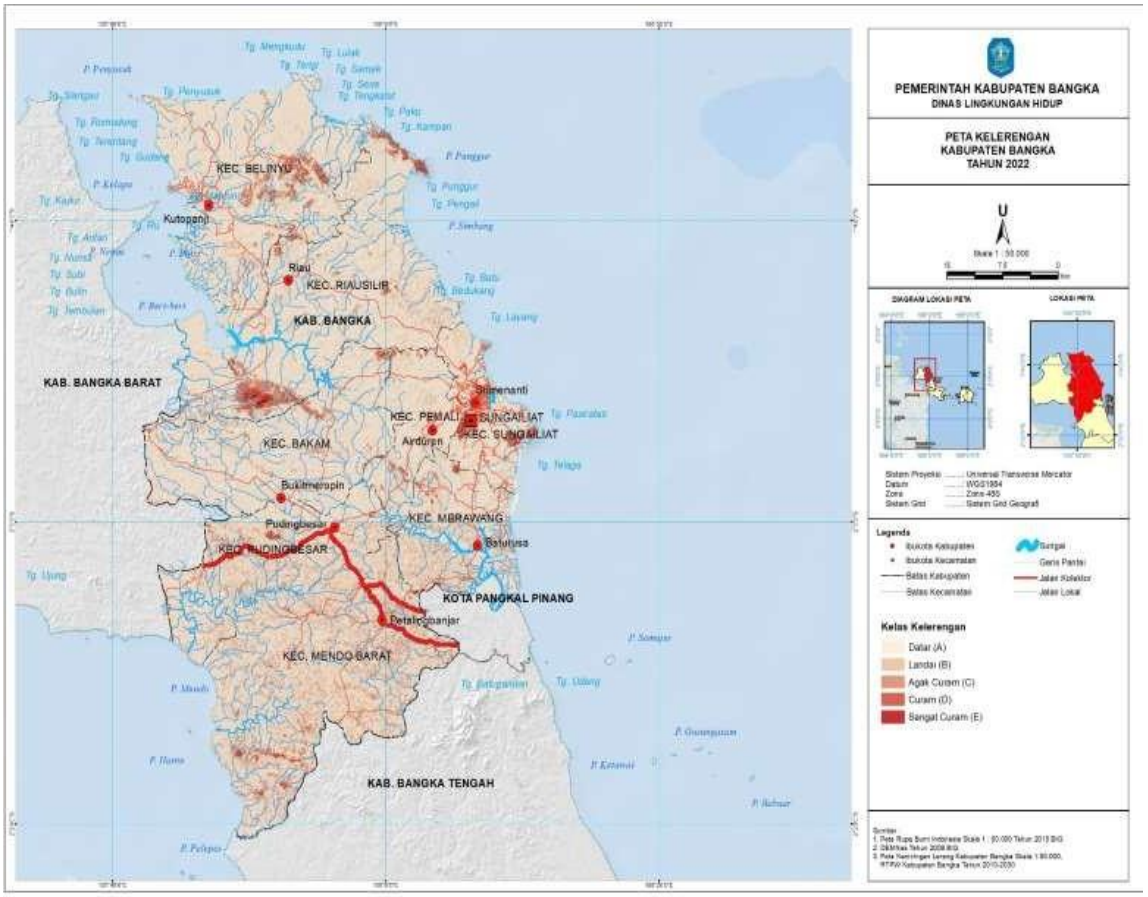

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2024

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Secara fisiografi, Pulau Bangka termasuk ke dalam Sunda Land dan merupakan bagian terangkat dari peneplain Sunda. Bila ditinjau dari sudut geologi, Pulau Bangka merupakan kelanjutan dari *Granite Belt* yang berumur Yura–Kapur yang membentang mulai dari Birma, Muangthai, Malaysia, Kepulauan Riau (Pulau Singkep, Pulau Karimun dan Pulau Kundur), Pulau Bangka dan Pulau Belitung hingga Pulau Karimata. *Granite Belt* sendiri merupakan deretan formasi batuan granite kaya akan mineral *cassiterite* yang kemudian dikenal dengan sebutan *The Tin Belt*.

Pulau-pulau dari *The Tin Belt* diinterpretasikan merupakan sisa bagian resisten dari gunung yang muncul pada masa terbentuknya *Sunda Shelf*. Pupili (1973) menyatakan bahwa Malaysia, Kepulauan Riau dan Bangka berada dalam kelompok elemen tektonik yang sama. Evolusi tektonik di wilayah ini telah dimulai sejak *Paleozoikum* Bawah dimana berdasarakan

Teori Tektonik Lempeng bahwa daerah penunjaman *(subduction zone)* berada di bagian timur Malaysia dan pada Mesozoikum Bawah–Tengah menghasilkan busur gunung api *(magmatic arc)* dalam bentuk deretan Pulau Kundur, Pulau Singkep, Pulau Bangka, Pulau Belitung dan sebagian dari Kalimantan Barat.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Bangka

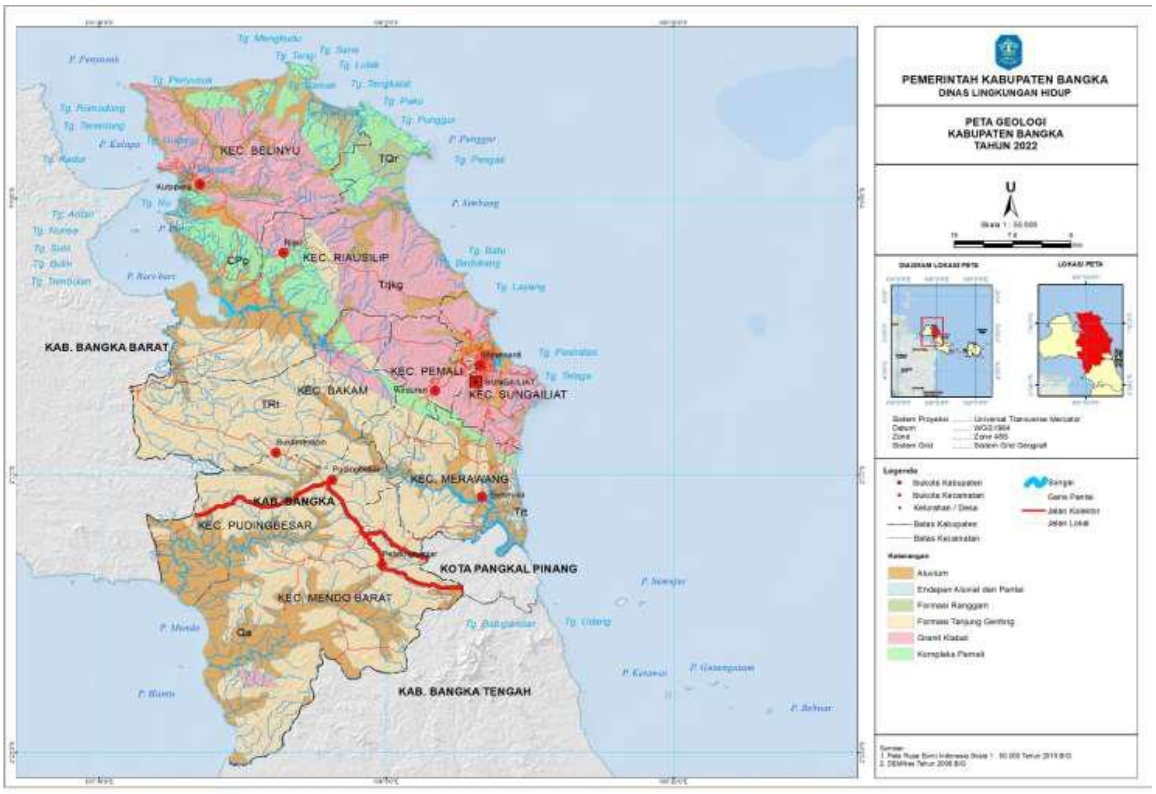

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2024

Proses dan kondisi geologi Pulau Bangka sangat mempengaruhi terbentuknya potensi sumber daya bahan galian yang ada di Kabupaten Bangka. Proses geologi tersebut diantaranya berupa intrusi magma, tektonik, perlipatan, pelapukan, pengayaan (*leaching*), erosi, dan pengendapan. Sedangkan berdasarkan kondisi geologisnya yang ditunjukkan pada Gambar 2.4. Pulau Bangka dan wilayah sekitarnya berada pada Paparan Sunda atau bagian tepi dari kerak benua (*craton*) Asia. Oleh karena itu, batuan dasar penyusun Kabupaten Bangka ini selain batuan malihan adalah batuan inti benua berupa batuan beku asam atau granitik. Batuan beku asam ini yang merupakan batuan pembentuk mineral timah yang ada di Pulau Bangka.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya kondisi hidrologi di Kabupaten Bangka lebih didominasi oleh air permukaan sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka berhulu di daerah perbukitan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut, dimana terdapat sekitar 39 aliran sungai yang mengalir di wilayah tersebut dengan panjang sungai keseluruhan ± 347,45 km. Sungai-sungai besar yang terdapat di daerah Kabupaten Bangka antara lain adalah Sungai Baturusa, Sungai Layang, Sungai Jeruk. Sungai terpanjang di Kabupaten Bangka adalah Sungai Batu Rusa dengan panjang mencapai 31.250 m yang terletak di Kecamatan Merawang. Nama dan panjang sungai-sungai di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2
Sungai di Kabupaten Bangka Menurut Kecamatan

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lokasi Kecamatan
1	Sungai Panji	10	Kecamatan Belinyu
2	Sungai Pasir	5	
3	Sungai Pejem	4,5	
4	Sungai Tengkalak	2	
5	Sungai Kerang	8	
6	Sungai Bayat	9	
7	Sungai Jelutung	12	
8	Sungai Belinyu	6	
9	Sungai Berok	6	
10	Sungai Romodong	3	
11	Sungai Bubus	4	
12	Sungai Sembuang	5	
13	Sungai Sekak	5	
14	Sungai Gruduk – S. Kusam	2,5	
Panjang total		**82**	

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lokasi Kecamatan
1	Sungai Tengkalak	50	Kecamatan Riau Silip
2	Sungai Bedukang	9	
3	Sungai Deniang Laut	1,3	
4	Sungai Mapur	21,25	
5	Sungai Semubur	3	
6	Sungai Perimping	2,75	
Panjang total		**87,3**	
1	Sungai Telang	5	Kecamatan Bakam
2	Sungai Mabat	15	
3	Sungai Layang	32,5	
Panjang total		**52,5**	
1	Sungai Baturusa	31,25	Kecamatan Merawang
Panjang total		**31,25**	Kecamatan Puding Besar
1	Sungai Perai	10	
2	Sungai Kotawaringin	20	
3	Sungai Kayubesi	0,5	
4	Sungai Jeruk	15	
5	Sungai Lubang	6	
Panjang total		**51,5**	
1	Sungai Menduk	26,5	Kecamatan MendoBarat
2	Sungai Rukam	20	
3	Sungai Sembilang	2	
4	Sungai Penagan	2,5	
5	Sungai Penjirang	5	

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lokasi Kecamatan
6	Sungai Kelapabingil	3	
Panjang total		**59**	
1	Sungai Jelitik	3	Kecamatan Sungailiat
Panjang total		**3**	
Panjang keseluruhan sungai		**366,55**	

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan Tabel di atas, sungai dan kolong yang ada di Kabupaten Bangka menurut jumlah sungai sebagian besar berada di Kecamatan Belinyu. Sementara itu menurut fungsinya, sungai dan kolong sebagian besar didominasi oleh fungsi irigasi dan transportasi bagi nelayan.

Wilayah Kabupaten Bangka dilingkup oleh 26 Daerah Aliran Sungai (DAS). Luas seluruh DAS ± 301822.3 Ha. DAS terluas adalah DAS Baturusa, dikuti DAS Layang dan DAS Kotawarngin. Nama-nama DAS dan gambaran umum luas DAS di Kabupaten Bangka disajikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.3
Nama dan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bangka

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase
1	Mapur	13.940	4.62%
2	Tuing	8.147	2.70%
3	Duku	12.460	4.13%
4	Sekah	5.482	1.82%
5	Bubus	9.044	3.00%
6	Parak	1.853	0.61%
7	Padang lalang	2.049	0.68%
8	Damar	8.132	2.69%
9	Kajut	314.3	0.10%
10	Riding	3.811	1.26%
11	Nijuk 1	400	0.13%
12	Nijuk 2	1.315	0.44%

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase
13	Layang	43.380	14.37%
14	Babar	23.640	7.83%
15	Mancang	2.872	0.95%
16	Kotawaringin	42.360	14.03%
17	Menduk	36.050	11.94%
18	Petal	3.078	1.02%
19	Selan	4.811	1.59%
20	Baturusa	51.290	16.99%
21	Rebo	1.837	0.61%
22	Betung	14.411	4.72%
23	Lawang Laut	500	0.17%
24	Matras	529	0.18%
25	Deniang	7.375	2.41%
26	Padukang	3.013	1.00%
Jumlah		**302.093,67**	**100%**

Sumber: Peta Digital Daerah Aliran Sungai BPDASHL Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Gambar 2.5
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bangka Tahun 2022

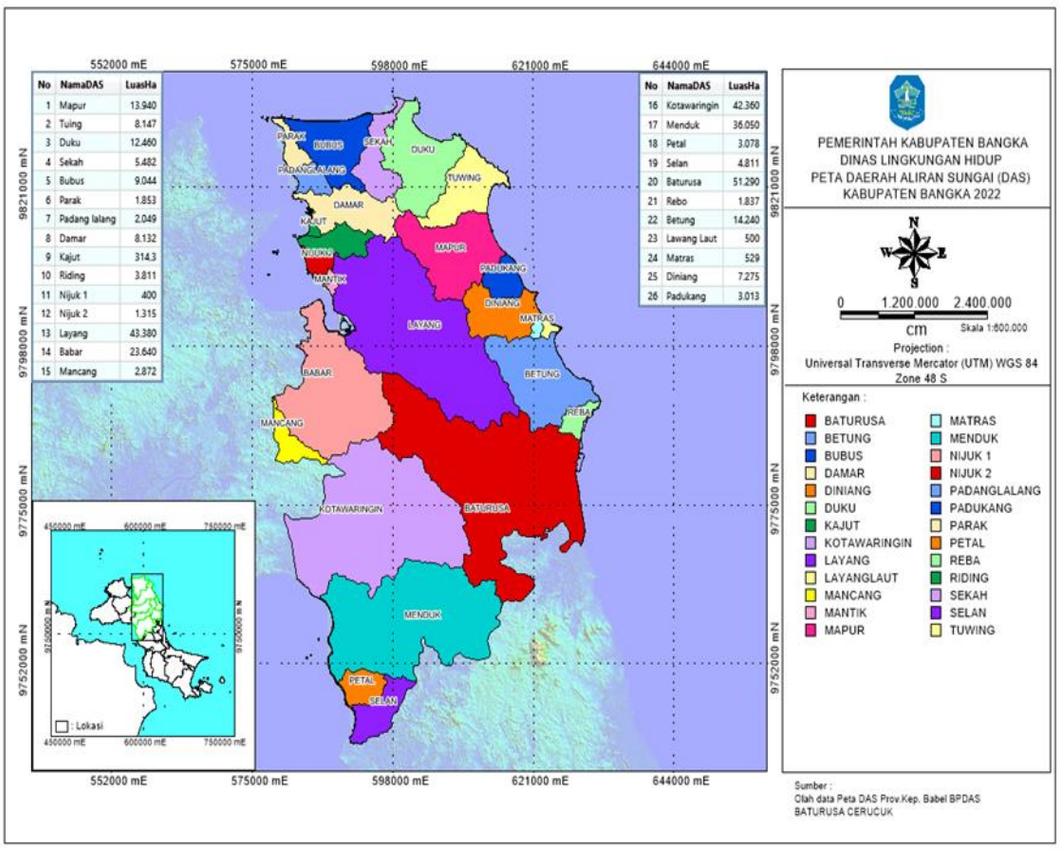

Sumber: BPDASHL Baturusa-Cerucuk, 2022

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Bangka beriklim tropis tipe A yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Berdasarkan pengamatan unsur iklim oleh Stasiun Meteorologi Depati Amir pada tahun 2023, suhu rata – rata di Kabupaten Bangka berkisar antara 26,00^{o}C – 28,50^{o}C. Suhu terendah adalah 22,00^{o}C pada bulan Januari sedangkan suhu tertinggi adalah 35,40^{o}C pada bulan November. Kelembaban udara di Kabupaten Bangka berkisar antara 74,50% - 90,60%, dengan kelembaban udara terendah 40% pada bulan Oktober dan kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Januari – Juli dan November – Desember.

Sementara itu, kecepatan angin rata-rata di Kabupaten Bangka berkisar antara 3,20 knot hingga 7,90 knot, dengan kecepatan angina maksimum 20 knot. Tekanan udara rata-rata di Kabupaten Bangka berkisar antara 1.005,50 – 1.007,00 mbar, dengan tekanan udara minimum sebesar 999,70 mbar dan tekanan udara maksimum sebesar 1011,20

mbar. Curah hujan di Kabupaten Bangka pada tahun 2023 berkisar antara 10,30 mm/bulan hingga 314,10 mm/bulan.

Secara umum, tidak ada perbedaan distribusi curah hujan di wilayah Kabupaten Bangka dengan wilayah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Distribusi curah hujan di Kabupaten Bangka tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Depati Amir Kabupaten Bangka Tahun 2024

Bulan *Month*	Kecepatan Angin (knot) *Wind Velocity (knot)*			Tekanan Udara/*Atmospheric Pressure* (mbar)		
	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari/*January*	0,00	3,90	15,00	999,70	1.005,50	1.009,90
Februari/*February*	0,00	4,50	13,00	1.001,30	1.005,60	1.010,00
Maret/*March*	0,00	3,90	14,00	1.001,40	1.006,30	1.011,10
April/*April*	0,00	3,60	16,00	1.000,70	1.005,00	1.010,40
Mei/*May*	0,00	4,20	15,00	1.000,60	1.005,90	1.010,50
Juni/*June*	0,00	5,00	15,00	1.002,60	1.005,70	1.009,80
Juli/*July*	0,00	5,70	18,00	1.002,20	1.006,50	1.010,00
Agustus/*August*	1,00	7,50	20,00	1.003,30	1.007,00	1.011,20
September/*September*	1,00	7,90	20,00	1.002,60	1.006,30	1.010,20
Oktober/*October*	0,00	5,90	15,00	1.003,10	1.006,90	1.010,10
November/*November*	0,00	3,60	14,00	1.001,10	1.005,70	1.009,20
Desember/*December*	0,00	3,20	12,00	1.002,20	1.006,00	1.009,80

https://bangkakab.bps.go.id

Bulan *Month*	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan) *Number of Precipitation (mm/month)*	Jumlah Hari Hujan (hari) *Number of Rainy Days (day)*	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (jam) *Daily Average of Sunshine (hour)*
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/*January*	233,10	29	3,0
Februari/*February*	164,90	20	3,8
Maret/*March*	260,80	22	4,1
April/*April*	147,10	21	5,6
Mei/*May*	314,10	23	5,1
Juni/*June*	128,30	19	5,4
Juli/*July*	146,20	19	6,4
Agustus/*August*	25,00	7	8,6
September/*September*	10,30	5	8,5
Oktober/*October*	16,80	5	7,4
November/*November*	202,80	18	5,4
Desember/*December*	219,00	25	3,2

Sumber : Kabupaten Bangka Dalam Angka, BPS, 2024

2.1.2 Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bangka memiliki beberapa variasi yang dipengaruhi oleh kondisi topografi. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Bangka dapat dikelompokkan menjadi Lahan non pertanian dan Lahan pertanian. Lahan non pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha atau kegiatan selain usaha untuk pertanian. Misalnya untuk pemukiman, perindustrian, jasa dan lain-lain sedangkan Lahan Pertanian adalah sebuah lahan yang mencakup kondisi tanah, iklim, hidrologi dan udara yang digunakan untuk memproduksi tanaman pertanian atau melakukan pertenakan hewan.

Lahan pertanian adalah salah satu dari sumber daya utama pada bidang pertanian. Dinamika perubahan luasan penutup lahan di Kabupaten Bangka dalam rentang tahun 2019 hingga 2022 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Perubahan Tutupan lahan di Kabupaten Bangka dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022

Kelas Tutupan Lahan	Luas (Ha)			
	2019	2020	2021	2022
Hutan Lahan Kering Sekunder	4.498,14	4.818,89	5.531,40	5.511,00
Hutan Mangrove Primer	2.899,29	2.913,05	4.287,72	4.037,12
Hutan Rawa Primer	277,42	277,42	277,27	277,39
Semak Belukar	23.191,35	22.778,97	19.626,98	19.611,12
Perkebunan/Kebun	35.200,84	37.506,76	48.267,3	49.358,00
Pemukiman	5.601,64	6.677,2	8.324,46	8.383,410
Tanah/Lahan Terbuka	973,02	959,44	819,84	779,889
Padang Rumput/Savana	710,99	710,99	478,8	478,78
Badan/Tubuh Air	1.629,76	1.629,76	1.476,4	1.448,05
Hutan Mangrove Sekunder	6.779,21	6.779,21	5.906,96	5.856,12
Hutan Rawa Sekunder	7.707,79	7.707,79	9.120,47	9.097,98
Semak Belukar Rawa	7.035,91	7.035,91	7.674,47	7.655,89
Pertanian Lahan Kering	20.957,08	20.957,08	20.342,24	20.918,99
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	151.302,23	150.006,41	140.703,83	140.753,70
Sawah	10,65	10,65	1.123,54	1.123,54
Tambak	206,98	206,98	515,85	516,27
Pertambangan	28.668,84	26.674,66	25.521,65	25.665,31
Rawa	1.247,61	1.247,61	1.397,68	1.397,69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, 2024

Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Bangka didominasi oleh pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Berdasarkan data tutupan lahan Kabupaten Bangka pada tahun 2022, kawasan pertanian berkontribusi sebesar 20.918,99 Ha untuk pertanian lahan kering dan 140.753,7 Ha untuk pertanian lahan kering campur semak. Kawasan perkebunan berkontribusi sebesar 49.358 Ha, dan kawasan pertambangan berkontribusi sebesar 25.665,31 Ha. Berikut peta tutupan lahan Kabupaten Bangka.

Gambar 2.6
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bangka

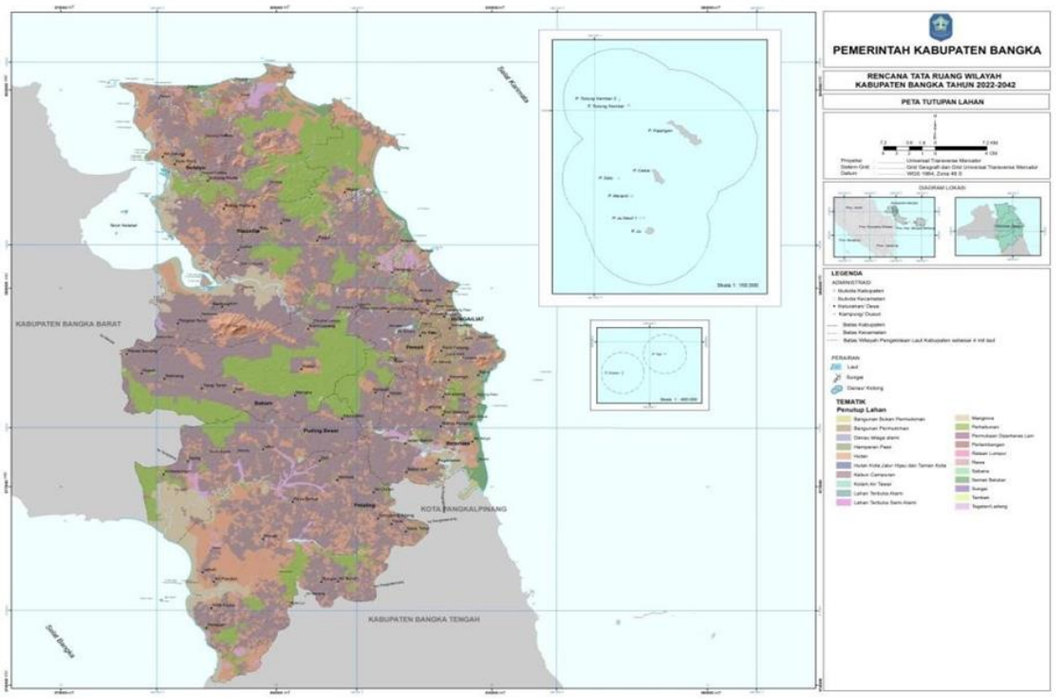

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2024

Penggunaan lahan dengan jenis pertanian lahan kering hampir di seluruh wilayah dengan kondisi topografi datar dengan jenis pertanian budidaya tanaman hortikultura. Penggunaan lahan di Kabupaten Bangka pada tahun 2023 dapat dilihat pada dibawah ini.

Gambar 2.7
Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Bangka

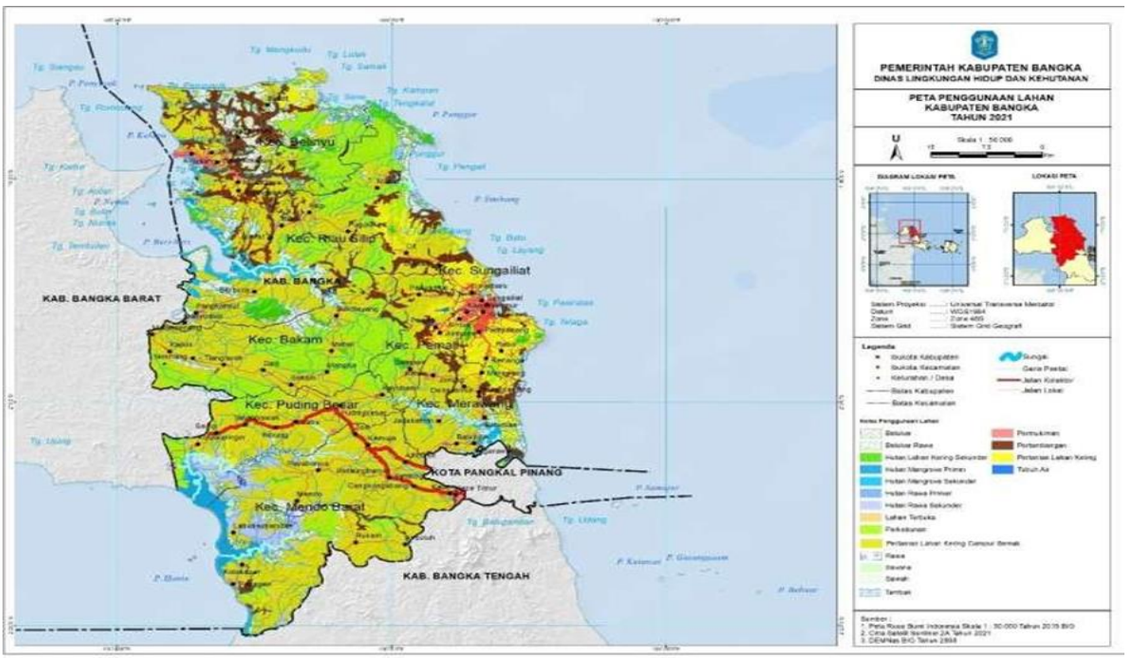

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2024

Secara perencanaan tata ruang, penggunaan lahan di Kabupaten Bangka terbagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Penggunaan lahan di Kabupaten Bangka terbagi menjadi 2 (dua) kawasan yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

2.1.2.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 36.398,15 hektar atau sekitar 12,05 % dari luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Eksisting
Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
1	Kawasan Badan Air	829,99	0,27
2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya (Kawasan Lindung)	16.633,76	5,51
3	Kawasan Perlindungan Setempat	1.491,04	0,49
4	Kawasan Konservasi	15.964,38	5,28
	Kawasan Pelestarian Alam (KPA) berupa Taman Nasional	15.963,63	5,28
	Taman Wisata Alam	0,75	0,00
5	Kawasan Cagar Budaya	94,54	0,03
6	Kawasan Ekosistem Mangrove	1.384,41	0,46
	JUMLAH	**36.398,15**	**12,05**

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2024

2.1.2.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Buatan. Penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih

265.695,53 Ha atau 87,95 % dari luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Penggunaan Lahan Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Eksisting
Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
1	Kawasan Hutan Produksi	60.293,97	19,96
	Hutan Produksi Tetap (HPT)	60.269,76	19,95
	Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi	24,21	0,01
2	Kawasan Perkebunan Rakyat	65,45	0,02
3	Kawasan Pertanian	159.367,48	52,75
	Kawasan Tanaman Pangan	3.395,95	1,12
	Kawasan Hortikultura	66,08	0,02
	Kawasan Perkebunan	155.783,42	51,57
	Kawasan Peternakan	122,03	0,04
4	Kawasan Perikanan	2.613,61	0,87
5	Kawasan Pertambangan dan Energi	2.197,37	0,73
	Kawasan Pertambangan Mineral	2.136,4	0,71
	- Kawasan Pertambangan Mineral Logam	2.051,27	0,68
	- Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	85,13	0,03
	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	60,97	0,02
6	Kawasan Peruntukan Industri	1.539,28	0,51
7	Kawasan Pariwisata	1.174,94	0,39
8	Kawasan Pemukiman	38.370,44	12,70
	Kawasan Permukiman Perkotaan	21.579,06	7,14
	Kawasan Pemukiman Pedesaan	16.791,38	5,56
9	Kawasan Transportasi	57,07	0,02
10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	15,92	0,01

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
	JUMLAH	**265.695,53**	**87,95**

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2024

Kawasan budidaya ini mencakup kawasan pertanian, kawasan permukiman, pertambangan dan industri. Pola ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada bagian wilayah Barat-Timur, mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi, baik untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian maupun perkotaan.

Secara keseluruhan, rencana pola ruang Kabupaten Bangka baik lahan kawasan budidaya maupun lahan kawasan lindung disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.8
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka

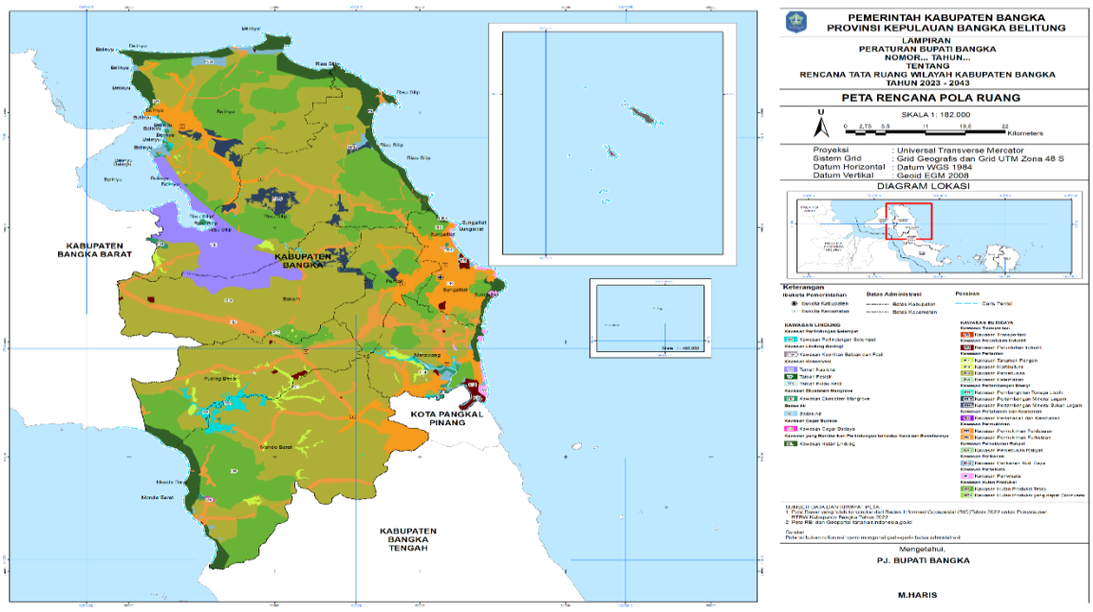

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2024

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Bangka memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

2.1.3.1. Potensi Perkebunan

Sektor perkebunan memiliki potensi terbesar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Pengembangan potensi sektor perkebunan ini mencakup perkebunan besar, sedang, kecil, dan perkebunan rakyat. Pengembangan potensi perkebunan besar/sedang/kecil untuk komoditas perkebunan

seperti: sawit dan singkong. Pengembangan potensi perkebunan rakyat untuk komoditas berupa: lada, karet, dan singkong. Secara keseluruhan, potensi perkebunan ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka, memiliki luas kurang lebih 155.848,87 ha atau 51,59% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Untuk usaha perkebunan memiliki potensi luas kurang lebih 155.783,42 ha atau 51,57% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Untuk perkebunan rakyat memiliki potensi luas kurang lebih 65,45 ha atau 0,02% dari luas wilayah Kabupaten Bangka.

Untuk kegiatan perkebunan, luas areal tanaman perkebunan yang terluas adalah luas tanam kelapa sawit 24.112,58 Ha dengan produksi sebesar 66.274,54 ton. Disusul oleh luas tanam karet 17.608,61 Ha dengan produksi sebesar 26.548,63 ton. Kemudian juga terdapat kelapa dengan luas tanam 3.968,12 Ha dan produksinya sebesar 5.535,24 ton.

2.1.3.2. Potensi Pertanian

Sektor pertanian memiliki potensi cukup besar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Sektor pertanian juga berperan strategis dalam mewujudkan kebijakan ketahanan pangan serta peningkatan daya saing komoditi produk pertanian tahun 2023. Peningkatan daya saing komoditas dan produk olahan pertanian dilakukan dengan upaya pengembangan industri primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna peningkatan *Nilai Tambah Komoditi Produk Pertanian* serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi pertanian dari hulu ke hilir.

Secara keseluruhan, potensi pertanian memiliki luas kurang lebih 3.462,03 ha atau 1,14% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Potensi pertanian ini terdiri dari: (i) potensi pertanian hortikultura yaitu dengan luas kurang lebih 66,08 ha atau 0,02 % dari luas wilayah Kabupaten Bangka, dan (ii) potensi pertanian tanaman pangan yaitu dengan luas kurang lebih 3.395,95 ha atau 1,12% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Pada Tahun 2024 produksi tanaman sayuran mengalami peningkatan untuk beberapa komoditas. Yang mengalami peningkatan produksinya adalah mentimun dengan luas panen 191,71 Ha dan produksinya 19.404,52 kuintal, melon dengan luas panen 12,20 Ha dan produksinya 2.163,70 kuintal, buncis dengan luas panen 45,90 Ha dan produksinya 2.244,67 kuintal, bawang merah dengan luas tanam 1,60 Ha dan produksinya 31,00 kuintal, jamur tiram dengan luas panen 145,00 ha dan produksinya 13,49 kuintal, serta cabe keriting dengan luas panen 216,97 Ha dan produksinya 17.782,70 kuintal. Untuk tanaman biofarmaka tahun 2024 banyak mengalami kenaikan luas panen. Jahe menjadi 232.045 m^2, laos 143.119 m^2, kencur 79.282 m^2 dan kunyit 157.149 m^2.

2.1.3.3. Potensi Perikanan

Pengamanan ketahanan pangan juga dilakukan melalui kegiatan untuk peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, perikanan budidaya air laut, konservasi dan rahabilitasi laut, pesisir serta pulau-pulau kecil, optimalisasi kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI), jaminan kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan daya saing komoditi produk perikanan. Potensi perikanan ini memiliki luas kurang lebih 2.613,61 ha atau 0,87% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka.

Perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang memiliki sumber daya laut yang relatif besar untuk dikembangkan. Komoditi yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi seperti ikan Kerapu, Kakap Merah, Udang, Cumicumi, Sirip Ikan dan lain-lain. Volume dan nilai tangkapan ikan tahun 2024 yaitu 28,347.576 ton dan jumlah produksi 924.109.196.426,25 (ribu) rupiah nilai rupiah tangkap. Dan untuk tangkapan ikan tertinggi adalah ikan laut sejumlah 28,347.576 ton dengan produksi 924.109.196.426,25 ribu rupiah.

Jumlah produksi dan nilai budidaya ikan sebesar 2.142,57 kg dan nilainya 110.306.608.000 (ribu) rupiah nilai budidaya ikan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor perikanan dengan jumlah rumah tangga yang melakukan perikanan tangkap 2.920 dan rumah tangga budidaya 375.

Jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Bangka 6.781 dan yang terbanyak berdomisili di Sungailiat sebanyak 3.974 orang, disusul Belinyu 1.171. Jumlah kapal 2.573, dengan perahu dengan motor tempel 1.559, dan kapal motor 1.014.

2.1.3.4. Potensi Peternakan

Kabupaten Bangka memiliki potensi peternakan yang cukup besar karena kawasan peternakan ini menyebar hampir di seluruh kecamatan. Kawasan ini dapat terintegrasi dengan kawasan peruntukan lainnya selama tidak mengganggu peruntukan utamanya.

Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong tumbuhnya kawasan peternakan di tiap desa khususnya dengan mengintegrasikan peternakan sapi di dalam kawasan perkebunan sawit sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, dan menciptakan harmonisasi pemanfaatan ruang.

Potensi peternakan ini memiliki luas kurang lebih 122,03 ha atau 0,04% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Di Kabupaten Bangka umumnya usaha di sub sektor perternakan yang dilakukan masyarakat saat ini hanya merupakan Peternakan Rakyat. Walaupun demikian, pada tahun 2024 jumlah populasi ternak dan unggas sebagian besar mengalami peningkatan yaitu sapi sebanyak 3.213, kerbau sebanyak 83, kambing sebanyak 882, babi sebanyak 3.545, ayam kampung sebanyak 90.355, ayam petelur 67.477, dan itik 47.693 ekor. Sebaliknya, sebagian peternakan juga mengalami penurunan untuk ternak ayam pedaging, yaitu 2.419.301 ekor karena penyakit yang menyerang ternak tersebut.

2.1.3.5. Potensi Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang masih berperan besar dalam perekonomian Kabupaten Bangka. Peruntukan kawasan pertambangan yang memiliki potensi untuk diusahakan melalui penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Berdasarkan pola ruang pertambangan di Kabupaten Bangka, secara keseluruhan potensi pertambangan di Kabupaten Bangka memiliki luas lebih kurang 2.136,40 ha atau 0,71% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Potensi pertambangan ini terdiri dari: (1) potensi pertambangan mineral logam dengan luas 2.051,27 ha atau 0,68% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka, dan (2) potensi pertambangan mineral bukan logam seluas lebih kurang 85,13 ha atau 0,03% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka.

Bahan galian yang paling banyak dieksploitir dan telah banyak diusahakan secara besar-besaran di Kabupaten Bangka adalah timah. Sedangkan bahan galian lainnya belum diusahakan sebesar-besaran dan masih dilakukan pengelolaannya oleh penduduk setempat atau oleh swasta dengan jumlah terbatas. Potensi bahan galian lainnya di Kabupaten Bangka tersebar di beberapa Kecamatan. Potensi bahan galian lainnya tersebut berupa produk non logam. Untuk sebaran produk non logam yang ada di Kabupaten Bangka adalah pasir kuarsa di Kecamatan Sungailiat, kaolin di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip, granit di Kecamatan Merawang dan zirkon di kecamatan Belinyu dan Kecamatan Merawang.

Produksi bijih timah pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 produksi bijih timah mencapai 4.422 ton, menurun di tahun 2023. Pada tahun 2024. produksi bijih timah terbesar berada di Kecamatan Sungailiat sebesar 2.482 ton.

2.1.3.6. Potensi Industri

Salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah menjadikan Kabupaten Bangka sebagai daerah industri dan perdagangan. Pemerintah daerah melalui Perda Nomor 3 Tahun 2005 menetapkan Kawasan Jelitik Sungailiat sebagai Kawasan Industri Jelitik seluas 263.26 Ha. Secara keseluruhan, potensi industri lebih kurang 1.539,28 ha atau 0,51% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka.

Perkembangan jumlah industri besar, menengah dan kecil di Kabupaten Bangka tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8
Jumlah Industri Besar, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA (UNIT)	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp)
1	Sungailiat	4	279	401.987.550.000
2	Merawang	4	194	167.907.551.000
3	Pemali	-	-	-
4	Puding Besar	2	100	229.340.000.000
5	Mendo Barat	1	143	377.216.070.000
6	Bakam	5	208	1.952.139.374.000
7	Riau Silip	2	6	62.855.519.000
8	Belinyu	1	526	151.000.000.000
	JUMLAH	**19**	**1.456**	**3.342.446.064.000**

Sumber: Dinakerindag Kabupaten Bangka, 2025

Tabel 2.9
Jumlah Industri Menengah, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA (UNIT)	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp)
1	Sungailiat	1	119	8.200.000
2	Merawang	9	458	71.350.353
3	Pemali	2	166	18.031.305
4	Puding Besar	3	21	18.275.000

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA (UNIT)	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp)
5	Mendo Barat	21	803	90.354.389
6	Bakam	0	0	0
7	Riau Silip	4	207	12.675.000
8	Belinyu	3	280	21.732.000
	JUMLAH	**43**	**2.504**	**240.618.047**

Sumber: Dinakerindag Kabupaten Bangka, 2025

Tabel 2.10
Jumlah Industri Kecil, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA (UNIT)	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp)
1	Sungailiat	1.434	4.208	38.541.448
2	Merawang	487	1.405	17.557.242
3	Pemali	518	1.133	11.528.100
4	Puding Besar	223	383	2.385.900
5	Mendo Barat	554	902	8.391.200
6	Bakam	240	371	2.712.800
7	Riau Silip	313	582	3.734.680
8	Belinyu	649	1.449	10.778.385
	JUMLAH	**4.418**	**10.433**	**95.629.755**

Sumber: Dinakerindag Kabupaten Bangka, 2025

Pada tahun 2024 jumlah industri di Kabupaten Bangka sebanyak 4.967 industri, yang terdiri dari industri besar sebanyak 32 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 2.832 orang, industri sedang sebanyak 23 perusahaan dengan tenaga kerja 2870 orang sedangkan industri kecil formal ada sebanyak 4.912 unit usaha dengan 12.140 orang tenaga kerja. Yang jika dibandingkan tahun sebelumnya meningkat untuk setiap jenis industri.

2.1.3.7. Potensi Pariwisata

Kawasan pariwisata di Kabupaten Bangka terdiri dari kawasan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan lain-lain. Luas peruntukan kawasan pariwisata lebih kurang 1.174,94 ha atau 0,39% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangka tersaji pada tabel berikut.:

Tabel 2.11

Destinasi Wisata di Kabupaten Bangka

NO	KECAMATAN	DESTINASI WISATA	AMENITAS
1	Sungailiat	1. Pantai Matras 2. Pantai Parai Tenggiri 3. Pantai Tanjung Pesona 4. Pantai Tongachi 5. Pantai Tikus Emas 6. Pantai Rebo 7. Pantai Rambak 8. Pantai Mang Kalok 9. Pantai Takari 10. Novila Kuala 11. Puri Tri Agung 12. Bukit Mahayana 13. Pantai Teluk Uber	- Hotel Tanjung Pesona, Hotel Parai, Novilla Hotel, Puri Ansel, Batu Bedaun Resort, Hotel Sunjaya, Hotel ST 12, Boss Hotel, Hotel Tri Mustika - Penginapan - Restoran - Rumah makan - Cafe - Pusat oleh-oleh - Tempat Ibadah
2	Pemali	1. Pemandian Air Panas Tirta Tapta 2. Air Simpur 3. Bukit Tujuh Sempan 4. *Ecopark* Pemali	- Rumah makan - Cafe - Tempat Ibadah
3	Merawang	1. Pantai Air Anyir 2. Pantai Temberan 3. Hutan Nyato Kimak	- Hotel Jatimas - Rumah makan - Tempat Ibadah
4	Belinyu	1. Pantai Penyusuk 2. Pantai Remodong 3. Pantai Levar 4. Wisata Aik Bedelew 5. Mangrove Perpat Permai 6. Mangrove Sungai Buntu 7. Situs Benteng Kutopanji 8. Kelenteng Bongkap 9. Goa Maria Belinyu 10. Kuil Pha Kak Liang	- Hotel Dragon, Sam Pesaren Hotel, Mink-Mink Inn - Penginapan - Rumah Makan - Cafe - Pusat oleh-oleh - Tempat Ibadah
5	Riau Silip	1. Gunung Maras 2. Pantai Tuing	- Cafe - Tempat Ibadah
6	Bakam	Hutan Raya Rimbe Mambang	- Rumah makan - Tempat Ibadah
7	Mendo Barat	Situs Benteng Kota Kapur	- Rumah makan - Tempat Ibadah

Sumber : Dinparbud Kabupaten Bangka, 2025

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Morfologi Pulau Bangka yang cenderung datar menjadikan wilayah Kabupaten Bangka bukanlah daerah yang rawan terkena bencana. Kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bangka adalah adanya banjir genangan air di beberapa kecamatan

yang tersebar di Kabupaten Bangka akibat naiknya permukaan air laut saat pasang dan tingginya curah hujan pada musim penghujan. Namun, genangan yang terjadi tidak mengganggu perekonomian dan aktivitas sehari-hari masyarakat Kabupaten Bangka. Selain banjir, kejadian bencana lainnya secara sporadis yang sering terjadi di Kabupaten Bangka adalah kebakaran hutan pada musim kemarau dan adanya angin puting beliung yang dapat menyebabkan kerusakan pada rumah penduduk di wilayah yang dilalui angin tersebut.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Bangka terus bertambah dari tahun sebelumnya namun dampak yang ditimbulkan berkurang dari tahun sebelumnya dan perkiraan kerugian berkurang dari tahun sebelumnya, ini dikarenakan penanganan terhadap kejadian bencana dikabupaten sudah mulai berjalan dengan lebih baik dari tahun sebelumnya, Tabel di bawah ini menunjukkan data bencana di Kabupaten Bangka Tahun 2020 - 2024.

Tabel 2.12
Jumlah Kejadian Bencana Alam, Korban dan Kerugian Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana	Meninggal	Luka - luka	Terdampak	Perkiraan (Rp)
2024	26	-	-	250	36.223.900
2023	78	14	1	1.444	192.239.100
2022	38	-	-	2.015	394.012.565
2021	97	3	-	646	543.000.000
2020	1	-	-	44	-

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2024

2.1.5. Aspek Demografi

Menurut Profesor Sri Murtiningsih Adioetomo (2006), jika angka beban ketergantungan semakin kecil akan menyebabkan munculnya peluang keuntungan demografi yang dikenal dengan bonus demografi. Dengan merujuk hal di atas, Kabupaten Bangka telah masuk pada periode bonus demografi, sementara secara nasional puncak bonus demografi diperkirakan akan dicapai oleh Indonesia pada tahun 2025-2030. Bonus demografi secara harfiah berarti komposisi struktur usia penduduk idealnya mampu memberikan keuntungan secara ekonomi akibat besarnya penduduk yang masuk sebagai angkatan kerja. Keadaan ini sering disebut sebagai “the windows of opportunity” karena secara teori hanya akan terjadi satu kali. Untuk bisa berhasil meraih peluang emas ini,

tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampungnya

Aspek demografi memberikan deskripsi tentang jumlah, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

Konsep penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan dengan tujuan untuk menetap.

Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, akan tetapi juga dapat menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini akan terjadi apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhanseperti sandang, pangan, serta kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Komposisi penduduk timpang akan menyebabkan beban kerja pemerintah semakin berat, sementara masalah kepadatan penduduk dapat mengakibatkan masalah lingkungan karena daya dukung lingkungan yang tidak memadai. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan agar dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan.

2.1.5.1 Jumlah Penduduk

Kependudukan merupakan hal penting dalam suatu pembangunan karena penduduk merupakan suatu sasaran pembangunan. Karena dalam hal ini peran penduduk sangat penting, sehingga kualitas penduduk perlu ditingkatkan memalui sumber daya yang ada dengan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas, karena kependudukan khususnya akibat tingkat fertilitas (kelahiran) yang tinggi. Dimana pertambahan penduduk yang besar akan memberikan dampak berbagai aspek kehidupan

Kondisi demografi Kabupaten Bangka secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk dan sebaran penduduk sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Indikator Kependudukan Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	320.552	323.107	327.395	332.964	337.755
	a. Laki-laki		164.802	165.869	167.890	170.809	173.294
	b. Perempuan		155.750	157.238	159.505	162.155	164.461
2	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	105,84	106,68	108,09	110,22	111,96
3	Rasio Jenis Kelamin	persen	105,81	105,5	105,26	105,34	105.37
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	0,56	0,80	2,09	3,87	5,96

Sumber: Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2025, data diolah

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2024 sebanyak 337.755 jiwa dengan kepadatan 111,96 jiwa per km^2, meningkat dibanding tahun 2023 yaitu sebanyak 332.964 jiwa dengan kepadatan 110,22 jiwa per km^2, seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Km^2 Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2020– 2024

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk 2023 (jiwa)	Kepadatan per km^2 (jiwa)
1	SUNGAILIAT	147,05	96.369	655,35
2	BELINYU	503,54	51.467	102,21
3	MERAWANG	215,89	31.610	146,42
4	MENDO BARAT	685,64	52.568	76,67
5	PEMALI	140,46	35.946	255,92
6	BAKAM	426,26	19.432	45,59
7	RIAU SILIP	625,91	29.704	47,46
8	PUDING BESAR	272,10	20.659	75,92
Time series	**2024**	**3.016,85**	**337.755**	**111,96**
	2023	**3.020,94**	**332.964**	**110,22**
	2022	**3.028,79**	**327.394**	**108,09**
	2021	**3.028,79**	**323.107**	**106,68**
	2020	**3.028,79**	**320.552**	**105,84**

Sumber: Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2025

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2024 terjadi pertambahan penduduk sebanyak 4.791 jiwa. Pertambahan penduduk ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi. Faktor migrasi cukup besar karena berkembangnya daerah Kabupaten Bangka dari berbagai sektor ekonomi, sehingga menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar daerah untuk datang ke Kabupaten Bangka.

2.1.5.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Selama tahun 2020-2024, jumlah penduduk Kabupaten Bangka, baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan, seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			Sex Ratio
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
1	SUNGAILIAT	48.868	47.501	96.369	102,88
2	BELINYU	26.263	25.204	51.467	104,20
3	MERAWANG	16.216	15.394	31.610	105,34
4	MENDO BARAT	27.331	25.237	52.568	108,30
5	PEMALI	18.338	17.608	35.946	104,15
6	BAKAM	10.134	9.298	19.432	108,99
7	RIAU SILIP	15.378	14.326	29.704	107,34
8	PUDING BESAR	10.766	9.893	20.659	108,82
	2024	**173.294**	**164.461**	**337.755**	**105,37**
	2023	**170.809**	**162.155**	**332.964**	**105,34**
	2022	**167.890**	**159.504**	**327.394**	**105,26**
	2021	**165.869**	**157.238**	**323.107**	**105,5**
	2020	**164.802**	**155.750**	**320.552**	**105,81**

Sumber: Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2025, data diolah

Selama tahun 2020 – 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bangka, baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 173.294 jiwa atau sebesar 51,31 persen dari total penduduk di Kabupaten Bangka, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 164.461 jiwa atau sebesar

48,69 persen. Baik jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan pada tahun 2023 mengalami peningkatan hingga tahun 2024.

2.1.5.3 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Penduduk di Kabupaten Bangka didominasi oleh penduduk usia 5-9 tahun, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 (%)

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0 – 4	7,52	7,56	5,84	7,12	6.75
5 – 9	9,82	9,62	8,99	8,94	8,71
10 – 14	9,53	9,72	9,97	9,86	9.81
15 – 19	8,67	7,9	8,11	8,36	8.68
20 – 24	8,00	8,1	8,20	8,22	8.32
25 – 29	7,17	7,11	7,25	7,12	7.21
30 – 34	8,58	8,29	7,51	7,38	6.98
35 – 39	8,52	8,62	8,41	8,27	8.21
40 – 44	7,85	8,06	8,70	8,57	7.41
45 – 49	6,22	6,57	6,87	6,76	7.06
50 – 54	5,07	5,19	5,71	5,59	5.65
55 – 59	4,10	4,14	4,35	4,23	4.38
60 – 64	3,61	3,54	3,59	3,47	3.50
65 – 69	2,53	2,67	2,93	2,79	2.81
70 – 74	1,44	1,52	1,87	1,77	1.87
≥ 75	1,39	1,39	1,70	1,55	1.64
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2025 (Data Diolah)

Dalam bentuk piramida penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bangka tahun 2024, tersaji pada grafik berikut :

Grafik 2.1
Piramida Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2024 (%)

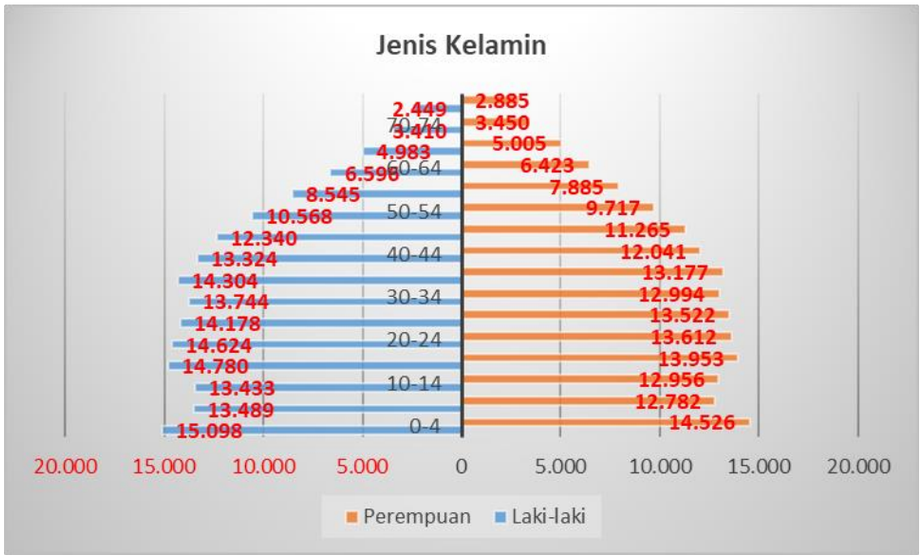

Sumber: Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2024 (Data Diolah)

2.1.5.4 Rasio Ketergantungan

Pada Tahun 2024, Kabupaten Bangka memperoleh bonus demografi yang dalam kata lain Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun) lebih banyak daripada jumlah penduduk usia non Produktif (0-14 tahun dan >=65 tahun) seperti yang tergambar di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif
di Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-14	43,963	13,02	41,393	12,26	85,356	25,27
2	15-64	119,216	35,30	111,831	33,11	231,047	68.41
3	>=65	10,115	2,99	11,237	3,33	21,352	6.32
Jumlah		**173.294**	**51,31**	**164.461**	**49,69**	**337.755**	**100**

Sumber : Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita peroleh rasio ketergantungan di Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang secara definisinya merupakan angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif).

Rumus ratio ketergantungan adalah :

$$DR = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} x\ 100\%$$

Dimana :

DR = Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

$P_{0\text{-}14}$ = Jumlah Penduduk Usia 0-14

$P_{15\text{-}64}$ = Jumlah Penduduk Usia 15-64

P_{65} = Jumlah Penduduk Usia 65 Tahun ke atas

Sehingga didapat sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} x\ 100\%$$

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{85.356 + 21.352}{231.047} x\ 100\%$$

$$\text{Rasio K} = 45{,}18\%$$

2.1.6 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun rancangan RKPD 2024 Kabupaten Bangka terlebih dahulu disusun capaian indikator setiap variabel. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari 3 (tiga) fokus yaitu (1) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; (2) kesejahteraan sosial; dan (3) seni budaya dan olah raga.

2.1.6.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

2.1.6.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.2
Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka
Tahun 2020-2024

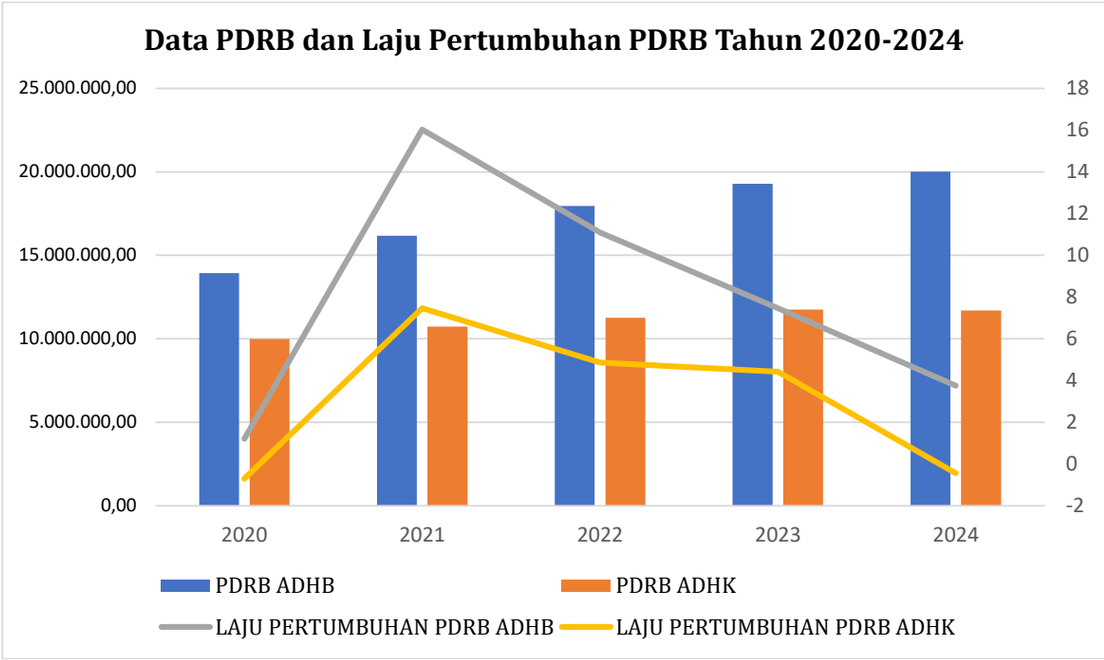

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025

Sementara perkembangan PDRB menurut sektor atau lapangan usaha selama periode tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.18 dan Tabel 2.19.

Tabel 2.18
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka
Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.996.707,12	3.306.361,39	3.575.033,12	3.933.555,17	4.242.269,48
B	Pertambangan dan Penggalian	1.315.809,57	1.712.664,35	1.695.971,44	1.617.376,86	1.634.639,63
C	Industri Pengolahan	3.016.697,94	3.908.197,05	4.671.879,03	4.875.610,80	4.849.836,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	36.564,24	41.853,91	40.846,29	41.379,68	43.818,32
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.401,09	3.756,01	3.945,54	4.357,65	4.822,34
F	Konstruksi	1.417.092,47	1.548.531,20	1.633.463,27	1.830.948,17	1.836.979,53

Sektor PDRB Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.815.628,74	1.989.713,33	2.362.409,42	2.533.802,50	2.617.497,10
H	Transportasi dan Pergudangan	320.099,94	358.623,90	412.533,86	483.437,37	519.131,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	402.896,00	461.494,15	531.926,19	601.376,70	641.434,14
J	Informasi dan Komunikasi	339.571,26	370.679,10	410.954,36	472.733,35	524.594,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	358.463,80	398.578,08	466.620,34	554.766,07	561.804,80
L	Real Estat	514.327,74	557.558,43	601.246,64	647.420,99	677.141,39
M,N	Jasa Perusahaan	34.124,37	38.044,49	44.433,16	52.018,34	55.633,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	760.659,88	813.855,76	805.423,91	857.033,71	921.317,07
P	Jasa Pendidikan	336.727,72	358.862,87	382.497,81	433.562,27	487.779,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150.485,60	176.628,58	184.425,26	204.646,48	211.022,35
R,S,T, U	Jasa Lainnya	113.680,22	120.604,95	135.217,13	154.821,21	173.764,46
Produk Domestik Regional Bruto		**13.932.937,70**	**16.166.007,55**	**17.958.826,77**	**19.298.847,32**	**19.298.847,32**

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025

Tabel 2.19
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.102.108,04	2.148.411,77	2.176.400,31	2.262.236,19	2.316.416,67
B	Pertambangan dan Penggalian	1.368.586,31	1.500.693,53	1.528.511,61	1.507.880,81	1.426.975,54
C	Industri Pengolahan	2.332.820,25	2.615.171,30	2.825.349,80	2.912.149,02	2.716.092,29
D	Pengadaan Listrik & Gas	20.524,05	23.613,31	22.654,68	22.807,47	24.230,46

Sektor PDRB Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.039,61	2.143,09	2.217,94	2.372,40	2.463,35
F	Konstruksi	851.120,70	891.923,43	893.738,40	969.438,14	964.137,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.124.048,22	1.201.952,41	1.328.715,95	1.366.039,38	1.379.274,22
H	Transportasi dan Pergudangan	198.235,02	219.153,27	238.572,75	259.214,12	272.595,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227.697,02	254.334,12	284.048,38	315.174,51	327.910,49
J	Informasi & Komunikasi	303.343,00	330.004,44	361.336,15	407.537,55	450.889,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	238.902,82	252.121,25	268.840,83	314.986,07	315.366,61
L	Real Estate	351.556,55	376.299,97	394.161,92	411.364,08	426.208,17
M,N	Jasa Perusahaan	18.344,26	19.426,91	21.493,02	23.518,62	25.181,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	489.114,99	512.267,99	507.685,42	534.191,13	575.737,25
P	Jasa Pendidikan	191.150,74	197.740,99	205.622,65	228.610,82	252.751,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.805,24	119.014,39	121.589,50	132.642,22	135.573,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	66.402,35	69.587,48	75.279,51	83.573,51	90.584,52
	Produk Domestik Regional Bruto	**9.988.799,17**	**10.733.859,65**	**11.256.218,82**	**11.753.736,04**	**11.702.387,51**

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025

2.1.6.1.2 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Perkembangan PDRB per kapita dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama periode tahun 2020-2024 dapat diihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.3
PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

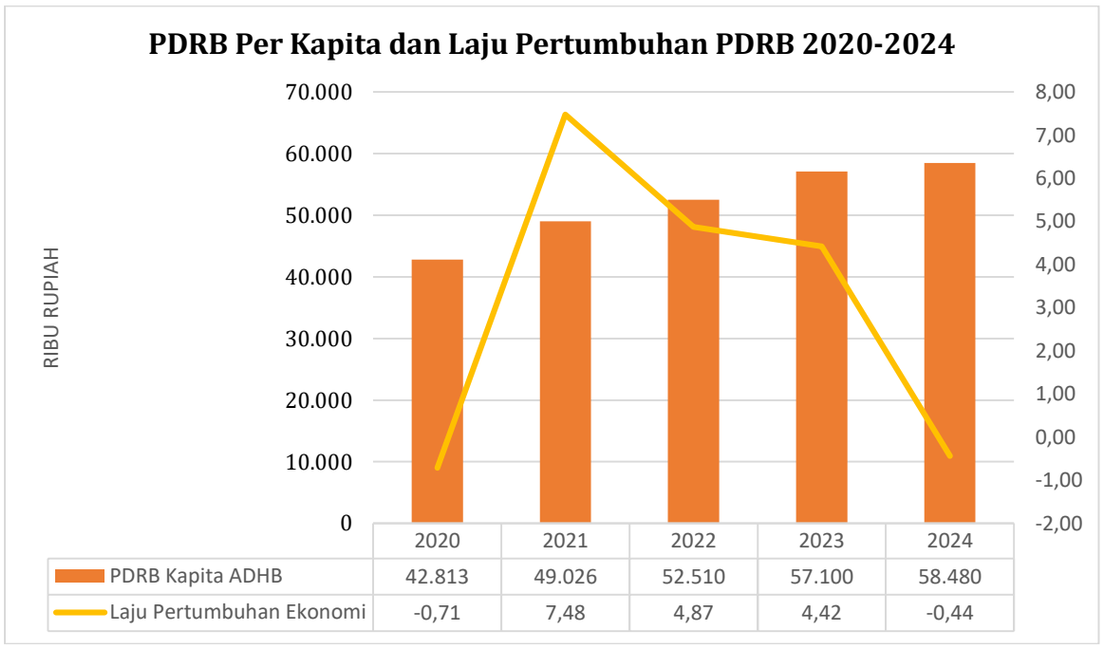

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025

2.1.6.1.3 Laju Inflasi

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi.

Laju inflasi sektoral Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada Grafik berikut ini.

Grafik 2.4
Laju Inflasi Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

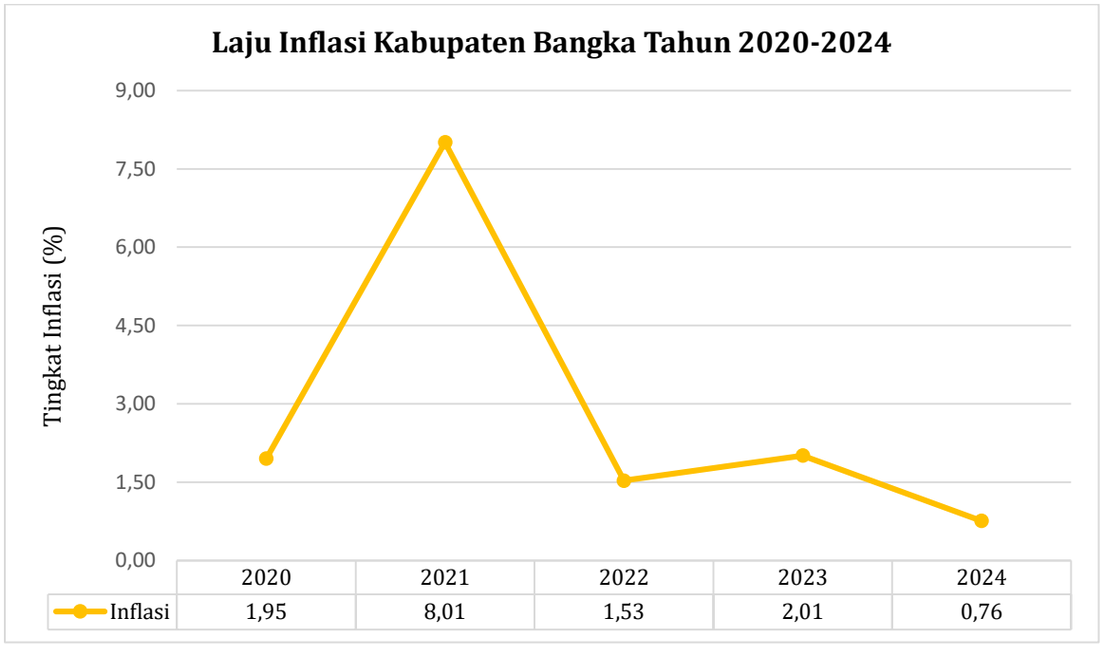

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025

Pada tahun 2020 sektor-sektor yang ada dalam penghitungan PDRB Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengalami inflasi sebesar 1,95 persen. Namun pada tahun 2020 angka inflasi terus meningkat menjadi 8,01 persen. Pada tahun 2022 angka inflasi mengalami penurunan kembali menjadi 1,53 persen, kemudian meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 2,01 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2024 hingga mencapai 0,76 persen.

2.1.6.1.4 Koefisien Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai satu berarti ketimpangan

sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

- GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- 0.4<GR < 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Dalam konteks Kabupaten Bangka, terlihat bahwa secara umum pada periode 2020-2024, Gini Ratio berkisar pada angka 0,254 hingga 0,211, ini berarti bahwa Kabupaten Bangka termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir golongan masyarakat tertentu, namun dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Ketimpangan pendapatan ini cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Gini Ratio berada pada angka 0,254. Angka ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga mencapai 0,211 pada tahun 2024, seperti disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.5
Gini Ratio Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

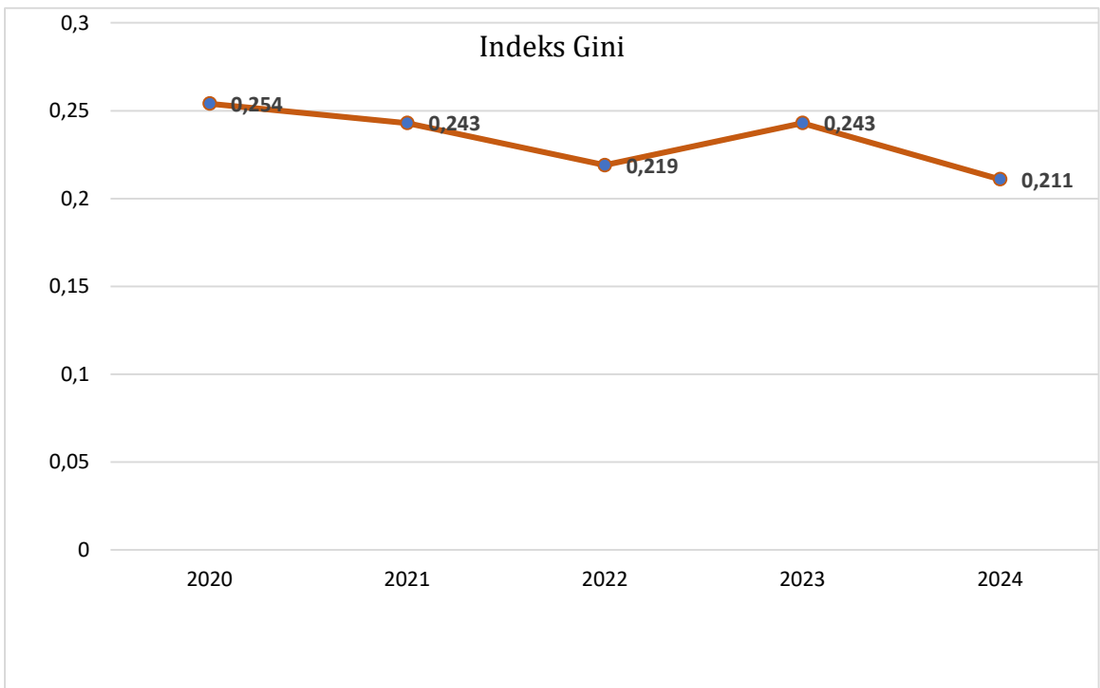

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan nilai indeks ini, maka ketimpangan pembangunan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Bangka menjadi semakin rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.6.1.5 Indeks Ketimpangan Williamson

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Bangka digunakan teknik analisis Indeks Williamson.

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Bangka pada tahun 2020-2023 cenderung menurun dengan rentang nilai indeks sebesar 0,189 – 0,181. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah (kecamatan) di Kabupaten Bangka termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Artinya bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangka dapat terdistribusi secara merata di seluruh wilayah kecamatan. Namun, pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 0,219, hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Bangka semakin besar atau tidak merata jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 2.6
Indeks Williamson Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2024

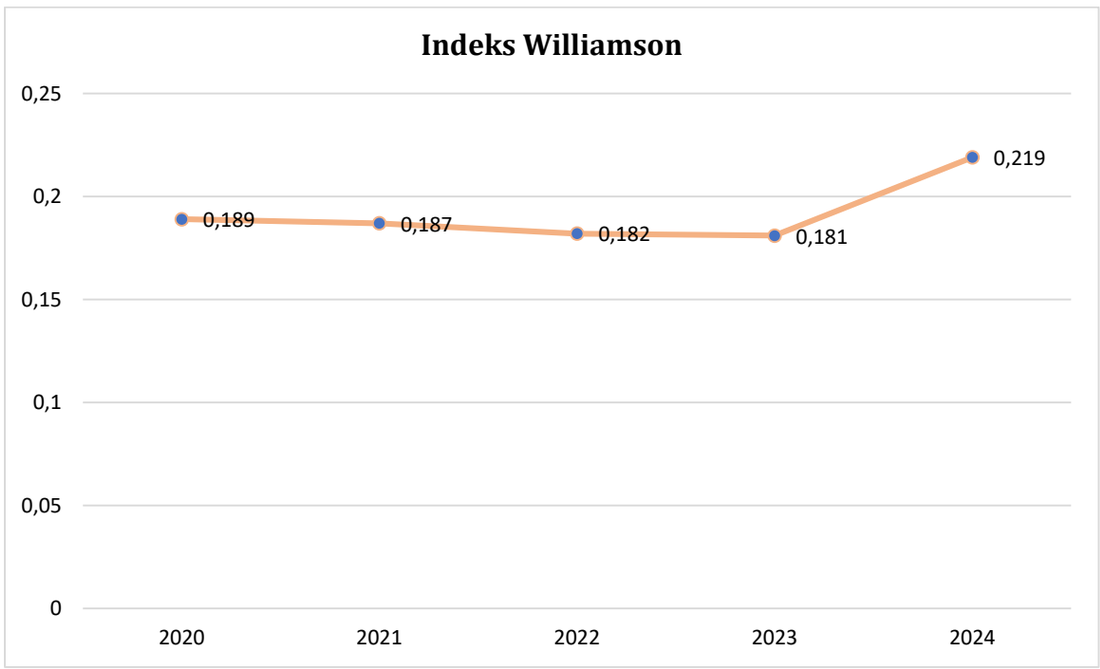

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025

2.1.6.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Bangka dilakukan terhadap indikator-indikator bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

2.1.6.2.1 Angka Melek Huruf

Melek huruf merupakan kemampuan penduduk dalam memahami informasi berbentuk tulisan. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis **huruf** latin dan **huruf** lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas	98,63	97,81	98,61	98,71	98,68
2	Angka Buta Huruf	3,88	0,31	0,3	0,3	0,3

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas di Kabupaten Bangka selama periode 2020-2024 cenderung mengalami fluktatif. Pada tahun 2020, angka melek huruf 98,63 Pada tahun 2024 meningkat menjadi 98,68 .

2.1.6.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi atau lama jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Selengkapnya perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka tahun 2020 hingga 2024, tersaji pada Grafik 2.7.

Grafik 2.7
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka
Tahun 2020– 2024

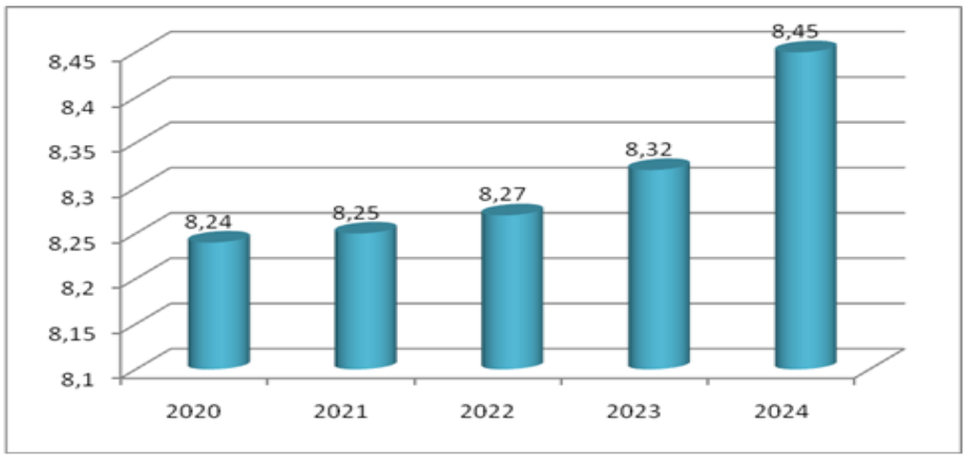

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025

Sebagai salah satu variabel komposit Indeks Pembangunan Manusia, perkembangan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan tren yang terus meningkat dengan interval antara 8,24 tahun sampai dengan 8,45 tahun.

2.1.6.2.3 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidian tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, seperti tersaji pada grafik berikut.

Grafik 2.8
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

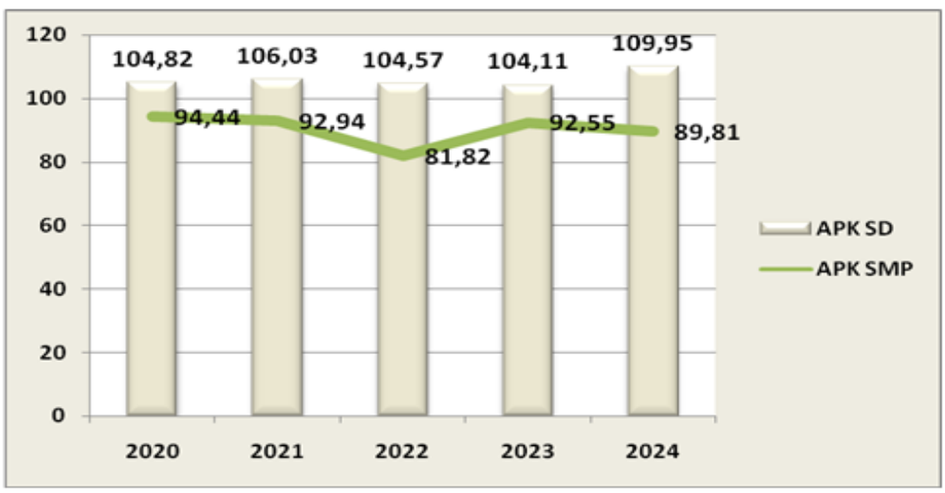

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

2.1.6.2.4 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Selengkapnya perkembangan angka partisipasi murni Kabupaten Bangka tahun 2020-2024 tersaji pada grafik berikut:

Grafik 2.9
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

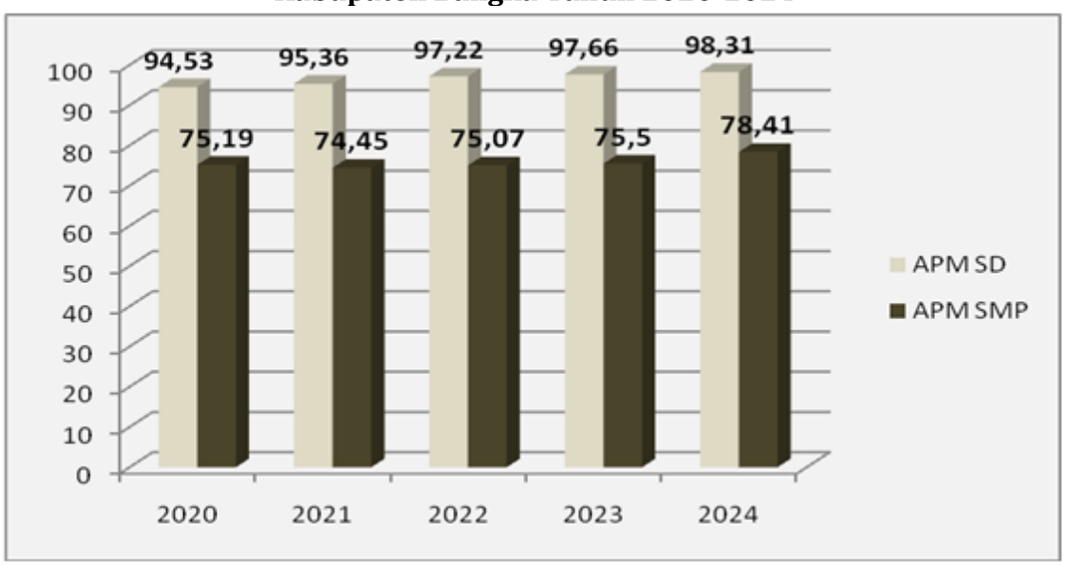

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

2.1.6.2.5 Kesehatan

Beberapa indikator kinerja bidang kesehatan selama kurun waktu 2020- 2024 terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan
Kabupaten Bangka Tahun 2020– 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,81	6,37	1,12	0,4	9,54
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2.6	1.1	8.6	0.8	0,9
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	2.8	5.8	6.3	4.9	7,6
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	81.0	309.6	57.30	152.15	97,31
Rasio posyandu per satuan balita	1.0	1.0	1.0	1.2	100,5

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (jumlah)	NA	84	97	80	4354,4
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (jumlah rumah sakit)	7	6	7	7	47898,9
Rasio dokter per satuan penduduk	97.5	101.1	97.5	94.1	0,41
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	11.6	11.6	12.1	11.7	0,49
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	96.6	99.8	1192	475	462
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93.9	91.2	97.2	47.6	88,51
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	98.8	100.0	100.0	100,0	95,06
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	93.2	90.7	97.1	91,3	91,2
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0.0	2.2	1.1	3.4	5,94
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	58.4	52.2	75.0	30.1	66,62
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	71.36	100.0	100.0	47.9	48,58
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	6.5	5.7	8.2	8.8	6,15
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	NA	NA	80.6	41.4	48,58
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	94.9	64.4	84.1	87.2	87
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100.0	100.0	100.0	100	100
Penderita diare yang ditangani	100.0	100.0	100.0	100	69,39
Angka kejadian Malaria	0.0	44.2	89.4	10.2	0,003
Tingkat kematian akibat malaria	0.0	0.0	1.4	0.0	1
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100.0	100.0	100.0	100.0	100
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,12	0,18	0,30	0,34	0,31
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	90.0	85.8	89.1	44.3	85,36
Cakupan pelayanan nifas	94.0	91.2	96.0	45.3	88,38
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	96.7	71.0	99.1	49.1	318
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100.0	92.1	119.9	39.3	100
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100.0	100	100.0	100.0	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2025

Angka kematian bayi dari 4,81 kematian per 1000 kelahiran pada tahun 2020 menurun menjadi 0,4 kematian per 1000 kelahiran pada tahun 2023 dan terus mengalami kenaikan menjadi 9,54 pada tahun 2024.

Sedangkan Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan hingga tahun 2024 menjadi 100 persen. Khusus indikator cakupan balita gizi buruk ini sangat erat kaitannya dengan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Bangka sebagaimana dijelaskan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.22
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Bangka Berdasarkan SSGI
Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Angka Stunting (%)	17,5	16,2	16,2*	*Belum rilis

Sumber : Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018, 2021
Hasil SSGI Tahun 2022, 2023

Tabel 2.23
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Bangka Berdasarkan EPPGBM
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020 (23 Feb 2020)	2021 (Agustus 2021)	2022	2023	2024
Angka Stunting (%)	5,05	1,68	1,34	1,33	0,99

Sumber : Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, 2025

Berdasarkan tabel di atas, prevalensi angka *stunting* Kabupaten Bangka berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan setiap tahun diperoleh angka stunting mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 17,5 persen pada tahun 2021 menjadi 16,2 persen pada tahun 2023, sementara untuk data tahun 2024 belum rilis, data ini menunjukkan bahwa upaya untuk menurunkan stunting di Kabupaten Bangka berjalan dengan baik dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun sampai tahun 2023 tetap berada diangka 16,2 persen. Kondisi ini juga berbanding lurus dengan pengukuran prevalensi *stunting* berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) per tanggal 23 Februari yang menunjukkan penurunan angka *stunting* dari sebesar 5,05 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,99 persen di tahun 2024 angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya.

2.1.6.2.6 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yangmencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Usia harapan hidup cenderung meningkat dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, tercatat pada tahun 2020 sebesar 71,06 tahun, dan pada Tahun 2024 sebesar 73,24 tahun. Peningkatan usia harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Berikut ini memberikan gambaran kondisi usia harapan hidup di Kabupaten Bangka tahun 2020-2024.

Grafik 2.10
Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bangka tahun 2020-2024

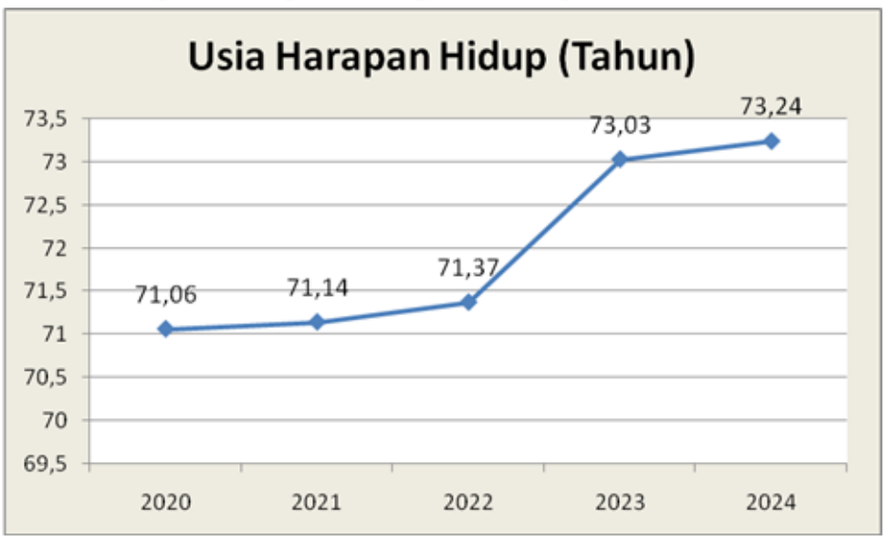

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2025

2.1.6.2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam konteks Kabupaten Bangka, IPM terus menunjukkan perbaikan, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan. Selengkapnya tren perkembangan IPM dalam lima tahun terakhir, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,40	72,46	72,95	74,34	74,66
2	Pengeluaran Per Kapita (Rp.000,-)	12.410	12.420	12.863	13.146	13.205
3	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,77	12,78	12,80	13,11	13,12

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,24	8,25	8,27	8,32	8,45
5	Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,06	71,14	71,37	73,03	73,24

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025

Tabel 2.24 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020-2024, IPM terus mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Bangka sebesar 72,40 pada tahun 2020, kondisi ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2024 mampu mencapai 74,66.

Dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,24 pada tahun 2020 menjadi 8,45 di tahun 2024. Harapan lama sekolah meningkat dari 12,77 di tahun 2020 menjadi 13,12 di tahun 2024. Dari sisi kesehatan, usia harapan hidup meningkat dari 71,06 pada tahun 2020 menjadi 73,24 di tahun 2024. Dari sisi ekonomi, daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan yang luar biasa, dari 12.410 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 13.205 juta rupiah di tahun 2024. Fakta bahwa terus terjadi peningkatan IPM dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah dijalankan dalam koridor yang benar.

2.1.6.2.8 Ketenagakerjaan

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan isu penting sekaligus persoalan serius yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan regional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Tabel 2.00 menyajikan perkembangan indikator kinerja bidang ketenagakerjaan Kabupaten Bangka tahun 2020-2024.

Tabel 2.25
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja yang Bekerja	151.310	149.844	168.137	168.137	168.186
Angkatan Kerja	159.985	159.365	177.723	177.723	176.869
Rasio Penduduk yang Bekerja	0,946	0,94	0,946	0,946	0,951

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025

Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja di Kabupaten Bangka terus mengalami peningkatan dari 151.310 jiwa ditahun 2020 meningkat menjadi 168.186 jiwa di tahun

2024, hal ini berbanding lurus dengan kondisi Angkatan Kerja Kabupaten Bangka dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

2.1.6.2.8 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk kategori angkatan kerja adalah penduduk usia kerja produktif (15-65 tahun) yang sedang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja /pengangguran, oleh karena itu, seseorang yang mempunyai penghasilan, baik itu penghasilan tetap ataupun tidak dan sudah berada pada usia produktif, maka masuk ke dalam kategori penduduk angkatan kerja. Untuk angkatan kerja di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bangka
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	159.950	159.985	159.364	177.723	173.097

Sumber: Dinakerperindag Kabupaten Bangka, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bangka pada tahun 2020 sebanyak 159.950 jiwa dan menurun di tahun 2022 sebanyak 159.364 orang kemudian meningkat lagi di tahun 2024 sebanyak 173.097.

2.1.6.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usiakerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan yaitu persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja dan mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK menurut jenis kelamin selama periode Tahun **2020– 2024** seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bangka
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,93	62,68	68,81	67,46	67,92

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Berdasarkan tabel di atas, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bangka tahun 2020 sebesar 63,93 persen, namun di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 62,68 persen dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 68,81 persen dan menurun kembali sebesar 67,46 persen ditahun 2023 serta mengalami sedikit peningkatan di tahun 2024 sebesar 67,92.

2.1.6.2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengganggur dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pada periode tahun 2020-2024, TPT Kabupaten Bangka mengalami penurunan. Berikut tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024.

Tabel 2.28
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangka
Tahun 2020– 2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,42	5,97	5,29	5,03	4,91

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung 2025

Tahun 2020 tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka menyentuh angka sebanyak 5,42 persen, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 5,97 persen dan terus mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 4,91.

2.1.6.2.11 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka diarahkan pada pencapaian indikator sasaran yang mencerminkan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Bangka yang berupa angka kemiskinan, penduduk di atas garis kemiskinan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari angka absolut. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan namun juga mencakup kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Grafik 2.11. menunjukkan bahwa perkembangan penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Bangka selama periode 2020 – 2024 mempunyai trend yang fluktuatif. Pada tahun 2020 penduduk di atas garis kemiskinan mencapai 95,49 persen kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 95,19 persen dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 95,76 persen.

Grafik 2.11
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

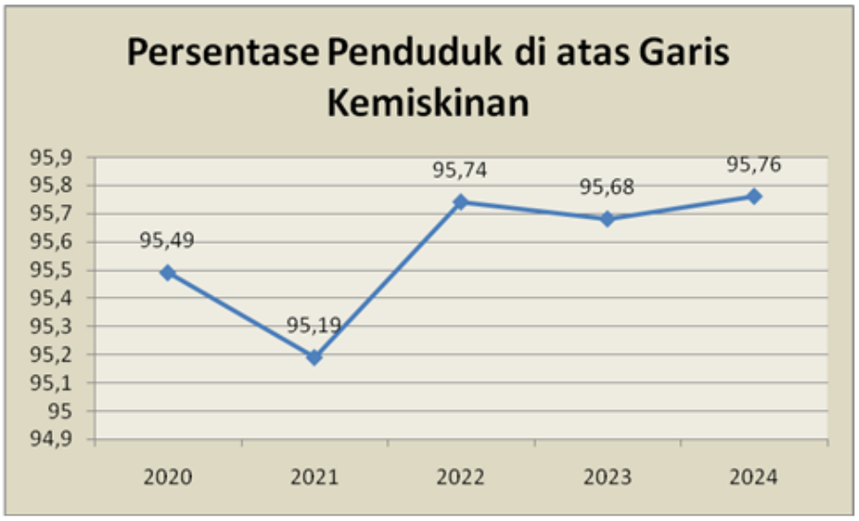

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025

2.1.6.2.12 Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bangka

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara denganRp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Bangka tahun 2022 sebesar 1,13% angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 0,82% dan lebih rendah dari angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar 2,04 %, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Bangka hanya rilis di tahun 2021 dan tahun 2022 saja, namun untuk tahun 2023 dan tahun 2024 BPS sudah tidak mengeluarkan rilis lagi. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2024

KABUPATEN /KOTA	2021		2022		2023	2024
	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (dlm 000)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (PO)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (dlm 000)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (PO)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (PO)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (PO)
Bangka	0,82	0,24	3,85	1,13	Data tidak rilis	Data tidak rilis
Belitung	0	0	3,95	2,06		
Bangka Barat	0	0	0,88	0,41		
Bangka Tengah	0,94	0,48	0,96	0,48		
Bangka Selatan	0	0	0,05	0,02		
Belitung Timur	2,07	1,6	1,06	0,81		
Kota Pangkal Pinang	1,98	0,94	1,53	0,71		
KEP. BANGKA BELITUNG	**5,81**	**0,39**	**12,27**	**0,82**		

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2025

Data kemiskinan ekstrem yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bangka berasal dari kementerian koordinator bidang pembangunan manusia (Kemenko PMK) tahun 2022 desil 1 (satu) berjumlah 15.566 individu pada bulan Maret 2023.

Data tersebut dijadikan data dasar untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang diatur dalam instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Verifikasi dan validasi dan keputusan Kemenko PMK nomor 32 tahun 2022 tentang pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dinas Sosial menjadi *leading sector* dalam

melaksanakan verifikasi dan validasi dengan menggerakkan seluruh pekerja sosial masyarakat (PSM) yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandangani oleh pihak Desa/Kelurahan/Kecamatan.

Data kemiskinan ekstrem Kabupaten Bangka beberapa kali dilakukan verifikasi dan validasi data terakhir menunjukkan sebesar 135 jiwa yang ditetapkan dengan keputusan bupati bangka nomor:100.3.3.2/1051/DINSOS/2024 tentang penetapan data kemiskinan ekstrem Kabupaten Bangka Tahap III Tahun 2024.

Ada beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam upaya penurunan angka kemiskinan ektrem sebagaimana yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (a.) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (b.) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (c.) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Penurunan beban pengeluaran masyarakat Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:
    1. Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
    2. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler.
    3. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
    4. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.
b. Peningkatan pendapatan masyarakat Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
    1. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
    2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
    3. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
    4. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
    5. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
   1. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
   2. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

2.1.6.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator seperti jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, jumlah lapangan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja, rasio gelanggang/balai remaja per 1000 penduduk dan rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk.

Tabel 2.30
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

No	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	0	0	3	3	5
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	10	10	10	10	10
3	Jumlah Lapangan Olah Raga di Kabupaten	479	479	479	323	323
4	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja di Kabupaten	11	10	11	10	10
5	Rasio Gelanggang/ Balai Remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
6	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk	1,46	1,45	1,43	0,95	0,94

Sumber : Dinparbud dan Dindikpora Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bangka dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

2.1.7.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.7.1.1 Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas memberikan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendidikan merupakan urusan wajib bidang pelayanan dasar. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pendidikan tinggi dan penetapan standar nasional pendidikan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan layanan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi: penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan di dalam wilayah kabupaten/kota, penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat, dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota (Arwildayanto, Lamatenggo, & Sumar, 2017: 93). Pembagian urusan layanan pendidikan ini dimaksudkan agar masing-masing dapat fokus dalam memberikan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yang amat penting, menyangkut hajat hidup orang banyak, menentukan masa depan anak bangsa, dan juga akan ikut menentukan maju-mundurnya daerah itu sendiri dalam jangka panjang, jika diukur dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut sebagai hasil dari proses pendidikan yang diurusnya. Beberapa indikator kinerja terkait dengan pelayanan dasar bidang pendidikan menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Persentase PAUD adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak, dibagi dengan jumlah seluruh anak usia 4-6 tahun pada tahun tertentu.

Tabel 2.31
Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangka
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	72,54	39,23	53,73	43,62	Belum rilis

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2025

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase PAUD di Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2020 – 2024 terus mengalami fluktuasi. Persentase PAUD terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 39,23persen. Di tahun 2022 persentase PAUD mengalami sedikit peningkatan menjadi 53,73 persen dan pada tahun 2023 menurun menjadi 43,62 persen, untuk tahun 2024 belum rilis.

b. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam menampung penduduk usia pendidikan. Selengkapnya perkembangan kinerja pendidikan dasar Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Perkembangan Kinerja Pendidikan Dasar
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata kemampuan Literasi SD	N/A	N/A	N/A	58,81	74,98
2	Rata-rata kompetensi Literasi SMP	N/A	N/A	N/A	71,91	80,68

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Rata-rata kemampuan Numerasi SD	N/A	N/A	N/A	42,83	43,85
4	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP	N/A	N/A	N/A	61,87	72,21
5	Iklim keamanan SD	N/A	N/A	N/A	74,44	74,43
6	Iklim keamanan SMP	N/A	N/A	N/A	71,35	71,34
7	Iklim kebinekaan SD	N/A	N/A	N/A	74,70	74,7
8	Iklim kebinekaan SMP	N/A	N/A	N/A	74,89	74,89
9	Iklim inklusivitas SD	N/A	N/A	N/A	57,30	57,29
10	Iklim inklusivitas SMP	N/A	N/A	N/A	58,07	58,07
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	N/A	67,01	69,46	75,05	75,04
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	97,97	105,06	99,91	99,35	99,34
13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	91,88	87,88	85,85	92,25	92,24
14	Rasio Ketersedian Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
15	Rasio Guru/Murid	20,45	18,17	19,30	19,30	19,30
16	Rasio Guru/ Murid Per Kelas Rata-rata	0,7	17,77	19,80	19,80	19,80

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2024

c. Angka Putus Sekolah (APUS)

Angka Putus Sekolah (APUS) adalah persentase jumlah anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun tersebut. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Bangka selama periode tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Perkembangan Anak Putus Sekolah (APUS) Kabupaten Bangka
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Putus Sekolah (APUS) SD/ MI	0,19	0,7	1,6	1,29	Belum rilis
2	Angka Putus Sekolah (APUS) SMP/ MTs	0,33	1,9	0,3	0,19	Belum rilis

Sumber : BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka 2023 dan Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2025

d. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan adalah persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikandan tahun tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang dan tahun yang sama. Selengkapnya perkembangan angka kelulusan Kabupaten Bangka tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Perkembangan Angka Kelulusan (AL)
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelulusan SD/ MI	98,2	99,6	96,4	96,4	100
2	Angka Kelulusan SMP/ MTs	99,1	98,7	91,9	91,9	100
3	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs	99,1	93,5	87,8	93,18	Belum Rilis
4	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ DIV	86,4	88,8	89,3	89,3	Belum Rilis

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2025

e. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah semua kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik dalam rangka untuk memudahkan, melancarkan dan menunjang dalam kegiatan belajar di sekolah. Supaya lebih efektif dan efisien yang nantinya peserta didik dapat belajar dengan maksimal dan hasil belajar yang memuaskan. Kondisi fasilitas yang baik dapat menunjang mutu pendidikan yang berkualitas. Selengkapnya perkembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangka tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Perkembangan Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Sekolah SD Bangunan Baik	84,53	94,5	94,6	94,6	95,9
2	Sekolah SMP Bangunan Baik	75	85,1	93,5	93,5	97,9

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2024

Kriteria sekolah dengan bangunan baik ini adalah bangunan yang memenuhi persyaratan kenyamanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum. Kriteria bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan adalah sebagai berikut : a. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran. b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik. c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.

2.1.7.1.2 Kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka tidak terlepas dari kebijakan nasional dan internasional. Adapun program kesehatan baru yang dicanangkan PBB yaitu SDG's sebagai kelanjutan dari program MDG's, bertujuan untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua masyarakat pada segala usia. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.Beberapa indikator kinerja terkait dengan pelayanan dasar bidang kesehatan meliputi :

a. Angka Kematian Bayi

Kejadiaan kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas).

Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 2.36
Perkembangan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	4,81	6,37	1,12	0,4	9,54

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2025

Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir bersipat fluktuatif, pada tahun 2023 sempat mengalami penurunan dengan angka 0,4, namun pada tahun 2024 sempat terjadi kenaikan angka yang cukup signifikan sebesar 9,54. Hal ini menunjukkan perlunya upaya serius dalam hal menekan angka kematian bayi di Kabupaten Bangka dengan intervensi program dan kegiatan yang tepat.

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (*maternal mortality rate*) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 1000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang

berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Tabel 2.37
Perkembangan Angka Kematian Ibu
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup	81,0	309,6	57,29	152,15	97,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2025

Secara umum selama tahun 2020-2024 AKI di Kabupaten Bangka cenderung bersifat fluktuatif, angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 309,6 dan terjadi penurunan ditahun 2024 menjadi 97,31. Faktor penyebab terbesar kematian ibu hamil saat melahirkan diantaranya karena pendarahan dan terinfeksi virus Covid 19. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan diantaranya pendampingan dan sosialisasi kepada ibu hamil serta kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan, gerakan senam ibu hamil, dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat dan dengan optimalisasi inovasi “SMS Bunda Cerdas”. Pemberian tablet penambah daerah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan diharapkan akan mengurangi angka kematian ibu.

c. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita Gizi Buruk adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Balita gizi buruk terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Persentase Balita gizi buruk bersifat fluktuatif tiap tahun, yaitu dari 1,3 persen pada tahun

2020 dan relatif tinggi di tahun 2021 sebesar 1,9 persen dan tiga tahun terakhir memiliki tren menurun yaitu 0,02 persen ditahun 2024.

Grafik 2.12
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

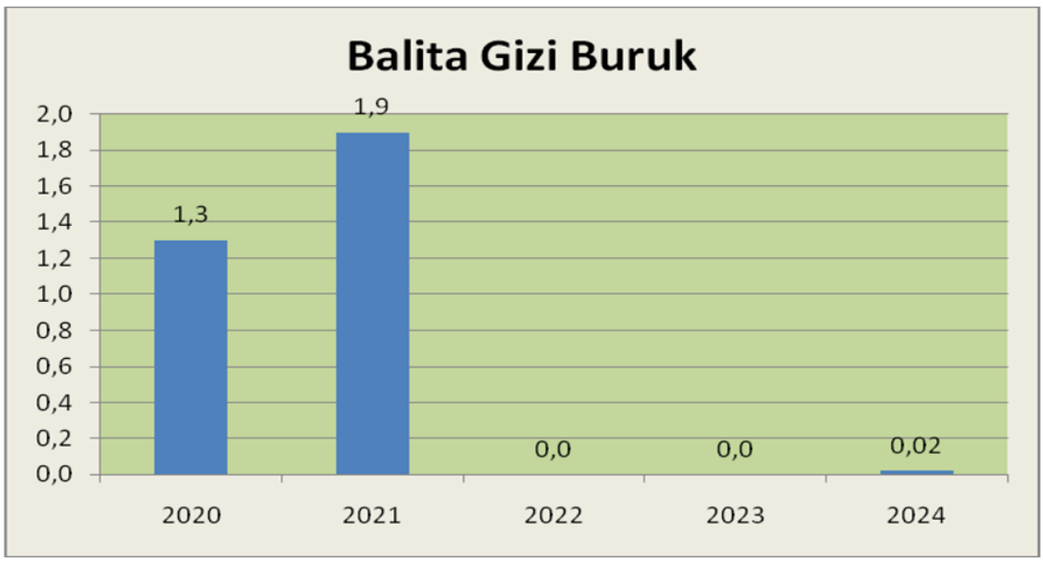

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2024

d. Jumlah Orang terduga Tuberkulosis dan Kasus Tuberkulosis

Kondisi tuberkulosis tahun 2024 dapat dilihat pada setiap puskesmas yang menunjukkan Total Penemuan berjumlah 618 insiden, dengan target temuan berjumlah **1272** insiden, target orang terduga tuberkulosis diperkirakan **6182** orang. Capaian intervensi tuberkulosis dan kondisi tuberkulosis pada Puskesmas, Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Capaian Intervensi Tuberkulosis Tahun 2024

NO	Puskesmas	Target TC TBC 2024 100 %	Total Penemuan (TC)	Capaian TC (%)	Target Terduga TBC 2024 100 %	Capaian terduga	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUNGAILIAT	267	51	19,09	1298	1337	103,00
2	SINARBARU	38	5	13,10	185	227	122,70
3	KENANGA	89	25	28,08	433	343	79,21
4	PEMALI	76	17	22,27	371	375	101,08
5	BAKAM	89	11	12,35	433	478	110,39
6	BELINYU	64	29	45,60	309	351	113,59
7	GUNUNG MUDA	38	8	20,96	185	242	130,81

8	RIAU SILIP	76	11	14,41	372	396	106,45
9	BATURUSA	140	27	19,30	680	716	105,29
10	PUDING BESAR	127	14	11,01	618	624	100,97
11	PETALING	191	42	22,01	927	875	94,39
12	PENAGAN	76	10	13,10	371	375	101,08
13	RSUD Depati Bahrin	-	232	-	-	552	-
14	RSUD Ir Soekarno	-	72	-	-	189	-
15	RS Arsani	-	35	-	-	125	-
16	RSMS	-	4	-	-	12	-
17	Rumah Sakit Jiwa Sungailiat	-	2	-	-	8	-
18	RSUD DR Eko maulana	-	19	-	-	59	-
19	RSUD Sjafrie Rachman	-	0	-	-	1	-
20	KLINIK AL-HUSNI	-	1	-	-	9	-
21	KLINIK AL-HADI	-	0	-	-	0	-
22	KLINIK MEDIKA STANIA BELINYU	-	0	-	-	0	-
23	Lapas Kelas II B Sungailiat	-	0	-	-	30	-
24	KLINIK POLRES	-	0	-	-	0	-
25	Apotek Kondang Jaya	-	3	-	-	7	-
	KABUPATEN	**1272**	618	48,58	**6182**	**7331**	118,59

e. Persentase Orang Resiko Terinfeksi HIV

Persentase orang yang beresiko HIV di Kabupaten Bangka cukup tinggi sebesar 102.1% yang sudah mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, dengan jumlah kasus sebanyak 63 (Enam puluh tiga) kasus. Untuk lebih lengkap data kondisi HIV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Jumlah kasus HIV di Kabaputen Bangka Tahun 2024

KELOMPOK UMUR	KASUS HIV			PROPORSI KELOMPOK UMUM
	L	P	L+P	
≤ 4 TAHUN	0	0	0	0,00
5-14 TAHUN	0	2	2	2,0
15-19 TAHUN	2	2	4	6.3
20-24 TAHUN	5	2	7	11.1
25-49 TAHUN	27	14	41	65.1
≥ 50 TAHUN	8	1	9	14.3
JUMLAH (KAB/KOTA)	42	21	63	
JUMLAH PROPORSI JENIS KELAMIN	66.7	33.3		
JUMLAH ESTIMASI ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV				7186

KELOMPOK UMUR	KASUS HIV			PROPORSI KELOMPOK UMUM
	L	P	L+P	
JUMLAH ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR				7336
PERSENTASE ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV MENDAPATKAN PELAYANAN DETEKSI DINI HIV SESUAI STANDAR				102.1

f. Persentase Kasus Akibat Malaria

Kabupaten Bangka sudah dalam status eleminasi malaria, kasus malaria tetap ada tetapi tidak signifikan kondisi malaria di Kabupaten Bangka dilihat dari jumlah kasus sebanyak 1 (Satu) kasus, dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Jumlah Kasus Malaria Tahun 2024

KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KASUS
SUNGAILIAT	SUNGAILIAT	1
	SINAR BARU	0
	KENANGA	0
PEMALI	PEMALI	0
BAKAM	BAKAM	0
BELINYU	BELINYU	0
	GUNUNG MUDA	0
RIAU SILIP	RIAU SILIP	0
MERAWANG	BATURUSA	0
PUDING BESAR	PUDING BESAR	0
MENDO BARAT	PETALING	0
	PENAGAN	0
JUMLAH (KAB/KOTA)		1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka 2025

g. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita Gizi Buruk adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Balita gizi buruk terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga

berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Status gizi baikpada balita perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini dikarenakabn gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Apabila status gizi balita buruk, maka akan menghambat pertumbuhan fisik, mental, maupun kemampuan berfikir yang tentu akan berpengaruh pada penurunan produktivitas kerja. Oleh karena itu, balita adalah asset yang perlu dipelihara mengingat usia balita adalah usia dimana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Persentase Balita gizi buruk mengalami penurunan tiap tahun, yaitu dari 0,02 persen pada tahun 2018 menurun menjadi 0,017 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 0, 02 persen di tahun 2022 dan turun 0,1% di tahun 2023.

Grafik 2.13
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Tahun 2018-2023

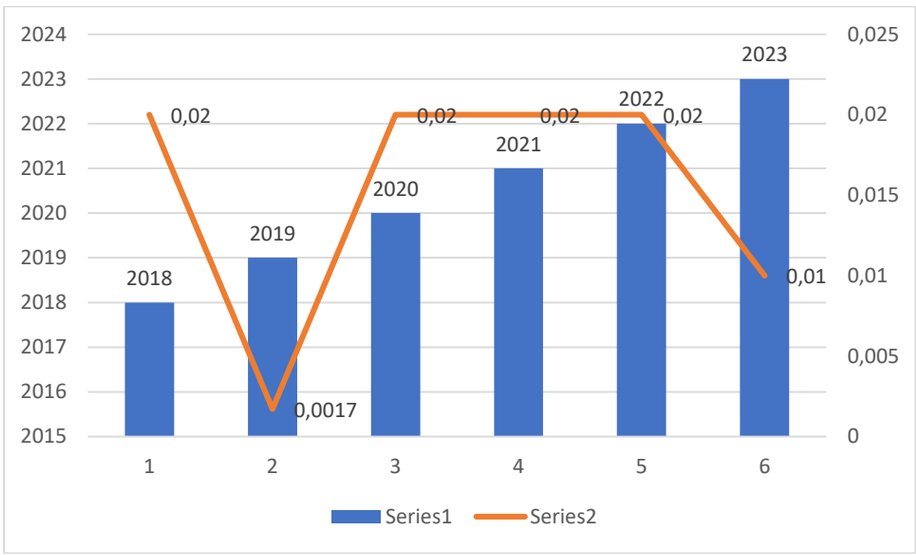

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka,, 2024

2.1.7.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Konektivitas melalui penyediaan akses jalan di Kabupaten Bangka cukup baik. Lebih dari 70% panjang jalan di Kabupaten Bangka dalam kondisi mantap. Hal ini tentunya mendukung mobilitas masyarakat dan konektivitas dalam wilayah Kabupaten Bangka. Selama lima tahun terakhir (2020 – 2024) panjang jalan dalam kondisi baik terus meningkat, yaitu dari 337,019 km jalan dalam kondisi baik di tahun 2020 menjadi 469.671 km pada tahun 2024, sehingga persentase jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bangka tahun 2024 sebesar 63,94%.

Perkembangan kondisi jalan ini berkontribusi terhadap kemantapan jalan di Kabupaten Bangka, dimana kemantapan jalan tersebut juga meningkat dari 72,34% pada

tahun 2020 menjadi 79,33% pada tahun 2024. Dukungan Pemerintah Kabupaten Bangka cukup konsisten untuk terus menyediakan dan memastikan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yang memang bergantung pada konektivitas jalan, di seluruh wilayah Kabupaten Bangka. Perkembangan jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41
Kondisi Jalan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	337,019	332,62	402,06	444,949	469,671
Sedang	194,311	209,02	162,12	137,255	113,031
Rusak Ringan	199,141	95,626	73,475	65,114	59,446
Rusak Berat	4,030	97,235	96,848	87,183	92,353
Panjang Jalan	734,501	734,501	734,501	734,501	734,501
Persentasi Baik	45,88%	45,29%	54,74%	60,58%	63,94%
Persentase Mantap	72,34%	73,74%	76,81%	79,27%	79,33%

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2025

b. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menggambarkan seberapa banyak masyarakat yang terlayani akses jalan. Berdasarkan tabel di bawah ini, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bangka masih rendah, dimana per 2 km jalan di Kabupaten Bangka melayani 1 penduduk. Dalam kurun waktu 2020 – 2024 memang terlihat penurunan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk namun dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Bangka tehadap rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk sebanyak 337.755 jiwa pada tahun 2024, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebesar 2,17. Sekalipun rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangka tahun 2020 – 2024 masih rendah, angka ini tidak dapat menggambarkan tingkat kepadatan jalan di Kabupaten Bangka.

Tabel 2.42
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan seluruhnya (Km)	734.501	734.501	734.501	734.501	734.501
Jumlah Penduduk	320.552	323.107	327.395	332.964	337.755
Persentase (%)	2,29	2,27	2,24	2,21	2,17

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025, data diolah

c. Akses Air Minum dan Sanitasi

Akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Bangka menunjukkan peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Akses air minum dan sanitasi merupakan target nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2019 – 2024 sehingga berbagai program air minum dan sanitasi dilakukan secara massif. Program tersebut antara lain program Pamsimas dan Hibah Air Minum untuk bidang air minum. Sedangkan untuk air limbah terdapat program Sanimas dan Hibah Air Limbah Setempat. Selain itu, masih terdapat pendanaan pembangunan akses air minum dan sanitasi melalui DAK Fisik yang menyasar tematik penurunan stunting dan pengentasan permukiman kumuh. APBD juga berperan dalam pembangunan akses air minum dan sanitasi ini, khususnya guna pencapaian Program Desa ODF.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat perkembangan akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Bangka dari 2021 – 2024. Akses terhadap air minum meningkat dari 87,62% pada tahun 2021 menjadi 92,04% tahun 2024. Akses terhadap sanitasi meningkat dari 95,32% pada tahun 2021 menjadi 95,54%.

Tabel 2.43
Akses Air Minum dan Sanitasi
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase akses terhadap air minum layak (%)	N/A	87,62	90,05	91,53	92,04
Persentase akses air minum perkotaan (%)	N/A	14,39	16,09	17,64	17,78

Persentase akses air minum perdesaan (%)	N/A	73,23	73,97	73,89	74,26
Persentase cakupan akses terhadap sanitasi (air limbah) layak (%)	N/A	95,32	95,38	95,47	95,54

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2025

d. Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Bangka

Kawasan kumuh di Kabupaten Bangka pada tahun 2020 seluas 73,6 Ha, atau 0,736 km^2. Luasan ini berkontribusi terhadap 0,024% persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Bangka. Secara umum, areal kawasan kumuh di Kabupaten Bangka cenderung menurun karena berbagai program penanganan kumuh yang dilaksanakan. Pada tahun 2024, persentase areal kawasan kumuh sudah menurun menjadi 0.012%. Penurunan ini secara signifikan didukung oleh program DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, serta berbagai program pengentasan kumuh lainnya dari berbagai sumber pendanaan seperti APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.

Tabel 2.44
Proporsi Kawasan Kumuh
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Kawasan Kumuh (km^2)	0,736	0,4936	0,4526	0,4254	0,685
Luas Wilayah (km^2)	3.028,79	3.028,79	3.028,79	3.028,79	3.028,79
Persentase (%)	0,024	0,016	0,015	0,014	0,012

Sumber : DINPERKPP Kabupaten Bangka, 2025

e. Rasio Jaringan Irigasi

Realisasi rasio jaringan irigasi Kabupaten Bangka dalam kondisi baik sepanjang tahun 2020 - 2024 terlihat mengalami peningkatan mulai pada tahun 2021. Penanganan jaringan irigasi pada tahun 2020 terkontraksi karena pemerintah fokus pada penanganan Covid-19 yang mewabah pada tahun 2020. Akibatnya, anggaran untuk penanganan jaringan irigasi di Kabupaten Bangka untuk sementara dialihkan. Pada tahun selanjutnya, penanganan jaringan irigasi dilakukan kembali sehingga pada tahun 2021, luas jaringan

irigasi Kabupaten Bangka yang dalam kondisi baik sebesar 2.255,04 Ha atau 98,73%. Tidak ada perubahan pada luasan daerah irigasi dalam kondisi baik tahun 2023 dan tahun 2024, yaitu sebesar 2.273,63 Ha atau 99,55%. Hingga tahun 2024 terdapat perubahan terhadap luasan Daerah Irigasi Kabupaten Bangka sesuai dengan luasan Daerah Irigasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sebesar 1.286 Ha. Dengan adanya penyesuaian luasan Daerah Irigasi dan mengukur capaian kinerja dari intervensi program dan kegiatan penanganan irigasi di Kabupaten Bangka tahun 2024, luasan jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Bangka pada tahun 2024 menurun menjadi 89,03%. Perkembangan luasan daerah irigasi Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45
Luas Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	2.240	2.255,04	2.273,63	2.273,63	1145
Luas irigasi Kabupaten	2.284	2.284	2.284	2.284	1286
Ratio (%)	98,07	**98,73**	**99,55**	**99,55**	**89,03**

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2025

f. Ketaatan Terhadap RTRW

Persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Bangka dilihat dari tiga indikator, yaitu persentase rata – rata kesesuaian peruntukan kawasan lindung, persentase rata – rata kesesuaian peruntukan kawasan budidaya, dan persentase ketaatan terhadap RTRW. Selama lima tahun terakhir, ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Bangka semakin meningkat, mengkonfirmasi meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan struktur ruang, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan peruntukan spasial. Pada tabel di bawah ini, dapat dilihat bahwa kesesuaian peruntukan kawasan lindung meningkat menjadi 90% pada tahun 2024. Peruntukan kawasan budidaya sudah sesuai 100%. Ketaatan terhadap RTRW meningkat menjadi 100% pada tahun 2024.

Tabel 2.46
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Bangka
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	% Rata-Rata Kesesuaian Peruntukan Kawasan Lindung	93	100	72,22	83,33	90
2	% Rata-Rata Kesesuaian Peruntukan Kawasan Budidaya	95	98,44	98,38	100	87,72
3	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	94	99,22	85,30	91,67	100

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7.1.4 Perumahan Rakyat dan Permukiman

Pada urusan wajib perumahan ini yang menjadi indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunannya adalah sebagai berikut:

a. **Persentase Rumah Layak Huni**

Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bangka pada tahun 2024 sebanyak 83.964 unit atau sebesar 97,31%.

Tabel 2.47
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Layak Huni	77.627	77.766	84.094	84.234	83.964
Jumlah Seluruh Rumah	79.695	79.695	85.667	86.181	86.286
Ratio	97,40	97,57	98,16	97,74	97,31

Sumber : DINPERKPP Kabupaten Bangka, 2025

b. **Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**

Jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih di Kabupaten Bangka, tersaji pada berikut ini.

Tabel 2.48
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RT yang dapat mengakses air bersih	90.220	90.743	72.084	73.262	73.670
Jumlah RT	95.984	101.115	80.045	80.045	80.045
Rasio (%)	93,99	89,74	90,05	91.53	92,04

Sumber : DINPUPR Kabupaten Bangka, 2025

Realisasi persentase rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2024 meningkat menjadi 92,04% dibanding tahun 2022 sebesar 90,05%. Dukungan pencapaian target ini dilakukan melalui APBD Kabupaten Bangka melalui Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; serta Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; dan dari APBN melalui Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) serta DAK Fisik Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.

c. Rumah Tangga Bersanitasi

Realisasi rumah tangga bersanitasi Kabupaten Bangka sepanjang tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sebesar 95,15% dan terus meningkat sampai pada tahun 2024 menjadi sebesar 95,54%, seperti tersaji pada tabel 2.49.

Tabel 2.49
Rumah Tangga Bersanitasi
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
% Rumah Tangga Bersanitasi	95,15	95,32	95,38	95,47	95,54

Sumber : DINPUPR Kabupaten Bangka, 2025

Kenaikan jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Bangka merupakan keberhasilan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) yang telah mengupayakan tercapainya target melalui berbagai program mulai dari Program pengentasan kemiskinan dan dalam rangka menanggulangi stunting berupa Program Pembangunan Rumah Layak Huni APBD Kabupaten Bangka 2024, Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) dana APBN dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2024, peran serta masyarakat (arisan jamban), peran serta swasta (*Corporate Social Responsibility/CSR dari PT. Timah dan Baznas*) serta program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) lainnya yang intinya memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui penyehatan lingkungan.

d. **Lingkungan Permukiman Kumuh**

Luas lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/199/PU/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka adalah 105,42 hektar dengan lokasi :

- Kecamatan Sungailiat yaitu Lingkungan Nelayan I seluas 26,32 ha, Lingkungan Nelayan II 45,11 ha, Kelurahan Kuday 3,572 ha;
- Kecamatan Belinyu yaitu Kelurahan Kuto Panji seluas 2,44 ha dan Kelurahan Air Jukung seluas 27,98 ha.

Namun, setelah dilakukan verifikasi data melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diperoleh data kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Bangka untuk tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/607/DINPERKPP/2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45l325.5/PU/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka seluas 49,36 hektar dengan lokasi :

- Kawasan Nelayan (RT 02, RT 04 dan RT 05) Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat dengan luas 16,52 hektar;
- Kawasan Parit Pekir (RT 04, RT 07 dan RT 08) Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat dengan luas 20,67 hektar;
- Kawasan HOS Cokroaminoto (RT 05) Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat dengan luas 1,20 hektar;
- Kawasan Mantung (RT 11, RT 12 dan RT 13) Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu dengan luas 10,97 hektar.

Tabel 2.50
Lingkungan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	73,60	49,36	45,26	42,54	68,5
Luas Wilayah	302.879	302.879	302.879	302.879	302.879
Ratio (%)	0,024	0,016	0,015	0,014	0,023

Sumber : DINPERKPP Kabupaten Bangka, 2025

Luas lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka pada tahun 2024 seluas 68,5 ha atau sebesar 0,023% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 kurang lebih 45,26 ha atau sebesar 0,015 persen dari total luas wilayah.

Kenaikan luasan lingkungan permukiman kumuh disebabkan adanya pendataan kembali luasan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka. Lingkungan permukiman kumuh yang sudah ditangani dikeluarkan dari kawasan permukiman kumuh, sedangkan wilayah Kabupaten Bangka yang dinilai memiliki tingkat kekumuhan tinggi dimasukkan kedalam kawasan permukiman kumuh.

2.1.7.1.4 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesbangpol. dengan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja atau Analisis kinerja atas Aspek Pelayanan Umum terhadap indikator yang mempengaruhi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tahun 2020–2024

Uraaian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	-	-	-	26%	26,82%
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol-PP Kabupaten Bangka, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 sebesar 26,82 % sedangkan untuk tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebesar 100%, begitu juga dengan cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Bangka selama kurun waktu lima tahun telah mencangkup 100% wilayah kabupaten Bangka, untuk tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran juga berjalan 100% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 serta penegakan PERDA juga selama lima tahun sudah berjalan sebesar 100%,

2.1.7.1.5 Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban KDRT, karang taruna, korban bencana, lansia dan anak sekolah. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya melalui pemberian bantuan, pendampingan dan pembinaan. Berdasarkan tabel 2.52, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2020-2024 cenderung fluktuatif.

Tabel 2.52
Jumlah Penduduk Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Penduduk miskin (RT)	15.410	85.000	103.120	80.227	80.227
2. Penduduk Penyandang Masalah Sosial		858	1.131	2.140	2.140
a. Lanjut Usia Terlantar (orang)	35	126	177	180	429
b. Komunitas Adat Terpencil (orang)	-	-			0
c. Penyandang Cacat (orang)	363	858	1048	1.562	1.907
d. Pengungsi dan Korban Bencana (orang)	214	1.578	247	298	17

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
4. Jumlah Penghuni Panti Asuhan (orang)	65	136	136	107	95
5. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)					2.386
a. Karang Taruna (orang)	62	89	90	2.668	2.297
b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) (orang)	8	8	8	8	89
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Na	Na	Na	65%	61%
Persentase PMKS yang tertangani	Na	Na	Na	65%	61%
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Na	Na	Na	65%	61%
"Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya"	Na	Na	Na	Na	0
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Na	Na	Na	Na	100%
"Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial"	Na	Na	Na	Na	0
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Na	Na	Na	Na	100%
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Na	Na	Na	Na	100%
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Na	Na	Na	Na	61%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bangka dan BPS Kabupaten Bangka, 2024

2.1.7.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.7.2.12 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja (*manpower*) diartikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja memerlukan ketersediaan lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja kesempatan kerja menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi pencari kerja. Disamping itu, beberapa indikator kinerja terkait dengan Non Pelayanan Dasar bidang Tenaga dapat diliat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	23	12	16	21	23
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	15	7	10	16	12
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0	94	108	37	79
4	Keselamatan dan perlindungan	0	0	0	0	0
5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	9.163	8.692	7.302	9.767	9.797
6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0
7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	0	0	0	0	0
8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	0	0	0	0	0
9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	16	0	0	0	20
10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	0	0	0	0
11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	0	0	0	0
12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	65/1/0	14/0/0	23/1/0	190/5/0	175/0/0

Sumber : Dinakerperindag Kabupaten Bangka, 2024

2.1.7.2.13 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah mencapai kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya pembangunan manusia, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender (*gender gap*) masih terjadi di sebagian besar bidang. Berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan

kualitas kehidupan dan peran perempuan agar mereka tidak tertinggal dibandingkan laki-laki.

Di bidang pendidikan, upaya mendorong kesetaraan gender dilakukan dengan memberikan akses dan partisipasi yang sama, baik bagi perempuan, maupun laki-laki. Keberhasilan dari upaya tersebut antara lain dapat dilihat dari indeks paritas gender/IPG (*Gender Parity Index/GPI*) angka partisipasi murni (APM), atau rasio APM perempuan terhadap laki-laki.

Selengkapnya perkembangan kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bangka tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.54
Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar					
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,01	0,99	0,99	0,99	0,99
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,96	1,04	1,04	1,20	1,20
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	17,14	14,28	14,28	14,28	14,28

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7.2.14 Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Terpenuhinya hak masyarakat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri merupakan hal yang amat penting, disamping ketersediaan pangan itu sendiri. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri, maka terpenuhinya gizi masyarakat akan cenderung lebih tinggi.

Analisis kinerja atas fokus layanan urusan wajib non dasar dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi Aspek Pelayanan Umum. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada urusan pangan sebagai berikut:

a. Ketersediaan Pangan

. Di bawah ini ditampilkan tabel ketersediaan bahan pangan beras dan jumlah konsumsi beras di Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2020 – 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, ketersediaan beras di Kabupaten Bangka menurun, yaitu 44.916,98 ton pada tahun 2020 dan 44.431,20 ton pada tahun 2021,namun konsumsi beras Kabupaten

Bangka pada tahun tersebut meningkat. Pada tahun 2020, konsumsi beras Kabupaten Bangka sebesar 35.566,79 ton dan konsumsi beras pada tahun 2021 sebesar 35.767,10 ton. Pada tahun 2022 ketersediaan beras sebesar 50.477,20 ton dan jumlah konsumsi beras sudah dibawah 30.000 ton. Namun pada tahun 2023 Ketersediaan beras naik sebesar 74,612,20 ton dan jumlah konsumsi beras juga naik menjadi sebesar 30,221,69, pada tahun 2024 ketersediaan beras kembali menurun sebesar 48.010.50 namun jumlah konsumsi beras terus naik sebesar 49.019.40

Grafik 2.14
Ketersediaan Beras (Ton) dan Jumlah Konsumsi Beras (Ton) Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

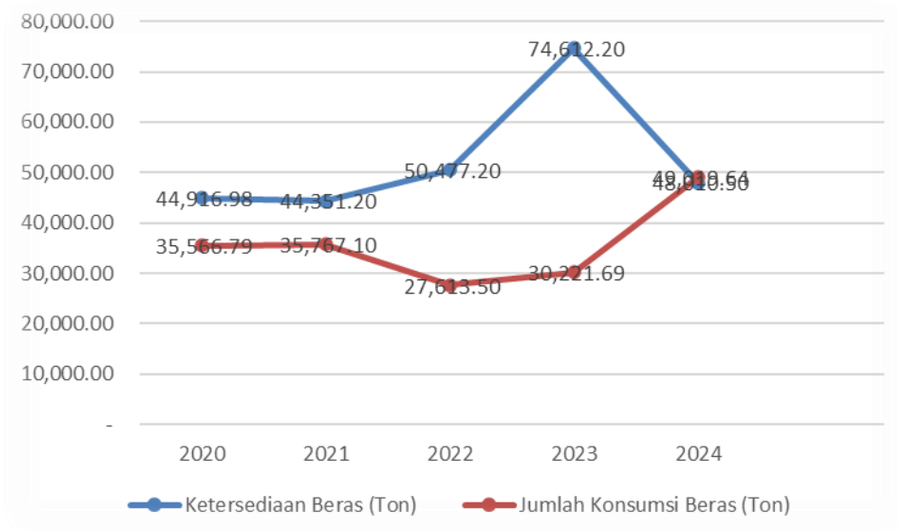

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, 2024

b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Untuk Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.55
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2024

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Energi Per Kapita Kapita (Kkal)	Na	2.626,00	2.688,00	3.197,00	3.202,00
2	Ketersediaan Protein Per Kapita (gram)	Na	83,72	77,31	82,03	84,72

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2024

Ketersediaan Energi Per Kapita Kapita (Kkal) Kabupaten Bangka pada tahun 2021 berjumlah 2.626,00 meningkat di tahun 2022 sebesar 2,688,00 dan terus meningkat di tahun 2023 sebesar 3.197,00 sampai tahun 2024 juga meningkat sebesar 3.202,00 begitu juga Ketersediaan Protein Per Kapita (gram) untuk tahun 2021 sebesar 83,72 menurun di tahun 2022 sebesar 77,72 dan meningkat lagi di tahun 2023 sebesar 82,03 hingga taahun 2024 juga terus meningkat sebesar 84,72.

2.1.7.2.15 Pertanahan

Indikator kinerja bidang pertanahan di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan yang sangat masif selama kurun waktu 2020 – 2024. Tahun 2020 persentase luas lahan yang bersertifikat mencapai 33,3 persen, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 30,4%. Pada Tahun 2022 persentase luas lahan yang bersertifikat mencapai 31,9% meningkat dibandingkan dengan tahun 2021, sedangkan pada tahun 2023 persentase jumlah luas lahan yang bersertifikat menurun Kembali menjadi sebesar 26%. Penurunan ini disebabkan karena adanya lahan yang dihibahkan kepada pihak lain. Tahun 2024, persentase luas lahan yang bersertifikat meningkat menjadi 27,95%.

Grafik 2.15
Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat
Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024

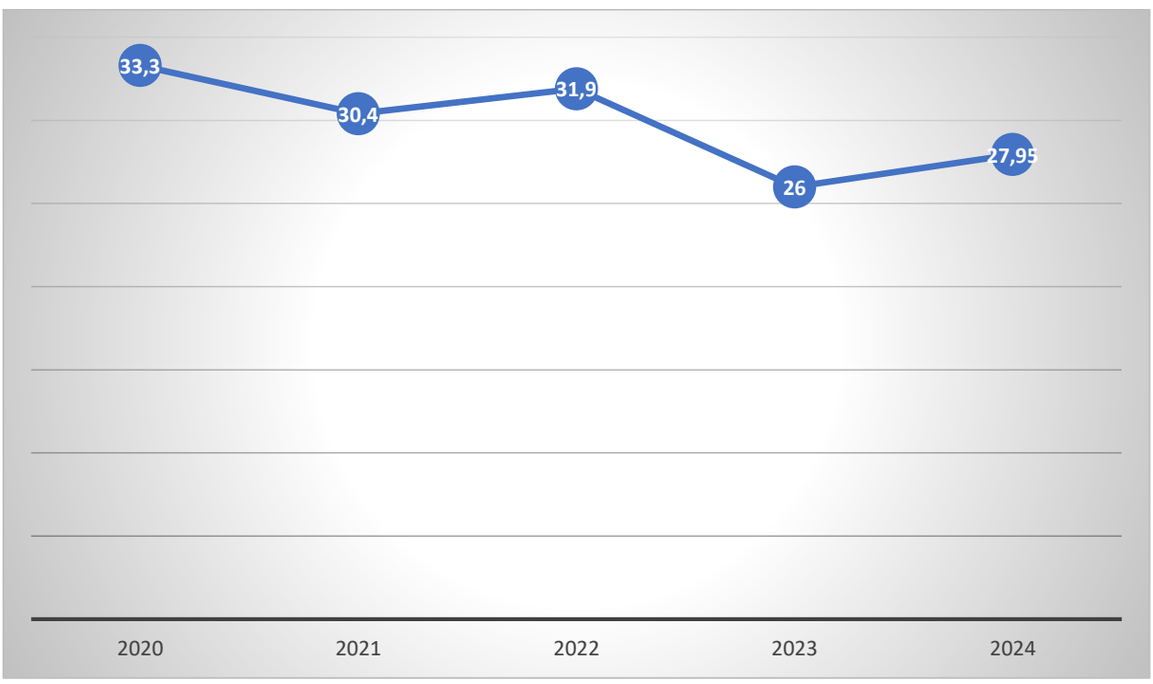

Sumber: DINPERKPP Kab Bangka, 2025

2.1.7.2.16 Lingkungan Hidup

Mengelola SDA yang lestari dapat dilakukan melalui revitalisasi dan refungsionalisasi *local wisdom* dan *local knowledge* dalam pengelolaan SDA dan lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat yakni dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat yang terkait dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pengelolaan SDA dan lingkungan. Selengkapnya perkembangan kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Bangka tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel 2.56.

Tabel 2.56
Perkembangan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan Sampah	98,91	88,22	87,5	81,9	52,51
Persentase Pengurangan Sampah	8,74	9,08	10,01	15,07	6,41
Jumlah TPS per Satuan Penduduk	0,25	0,15	1,03	1,06	0,01

Sumber : DLH Kabupaten Bangka, 2025

Persentase penanganan sampah perkotaan di Kabupaten Bangka tahun 2024 sebesar 52,51%, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 87,5%. Jika dilihat dari tabel, persentase pengurangan sampah semakin meningkat seiiring dengan bertambahnya jumlah TPS3R yang dibangun dan bank sampah yang perannya sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk pengelolaan sampah perkotaan Kabupaten Bangka pada tahun 2024 sebesar 96,16%, sedangkan pengelolaan sampah kabupaten sebesar 63,52% dengan kegiatan penanganan sampah sebesar 52,12% dan kegiatan pengurangan sampah sebesar 11,39%.

Indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan hidup daerah ini adalah Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah. Untuk memastikan kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka maka ditetapkan Sasaran pembangunan lingkungan hidup ini adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kinerja Lingkungan Hidup sebesar 65,84 pada tahun 2024 dan untuk Indeks

Ketahanan Bencana Daerah pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,50 dari 0,29 di tahun 2023.

Berikut ini tabel indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.57
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR SASARAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,22	66,38	64,91	65,84	64,76
2.	Indeks Resiko Bencana	NA	NA	NA	0,29	0,50

Sumber : DLH Kabupaten Bangka, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 mencapai 64,76, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang berada pada angka 65,84. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini merupakan akumulasi dari komponen Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Perkembangan komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.16
Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

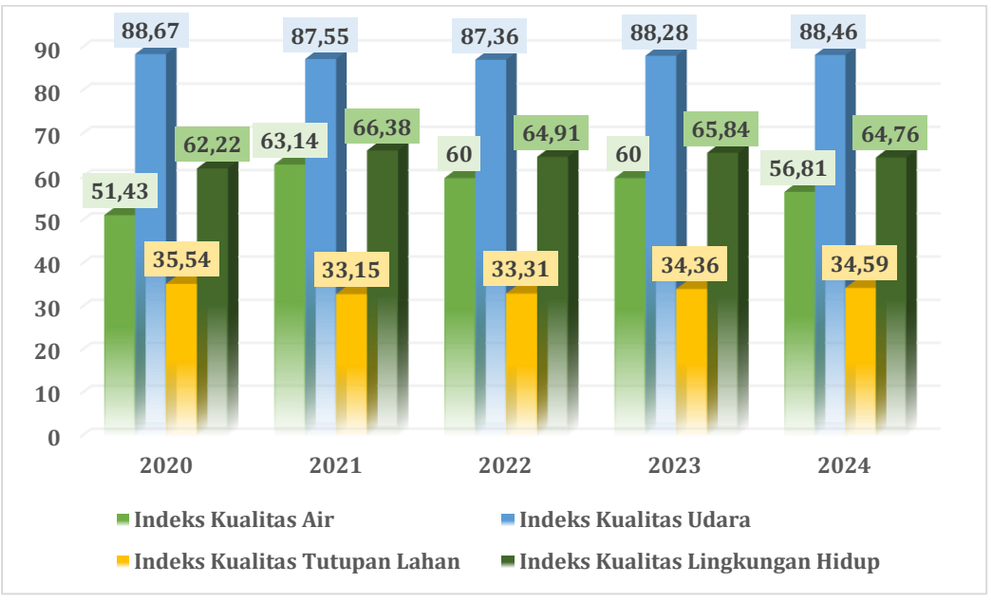

Sumber : DLH Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pengukuran indeks kualitas air sebesar 56,81, menurun dari tahun 2023 yang sebesar 60. Untuk hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Bangka pada tahun 2024 sebesar 88,46, mengalami kenaikan dibanding hasil pengukuran IKU pada tahun 2023 dengan nilai 88,28. Hasil pengukuran ini termasuk kategori baik. Hal ini dikarenakan konsentrasi NO_2 yang rata-rata berasal dari sektor transportasi masih rendah begitu juga dengan konsentrasi SO_2 yang rata-rata berasal dari sektor industri juga masih rendah. Untuk hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), nilai IKTL pada tahun 2024 sebesar 34,59 meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar 34,36.

Indikator lain yang menjadi indikator kinerja pencapaian sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup" adalah Indeks Ketahanan Bencana Daerah. Indeks Ketahanan Bencana Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

2.1.7.2.17 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya untuk pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menunjukkan capaian yang sangat baik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari persentase kepemilikan KTP pada tahun 2024 mencapai 98,73 persen, seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Perkembangan Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,97	0,98	1	1	0,99
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,89	0,90	0,97	0,99	0,99
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.79	0.48	0,48	0,62	0,67
4	Kepemilikan KTP (%)	99,36	99,37	100	99,32	98,73
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	95,67	90,42	96,82	97,80	98,27

Sumber : Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2024

Berdasarkan data pada Tabel di atas untuk kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2024 telah mencapai nilai sebesar **98.27%.**

2.1.7.2.18 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari indikator Indeks Desa Membangun dan persentase Desa Swasembada. Perkembangan capaian masing-masing indikator tersebut dalam periode 5 (Lima) tahun dari tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Perkembangan Rata - Rata Indeks Desa Membangun dan Persentase Desa Swasembada Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Rata-rata Indeks Desa membangun	0,6760	0,6842	0,7133	0,8169	0,8169
	Jumlah Desa Mandiri	0	1	8	17	17
	Jumlah Desa Maju	11	14	21	45	45
	Jumlah Desa Berkembang	51	47	33	0	0
	Jumlah Desa Tertinggal	0	0	0	0	0
2	Persentase Desa Swasembada (%)	25,81	27,42	46,77	37,09	37,09
	Jumlah Desa Swasembada	16	17	29	23	23
	Jumlah Desa se- Kabupaten Bangka	62	62	62	62	62

Sumber : Dinpemdes Kabupaten Bangka, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata Indeks Desa membangun Kabupaten Bangka mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 diangka 0,8169. Hal ini seiring dengan peningkatan status perkembangan desa, di mana pada tahun 2021 sudah ada 1 Desa dengan status mandiri, 14 Desa berstatus maju dan 51 Desa berstatus berkembang. Pada tahun 2022 status desa mandiri meningkat menjadi 8 Desa, 21 Desa berstatusmaju, dan 47 Desa berstatus berkembang. Pada tahun 2023 jumlah desa mandiri terus meningkat menjadi berjumlah 17 desa, 45 Desa berstatus maju, dan tidak ada lagi Desa berstatus berkembang hingga tahun 2024.

Analisis kinerja atas fokus layanan urusan wajib non dasar dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi Aspek Pelayanan Umum. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Tabel 2.60
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang PEMDES Kabupaten Bangka
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	62	62	62	62	62
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1	1	1	1	1
Persentase LSM aktif	0	0	0	0	0
Persentase LPM Berprestasi	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinpemdes Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7.2.19 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan pelaksanaan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut dalam program keluarga berencana perlu terus ditingkatkan untuk menekan jumlah angka kelahiran. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.

Tabel 2.61
Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Kabupaten Bangka
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PUS	51.938	51.798	48.332	52.230	53.495
2	Jumlah Peserta KB Aktif	40.804	40.300	35.796	38.617	40.235

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Bangka, 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024 jumlah PUS di Kabupaten Bangka sebanyak 53.495 pasangan. Sementara itu, jumlah peserta aktif sampai dengan November tahun 2024 sebanyak 40.235 orang, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.7.2.20 Perhubungan

Perkembangan sektor perhubungan dapat dilihat dari kondisi angkutan di Kabupaten Bangka. Dapat dilihat pada tabel di bawah bahwa jumlah angkutan umum di Kabupaten Bangka semakin menurun. Hal ini disebabkan karena beberapa kendaraan sudah tidak layak jalan. Selain itu tren di Kabupaten Bangka dimana masyarakat

cenderung memiliki kendaraan pribadi, baik kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Uji KIR tetap dilaksanakan pada setiap kendaraan di Kabupaten Bangka, namun dari data yang ada, uji KIR terdata pada angkutan umum saja dan jumlahnya cenderung menunjukkan penurunan setiap tahun.

Tabel 2.63
Jumlah Angkutan Umum dan Uji KIR Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Angkutan Umum	75	48	38	28	1689
2.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	102	76	128	73	1637

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bangka, 2025

Akan tetapi, sektor perhubungan tetap berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bangka. Tabel di bawah menunjukkan kontribusi sektor transportasi terhadap PDRB. Penurunan kontribusi terlihat dari tahun 2020 – 2021 yang dianggap diakibatkan dari dampak Covid-19. Pada tahun 2022, kontribusi sektor transportasi terlihat mulai meningkat. Diharapkan terjadi peningkatan kontribusi sektor transportasi pada tahun 2024.

Tabel 2.64
Kontribusi Sektor Transportasi Terhadap PDRB
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB	2,30%	2,22%	2,29%	2,51%	2,60%

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7.2.21 Komunikasi dan Informatika

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu hasil penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Bangka dalam 5 (Lima) tahun terakhir (2020 – 2024) menunjukkan trend peningkatan. Walaupun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan, tahun 2024 indeks SPBE Kabupaten Bangka kembali meningkat. Peningkatan

tersebut dinilai karena terdapat perkembangan dalam bidang komunikasi dan informatika, salah satunya dibentuknya forum Smart City Kabupaten Bangka. Selengkapnya terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65
Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,77	2,25	1,8	2,44	2,8
Kategori	Baik	Cukup	Cukup	Cukup	Baik

Sumber : Dinkominfotik Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7.2.22 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Secara kuantitatif perkembangan koperasi di Kabupaten Bangka menunjukkan tren yang stabil. Pada tahun 2020 jumlah koperasi aktif sebanyak 136 unit dan di tahun 2024 sebanyak 118 unit. Sementara jumlah usaha mikro yang ada di Kabupaten Bangka menunjukan tren fluktuatif pada tahun 2020 sebanyak 34.113 unit dan di tahun 2024 meningkat menjadi 37.622.

Tabel 2.66
Jenis dan Jumlah Koperasi, Usaha Besar, Menengah, Kecil, dan Mikro Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

NO	JENIS KOPERASI	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi Aktif (unit)	136	108	109	110	118
2	Koperasi Tidak Aktif (unit)	71	102	102	105	104
3	Jumlah Induk Koperasi (unit)	-	-	-	-	-
4	Jumlah Koperasi Primer (unit)	207	210	211	215	222
5	Jumlah KUD (unit)	8	8	8	8	8
6	Jumlah Non KUD (unit)	199	202	203	207	214
7	Pengusaha Besar	13	16	19	19	228
8	Pengusaha Menengah	48	48	48	49	31
9	Pengusaha Kecil	2.908	3.266	3.763	4.407	1.079
10	Pengusaha Mikro	34.113	32.118	31.379	31.379	37.622

Sumber : DINPMP2KUKM dan DINAKERINDAG Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7.2.23 Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama kurun waktu lima tahun terakhir sangat tergantung pada sektor pertambangan yang berasal dari komoditi biji timah, dan sektor penggalian yang berasal dari kaolin, pasir kwarsa dan lain-lain. Komoditi inilah yang banyak menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bangka, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk sektor perdagangan dan industri makanan merupakan sektor penunjang yang mempunyai peran cukup penting dikarenakan produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa. Sektor perdagangan dan industri makanan termasuk salah satu sektor yang mengalami peningkatan nilai tambah yang cukup signifikan selama 5 (Lima) tahun terakhir. Pada tahun 2024, sektor industri makanan berada pada posisi kedua setelah sektor pertambangan dalam sebaran investasi.

Nilai investasi di Kabupaten Bangka selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, seperti tersaji pada grafik 2.17.

Grafik 2.17
Nilai Investasi PMDN dan PMA
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

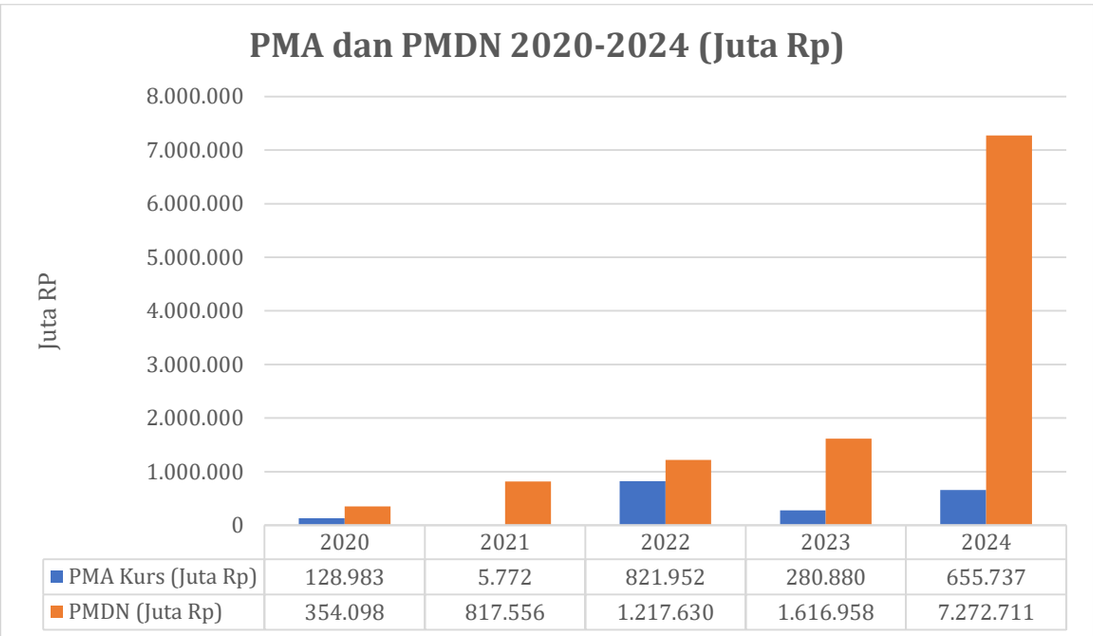

	2020	2021	2022	2023	2024
PMA Kurs (Juta Rp)	128.983	5.772	821.952	280.880	655.737
PMDN (Juta Rp)	354.098	817.556	1.217.630	1.616.958	7.272.711

Sumber : DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka, 2025

Pada tahun 2021 nilai investasi PMA di Kabupaten Bangka mengalami penurunan yang jika dibandingkan dengan Tahun 2020. Nilai PMA turun sebesar Rp. 123.211.000.000,- , sedangkan nilai PMDN naik menjadi sebesar Rp 463.458.000.000,-.

Pada tahun 2023 nilai investasi di Kabupaten Bangka PMDN sebesar Rp. 1.616.958.000.000,- dan PMA sebesar Rp. 280.880.000.000,-. Dan pada tahun 2024 nilai investasi di Kabupaten Bangka PMDN sebesar Rp 7.272.924.194.263,- dan PMA sebesar Rp 655.525.648.995,-.

Pada tahun 2024 terjadi lonjakan kenaikan nilai investasi yang sangat signifikan terhadap Penamaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Lonjakan kenaikan tersebut terjadi pada sektor pertambangan. industri makanan, industri logam dasar, dan tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

2.1.7.2.24 Kepemudaan dan Olahraga

Analisis kinerja atas penyelenggaraan layanan pada bidang urusan kepemudaan dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain jumlah lapangan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja, rasio gelanggang/balai remaja per 1000 penduduk dan rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

No	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Lapangan Olah Raga di Kabupaten	479	479	479	323	323
2	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja di Kabupaten	11	10	11	10	10
3	Rasio Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
4	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk	1,46	1,45	1,43	0,95	0,94

Sumber : Dinparbud dan Dindikpora Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7.2.25 Statistik

Kinerja penyelenggaraan layanan bidang Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka diukur melalui indikator persentase ketersediaan data informasi indikator yang akurat dan *up to date*, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada berikut.

Tabel 2.68
Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Statistik
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan data informasi statistik yang akurat dan up to date	0%	0%	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinkominfotik Kab. Bangka, 2025

Dari tahun 2022 hingga tahun 2024 indikator ketersediaan data informasi statistik pada Dinas Kominfotik dengan capaian 100 persen.

2.1.7.2.15 Kebudayaan

Analisis kinerja atas penyelenggaraan layanan pada bidang urusan kebudayaan dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kebudayaan
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

No	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	0	0	6	6	5
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	0	0	10	10	10

Sumber : Dinparbud dan Dindikpora Kabupaten Bangka, 2025

Pada tahun 2021 capaian pembangunan penyelenggaraan festival seni dan budaya tidak dapat terlaksana akibat wabah Virus Corona (COVID-19). Semua kegiatan dihentikan untuk mencegah penyebaran virus. Pada tahun 2024 capaian pembangunan penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 5 kali.

2.1.7.2.16 Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peranan strategis untuk turut mendukung peningkatan kecerdasan bangsa khususnya di Kabupaten Bangka. Di era globalisasi seperti saat ini, keunggulan suatu bangsa ditentukan oleh keunggulannya dalam pengusaan informasi. Jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan daerah Kabupaten Bangka hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang meningkat.

Tabel 2.70
Jumlah Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koleksi judul buku di Perpustakaan daerah	12.643	12.643	12.643	11.979	11.793
2	Jumlah koleksi buku di Perpustakaan daerah	18.751	18.751	18.751	17.590	20.135
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan selama 1 tahun	143.486	1.504	521	5.503	5.309

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, 2025

Pada tahun 2024, jumlah koleksi judul buku sebanyak 11.793 judul buku, jumlah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah koleksi buku pada tahun 2024 sebanyak 20.135. Jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun pada tahun 2024 berjumlah 5.309 orang.

2.1.7.2.17 Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan layanan bidang Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka diukur melalui beberapa indikator, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kearsipan Kabupaten Bangka
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemdes yang tertib arsip (baku, sesuai ketentuan Permendagri)	17,4	30,43	40,9	56,52	78,26

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemdes yang dibina dan dilatih (pembinaan dan pelatihan pengelola arsip)	64,29	100	100	100	100
3.	Persentase arsip dinamis dan statis yang terdata dan tertata baik (sama dengan terselamatkan, tidak kacau)	73,91	78,91*	93	93	95
4.	Persentase arsip dinamis dan statis yang tertata dan terpelihara baik (dirawat)	73,91	78,91*	100	100	100
5.	Persentase Arsip Statis Daerah yang diselamatkan dan dilestarikan (didata arsip statis)	50,00	52,31	65	65	75

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakan Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan Tabel 2,71, persentase OPD, Kelurahan dan Pemdes yang tertib arsip mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, sehingga pada tahun 2024, lebih dari 50% OPD, Kelurahan dan Pemdes yang tertib arsip. Hal ini dikarenakan telah dilakukan pembinaan dan pelatihan pengelola arsip secara menyeluruh kepada OPD, Kelurahan, dan Pemdes.

Sedangkan, pada tahun 2024, persentase arsip dinamis dan statis yang terdata dan tertata baik sebesar 95%, arsip dinamis dan statis yang tertata dan terpelihara baik sebesar 100%, serta arsip statis daerah yang diselamatkan dan dilestarikan sebesar 75%.

2.1.7.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.7.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sub sektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang memiliki sumber daya laut yang relatif besar untuk dikembangkan. Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah tangkapan perikanan laut sampai dengan tahun 2024 sebanyak 28.347,576 ton, naik sebesar 3.524,96 ton dari tahun 2023. Ketersediaan sarana

kapal penangkap ikan di laut pada tahun 2024 berkurang 176 unit menjadi total sebanyak 2.573 unit.

Tabel 2.72
Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024

URAIAN	TAHUN						SATUAN
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Perikanan Laut							
1. Jumlah Tangkapan	26.214	26.994	27.923,83	28.055,24	24.822,61	28.347,576	Ton
2. Jumlah Kapal Penangkap Ikan	2.842	2.720	2.725	2.747	2.749	2.573	Unit
3. Jumlah Rumah Tangga Perikanan	2.899	2.972	2.995	2.977	3.012	2.573	RTP
4. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	1	1	1	1	1	1	Unit
Perikanan Darat							
1. Tambak							
a. Luas	271,26	271,02	361,895	170,337	170,337	171,5	Ha
b. Jumlah Produksi Perikanan Darat	1.925,21	1.910,61	3.389,522	2.373,219	1.512,101	-	Ton
2. Kolam							
a. Luas	32,27	33.12	22,591	22,590	22,590	22,59	Ha
b. Jumlah Produksi Rumah Tangga	200,28	212,32	165,999	295,594	275,951	-	Ton

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, 2024

2.1.7.3.2 Pariwisata

Salah satu sektor yang diharapkan untuk menunjang perekonomian di Kabupaten Bangka adalah sektor pariwisata. Menipisnya cadangan sumber daya alam terutama timah yang menjadi tumpuan industri ekstraktif membuat pemerintah daerah perlu untuk

segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dianggap cukup potensial untuk dikembangkan karena potensi pariwisata Kabupaten Bangka yang sagat besar, menjadi harapan penunjang sektor lainnya sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Hal itu terlihat dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dan *spending of money tourism* selama kurun waktu 2019-2023 seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan *Spending of Money Tourism*
Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	90.714	91.563	234.455	251.292	276.484	296,317
2	*Spending Of Money Tourism*	Milyar/tahun	16,31	16,90	121,942	154,277	191,863	197,961

Sumber : Dinparbud Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7.3.3 Pertanian

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bangka merupakan program prioritas karena terkait dengan peningkatan ketahanan pangan daerah. Berikut data produksi sector pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.74
Luas Produksi, Jumlah Produksi dan Jumlah Konsumsi
Tanaman Padi, Jagung dan Singkong Kabupaten Bangka Tahun 2019–2024

Uraian	Capaian						Satuan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	
A. Padi							
1). Luas Areal Produksi (Panen)	5.315,70	6.079,38	4.365,45	4.154,80	2.993,05	3.028,07	Ha
2). Jumlah Produksi	10.092,50	14.977,38	12.317,30	11.635,25	8.473,07	8.585,80	Ton
3). Jumlah	30.498,70	40,460	27.022,53	27.613,5	26.881,26		Ton/Tahun

Uraian	Capaian						Satuan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	
Konsumsi Beras							
B. Jagung							
1). Jumlah Areal Produksi (Panen)	759,9	358,1	262	240,45	59,15	42,25	Ha
2). Jumlah Produksi	3.799,50	1.848,08	1.319,34	1.203,41	295,25	211,25	Ton
3). Jumlah Konsumsi	637,5	648,1	128,22	131,9	468,08		Ton/tahun
C. Singkong dan Hasil Umbi-Umbian (Ubi jalar dan talas)							
1). Luas Areal Produksi (Panen)	2.049,00	2.158,10	2.093,40	1.615,50	1.480,76	1.367,85	Ha
2). Jumlah Produksi	28.281,00	44.557,70	57,581	47.782,50	38.502,55	37.574,51	Ton
3). Jumlah Konsumsi	10.697,50	32,000	3.718,403	5.278,5	7.255,26		Ton/tahun

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 luas panen padi seluas 3.028,07 hektar dengan produksi sebesar 8585,80 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Bangka terhadap beras dari luar daerah masih tinggi.

Jumlah areal produksi untuk tanaman jagung sampai dengan tahun 2024 seluas 42,25 Ha, demikian juga dengan produksi jagung pada tahun 2024 menjadi 211,25 ton.

Tabel 2.69 juga menunjukkan bahwa luas areal produksi jenis singkong dan umbi-umbian (talas dan ubi jalar) pada tahun 2024 menurun menjadi 1.367,85 Ha dibandingkan tahun sebelumnya seluas 1.480,76 Ha.

2.1.7.3.4 Perdagangan

Keberhasilan pelaksanaan Urusan Perdagangan di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Dari tabel berikut, diketahui bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB cenderung menurun dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2019 - 2021. Penurunan yang terjadi akibat kontraksi ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Namun pada tahun 2022, kontribusi sektor perdagangan meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 sebesar 12,29% menjadi 13,15% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bangka menurun menjadi 13,13%. Pada tahun 2024 angka kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bangka menurun menjadi 12,62%.

Tabel 2.75
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bangka
Tahun 2019 – 2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,09%	13,02%	12,29%	13,15%	13,13%	12,62%

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7.3.5 Industri

Pelaksanaan urusan industri di Kabupaten Bangka salah satunya terkait pembinaan terhadap kelompok UMKM. Di bawah ini ditampilkan data cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Bangka. Terlihat bahwa pembinaan yang dilakukan kepada para pengrajin di Kabupaten Bangka semakin dapat diakses oleh para kelompok pengrajin. Dari 7 kelompok pengrajin di Kabupaten Bangka hingga tahun 2023 berkisar 71% yang sudah dibina dari 43% pengrajin pada tahun 2019. Pada tahun 2024 ini kelompok pengrajin bertambah menjadi 6 kelompok yang mendapatkan bantuan binaan pemda, 8 kelompok pengrajin dengan cakupan bina kelompok penngarjin menjadi 75%. Diharapkan di tahun mendatang, seluruh kelompok pengrajin dapat memperoleh bantuan binaan pemda dan akan bermunculan kelompok – kelompok pengrajin yang baru.

Tabel 2.76
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Jumlah kelompok pengrajin yang	3	4	4	4	5	6

	mendapatkan bantuan binaan pemda						
2	Jumlah kelompok pengrajin	7	7	7	7	7	8
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	43%	57%	57%	57%	71%	75%

Sumber : Dinas Nakerindag Kabupaten Bangka, 2025

Sektor industri juga berkontribusi terhadap PDRB. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB. Dari tabel berikut, diketahui bahwa Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 21,42% mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 21,56%. Kemudian dari tahun 2020 ke tahun 2022, kontribusi sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 26,01% pada tahun 2022 tahun 2023 menurun menjadi 25,26% dan tahun 2024 naik menjadi 25,67%.

Tabel 2.77
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,42%	21,56%	24,22%	26,01%	25,26%	25,67%

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang

2.1.7.4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Inspektorat. Adapun salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Perkembangan hasil EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka selama beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin baik, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Perkembangan Hasil EKPPD Terhadap LPPD
Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
TAHUN LPPD	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SKOR EKPPD	3,2853	3,5611	3,5611	3,5611	3,5611	3,1096
PERINGKAT NASIONAL	60	-	-	-	-	-

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7.4.2 Bidang Perencanaan

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang perencanaan adalah hasil penilaian perencanaan dan pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tingkat Provinsi dan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada tingkat Nasional.

Selama lima tahun terakhir, perkembangan hasil penilaian terhadap perencanaan dan pembangunan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79
Hasil Penilaian Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
HASIL PENILAIAN TINGKAT PROVINSI	Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2019	Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2020	Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2021	Peringkat II Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2022	-	-
HASIL PENILAIAN TINGKAT NASIONAL	Penghargaan Top 6 Perencanaan & Pembangunan Daerah Nasional 2019	Penghargaan Top 3 Perencanaan & Pembangunan Daerah Nasional 2020	Penghargaan Top 1 Perencanaan & Pembangunan Daerah Nasional 2021	Penghargaan Top 6 Perencanaan & Pembangunan Daerah Nasional 2022	-	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

Indikator lain yang juga dapat digunakan untuk melihat tingkat kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang perencanaan adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah khususnya pada komponen perencanaan kinerja. Berdasarkan

hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Pemkab Bangka mengalami perbaikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Komponen Perencanaan Kinerja)
Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hasil Penilaian AKIP (Komponen Perencanaan Kinerja)	22,95	23,57	23,75	23,76	23,76	23,83

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7.4.3 Bidang Keuangan

Urusan Penunjang Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang merupakan penggabungan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka selama lima tahun terakhir semakin membaik, dalam hal ini dapat dilihat melalui opini hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81
Opini Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024

URAIAN	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opini Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap LKPD Pemkab Bangka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPPKAD Kabupaten Bangka, 2025

2.1.7.4.4 Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah

Fokus layanan pada Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat profesionalitas ASN pada instansi pemerintah termasuk Pemkab Bangka adalah Indeks Profesionalitas ASN yang diatur melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi (pendidikan formal), Kompetensi (Riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya), Kinerja (penilaian kinerja berdasarkan perencanaan kinerja individu dan organisasi), dan Disiplin (riwayat hukuman disiplin).

Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Pemkab Bangka selama empat tahun terakhir, walaupun masih berada pada kategori "Rendah", akan tetapi menunjukkan perbaikan secara kontinyu, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Profesionalitas ASN	67,26	63,73	63,86	64,00	65,14
Kategori	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks Profesionalitas ASN Pemkab Bangka pada tahun 2019 masuk kategori "Rendah" dengan nilai 67,26. Hal ini dikarenakan adanya perubahan formulasi pengukuran berdasarkan ketentuan dari pusat. Selanjutnya dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, maka pada tahun 2020 Indeks Profesionalitas ASN kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 63,73 dengan kategori "Rendah", namun untuk tahun 2021 Indeks Profesionalitas ASN turun lagi menjadi sebesar 63.86 dengan kategori "Rendah". Untuk tahun 2022 dan 2023, Indeks Profesionalitas ASN naik menjadi 64,00 dan 65,14 masih dengan kategori "Rendah".

2.1.7.4.5 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan salah satu fokus utama adalah mendorong seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka agar melakukan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik kepada masyarakat.

Perkembangan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemkab Bangka termasuk salah satu pemerintah daerah dengan kategori "Sangat Inovatif" berdasarkan hasil penilaian *Innovative Government Award* (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Bangka dalam lima tahun terakhir juga selalu

mendapatkan apresiasidalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahkan beberapa inovasi berhasil menembus Top 35, Top 45 dan Top 99 Inovasi Terbaik, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.83
Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Bangka Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) Tahun 2019-2024

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
1	2019	12 inovasi	1	Anak Bangka Sehat Cerdas (ABSC)	DINKES	2 inovasi TOP 99
			2	Gerlingan ODGJ	DINKES	Ransel Si Dora
			3	Ojek Lansia	DINKES	Ojek Lansia
			4	Matras TB	DINKES	
			5	SMS Bunda Cerdas	DINKES	1 inovasi TOP 45
			6	Perburuan Ibu Hamil Risiko Tinggi Si Resti Cikar	DINKES	Ransel Si Dora
			7	Ransel Si Dora	DINKES	
			8	”Nganggung” Germas	DINKES	
			9	Si Manis Teman Kelompok Wanita Tani	PANGAN	
			10	Pintu Kite	DIN PMP2KUKM	
			11	PORCATWIN 5 in 1	DINKES	
			12	”Lada Putih” RSUD Depati Bahrin Turunkan AKI/AKB	RSUD DEPATI BAHRIN	
2	2020	14 inovasi	1	Laboratorium Terpadu Publikasi Inovasi Bangka (LA REPUBLIKA)	BAPPEDA	
			2	Kesejahteraan Masyarakat Bangka Dengan Sistem dan Aplikasi (Kembang Desa)	BAPPEDA	
			3	GERBANG LESTARI (Gerakan Pembangunan Melestarikan Lingkungan)	BAPPEDA	
			4	Si Tumbuh Cerdas (Aksi Kolaborasi Penurunan Stunting Agar Bayi Hidup Cerdas dan Sehat)	BAPPEDA	
			5	Timah Corner sebagai Efektifitas Upaya Penyelamatan Arsip Sejarah Timah Bangka di Kabupaten Bangka	DINAS KEARSIPAN PERPUSTAKAAN	
			6	Nyaman Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Dibalik Kocokan Arisan “Ibu”	DINKES	
			7	PAMOR KANCIL	DINKES	
			8	SMART-IN PIRT	DINKES	

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
			9	"GERLINGAN ODGJ" Gerakan Perlindungan ODGJ	DINKES	
			10	"Matras" TBC	DINKES	
			11	ABANG TIMAH UNTUK BU DISA (Lahan Bekas Tambang Timah Untuk Budidaya Padi Sawah)	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	TOP 99
			12	Peningkatan Layanan Paten dengan Sistem Aplikasi	KECAMATAN BAKAM	
			13	"SILADA PUTIH" RSUD DEPATI BAHRIN TURUNKAN AKI/AKB	RSUD DEPATI BAHRIN	
			14	Open Links : Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Sekolah Oleh Seluruh Warga Sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua dan Peserta Didik) Dalam Rangka Memperkuat Pembentukan Karakter di SD Negeri 12 Sungailiat Kabupaten Bangka	SDN 12 Sungailiat	
3	2021	14 inovasi	1	SI LUKI DAN SI EKO TEMAN BAIK (Reklamasi Laut untuk Pemulihan Ekosistem Lautan dan Penanganan Perubahan Iklim)	BAPPEDA	
			2	Pundok Digital Informatika Setara	DINKOMINFOTIK	
			3	KOLAK BESTI 2023 (Kolaborasi untuk Bangka Bebas Stunting 2023)	BAPPEDA	
			4	PAK KASTAMA UNTUK BU IRTA	DINAS PERIKANAN	
			5	Eccovillage Strategi Ketahanan Pangan Keluarga Di Masa Dan Pasca Pandemi	KEC. MENDO BARAT	
			6	DIBUKA TABUNGAN UNTUK MENIKAH (Subsidi Bunga Kredit Usaha Perorangan Tanpa Syarat Berat dengan Cicilan Ringan untuk Usaha Mikro Se Kabupaten Bangka Agar Omset Meningkat dan Bertambah	DINPMP2KUKM	
			7	RUMPIS (Rumah Pusat Informasi Serviks)	KECAMATAN SUNGAILIAT	
			8	INTAN ANGGUN (Pinjaman Tanpa Bunga Tanpa Anggunan)	BAPPEDA	
			9	GERBANG MULYA (Gerakan Bangka Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama)	DINAS SOSIAL	

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
			10	HERBAL BALLS (Terapi Komplementer Untuk Membantu Dalam Mengatasi Nyeri dan merangsang Kontraksi Miometrium)	RSUDDB	
			11	IPB BOGOR (Industri Pangan Berkelanjutan Berbasis Sagu Rumbia; Inovasi Berbasis Halal, Digital dan Integral	BAPPEDA	
			12	DULANG YAMANI PRIDE Disabilitas (Dulang Yamani Peduli, Responsif, Digital, Efektif terhadap Disabilitas)	RSUDDB	
			13	SI INTAN HUTAN KOTA SUNGAILIAT	DLH	
			14	LETS GO (Layanan Emergency Tanggap Sigap dan Gratis Secara Online)	DINKES	
4	2022	17 Inovasi	1	SI LUKI DAN SI EKO TEMAN BAIK (REKLAMASI LAUT UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM LAUTAN DAN PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM)	BAPPEDA	
			2	ABANG TIMAH UNTUK BU DISA (LAHAN BEKAS TAMBANG TIMAH UNTUK BUDIDAYA PADI SAWAH)	DINPANPERTAN	
			3	PUNDOK DIGITAL INFORMATIKA SETARA	DINKOMINFOTIK	
			4	KOLAK BESTI 2023 (KOLABORASI UNTUK BANGKA BEBAS STUNTING 2023)	BAPPEDA	
			5	PAK KASTAMA UNTUK BU IRTA	DINPERKAN	
			6	ECCOVILAGE STRATEGI KETAHANAN PANGAN KELUARGA DI MASA DAN PASCA PANDEMI	KEC. SUNGAILIAT	
			7	RANSEL SI DORA	DINKES	
			8	DIBUKA TABUNGAN UNTUK MENIKAH (SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA PERORANGAN TANPA SYARAT BERAT DENGAN CICILAN RINGAN UNTUK USAHA MIKRO SE KABUPATEN BANGKA AGAR OMSET MENINGKAT DAN BERTAMBAH)	DINPMP2KUKM	
			9	NYAMAN STOP “BABS” DIBALIK KOCOKAN ARISAN IBU	DINKES	

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
			10	RUMPIS (RUMAH PUSAT INFORMASI SERVIKS)	KEC. SUNGAILIAT	
			11	INTAN ANGGUN (PINJAMAN TANPA BUNGA TANPA AGUNAN)	BAPPEDA	
			12	GERBANG MULYA (GERAKAN BANGKA MENINGKATKAN UPAYA PELAYANAN SOSIAL BERSAMA)	DINSOS	
			13	"HERBAL BALLS" TERAPI KOMPLEMENTER UNTUK MEMBANTU DALAM MENGATASI NYERI DAN MERANGSANG KONTRAKSI MIOMETRIUM	RSUD DEPATI BAHRIN	
			14	IPB BOGOR (INDUSTRI PANGAN BERKELANJUTAN BERBASIS SAGU RUMBIA: INOVASI BERBASIS HALAL, DIGITAL DAN INTEGRAL)	BAPPEDA	
			15	DULANG YAMANI PRIDE DISABILITAS (DULANG YAMANI PEDULI, RESPONSIF, DIGITAL EFEKTIF TERHADAP DISABILITAS)	RSUD DEPATI BAHRIN	
			16	SI INTAN HUTAN KOTA SUNGAILIAT	DLH	
			17	LAYANAN EMERGENCY TANGGAP SIGAP DAN GRATIS SECARA ONLINE (LETS GO	DINKES	
5	2023	19 Inovasi	1	ABANG TIMAH UNTUK BU DISA (Lahan Bekas Tambang Timah Untuk Budidaya Padi Sawah)	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			2	EMERGENCY RESCUE BRIGADE (ERB)	SPGDT	
			3	GERAKAN 1001 INOVASI UNTUK PELAYANAN PUBLIK PRIMA	BAPPEDA	
			4	GERBANG LESTARI (Gerakan Pembangunan Melestarikan Lingkungan)	BAPPEDA	
			5	HARUMI BERSERI (Herbal Untuk Mama Inspiratif, Bersalin Bebas Nyeri)	DINKES	
			6	IBU JARI (Inseminasi Buatan Menjangkau Negeri)	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			7	INDUSTRI PANGAN BERKELANJUTAN BERBASIS SAGU RUMBIA: INOVASI BERBASIS HALAL, DIGITAL DAN INTEGRAL	BAPPEDA	

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
			8	KITE PACAK (Kegiatan Teknis Penandaan Dan Pencatatan Ternak)	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			9	MODEL TERBAIK ATASI KETIMPANGAN PENDAPATAN DENGAN FOKUS PENINGKATAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH		
			10	NYAMAN STOP BABS DIBALIK KOCOKAN ARISAN IBU	DINKES	
			11	PENDONOR EMERGENCY KARYAWAN RSUD DEPATI BAHRIN (PENDEKAR RSDB)	RSUD DEPATI BAHRIN	
			12	PERBURUAN ANAK PUTUS SEKOLAH	DINDIKPORA	
6	2024		13	PESAN KU KAWAN (Penataan Kawasan Kumuh Skala Kawasan Nelayan)	DINPERKPP	
			14	RANSEL SI DORA	DINKES	
			15	REKLAMASI LAUT	BAPPEDA	
			16	SAPI KURBAN (Subsidi Usaha Perorangan / Mikro Melalui Kredit Usaha Rakyat Bunga Nol Persen)	DINPMP2KUKM	
			17	SEKOLAH INOVASI	BAPPEDA	
			18	TERAPUNG SUNGAI (Wisata Keramba Kampung Pasir Sungailiat)	DINPERKPP	
			19	TREC MATRAS SUTRA (Tim Reaksi Cepat melayani Masyarakat Prioritas dan Suku Terasing)		
			1	GERBANG LESTARI (Gerakan Pembangunan Melestarikan Lingkungan)	BAPPEDA	
			2	RANSEL SI DORA	DINKES	
			3	REKLAMASI LAUT	BAPPEDA	
			4	ABANG TIMAH UNTUK BU DISA (Lahan Bekas Tambang Timah untuk Budidaya Padi Sawah)	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

2.1.8. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, baik domestik ataupun internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur dan iklim berinvestasi.

2.1.8.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.8.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi perkapita di Kabupaten Bangka disajikan pada tabel 2.84.

Tabel 2.84
Pengeluaran Per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita dan Pengeluaran Konsumsi Makanan Per Kapita
Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	12.416	12.424	12.863	13.146	13.205
Pengeluaran konsumsi non makanan per kapita (%)	47,55	47,52	43,60	47,88	47,12
Pengeluaran konsumsi makanan per kapita (%)	52.45	52,48	56,40	52,12	52,88

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Bangka selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang terus mengalami kenaikan. Pengeluaran per kapita pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023, yaitu dari 13,146 juta rupiah/orang/tahun menjadi 13,205 juta rupiah/orang/tahun.

Sementara itu untuk pengeluaran konsumsi bukan makanan pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 47,12 persen dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 47,88 persen. Pada tahun 2024 pengeluaran konsumsi makanan mengalami peningkatan menjadi 52,88 persen.

Peningkatan pengeluaran per kapita tersebut bisa dipicu oleh banyak faktor antara lain bertambahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup (meningkatnya konsumsi barang dan jasa) atau juga bisa disebabkan oleh kenaikan harga. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat. Pengeluaran perkapita ini juga sangat dipengaruhi oleh harga timah dan kelapa sawit di pasaran mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bangka sangat terikat dengan timah dan kelapa sawit.

2.1.8.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani.

Tabel 2.85
Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani	113,46	124,50	125,95	118,32	133,51

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2020-2024 Nilai Tukar Petani menunjukkan tren yang semakin meningkat, meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan pada angka 118,32. Pada tahun 2020 sebesar 113,46, dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 133,51.

2.1.8.1.3 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan memberikan gambaran tentang kemampuan nelayan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya. NTN tahun 2022 sebesar 113,20 berarti harga produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan subsektor perikanan tangkap lebih tinggi dari harga barang/jasa yang dikonsumsi dan biaya produksi nelayan subsektor perikanan tangkap.

Tabel 2.86
Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Nilai Tukar Nelayan	113,20	113,28	112,30	112,30	Tidak dirilis

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2020-2024, NTN menunjukkan tren yang menurun.

2.1.8.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator: angka kriminalitas, lama proses perijinan, jenis pajak dan retribusi daerah, dan jumlah perda yang mendukung iklim usaha.

2.1.8.2.1 Angka kriminalitas

Angka kriminalitas di Kabupaten Bangka dari tahun 2020 – 2024 cenderung fluktuatif. Berikut tabel angka kriminalitas di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024.

Tabel 2.87
Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

No	Jenis Kriminal	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	311	189	231	153	208
2.	Jumlah Penduduk	320.552	323.107	327.394	332.964	**337.755**
3.	**Angka Kriminalitas**	**0,00097**	**0,00058**	**0,00070**	**0,00046**	**0,00061**

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2024 (data diolah)

Tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun pada tahun 2020 sempat berjumlah 311 dan mulai menurun ditahun berikutnya yaitu tahun 2021 dengan jumlah 189 namun kembali meningkat di tahun 2022 dengan jumlah 231 dan menurun lagi ditahun 2023 dengan jumlah 153 namun tahun 2024 kembali meningkat dengan jumlah 208..

2.1.8.2.2 Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM. Adapun penerbitan perizinan yang dilayani meliputi 14 (empat belas) bidang, yaitu :

1) Bidang Kesehatan
2) Bidang Pekerjaan Umum
3) Bidang Perindustrian dan Perdagangan
4) Bidang Perhubungan
5) Bidang Lingkungan Hidup
6) Bidang Usaha Kepariwisataan
7) Bidang Pertanahan
8) Bidang Peternakan
9) Bidang Pendapatan
10) Bidang Perikanan
11) Bidang Sosial dan Tenaga Kerja
12) Bidang Pertanian dan Perkebunan
13) Bidang Penanaman Modal dan KUKM
14) Bidang Pendidikan

Dalam rangka mendorong investasi melalui percepatan penerbitan perijinan usaha, maka diterbitkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Non Perizinan Di Kabupaten Bangka di mana penandatanganan perizinan langsung dilakukan oleh Kepala PTSP sehingga proses penerbitan perizinan lebih cepat.

2.1.8.2.3 Pajak dan Retribusi Daerah

Salah satu komponen penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah di sektor pajak dan retribusi. Beberapa regulasi sudah diterbitkan untuk mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yaitu :

- Peraturan Daerah Bangka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2020;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018;

- Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka, terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 65 Tahun 2021;
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perforasi Atas Bukti Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2020;
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Untuk Jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2021;
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Bangka; dan
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha untuk Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Dibawah ini dijelaskan beberapa jenis Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang ada di Kabupaten Bangka :

1. Pajak Daerah terdiri dari :
    a. Pajak Hotel
    b. Pajak Restoran
    c. Pajak Hiburan
    d. Pajak Reklame
    e. Pajak Penerangan Jalan
    f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
    g. Pajak Parkir
    h. Pajak Air Tanah
    i. Pajak Sarang Burung Walet
    j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
    k. Pajak BPHTB
2. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
    a. Retribusi Pelayanan Persampahan
    b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
    c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

3. Retribusi Jasa Usaha :
   a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
   b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
   c. Retribusi Palayanan Pasar
   d. Retribusi Terminal
   e. Retribusi Tempat Khusu Parkir
   f. Retribusi Rumah Potong Hewan
   g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
   h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4. Retribusi Perizinan Tertentu :
   a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
   b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
   c. Retribusi Izin Trayek
   d. Retribusi Izin Usaha Perikanan
   e. Retribusi Perpanjangan IMTA

2.1.8.2.4 Regulasi Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Penataan regulasi di Kabupaten Bangka dalam rangka mendukung iklim usaha dan investasi sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2009. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha lainnya yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bangka dapat mengembangkan usaha secara efisien sesuai dengan ketentuan peraturan daerah di Kabupaten Bangka. Regulasi yang sudah diterbitkan untuk mendukung iklim usaha antara lain :

1. Peraturan Daerah Bangka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2020;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perubahan terakhir melalui Perda Nomor 1 Tahun 2018;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perubahan terakhir melalui Perda Nomor 5 Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perubahan terakhir melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Perusahaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Bangka;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Jalan di Kabupaten Bangka;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bangka;
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan di Kabupaten Bangka;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bergulir;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangka;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 29 Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17B Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Pariwisata;
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka;
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17A Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan;
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Objek Wisata Bahari di Wilayah Kabupaten Bangka;
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pengunaan Aplikasi Smart in PIRT dalam Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Bangka;
32. Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Elektronik
33. Peraturan Bupati Bangka Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bangka;
34. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bangka Tahun 2020 – 2024, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 78 Tahun 2021;
35. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Bangka
36. Peraturan Bupati Bangka Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Bangka; dan
37. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40A Tahun 2020 tentan Masterplan Kawasan Pantai Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2020-2030;
38. Peraturan Bupati Bangka Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik;
39. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10 Tahun 2021 tentan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Perorangan di Kabupaten Bangka;

40. Peraturan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Ternak Pemerintah pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka;
41. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
42. Peraturan Bupati Bangka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
43. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentan Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka;
44. Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perforasi Atas Bukti Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah;
45. Peraturan Bupati Bangka Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bangka.
46. Peraturan Bupati Bangka Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemutakhiran Data Dan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
47. Peraturan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah
48. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
49. Peraturan Bupati Bangka Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

2.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bangka harus melakukan penyesuaian dan penyelarasan prioritas pembangungan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah :

Pertama, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka sudah melakukan integrasikan dan penyelarasaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang digunakan pada tahapan :

a. Perencanaan pembangunan daerah
b. Perencanaan anggaran daerah
c. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
d. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

e. Pertanggungjawaban keuangan daerah

f. Analisis informasi pemerintahan daerah lainya

Tahapan tersebut diaplikasikan ke SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Kedua, pada triwulan I Presiden Republik Indonesia mengumumkan Pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Bangka merespon hal tersebut dengan melakukan penghentian kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak urgen untuk masyarakat, melakukan perubahan RPJMD, serta beberapa kali melakukan refocusing anggaran.

Adapun evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bangka Triwulan I-IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN BANGKA
TRIWULAN IV TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
		1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.123.918.239.193				347.909.006.544,80			40.849.516.876			81.923.226.635			73.486.127.379			135.534.444.672			331.822.149.061		331.822.149.061		29,52	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (74.24)				BB (74,02)		0,00			BB (74,38)									BB (74,38)							
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / KABUPATEN KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	26,52	606.866.310.308		-	26,48	247.536.382.529	0,00		38.092.130.076	22,86		65.954.324.548	0,00		62.031.825.958	0,00		71.104.772.455	22,86		237.183.053.037	22,86	237.183.053.037	86,20	39,08	DINDIKPORA
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	10,18				10,14		0,00			12,14			0,00			0,00			12,14			12,14		#####		
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00				0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		100		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup	71,00				67,00		0,00			66,21			0,00			0,00			66,21			66,21	-	93,25		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4,00				3,00		0,00			0,00			0,00			3,00			3,00			3,00	-	75,00		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)	100				100		0,00			0,00			0,00			100			100			100	-	100		
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai	1 01 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	1.655.000.000			100	83.091.350	40,00		36.799.000	40,00		12.240.000	20,00		4.970.000	0,00		13.953.280	100		67.962.280	100	67.962.280	100	4,11	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100				100		66,67			16,67			16,67			0,00			100			100		100		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 01 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15	1.324.000.000	0,00	-	5	62.846.350	40,00	2	35.569.000	40,00	2	4.640.000	20,00	1	1.040.000	0,00	0,00	12.203.280	100	5	53.452.280	5	53.452.280	33,33	4,04	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1 01 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	331.000.000	0,00	-	6	20.245.000	66,67	4	1.230.000	16,67	1	7.600.000	16,67	1	3.930.000	0,00	0,00	1.750.000	100	6	14.510.000	6	14.510.000	33,33	4,38	
		1 01 01 2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai	100	583.987.468.088			100	243.910.737.786	11,76		37.461.883.106	41,18		64.912.161.277	29,41		61.247.871.338	17,65		70.225.433.915	100		233.847.349.636	100	233.847.349.636	100	40,04	
				Persentase penatausahaan keuangan sesuai	100				100		25,00			25,00			25,00			25,00			100			100		100		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 01 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	9072	583.656.468.088			3024	243.869.192.438	25,00	3024	37.457.790.663	25,00	3024	64.912.161.277	25,00	3024	61.247.871.338	25,00	3024	70.200.851.415	100	3024	233.818.674.693	3024	233.818.674.693	33,33	40,06	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	1 01 01 2 02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	82.750.000			12	16.745.000	25,00	3	-	25,00	3		25,00	3	-	25,00	3	14.262.500	100	12	14.262.500	12	14.262.500	33,33	17,24	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran	1 01 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	102	248.250.000			34	24.800.348	11,76	4	4.092.443	41,18	14		29,41	10	-	17,65	6	10.320.000	100	34	14.412.443	34	14.412.443	33,33	5,81	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan	1 01 01 2 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap (%)	100	611.191.500			100	-	25,00		-	25,00		-	25,00		-	25,00			100		-	100	-	100	0,00	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)	100				100		25,00			25,00			25,00			25,00			100			100		100		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)**	**100**				**15,39**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	1 0 1 0 1 2 0 5 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	31.941.500			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 0 1 0 1 2 0 5 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33	82.750.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 0 1 0 1 2 0 5 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	30	496.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		1 0 1 0 1 2 0 6	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)**	**100**	**2.648.000.000**			**100**	**166.949.255**	**25,00**		**21.439.547**	**25,00**		**48.382.245**	**25,00**		**58.612.163**	**25,00**		**28.825.390**	**100**		**157.259.345**	**100**	**157.259.345**	**100**	**5,94**	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 0 1 0 1 2 0 6 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	331.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 0 1 0 1 2 0 6 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	3	165.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 0 1 0 1 2 0 6 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	36	496.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 0 1 0 1 2 0 6 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	993.000.000			12	166.949.255	25,00	3	21.439.547	25,00	3	48.382.245	25,00	3	58.612.163	25,00	3	28.825.390	100	12	157.259.345	12	157.259.345	33,33	15,84	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 0 1 0 1 2 0 6 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	36	165.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1 0 1 0 1 2 0 6 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	496.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung	**1 0 1 0 1 2 0 7**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)**	**100**	**662.000.000**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersedianya Mebel	1 0 1 0 1 2 0 7 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	36	165.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 0 1 0 1 2 0 7 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	36	496.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		1 0 1 0 1 2 0 8	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah (%)**	**100**	**14.538.800.719**			**100**	**2.926.681.246**	**25,00**		**549.492.623**	**25,00**		**911.916.726**	**25,00**		**678.169.057**	**25,00**		**674.664.120**	**100**		**2.814.242.526**	**100**	**2.814.242.526**	**100**	**19,36**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 0 1 0 1 2 0 8 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	10.434.400.719			12	2.070.201.753	25,00	3	404.025.600	25,00	3	689.584.120	25,00	3	483.954.475	25,00	3	467.645.050	100	12	2.045.209.245	12	2.045.209.245	33,33	19,60	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 0 1 0 1 2 0 8 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listriik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	1.555.700.000			12	365.134.450	25,00	3	52.659.023	25,00	3	68.426.606	25,00	3	70.994.682	25,00	3	91.930.220	100	12	284.010.531	12	284.010.531	33,33	18,26	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 0 1 0 1 2 0 8 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	2.548.700.000			12	491.345.043	25,00	3	92.808.000	25,00	3	153.906.000	25,00	3	123.219.900	25,00	3	115.088.850	100	12	485.022.750	12	485.022.750	33,33		
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	**1 0 1 0 1 2 0 9**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**100**	**2.763.850.000**		**-**	**100**	**448.922.892**	**25,00**		**22.515.800**	**25,00**		**69.624.300**	**25,00**		**42.203.400**	**25,00**		**161.895.750**	**100**		**296.239.250**	**100**	**296.239.250**	**100**	**10,72**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 0 1 0 1 2 0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	1.324.000.000			6	404.847.824	0,00	0,00	22.515.800	50,00	3	69.624.300	50,00	3	42.203.400	0,00	0,00	119.743.800	100	6	254.087.300	6	254.087.300	100,00	19,19	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	1 0 1 0 1 2 0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	59	662.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 0 1 0 1 2 0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	281.350.000			60,00	44.075.068	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		100	60	42.151.950	100	60	42.151.950	60,00	42.151.950	100,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 0 1 0 2 0 1 2 0 9 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	496.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata rata capaian kinerja (%)							**24,40**		**15,39**	**27,08**		**26,64**	**24,19**		**25,06**	**24,33**		**28,72**	**100**		**95,82**			**41,67**	**39,08**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
	MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDIDIKAN			**APS SD**	**99,52%**				**99,32%**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**							
				APS SMP	**96,15%**				**95,95%**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**							
	MENINGKATNYA MUTU DAN RELEVANSI HASIL BELAJAR			**Kemampuan Literasi SD**	**2,31**				**1,91**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**							
				Kemampuan Numerasi SD	**2,21**				**1,81**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**							
				Kemampuan Literasi SMP	**2,38**				**1,98**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**							
				Kemampuan Numerasi SMP	**2,25**				**1,85**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**							
	MENINGKATNYA AKSES SATU TAHUN PRASEKOLAH DARI PAUD			**Angka Kesiapan Sekolah**	**58,90%**				**52,90%**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**							
	MENINGKATNYA AKSES PENDIDIKAN NON			**APS Nom Formal**	**60,00%**				**50,00%**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**							
2	**Meningkatnya Layanan Pendidikan Dasar**	**1 0 1 0 2**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD**	**110**	**513.266.943.885**			**110**	**100.007.655.865,80**	**0,00**		**2.757.386.800**	**0,00**		**15.930.557.797**	**0,00**		**11.448.751.421**	**0,00**		**64.429.672.217**	**0,00**		**94.566.368.234**	**0,00**	**94.566.368.234**	**0,00**	**18,42**	**DINDIKPORA**
	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	**1 0 1 0 2 0 1**	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana SD**	**72,00%**	**272.501.732.000**		**-**	**68,00%**	**55.267.304.464**	**0,00**		**2.541.174.400**	**0,00**		**9.466.770.263**	**0,00**		**5.795.951.990**	**0,00**		**35.197.305.089**	**0,00**		**53.001.201.742**	**0,00**	**53.001.201.742**	**0,00**	**19,45**	
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Sekolah			**Proporsi Pemanfaatan Sumber Daya Sekolah untuk Peningkatan Mutu Jenjang SD**	**51,12%**				**46,12%**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 0 1 0 2 2 0 1 0003	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	30	7.200.000.000			3	541.920.390	0,00	0,00	-	0,00	0,00		33,33	1	164.355.200	66,67	2	371.306.800	100	3	535.662.000	3	535.662.000	10,00	7,44	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 0 1 0 2 2 0 1 0010	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (ruang)	15	1.425.000.000			3	92.837.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		33,33	1	45.015.350	66,67	2	47.115.350	100	3	92.130.700	3	92.130.700	20,00	6,47	
	Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 0 1 0 2 2 0 1	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	-			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 0 1 0 2 2 0 1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0	-			0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 0 1 0 2 2 0 1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	9	2.700.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 0 1 0 2 2 0 1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	2.250.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah	1 0 1 0 2 2 0 1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Terat	15	825.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 0 1 0 2 2 0 1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	2.145.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	1 0 1 0 2 2 0 1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	2.250.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Mebel sekolah yang Tersedia	1 0 1 0 2 2 0 1 0014	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	90	4.950.000.000			56	1.096.130.665	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	56	1.092.295.000	0,00	0,00	2.585.000	100	56	1.094.880.000	56	1.094.880.000	62,22	22,12	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 0 1 0 2 2 0 1	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	498	7.470.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 0 1 0 2 2 0 1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	30	3.310.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 0 1 0 2 2 0 1 0021	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1992	2.390.400.000			664	600.840.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		75,30	500	-	24,70	164	600.840.000	100	664	600.840.000	664	600.840.000	33,33	25,14	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 0 1 0 2 2 1 0022	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	72	3.972.000.000			24	993.090.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	24	711.525.000	0,00	0,00	3.615.000	100	24	715.140.000	24	715.140.000	33,33	18,00	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	1 0 1 0 2 2 1 0025	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15	993.000.000			5	300.960.000	0,00	0,00	-	40,00	2	102.640.205	40,00	2	165.100.000	20,00	1	1.965.000	100	5	269.705.205	5	269.705.205	33,33	27,16	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan	1 0 1 0 2 2 1 0026	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2760	85.117.500.000			920	13.055.171.918	100	920	2.541.174.400	0,00	0,00	3.891.141.212	0,00	0,00	1.974.420.000	0,00	0,00	3.126.791.632	100	920	11.533.527.244	920	11.533.527.244	33,33	13,55	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	1 0 1 0 2 2 1 0027	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	660	2.482.500.000			220	107.216.560	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		100	220	21.922.000	100	220	21.922.000	220	21.922.000	33,33	0,88	
	Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	1 0 1 0 2 2 1 0028	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	183	496.500.000			183	280.000.000	100	183	-	0,00	0,00	55.200.000	0,00	0,00	116.752.500	0,00	0,00	94.405.000	100	183	266.357.500	183	266.357.500	100	53,65	
	Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 0 1 0 2 2 1 0029	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	184	109.500.000.000			184	33.005.553.996	100	184	-	0,00	0,00	5.391.596.476	0,00	0,00	-	0,00	0,00	27.402.452.372	100	184	32.794.048.848	184	32.794.048.848	100	29,95	
	Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah	1 0 1 0 2 2 1 0030	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS	1098	450.000.000			368	75.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	4.347.900	0,00	0,00	-	100	368	56.517.780	100	368	60.865.680	368	60.865.680	33,52	13,53	
	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar	1 0 1 0 2 2 1 0031	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah	30	7.830.000.000			10	583.657.610	0,00	0,00	-	0,00	0,00		30,00	3	207.924.360	70,00	7	368.832.140	100	10	576.756.500	10	576.756.500	33,33	7,37	
	Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi	30	4.800.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	75	750.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan,	1 0 1 0 2 2 1 0038	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	3	331.000.000			1	50.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		100	1	38.072.000	100	1	38.072.000	1	38.072.000	33,33	11,50	
	Perlengkapan Peserta Didik yang		Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang	4648	2.307.732.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 0 1 0 2 2 1 0047	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	30	8.639.100.000			5	1.721.347.500	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.250.000	40,00	2	509.141.200	60,00	3	1.188.955.300	100	5	1.699.346.500	5	1.699.346.500	16,67	19,67	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	1 0 1 0 2 2 1 0048	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	18	2.214.000.000			6	242.693.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	1.200.000	100	6	235.690.000	100	6	236.890.000	6	236.890.000	33,33	10,70	
	Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan	1 0 1 0 2 2 1 0050	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan	183	993.000.000			183	300.000.000	100	183	-	0,00	0,00	19.469.470	0,00	0,00	35.312.500	0,00	0,00	219.464.715	100	183	274.246.685	183	274.246.685	100	27,62	
	Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	30	4.710.000.000			10	2.220.885.825	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.125.000	40,00	4	772.910.880	60,00	6	1.416.775.000	100	10	2.190.810.880	10	2.190.810.880	33,33	46,51	
	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	**1 0 1 0 2 2 2 0** **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana SMP (%)**	**72,00**	**171.797.064.000**		-	**68,00**	**29.878.952.745,80**	**0,00**		**1.920.000**	**0,00**		**6.063.358.121**	**0,00**		**2.881.621.299**	**0,00**		**19.777.056.015**	**0,00**		**28.723.955.434**	**0,00**	**28.723.955.434**	**0,00**	**16,72**	
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Sekolah			**Proporsi Pemanfaatan Sumber Daya Sekolah untuk Peningkatan Mutu Jenjang SMP**	**51,12**				**46,12**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	1 0 1 0 2 2 0 2000	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6	2.940.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	1 0 1 0 2 2 0 2 0004	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6	1.400.000.000			4	152.917.000	0,00	0,00		0,00	0,00		50,00	2	75.353.000	50,00	2	77.043.000	100	4	152.396.000	4	152.396.000	66,67	10,89	
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Terbangun	1 0 1 0 2 2 0 2 0006	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6	3.150.000.000			2	367.150.780	0,00	0,00		0,00	0,00	3.001.750	50,00	1	130.536.700	50,00	1	228.364.300	100	2	361.902.750	2	361.902.750	33,33	11,49	
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	1 0 1 0 2	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	6	1.960.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang	1 0 1 0 2	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6	1.760.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Fasilitas Parkir yang Terbangun		Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	6	450.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Kantin Sekolah yang Terbangun		Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	6	450.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	15	2.300.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ruang kelas sekolah yang terehabilitasi	1 0 1 0 2 2 0 2 0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi	15	2.950.000.000			5	1.631.323.965	0,00	0,00		0,00	0,00	3.562.680	60,00	3	583.391.500	40,00	2	1.022.405.500	100	5	1.609.359.680	5	1.609.359.680	33,33	54,55	
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah terehabilitasi Sedang/Berat		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	2.350.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9	2.550.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 0 1 0 2 2 0 2 0018	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	9	2.970.000.000			3	325.288.000	0,00	0,00		0,00	0,00		33,33	1	95.959.499	66,67	2	225.640.496,50	100	3	321.599.995	3	321.599.995	33,33	10,83	
	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi sedang/berat		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	9	1.350.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	9	1.350.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	15	450.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Kantin Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	15	450.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	1 0 1 0 2 2 0 2 0024	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	15	1.725.000.000			5	470.795.000	0,00	0,00		0,00	0,00	875.000	20,00	1	138.940.000	80,00	4	325.495.000	100	5	465.310.000	5	465.310.000	33,33	26,97	
	Mebel Sekolah yang Tersedia	1 0 1 0 2 2 0 2 0025	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	90	4.350.000.000			30	382.300.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.230.000	100	30	377.855.000	0,00	0,00	1.190.000	100	30	380.275.000	30	380.275.000	33,33	8,74	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	96	2.400.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan	15	1.125.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya	1 0 1 0 2 2 0 2 0032	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya	960	1.152.000.000			320	360.735.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	100	320	360.735.000	100	320	360.735.000	320,00	360.735.000	33,33	31,31	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	1 0 1 0 2 2 0 2 0038	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15	1.324.000.000			5	423.265.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	5.685.300	60,00	3	256.024.500	40,00	2	123.558.750	100	5	385.268.550	5	385.268.550	33,33	29,10	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan	1 0 1 0 2 2 0 2 0039	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	687	15.000.000.000			368	6.147.794.264	0,00	0,00	1.920.000	100	368	2.525.156.800	0,00	0,00	876.162.400	0,00	0,00	2.053.273.200	100	368	5.456.512.400	368,00	5.456.512.400	53,57	36,38	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	1 0 1 0 2 2 0 2 0040	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	45	2.151.500.000			110	71.100.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 0 1 0 2 2 0 2 0041	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	46	496.500.000			46	100.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	15.690.000	100	46	35.895.000	0,00	0,00	41.222.750	100	46	92.807.750	46	92.807.750	100,00	18,69	
	Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana	1 0 1 0 2 2 0 2 0042	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana	46	53.500.000.000			46	18.064.817.891,80	100	46	-	0,00	0,00	3.499.372.841	0,00	0,00	-	0,00	0,00	14.363.315.818	100	46	17.862.688.659	46	17.862.688.659	100	33,39	
	Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	1 0 1 0 2 2 0 2 0043	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	192	450.000.000			46	75.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2.560.000	0,00	0,00	400.000	100	46	52.830.000	100	46	55.790.000	46,00	55.790.000	23,96	12,40	
	Ruang TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	2.730.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Ruang Kepala Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	450.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6144	614.400.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Perlengkapan Peserta Didik		Sub Kegiatan Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik	1024	677.888.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yangTersedia	30	993.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
	Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 0 1 0 2 2 0 2 0051	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	46	331.000.000			46	50.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	9.505.000	0,00	0,00	9.505.000	0,00	9.505.000	0,00	2,87	
	Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 0 1 0 2 2 0 2 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	40416	1.158.500.000			6278	225.000.000	100	6278	-	0,00	0,00	4.375.000	0,00	0,00	7.485.000	0,00	0,00	181.141.900	100	6278	193.001.900	6278	193.001.900	15,53	16,66	
	Ruang Kelas Baru Bertambah	1 0 1 0 2 2 0 2 0059	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15	48.500.000.000			5	744.493.625	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.848.750	40,00	2	218.898.700	60,00	3	511.965.300	100	5	732.712.750	5	732.712.750	33,33	1,51	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah yang	1 0 1 0 2 2 0 2 0064	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah yang Telah	18	2.482.500.000			1	286.972.220	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	84.720.000	0,00	0,00	199.370.000	0,00	0,00	284.090.000	0,00	284.090.000	0,00	11,44	
	Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta		Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	3072	677.888.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Perlengkapan Peserta Didik yang		Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang	3072	677.888.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	**1 0 1 0 2 2 0 3**	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal**	**41,41**	**58.489.897.885**		-	**40,40**	**13.587.464.136**	**0,00**		**214.292.400**	**0,00**		**398.789.413**	**0,00**		**2.361.289.132**	**0,00**		**8.696.528.543**	**0,00**		**11.670.899.488**	**1 : 20**	**11.670.899.488**	**1 : 20**	**19,95**	
				Persentase Pendidik yang Berkualifikasi Minimal S1 / D4 (%)	**83,00**	-			**82,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	1 0 1 0 2 2 0 3 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah	12	1.986.000.000			4	676.663.608	0,00	0,00	525.000	0,00	0,00	4.465.185	50,00	2	216.033.359	50,00	2	438.285.200	100	4	659.308.744	4	659.308.744	33,33	33,20	
	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (unit)	3	1.324.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi	12	993.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Mebel PAUD yang Tersedia		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (paket)	12	463.400.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	perlengkapan PAUD yang		Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	12	662.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Biaya Personil peserta didik PAUD diterima oleh peserta didik		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (peserta didik)	9000	2.482.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Alat Praktik dan Peraga siswa PAUD yang Tersedia	1 0 1 0 2 2 0 3 0012	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (paket)	15	827.500.000			5	327.342.360	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	100	5	313.643.670	100	5	313.643.670	5,00	313.643.670	33,33	37,90	
	Terselenggaranya proses belajar PAUD	1 0 1 0 2 2 0 3 0013	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (siswa)	18834	993.000.000			6278	250.000.000	100	6278	9.690.600	0,00	0,00	40.393.748	0,00	0,00	39.894.561	0,00	0,00	116.696.145	100	6278	206.675.054	6278	206.675.054	33,33	20,81	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1 0 1 0 2 2 0 3 0015	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (orang)	68	25.761.500.000			68	8.009.005.716	100	68	204.076.800	0,00	0,00	339.762.200	0,00	0,00	156.181.200	0,00	0,00	5.602.181.600	100	68	6.302.201.800	68	6.302.201.800	100	24,46	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	1 0 1 0 2 2 0 3 0016	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (orang)	30	1.324.000.000			100	21.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	6.254.000	0,00	0,00	6.254.000	0,00	6.254.000	0,00	0,47	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 0 1 0 2 2 0 3 0017	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (satuan	180	1.655.000.000			180	79.447.452	0,00	0,00	-	0,00	0,00	14.168.280	100	180	56.650.000	0,00	0,00	3.051.400	100	180	73.869.680	180	73.869.680	100,00	4,46	
	PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 0 1 0 2 2 0 3 0018	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (satuan pendidikan)	180	13.902.000.000			180	4.099.005.000	100	180	-	0,00	0,00		0,00	0,00	1.874.296.150	0,00	0,00	2.162.431.528	100	180	4.036.727.678	180	4.036.727.678	100	29,04	
	Meningkatnya kapasitas pengelolaan Dana BOP PAUD	1 0 1 0 2 2 0 3 0019	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP	180	496.500.000			180	75.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		50,00	90	-	50,00	90	36.431.000	100	180	36.431.000	180	36.431.000	100	7,34	
	Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	1 0 1 0 2 2 0 3 0025	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	180	165.500.000			180	50.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		50,00	90	18.233.862	50,00	90	17.554.000	100	180	35.787.862	180	35.787.862	100,00	21,62	
	Ruang Kelas yang Bertambah		Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang Bertambah	9	2.474.997.885			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Perlengkapan siswa PAUD yang Tersedia		Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia (paket)	24	1.986.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3							4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya pemeliharaan rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan (unit)	12	993.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Ketersediaan layanan pendidikan Non Formal yang memenuhi	**1**	**0 1**	**0 2**	**2 4**				**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Persentase Non Formal terakreditasi minimal C**	**82,00**	**10.478.250.000**			**72,00**	**1.273.934.520**	**0,00**		-	**0,00**		**1.640.000**	**0,00**		**409.889.000**	**0,00**		**758.782.570**	**0,00**		**1.170.311.570**	**0,00**	**1.170.311.570**	**0,00**	**11,17**	
	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/ Kesetaraan yang Terbangun								Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun (unit)	6	2.317.000.000			0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Biaya Personil peserta didik PAUD diterima oleh peserta didik								Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1500	827.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang	1	0 1	0 2	2 4	0 4	001 1		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia (paket)	6	331.000.000			2	100.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	820.000	100	2	98.452.050	100	2	99.272.050	2,00	99.272.050	33,33	29,99	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan								Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	24	150.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan								Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (orang)	24	150.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/	1	0 1	0 2	2 4	0 4	001 6		Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen satuan	12	496.500.000			12	150.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.640.000	0,00	0,00	500.000	100	12	119.231.700	100	12	121.371.700	12,00	121.371.700	100,00	24,45	
	Terlaksananya pengelolaan dana BOP Sekolah Non Formal/	1	0 1	0 2	2 4	0 4	001 7		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (satuan	12	2.648.000.000			12	898.934.520	100	12	-	0,00	0,00		0,00	0,00	405.544.000	0,00	0,00	459.612.000	100	12	865.156.000	12	865.156.000	100	32,67	
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraa	1	0 1	0 2	2 4	0 4	001 8		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non	36	248.250.000			12	50.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	3.025.000	100	12	16.935.620	100	12	19.960.620	12,00	19.960.620	33,33	8,04	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia								Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (paket)	6	331.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi								Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	6	662.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terselenggaranya Proses Belajar Non Formal/Kesetaraa n	1	0 1	0 2	2 4	0 4	004 6		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (satuan	12	827.500.000			12	75.000.000	100	12	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	64.551.200	100	12	64.551.200	12	64.551.200	100	7,80	
	Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia								Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (paket)	6	331.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (unit)	6	165.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat								Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (unit)	6	993.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**25,00**		**2,76**	**3,18**		**15,93**	**28,53**		**11,45**	**43,29**		**64,42**	**100**		**94,56**				**48,66**	**18,42**	
															Predikat Kinerja	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**			**SR**			**ST**		**ST**				**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Proses Pembelajaran**	**1**	**0 1**	**0 3**					**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Kualitas pengelolaan kurikulum sekolah**	**49,73**	**2.874.735.000**		-	**49,53**	**250.000.000**	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**DINDIKPORA**
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sekolah	**1**	**0 1**	**0 3**	**2 1**				**Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase dokumen kurikulum yang tersusun**	**100**	**2.460.985.000**		-	**100**	**200.000.000**	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
	Tersusunnya Silabus Muatan Lokal Pendidikan								Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	6	331.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	1 0 1 0 3 2 0 1 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	13740	1.136.985.000			1	200.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat		Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	180	662.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersusunya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 0 1 0 3 2 0 1 0007	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	6	331.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Pemerataan Layanan PAUD			**Muatan Pengembangan Kurikulum sesuai dengan peraturan dan**	**100**	**413.750.000**		-	**80,00**	**50.000.000**	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Satuan PAUD	**1 0 1 0 3 2 0 2**	**Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non**	**Persentase Satuan PAUD yang menyusun kurikulum mulok**	**70,00**	**413.750.000**		-	**50,00**	**50.000.000**	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang		Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	3	165.500.000			0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang		Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	4500	82.750.000			1500	25.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang		Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	3	165.500.000			1	25.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**			**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**	
4	**Meningkatnya Kualitas Proses Pembelajaran Pendidikan Dasar**	**1 0 1 0 4**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Proporsi GTK bersertifikat jenjang SD**	**45,00**	**662.000.000**			**44,81**	**100.000.000**	**0,00**		-	**0,00**		**26.734.290**	**0,00**		**4.400.000**	**0,00**			**0,00**		**59.517.790**	**0,00**	**59.517.790**	**0,00**	**8,99**	**DINDIKPORA**
				Proporsi GTK bersertifikat jenjang	**32,39**				**32,19**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Indeks Distribusi Guru	**0,87**				**0,67**																				
		1 0 1 0 4 2 0 2	**Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan**	**Pemenuhan kebutuhan Guru SD**	**0,65**	**662.000.000**		-	**0,60**	**100.000.000**	**0,00**		-	**0,00**		**26.734.290**	**0,00**		**4.400.000**	**0,00**		**28.383.500**	**0,00**		**59.517.790**	**0,00**	**59.517.790**	**0,00**	**8,99**	
				Pemenuhan kebutuhan Guru SMP	**0,71**				**0,69**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	1 0 1 0 4 2 0 1 0001	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6	331.000.000	0	-	2	50.000.000	0,00	0	-	50,00	1	11.738.000	0,00	0,00		50,00	1	8.558.500	100	2	20.296.500	2	20.296.500	33,33	6,13	
	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non	1 0 1 0 4 2 0 1 0002	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6	331.000.000	0,00	-	2	50.000.000	0,00	0,00	-	50,00	1	14.996.290	0,00	0,00	4.400.000	50,00	1	19.825.000	100	2	39.221.290	2	39.221.290	33,33		
				Rata rata capaian kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**50,00**		**26,73**	**0,00**			**50,00**			**100**		**59,52**			**33,33**	**8,99**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**			**SR**			**ST**		**R**			**SR**	**SR**	
5	**MENINGKATNYA PEMERATAAN LAYANAN PAU**	**1 0 1 0 5**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDIDIKAN**	**Tingkat kepatuhan terhadap penyelenggara perizinan**	**100,00**	**248.250.000**			**100,00**	**14.968.150**	**0,00**		-	**0,00**		**11.610.000**	**0,00**		**1.150.000**	**0,00**			**0,00**		**13.210.000**	**0,00**	**13.210.000**	**0,00**	**5,32**	**DINDIKPORA**
		1 0 1 0 5 2 0 2	**Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase penerbitan izin sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku**	**100%**	**248.250.000**	**0%**		**100%**	**14.968.150**	**0,00**		-	**0,00**		**11.610.000**	**0,00**		**1.150.000**	**0,00**		**450.000**	**0,00**		**13.210.000**	**0,00**	**13.210.000**	**0,00**	**5,32**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	1 0 1 0 5 2 0 2 0001	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3	82.750.000			1	-	0,00	0	-	100	1		0,00	0,00		0,00			100	1	-	1	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 0 1 0 5 2 0 2 0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3	82.750.000			1	-	0,00	0		100	1		0,00	0,00					100	1		1	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 0 1 0 5 2 0 2 0003	Sub Kegiatan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3	82.750.000			1	14.968.150	0,00	0,00	-	100	1	11.610.000	0,00	0,00	1.150.000	0,00		450.000	100	1	13.210.000	1	13.210.000	33,33	15,96	
				Rata rata capaian kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**100**		**77,56**	**0,00**			**0,00**			**100**		**88,25**			**33,33**	**5,32**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**ST**		**T**	**SR**			**SR**			**ST**		**T**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PENDIDIKAN						**347.909.006.545**		**40.849.516.876**			**81.923.226.635**			**73.484.977.379**			**135.534.444.672**			**331.822.149.061**		**331.822.149.061**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pendidikan (%)							**12,35**		**11,74**	**45,06**		**23,55**	**13,18**			**29,41**			**100**		**95,38**			**31,40**	**14,36**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pendidikan							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**			**SR**			**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
		1 02	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN**			**972.870.564.870**				**291.166.339.809**		**22.781.109.813**			**86.283.385.849**			**84.088.552.786**			**95.371.754.624**			**288.524.803.072**		**288.524.803.072**		**29,66**	
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / KABUPATEN KOTA**	**Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah**	**27,15**	**487.216.249.026**			**28,35**	**179.516.359.442**	**0,00**		**17.612.126.766**	**27,92**		**62.956.522.368**	**0,00**		**48.637.189.818**	**0,00**		**53.479.925.466**	**27,92**		**182.685.764.418**	**27,92**	**182.685.764.418**	**#####**	**37,50**	**DINKES**
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	**11,15**				**12,72**		**0,00**			**12,00**			**0,00**			**0,00**			**12,00**			**12,00**	**-**	**#####**		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan PD dalam LHP BPK-RI (%)**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**-**	**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**64,00**				**1,00**		**0,00**			**73,84**			**0,00**			**0,00**			**73,84**			**73,84**	**-**	**#####**		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**3**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)**	**98,20**				**63,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	**1 02 01 01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesual standar (%)**	**100**	**1.911.171.840**			**100**	**304.730.805**	**25,81**		**20.660.400**	**48,39**		**135.981.759**	**25,81**		**72.762.163**	**0,00**		**64.694.200**	**100**		**294.098.522**	**100**	**294.098.522**	**100**	**15,39**	
				Persentase pelaporan kinerja sesuai standar (%)	**100**				**100**		**25,00**			**50,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**	**-**	**100**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 02 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan program kesehatan yang disusun (dokumen)	93	1.290.613.040			31	236.758.070	25,81	8	20.660.400	48,39	15	94.177.959	25,81	8	72.762.163	0,00		41.394.200	100	31	228.994.722	31	228.994.722	33,33	17,74	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 02 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	48	620.558.800			16	67.972.735	25,00	4		50,00	8	41.803.800	25	4	-	0,00		23.300.000	100	16	65.103.800	16	65.103.800	33,33	10,49	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat	**1 02 01 2 02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)**	**100**	**260.852.580.000**			**100**	**74.718.495.511**	**25,00**		**6.075.500.355**	**25,00**		**29.972.538.521**	**25,00**		**17.791.339.708**	**25,00**		**18.308.340.219**	**100**		**72.147.718.803**	**100**	**72.147.718.803**	**100**	**27,66**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 02 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (bulan)	1995	259.800.000.000			665	74.555.130.055	25,00	665	6.059.431.155	25,00	665	29.903.011.721	25,00	665	17.750.307.108	25,00	665	18.272.303.419	100	665	71.985.053.403	665	71.985.053.403	33,33	27,71	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	1 02 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	893.700.000			12	163.365.456	25,00	3	16.069.200	25,00	3	69.526.800	25,00	3,00	41.032.600	25,00	3	36.036.800	100	12	162.665.400	12	162.665.400	33,33	18,20	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	1 0 2 0 1 2 0 2 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	84	158.880.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya kepatuhan terhadap kelengkapan	**1 02 01 2 05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang mengenakan atribut lengkap (%)**	**100**	**896.182.500**		**-**	**100**	**9.750.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian			**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**	**-**	**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			**Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)**	**50,00**				**44,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	1 0 2 0 1 2 0 5 0002	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Paket)	3	32.272.500			1	9.750.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 0 2 0 1 2 0 5 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42	3.310.000			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 0 2 0 1 2 0 5 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	12	860.600.000			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksannya Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1 02 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)**	**100**	**1.682.142.000**		**-**	**1**	**231.675.000**	**25,00**		**9.308.679**	**25,00**		**78.895.018**	**25,00**		**89.932.341**	**25,00**		**43.935.826**	**100**		**222.071.864**	**100**	**222.071.864**	**100**	**13,20**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 0 2 0 1 2 0 6 0009	Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumla laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	182.712.000			12	231.675.000	25,00	3	9.308.679	25,00	3	78.895.018	25,00	3	89.932.341	25,00	3	43.935.826	100	12	222.071.864	12	222.071.864	33,33	121,54	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 0 2 0 1 2 0 6 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Laporan)	36	579.250.000			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 0 2 0 1 2 0 6 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Laporan)	36	920.180.000			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasanaran	**1 02 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah (%)**	**7,00**	**2.313.690.000**		**-**	**7,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersedianya Mebel	1 0 2 0 1 2 0 7 0005	Subkegiatan Pengadaan Mebel (termasuk DID)	Jumlah paket Mebel yang disediakan (Unit)	45	142.330.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 0 2 0 1 2 0 7 0006	Subkegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	30	1.694.720.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 0 2 0 1 2 0 7 0009	Subkegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3	476.640.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksannya layanan jasa penunjang	**1 02 01 2 08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang di**	**100**	**4.539.151.950**			**100**	**1.200.847.676**	**25,00**		**97.934.823**	**25,00**		**417.855.352**	**25,00**		**242.009.646**	**25,00**		**313.999.351**	**100**		**1.071.799.172**	**100**	**1.071.799.172**	**100**	**23,61**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 0 2 0 1 2 0 8 0001	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	36	1.820.500.000			12	455.989.232	25,00	3	29.842.800	25,00	3	191.431.650	25,00	3	73.706.600	25,00	3	132.530.200	100	12	427.511.250	12	427.511.250	33,33	23,48	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 0 2 0 1 2 0 8 0002	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	1.043.791.950			12	519.622.272	25,00	3	47.331.623	25,00	3	122.050.012	25,00	3	119.883.646	25,00	3	139.612.851	100	12	428.878.132	12	428.878.132	33,33	41,09	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 0 2 0 1 2 0 8 0003	Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	36	1.674.860.000			12	225.236.172	25,00	3	20.760.400	25,00	3	104.373.690	25,00	3	48.419.400	25,00	3	41.856.300	100	12	215.409.790	12	215.409.790	33,33	12,86	
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	**1 02 01 2 09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**19.310.732.500**			**100**	**363.343.832**	**25,00**		**26.582.400**	**25,00**		**51.329.600**	**25,00**		**83.981.100**	**25,00**		**94.558.500**	**100**		**256.451.600**	**100**	**256.451.600**	**#####**	**1,33**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	1 0 2 0 1 2 0 9 0001	Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Opeasional/ Lapangan.	Jumlah kendaran Dinas/Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	33	1.264.420.000			11	317.223.832	27,27	3	26.582.400	27,27	3	51.329.600	27,27	3	83.981.100	18,18	2	75.247.000	100	11	237.140.100	11	237.140.100	33,33	18,75	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 02 01 2 09 0002	Subkegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	207	165.500.000			69	46.120.000	0,00	0,00	39,13	27	0,00	0,00	-	60,87	42	19.311.500	100	69	19.311.500	69	**19.311.500**	33,33	11,67	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 02 01 2 09 0009	Subkegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (Unit)	3	17.880.812.500			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	**1 02 01 2 10**	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Opini Kinerja BLUD**	**WTP**	**195.710.598.236**			**WTP**	**102.687.516.618**	**0,00**		**11.382.140.109**	**WTP**	**32.299.922.118**	**0,00**	**30.357.164.860**	**0,00**	**34.654.397.370**	**WTP**	**108.693.624.457**	**WTP**	**108.693.624.457**	**100**	**55,54**	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 02 01 2 10 0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit kerja)	45	195.710.598.236			16	102.687.516.618	100	16	11.382.140.109	0,00	32.299.922.118	0,00	30.357.164.860	0,00	34.654.397.370	100	16	108.693.624.457	16	108.693.624.457	35,56	55,54	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**27,34**		**9,81**	**26,23**	**35,07**	**19,01**	**27,09**	**19,09**	**29,79**	**100**	**101,77**			**30,74**	**37,50**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat**	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan**	**100**	**482.080.671.034**		**-**	**100**	**109.882.542.063**	**0,00**		**5.162.560.047**	**0,00**	**22.994.496.546**	**0,00**	**34.772.750.122**	**0,00**	**41.278.281.829**	**0,00**		**104.208.088.544**	**0,00**	**104.208.088.544**	**0,00**	**21,62**	**DINKES**
				Indeks Keluarga Sehat	**0,45**				**0,43**		**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
				Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
	Terlaksannya Penyediaan Faskes untuk ukm ukp kewenangan daerah kabupaten/kota	**1 02 02 2 01**	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar (%)**	**100**	**150.816.273.626**		**-**	**100**	**42.682.159.006**	**0,00**		**-**	**0,00**	**1.513.513.016**	**0,00**	**17.579.927.523**	**0,00**	**22.752.972.045**	**0,00**		**41.846.412.584**	**0,00**	**41.846.412.584**	**0,00**	**27,75**	
				Persentase Faskes yg memiliki Prasarana sesuai Standar (%)	**84,00**				**82**		**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
				Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang tersedia (%)	**67,67**				**64,33**		**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
				Persentase Keluarga yang diintervensi masalah kesehatan	**67,00**				**58**		**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
	Terpenuhnya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal	1 02 02 2 01 01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta sarana dan Prasarana pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 (Unit)	1	5.000.000.000			0		0,00	0		0,00		0,00		0,00		0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	1 02 02 2 01 01	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun (Unit)	1	3.000.000.000			0		0,00	0		0,00		0,00		0,00		0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1 02 02 2 01 01	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun (Unit)	12	1.994.937.000			4	1.800.000.000	0,00	0		0,00		0,00	342.847.500,00	100,00	4	1.227.542.500,00	100	4	1.570.390.000	4	1.570.390.000	33,33	78,72	
	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 02 02 2 01 01	Sub kegiatan pengembangan rumah sakit	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang melindungi rasio tempat tidur terhadap jumalh penduduk minimal 1:1000 (Unit)	3	2.384.220.000			1	14.500.000.000	0,00	0		0,00		0,00	1.038.145.800,00	100,00	1	13.362.340.200,00	100	1	14.400.486.000	1	14.400.486.000	33,33	603,99	
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 02 02 2 01 04	Sub kegiatan pengembangan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alkes, dan SDM agar sesuai standar (Unit)	12	36.016.400.000			12	14.214.521.000	0,00	0		0,00	119.520.000	0,00	9.672.751.000,00	100,00	12	4.217.380.000,00	100	12	14.009.651.000	12	14.009.651.000	100,00	38,90	
	Tersedianya pengembangan fasilitas kesehatan lainnya sesuai standar	1 02 02 2 01 04	Sub kegiatan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar (Unit)	5	5.972.000.000			3	3.550.323.800	0,00	0		0,00		0,00	1.881.469.000,00	100,00	3	1.639.492.754	100	3	3.520.961.754	3	3.520.961.754	60,00	58,96	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 02 02 2 01 04	Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah sarana, prasaran dan alkes yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit (Unit)	9	14.002.000.000			0		0,00	0		0,00			0,00			0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	1 02 02 2 01 04	Sub Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasaran dan alkes yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	14	2.866.000.000			0		0,00	0		0,00			0,00			0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 02 02 2 01 04	Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	102	13.671.000.000			0		0,00	0		0,00			0,00			0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan	1 02 02 2 01 05	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah sarana dan perasarana rumah dinas tenaga kesehtan yang telah dilakukan rehabilatasi pemeliharaan (Unit)	42	5.611.500.000			0		0,00	0		0,00			0,00			0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2 01 05	Sub kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Mendik FasilitasKesehatan yang disediakan (Unit)	468	25.338.550.000			156	6.412.215.123	0,00	0		0,00		1.158.424.050	0,00		4.167.803.576,00	100,00	156	916.935.352	100	156	6.243.162.978	156	6.243.162.978	33,33	24,64	
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 02 02 2 01 05	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintenanace (Unit)	12	3.032.310.000			4	134.075.568	0,00	0		0,00		59.338.590	0,00		40.807.147,00	100,00	4	21.219.600	100	4	121.365.337	4	121.365.337	33,33	4,00	
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	1 02 02 2 01 05	Sub kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai	3	331.000.000			1	57.874.000	0,00	0		0,00			0,00		56.728.000,00	100,00	1	-	100	1	56.728.000	1	56.728.000	33,33	17,14	
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 02 02 2 01 12	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat , vaksin dan BMHP yang disediakan (Unit)	12	31.328.246.626			4	2.013.149.515	0,00	0		0,00		176.230.376	0,00		379.375.500,00	100,00	4	1.368.061.639,00	100	4	1.923.667.515	4	1.923.667.515	33,33	6,14	
	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang diawali tahapan kunjungan keluarga	1 02 02 2 01 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas (Keluarga)	306603	264.800.000			0		0,00	0		0,00			0,00			0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 02 02 2 01 13	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	31	3.310.000			0		0,00	0		0,00			0,00			0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terselenggaranya Penyediaan layanan Kesehatan UKM & UKP Rujukan tingkat kab/kota sesuai standar	**1 02 02 2 02**	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan**	**100**	**327.920.987.408**			**100**	**67.146.163.641**	**0,00**		**5.153.377.647**	**0,00**		21.448.140.730	**0,00**		**17.186.960.799**	**0,00**		**18.519.627.384**	**0,00**		**62.308.106.560**	**0,00**	**62.308.106.560**	**0,00**	**19,00**	
				Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
				Status Gizi Kurang pada Balita	**7,80**				**8**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
				Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis	**9,88**				**7,41**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
				Indeks Penyakit menular dan Tidak	**0,41**				**0,42**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Cakupan Masyarakat yg memiliki Jaminan Kesehatan	90,00				87		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	-	0,00		
				Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure	100				100		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	-	0,00		
				Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS	100				100		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	-	0,00		
				Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan	100				100		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	-	0,00		
				Persentase Faskes yang terakreditasi	69,23				58,97		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	-	0,00		
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai	1 02 02 2 02 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	19041	662.000.000			5205	624.153.000	21,94	1142		19,79	1030	165.635.200,00	21,79	1134	182.920.400,00	21,84	1137	255.146.100	85,36	4443	603.701.700	0,00	603.701.700	0,00	91,19	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai	1 02 02 2 02 02	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	18177	1.026.100.000			5205	171.746.208	23,44	1220	2.303.934	22,15	1153	19.762.866,00	22,23	1157	46.871.550,00	20,69	1077	85.454.100,00	88,51	4607	154.392.450	0,00	154.392.450	0,00	15,05	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai	1 02 02 2 02 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	17311	479.950.000			5138	141.926.344	23,36	1200		22,15	1138	62.509.500,00	22,01	1131	-	21,49	1104	65.777.000,00	89,00	4573	128.286.500	0,00	128.286.500	0,00	26,73	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita	1 02 02 2 02 04	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90461	1.833.905.500			19690	67.450.000	26,81	5279		25,61	5042	29.342.000,00	28,33	5578	10.430.000,00	19,25	3791	27.027.500,00	100	####	66.799.500	0,00	66.799.500	0,00	3,64	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada	1 02 02 2 02 05	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	179603	519.670.000			57263	340.709.000	31,93	####		25,05	####	55.840.000,00	34,53	####	128.726.000,00	8,52	4.881	115.041.000	100,03	####	299.607.000	0,00	299.607.000	0,00	57,65	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	625345	359.135.000			214756	497.418.000	20,64	####		19,82	####	29.077.500,00	23,35	####	460.030.000,00	27,97	####	7.470.000,00	91,78	####	496.577.500	0,00	496.577.500	0,00	138,27	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai	1 02 02 2 02 06	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Lanjut	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	86283	2.062.928.400			31906	557.485.000	24,83	7923		22,29	7112	6.437.500,00	20,23	6456	59.366.000,00	24,28	7747	488.925.000,00	91,64	####	554.728.500	0,00	554.728.500	0,00	26,89	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	195748	111.878.000			17045	67.450.000	56,36	9607		29,63	5050	14.516.000,00	13,85	2360	38.248.000,00	15,39	2624	13.850.000,00	115,23	####	66.614.000	0,00	66.614.000	0,00	59,54	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	20204	101.948.000			6584	652.551.000	32,21	2121		25,71	1693	419.155.000,00	20,94	1379	10.720.000,00	22,78	1500	207.536.000,00	101,66	6693	637.411.000	0,00	637.411.000	0,00	625,23	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 02 02 2 02 07	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	'Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (Orang)	1674	331.000.000			626	67.450.000	38,34	240	-	28,27	177	3.990.000,00	26,68	167	6.280.000,00	11,18	70	49.725.350,00	104,47	654	59.995.350	0,00	59.995.350	0,00	18,13	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	16530	1.803.536.250			6182	1.174.327.140	29,42	1819	-	26,90	1663	50.815.000,00	28,07	1735	994.000.500,00	29,38	1816	111.615.000,00	113,77	7033	1.156.430.500	0,00	1.156.430.500	0,00	64,12	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	1 02 02 2 02 08	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan yankes sesuai standar (Orang)	28136	584.498.667			7186	230.400.000	20,11	1445	-	21,46	1542	31.770.000,00	25,27	1816	108.725.000,00	35,11	2523	67.838.000,00	101,95	7326	208.333.000	0,00	208.333.000	0,00	35,64	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 02 02 2 02 09	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar (Dokumen)	3	43.030.000			0		0,00	0		0,00	0		0,00		-	0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampar Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi	1 02 02 2 02 10	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisi Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	3	6.620.000			0		0,00	0		0,00	0		0,00		-	0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	1 02 02 2 02 11	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Dokumen)	36	592.232.224			12	2.602.332.416	25,00	3	4.591.200	25,00	3	306.881.376,00	25,00	3	1.066.709.860,00	25,00	3	624.803.770	100	12	2.002.986.206	0,00	2.002.986.206	0,00	338,21	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 02 02 01 02 12	Sub Kegiatana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan Olah raga (Dokumen)	72	125.900.000					0,00	0		0,00	0		0,00		-	0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 02 02 01 02 13	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (Dokumen)	72	100.005.030			24	630.982.624	25,00	6	6.886.800	25,00	6	62.697.200,00	25,00	6	443.725.400,00	25,00	6	101.000.280,00	100	24	614.309.680	0,00	614.309.680	0,00	614,28	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 02 02 01 02 14	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	36	336.693.200			12	367.110.000	25,00	3		25,00	3	134.815.000,00	25,00	3	129.335.750,00	25,00	3	94.062.500	100	12	358.213.250	0,00	358.213.250	0,00	106,39	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri	1 02 02 2 02 17	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	36	179.302.700					0,00	0		0,00	0		0,00		-	0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans		Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan (Dokumen)	36	754.349.000			12	487.597.654	25,00	3	6.886.800	25,00	3	76.127.100,00	25,00	3	120.043.000,00	25,00	3	167.764.416,00	100	12	370.821.316	0,00	370.821.316	0,00	49,16	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1418	136.901.600			0		0,00	0		0,00	0		0,00		-	0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	24	213.600.000			8	2.340.000	25,00	2		25,00	2		25,00	2	2.320.000,00	25,00	2	-	100	8	2.320.000	0,00	2.320.000	0,00	1,09	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (Dokumen)	54	924.116.166			18	2.122.800.827	27,78	5	9.182.400	27,78	5	363.133.600,00	27,78	5	457.543.900,00	16,67	3	1.072.257.894	100	18	1.902.117.794	18	1.902.117.794	33,33	205,83	
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Dokumen)	36	7.950.000.000			12	22.360.920.340	25,00	3	2.400.084.400	25,00	3	7.820.507.438,00	25,00	3	5.328.040.600,00	25,00	3	6.749.614.957,00	100	12	22.298.247.395	12	22.298.247.395	33,33	280,48	
	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2 02 18	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	14764	400.160.000			0		0,00	0		0,00	0		0,00		-	0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium	1 02 02 2 02 19	Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensia KLB ke laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah spesimen penyakit pontensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan (Paket)	480	317.760.000			150	36.675.000	25,00	37,5		25,00	37,5	9.634.600,00	25,00	37,5	6.406.600,00	25,00	37,5	12.746.000,00	100	150	28.787.200	150	28.787.200	31,25	9,06	
	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat		Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat (Dokumen)	30	673.450.000			12	200.460.000	25,00	3		25,00	3	200.000.000,00	25,00	3	-	25,00	3	- 13.150.594,00	100	12	186.849.406	12	186.849.406	40,00	27,75	
	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan	1 02 02 2 02 20	Sub Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (Dokumen)	32	3.310.000			0		0,00	0		0,00	0		0,00		-	0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 02 02 2 02 21	Sub kegiatan operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokumen operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	108	79.301.366.100			36		25,00	9		25,00	9		25,00	9	-	25,00	9		100	36	-	36	-	33,33	0,00	
		1 02 02 2 02 25	Operasional Pelayanan RSUD Depati Bahrin	Jumlah dokumen operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Depati Bahrin	36	42.439.315.100			12	8.554.309.043	25,00	3	790.601.434	25,00	3	2.944.259.707,00	25,00	3	1.406.172.211,00	25,00	3	2.386.177.444,00	100	12	7.527.210.796	12	7.527.210.796	33,33	17,74	
			Operasional Pelayanan RSUD Eko Maulana Ali	Jumlah dokumen operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Eko Maulana Ali	36	22.832.000.000			12	4.332.405.508	25,00	3	448.733.092	25,00	3	1.641.303.385,00	25,00	3	1.007.265.900,00	25,00	3	816.216.056,00	100	12	3.913.518.433	12	3.913.518.433	33,33	17,14	
			Operasional Pelayanan RSUD Syafrie Rachman	Jumlah dokumen operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Syafrie Rachman	36	14.030.051.000			12	2.877.773.538	25,00	3	169.864.360	25,00	3	1.155.791.448,00	25,00	3	605.829.139,00	25,00	3	836.917.579,00	100	12	2.768.402.526	100	2.768.402.526	277,78	19,73	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		Sub Kegiatan operasional pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas (Dokumen)	432	64.351.316.700			144		25,00	36		25,00	36		25,00	36	-	25,00	36		100	144	-	100	-	23,15	0,00	
		1 02 02 2 02 33	Operasional pelayanan Puskesmas Kenanga	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Kenanga	36	7.326.870.000			12	974.512.428	25,00	3	80.474.572	25,00	3	314.217.743,00	25,00	3	202.323.256,00	25,00	3	253.940.381,00	100	12	850.955.952	100	850.955.952	277,78	11,61	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 02 02 2 02 33	Operasional pelayanan Puskesmas Belinyu	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Belinyu	36	6.410.000.000			12	1.529.754.605	25,00	3	140.090.635	25,00	3	607.677.753,00	25,00	3	308.534.745,00	25,00	3	325.746.712,00	100	12	1.382.049.845	12	1.382.049.845	33,33	21,56	
		1 02 02 2 02 33	Operasional pelayanan Puskesmas Gunung Muda	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Muda	36	3.462.260.000			12	707.518.068	25,00	3	46.516.800	25,00	3	237.036.445,00	25,00	3	135.335.198,00	25,00	3	163.541.303,00	100	12	582.429.746	12	582.429.746	33,33	16,82	
		1 02 02 2 02 33	Operasional pelayanan Puskesmas Sungailiat	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Sungailiat	36	3.415.920.000			12	985.488.903	25,00	3	66.084.277	25,00	3	310.618.523,00	25,00	3	195.865.267,00	25,00	3	263.090.872,00	100	12	835.658.939	12	835.658.939	33,33	24,46	
		1 02 02 2 02 33	Operasional pelayanan Puskesmas Baturusa	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Baturusa	36	4.435.400.000			12	964.308.008	25,00	3	80.273.325	25,00	3	324.640.833,00	25,00	3	212.418.307,00	25,00	3	226.871.687,00	100	12	844.204.152	12	844.204.152	33,33	19,03	
		1 02 02 2 02 33	Operasional pelayanan Puskesmas Pemali	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Pemali	36	4.916.147.710			12	822.808.742	25,00	3	72.135.450	25,00	3	295.210.709,00	25,00	3	172.718.572,00	25,00	3	217.654.181,00	100	12	757.718.912	12	757.718.912	33,33	15,41	
		1 02 02 2 02 33	Operasional pelayanan Puskesmas Bakam	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Bakam	36	6.807.200.000			12	1.461.586.742	25,00	3	129.421.917	25,00	3	480.555.774,00	25,00	3	253.332.008,00	25,00	3	359.432.435,00	100	12	1.222.742.134	12	1.222.742.134	33,33	17,96	
		1 02 02 2 02 33	Operasional pelayanan Puskesmas Riausilip	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Riausilip	36	5.296.000.000			12	1.307.620.084	25,00	3	127.182.000	25,00	3	489.972.411,00	25,00	3	252.883.248,00	25,00	3	314.767.346,00	100	12	1.184.805.005	12	1.184.805.005	33,33	22,37	
		1 02 02 2 02 33	Operasional pelayanan Puskesmas Puding Besar	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Puding Besar	36	4.223.560.000			12	896.907.876	25,00	3	95.340.860	25,00	3	376.646.379,00	25,00	3	160.008.398,00	25,00	3	176.300.079,00	100	12	808.295.716	12	808.295.716	33,33	19,14	
		1 02 02 2 02 33	Operasional pelayanan Puskesmas Petaling	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Petaling	36	9.469.910.000			12	1.665.315.340	25,00	3	152.665.780	25,00	3	657.512.598,00	25,00	3	365.431.198,00	25,00	3	358.226.473,00	100	12	1.533.836.049	12	1.533.836.049	33,33	16,20	
		1 02 02 2 02 33	Operasional pelayanan Puskesmas Sinar Baru	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Sinar Baru	36	4.496.257.660			12	844.965.450	25,00	3	62.191.700	25,00	3	261.190.725,00	25,00	3	153.256.694,00	25,00	3	177.587.572,00	100	12	654.226.691	12	654.226.691	33,33	14,55	
		1 02 02 2 02 33	Operasional pelayanan Puskesmas Penagan	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Penagan	36	5.312.550.000			12	1.121.933.069	25,00	3	96.809.000	25,00	3	422.430.631,00	25,00	3	182.099.317,00	25,00	3	246.167.860,00	100	12	947.506.808	12	947.506.808	33,33	17,84	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Sub kegiatan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (Dokumen)	36	8.574.600.000			12	1.645.021.622	25,00	3		25,00	3	175.119.350,00	25,00	3	1.333.356.100,00	25,00	3	91.774.185,00	100	12	1.600.249.635	12	1.600.249.635	33,33	18,66	
	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Sub kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota (Unit)	75	973.478.400			0		0,00	0		0,00	0		0,00		-	0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian		Sub kegiatan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) (Laporan)	6	78.400.000			2	32.950.000	0,00	0		50,00	1	6.620.000,00	0,00		2.245.000,00	50,00	1	17.895.000,00	100	2	26.760.000	2	26.760.000	33,33	34,13	
	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat		Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah public safety center (psc 119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) (Unit)	9	5.930.000.000			3	1.558.329.062	0,00	0	165.056.911	33,33	1	522.099.136,00	33,33	1	252.868.841,00	33,33	1	458.905.006,00	100	3	1.398.929.894	3	1.398.929.894	33,33	23,59	
	Terlaksananya pengelolaan kesehatan orang dengan Tuberkolusis		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang yang menderita TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	3150	195.600.000			1272	67.600.000	25,00	318		25,00	318	11.250.000,00	25,00	318	10.175.000,00	25,00	318	37.200.000	100	1272	58.625.000	1272	58.625.000	40,38	29,97	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV/ Aids		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Penderita HIV/Aids yang mendapatkan pelyanan kesehatan sesuai standar (Orang)	174	165.500.000			58	38.701.000	25,86	15		25,86	15	4.900.000,00	24,14	14	13.786.320,00	24,14	14	10.063.680	100	58	28.750.000	58	28.750.000	33,33	17,37	
	Terselenggaranya pengelolaan kesehatan malaria		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4800	66.200.000			160	50.300.000	25,00	40		25,00	40	7.250.000,00	25,00	40	16.500.000,00	25,00	40	20.972.000,00	100	160	44.722.000	160	44.722.000	3,33	67,56	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduks (Dokumen)	36	578.505.000			12	191.143.000	25,00	3		25,00	3	21.810.160,00	25,00	3	75.225.640,00	25,00	3	57.661.720	100	12	154.697.520	12	154.697.520	33,33	26,74	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	72	198.600.000			24	1.110.627.000	25,00	6		25,00	6	317.380.140,00	25,00	6	268.887.880,00	25,00	6	398.013.540	100	24	984.281.560	24	984.281.560	33,33	495,61	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**1 02 02 01 03**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase Faskes yang menjalankan sistem informasi (%)**	**100**	**2.547.250.000**			**100**	**43.803.680**	**25,00**		**6.886.800**	**25,00**		**25.206.000**	**25,00**		**5.861.800**	**25,00**		**5.682.400**	**100**		**43.637.000**	**100**	**43.637.000**	**100**	**1,71**	
	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 02 02 01 03 0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan (Dokumen)	108	2.547.250.000			35	43.803.680	22,86	8	6.886.800	25,71	9	25.206.000	25,7	9	5.861.800,00	25,71	9	5.682.400,00	100	35	43.637.000	35	43.637.000	32,41	1,71	
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	**1 02 02 01 04**	**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**88,70**	**796.160.000**		**-**	**88,60**	**10.415.736**	**0,00**		**2.295.600**	**0,00**		**7.636.800**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**9.932.400**	**0,00**	**9.932.400**	**0,00**	**0,01**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional	1 02 02 01 04 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan (Unit)	19	540.160.000			19	10.415.736	21,05	4	2.295.600	26,32	5	7.636.800	26,3	5	-	26,32	5	-	100	19	9.932.400	19	9.932.400	100,00	0,02	
	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 02 02 01 04 0005	Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	3	256.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							21,76		4,70	22,32		20,93	21,36		31,65	36,07		37,57	100		94,84			34,90	21,62	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
3	**Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar**	**1 02 03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase peningkatan kapasitas SDMK sesuai standar (%)**	**0,75**	**1.806.862.800**			**0,68**	**991.084.152**	**0,00**		**-**	**0,00**		**146.813.035**	**0,00**		**503.105.124**	**0,00**		**276.934.880**	**0,00**		**926.853.039**	**0,00**	**926.853.039**	**0,00**	**0,51**	**DINKES**
	Terlaksannya pemberian izin peraktek tenaga Kesehatan	**1 02 03 2 01**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP (%)**	**95,00**	**335.965.000**			**95**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
				Cakupan tenaga kesehatan yang memiliki STR (%)	**100**				**92,5**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 02 03 2 01 0001	Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	3	335.965.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00		0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terencananya kebutuhan dan pendayagunaan SDM	**1 02 03 2 02**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Faskes dengan jenis tenaga sesuai standar (%)**	**100**	**755.308.900**			**100**	**146.874.152**	**100**		**-**	**0,00**		**61.653.400**	**0,00**		**17.981.600**	**0,00**		**65.859.800**	**100**		**145.494.800**	**100**	**145.494.800**	**100**	**19,26**	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	1 02 03 2 02 0003	Sub Kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan (Dokumen)	3	755.308.900			1	146.874.152	0,00	0		0,00		61.653.400	0,00		17.981.600	100	1	65.859.800	100	1	145.494.800	1	145.494.800	0,11	19,26	
	Meningkatnya pengembangan mutu dan kompetensi teknis SDM	**1 02 03 2 03**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi (%)**	**4,80**	**715.588.900**			**3,9**	**844.210.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**85.159.635**	**0,00**		**485.123.524**	**0,00**		**211.075.080**	**0,00**		**781.358.239**	**0,00**	**781.358.239**	**0,00**	**#####**	
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	1 02 03 2 03 0001	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya (Orang)	115	715.588.900			112	844.210.000	0,00	0	-	26,79	30	85.159.635	28,57	32	485.123.524,00	44,64	50	211.075.080,00	100	112	781.358.239	112	781.358.239	0,32	109,19	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	13,39		14,81	14,29		50,76	48,21		27,94	100		93,52			0,15	0,51	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		R	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
4	**Meningkatnya Pengawasan Keamanan Obat dan makanan**	**1 02 04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase pengawasan toko obat, apotek, dan keamanan pangan**	**91,00**	**955.832.010**		**-**	**70**	**317.901.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**76.659.000**	**0,00**		**68.103.122**	**0,00**		**136.687.449**	**0,00**		**281.449.571**	**0,00**	**281.449.571**	**0,00**	**29,45**	**DINKES**
	Terselenggaranya Pemberian izin Sarana kesehatan	**1 02 04 2 01**	**Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat**	**Cakupan pengawasan sarana kefarmasian**	**100**	**49.650.000**			**100**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		-	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	1 02 04 2 01 0001	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan apotek, toko obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*3*	49.650.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00		0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terselenggaranya rekomendasi penerbitan sertifikat Produk PIRT	**1 02 04 2 02**	**Kegiatan Penerbitan Sertifikasi produksi pangan industri RT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri**	**Cakupan Industri yang memiliki Sertifikat PIRT**	**49,00**	**377.737.200**			**41**	**139.266.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**74.459.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**61.308.000**	**0,00**		**135.767.000**	**0,00**	**135.767.000**	**0,00**	**35,94**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat produksi pangan industri RT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat	1 02 04 2 02 0001	Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT (Dokumen)	3	377.737.200			1	139.266.000	0,00	0	-	0,00	0	74.459.000	0,00	0	-	100	1	61.308.000,00	100	1	135.767.000	1	135.767.000	33,33	35,94	
	Meningkatnya keamanan produk pangan industri rumah tangga	**1 02 04 2 03**	**Kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan**	**Cakupan pengawasan sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)**	**80,00**	**528.444.810**			**75**	**178.635.000**	**18,75**		**-**	**18,75**		**2.200.000**	**18,75**		**68.103.122**	**18,75**		**75.379.449**	**75,00**		**145.682.571**	**75,00**	**145.682.571**	**93,75**	**27,57**	
	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta	1 02 04 2 03 0002	Sub Kegiatan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman IRT beredar yang dilakukan pemeriksaan Pos Market dalam rangka tindak lanjut pengawasan (Unit)	270	528.444.810			75	178.635.000	25,33	19		25,33	19	2.200.000	25,33	19	68.103.122	24,00	18	75.379.449,00	100	75	145.682.571	75	145.682.571	27,78	27,57	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**12,67**		**0,00**	**12,67**		**24,11**	**12,67**		**21,42**	**62,00**		**43,00**	**100**		**88,53**			**20,37**	**29,45**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**R**		**SR**	**ST**		**T**			**SR**	**SR**	
5	**Meningkatnya prilaku hidup bersih dan sehat**	**1 02 05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG**	**Indeks rumah tangga yang berPHBS**	**0,75**	**810.950.000**			**0,70**	**458.453.152**	**0,00**		**6.423.000**	**0,00**		**108.894.900**	**0,00**		**107.404.600**	**0,70**		**199.925.000**	**0,70**		**422.647.500**	**0,70**	**422.647.500**	**93,33**	**52,12**	**DINKES**
	Meningkatnya pemberdayaan & peningkatan peran serta masyarakat	**1 02 05 2 01**	**Kegiatan advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Advokasi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**	**100**	**513.050.000**			**100**	**80.056.152**	**0,00**		**6.423.000**	**0,00**		**27.965.400**	**0,00**		**11.723.600**	**100**		**33.325.300**	**100**		**79.437.300**	**100**	**79.437.300**	**100**	**15,48**	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	1 02 05 2 01 01	Sub kegiatan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraam dan pemberdayaan masyarakat (Dokumen)	3	513.050.000			1	80.056.152	0,00	0	6.423.000	0,00		27.965.400	0,00		11.723.600	100	1	33.325.300	100	1	79.437.300	1	79.437.300	33,33	15,48	
	Meningkatnya pengembangan & Pelaksanaan UKBM	**1 02 05 2 03**	**Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah**	**Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat**	**98,00**	**297.900.000**			**97**	**378.397.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**80.929.500**	**0,00**		**95.681.000**	**97,00**		**166.599.700**	**97,00**		**343.210.200**	**97,00**	**343.210.200**	**98,98**	**#####**	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	1 02 05 2 03 01	Sub kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyakarat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supevisi upaya kesehatan bersumber daya masyarkat (UKBM) (Dokumen)	3	297.900.000			1	378.397.000	0,00	0		0,00		80.929.500	0,00	0	95.681.000	100	1	166.599.700	100	1	343.210.200	1	343.210.200	33,33	115,21	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**1,40**	**0,00**		**23,75**	**0,00**		**23,43**	**100**		**43,61**	**100**		**92,19**			**33,33**	**52,12**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**R**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KESEHATAN						**291.166.339.809**			**22.781.109.813**			**86.283.385.849**			**84.088.552.786**			**95.371.754.624**			**288.524.803.072**		**288.524.803.072**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Kesehatan (%)							**12,35**		**7,82**	**14,92**		**29,63**	**13,46**		**28,88**	**53,08**		**32,76**	**100**		**99,09**			**23,90**	**29,66**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Kesehatan							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**R**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
		1 03	**URUSAN PEMERINTAH BIDAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**572.612.868.100,01**				**83.958.832.822**			**2.509.716.613**			**23.483.252.222**			**25.680.337.080**			**31.116.179.037**			**82.789.484.952**		**82.789.484.952**		**14,46**	
	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan			**Nilai Evaluasi Akip (Angka)**	**BB (79,70)**				**BB (79,50)**		**0,00**			**BB (71,61)**			**0,00**			**0,00**			**BB (71,61)**			**BB (71,61)**		**89,85**		
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan**	**1 03 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah (Angka)**	**30,00**	**58.181.160.452**			**29,30**	**8.839.125.924**	**0,00**		**1.820.625.135**	**22,37**		**2.639.024.485**	**0,00**		**1.817.813.355**	**0,00**		**2.189.707.710**	**22,37**		**8.467.170.685**	**22,37**	**8.467.170.685**	**74,57**	**14,55**	**DPUPR**
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat	**13,99**				**12,99**		**0,00**			**11,63**			**0,00**			**0,00**			**11,63**			**11,63**		**83,13**		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan			**Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			**Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup**	**64,76**				**65,60**		**0,00**			**66,04**			**0,00**			**0,00**			**66,04**			**66,04**		**#####**		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Angka)**	**4,00**				**3,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**3,00**			**3,00**			**3,00**		**75,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)**	**100**				**75,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**75,00**			**75,00**			**75,00**		**75,00**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	**1 03 01 2 01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)**	**100**	**628.829.001**			**100**	**77.390.000**	**50,00**		**1.230.000**	**25,00**		**28.797.500**	**25,00**		**1.230.000**	**0,00**		**45.113.823**	**100**		**76.371.323**	**100**	**76.371.323**	**100**	**12,15**	
				Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	**100**				**100**		**50,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 03 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	360.160.000			4	41.955.000	50,00	2	1.230.000	25,00	1	13.657.500,00	25,00	1	1.230.000	0,00	0,00	25.493.823	100	4	41.611.323	4	41.611.323	33,33	11,55	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 03 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	42	268.669.001			4	35.435.000	50,00	2	-	25,00	1	15.140.000,00	25,00	1	-	0,00	0,00	19.620.000	100	4	34.760.000	4	34.760.000	9,52	12,94	
		1 03 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar (%)**	**100**	**28.570.357.796**			**100**	**6.253.028.365**	**25,00**		**1.397.836.785**	**25,00**		**1.952.732.243**	**25,00**		**1.333.174.652**	**25,00**		**1.336.702.988**	**100**		**6.020.446.668**	**100**	**6.020.446.668**	**100**	**21,07**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 03 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	186	28.144.851.861			63	6.243.028.365	25,00	63	1.397.836.785	25,00	63	1.950.272.243,00	25,00	63	1.330.714.652	25,00	63	1.332.112.988	100	63	6.010.936.668	63	6.010.936.668	33,87	21,36	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 03 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	243.584.135			12	5.000.000	25,00	3	-	25,00	3	2.460.000,00	25,00	3	-	25,00	3	2.090.000	100	12	4.550.000	12	4.550.000	33,33	1,87	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	1 03 01 2 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	54	181.921.800			40	5.000.000	25,00	10	-	25,00	10		0,00	0,00	2.460.000	50,00	20	2.500.000	100	40	4.960.000	40	4.960.000	74,07	2,73	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	**1 03 01 2 03**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah (%)**	**100**	**273.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 03 01 2 03 0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	36	273.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	**1 03 01 2 04**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang terkelola (%)**	**100**	**273.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersedianya Laporan Pengelolaan	1 03 01 2 04 0007	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	273.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan	**1 03 01 2 05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap (%)**	**100**	**855.400.000**			**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)**	**67,54**				**49,54**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	1 03 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	364.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 03 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	127.400.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 03 01 2 05 0005	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	364.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat	**1 03 01 2 06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum Di Perangkat Daerah (%)**	**100**	**3.151.590.500**			**100**	**38.068.979**	**25,00**		**22.060.200**	**25,00**		**7.195.000**	**25,00**		**5.145.000**	**25,00**		**3.360.000**	**100**		**37.760.200**	**100**	**37.760.200**	**100**	**1,20**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	1 03 01 2 06 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1.859.390.500			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 03 01 2 06 0005	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	1.092.000.000			12	38.068.979	25,00	3	22.060.200	25,00	3	7.195.000,00	25,00	3	5.145.000,00	25,00	3	3.360.000	100	12	37.760.200	12	37.760.200	33,33	3,46	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 03 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	109.200.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 03 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	91.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana	**1 03 01 2 07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah (%)**	**85,00**	**11.220.290.002**			**70,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 03 01 2 07 0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6	2.548.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Alat Besar	1 03 01 2 07 0003	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	3	7.398.290.002			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 03 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	546.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 03 01 2 07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	728.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat	**1 03 01 2 08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah (%)**	**100**	**9.074.258.491**			**100**	**1.843.963.672**	**25,00**		**365.447.937**	**25,00**		**550.265.820**	**25,00**		**459.860.069**	**25,00**		**414.332.080**	**100**		**1.789.905.906**	**100**	**1.789.905.906,00**	**100**	**19,73**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 03 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	7.677.000.000			12	1.592.039.840	25,00	3	308.510.996	25,00	3	479.142.800,00	25,00	3	401.544.400	25,00	3	352.445.600	100	12	1.541.643.796	12	1.541.643.796	33,33	20,08	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 03 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	820.939.247			12	170.000.000	25,00	3	38.594.785	25,00	3	44.667.020,00	25,00	3	40.430.269	25,00	3	45.639.280	100	12	169.331.354	12	169.331.354	33,33	20,63	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 03 01 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	576.319.244			12	81.923.832	25,00	3	18.342.156	25,00	3	26.456.000	25,00	3	17.885.400	25,00	3	16.247.200	100	12	78.930.756	12	78.930.756	33,33	13,70	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	**1 03 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**95,00**	**4.134.434.662**			**75,00**	**626.674.908**	**18,75**		**34.050.213**	**18,75**		**100.033.922**	**18,75**		**18.403.634**	**18,75**		**390.198.819**	**75,00**		**542.686.588**	**75,00**	**542.686.588**	**78,95**	**86,60**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	1 03 01 2 09 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	1.027.974.662			8	257.259.908	12,50	1	27.535.559	37,50	3	63.524.300,00	25,00	2	17.267.016	25,00	2	121.725.395	100	8	230.052.270	8	230.052.270	100,00	22,38	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	1 03 01 2 09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2	2.100.000.000			5	143.665.000	0,00	0,00	834.654	40,00	2	33.179.622,00	20,00	1	1.136.618	40,00	2	53.923.424	100	5	89.074.318	5	89.074.318	250,00	4,24	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 03 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	54	273.000.000			54	25.750.000	0,00	0,00	5.680.000	35,19	19	3.330.000,00	0,00	0,00	-	64,81	35	16.740.000	100	54	25.750.000	54	25.750.000	100,00	9,43	
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 03 01 2 09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	733.460.000			2	200.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		100	2	197.810.000	100	2	197.810.000	2	197.810.000	100,00	26,97	
				Rata rata capaian kinerja (%)							**22,12**		**20,60**	**25,98**		**29,86**	**18,85**		**20,57**	**33,06**		**24,77**	**100**		**95,79**			**48,19**	**14,55**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur			**Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam kondisi Baik (%)**	**91,00**				**89,00**																				
2	**Meningkatnya Infrastruktur Irigasi dalam**	**1 03 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi yang Baik (%)**	**68,00**	**25.034.258.097**			**65,00**	**4.477.788.565**	**0,00**		**17.533.234**	**0,00**		**1.470.755.858**	**0,00**		**1.596.162.973**	**0,00**		**1.278.213.334**	**0,00**		**4.362.665.399**	**0,00**	**4.362.665.399**	**0,00**	**17,43**	**DPUPR**
	Meningkatnya Infrastruktur SDA Dalam Kondisi			**Persentase Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik**	**62,75**				**61,20**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu	**1 03 02 2 01**	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah**	**Persentase Infrastruktur Drainase Dalam Kondisi Baik (%)**	**73,0**	**15.183.400.000**			**61,00**	**3.060.364.317**	**0,00**		**820.000**	**0,00**		**1.416.918.316**	**0,00**		**934.667.298**	**0,00**		**639.405.900**	**0,00**		**2.991.811.514**	**0,00**	**2.991.811.514**	**0,00**	**19,70**	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	1 03 02 2 01 0080	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (Km)	12	2.047.200.000			11,31	288.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		100	11,31	283.307.200	100	11,31	283.307.200	11,31	283.307.200	94,25	13,84	
	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	1 03 02 2 01 0093	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (Km)	3	1.706.000.000			3	498.967.179	0,00	0,00	-	66,67	2	297.827.179	33,33	1	193.984.000	0,00	0,00	3.440.000	100	3	495.251.179	3	495.251.179	100	29,03	
	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	1 03 02 2 01 0101	Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (Km)	12	1.706.000.000			0,9365	1.749.329.950	0,00	0,00	-	46,77	0,438	893.793.950,00	53,23	####	696.196.358	0,00	0,00	151.780.000	100	0,94	1.741.770.308	0,94	1.741.770.308	7,80	102,10	
	Meningkatnya Tanggul Sungai	1 03 02 2 01 0103	Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan (Km)	21	3.412.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	1 03 02 2 01 0110	Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi (Km)	12	1.706.000.000			1	149.282.000	0,00	0,00	-	100	1	149.282.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	1	149.282.000	1	149.282.000	8,33	8,75	
	Panjang Tanggul Sungai yang	1 03 02 2 01 0115	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (Km)	12	1.706.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terbangunnya Embung dan Penampung Air	1 03 02 2 01 0121	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	6	682.400.000			1	274.785.188	0,00	0,00	-	0,00	0,00	74.785.187	0,00	0,00	-	100	1	162.804.000	100	1	237.589.187	1	237.589.187	16,67	34,82	
	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	1 03 02 2 01 0126	Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	6	1.706.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan	1 03 02 2 01 0128	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	3	511.800.000			1	100.000.000	0,00	0,00	820.000	0,00	0,00	1.230.000	0,00	0,00	44.486.940	100	1	38.074.700	100	1	84.611.640	1	84.611.640	33,33	16,53	
	Terlaksannya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi yg luasnya dibawah	**1 03 02 2 02**	**Kegiatan Pengembangan dan Pengeloaalaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam**	**Persentase Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik (%)**	**67,00**	**9.850.858.097**			**60,00**	**1.417.424.248**	**0,00**		**16.713.234**	**0,00**		**53.837.542**	**0,00**		**661.495.675**	**0,00**		**638.807.434**	**0,00**		**1.370.853.885**	**0,00**	**1.370.853.885**	**0,00**	**13,92**	
	Terbangunnya Jarigan Irigasi Permukaan	1 03 02 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (Km)	1	600.000.000			1,0948	1.152.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	29,23	0,32	624.497.875	70,77	0,77	504.128.998	100	1,09	1.128.626.873	1,09	1.128.626.873	218,96	188,10	
	Meningkatnya jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2 02 0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (Km)	1	1.106.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2 02 0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Km)	9	4.623.260.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2 02 0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	22	2.217.800.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Kelembagaan Pengelola Irigasi yang mendapatkan Operasionalisasi	1 03 02 2 02 0034	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	20	853.000.000			6	144.725.000	0,00	0,00	16.713.234	100	6	30.850.800	0,00	0,00	24.630.800	0,00	0,00	59.956.400	100	6	132.151.234	6,00	132.151.234	30,00	15,49	
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi	1 03 02 2 02 0035	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang	3	450.798.097			1	120.699.248	0,00	0,00	-	0,00	0,00	22.986.742	0,00	0,00	12.367.000	100	1	74.722.036	100	1	110.075.778	1	110.075.778	33,33	24,42	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,39**	**34,83**		**32,85**	**12,87**		**35,65**	**52,31**		**28,55**	**100**		**97,43**			**67,84**	**17,43**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**R**		**SR**	**ST**		**ST**			**S**	**SR**	
	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur			**Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum (%)**	**92,60**																	**38.074.700**								
3	**Meningkatnya Akses Air Bersih**	**1 03 03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Air Minum (%)**	**67,52**	**2.729.600.000**	**0,00**		**43,00**	**1.590.430.000**	**0,00**		**20.073.478**	**0,00**		**23.824.192**	**0,00**		**959.011.698**	**0,00**		**476.245.231**	**0,00**		**1.479.154.599**	**0,00**	**1.479.154.599**	**0,00**	**54,19**	**DPUPR**
	Tersedianya pengembangan sistem penyediaan air	**1 03 03 2 01**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah**	**Jumlah SR SPAM Kabupaten dalam Kondisi Baik (SR)**	**19.796**	**2.729.600.000**	**0,00**		**19.296**	**1.590.430.000**	**0,00**		**20.073.478**	**0,00**		**23.824.192**	**0,00**		**959.011.698**	**0,00**		**476.245.231**	**0,00**		**1.479.154.599**	**0,00**	**1.479.154.599**	**0,00**	**54,19**	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air	1 03 03 2 01 0025	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang	3	511.800.000	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 03 03 2 01 0029	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan	3	1.364.800.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1 03 03 2 01 0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0	0,00	0,00	-	106	1.590.430.000	0,00	0,00	20.073.478	0,00	0,00	23.824.192	100	106	959.011.698	0,00	0,00	476.245.231	100	106	1.479.154.599	106	1.479.154.599	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1 03 03 2 01 0033	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	3	853.000.000	0,00		0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**1,26**	**0,00**		**1,50**	**100**		**60,30**	**0,00**		**29,94**	**100**		**93,00**			**0,00**	**54,19**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**R**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**R**	
4	**Meningkatnya Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan**	**1 03 04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**	**25,00**	**1.456.000.000**	**0,00**	**-**	**15,00**	**656.158.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**154.537.800**	**0,00**		**484.210.000**	**0,00**		**638.747.800**	**0,00**	**638.747.800**	**0,00**	**21,94**	**DPUPR**
	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	**1 03 04 2 01**	**Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan dalam Kondisi Baik (Unit)**	**3**	**1.456.000.000**	**0,00**	**-**	**1**	**656.158.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**154.537.800**	**0,00**		**484.210.000**	**0,00**		**638.747.800**	**0,00**	**638.747.800**	**0,00**	**43,87**	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1 03 04 2 01 0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	3	364.000.000	0,00		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 03 04 2 01 0010	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (Ton/Hari)	3	1.092.000.000	0,00		1	656.158.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	154.537.800	100	1	484.210.000	100	1	638.747.800	1	638.747.800	33,33	58,49	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**23,55**	**100**		**73,79**	**100**		**97,35**			**33,33**	**21,94**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**S**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur			**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi (%)**	**97,20**				**96,60**																				
5	**Meningkatnya Penerapan Sistem Pengelolaan Air Limbah secara Komunal**	**1 03 05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL (%)**	**25,90**	**3.070.800.000**	**0,00**	**-**	**75,00**	**850.565.630**	**0,00**		**29.530.075**	**0,00**		**45.200.710**	**0,00**		**196.925.127**	**0,00**		**569.441.700**	**0,00**		**841.097.612**	**0,00**	**841.097.612**	**0,00**	**29,49**	**DPUPR**
	Terlaksananya pengembangan sistem air limbah domestik	**1 03 05 2 01**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sistem Jaringan Air Limbah Domestik dalam Kondisi Baik (Unit)**	**750**	**3.070.800.000**	**0,00**	**-**	**450**	**850.565.630**	**0,00**		**29.530.075**	**0,00**		**45.200.710**	**0,00**		**196.925.127**	**0,00**		**569.441.700**	**0,00**		**841.097.612**	**0,00**	**841.097.612**	**0,00**	**27,39**	
	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	1 03 05 2 01 0033	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	300	511.800.000	0,00		100	168.261.040	10,00	10	23.327.695	30,00	30	42.384.000	49,00	49	32.829.527,00	11,00	11	63.116.700	100	100	161.657.922	100	161.657.922	33,33	31,59	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 03 05 2 01 0038	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Rumah	3	682.400.000	0,00		1	682.304.590	0,00	0,00	6.202.380	0,00	0,00	2.816.710	0,00	0,00	164.095.600	100	1	506.325.000	100	1	679.439.690	1	679.439.690	33,33	99,57	
	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 03 05 2 01 0039	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	150	1.364.800.000	0,00		0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 03 05 2 01 0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	3	511.800.000	0,00		0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**5,00**		**3,47**	**15,00**		**5,31**	**24,50**		**23,15**	**55,50**		**66,95**	**100**		**98,89**			**33,33**	**29,49**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**R**		**S**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
6	**Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase**	**1 03 06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%)**	**79,79**	**42.851.080.000**	**0,00**	**##########**	**100**	**2.516.951.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**1.179.723.800**	**0,00**		**1.313.658.600**	**0,00**		**12.030.000**	**0,00**		**2.505.412.400**	**0,00**	**2.505.412.400**	**0,00**	**5,85**	**DPUPR**
	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	**1 03 06 2 01**	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik (%)**	**80,13**	**42.851.080.000**	**0,00**	**##########**	**75,00**	**2.516.951.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**1.179.723.800**	**0,00**		**1.313.658.600**	**0,00**		**12.030.000**	**0,00**		**2.505.412.400**	**0,00**	**2.505.412.400**	**0,00**	**5,85**	
	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	1 03 06 2 01 0012	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (Meter)	3000	1.706.000.000	0,00		4124	2.516.951.000	0,00	0,00	-	32,08	1323	1.179.723.800	67,92	2801	1.313.658.600	0,00	0,00	12.030.000	100	4124	2.505.412.400	4124,00	2.505.412.400	137,47	146,86	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	1 03 06 2 01 0015	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	3000	1.706.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	1 03 06 2 01 0021	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Unit)	3	1.706.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase	1 03 06 2 01 0022	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang	3	341.200.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	1 03 06 2 01 0028	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Unit)	3	1.637.760.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	1 03 06 2 01 0025	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Unit)	28	29.002.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase	1 03 06 2 01 0030	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	3	545.920.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	1 03 06 2 01 0031	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara (Meter)	16	6.206.200.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**32,08**		**46,87**	**67,92**		**52,19**	**0,00**		**0,48**	**100**		**99,54**			**17,18**	**18,36**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**S**		**R**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
7	**Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Permukiman**	**1 03 07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Cakupan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (%)**	**100**	**18.686.351.344**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DPUPR**
	Terselenggaranya Infrastruktur Permukiman	**1 03 07 2 01**	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada**	**Presentase Infrastruktur Permukiman dalam**	**100**	**18.686.351.344**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	1 03 07 2 01 0007	Sub Kegiatan Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	30	18.686.351.344	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**	
8	**Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung**	**1 03 08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Ketaatan terhadap Penataan Bangunan Gedung (%)**	**100**	**3.939.428.298**	**0,00**	**-**	**100**	**50.000.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**26.205.000**	**0,00**		**13.890.000**	**0,00**		**40.095.000**	**0,00**	**40.095.000**	**0,00**	**1,02**	**DPUPR**
	Terlaksananya penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat	**1 03 08 2 01**	**Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Perizinan (%)**	**100**	**3.939.428.298**	**0,00**	**-**	**50**	**50.000.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**26.205.000**	**0,00**		**13.890.000**	**0,00**		**40.095.000**	**0,00**	**40.095.000**	**0,00**	**1,02**	
	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 03 08 2 01 0021	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3	2.915.828.298	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	1 03 08 2 01 0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	300	1.023.600.000	0,00	-	100	50.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		87,00	87	26.205.000	13,00	13	13.890.000	100	100	40.095.000	100	40.095.000	33,33	3,92	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**87,00**		**52,41**	**13,00**		**27,78**	**100**		**80,19**			**33,33**	**1,02**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**T**		**R**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**SR**	**SR**	
9	**Terselenggaranya Pengembangan Jasa Kontruksi**	**1 03 09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Presentase SDM Jasa Kontruksi yang Terlatih (%)**	**100**	**1.818.192.997**	**0,00**	**-**	**100**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DPUPR**
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**1 03 09 2 01**	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)**	**100**	**1.818.192.997**	**0,00**	**-**	**50,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan	1 03 09 2 01 0007	Sub Kegiatan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)	3	443.560.000	0,00	-	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan (Unit)	1 03 09 2 01 0005	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan (Unit)	3	351.032.997	0,00	-	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah	1 03 09 2 01 0010	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3	1.023.600.000	0,00	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	
	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur			**Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)**	**69,00**				**63,00**																				
10	**Meningkatnya infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam**	**1 03 #**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap (%)**	**77,51**	**408.686.434.380**	**0,00**	**-**	**75,98**	**64.752.676.200**	**0,00**		**580.399.900**	**0,00**		**18.073.540.965**	**0,00**		**19.615.302.527**	**0,00**		**25.966.321.282**	**0,00**		**64.235.564.674**	**0,00**	**64.235.564.674**	**0,00**	**15,72**	**DPUPR**
	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur	**1 03 # 2 01**	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Km)**	**49,96**	**408.686.434.380**	**0,00**	**-**	**48,98**	**64.752.676.200**	**0,00**		**580.399.900**	**0,00**		**18.073.540.965**	**0,00**		**19.615.302.527**	**0,00**		**25.966.321.282**	**0,00**		**64.235.564.674**	**0,00**	**64.235.564.674**	**0,00**	**15,72**	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1 03 10 2 01 0025	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang	3	1.893.924.229	0,00	-	1	510.337.000	0,00	0,00	11.775.400	0,00	0,00	50.600.135	100	1	82.395.970	0,00	0,00	242.355.678	100	1	387.127.183	1,00	387.127.183	33,33	20,44	
	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1 03 10 2 01 0030	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	3	502.755.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tergantinya Jembatan	1 03 10 2 01 0031	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti (Meter)	16	3.770.662.500	0,00	-	13,50	397.900.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	48,15	6,50	197.200.000	51,85	7	199.235.000	100	14	396.435.000	13,50	396.435.000	84,38	10,51	
	Terbangunnya Ialan	1 03 10 2 01 0032	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	140	22.595.434.604	0,00	-	2,766	1.181.665.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	771.012.000	78,16	2,162	203.083.000	21,84	0,60	200.538.000	100	2,77	1.174.633.000	2,77	1.174.633.000	1,98	5,20	
	Terekonstruksinya Ialan	1 03 10 2 01 0033	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (Km)	74,08	204.647.107.576	0,00	-	16,42	45.091.806.900	0,00	0,00	271.463.500	28,75	4,72	12.774.347.850	28,23	####	12.358.175.650	43,03	7,07	19.481.741.850	100	16,42	44.885.728.850	16,42	44.885.728.850	22,16	21,93	
	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	1 03 10 2 01 0034	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)	37,87	39.735.117.412	0,00	-	16,824	13.946.793.800	0,00	0,00	99.475.000	30,43	5,12	4.034.892.500	65,07	####	4.755.760.075	4,50	0,76	4.939.607.925	100	16,82	13.829.735.500	16,82	13.829.735.500	44,43	34,80	
	Terpantau dan Tervaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1 03 10 2 01 0036	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (Km)	3,00	502.755.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	1 03 10 2 01 0037	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (Km)	79	9.097.181.725	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	1 03 10 2 01 0038	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Meter)	48	5.027.550.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terehabilitasinya Jembatan	1 03 10 2 01 0039	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	33	12.476.609.402	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terbangunnya Jembatan	1 03 10 2 01 0040	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Meter)	126	30.165.300.000	0,00	-	5	846.878.500	0,00	0,00	197.686.000	0,00	0,00	343.434.500	100	5	297.715.000	0,00	0,00	1.985.000	100	5	840.820.500	5	840.820.500	3,97	2,79	
	Jalan yang Mendapatkan Pelebaran Menambah Lajur	1 03 10 2 01 0041	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (Km)	70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		
	Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	1 03 10 2 01 0042	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	17	3.770.662.500	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	1 03 10 2 01 0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Km)	3	1.675.850.000	0,00	-	1	404.735.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	99.253.980	0,00	0,00	1.361.500	100	1	280.735.000	100	1,00	381.350.480	1,00	381.350.480	33,33	22,76	
	Terehabilitasinya Jalan	1 03 10 2 01 0044	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)	38	54.466.733.816	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	1 03 10 2 01 0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Km)	16	18.358.790.616	0,00	-	33,00	2.372.560.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60,61	20	1.719.611.332	39,39	13	620.122.829	100	33	2.339.734.161	33	2.339.734.161	201,34	12,74	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,90**	**8,45**		**27,91**	**54,32**		**30,29**	**37,23**		**40,10**	**100**		**99,20**			**60,14**	**15,72**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**R**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**R**	**SR**	
11	**Terselenggaranya Pengembangan Jasa Kontruksi**	**1 03 #**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Presentase SDM Jasa Kontruksi yang Terlatih (%)**	**100**	**1.190.837.531**	**0,00**	**-**	**100**	**45.750.500**	**0,00**		**-**	**0,00**		**2.870.000**	**0,00**		**720.000**	**0,00**		**38.619.780**	**0,00**		**42.209.780**	**0,00**	**42.209.780**	**0,00**	**3,54**	**DPUPR**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil	**1 03 # 2 01**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih (Orang)**	**135**	**679.037.531**	**0,00**	**-**	**50**	**45.750.500**	**0,00**		**-**	**0,00**		**2.870.000**	**0,00**		**720.000**	**0,00**		**38.619.780**	**0,00**		**42.209.780**	**0,00**	**42.209.780**	**0,00**	**6,22**	
	Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1 03 # 2 01 0014	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Orang)	3	170.600.000	0,00	-	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan	1 03 # 2 01 0016	Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	135	508.437.531	0,00	-	50	45.750.500	0,00	0,00		0,00	0,00	2.870.000	0,00	0,00	720.000	100	50	38.619.780	100	50	42.209.780	50	42.209.780	37,04	8,30	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	**1 03 # 2 02**	**Kegiatan Penyelenggaran Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/kota**	**Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi**	**3**	**511.800.000**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	1 03 # 2 02 0014	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan	15	341.200.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 03 # 2 02 0015	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	3	170.600.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**6,27**	**0,00**		**1,57**	**100**		**84,41**	**100**		**92,26**			**37,04**	**3,54**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
	Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang			**Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR) (%)**	**100**		**0,00**		**100**																				
12	**Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**1 03 #**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Cakupan Aspek Penyelenggaraan**	**100**	**4.968.725.000**	**0,00**	**-**	**100**	**179.387.003**	**0,00**		**41.554.791**	**0,00**		**48.312.212**	**0,00**		**-**	**0,00**		**87.500.000**	**0,00**		**177.367.003**	**0,00**	**177.367.003**	**0,00**	**3,57**	**DPUPR**
	Tersusunnya Dokumen RTRW dan RRTR	**1 03 # 2 01**	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang**	**Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR yg ditetapkan (Dokumen)**	**12**	**1.723.060.000**	**0,00**	**-**	**1**	**7.870.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**5.850.000**	**0,00**		**5.850.000**	**0,00**	**5.850.000**	**0,00**	**0,34**	
	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang	1 03 # 2 01 0003	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	170.600.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka	1 03 # 2 01 0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	3	85.300.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka	1 03 # 2 01 0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	699.460.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku	1 03 # 2 01 0012	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	3	767.700.000	0,00	-	1	7.870.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	1	5.850.000	100	1	5.850.000	1	5.850.000	33,33	0,76	
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	**1 03 # 2 02**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah yang**	**10**	**853.000.000**	**0,00**	**-**	**2**	**154.607.003**	**0,00**		**41.554.791**	**0,00**		**33.942.212**	**0,00**		**-**	**2**		**79.110.000**	**2**		**154.607.003**	**2**	**154.607.003**	**20,00**	**18,13**	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 03 # 2 02 0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	3	85.300.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 03 # 2 02 0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	4	682.400.000	0,00	-	2	154.607.003	0,00	0,00	41.554.791	50,00	1	33.942.212	50,00	1	-	0,00	0,00	79.110.000	100	2	154.607.003	2	154.607.003	50,00	22,66	
	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 03 # 2 02 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat (Dokumen)	3	85.300.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	**1 03 # 2 03**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah KKPR dan PKKPR yang dikeluarkan**	**9**	**2.051.465.000**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program	1 03 # 2 03 0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	6	1.966.165.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 03 # 2 03 0006	Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3	85.300.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan	**1 03 # 2 04**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah KKPR dan PKKPR yang di monitoring pelaksanaannya**	**1**	**341.200.000**	**0,00**	**-**	**1**	**16.910.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**14.370.000**	**0,00**		**-**	**1**		**2.540.000**	**1**		**16.910.000**	**1**	**16.910.000**	**100**	**4,96**	
	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	1 03 # 2 04 0002	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang	3	85.300.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 03 # 2 04 0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	3	85.300.000	0,00	-	1	9.060.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	7.790.000	100	1	-	0,00	0,00	1.270.000	100	1	9.060.000	1	9.060.000	33,33	10,62	
	Terlaksananya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau	1 03 # 2 04 0008	Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku	Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	3	0,00	0,00	-	1	7.850.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	6.580.000	100	1	-	0,00	0,00	1.270.000	100	1	7.850.000	1	7.850.000	33,33	0,00	
	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 03 # 2 04 0009	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	3	85.300.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non	1 03 # 2 04 0015	Sub Kegiatan Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Dokumen)	3	85.300.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**23,16**	**12,50**		**26,93**	**62,50**		**0,00**	**25,00**		**48,78**	**100**		**98,87**			**37,50**	**3,57**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**R**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**83.958.832.822**		**2.509.716.613**			**23.483.252.222**			**25.680.337.080**			**31.116.179.037**			**82.789.484.952**		**82.789.484.952**			
			Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)								**2,47**		**2,99**	**11,71**		**27,97**	**38,90**		**30,59**	**37,83**		**37,06**	**100**		**98,61**			**33,44**	**14,46**	
			Predikat Kinerja Seluruh Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN			**31.773.149.050**				**12.190.285.056**			**1.224.756.295**			**1.249.558.794**			**5.864.616.209**			**3.469.168.854**			**11.808.100.152**		**11.808.100.152**		**37,16**	
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan**	**1 04 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah**	**28,00**	**5.480.392.405**		**-**	**23,00**	**3.967.222.841**	**0,00**		**793.682.639**	**23,79**		**1.194.193.095**	**0,00**		**887.052.916**	**0,00**		**942.969.285**	**23,79**		**3.817.897.935**	**23,79**	**3.817.897.935**	**84,96**	**69,66**	**DINPERKPP**
				Nilai kinerja pelaporan Perangkat	**11,25**				**11,00**		**0,00**			**11,66**			**0,00**			**0,00**			**11,66**			**11,66**		**#####**		
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**62,00**				**64,76**		**0,00**			**64,59**			**0,00**			**0,00**			**64,59**			**64,59**		**#####**		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**100,00**				**1,95**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**85,00**				**70,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan	**1 04 01 2 01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai**	**100**	**46.650.025**		**-**	**100**	**29.775.000**	**50,00**		**-**	**25,00**		**3.995.000**	**25,00**		**-**	**0,00**		**23.139.060**	**100**		**27.134.060**	**100**	**27.134.060**	**100**	**58,17**	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	**100**				**100**		**50,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 04 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	17.000.000			8	24.320.000	50,00	4	-	25,00	2	-	25,00	2		0,00	0,00	22.114.060	100	8	22.114.060	8	22.114.060	61,54	130,08	
	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1 04 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	2.116.390			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1 03 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	5.034.925			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedinay Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 03 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	7.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 03 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	4.999.065			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 04 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	4.999.845		-	8	5.455.000	50,00	4	-	25,00	2	3.995.000	25,00	2		0,00	0,00	1.025.000	100	8	5.020.000	8	5.020.000	100,00	100,40	
	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 03 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	4.999.800			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan	**1 04 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuagan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar**	**100**	**3.823.124.290**			**100**	**3.127.609.768**	**25,00**	**1**	**665.513.819**	**25,00**		**1.003.915.375**	**25,00**		**744.337.116**	**25,00**		**637.557.816**	**100**		**3.051.324.126**	**100**	**3.051.324.126**	**100**	**79,81**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 04 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mene	90	3.794.070.000		-	30	3.121.144.768	25,00	30	665.513.819	25,00	30	1.003.915.375	25,00	30	740.342.116	25,00	30	635.600.316	100	30	3.045.371.626	30	3.045.371.626	33,33	0,80	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	1 04 01 2 02 0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	19.201.400			12	1.465.000	25,00	3	-	25,00	3		25,00	3	-	25,00	3	1.440.000	100	12	1.440.000	12	1.440.000	33,33	0,07	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 04 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	5.196.830,00			2	-	50,00	1	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	50,00	1		100	2	-	2	-	33,33	0,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	1 04 01 2 02 0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuang	54	4.656.060			18	5.000.000	27,78	5	-	33,33	6		27,78	5	3.995.000,0000	11,11	2	517.500	100	18	4.512.500	18	4.512.500	33,33	0,97	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan	**1 04 01 2 05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**100**	**42.830.080**			**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100,00**	**-**	**#####**	**0,00**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100,00**		**#####**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti			**Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan**	**45,00**				**10,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	1 04 01 2 05 0001	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	9.750.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1 04 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	33	3.080.080			11	-	36,36	4	-	27,27	3		27,27	3	-	9,09	1		100	11	-	11	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 04 01 2 05 0005	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	9	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Layanan Jasa Administrasi Umum Perangkat	**1 04 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**221.081.637**			**100**	**165.917.497**	**25,00**		**34.813.151**	**25,00**		**30.742.720**	**25,00**		**19.993.600**	**25,00**		**76.511.260**	**100**		**162.060.731**	**100,00**	**162.060.731**	**#####**	**73,30**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 04 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	164.547.357			12	119.073.081	25,00	3	29.239.551	25,00	3	11.860.320	25,00	3	8.270.000	25,00	3	66.046.460	100	12	115.416.331	12	115.416.331	33,33	0,70	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 04 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	28.267.140			12	23.422.208	25,00	3	2.786.800	25,00	3	9.441.200	25,00	3	5.861.800	25,00	3	5.232.400	100	12	23.322.200	12	23.322.200	33,33	0,83	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	1 04 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	28.267.140			12	23.422.208	25,00	3	2.786.800	25,00	3	9.441.200	25,00	3	5.861.800	25,00	3	5.232.400	100	12	23.322.200	12	23.322.200	33,33	0,83	
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana	**1 04 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah**	**100**	**426.484.000**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 04 01 2 07 0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	316.484.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,000	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 04 01 2 07 0008	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	110.000.000	0,00		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,000	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Pemenuhan Prasarana Pendukung	**1 04 01 2 08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**578.295.233**			**100**	**486.718.128**	**25,00**		**80.811.920**	**25,00**		**130.300.200**	**25,00**		**103.041.700**	**25,00**		**151.737.880**	**100**		**465.891.700**	**100**	**465.891.700**	**100**	**80,56**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 04 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	450.997.100			12	375.930.732	25,00	3	71.343.400	25,00	3	102.323.600	25,00	3	82.350.200	25,00	3	115.280.800	100	12	371.298.000	12	371.298.000	33,33	82,33	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 04 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	60.766.195			12	54.000.000	25,00	3	4.386.120	25,00	3	8.003.000	25,00	3	8.967.900	25,00	3	16.829.300	100	12	38.186.320	12	38.186.320	33,33	62,84	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 04 01 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	66.531.938			12	56.787.396	25,00	3	5.082.400	25,00	3	19.973.600	25,00	3	11.723.600	25,00	3	19.627.780	100	12	56.407.380	12	56.407.380	33,33	84,78	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	**1 04 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**100,00**	**341.927.140**			**100**	**157.202.448**	**25,00**		**12.543.749**	**25,00**		**25.239.800**	**25,00**		**19.680.500**	**25,00**		**54.023.269**	**100**		**111.487.318**	**100**	**111.487.318**	**100**	**32,61**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	1 04 01 2 09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	190.267.140			9	138.852.448	22,22	2	12.543.749	33,33	3	25.239.800	33,33	3	19.680.500	11,11	1	37.768.269	100	9	95.232.318	9	95.232.318	33,33	50,05	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 04 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114	26.430.000			38	18.350.000	21,05	8	-	36,84	14	-	0,00	0,00	-	42,11	16	16.255.000	100	38	16.255.000	38	16.255.000	33,33	61,50	
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 04 01 2 09 0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	125.230.000			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**26,80**		**20,01**	**22,54**		**30,10**	**20,19**		**22,36**	**19,36**		**23,77**	**100**		**96,24**			**34,90**	**69,66**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**S**	
2	**Meningkatnya Penanganan Rumah Korban Bencana**	**1 04 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Korban Bencana yang Direkonstruksi (%)**	**68,00**	**684.000.000**		**-**	**68,00**	**144.573.445**	**0,00**		**3.000.000**	**0,00**		**5.730.000**	**0,00**		**12.989.800**	**0,00**		**21.442.500**	**0,00**		**43.162.300**	**0,00**	**43.162.300**	**0,00**	**13,12**	**DINPERKPP**
	Tersedianya Data Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam/ Bencana Sosial	**1 04 02 2 01**	**Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program**	**Persentase Rumah korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi (%)**	**100**	**35.000.000**			**73,00**	**14.473.445**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**7.091.500**	**0,00**		**6.550.000**	**0,00**		**13.641.500**	**0,00**	**13.641.500**	**0,00**	**38,98**	
	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten	1 04 02 2 01 0001	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program	1	35.000.000			1	14.473.445	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	7.091.500	100	1	6.550.000	100	1	13.641.500	1	13.641.500	100	38,98	
	Tersediannya Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam/ Bencana Sosial	**1 04 02 2 03**	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah yang Direkonstruksi (%)**	**100**	**440.000.000**			**73,00**	**100.000.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana	1 04 02 2 03 0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang	8	140.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana	1 04 02 2 03 0004	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang	8	300.000.000			2	100.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni yang Dibangun untuk	**1 04 02 2 05**	**Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase Unit Rumah Susun/Rumah Khusus yang Terbina (%)**	**100**	**150.000.000**			**73,00**	**30.100.000**	**25,00**		**3.000.000**	**25,00**		**5.730.000**	**25,00**		**5.898.300**	**25,00**		**14.892.500**	**100**		**29.520.800**	**100**	**29.520.800**	**100**	**19,68**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terfasilitasinya pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 04 02 2 05 0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun (Laporan)	3	150.000.000			1	30.100.000	0,00	0,00	3.000.000	0,00	0,00	5.730.000	100	1	5.898.300	0,00	0,00	14.892.500	100	1	29.520.800	1,00	29.520.800	33,33	19,68	
	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	**1 04 03 2 06**	**Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Persentase Kepatuhan Pengembang terhadap Site Plan (%)**	**100**	**59.000.000**			**100**	**-**	**25,00**			**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkrnonisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan	1 04 02 2 06 0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah site plan yang diterbitkan (Site Plane)	22	59.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**2,08**	**0,00**		**3,96**	**50,00**		**8,98**	**50,00**		**14,83**	**100**		**29,85**			**44,44**	**13,12**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh**	**1 04 03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh**	**80,00**	**25.130.006.645**		**-**	**68,00**	**8.039.449.270**	**0,00**		**425.613.656**	**0,00**		**47.002.296**	**0,00**		**4.961.536.893**	**0,00**		**2.474.822.069**	**0,00**		**7.908.974.914**	**0,00**	**7.908.974.914**	**0,00**	**0,315**	**DINPERKPP**
	Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh yang diata	**1 04 03 2 02**	**Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani dibawah 10 Ha**	**100**	**227.000.000**			**73,00**	**21.190.265**	**0,00**		**15.538.656**	**0,00**		**1.803.244**	**0,00**		**125.000**	**0,00**		**150.000**	**0,00**		**17.616.900**	**0,00**	**17.616.900**	**0,00**	**7,76**	
	Tersusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas	1 04 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	3	150.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksannya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman	1 04 03 2 02 0004	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tubuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3	77.000.000			3	21.190.265	33,33	1	15.538.656	33,33	1	1.803.244	33,33	1	125.000	0,00	0,00	150.000	100	3	17.616.900	3	17.616.900	100,00	22,88	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Permukiman Dalam Kondisi	**1 04 03 2 03**	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase Rumah Layak Huni di dalam Kawasan Kumuh (%)**	**100**	**24.903.006.645**			**100**	**8.018.259.005**	**0,00**		**410.075.000**	**0,00**		**45.199.052**	**0,00**		**4.961.411.893**	**0,00**		**2.474.672.069**	**0,00**		**7.891.358.014**	**0,00**	**7.891.358.014**	**0,00**	**31,69**	**DINPERKPP**
	Tersusunnya Rencana Tapak (siteplan) dan DED Peremajaan/ Pemugaran Pemukiman	1 04 03 2 03 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	2	120.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Rumah Tidak Layak Huni yang	1 04 04 2 01 0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (Unit)	3	60.000.000			1	20.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	1	20.000.000	0,00	0,00	-	100	1	20.000.000	1	20.000.000	33,33	33,33	
	Terlaksananya Kerjasama perbaikan RTLH beserta PSU di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan	1 04 03 2 03 0003	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1	50.700.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Snkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Pemukiman	1 04 03 2 03 0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3	385.000.000			1	80.656.790	0,00	0,00	11.810.000	100	1	35.206.556	0,00	0,00	5.345.000	0,00	0,00	15.557.000	100	1	67.918.556	1	67.918.556	33,33	17,64	
	Terlaksannya Pelaksanaan Peremajaan	1 04 03 2 03 0006	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	3	190.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksannya Pendataan dan Verivikasi	1 04 03 2 03 0007	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1	175.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan	1 04 03 2 03 0008	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (Unit)	50	169.500.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	1 04 03 2 03 0010	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (Rumah Tangga)	3	75.000.000			1	25.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.092.000	100	1	22.771.000	0,00	0,00	690.000	100	1	24.553.000	1	24.553.000	33,33	32,74	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningatan Kualitas	1 0 4 0 2 0 0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	150	7.216.696.200			50	2.405.565.400	0,00	0,00	-	0,00	0,00	5.892.596	100	50	2.272.775.000	0,00	0,00	72.646.362	100	50	2.351.313.958	50	2.351.313.958	33,33	32,58	
	Terlaksananya Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman	1 0 4 0 2 0 0013	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	6,85	16.461.110.445			6,85	5.487.036.815	0,00	0,00	398.265.000	0,00	0,00	3.007.900	70,80	5	2.640.520.893	29,20	2	2.385.778.707	100	6,85	5.427.572.500	7	5.427.572.500	100,00	32,97	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							5,56		5,29	22,22		0,58	67,36		61,71	4,87		30,78	100		98,38			47,62	0,315	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	S		R	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
4	**Meningkatnya Upaya Pencegahan**	**1 04 04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani (%)**	**80,00**	**243.750.000**			**75,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni yang Dibangun di Luar	**1 0 4 0 4 2 0 1**	**Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Layak Huni di luar Kawasan Kumuh (%)**	**100**	**243.750.000**			**100**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Terlaksananya perbaikan RTLH untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh di luar Kawasan pemukiman	1 0 4 0 4 2 0 1 0001	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang	50	193.750.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya kerjasama perbaikan RTLH beserta PSU di luar Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	1 0 4 0 4 2 0 1 0002	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3	50.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya Akses terhadap Sarana dan Prasarana Perumahan**	**1 04 05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase rumah yang memiliki akses sarana dan prasarana perumahan yang layak (%)**	**100**	**235.000.000**			**6,17**	**39.039.500**	**0,00**		**2.460.000**	**0,00**		**2.633.403**	**0,00**		**3.036.600**	**0,00**	**-**	**29.935.000**	**0,00**		**38.065.003**	**0,00**	**38.065.003**	**0,00**	**16,20**	
	Meningkatnya Jumlah Perumahan yang memiliki PSU yg Layak	**1 04 05 2 01**	**Kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Perumahan yang memiliki PSU yang Layak (%)**	**100**	**235.000.000**			**85,00**	**39.039.500**	**0,00**		**2.460.000**	**0,00**		**2.633.403**	**0,00**		**3.036.600**	**0,00**		**29.935.000**	**0,00**		**38.065.003**	**0,00**	**38.065.003**	**0,00**	**16,20**	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 0 4 0 5 2 0 1 0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	3	50.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersediannya PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	1 0 4 0 5 2 0 1 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	10	100.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU perumahan	1 0 4 0 5 2 0 1 0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Perumahan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan	5	35.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersediannya Dokumen Kerjasama Pengelolaan PSU	1 0 4 0 5 2 0 1 0005	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari	3	50.000.000			1	39.039.500	0,00	0,00	2.460.000	100	1	2.633.403	0,00	0,00	3.036.600	0,00	0,00	29.935.000	100	1	38.065.003	1	38.065.003	33,33	0,76	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		6,30	100		6,75	0,00		7,78	0,00		76,68	100		97,50			16,67	0,00	
				Predikat Kinerja							SR		SR	ST		SR	SR		SR	SR		T	ST		ST			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						12.190.285.056			1.224.756.295			1.249.558.794			5.864.616.209			3.469.168.854			11.808.100.152		11.808.100.152			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (%)							8,09		10,05	36,19		10,25	34,39		48,11	18,56		28,46	100		96,86			35,91	37,16	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
		1 05	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG TRANTIBUM DAN LINMAS**			**55.135.992.320**		**-**		**20.278.861.882**			**6.243.595.491**			**4.377.436.292**			**4.454.737.279**			**4.092.758.277**			**19.926.109.629**		**19.926.109.629**		**36,14**	
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan**	**1 05 1**	**Program Penunjang Urusan Daerah**	**Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah**	**27,35**	**13.818.183.320**	**0,00**	**0,00**	**27,32**	**6.193.885.253**	**0,00**		**2.015.158.415**	**23,31**		**1.395.486.870**	**0,00**		**1.472.097.942**	**0,00**		**1.150.237.695**	**23,31**		**6.014.339.212**	**23,31**	**6.014.339.212**	**23,31**	**43,52**	**SATPOL PP**
				Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	**10,25**		**0,00**		**10,20**		**0,00**			**11,23**			**0,00**			**0,00**			**11,23**			**11,23**		**11,23**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kinerja pengelolaan keuangan			**Persentase temuan pengelolaan keuangan perangkat daerah dalam LHP BPK-RI (%)**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Profesionalisme ASN perangkat daerah			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**60,75**		**0,00**		**60,75**		**0,00**			**62,41**			**0,00**			**0,00**			**62,41**			**62,41**		**62,41**		
	Meningkatnya Efektivitas organisasi dan Tata laksana			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**4,00**		**0,00**		**3,25**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**70,00**		**0,00**		**60,70**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		1 05 1 2 01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai**	**100**	**57.829.850**	**0,00**	**0,00**	**100**	**41.405.000**	**50,00**		**12.825.000**	**25,00**		**3.690.000**	**25,00**		**24.164.655**	**0,00**		**600.000**	**100**		**41.279.655**	**100**	**41.279.655**	**100**	**71,38**	
				Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standart	**100**		**0,00**		**100**		**50,00**		-	**25,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
		1 05 1 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	6	34.263.360	0,00	0,00	8	25.275.000	50,00	4	5.415.000	25,00	2	-	25,00	2	19.514.655	0,00		300.000	100	8	25.229.655	8	25.229.655	133	0,74	
		1 05 1 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4	23.566.490	0,00	0,00	4	16.130.000	50,00	2	7.410.000	25,00	1	3.690.000	25,00	1	4.650.000	0,00		300.000	100	4	16.050.000	4	16.050.000	100	0,68	
		1 05 1 2 02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standart**	**100**	**5.539.064.980**	**0,00**	**2.945.252.700**	**100**	**5.315.569.522**	**25,00**		**1.702.934.494**	**25,00**		**1.242.318.206**	**25,00**		**1.237.663.052**	**25,00**		**1.028.474.271**	**100**		**5.192.748.313**	**100**	**5.192.748.313**	**100**	**93,75**	
		1 05 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	40	5.493.192.000	0,00		55	5.279.369.522	25,00	55	1.696.934.494	25,00	55	1.222.433.166	25,00	55	1.210.021.342	25,00	55	1.027.274.271	100	55	5.156.663.273	55	5.156.663.273	137,50	0,94	
		1 05 1 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	27.036.490	0,00	0,00	12	23.100.000	25,00	3	3.000.000	25,00	3	14.965.040	25,00	3	4.800.000	25,00	3	300.000	100	12	23.065.040	12	23.065.040	100	0,85	
		1 05 1 2 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/	40	18.836.490	0,00	0,00	40	13.100.000	25,00	10	3.000.000	25,00	10	4.920.000	25,00	10	4.800.000	25,00	10	300.000	100	40	13.020.000	40	13.020.000	100,00	0,69	
		1 05 1 2 05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**100**	**450.000.000**	**0,00**	**0,00**	**100**	**22.018.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**2.655.000**	**25,00**		**18.041.710**	**25,00**		**600.000**	**100**		**21.296.710**	**100**	**21.296.710**	**100**	**4,73**	
				Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	**100**		**0,00**	**0,00**	**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**20,00**		**0,00**	**0,00**	**10,00**		**0,00**			**0,00**			**0,02**			**0,00**			**0,02**			**0,02**		**0,02**		
		1 05 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya *(Paket)*	1	75.000.000	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		1 05 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *(dokumen)*	11	25.000.000	0,00	0,00	11	4.260.000	*27,27*	3	-	*27,27*	3	2.655.000	*27,27*	3	1.305.000	18,18	2	300.000	100	11	4.260.000	11	4.260.000	100	0,17	
		1 05 01 2 05 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	15	350.000.000	0,00	0,00	1	17.758.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	1	16.736.710	0,00	0,00	300.000	100	1	17.036.710	1	17.036.710	6,67	0,05	
		1 05 01 2 06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persentase layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah**	**100**	**555.143.490**	**0,00**	**0,00**	**100**	**149.563.478**	**25,00**		**70.473.455**	**25,00**		**42.807.502**	**25,00**		**26.032.420**	**25,00**		**7.092.190**	**100**		**146.405.567**	**100**	**146.405.567**	**100**	**26,37**	
		1 05 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dn Konsultasi SKPD	36	481.307.000	0,00	0,00	12	127.003.478	25,00	3	64.557.248	25,00	3	38.489.272	25,00	3	20.909.230	25,00	3	2.674.000	100	12	126.629.750	12	126.629.750	33	0,26	
		1 05 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	23.836.490	0,00	0,00	12	4.260.000	25,00	3	-	25,00	3	2.655.000	25,00	3	1.305.000	25,00	3	300.000	100	12	4.260.000	12	4.260.000	33	0,18	
		1 05 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	50.000.000	0,00	0,00	12	18.300.000	25,00	3	5.916.207	25,00	3	1.663.230	25,00	3	3.818.190	25,00	3	4.118.190	100	12	15.515.817	12	15.515.817	33	0,31	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 05 1 2 08	**Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di**	**100**	**1.700.000.000**	**0,00**	**0,00**	**100**	**338.423.953**	**25,00**		**148.239.032**	**25,00**		**24.781.162**	**25,00**		**104.637.105**	**25,00**		**35.606.039**	**100**		**313.263.338**	**100**	**313.263.338**	**100**	**18,43**	
		1 05 1 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	250.000.000	0,00	0,00	12	94.784.125	25,00	3	39.848.055	25,00	3	10.253.250	25,00	3	28.281.380	25,00	3	940.000	100	12	79.322.685	12	79.322.685	33	0,32	
		1 05 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	250.000.000	0,00	0,00	12	95.902.750	25,00	3	27.310.227	25,00	3	14.427.912	25,00	3	25.829.040	25,00	3	20.180.039	100	12	87.747.218	12	87.747.218	33	0,35	
		1 05 01 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	36	1.200.000.000	0,00	0,00	12	147.737.078	25,00	3	81.080.750	25,00	3	100.000	25,00	3	50.526.685	25,00	3	14.486.000	100	12	146.193.435	12	146.193.435	33	0,12	
		1 05 01 2 07	**KegiatanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja**	**80,00**	**4.975.000.000**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	-	**0,00**		-	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	
		1 01 01 2 07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	14	1.800.000.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		1 01 01 2 07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Me	Jumlah Paket Mebel	77	175.000.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		1 01 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	42	250.000.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 07 0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5	2.750.000.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		1 05 1 2 09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**100**	**541.145.000**	**0,00**	**0,00**	**100**	**326.905.300**	**25,00**		**80.686.434**	**25,00**		**79.235.000**	**25,00**		**61.559.000**	**25,00**		**77.865.195**	**100**		**299.345.629**	**100**	**299.345.629**	**100**	**55,32**	
		1 05 1 2 09 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	45	311.145.000	0,00	0,00	15	303.195.300	26,67	4	69.743.650	20,00	3	75.738.500	26,67	4	52.901.300	26,67	4	77.565.195	100	15	275.948.645	15	275.948.645	33,33	0,89	
		1 05 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	90	80.000.000	0,00	0,00	30	23.710.000	40,00	12	10.942.784	23,33	7	3.496.500	26,67	8	8.657.700	10,00	3	300.000	100	30	23.396.984	30	23.396.984	33,33	0,29	
		1 05 01 2 09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2	150.000.000	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0		0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**26,21**		**32,53**	**21,51**		**22,53**	**28,37**		**23,77**	**18,03**		**18,57**	**100**		**97,10**			**57,50**	**43,52**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**R**	**SR**	
2		**1 05 02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada**	**1,25**	**14.025.000.000**		-	**1,00**	**9.060.698.036**	**0,00**		**2.912.346.500**	**0,00**		**1.674.142.800**	**0,00**		**1.956.316.400**	**0,00**		**1.679.471.200**	**0,00**		**8.998.500.900**	**0,00**	**8.998.500.900**	**0,00**	**64,16**	**SATPOL PP**
				Persentase Perlanggaran Perda dan Perkada yang ditindak	**95,50**				**80,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		1 05 02 2 01	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Wilayah yang dilayani Patroli**	**74,07**	**500.000.000**			**35,60**	**1.444.706.700**	**8,90**		**432.726.000**	**0,00**		**171.442.000**	**0,00**		**5.610.000**	**0,00**		**30.478.000**	**8,90**		**1.416.480.000**	**8,90**	**1.416.480.000**	**12,02**	**#####**	
				Persentase Kerjasama dalam Pengamanan dan Hari-hari Besar	**100**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Desa/Kelurahan yang memeiliki Satlinmas	**40,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Personil Pol PP yang mendapatkan	**32,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		1 05 02 2 01 0001	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	216	150.000.000			72	44.840.000	16,67	12	21.736.000	25,00	18	4.712.000	30,56	22	3.960.000	27,78	20	14.118.000	100	72	44.526.000	72	44.526.000	33,33	0,30	
		1 05 02 2 01 0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	12	425.000.000			4	86.380.000	25,00	1	25.853.000	25,00	1	13.600.000	25,00	1	17.340.000	25,00	1	29.466.000	100	4	86.259.000	4	86.259.000	33,33	0,20	
		1 05 02 2 01 0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman	12	1.795.463.690			4	1.219.748.700	25,00	1	359.800.000	25,00	1	116.000.000	25,00	1	176.460.000	25,00	1	543.248.000	100	4	1.195.508.000	4	1.195.508.000	33,33	0,67	
		1 05 02 2 01 0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	400	700.000.000			381	23.798.000	9,45	36	3.525.000	30,18	115	7.074.000	31,50	120	9.410.000	28,87	110	300.000	100	381	20.309.000	381	20.309.000	95,25	0,03	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	R	
		02 2 02 2 01 0006	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12	350.000.000			4	69.940.000	25,00	1	21.812.000	25,00	1	30.056.000	25,00	1	1.650.000	25,00	1	16.360.000	100	4	69.878.000	4	69.878.000	33,33	0,20	
		1 05 02 2 02	**Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Cakupan Sosialisasi Perda dan Perkada**	**98,76**	**13.250.000.000**		**-**	**90,00**	**7.611.231.336**	**34,39**		**2.478.390.500**	**0,00**		**1.502.700.800**	**0,00**		**1.949.476.400**	**0,00**		**1.648.693.200**	**34,39**		**7.579.260.900**	**34,39**	**7.579.260.900**	**34,82**	**57,20**	
				Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Masuk Ke Tahap Penyelidikan dan Penyidikan	**72,00**				**1,50**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		1 05 02 2 02 0001	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok/ Masyarakat/	24	250.000.000			8		25,00	2		25,00	2	-	25,00	2	-	25,00	2	-	100	8	-	8	-	33,33	0,00	
		1 05 02 2 02 0002	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap PenegakkanPeraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	36	250.000.000			12	36.920.000	25,00	3	2.840.000	25,00	3	-	25,00	3	28.142.000	25,00	3	5.530.000	100	12	36.512.000	12	36.512.000	33,33	0,15	
		1 05 02 2 02 0003	Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat	36	12.750.000.000			12	7.574.311.336	33,33	4	2.475.550.500	25,00	3	1.502.700.800	25,00	3	1.921.334.400	16,67	2	1.643.163.200	100	12	7.542.748.900	12	7.542.748.900	33,33	0,59	
		1 05 02 2 03	**Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan kompetensi PPNS**	**26,08**	**275.000.000**			**20,00**	**4.760.000**	**4,22**		**1.230.000**	**4,22**		**-**	**4,22**		**1.230.000**	**4,22**		**300.000**	**16,88**		**2.760.000**	**16,88**	**2.760.000**	**64,72**	**1,00**	
		1 05 02 2 03 0001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam	36	275.000.000			12	4.760.000	25,00	3	1.230.000	25,00	3	-	25,00	3	1.230.000	25,00	3	300.000	100	12	2.760.000	12	2.760.000	33,33	1,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**23,27**		**32,14**	**25,58**		**18,48**	**26,34**		**21,59**	**24,81**		**18,54**	**100**		**99,31**			**40,21**	**64,16**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**R**	
3		**1 05 04**	**PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN**	**Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran**	**86,41**	**7.230.000.000**			**75,00**	**1.786.263.512**	**0,00**		**511.390.900**	**0,00**		**409.845.000**	**0,00**		**461.439.600**	**0,00**		**315.659.550**	**0,00**		**1.698.335.050**	**0,00**	**1.698.335.050**	**0,00**	**23,49**	**SATPOL PP**
				Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	**92,00**				**90,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		1 05 04 2 01	**Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan dan Pengamanan Bahan Berbahaya dan Bercun**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Damkar**	**36,00**	**6.130.000.000**			**30,00**	**1.779.263.512**	**0,00**		**508.690.900**	**0,00**		**409.320.000**	**0,00**		**460.339.600**	**0,00**		**312.509.550**	**0,00**		**1.690.860.050**	**0,00**	**1.690.860.050**	**0,00**	**27,58**	
				Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		1 05 04 2 01 0001	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota	Laporan Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah	36	500.000.000			12	30.660.000	25,00	3	1.350.000	25,00	3	9.438.000	25,00	3	13.542.000	25,00	3	6.150.000	100	12	30.480.000	12	30.480.000	33,33	6,10	
		1 05 04 2 01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	36	4.800.000.000			12	1.714.903.512	25,00	3	506.840.900	25,00	3	385.632.000	25,00	3	430.067.600	25,00	3	304.209.550	100	12	1.626.750.050	12	1.626.750.050	33,33	33,89	
		1 05 04 2 01 0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Peyelamatan/ Evakuasi saat Penaggulangan Kebakaran dan Non	36	280.000.000			12	33.700.000	25,00	3	500.000	25,00	3	14.250.000	25,00	3	16.730.000	25,00	3	2.150.000	100	12	33.630.000	12	33.630.000	33,33	12,01	
		1 05 04 2 01 0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan Legal sesuai	149	450.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 05 04 2 01 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikat Ketrampilan Teknis dan Analis dalam Pencegahan dan	153	100.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0	-	0,00	0,00	
		1 05 04 2 02	**Kegiatan Inpeksi Peralatan Protekksi Kebakaran**	**Persentase Gedung Perkantoran yang tersedia Apar**	**100**	**475.000.000**			**62,14**	**3.500.000**	**62,14**		**2.175.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**1.000.000**	**0,00**		**300.000**	**62,14**		**3.475.000**	**62,14**	**3.475.000**	**62,14**	**0,73**	
		1 05 04 2 02 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	36	475.000.000			12	3.500.000	25,00	3	2.175.000	25,00	3	-	25,00	3	1.000.000	25,00	3	300.000	100	12	3.475.000	12	3.475.000	33,33	0,73	
		1 05 04 2 03	**Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persentse Investigasi yang Melibatkan Koordinasi Lintas**	**13,5**	**425.000.000**			**11,50**	**3.500.000**	**5,00**		**525.000**	**2,50**		**525.000**	**2,00**		**100.000**	**2,00**		**2.850.000**	**11,50**		**4.000.000**	**11,50**	**4.000.000**	**85,19**	**0,94**	
		1 05 04 2 03 0001	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi	36	425.000.000			12	3.500.000	25,00	3	525.000	25,00	3	525.000	25,00	3	100.000	25,00	3	2.850.000	100	12	4.000.000	12	4.000.000	33,33	0,94	
		1 05 04 2 04	**Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase Cakpan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran**	**99**	**200.000.000**			**95,00**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**			**25,00**			**20,00**			**95,00**		**-**	**95,00**	**-**	**96,19**	**0,00**	
		1 05 04 2 04 0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan	480	100.000.000			160	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		62,50	100		37,50	60		100	160	-	160	-	33,33	0,00	
		1 05 04 2 04 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuknya dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	81	100.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**20,83**		**28,63**	**20,83**		**22,94**	**31,25**		**25,83**	**27,08**		**17,67**	**100**		**95,08**			**33,33**	**23,49**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
4	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan**	**1 05 02**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah**	**26,65**	**11.872.833.051**		**-**	**25,45**	**2.520.777.901**	**0,00**		**568.095.676**	**23,81**		**676.500.622**	**0,00**		**444.109.837**	**0,00**		**787.001.832**	**23,81**		**2.475.707.967**	**23,81**	**2.475.707.967**	**89,34**	**20,85**	**BPBD**
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	**10,62**				**9,75**		**0,00**			**9,18**			**0,00**			**0,00**			**9,18**			**9,18**		**86,44**		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**70,00**				**65,00**		**0,00**			**64,15**			**0,00**			**0,00**			**64,15**			**64,15**		**91,64**		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**3,00**				**3,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**1,00**				**1,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	**1 05 01 2 01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**100**	**148.130.000**		**-**	**100**	**8.500.000**	**25,00**		**-**	**50,00**		**4.497.500**	**25,00**		**3.480.000,00**	**0,00**		**450.000**	**100**		**8.427.500**	**100**	**8.427.500**	**100**	**5,69**	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	**100**				**100**		**25,00**			**50,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	1 05 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen :	36	108.410.000			12	8.500.000	25,00	3	-	50,00	6	4.497.500	25,00	3	3.480.000	0,00		450.000	100	12	8.427.500	12	8.427.500	33,33	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 05 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen (3 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, 3 Dokumen Laporan Tahunan Perangkat Daerah, 3 Dokumen LKPJ Perangkat Daerah, 3 Dokumen LPPD 12 Dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah, 12 Dokumen Evaluasi Rencana Aksi)	36	39.720.000			12	-	25,00	3		50,00	6		25,00	3	-	0,00			100	12	-	12	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi	**1 05 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai**	**100**	**8.136.212.297**			**1**	**1.806.264.401**	**25,00**		**401.585.876**	**25,00**		**496.228.270**	**25,00**		**321.627.753,00**	**25,00**		**215.409.876**	**100**		**1.434.851.775**	**100**	**1.434.851.775**	**100**	**17,64**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 05 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang (14 Laki-laki dan 1	15	8.054.772.297			15	1.806.264.401	25,00	15	401.585.876	25,00	15	496.228.270	25,00	15	321.627.753	25,00	15	215.409.876	100	15	1.434.851.775	15	1.434.851.775	100,00	17,81	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	1 05 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	39.720.000			12	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	1 05 01 2 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD. (Dokumen)	132	41.720.000			44	-	25,00	11		25,00	11		22,73	10		27,27	12		100	44	-	44	-	33,33	0,00	
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**1 05 01 2 05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**50,00**	**360.679.688**			**40,00**	**-**	**0,00**		**9.450.000**	**0,00**		**9.450.000**	**0,00**			**0,00**		**-**	**0,00**		**18.900.000**	**0,00**	**18.900.000**	**0,00**	**5,24**	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan			**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang berkinerja Baik			**Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	1 05 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	6	201.450.000			2	-	50,00	1	9.450.000	0,00	0,00	9.450.000	0,00	0,00		50,00	1		100	2	18.900.000	2	18.900.000	33,33	9,38	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 05 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33	36.410.000			11	-	27,27	3		27,27	3		27,27	3		18,18	2		100	11	-	11	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 05 01 2 05 0005	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, (Orang)	9	122.819.688			3	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat	**1 05 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah**	**100**	**518.312.467**			**100**	**59.835.845**	**25,00**		**1.230.000**	**25,00**		**6.530.000**	**25,00**		**4.215.000,00**	**25,00**		**26.548.000**	**100**		**38.523.000**	**100**	**38.523.000**	**100**	**7,43**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 05 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	36	313.310.000			12	59.835.845	25,00	3	1.230.000	25,00	3	6.530.000	25,00	3	4.215.000	25,00	3	26.548.000	100	12	38.523.000	12	38.523.000	33,33	12,30	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis	1 05 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	36	94.557.233			12	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 05 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, (Dokumen)	36	110.445.233			12	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana	**1 05 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah**	**100**	**470.000.000**		**-**	**100**	**26.051.000**	**25,00**		**25.601.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**22.500.000,00**	**25,00**		**450.000**	**100**		**48.551.000**	**100**	**48.551.000**	**100**	**10,33**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 05 01 2 07 00011	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (Unit)	1	400.000.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Mebel	1 05 01 2 07 00051	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14	25.000.000			1	26.051.000	0,00	0,00		0,00	0,00		100	1	22.500.000,00	0,00	0,00	450.000	100	1	22.950.000	1	22.950.000	7,14	91,80	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 05 01 2 07 00061	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	19	45.000.000			1		100	1	25.601.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		100	1	25.601.000	1	25.601.000	5,26	56,89	
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat	**1 05 01 2 08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah**	**100**	**1.518.002.521**		**-**	**100**	**477.896.655**	**25,00**		**122.188.800**	**25,00**		**135.407.182**	**25,00**		**62.515.584**	**25,00**		**423.203.786**	**100**		**743.315.352**	**100**	**743.315.352**	**100**	**48,97**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 05 01 2 08 00011	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat . (Dokumen)	36	1.203.903.897			12	377.250.176	25,00	3	106.915.200	25,00	3	111.722.600	25,00	3	49.916.800	25,00	3	346.812.200	100	12	615.366.800	12	615.366.800	33,33	51,11	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 05 01 2 08 00021	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	136.000.000			12	53.330.000	25,00	3	-	25,00	3	7.279.582	25,00	3	4.986.384	25,00	3	26.035.786	100	12	38.301.752	12	38.301.752	33,33	28,16	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 05 01 2 08 00041	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	178.098.624			12	47.316.479	25,00	3	15.273.600	25,00	3	16.405.000	25,00	3	7.612.400	25,00	3	50.355.800	100	12	89.646.800	12	89.646.800	33,33	50,34	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	**1 05 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100**	**721.496.078**		**-**	**100**	**142.230.000**	**25,00**		**8.040.000**	**25,00**		**24.387.670**	**25,00**		**29.771.500,00**	**25,00**		**120.940.170**	**100**		**183.139.340**	**100**	**183.139.340**	**100**	**25,38**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	1 05 01 2 09 00021	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya. (Unit 3 Unit Mobil, 3 Unit	18	575.344.200			6	135.690.000	33,33	2	1.500.000	33,33	2	24.387.670	16,67	1	29.771.500,00	16,67	1	120.940.170	100	6	176.599.340	6	176.599.340	33,33	30,69	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 05 01 2 09 00061	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	100.851.878			24	6.540.000	16,67	4	6.540.000	50,00	12	-	16,67	4		16,67	4		100	24	6.540.000	24	6.540.000	80,00	6,48	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	1 05 01 2 09 00091	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	45.300.000			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**29,55**		**22,54**	**25,62**		**26,84**	**25,49**			**19,34**		**31,22**	**100**		**98,21**			**31,29**	**20,85**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**					**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
5	**Meningkatnya penanganan darurat bencana**	**1 05 03 2**	**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase penanganan darurat bencana yang**	**100**	**8.189.975.949**			**100**	**717.237.180**	**25,00**		**236.604.000**	**25,00**		**221.461.000**	**25,00**		**120.773.500**	**25,00**		**160.388.000**	**100**		**739.226.500**	**100**	**739.226.500**	**100**	**9,03**	**BPBD**
	Terpenuhinya SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana	**1 05 03 2 01**	**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan Informasi**	**100**	**620.850.000**		**-**	**100**	**3.800.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**			**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana	1 05 03 2 01 00011	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi pada tahun berkenaan (Dokumen)	1	173.250.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasidan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman	1 05 03 2 01 00021	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya pada tahun berkenaan (Orang)	1200	447.600.000			300	3.800.000	33,33	100	-	33,33	100	-	0,00			33,33	100		100	300	-	300	-	25,00	0,00	
	Terpenuhinya SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**1 05 03 2 02**	**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana yang Mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan**	**100**	**6.393.505.949**			**100**	**691.027.180**	**25,00**		**236.604.000**	**25,00**		**214.229.000**	**25,00**		**113.923.500**	**25,00**		**153.312.000**	**100**		**718.068.500**	**100**	**718.068.500**	**100**	**11,23**	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2 02 00011	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi yang disusun pada tahun	1	180.000.000			1		0,00	0,00		0,00	0,00		100	1		0,00	0,00		100	1	-	1	-	100,00	0,00	
	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di	1 05 03 2 02 00021	Sub KegiatanPelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana pada tahun berkenaan (Orang)	210	364.100.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 2 02 0003	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota yang disusun pada tahun	36	682.500.000			12		25,00	3		25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal	1 05 03 2 02 0006	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya pada tahun berkenaan (Personel)	30	4.355.779.357			30	691.027.180	100	30	236.604.000	0,00	0,00	214.229.000	0,00	0,00	113.923.500	0,00	0,00	153.312.000	100	30	718.068.500	30	718.068.500	100,00	16,49	
	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana	1 05 03 2 02 0009	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi pada tahun berkenaan	1	135.000.000			1		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		100	1		100	1	-	1	-	100,00	0,00	
	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana	1 05 03 2 02 0010	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan pada tahun berkenaan	900	149.200.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	1 05 03 2 02 0011	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi pada tahun	1	126.926.592			1		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		100	1		100	1	-	1	-	100	0,00	
	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 05 03 2 02 0012	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam pada	400	400.000.000			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terpenuhinya SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**1 05 03 2 03**	**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Pesentase Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban**	**100**	**900.620.000**		**-**	**100**	**22.410.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**7.232.000**	**25,00**		**6.850.000,00**	**25,00**		**7.076.000**	**100**		**21.158.000**	**100**	**21.158.000**	**100**	**2,35**	
	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 05 03 2 03 0001	Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas pada tahun	2	109.230.000			1	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		100	1		100	1	-	1	-	50,00	0,00	
	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling	1 05 03 2 03 0002	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat pada tahun	3	109.530.000			1	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		100	1		100	1	-	1	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi	1 05 03 2 03 0003	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana pada tahun berkenaan	525	248.250.000			150	22.410.000	0,00	0,00		0,00	0,00	7.232.000	24,67	37	6.850.000	75,33	113	7.076.000	100	150	21.158.000	150	21.158.000	28,57	8,52	
	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 05 03 2 03 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada tahun	180	215.150.000			60	-	0,00	0,00	-	30,00	18		20,00	12		50,00	30		100	60	-	60	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi	1 05 03 2 03 0005	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana pada tahun berkenaan (Laporan)	3	109.230.000			1	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		100	1		100	1	-	1	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling	1 05 03 2 03 0006	Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu pada tahun berkenaan (Dokumen)	3	109.230.000			1	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		100	1		100	1	-	1	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**1 05 03 2 04**	**Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase penyelesaian Dokumen-Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana sampai**	**100**	**275.000.000**			**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**			**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 05 03 2 04 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah yang disusun pada tahun berkenaan (Dokumen)	3	50.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan	1 05 03 2 04 0006	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Yang disusun pada tahun	3	225.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							9,90		32,99	5,52		30,88	10,60			48,98		22,36	100		103,07			37,24	9,03	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR			SR		SR	ST		ST			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN TRANTIBUM DAN LINMAS					20.278.861.882				6.243.595.491			4.377.436.292			4.454.737.279			4.092.758.277			19.926.109.629		19.926.109.629			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Trantibum dan Linmas (%)							21,95		30,79	19,81		21,59	24,41		21,97	27,65		20,18	100		98,26			39,91	32,21	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Trantibum dan Linmas							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
		1 06	**BIDANG URUSAN SOSIAL**			**11.963.340.020**				**9.753.209.248**			**1.252.559.326**			**1.531.925.352**			**3.329.306.310**			**2.091.374.483**			**8.205.165.471**		**8.205.165.471**		**68,59**	
1	**Meningkatnya Pemberdayaan Sosial**	**1 06 02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial (%)**	**80,00**	**1.347.500.000**		**-**	**80,00**	**892.170.000**	**0,00**		**193.650.000**	**0,00**		**193.757.460**	**0,00**		**115.101.800**	**0,00**		**376.176.271**	**0,00**		**878.685.531**	**0,00**	**878.685.531**	**80,00**	**65,21**	**DINSOS**
		1 06 02 2 02	**Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah**	**Persentase pemberian izin pengumpulan sumbangan (%)**	**80,00**	**25.000.000**			**80,00**	**6.000.000**	**20,00**		**-**	**30,00**		**-**	**20,00**		**820.000**	**30,00**		**5.165.000**	**100**		**5.985.000**	**100**	**5.985.000**	**125**	**23,94**	
		1 06 02 2 02 0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (dokumen)	60	25.000.000			20	6.000.000	20,00	4		30,00	6	-	20,00	4	820.000	30,00	6	5.165.000	100	20	5.985.000	20,00	5.985.000	33,33	23,94	
		1 06 02 2 03	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial**	**Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan**	**90,00**	**1.322.500.000**			**80,00**	**886.170.000**	**0,00**		**193.650.000**	**0,00**		**193.757.460**	**0,00**		**114.281.800**	**0,00**		**371.011.271**	**0,00**		**872.700.531**	**0,00**	**872.700.531**	**0,00**	**65,99**	
		1 06 02 2 03 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	81	1.000.000.000			81	576.380.000	100	81	163.770.000	0,00	0,00	162.000.000	0,00	0,00	81.900.000	0,00	0,00	168.560.000	100	81	576.230.000	81	576.230.000	100	57,62	
		1 06 02 2 03 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	8	110.000.000			8	60.840.000	100	8	16.510.000	0,00	0,00	16.000.000	0,00	0,00	8.490.000	0,00	0,00	16.730.000	100	8	57.730.000	8	57.730.000	100	52,48	
		1 06 02 2 03 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan	10	37.500.000			10	110.000.000	0,00	0,00	2.120.000	0,00	0,00	2.320.000	0,00	0,00	700.000	100	10	104.835.000	100	10	109.975.000	10	109.975.000	100	293,27	
		1 06 02 2 03 0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan	13	150.000.000			13	138.950.000	0,00	0,00	11.250.000	0,00	0,00	13.437.460	0,00	0,00	23.191.800	100	13	80.886.271	100	13	128.765.531	13	128.765.531	100	85,84	
		1 06 02 2 03 0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah sertifikat dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi	6	25.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata rata capaian kinerja (%)							**44,00**		**21,85**	**6,00**		**21,86**	**4,00**		**12,90**	**46,00**		**41,87**	**100**		**98,48**			**86,67**	**65,21**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**T**	**S**	
2	**Meningkatnya Rehabilitasi Sosial**	**1 06 04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)**	**50,00**	**920.000.000**		**-**	**50,00**	**782.710.000**	**0,00**		**17.045.000**	**0,00**		**8.285.000**	**0,00**		**693.476.717**	**0,00**		**51.865.000**	**0,00**		**770.671.717**	**0,00**	**770.671.717**	**0,00**	**83,77**	**DINSOS**
		1 06 04 2 01	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial Yang**	**40,00**	**500.000.000**		**-**	**40,00**	**445.000.000**	**0,00**		**8.670.000**	**0,00**	**0,00**	**4.190.000**	**0,00**		**391.581.250**	**40,00**		**33.900.000**	**40,00**		**438.341.250**	**0,00**	**438.341.250**	**0,00**	**87,67**	
		1 06 04 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	450	90.000.000		-	390	210.000.000	0,00	0,00	2.500.000	0,00	0,00	1.230.000	100	390	193.507.000	0,00	0,00	9.495.000	100	390	206.732.000	390	206.732.000	86,67	229,70	
		1 06 04 2 01 0002	Sub Kegiatan Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	180	90.000.000			160	110.000.000	0,00	0,00	2.450.000	0,00	0,00	-	100	160	99.691.500	0,00	0,00	6.385.000	100	160	108.526.500	160	108.526.500	88,89	120,59	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 06 04 2 01 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	120	120.000.000			75	110.000.000	0,00	0,00	2.100.000	0,00	0,00	820.000	100	75	97.152.750	0,00	0,00	8.010.000	100	75	108.082.750	75	108.082.750	62,50	90,07	
		1 06 04 2 01 0004	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	15	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		1 06 04 2 01 0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	180	30.000.000			60	10.000.000	0,00	0,00	1.620.000	0,00	0,00	820.000	100	60	1.230.000	0,00	0,00	6.330.000	100	60	10.000.000	60	10.000.000	33,33	33,33	
		1 06 04 2 01 0006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	15	15.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		1 06 04 2 01 0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan	30	15.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		1 06 04 2 01 0008	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		1 06 04 2 01 0009	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data Pengaduan Kewenangan	45	5.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		1 06 04 2 01 0010	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	15	15.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		1 06 04 2 01 0011	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		1 06 04 2 01 0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	30.000.000			20	5.000.000	0,00	0,00	-	50,00	10	1.320.000	0,00	0,00	-	50,00	10	3.680.000	100	20	5.000.000	20	5.000.000	33,33	16,67	
		1 06 04 2 02	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang**	**40,00**	**420.000.000**		**-**	**40,00**	**337.710.000**	**0,00**		**8.375.000**	**0,00**		**4.095.000**	**0,00**		**301.895.467**	**0,00**		**17.965.000**	**0,00**		**332.330.467**	**0,00**	**332.330.467**	**0,00**	**79,13**	
		1 06 04 2 02 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	600	120.000.000			420	210.000.000	0,00	0,00	3.590.000	0,00	0,00	820.000	100	420	195.586.917	0,00	0,00	6.660.000	100	420	206.656.917	420	206.656.917	70,00	172,21	
		1 06 04 2 02 0005	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	150	150.000.000			53	110.000.000	0,00	0,00	1.645.000	0,00	0,00	1.230.000	100	53	101.723.550	0,00	0,00	3.630.000	100	53	108.228.550	53	108.228.550	35,33	72,15	
		1 06 04 2 02 0007	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	300	60.000.000			100	5.360.000	0,00	0,00	750.000	20,00	20	700.000	20,00	20	1.620.000	60,00	60	2.145.000	100	100	5.215.000	100	5.215.000	33,33	8,69	
		1 06 04 2 02 0011	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45	30.000.000			15	5.000.000	0,00	0,00	710.000	33,33	5	-	33,33	5	1.210.000	33,33	5	3.030.000	100	15	4.950.000	15	4.950.000	33,33	16,50	
		1 06 04 2 02 0012	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45	30.000.000			15	2.350.000	0,00	0,00	410.000	33,33	5	-	33,33	5	410.000	33,33	5	1.530.000	100	15	2.350.000	15	2.350.000	33,33	7,83	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 06 04 2 02 0013	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75	30.000.000			25	5.000.000	0,00	0,00	1.270.000	32,00	8	1.345.000	40,00	10	1.345.000	28,00	7	970.000	100	25	4.930.000	25	4.930.000	33,33	16,43	
				Rata rata capaian kinerja (%)							0,00		2,18	15,33		1,06	66,06		88,60	18,61		6,63	100		98,46			30,19	43,57	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	S		T	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
3	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial	1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan	65,00	1.820.000.000			70,00	3.462.920.000	0,00		9.035.000	0,00		15.720.000	0,00		1.501.056.450	0,00		646.777.360	0,00		2.172.588.810	0,00	2.172.588.810	60,00	#####	DINSOS
		1 06 05 2 01	Kegiatan Pemeliharaan Anak Anak terlantar	Persentase anak anak terlantar yang mendapat	50,00	20.000.000			40,00	7.000.000	0,00		450.000	0,00		1.010.000	0,00		3.005.000	0,00		970.000	0,00		5.435.000	0,00	5.435.000	40,00	27,18	
		1 06 05 2 01 03	Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan	30	20.000.000			10	7.000.000	0,00	0	450.000	30,00	3	1.010.000	30,00	3	3.005.000	40,00	4	970.000	100	10	5.435.000	10	5.435.000	33,33	27,18	
		1 06 05 2 02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Persentase Data Fakir Miskin Yang Dikelola (%)	85,00	1.800.000.000			85,00	3.455.920.000	0,00		8.585.000	0,00		14.710.000	0,00		1.498.051.450	0,00		645.807.360	0,00		2.167.153.810	0,00	2.167.153.810	0,00	#####	
		1 06 05 2 02 01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	103120	240.000.000			103120	10.000.000	100	####	-	0,00	0,00	2.210.000	0,00	0,00	5.490.000	0,00	0,00	1.930.000	100	####	9.630.000	103120	9.630.000	100	4,01	
		1 06 05 2 02 02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	18000	60.000.000			18000	10.000.000	0,00	0,00	935.000	0,00	0,00	5.360.000	100	####	800.000	0,00	0,00	2.500.000	100	####	9.595.000	18000	9.595.000	100,00	15,99	
		1 06 05 2 02 03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	8500	900.000.000			4818	3.025.920.000	0,00	0,00	7.040.000	0,00	0,00	3.360.000	100	4818	1.129.264.300	0,00	0,00	639.687.360	100	4818	1.779.351.660	4818	1.779.351.660	56,68	197,71	
		1 06 05 2 02 04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	50	600.000.000			38	410.000.000	0,00	0,00	610.000	0,00	0,00	3.780.000	100	38	362.497.150	0,00	0,00	1.690.000	100	38	368.577.150	38	368.577.150	76,00	61,43	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							20,00		0,26	6,00		0,45	66,00		43,35	8,00		18,68	100		62,74			73,20	#####	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	S		SR	SR		SR	ST		R			S	ST	
4	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana	1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana (%)	40,00	735.000.000	0,00	-	40,00	386.008.800	0,00		35.000.000	0,00		106.725.000	0,00		37.830.000	0,00		71.355.000	0,00		250.910.000	0,00	250.910.000	0,00	34,14	DINSOS
		1 06 06 2 01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (%)	40,00	315.000.000	0,00		40,00	133.328.800	0,00		-	0,00		-	0,00		2.850.000	65,00		-	65,00		2.850.000	0,00	2.850.000	0,00	0,90	
		1 06 06 2 01 0001	Sub kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat 3x1 Hari dalam	3000	120.000.000			160	90.328.800	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		1 06 06 2 01 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap	100	75.000.000			25	43.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60,00	15	2.850.000	0,00			60,00	15	2.850.000	15	2.850.000	15,00	3,80	
		1 06 06 2 01 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	8	45.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		1 06 06 2 01 0004	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	20	45.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		1 06 06 2 01 0005	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan	15	30.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		1 06 06 2 02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	65,00	420.000.000		-	65,00	252.680.000	0,00		35.000.000	0,00		106.725.000	0,00		34.980.000	65,00		71.355.000	65,00		248.060.000	0,00	248.060.000	0,00	59,06	
		1 06 06 2 02 01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	20.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 06 06 2 02 02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan	28	400.000.000			28	252.680.000	100	28	35.000.000	0,00	0,00	106.725.000	0,00	0,00	34.980.000	0,00	0,00	71.355.000	100	28	248.060.000	28	248.060.000	100	62,02	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**33,33**		**9,07**	**0,00**		**27,65**	**20,00**		**9,80**	**0,00**		**18,49**	**53,33**		**65,00**			**19,17**	**34,14**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**R**		**R**			**SR**	**SR**	
5	**Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**1 06 07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan (%)**	**85,00**	**400.000.000**		**-**	**85,00**	**158.727.874**	**0,00**		**14.893.600**	**0,00**		**22.910.400**	**0,00**		**59.030.400**	**0,00**		**52.911.000**	**0,00**		**149.745.400**	**0,00**	**149.745.400**	**0,00**	**37,44**	**DINSOS**
		1 06 07 2 01	**Kegiatan Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terpelihara (%)**	**85,00**	**400.000.000**		**-**	**85,00**	**158.727.874**	**4,71**		**14.893.600**	**0,00**		**22.910.400**	**0,00**		**59.030.400**	**0,00**		**52.911.000**	**4,71**		**149.745.400**	**4,71**	**149.745.400**	**5,54**	**37,44**	
		1 06 07 2 01 02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (makam)	4	400.000.000			4	158.727.874	100	4	14.893.600	0,00	0,00	22.910.400	0,00		59.030.400	0,00	0,00	52.911.000	100	4	149.745.400	4	149.745.400	100	37,44	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**100**		**9,38**	**0,00**		**14,43**	**0,00**		**37,19**	**0,00**		**33,33**	**100**		**94,34**			**100**	**37,44**	
				Predikat Kinerja							**ST**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**ST**	**SR**	
6	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat**	**1 06 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)**	**29,00**	**6.740.840.020**			**29,00**	**4.070.672.574**	**0,00**		**982.935.726**	**25,59**		**1.184.527.492**	**0,00**		**922.810.943**	**0,00**		**892.289.852**	**25,59**		**3.982.564.013**	**25,59**	**3.982.564.013**	**88,24**	**59,08**	**DINSOS**
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	**11,00**				**11,00**		**0,00**			**8,68**			**0,00**			**0,00**			**8,68**			**8,68**		**78,91**		
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat			**Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup**	**74,00**				**74,00**		**0,00**			**66,50**			**0,00**			**0,00**			**66,50**			**66,50**		**89,86**		
		1 06 01 2 01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai**	**100**	**60.000.000**			**100**	**38.302.261**	**50,00**		**9.392.231**	**25,00**		**11.467.500**	**25,00**		**2.460.000**	**0,00**		**14.320.480**	**100**		**37.640.211**	**100**	**37.640.211**	**100**	**62,73**	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	**100**				**100**		**50,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**	-	**100**		
		1 06 01 2 01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	8	30.000.000			8	18.302.261	50,00	4	820.000	25,00	2	7.972.500	25,00	2	-	0,00	0,00	8.970.480	100	8	17.762.980	8	17.762.980	100,00	59,21	
		1 06 01 2 01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	4	30.000.000			4	20.000.000	50,00	2	8.572.231	25,00	1	3.495.000	25,00	1	2.460.000	0,00	0,00	5.350.000	100	4	19.877.231	4	19.877.231	100	66,26	
		1 06 01 2 02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar (%)**	**100**	**3.889.280.000**			**100**	**2.936.896.847**	**25,00**		**778.669.087**	**25,00**		**867.277.395**	**25,00**		**656.916.219**	**25,00**		**583.372.844**	**100**		**2.886.235.545**	**100**	**2.886.235.545**	**100**	**74,21**	
		1 06 01 2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	93	3.859.280.000			31	2.924.959.723	25,00	31	778.669.087	25,00	31	861.947.395	25,00	31	654.046.219	25,00	31	580.722.844	100	31	2.875.385.545	31	2.875.385.545	33,33	74,51	
		1 06 01 2 02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	36	15.000.000			12	5.000.000	25,00	3	-	25,00	3	2.460.000	25,00	3	1.230.000	25,00	3	300.000	100	12	3.990.000	12	3.990.000	33,33	26,60	
		1 06 01 2 02 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	126	15.000.000			40	6.937.124	25,00	10	-	25,00	10	2.870.000	25,00	10	1.640.000	25,00	10	2.350.000	100	40	6.860.000	40	6.860.000	31,75	45,73	
		1 06 01 2 05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap (%)**	**100**	**161.593.770**		**-**	**100**	**23.422.208**	**25,00**		**4.591.200**	**25,00**		**7.636.800**	**25,00**		**5.861.800**	**25,00**		**5.232.400**	**100**		**23.322.200**	**100**	**23.322.200**	**100**	**14,43**	
				Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**	-	**100**		
				Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	**20,00**				**6,67**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	-	**0,00**		
		1 06 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2	46.093.770			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		1 06 01 2 05 03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	11	85.500.000			11	23.422.208	27,27	3	4.591.200	27,27	3	7.636.800	27,27	3	5.861.800	18,18	2	5.232.400	100	11	23.322.200	11	23.322.200	100,00	27,28	
		1 06 01 2 05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1 06 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**100**	**371.000.000**			**100**	**136.510.272**	**25,00**		**31.843.080**	**25,00**		**44.908.460**	**25,00**		**34.753.820**	**25,00**		**23.645.800**	**100**		**135.151.160**	**100**	**135.151.160**	**100**	**36,43**	
		1 06 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	200.000.000			12	89.665.856	25,00	3	22.660.680	25,00	3	29.634.860	25,00	3	23.030.220	25,00	3	13.181.000	100	12	88.506.760	12	88.506.760	33,33	44,25	
		1 06 01 2 06 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	85.500.000			12	23.422.208	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.636.800	25,00	3	5.861.800	25,00	3	5.232.400	100	12	23.322.200	12	23.322.200	33,33	27,28	
		1 06 01 2 06 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	85.500.000			12	23.422.208	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.636.800	25,00	3	5.861.800	25,00	3	5.232.400	100	12	23.322.200	12	23.322.200	33,33	27,28	
		1 06 01 2 07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**330.000.000**			**100**	**28.496.230**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**100**		**23.500.000**	**100**		**23.500.000**	**100**	**23.500.000**	**100**	**7,12**	
		1 06 01 2 07 05	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	50.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		1 06 01 2 07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	30.000.000			2	23.450.500	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	2	19.550.000	100	2	19.550.000	2	19.550.000	200	65,17	
		1 06 01 2 07 09	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	50.000.000			1	5.045.730	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	1	3.950.000	100	1	3.950.000	1	3.950.000	100	7,90	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1	200.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		1 06 01 2 08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)**	**100**	**905.871.990**		**-**	**100**	**704.926.304**	**25,00**		**129.615.728**	**25,00**		**209.884.537**	**25,00**		**184.412.829**	**25,00**		**164.266.668**	**100**		**688.179.762**	**100**	**688.179.762**	**100**	**75,97**	
		1 06 01 2 08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	780.000.000			12	590.617.712	25,00	3	110.188.800	25,00	3	184.095.700	25,00	3	155.077.950	25,00	3	136.537.600	100	12	585.900.050	12	585.900.050	33,33	75,12	
		1 06 01 2 08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	60.645.000			12	63.813.350	25,00	3	10.144.528	25,00	3	8.610.937	25,00	3	17.611.279	25,00	3	16.064.268	100	12	52.431.012	12	52.431.012	33,33	86,46	
		1 06 01 2 08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	65.226.990			12	50.495.242	25,00	3	9.282.400	25,00	3	17.177.900	25,00	3	11.723.600	25,00	3	11.664.800	100	12	49.848.700	12	49.848.700	33,33	76,42	
		1 06 01 2 09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**100**	**1.023.094.260**		**-**	**100**	**202.118.452**	**25,00**		**28.824.400**	**25,00**		**43.352.800**	**25,00**		**38.406.275**	**25,00**		**77.951.660**	**100**		**188.535.135**	**100**	**188.535.135**	**100**	**18,43**	
		1 06 01 2 09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	14	812.794.260			14	196.648.452	35,71	5	28.824.400	21,43	3	43.352.800	21,43	3	38.406.275	21,43	3	73.292.050	100	14	183.875.525	14	183.875.525	100,00	22,62	
		1 06 01 2 09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25	10.300.000			8	5.470.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	8	4.659.610	100	8	4.659.610	8	4.659.610	32,00	45,24	
		1 06 01 2 09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	2	200.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata Rata Capaian Kinerja (%)							**22,82**		**24,15**	**19,04**		**29,10**	**19,04**		**22,67**	**33,21**		**21,92**	**94,12**		**97,84**			**60,61**	**59,08**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**R**	**R**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN SOSIAL						**9.753.209.248**			**1.252.559.326**			**1.531.925.352**			**3.329.306.310**			**2.091.374.483**			**8.205.165.471**		**8.205.165.471**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Sosial (%)							**36,69**		**12,84**	**7,73**		**15,71**	**29,18**		**34,14**	**17,64**		**21,44**	**91,24**		**84,13**			**61,64**	**68,59**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Sosial							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**R**	**S**	
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
		2 07	**BIDANG URUSAN TENAGA KERJA**			**29.114.665.300**				**7.194.678.659**			**1.549.304.754**			**2.202.896.385**			**1.565.769.094**			**1.630.507.969**			**6.948.478.202**		**6.948.478.202**		**23,87**	
1	**Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pelaporan**	**2 07 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah (Nilai)**	**25,62**	**27.369.665.300**			**28,50**	**7.100.614.869**	**0,00**		**1.536.308.754**	**25,35**		**2.181.988.385**	**0,00**		**1.557.762.594**	**0,00**		**1.586.234.574**	**25,35**		**6.862.294.307**	**25,35**	**6.862.294.307**	**98,95**	**25,07**	**DINAKER PERINDAG**
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Nilai)	**11,17**				**11,45**		**0,00**			**11,50**			**0,00**			**0,00**			**11,50**			**11,50**	-	#####		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)**	**0%**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	-	#####		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat		**Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah**	**64,65**				**64,50**		**0,00**			**64,16**			**0,00**			**0,00**			**64,16**			**64,16**	-	**99,24**		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah		**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Indeks)**	**4**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	-	**0,00**		
	Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana		**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)**	**100**				**0,70**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	-	**0,00**		
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Kinerja sesuai standar	**2 07 01 2 01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)**	**100**	**270.000.000**			**100**	**36.170.000**	**23,08**		**-**	**61,54**		**820.000**	**15,38**		**17.875.194**	**0,00**		**15.150.000**	**100**		**33.845.194**	**100**	**33.845.194**	**100**	**12,54**	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	**100**				**100**		**14,29**			**57,14**			**28,57**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
		2 07 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumalah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	39	150.000.000			13	27.855.000	23,08	3	-	61,54	8	820.000	15,38	2	17.875.194,00	0,00		7.555.000	100	13	26.250.194	13	26.250.194	33,33	17,50	
		2 07 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtsar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42	120.000.000			14	8.315.000	14,29	2	-	57,14	8	-	28,57	4	-	0,00		7.595.000	100	14	7.595.000	14	7.595.000	33,33	6,33	
		2 07 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang Disusun Sesuai**	**100**	**19.165.000.000**			**100**	**5.503.936.266**	**25,00**		**1.229.648.585**	**25,00**		**1.719.532.320**	**25,00**		**1.206.624.087**	**25,00**		**1.278.061.719**	**100**		**5.433.866.711**	**100**	**5.433.866.711**	**100**	**28,35**	
		2 07 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang 30 laki-laki dan 31	183	19.105.000.000			61	5.477.971.266	25,00	61	1.223.088.585	25,00	61	1.707.232.320	25,00	61	1.200.316.587	25,00	61	1.277.761.719	100	61	5.408.399.211	61	5.408.399.211	33,33		
		2 07 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	36	30.000.000			12	22.405.000	25,00	3	6.560.000	33,33	4	12.300.000	25,00	3	3.255.000	16,67	2	150.000	100	12	22.265.000	12	22.265.000	33,33	74,22	
		2 07 01 2 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/	126	30.000.000			42	3.560.000	26,19	11		26,19	11		26,19	11	3.052.500	21,43	9	150.000	100	42	3.202.500	42	3.202.500	33,33	10,68	
		2 07 01 2 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang mengunakan atribut lengkap (%)**	**100**	**309.000.000**			**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
				Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian	**100**				**100**		**25,00**		**-**	**25,00**		**35.400.550**	**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat	**50,00**				**50,00**		**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		2 07 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	130.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 07 01 2 05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	33	9.000.000			11	-	18,18	2	-	36,36	4	-	18,18	2		27,27	3		100	11	-	11	-	33,33	0,00	
		2 07 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang 15 laki-laki dan	30	170.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 07 01 2 06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum di perangkat daerah (%)**	**100**	**1.137.665.300**			**100**	**103.900.000**	**25,00**		**48.095.440**	**25,00**		**35.400.550**	**25,00**		**16.569.020**	**25,00**		**735.000**	**100**		**100.800.010**	**100**	**100.800.010**	**100**	**8,86**	
		2 07 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	1.109.665.300			12	101.000.000	25,00	3	48.095.440	25,00	3	35.400.550	25,00	3	16.569.020	25,00	3	735.000	100	12	100.800.010	12	100.800.010	33,33	9,08	
		2 07 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Laporan)	36	14.000.000			12	2.900.000	25,00	3	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
		2 07 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	36	14.000.000			12	-	25,00	3	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana	**2 07 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penambahan aset perangkat daerah (%)**	**6,20**	**1.215.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 07 01 2 07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	2	485.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 07 01 2 07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Paket)	3	135.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 07 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	70	195.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 07 01 2 07 0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	400.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana	**2 07 01 2 08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah (%)**	**100**	**4.285.000.000**			**100**	**1.317.221.695**	**25,00**		**232.971.260**	**25,00**		**382.368.757**	**25,00**		**290.256.501**	**25,00**		**259.197.799**	**100**		**1.164.794.317**	**100**	**1.164.794.317**	**100**	**27,18**	
		2 07 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	3.260.000.000			12	847.835.147	25,00	3	173.997.665	25,00	3	286.894.498	25,00	3	199.681.200	25,00	3	173.899.284	100	12	834.472.647	12	834.472.647	33,33	25,60	
		2 07 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	36	575.000.000			12	348.045.880	25,00	3	33.772.915	25,00	3	57.190.259	25,00	3	61.066.301	25,00	3	58.989.407	100	12	211.018.882	12	211.018.882	33,33	36,70	
		2 07 01 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36	450.000.000			12	121.340.668	25,00	3	25.200.680	25,00	3	38.284.000	25,00	3	29.509.000	25,00	3	26.309.108	100	12	119.302.788	12	119.302.788	33,33	26,51	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	**2 07 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik daerah yng dipelihara (%)**	**75,00**	**988.000.000**			**70,00**	**139.386.908**	**17,50**		**25.593.469**	**17,50**		**43.866.758**	**9,00**		**26.437.792**	**30,00**		**33.090.056**	**74,00**		**128.988.075**	**74,00**	**128.988.075**	**98,67**	**13,06**	
		2 07 01 2 09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	743.000.000			4	125.036.908	25,00	1	23.443.469	75,00	3	43.866.758	0,00	0,00	18.302.792	0,00	0,00	32.790.056	100	4	118.403.075	4	118.403.075	100,00	15,94	
		2 07 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	90	105.000.000			30	14.350.000	16,67	5	2.150.000	50,00	15	-	33,33	10	8.135.000	0,00	0,00	300.000	100	30	10.585.000	30	10.585.000	33,33	10,08	
		2 07 01 2 09 0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitas	3	140.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**23,10**		**21,64**	**36,75**		**30,73**	**22,98**		**21,94**	**17,17**		**22,34**	**100**		**96,64**			**28,57**	**25,07**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD**	**2 07 02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD (%)**	**88,00**	**60.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAKER PERINDAG**
	Tersusunnya Rencana Kerja Tenaga Kerja Daerah	**2 07 02 2 01**	**Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah Dokumen RTKD yang disusun (Dokumen)**	**3**	**60.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	2 07 02 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	3	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	2 07 03 2 01 0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro (orang)	75	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**2 07 03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang kompeten (%)**	**60,00**	**760.000.000**			**53,30**	**49.898.790**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**43.373.395**	**0,00**		**43.373.395**	**0,00**	**43.373.395**	**0,00**	**5,71**	**DINAKER PERINDAG**
	Meningkatnya Ketrampilan dan Kompetensi Pencari Kerja	**2 07 03 2 01**	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan (%)**	**57,14**	**640.000.000**			**20,00**	**49.898.790**	**0,00**		**-**	**10,00**		**-**	**0,00**		**-**	**10,00**		**43.373.395**	**20,00**		**43.373.395**	**0,00**	**43.373.395**	**0,00**		
		2 07 03 2 01 0001	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	210	540.000.000			20	49.898.790	0,00	0,00		60,00	12	-	10,00	2	-	30,00	6	43.373.395	100	20	43.373.395	0	43.373.395	0,00	8,03	
		1 03 03 2 01 0003	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	3	100.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Pembinaan LPKS	**2 07 03 2 02**	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja**	**Persentase LPKS yang dibina (%)**	**100**	**60.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 07 03 2 02 0001	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina (Lembaga)	12	60.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningatnya konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	**2 07 03 2 03**	**Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas (%)**	**45,00**	**60.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 07 03 2 03 0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan	45	60.000.000	-	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	60,00		0,00	10,00		0,00	30,00		0,00	100		86,92			0,00	8,03	
				Predikat Kinerja							SR		SR	R		SR	SR		SR	SR		SR	ST		T			SR	SR	
4	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	100	450.000.000			75,00	-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	DINAKER PERINDAG
		2 07 04 2 01	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL (%)	57,14	180.000.000			1800	-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 07 04 2 01 0002	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	225	90.000.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 07 04 2 01 0004	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	45	90.000.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 07 04 2 03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang dialkses pencaker (%)	28	270.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00		-	0,00			0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 07 04 2 03 0002	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karir Hub) (Pencaker dan Pemberi	180	180.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 07 04 4 03 0003	Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja (Orang)	90	90.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR			SR		SR			SR	SR	
5	Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan	49,04	535.000.000			46,50	44.165.000	43,95		12.996.000	1,27		20.908.000	0,64		8.006.500	0,00		900.000	45,86		42.810.500	45,86	42.810.500	93,52	8,00	DINAKER PERINDAG
		2 07 05 2 01	Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (%)	96,25	175.000.000			86,90	12.150.000	82,14		5.565.000	2,38		3.435.000	2,23		1.940.000	0,00		450.000	86,75		11.390.000	86,75	11.390.000	90,13	6,51	
		2 07 05 2 01 0001	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanankan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	30	75.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 07 05 2 01 0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartiti) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	3	100.000.000			1	12.150.000	0,00	0,00	5.565.000	100	1	3.435.000	0,00	0,00	1.940.000	0,00	0,00	450.000	100	1	11.390.000	1	11.390.000	33,33		
		2 07 05 2 02	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	62,5	360.000.000			62,50	32.015.000	18,75		7.431.000	37,50		17.473.000	25,00		6.066.500	18,75		450.000	100		31.420.500	100	31.420.500	#####	8,73	
		2 07 05 2 02 0002	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu)	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	48	120.000.000			16	32.015.000	18,75	3	7.431.000	37,50	6	17.473.000	25,00	4	6.066.500	18,75	3	450.000	100	16	31.420.500	16	31.420.500	33,33	26,18	
		2 07 05 2 02 0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi (Asosiasi dan SP)	3	60.000.000			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 07 05 2 02 0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Lembaga)	3	180.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							9,38		29,43	68,75		47,34	25,00		18,13	18,75		2,04	100		96,93			16,67	8,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Predikat Kinerja							SR		SR	S		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KETENAGAKERJAAN			7.194.678.659							1.549.304.754			2.202.896.385			1.565.769.094			1.630.507.969			6.948.478.202		6.948.478.202			
			Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Ketenagakerjaan (%)								10,83		21,53	55,17		30,62	19,33		21,76	21,97		22,66	100		96,58			9,05	25,07	
			Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Ketenagakerjaan								SR		SR	R		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
		2 08	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			19.096.140.540		-		5.820.921.406			848.253.263			2.016.058.083			1.312.639.171			1.103.381.668			5.311.618.185		5.311.618.185		27,82	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	32,65	15.732.646.317		-	28,90	5.267.363.331	0,00		844.653.263	24,45		2.007.051.582	0,00		1.288.679.571	0,00		1.047.213.444	24,45		5.187.597.860	24,45	5.187.597.860	74,89	32,97	DP2KBP3A
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13,45				11,86		0,00			12,64			0,00			0,00			12,64			12,64		93,98		
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00				0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		100		
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70,00				66,00		0,00			64,29			0,00			0,00			64,29			64,29		91,84		
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3				2		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	-	0,00		
	Meningkatnya Efektifitas Organisasi dan Tata Laksana			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100				100		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	-	0,00		
		2 8 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai	100	22.050.000			100	45.000.000	30,00		17.049.004	40,00		8.188.246	30,00		12.030.000	0,00		42.634.250	100		79.901.500	100	79.901.500	100	#####	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100				100		16,67			50,00			33,33			0,00			100			100		100		
		2 8 01 2 01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	24	11.025.000			10	-	30,00	3	-	40,00	4		30,00	3		0,00	0,00		100	10	-	3	-	12,50	0,00	
		2 8 01 2 01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan kinerja yang disusun (laporan)	15	11.025.000			12	45.000.000	16,67	2	17.049.004	50,00	6	8.188.246	33,33	4	12.030.000	0,00	0,00	42.634.250	100	12	79.901.500	2	79.901.500	13,33	724,73	
		2 8 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai	100	12.600.000.000			100	3.736.336.251	25,00		618.277.859	25,00		1.572.433.664	25,00		837.064.523	25,00		740.473.295	100		3.768.249.341	100	3.768.249.341	100	29,91	
		2 8 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang	36	12.600.000.000			12	3.736.336.251	25,00	3	618.277.859	25,00	3	1.572.433.664	25,00	3	837.064.523	25,00	3	740.473.295	100	12	3.768.249.341	3	3.768.249.341	8,33	29,91	
		2 08 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase Pegawai yang Mengenakan	100	134.746.578			100	-	25,00		-	25,00		-	25,00		-	25,00		-	100		-	100	-	100	0,00	
				Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100				100		25,00			25,00			25,00			25,00			100			100		100		
				Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan	30,00				20,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
		2 08 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	73.718.846			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 01 2 05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	8	61.027.732			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di	100	132.668.982			100	105.000.000	25,00		-	25,00		22.880.023	25,00		43.906.613	25,00		690.000	100		67.476.636	100	67.476.636	100	50,86	
		2 08 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	132.668.982			12	105.000.000	25,00	3	-	25,00	3	22.880.023,00	25,00	3	43.906.613	25,00	3	690.000	100	12	67.476.636	12	67.476.636	100	50,86	
		2 08 01 2 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah penambahan aset perangkat daerah	19	710.644.197			0,00	-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 08 01 2 07 02	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang diadakan	1	207.640.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 01 2 07 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	23.402.808			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 01 2 07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1	400.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 01 2 07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	79.601.389			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja	100	1.534.995.464			100	1.097.689.964	25,00		190.444.000	25,00		357.111.149	25,00		320.507.635	25,00		229.527.699	100		1.097.590.483	100	1.097.590.483,00	100	71,50	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 08 01 2 08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.186.957.545			12	978.292.748	25,00	3	174.465.600	25,00	3	323.750.400,00	25,00	3	294.196.200	25,00	3	196.224.000	100	12	988.636.200	12	988.636.200	100	83,29	
		2 08 01 2 08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	55.502.813			12	46.721.025	25,00	3	2.204.800	25,00	3	10.150.349,00	25,00	3	8.526.035	25,00	3	10.659.499	100	12	31.540.683	12	31.540.683	100	56,83	
		2 08 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor yang tertangani (bulan)	12	292.535.106			12	72.676.191	25,00	3	13.773.600	25,00	3	23.210.400,00	25,00	3	17.785.400	25,00	3	22.644.200	100	12	77.413.600	12	77.413.600	100	26,46	
		2 08 01 2 09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100**	**597.541.096**			**100**	**283.337.116**	**25,00**		**18.882.400**	**25,00**		**46.438.500**	**25,00**		**75.170.800**	**25,00**		**33.888.200**	**100**		**174.379.900**	**100**	**174.379.900**	**100**	**61,55**	
		2 08 01 2 09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	6	353.430.169			6	283.337.116	33,33	2	18.882.400	16,67	1	46.438.500,0	16,67	1	75.170.800	33,33	2	33.888.200	100	6	174.379.900	6	174.379.900	100,00	49,34	
		2 08 01 2 09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dinelihara	46	31.840.555			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 01 2 09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	212.270.372			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**20,50**		**16,04**	**23,17**		**38,10**	**20,50**		**24,47**	**15,83**		**19,88**	**100**		**98,49**			**48,56**	**32,97**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Layanan Bagi Perempuan Korban**	**2 08 03**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase Kasus Kekerasan Yang Terselesaikan**	**100**	**660.956.870**			**68,00**	**50.750.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**1.900.000**	**0,00**		**47.725.000**	**0,00**		**49.625.000**	**0,00**	**49.625.000**	**0,00**	**7,51**	**DP2KBP3A**
		2 08 03 2 01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Yang Aktif**	**100**	**159.202.779**			**100**	**50.750.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**1.900.000**	**25,00**		**47.725.000**	**100**		**49.625.000**	**100**	**49.625.000,00**	**100**	**31,17**	
		2 08 03 2 01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	13	79.601.389			13	50.750.000	23,08	3	-	38,46	5		23,08	3	1.900.000	15,38	2	47.725.000	100,00	13	49.625.000	13	49.625.000	100,00	62,34	
		2 08 03 2 01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	3	79.601.390			0		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 03 2 02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi**	**Persentase SDM UPTD PPPA yang terlatih**	**100**	**267.726.006**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 08 03 2 02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan	30	161.590.820			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 03 2 02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	106.135.186			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 03 2 03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**100**	**234.028.085**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 08 03 2 03 01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	50	187.859.279			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 03 2 03 02	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	5	46.168.806			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**23,08**		**0,00**	**38,46**		**0,00**	**23,08**		**3,74**	**15,38**		**94,04**	**100**		**97,78**			**16,67**	**7,51**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**ST**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang**	**2 08 02**	**Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase OPD yang menerapkan PPRG**	**100**	**371.606.819**		**-**	**100**	**105.410.790**	**0,00**		**3.600.000**	**0,00**		**9.006.501**	**0,00**		**5.499.600**	**91,53**		**8.443.224**	**91,53**		**26.549.325**	**91,53**	**26.549.325**	**91,53**	**0,00**	**DP2KBP3A**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 08 02 2 01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD Yang Responsif Gender**	**100**	**106.136.186**			**100**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 08 02 2 01 04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender	34	106.136.186			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 02 2 02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Perempuan Yang Terlibat Dalam Kelembagaan**	**45,55**	**177.298.828**			**37,95**	**46.210.790**	**0,00**		**-**	**0,00**		**1.230.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**1.230.000**	**0,00**	**1.230.000**	**0,00**	**0,69**	
		2 08 02 2 02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	15	100.828.426			15	46.210.790	0,00	0,00	-	53,33	8	1.230.000	20,00	3		26,67	4		100	15	1.230.000	15	1.230.000	100,00	1,22	
		2 08 02 2 02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	15	76.470.402			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 02 2 03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan**	**Jumlah Satgas PPPA Yang Terlatih**	**81**	**88.171.805**			**30,00**	**59.200.000**	**0,00**		**3.600.000**	**0,00**		**7.776.501**	**0,00**		**5.499.600**	**0,00**		**8.443.224**	**0,00**		**25.319.325**	**0,00**	**25.319.325**	**0,00**	**28,72**	
		2 08 02 2 01 04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	15	88.171.805			15	59.200.000	13,33	2	3.600.000	53,33	8	7.776.501	20,00	3	5.499.600	13,33	2	8.443.224	100	15	25.319.325	15	25.319.325	100,00	28,72	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**6,67**		**3,42**	**53,33**		**8,54**	**20,00**		**5,22**	**20,00**		**8,01**	**100**		**25,19**			**50,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**R**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**			**SR**	**SR**	
4	**Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan**	**2 08 04**	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan**	**40,15**	**300.583.616**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DP2KBP3A**
		2 08 04 2 01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga**	**16,85**	**205.185.848**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 08 04 2 01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8	88.171.805			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00		
		2 08 04 2 01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	50	117.014.043			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00		
		2 08 04 2 03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah**	**Jumlah Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Yang Terbentuk**	**2**	**95.397.768**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 08 04 2 03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	10	95.397.768			0,00	-	0,00		-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**	
5	**Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak yang Up to Date**	**2 08 05**	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**Profile Gender dan anak Kabupaten**	**3,00**	**60.231.718**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DP2KBP3A**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 08 05 2 01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di**	**Persentase Database Gender & Anak Per Lembaga yang up to date**	**100**	**60.231.718**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 08 05 2 01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang	1	60.231.718			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**	
6	**Meningkatnya Kualitas Lembaga Pemenuhan Hak Anak**	**2 08 06**	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Persentase lembaga PHA yang berkualitas**	**80,00**	**455.390.103**			**100**	**42.147.285**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DP2KBP3A**
		2 08 06 2 01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga PHA Yang Aktif**	**100**	**116.748.704**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 08 06 2 01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	5	116.748.704			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 06 2 02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase pembentukan Lembaga PHA**	**100**	**338.641.399**			**100**	**42.147.285**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 08 06 2 02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	30	84.908.150			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 06 2 02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	2	253.733.249			2	42.147.285	0,00	0,00	-	50,00	1		0,00	0,00		50,00	1		100	2	-	2	-	100,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**50,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**50,00**		**0,00**	**100**		**0,00**			**33,33**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**			**SR**	**SR**	
7	**Meningkatnya Kualitas Perlindungan Khusus Anak**	**2 08 07**	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Presentase Kasus Kekerasan Anak Yg Terselesaikan**	**100**	**1.514.725.097**		**-**	**100**	**355.250.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**16.560.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**47.846.000**	**0,00**	**47.846.000**	**0,00**	**3,16**	**DP2KBP3A**
		2 08 07 2 01	**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap**	**23,00**	**103.817.593**			**16,00**	**50.750.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**16.560.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**47.846.000**	**0,00**	**47.846.000**	**0,00**	**46,09**	
				Persentase pihak lingkup daerah kabupaten kota Perlindungan Khusus	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**									**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		2 08 07 2 01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan	13	53.067.593			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 08 07 2 01 04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	20	50.750.000			20	50.750.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		75,00	15	16.560.000	25,00	5	31.286.000	100	20	47.846.000	20	47.846.000	100,00	94,28	
		2 08 07 2 02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Perlindungan Khusus Anak Yang Aktif**	**100**	**920.141.784**			**100**	**235.480.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 08 07 2 02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan	30	47.760.833			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 03 08 2 02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	30	95.893.141			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 03 08 2 02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	2	70.047.810			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 03 08 2 02 06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	90	706.440.000			30	235.480.000,00	0,00	0,00		63,33	19	56.926.466	20,00	6	13.170.000	16,67	5	21.160.000	100	30	91.256.466	30	91.256.466	33,33	12,92	
		2 08 07 2 03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**Jumlah Satgas PPPA Yang Terampil**	**60**	**490.765.720**			**20**	**69.020.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 08 07 2 03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	8	90.214.908			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 03 08 2 03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	2	108.582.664			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 03 08 2 03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	2	84.908.148			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 03 08 2 03 06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	6	207.060.000			2	69.020.000	0,00	0,00		0,00	0,00		50,00	1	-	50,00	1		100	2	-	2	-	33,33	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**21,11**		**0,00**	**48,33**		**4,66**	**30,56**		**0,00**	**100**		**13,47**			**16,67**	**3,16**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**5.820.921.406**		**848.253.263**			**2.016.058.083**			**1.312.639.171**			**1.103.381.668**			**5.311.618.185**		**5.311.618.185**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (%)							**10,05**		**14,57**	**37,21**		**34,63**	**22,38**		**22,55**	**26,35**		**18,96**	**100**		**91,25**			**23,60**	**27,82**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
		2 09	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG URUSAN PANGAN**			**84.531.740.939**				**13.349.575.829**			**1.945.805.343**			**5.074.772.126**			**2.723.666.527**			**2.895.857.017**			**12.640.101.013**		**12.640.101.013**		**14,95**	
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DINPANPERTAN**	**2 08 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)**	**31,00**	**82.991.740.939**			**28,25**	**12.827.975.829**	**0,00**		**1.945.805.343**	**24,92**		**5.074.772.126**	**21,23**		**2.723.666.527**	**22,57**		**2.895.857.017**	**68,73**		**12.640.101.013**	**68,73**	**12.640.101.013**	**#####**	**0,15**	**DIN PANPERTAN**
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	**13,25**				**13,48**		**0,00**			**11,09**			**0,00**			**0,00**			**11,09**			**11,09**	-	**83,70**		
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat			**Indeks Peofesionalisme Aparatur Lingkup**	**72,00**				**69,50**		**0,00**			**66,41**			**0,00**			**0,00**			**66,41**			**66,41**		**92,24**		
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**4,00**				**85**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Efektifitas Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**100,00**				**0,95**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		2 09 01 2 01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai**	**100**	**37.475.941.541**			**100**	**37.155.305**	**50,00**		**4.015.000**	**25,00**		**6.977.500**	**25,00**		**14.608.700**	**0,00**		**8.750.000**	**100**		**34.351.200**	**100**	**34.351.200**	**100**	**29,48**	
				Persentase penatausahaan keuangan sesuai	**100**				**100**		**50,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
		2 09 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	24	75.000.000			8	21.875.000	50,00	4	2.065.000	25,00	2	4.977.500	25,00	2	8.845.000	0,00	0,00	3.690.000	100	8	19.577.500	8	19.577.500	33,33	26,10	
		2 09 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah laporan kinerja yang disusun (laporan)	12	112.188.810			4	15.280.305	50,00	2	1.950.000	25,00	1	2.000.000	25,00	1	5.763.700	0,00	0,00	5.060.000	100	4	14.773.700	4	14.773.700	33,33	13,17	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 09 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai**	**100**	**37.475.941.541**			**100**	**11.156.567.038**	**25,00**		**1.610.257.474**	**25,00**		**4.546.952.666**	**25,00**		**2.329.357.881**	**25,00**		**2.539.462.782**	**100**		**11.026.030.803**	**100**	**11.026.030.803**	**100**	**29,48**	
		2 09 01 2 01 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang	101	37.405.941.541			101	11.156.567.038	25,00	101	1.610.257.474	25,00	101	4.546.952.666	25,00	101	2.329.357.881	25,00	101	2.539.462.782	100	101	11.026.030.803	101	11.026.030.803	100	29,48	
		2 09 01 2 01 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	35.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 09 01 2 01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan	126	35.000.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 09 01 2 02	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**100**	**110.000.000**			**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**			**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
				Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**50,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		2 09 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3	31.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 09 01 2 05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian yang Terlaksana dengan Baik	36	32.000.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 09 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	16	47.000.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 09 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah**	**100**	**855.367.034**			**90,00**	**105.000.000**	**22,50**		**17.282.410**	**22,50**		**56.967.921**	**22,50**		**12.455.000**	**22,50**		**8.000.000**	**90,00**		**94.705.331**	**90,00**	**94.705.331**	**90,00**	**12,88**	
		2 09 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	735.367.034			12	105.000.000	25,00	3	17.282.410	25,00	3	56.967.921	25,00	3	12.455.000	25,00	3	8.000.000	100	12	94.705.331	12	94.705.331	33,33	12,88	
		2 09 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang terlaksana (bulan)	36	60.000.000			12	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3	-	25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
		2 09 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	60.000.000			12	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3	-	25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
		2 09 01 2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah**	**20,00**	**1.001.047.351**			**0,00**		**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	
		2 09 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya (paket)	15	387.464.409			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 09 01 2 07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah banguunan gedung kantor yang diadakan	2	613.582.942			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 09 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah**	**100**	**4.390.953.416**			**100**	**1.134.544.106**	**25,00**		**249.269.659**	**25,00**		**350.704.686**	**25,00**		**288.740.892**	**25,00**		**244.544.448**	**100**		**1.133.259.685**	**100**	**1.133.259.685**	**100**	**25,81**	
		2 09 01 2 08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	36	3.596.250.225			12	876.183.995	25,00	3	196.165.600	25,00	3	277.288.200	25,00	3	214.024.700	25,00	3	185.958.600	100	12	873.437.100	12	873.437.100	33,33	24,29	
		2 09 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	340.000.000			12	117.546.863	25,00	3	20.957.059	25,00	3	27.377.754	25,00	3	39.245.392	25,00	3	27.591.448	100	12	115.171.653	12	115.171.653	33,33	33,87	
		2 09 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor yang tertangani (bulan)	36	454.703.191			12	140.813.248	25,00	3	32.147.000	25,00	3	46.038.732	25,00	3	35.470.800	25,00	3	30.994.400	100	12	144.650.932	12	144.650.932	33,33	31,81	
		2 09 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**75**	**1.682.490.056**			**100**	**394.709.380**	**25,00**		**64.980.800**	**25,00**		**113.169.353**	**25,00**		**78.504.054**	**25,00**		**95.099.787**	**100**		**351.753.994**	**100**	**351.753.994**	#####	**20,91**	
		2 09 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang dipelihara (unit)	126	1.217.490.056			126	378.114.480	1,59	2	64.980.800	48,41	61	105.386.853	33,33	42	78.504.054	16,67	21	95.099.787	100	126	343.971.494	126	343.971.494	100,00	28,25	
		2 09 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	12	160.000.000			12	16.594.900	25,00	3	-	25,00	3	7.782.500	25,00	3	-	25,00	3	-	100	12	7.782.500	12	7.782.500	100,00	4,86	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 0 9 0 1 2 9 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumah gedung kantor yang dipelihara jumlah bangunan gedung kantor yang direhabilitas (unit)	14	305.000.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**29,30**		**15,17**	**26,95**		**39,56**	**25,69**		**21,23**	**18,06**		**22,57**	**100**		**98,54**			**31,58**	**0,15**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Kelancaran Distribusi Pangan**	**2 0 9 0 3**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Kelancaran Distribusi Pangan (%)**	**90,00**	**1.020.000.000**			**90,00**	**521.600.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**#####**	**0,00**	**DIN PANPERTAN**
		2 0 9 0 3 2 0 1	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga**	**Persentase Pedagangan yang melaporkan stok bahan pangan dan persentase Pangan yang harganya stabil (%)**	**100**	**346.000.000**		**-**	**100**	**521.600.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
		2 0 9 0 3 2 0 1 0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia	15	52.000.000			5	500.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 0 9 0 3 2 0 1 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi Singkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	90	47.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 0 9 0 3 2 0 1 0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Tokoh Tani Indonesia yang	1135	10.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 0 9 0 3 2 0 1 0007	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan (Keluarga)	600	147.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 0 9 0 3 2 0 1 0010	Pengembangan Kelembagaan Jaringan Distibusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang	1135	15.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 0 9 0 3 2 0 1 0014	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Strategis	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga	180	15.000.000			60	21.600.000	25,00	15	-	25,00	15	-	25,00	15	-	25,00	15		100	60	-	60	-	33,33	0,00	
		2 0 9 0 3 2 0 1 0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM) (buku)	51	60.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2 0 9 0 3 2 0 2	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (%)**	**25,00**	**535.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 0 9 0 3 2 0 2 0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3	310.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 0 9 0 3 2 0 2 0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	15.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 0 9 0 3 2 0 2 0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	210.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 0 9 0 3 2 0 4	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Persentase Kelancaran Distribusi Pangan (%)**	**90,00**	**139.000.000**		**-**	**90,00**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
		2 0 9 0 3 2 0 4 0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan per Kapital Per Tahun (Dokumen)	12	47.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 0 9 0 3 2 0 4 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peanekaragaman Konsumsi Pangan	12	60.000.000			4	-	25,00	1	-	25,00	1,00		25,00	1	-	25,00	1		100	4	-	4	-	33,33	0,00	
		2 0 9 0 3 2 0 4 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi ke propinsi dan pusat (Laporan)	48	32.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**0,00**	**25,00**		**0,00**	**25,00**		**0,00**	**25,00**		**0,00**	**100**		**0,00**			**5,13**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Penanganan Desa Rentan Pangan**	**2 0 9 0 4**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan desa Rentan Pangan**	**16**	**360.000.000**			**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		**DIN PANPERTAN**
	Meningkatkan Penangana Kerawanan	**2 0 9 0 4 2 0 2**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Intervensi Daerah Rawan Pangan**	**30**	**360.000.000**			**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		2 0 9 0 4 2 0 2 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	36	60.000.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 09 04 2 02 0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencangkup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencangkup dalam 1 (Satu) Daerah	3	300.000.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		#DIV/0!	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
				Predikat Kinerja							SR		#DIV/0!	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat**	**2 09 05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Keamanan Pangan Segar (%)**	**90,00**	**505.000.000**			**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		**DIN PANPERTAN**
	Meningkanya Keamanan Pangan Masyarakat	**2 09 05 2 01**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pedagangan dan Kelompok Wanita yag mendapatkan penyluhan Pangan**	**83,00**	**505.000.000**			**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		2 09 05 2 01 0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	9	135.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 09 05 2 01 0006	Rekomendasi Perizinan Kemanaan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Dokumen)	36	80.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 09 05 2 01 0007	Penyediaan Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	36	40.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 09 05 2 01 0008	Koordinasi dan Singkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	3	115.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 09 05 2 01 0009	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguat Kelembagaan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Dokumen)	9	135.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PANGAN						13.349.575.829			1.945.805.343			5.074.772.126			2.723.666.527			2.895.857.017			12.640.101.013		12.640.101.013		
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pangan (%)							27,15		14,58	25,98		38,01	25,35		20,40	21,53		21,69	100		94,69			18,35	14,95	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pangan							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
		2 #	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN**			**846.333.555**				**60.000.000**			**4.956.400**			**20.256.400**			**2.120.000**			**28.270.000**			**55.602.800**		**55.602.800**		**6,57**	
1	**Meningkatnya Pengelolaan Izin Lokasi**	**2 10 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	**Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lokasi (%)**	**100**	**60.000.000**			**0,00**		**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINPERKPP**
		02 2 01 2 01	**Kegiatan Pemebrian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Izin Lokasi yang Sesuai (%)**	**100**	**60.000.000**			**0,00**		**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
		02 2 01 01 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan	Persentase Izin Lokasi yang Sesuai (%)	36	60.000.000			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	
2	**Menurunnya Konflik Pertanahan**	**2 10 04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan (%)**	**100**	**80.000.000**			**75,00**	**17.046.875**	**0,00**		**500.000**	**0,00**		**906.400**	**0,00**		**100.000**	**0,00**		**12.885.000**	**0,00**		**14.391.400**	**0,00**	**14.391.400**	**0,00**	**84,42**	**DINPERKPP**
		2 10 04 2 01	**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Konflik Konflik yang Diselesaikan (%)**	**100**	**80.000.000**			**45,00**	**17.046.875**	**11,25**		**500.000**	**11,25**		**906.400**	**11,25**		**100.000**	**11,25**		**12.885.000**	**45,00**		**14.391.400**	**45**	**14.391.400**	**45,00**	**84,42**	
		2 # 04 2 01 02	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah	9	80.000.000			3	17.046.875	33,33	1	500.000	33,33	1	906.400	33,33	1	100.000	0,00		12.885.000	100	3	14.391.400	3	14.391.400	33,33	0,18	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							33,33		2,93	33,33		5,32	33,33		0,59	0,00		75,59	100		84,42			33,33	84,42	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		T	ST		T			SR	T	
3	**Terfasilitasinya Penyelesaian Ganti Kerugian**	**2 10 05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah yang**	**100**	**102.060.310**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINPERKPP**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian	**2 # 05 2 01**	**Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**	**Jumlah Bidang Tanah yang di Ganti Rugi**	**100**	**102.060.310**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksanannya koordinasi dan sinkronisasi penyelesaiaan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh	2 # 05 2 01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	102.060.310			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00		-	0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	
4	**Terfasilitasinya Pengelolaan Izin Membuka Tanah**	**2 # 09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase Usaha yang Memiliki Izin Membuka Tanah (%)**	**100**	**100.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINPERKPP**
	Terlaksananya Penerbitan Izin Membuka Tanah	**2 # 09 2 01**	**Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Persentase Pemberian Izin Membuka Tanah (%)**	**100**	**100.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin	2 # 09 2 01 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	3	100.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00		-	0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Pengusahaan Atas Tanah**	**2 # #**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Luas Lahan Pemda yang tersedia untuk kegiatan pembangunan (%)**	**28,75**	**604.273.245**			1	**42.953.125**	**0,00**	**0,00**	**4.456.400**	**0,00**		**19.350.000**	**0,00**		**2.020.000**	**0,00**		**15.385.000**	**0,00**		**41.211.400**	**0,00**	**41.211.400**	**0,00**	**95,95**	**DINPERKPP**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	**2 # # 2 01**	**Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Luas Tanah Pemda yang telah disertifikasi (%)**	**100**	**604.273.245**			**50,00**	**42.953.125**	**0,00**	**0,00**	**4.456.400**	**0,00**		**19.350.000**	**0,00**		**2.020.000**	**0,00**		**15.385.000**	**0,00**		**41.211.400**	**0,00**	**41.211.400**	**0,00**	**95,95**	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi tanah kewenangan kabupaten	2 # # 2 01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	3	604.273.245			1	42.953.125	0,00	0,00	4.456.400	0,00	0,00	19.350.000	0,00	0,00	2.020.000	100	1	15.385.000	100	1	41.211.400	1	41.211.400	33,33	6,82	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		10,38	0,00		45,05	0,00		4,70	100,00		35,82	100		95,95			33,33	95,95	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		SR	ST		ST			SR	ST	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PERTANAHAN						**60.000.000**			**4.956.400**			**20.256.400**			**2.120.000**			**28.270.000**			**55.602.800**		**55.602.800**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pertanahan (%)							16,67		8,26	16,67		33,76	16,67		3,53	50,00		47,12	100		92,67			16,67	6,57	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pertanahan							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
		2 11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**38.774.904.021**				**15.445.755.389**			**2.328.882.808**			**4.671.926.955**			**3.613.879.430**			**3.900.166.517**			**14.515.615.710**		**14.515.615.710**		**37,44**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah			**Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (BB)**	**77,50**				**77,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**			
1	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah**	**2 11 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah**	**27,75**	**29.562.839.219**		**-**	**27,5**	**7.046.667.952**	**0,00**		**1.297.532.208**	**26,53**		**2.204.580.730**			**1.527.408.835**			**1.680.811.735**	**26,53**		**6.710.333.508**	**26,53**	**6.710.333.508**	**95,60**	**22,70**	**DLH**
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat	**11,75**				**11,55**		**0,00**			**10,96**			**0,00**			**0,00**			**10,96**			**10,96**		**93,28**		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan			**Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI (%)**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**59,70**				**59,50**		**0,00**			**61,51**			**0,00**			**0,00**			**61,51**			**61,51**		#####		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**4,00**				**3,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)**	**95,00**				**92,00**		**0,00**			**46,00**			**0,00**			**0,00**			**46,00**			**46,00**		**48,42**		
	Meningkatnya penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai standar	**2 # 01 2 01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai**	**100**	**484.321.229**		**-**	**100**	**54.183.300**	**50,00**		**-**	**25,00**		**7.000.000**	**25,00**		**8.470.000**	**0,00**		**16.767.100**	**100**		**32.237.100**	**100**	**32.237.100**	**100**	**6,66**	
				Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)	**100**				**100**		**50,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 # 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	24	311.906.528	0	-	8	13.188.480	50,00	4	-	25,00	2	7.000.000	25,00	2	-	0,00	0,00	2.402.100	100	8	9.402.100	8	9.402.100	33,33	3,01	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2 # 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	172.414.701	0	-	4	40.994.820	50,00	2 -	25,00	1 -	25,00	1 8.470.000	0,00	0,00 14.365.000	100	4 22.835.000	4	22.835.000	33,33	13,24	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat	**2 # 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)**	**100**	**20.225.159.040**			**100**	**5.423.197.025**	**25,00**	**1.060.718.996**	**25,00**	**1.757.452.731**	**25,00**	**1.192.858.469**	**25,00**	**1.233.814.554**	**100**	**5.244.844.750**	**100,00**	**5.244.844.750**	#####	####	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2 # 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	65	20.134.941.600			65	5.403.087.025	25,00 56	1.060.718.996	25,00 56	1.747.487.731	25,00 56	1.190.398.469	25,00 56	1.227.489.554	100	56 5.226.094.750	56	5.226.094.750	86,15	25,96	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 # 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	59.987.440			1	9.660.000	0,00 0,00	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00	2.460.000	100 1	6.325.000	100	1,00 8.785.000	1	8.785.000	33,33	14,64	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 # 01 2 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	48	30.230.000			16	10.450.000	25,00 4	-	25,00 4	9.965.000	25,00 4		25,00 4	-	100	16 9.965.000	16	9.965.000	33,33	32,96	
	Meningkatnya Objek Sumber Pendapatan	**2 # 01 2 04**	**Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat**	**Persentase Objek Sumber Pendapatan yang terdata (%)**	**100**	**45.000.000**			**100**	**12.450.000**	**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**25,00**	**7.487.500**	**25,00**	**1.890.000**	**100**	**9.377.500**	**100**	**9.377.500**	**100**	**20,84**	
	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 # 01 2 04 0004	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	3	45.000.000			1	12.450.000	0,00 0,00	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00	7.487.500	100 1	1.890.000	100	1 9.377.500	1	9.377.500	33,33	20,84	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan	**2 # 01 2 05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap (%)**	**100**	**346.547.570**			**100**	**5.450.000**	**25,00**	**-**	**25,00**	**4.925.000**	**25,00**	**-**	**25,00**	**300.000**	**100**	**5.225.000**	**100**	**5.225.000**	**100**	**1,51**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)**	**100**				**100**		**25,00**		**25,00**		**25,00**		**25,00**		**100**		**100**		**100**	**1,51**	
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**28,13**				**16,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**1,51**	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	2 # 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	12	235.300.000			0	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	0,00 -	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 # 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	51.247.570			1	5.450.000	0,00 0,00	-	0,00 0,00	4.925.000	100 1		0,00 0,00	300.000	100	1 5.225.000	1	5.225.000	33,33	10,20	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 # 01 2 05 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	32	30.000.000			0	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	0,00 -	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 # 01 2 05 0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35	30.000.000			0	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	0,00 -	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Layanan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah	**2 # 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah (%)**	**100**	**1.224.545.240**			**100**	**256.502.491**	**25,00**	**29.900.080**	**25,00**	**67.301.660**	**25,00**	**52.765.718**	**25,00**	**88.209.203**	**100**	**238.176.661**	**100**	**238.176.661**	**100**	**19,45**	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 # 01 2 06 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	3	30.000.000			1	-	0,00 0,00		0,00 0,00	-	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	0,00 -	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	2 # 01 2 06 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	30.000.000			1	-	0,00 0,00		0,00 0,00	-	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	0,00 -	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 # 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	702.759.540			12	121.791.951	25,00 3	4.330.580	25,00 3	23.890.660	25,00 3	19.318.630	25,00 3	57.334.953	100	12 104.874.823	12	104.874.823	33,33	14,92	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 # 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	36	254.951.420			12	70.416.624	25,00 3	13.773.600	25,00 3	22.910.400	25,00 3	17.585.400	25,00 3	15.847.200	100	12 70.116.600	12	70.116.600	33,33	27,50	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	2 # 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	206.834.280			12	64.293.916	25,00	3	11.795.900	25,00	3	20.500.600	25,00	3	15.861.688	25,00	3	15.027.050	100	12	63.185.238	12	63.185.238	33,33	30,55	
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	**2 # 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah (%)**	**17,90**	**1.654.966.510**			**17,90**	**5.244.390**	**0,00**		**-**	**12,00**		**4.600.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**150.000,00**	**12,00**		**4.750.000**	**12,00**	**4.750.000**	**67,04**	**0,29**	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 # 01 2 07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10	751.012.700			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Mebel	2 # 01 2 07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	133	106.187.810			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 # 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	250.556.070			3	5.244.390	0,00	0,00	-	100	3	4.600.000	0,00	0,00		0,00	0,00	150.000	100	3	4.750.000	3	4.750.000	12,00	1,90	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 # 01 2 07 0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	547.209.930			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat	**2 # 01 2 08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah (%)**	**100**	**4.730.722.490**			**100**	**1.175.868.538**	**25,00**		**193.535.932**	**25,00**		**337.936.039**	**25,00**		**248.127.048**	**25,00**		**303.864.328**	**100**		**1.083.463.347**	**100**	**1.083.463.347**	**100**	**22,90**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 # 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	4.133.838.640			12	982.758.456	25,00	3	177.115.600	25,00	3	288.077.800	25,00	3	217.036.600	25,00	3	265.082.480	100	12	947.312.480	12	947.312.480	33,33	22,92	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 # 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	151.383.850			12	54.353.850	25,00	3	2.646.732	25,00	3	12.338.384	25,00	3	4.830.048	25,00	3	12.837.648	100	12	32.652.812	12	32.652.812	33,33	21,57	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 # 01 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	445.500.000			12	138.756.232	25,00	3	13.773.600	25,00	3	37.519.855	25,00	3	26.260.400	25,00	3	25.944.200	100	12	103.498.055	12	103.498.055	33,33	23,23	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	**2 # 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara (%)**	**5**	**851.577.140**			**5**	**113.772.208**	**1,25**		**13.377.200**	**1,25**		**25.365.300**	**1,25**		**17.700.100**	**1,25**		**35.816.550**	**5,00**		**92.259.150**	**5,00**	**92.259.150**	**100**	**10,83**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	2 # 01 2 09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	417.952.140			18	89.822.208	16,67	3	13.377.200	50,00	9	25.365.300	16,67	3	17.700.100	16,67	3	23.721.550	100	18	80.164.150	18	80.164.150	100	19,18	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 # 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	71.850.000			35	23.950.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	35	12.095.000	100	35	12.095.000	35	12.095.000	100	16,83	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 # 01 2 09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	361.775.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**19,79**		**18,41**	**25,00**		**31,29**	**22,92**		**21,68**	**32,29**		**23,85**	**100**		**95,23**			**41,07**	**22,70**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Perencanaan Lingkungan**	**2 11 01 02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan**	**100**	**1.104.000.000**			**100**	**30.157.180**	**0,00**		**-**	**100**		**18.112.350**	**0,00**		**1.440.000**	**0,00**		**8.366.584**	**100**		**27.918.934**	**100**	**27.918.934**	**100**	**2,53**	**DLH**
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan sesuai dengan	**2 # 02 2 01**	**Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan yang disusun sesuai dengan Ketentuan (Dokumen)**	**3**	**196.000.000**			**1**	**30.157.180**	**0,00**		**-**	**1**		**18.112.350**	**0,00**		**1.440.000**	**0,00**		**8.366.584**	**1**		**27.918.934**	**1**	**27.918.934**	**33,33**	**14,24**	
	RPPLH kabupaten/kota yang disusun	2 # 02 2 01 0006	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang Berisi Arahan/Muatan RPPLH	3	196.000.000			1	30.157.180	0,00	0	-	100	1	18.112.350	0,00	0,00	1.440.000	0,00	0	8.366.584	100	1	27.918.934	1	27.918.934	33,33	14,24	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan	**2 # 02 2 02**	**Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan yang disusun sesuai dengan**	**6**	**908.000.000**			**2**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	2 # 02 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD / RPJMD Kabupaten / Kota yang disusun (Dokumen)	3	20.000.000			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	2 # 02 2 02 0005	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	3	888.000.000			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**100**		**60,06**	**0,00**		**4,77**	**0,00**		**27,74**	**100**		**92,58**			**11,11**	**7,12**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Predikat Kinerja							SR		SR	ST		R	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
3	**Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup**	**2 # 03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN**	**Persentase menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan**	**100**	**1.435.623.180**			**100**	**410.718.765**	**25,00**		**27.905.000**	**25,00**		**85.624.480**	**25,00**		**61.529.825**	**25,00**		**70.915.498**	**100**		**245.974.803**	**100**	**245.974.803**	**100**	**17,13**	**DLH**
	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan	**2 # 03 2 01**	**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemantauan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (%)**	**100**	**1.132.810.400**			**100**	**284.415.985**	**25,00**		**27.905.000**	**25,00**		**85.624.480**	**25,00**		**61.529.825**	**25,00**		**70.915.498**	**100**		**245.974.803**	**100**	**245.974.803**	**100**	**-**	
	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2 # 03 2 01 0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2	71.453.800			2	70.328.645	0,00	0,00	-	50,00	1	11.092.730	50,00	1	14.220.185	0,00	0	33.671.498	100	2	58.984.413	2	58.984.413	100,00	82,55	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	2 # 03 2 01 0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	40.499.800			1	22.799.800	0,00	0,00	-	0,00	0,00	6.875.000	0,00	0,00	1.640.000	100	1	930.000	100	1	9.445.000	1	9.445.000	100,00	23,32	
	Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan	2 # 03 2 01 0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	3	84.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	2 # 03 2 01 0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan	15	149.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 # 03 2 01 0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	3	3.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat	2 # 03 2 01 0010	Sub Kegiatan Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	3	3.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 # 03 2 01 0011	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	3	3.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat	2 # 03 2 01 0014	Sub Kegiatan Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	3	3.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	2 # 03 2 01 0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian yang Dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan (Dokumen)	3	775.356.800			1	191.287.540	0,00	0,00	27.905.000	0,00	0,00	67.656.750	0,00	0,00	45.669.640	100	1	36.314.000	100	1	177.545.390	1	177.545.390	33,33	22,90	
	Terlaksananya rehabilitasi (Kewajiban Pemegang Izin	**2 # 03 2 03**	**Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi berdasarkan izin**	**100**	**302.812.780**			**100**	**126.302.780**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**	**-**	**-**	**100,00**	**-**	**#####**	**0,00**	
	Kegiatan rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	2 # 03 2 03 0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	22,46	299.812.780			22,46	126.302.780	25,00	5,62	-	25,00	5,62	-	25,00	5,62		25,00	5,62		100	22	-	22	-	100,00	0,00	
	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 # 03 2 03 0013	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	3	3.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	6,25				6,79		18,75		20,85	18,75		14,98	56,25		17,27	100		59,89				30,30	17,13		
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		R			SR	SR	
4	**Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman**	**2 # 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Keanekaragaman Hayati yang dikelola**	**100**	**6.051.354.522**			**100**	**1.393.487.395**	**25,00**		**211.688.200**	**25,00**		**378.861.280**	**25,00**		**308.779.720**	**25,00**		**279.330.500**	**100**		**1.178.659.700**	**100**	**1.178.659.700**	**100**	**19,48**	**DLH**
	Terlaksananya Pengelolaan Kehati	**2 # 04 2 01**	**Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Profil Kehati yang disusun (%)**	**100**	**6.051.354.522**		**-**	**100**	**1.393.487.395**	**0,00**		**211.688.200**	**0,00**		**378.861.280**	**0,00**		**308.779.720**	**0,00**		**279.330.500**	**0,00**		**1.178.659.700**	**0,00**	**1.178.659.700**	**0,00**	**19,48**	
				Persentase Luasan Kehati yang dikelola (%)	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**75,00**			**75,00**		**75,00**		
				Persentase Sarana dan Prasarana Kehati yang terpenuhi (%)	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Terlaksananya Pengelolaan RTH			**Persentase Luasan RTH yang dikelola (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang	2 # 04 21 0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	3	30.000.000			1	15.310.250	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	2 # 04 21 0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	30,75	5.681.882.725			30,75	1.346.981.815	25,00	7,69	211.688.200	25,00	7,69	375.201.280	19,35	6	302.013.220	30,65	9,43	260.785.560	100	31	1.149.688.260	31	1.149.688.260	100,00	20,23	
	Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman	2 # 04 21 0006	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	4	79.770.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang	2 # 04 21 0007	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	350	132.855.000			250	14.450.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	250	13.200.000	100	####	13.200.000	250	13.200.000	71,43	9,94	
	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	2 # 04 21 0009	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit)	1	126.846.797			1	16.745.330	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3.660.000	100	1	6.766.500	0,00	0,00	5.344.940	100	1	15.771.440	1	15.771.440	100,00	12,43	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**8,33**		**15,19**	**8,33**		**27,19**	**39,78**		**22,16**	**43,55**		**20,05**	**100**		**84,58**			**54,29**	**19,48**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**R**	**SR**	
5	**Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**	**2 # 05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Penghasil Limbah B3 yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan baik (%)**	**100**	**60.000.000**			**100**	**13.438.165**	**25,00**		**-**	**25,00**		**3.406.600**	**25,00**		**2.455.000**	**25,00**		**2.678.000**	**100**		**9.299.600**	**100**	**9.299.600**	**100**	**15,50**	**DLH**
	Meningkatnya pemenuhan standar/rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan koordinasi serta sinkronisasi pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten	**2 # 5 2 01**	**Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Persentase pemenuhan standar/rincian teknis penyimpanan limbah B3 (%)**	**100**	**30.000.000**		**-**	**100**	**8.391.285**	**25,00**		**-**	**25,00**		**1.526.950**	**25,00**		**225.000**	**25,00**		**2.678.000**	**100**		**4.429.950**	**100**	**4.429.950**	**100**	**14,77**	
	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan	2 # 5 2 01 0002	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 (Laporan)	24	30.000.000	0	-	6	8.391.285	0,00	0	-	66,67	4	1.526.950	33,33	2	225.000	0,00	0,00	2.678.000	100	6	4.429.950	6	4.429.950	25,00	14,77	
	Meningkatnya pemenuhan standar/rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan koordinasi serta sinkronisasi pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten	**2 # 05 2 02**	**Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten dan Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang bukan kewenangan**	**100**	**30.000.000**			**100**	**5.046.880**	**25,00**		**-**	**25,00**		**1.879.650**	**25,00**		**2.230.000**	**25,00**			**100**		**4.869.650**	**100**	**9.445.000**	**100**	**31,48**	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	2 # 05 2 02 0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pengumpulan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai kewenangannya (Dokumen)	3	30.000.000			1	5.046.880	0,00	0	-	100	1	1.879.650	0,00	0,00	2.230.000	0,00	0,00	760.000	100	1	4.869.650	1	4.869.650	33,33	16,23	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**83,33**		**25,35**	**16,67**		**18,27**	**0,00**		**19,93**	**100**		**69,20**			**29,17**	**15,50**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**T**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**S**			**SR**	**SR**	

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
6	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**2**	**#**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Pengawasan ketaatan pelaku usaha/kegiatan secara administrasi maupun teknis (%)**	**100**	**206.460.100**			**100**	**33.650.895**	**25,00**		**-**	**25,00**		**14.007.240**	**25,00**		**500.000**	**25,00**		**13.170.000**	**100**		**27.677.240**	**100**	**27.677.240**	**100**	**13,41**	**DLH**
	Meningkatnya pengawasan lingkungan hidup	**2**	**#**	**06**	**2**	**01**		**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengawasan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha atau kegiatan (%)**	**100**	**206.460.100**			**100**	**33.650.895**	**25,00**		**-**	**25,00**		**14.007.240**	**25,00**		**500.000**	**25,00**		**13.170.000**	**100**		**27.677.240**	**100**	**27.677.240**	**100**	**13,41**	
	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan	2	#	06	2	01	0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan (Dokumen)	30	30.000.000			10	13.098.170	30,00	3	-	50,00	5	2.550.700	10,00	1	150.000	10,00	1	6.820.000	100	10	9.520.700	10	9.520.700	33,33	31,74	
	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2	#	06	2	01	0005	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	60	176.460.100			60	20.552.725	25,00	15	-	33,33	20	11.456.540	3,33	2	350.000	38,33	23	6.350.000	100	60	18.156.540	60	18.156.540	100,00	10,29	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**27,50**		**0,00**		**41,67**		**41,63**			**6,67**		**1,49**	**24,17**		**39,14**	**100**		**82,25**			**66,67**	**13,41**	
									Predikat Kinerja	**SR**		**SR**		**SR**		**SR**			**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**S**	**SR**	
7	**Meningkatnya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait**	**2**	**#**	**07**				**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase Perda tentang pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diselesaikan (%)**	**100**	**30.000.000**			**100**	**48.806.300**	**0,00**		**-**	**0,00**		**3.860.000**	**0,00**		**6.100.000**	**0,00**		**600.000**	**0,00**		**10.560.000**	**0,00**	**10.560.000**	**0,00**	**35,20**	**DLH**
	Terlaksananya Rancangan Perda Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan dan Hak MHA yang terkait dengan	**2**	**#**	**07**	**2**	**01**		**Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Jumlah Rancangan Perda yang disusun (Dokumen)**	**1**	**30.000.000**		**-**	**1**	**48.806.300**	**0,00**		**-**	**0,00**		**3.860.000,00**	**0,00**		**6.100.000**	**1**		**600.000**	**1**		**10.560.000**	**1**	**10.560.000,00**	**100**	**35,20**	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait	2	#	07	2	01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dokumen)	1	30.000.000	0	-	1	48.806.300	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3.860.000	0,00	0,00	6.100.000	100	1	600.000	100	1	10.560.000	1	10.560.000	100,00	35,20	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**7,91**			**0,00**		**12,50**	**100**		**1,23**	**100**		**21,64**			**66,67**	**35,20**	
									Predikat Kinerja	**SR**		**SR**		**SR**		**SR**			**SR**		**SR**	**ST**		**SR**	**ST**		**SR**			**S**	**SR**	
8	**Meningkatnya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk**	**2**	**#**	**08**				**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup (%)**	**100**	**324.627.000**			**100**	**32.395.150**	**25,00**		**-**	**25,00**		**5.210.000**	**25,00**		**11.892.500**	**25,00**		**10.090.000**	**100**		**27.192.500**	**100**	**27.192.500**	**100**	**8,38**	**DLH**
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	**2**	**#**	**08**	**2**	**01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (%)**	**100**	**324.627.000**			**100**	**32.395.150**	**25,00**		**-**	**25,00**		**5.210.000**	**25,00**		**11.892.500**	**25,00**		**10.090.000**	**100**		**27.192.500**	**100**	**27.192.500**	**100**	**8,38**	
	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	2	#	08	2	01	0002	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	3	200.758.800			1	32.395.150	0,00	0,00	-	0,00	0,00	5.210.000	100	1	11.892.500	0,00	0,00	10.090.000	100	1	27.192.500	1	27.192.500	33,33	13,54	
	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	2	#	08	2	01	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat (Orang)	201	43.028.200			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota	2 # 08 2 01 0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/ Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok Masyarakat yang Meningkat Kapasitas Kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	1	80.840.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	0,00		16,08	100		36,71	0,00		31,15	100		83,94			11,11	8,38	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	ST		SR	SR		SR	ST		T			SR	SR	
9	**Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**2 # 09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten (%)**	**100**	**107.568.200**			**100**	**30.731.875**	**0,00**		-	**0,00**		**6.220.000**	**0,00**		**1.230.000**	**0,00**		**20.767.500**	**0,00**		**28.217.500**	**0,00**	**28.217.500**	**0,00**	**26,23**	**DLH**
	Terlaksananya Penetapan Calon Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	**2 # 09 2 01**	**Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Calon Penerima Penghargaan (Calon Penerima)**	**2**	**107.568.200**		-	**1**	**30.731.875**	**0,00**		-	**1**		**6.220.000**	**0,00**		**1.230.000**	**0,00**		**20.767.500**	**1**		**28.217.500**	**1**	**28.217.500**	**50,00**	**26,23**	
	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	2 # 09 2 01 0001	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia pendidikan/ Filantrophi yang dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	12	107.568.200	0	-	4	30.731.875	0,00	0,00	-	100	4	6.220.000	0,00	0,00	1.230.000	0,00	0,00	20.767.500	100	4	28.217.500	4	28.217.500	33,33	26,23	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	100		20,24	0,00		4,00	0,00		67,58	100		91,82			33,33	8,38	
				Predikat Kinerja							SR		SR	ST		SR	SR		SR	SR		S	ST		ST			SR	SR	
10	**Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**2 # #**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pelayanan dan fasilitasi pengaduan lingkungan hidup (%)**	**100**	**60.000.000**		-	**100**	**9.661.880**	**25,00**		-	**25,00**		**874.650**	**25,00**		**1.305.000**	**25,00**		**4.853.300**	**100**		**7.032.950**	**100**	**7.032.950**	**100**	**11,72**	**DLH**
	Terlaksananya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	**2 # # 2 01**	**Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase verifikasi pengaduan lingkungan hidup (%)**	**100**	**60.000.000**			**100**	**9.661.880**	**25,00**		-	**25,00**		**874.650**	**25,00**		**1.305.000**	**25,00**		**4.853.300**	**100**		**7.032.950**	**100**	**7.032.950**	**100**	**11,72**	
	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	2 # # 2 01 0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	4	30.000.000			4	9.661.880	25,00	1	-	25,00	1	874.650	50,00	2	1.305.000	0,00	0,00	4.853.300	100	4	7.032.950	4	7.032.950	100,00	23,44	
	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan	2 # # 2 01 0006	Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada Penanggung Jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota (Perkara)	4	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							25,00		0,00	25,00		9,05	50,00		13,51	0,00		50,23	100		72,79			50,00	11,72	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		R	ST		S			SR	SR	
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan			**Persentase Pengelolaan Sampah (%)**	**100**	**22.112.944.979**			**99,00**	**6.396.039.832**			**791.757.400**			**1.951.169.625**			**1.691.238.550**			**1.808.583.400,00**			**6.242.748.975**		**6.242.748.975**	**0,00**	**28,23**	
11	**Meningkatnya Pengurangan Sampah**	**2 # #**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Pengurangan Sampah (%)**	**30**	**22.112.944.979**			**28**	**6.396.039.832**	**0,00**		**791.757.400**	**0,00**		**1.951.169.625**	**0,00**		**1.691.238.550**			**1.808.583.400**	**0,00**		**6.242.748.975**	**0,00**	**6.242.748.975**	**0,00**	**28,23**	**DLH**
	Meningkatnya Penanganan Sampah			**Persentase Penanganan Sampah (%)**	**70**				**71**		**0,00**			**0,00**			**0,00**						**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Terlaksananya Rencana Pengelolaan Persampahan	**2 # # 2 01**	**Kegiatan Pengelolaan Sampah**	**Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Persampahan sesuai dengan ketentuan**	**3**	**22.112.944.979**		-	**3**	**6.396.039.832**	**0,00**		**791.757.400**	**0,00**		**1.951.169.625**	**0,00**		**1.691.238.550**	**0,00**		**1.808.583.400**	**0,00**		**6.242.748.975**	**0,00**	**6.242.748.975**	**0,00**	**28,23**	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengurangan Sampah dan Penanganan			**Persentase Sampah yang dikelola (%)**	**100**				**99,00**		**24,75**			**24,75**			**24,75**			**24,75**			**99,00**			**99,00**		**99,00**		
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam			**Persentase Kelompok Masyarakat yang mengelola persampahan (%)**	**65**				**58,33**		**58,33**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**58,33**			**58,33**		**89,74**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Sarana dan prasarana Pengurangan sampah dan berfungsi baik			**Persentase Prasarana dan Sarana Pengurangan Persampahan yang tersedia (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersedianya Sarana dan prasarana Penanganan sampah dan berfungsi baik			**Persentase Prasarana dan Sarana Penanganan Persampahan yang tersedia (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan	2 # # 2 01 0004	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	40	428.128.616	0	-	24	92.334.100	100	24	67.593.000	0,00	0,00	10.328.880	0,00	0,00	1.500.000	0,00	0,00	6.900.000	100	24	86.321.880	24	86.321.880	60,00	20,16	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada	2 # # 2 01 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	7	139.766.608	0	-	3	16.027.860	0,00	0,00	-	66,67	2	-	33,33	1	9.952.800	0,00	0,00	450.000	100	3	10.402.800	3	10.402.800	42,86	7,44	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	2 # # 2 01 0007	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	977	3.841.003.661	0	-	807	1.227.472.925	0,00	0,00	55.630.400	49,94	403	114.752.500	24,78	200	531.417.000	25,28	204	494.967.600	100	807	1.196.767.500	807	1.196.767.500	82,60	31,16	
	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2 # # 2 01 0008	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	30.000.000	0	-	1	20.935.175	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.380.000	0,00	0,00	-	100,00	1	8.948.550	100	1	10.328.550	1	10.328.550	100,00	34,43	
	Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan	2 # # 2 01 0015	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	20	3.886.706.285	0	-	20	1.413.180.000	0,00	0,00	-	50,00	10	677.613.645	25,00	5	260.269.750	25,00	5	460.960.700	100	20	1.398.844.095	20	1.398.844.095	100,00	35,99	
	Luas pelayanan pengumpulan sampah	2 # # 2 01 0016	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (%)	100	13.725.301.161	0	-	100	3.612.616.912	25,00	25	668.534.000	25,00	25	1.147.094.600	25,00	25	888.099.000	25,00	25	832.738.700	100	100	3.536.466.300	100	3.536.466.300	100,00	25,77	
	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 # # 2 01 0018	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	18	62.038.648	0	-	6	13.472.860	0,00	0,00	-	50,00	3	-	33,33	2	-	16,67	1	3.617.850	100	6	3.617.850	6	3.617.850	33,33	5,83	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**17,86**		**12,38**	**34,51**		**30,51**	**20,21**		**26,44**	**27,42**		**28,28**	**100**		**97,60**			**74,11**	**28,23**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**S**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						**15.445.755.389**		**2.328.882.808**			**4.671.926.955**			**3.613.879.430**			**3.900.166.517**			**14.515.615.710**		**14.515.615.710**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Lingkungan Hidup (%)							**9,52**		**15,08**	**39,69**		**30,25**	**25,00**		**23,40**	**25,79**		**25,25**	**100**		**93,98**			**42,53**	**17,02**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Lingkungan Hidup							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
		2 #	**BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**		**17.588.672.800**		-		**6.008.696.140**				**1.109.086.971**			**2.270.707.520**			**974.741.952**			**1.363.856.297**			**5.726.091.488**		**5.726.091.488**		**32,56**	
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan**	**2 # 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai kinerja perencanaan PD**	**30,00**	**16.744.489.335**			**27,82**	**5.319.584.935**	**0,00**		**1.048.084.471**	**24,45**		**1.923.659.671**	**0,00**		**944.266.952**	**0,00**		**1.145.324.079**	**24,45**		**5.068.883.921**	**24,45**	**5.068.883.921**	**81,50**	**30,27**	**DINDUKPENCAPIL**
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	**13,50**				**12,68**		**0,00**			**11,96**			**0,00**			**0,00**			**11,96**			**11,96**		**88,59**		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**72,00**				**70,00**		**0,00**			**71,85**			**0,00**			**0,00**			**71,85**			**71,85**		**99,79**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**3,00**				**1,75**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**100**				**85,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**						**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai	**2 # 01 2 01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**100**	**81.421.310**		**-**	**100**	**29.452.526**	**50,00**		**-**	**25,00**		**21.621.358**	**25,00**		**4.100.000**	**0,00**		**3.435.000**	**100**		**29.156.358**	**100**	**29.156.358**	**100**	**35,81**	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	**100**				**100**		**50,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 # 01 2 01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	10	51.778.780			4	3.232.500	50,00	2	-	25,00	1	2.507.500	25,00	1	-	0,00		725.000	100	4	3.232.500	4	3.232.500	40,00	6,24	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 # 01 2 01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	29.642.530			4	26.220.026	50,00	2	-	25,00	1	19.113.858	25,00	1	4.100.000	0,00		2.710.000	100	4	25.923.858	4	25.923.858	40,00	87,45	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat	**5 01 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar**	**100**	**5.193.993.000**		**-**	**100**	**3.301.392.488**	**25,00**		**645.471.756**	**25,00**		**1.092.107.039**	**25,00**		**730.412.554**	**25,00**		**663.372.419**	**100**		**3.131.363.768**	**100**	**3.131.363.768**	**100**	**60,29**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5 01 01 2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	5.171.703.000			34	3.294.102.488	25,00	34	645.471.756	25,00	34	1.090.787.039	25,00	34	728.732.554	25,00	34	659.132.419	100	34	3.124.123.768	34	3.124.123.768	100	60,41	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	5 01 01 2 02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36	17.490.000			12	2.490.000	25,00	3	-	25,00	3	1.320.000	25,00	3	-	25,00	3	1.120.000	100	12	2.440.000	12	2.440.000	33,33	13,95	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	5 01 01 2 02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	36	4.800.000			12	4.800.000	25,00	3		25,00	3		25,00	3	1.680.000	25,00	3	3.120.000	100	12	4.800.000	12	4.800.000	33,33	100,00	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	**5 01 01 2 05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**100**	**100.393.880**			**48,25**	**28.862.500**	**25,00**		**6.707.224**	**25,00**		**2.695.276**	**25,00**		**1.680.000**	**25,00**		**6.157.500**	**100**		**24.788.748**	**100**	**24.788.748**	**100**	**24,69**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100**	**-**			**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**35,00**	**-**			**25**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**		**71,43**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 01 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	50.000.000			1	150.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 01 01 2 05 03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33	10.393.880			11	7.712.500	27,27	3	-	36,36	4	1.202.500	0,00	0,00		36,36	4	5.707.500	100	11	6.910.000	11	6.910.000	33,33	66,48	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 01 01 2 05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	40.000.000			4	21.000.000	50,00	2	6.707.224	50,00	2	1.492.776	0,00	0,00	9.228.748	0,00	0,00	450.000	100	4	17.878.748	4	17.878.748	26,67	44,70	
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat	**2 # 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah**	**100**	**415.302.145**			**85,00**	**319.268.376**	**25,00**		**79.377.111**	**25,00**		**35.969.151**	**25,00**		**70.046.326**	**25,00**		**123.422.209**	**100**		**308.814.797**	**100**	**308.814.797**	**100**	**74,36**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 # 01 2 06 0005	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	307.061.205			12	246.218.376	25,00	3	69.034.771	25,00	3	15.500.000	25,00	3	59.564.236	25,00	3	102.087.369	100	12	246.186.376	12	246.186.376	33,33	80,18	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 # 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	33.240.940			12	20.050.000	25,00	3	-	25,00	3	9.305.000	25,00	3	-	25,00	3	10.392.500	100	12	19.697.500	12	19.697.500	33,33	59,26	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 # 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	75.000.000			12	53.000.000	25,00	3	10.342.340	25,00	3	11.164.151	25,00	3	10.482.090	25,00	3	10.942.340	100	12	42.930.921	12	42.930.921	33,33	57,24	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana	**2 # 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah**	**4,31**	**1.450.000.000**			**4,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 # 01 2 07 0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	425.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2 # 01 2 07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	600.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 # 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	60	500.000.000			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (rehab berat ruang arsip, pembangunan tangga, pembangunan lapangan parkir, pembangunan ruang rapat)	2 # 01 2 07 0010	Sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	350.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat	**2 # 01 2 08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah**	**100**	**9.140.529.000**			**100**	**1.497.132.545**	**25,00**		**297.236.380**	**25,00**		**707.101.047**	**25,00**		**138.028.072**	**25,00**		**298.685.051**	**100**		**1.441.050.550**	**100**	**1.441.050.550**	**100**	**15,77**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 # 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	7.403.559.200			12	1.225.026.022	25,00	3	297.236.380	25,00	3	588.728.400	25,00	3	86.728.810	25,00	3	238.962.200	100	12	1.211.655.790	12	1.211.655.790	33,33	16,37	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 # 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	1.225.246.000			12	176.706.500	25,00	3		25,00	3	59.503.647	25,00	3	33.413.862	25,00	3	43.575.651	100	12	136.493.160	12	136.493.160	33,33	11,14	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 # 01 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	511.723.800			12	95.400.023	25,00	3		25,00	3	58.869.000	25,00	3	17.885.400	25,00	3	16.147.200	100	12	92.901.600	12	92.901.600	33,33	18,15	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	**2 # 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100**	**362.850.000**			**75,00**	**143.476.500**	**18,75**		**19.292.000**	**18,75**		**64.165.800**	**18,75**		**-**	**18,75**		**50.251.900**	**75,00**		**133.709.700**	**75,00**	**133.709.700**	**75,00**	**36,85**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	2 # 01 2 09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	142.850.000			6	120.446.500	33,33	2	19.292.000	33,33	2	56.855.800	0,00	0,00		33,33	2	36.481.900	100	6	112.629.700	6	112.629.700	85,71	78,84	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 # 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	70.000.000			20	23.030.000	15,00	3	-	40,00	8	7.310.000	0,00	0,00		45,00	9	13.770.000	100	20	21.080.000	20	21.080.000	50,00	30,11	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 # 01 2 09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	150.000.000			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**30,04**		**19,70**	**28,98**		**36,16**	**18,33**		**17,75**	**22,65**		**21,53**	**100**		**95,29**			**30,59**	**30,27**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan**	**2 # 02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penerbitan KIA**	**65,00**	**432.100.500**		**-**	**40,00**	**282.251.205**	**10,00**		**17.260.000**	**10,00**		**175.863.727**	**10,00**		**20.330.000**	**10,00**		**50.605.000**	**40,00**		**264.208.727**	**40,00**	**264.208.727**	**40,00**	**61,15**	**DINDUK CAPIL**
				Persentase Penerbitan KK	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase Perekaman KTP-EL	**99,50**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akses Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**2 # 02 2 01**	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Jenis Layanan Pendaftaran Penduduk**	**5**	**363.670.500**			**4**	**251.966.205**	**4**		**17.260.000**	**0,00**		**152.063.727**	**0,00**		**20.330.000**	**0,00**		**50.605.000**	**4**		**240.258.727**	**4**	**240.258.727**	**80,00**	**66,06**	
	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	2 # 02 2 01 0001	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3	5.000.000			1	6.250.389	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	700.000	100	1	5.550.000	100	1,00	6.250.000	1	6.250.000	33,33	125,00	
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran	2 # 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	6	247.980.500			2	136.140.000	0,00	0,00	-	50,00	1	123.764.400	0,00	0,00	-	50,00	1	690.000	100	2	124.454.400	2	124.454.400	33,33	50,19	
	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 # 02 2 01 0004	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6	110.690.000			2	109.575.816	0,00	0,00	17.260.000	50,00	1	28.299.327	0,00	0,00	19.630.000	50,00	1	44.365.000	100	2	109.554.327	2	109.554.327	33,33	98,97	
	Meningkatnya Ketersediaan Sapras Pendaftaran	**2 # 02 2 02**	**Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Sarpras Pendaftaran Penduduk yang terstandarisasi**	**100**	**68.430.000**	**0,00**		**100**	**30.285.000**	**20,00**		**-**	**30,00**		**23.800.000**	**20,00**		**-**	**30,00**		**150.000**	**100**		**23.950.000**	**100**	**23.950.000**	**100**	**35,00**	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai	2 # 02 2 02 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	7500	68.430.000			2500	30.285.000	20,00	500	-	41,24	1031	23.800.000	25,24	631	-	13,52	338	150.000	100	2500	23.950.000	2500	23.950.000	33,33	35,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**5,00**		**6,12**	**35,31**		**62,31**	**6,31**		**7,20**	**53,38**		**17,93**	**100**		**93,61**			**33,33**	**61,15**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**R**	**SR**		**SR**	**R**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**R**	
3	**Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**2 # 03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian**	**100**	**233.435.000**			**100**	**329.510.000**	**0,00**		**26.302.500**	**0,00**		**139.483.302**	**0,00**		**1.625.000**	**0,00**		**148.646.020**	**0,00**		**316.056.822**	**0,00**	**316.056.822**	**0,00**	**#####**	**DINDUK CAPIL**
				Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	**70,00**				**62,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	**99,00**				**95,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Akses Layanan Pencatatan Sipil	**2 # 03 2 01**	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Jenis Layanan Pencatatan Sipil**	**10**	**233.435.000**			**10**	**321.485.000**	**10,00**		**26.302.500**	**0,00**		**139.483.302**	**0,00**		**1.625.000**	**0,00**		**148.646.020**	**10,00**		**316.056.822**	**10,00**	**316.056.822**	**100**	**#####**	
	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	2 # 03 2 01 02	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	10	233.435.000			10	321.485.000	100	10	26.302.500	0,00	0,00	139.483.302	0,00		1.625.000	0,00	0,00	148.646.020	100	10	316.056.822	10	316.056.822	100	135,39	
	Meningkatnya Ketersediaan Sarpras Pencatatan Sipil	**# # 03 2 02**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase Sarpras Pencatatan Sipil yang Terstandarisasi**	**100**	**98.820.000**			**100**	**8.025.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**		**100**	**0,00**	
	Pemangku Kepentingan dan masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	# # 03 2 02 10	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	256	98.820.000			100	8.025.000	25,00	25	-	25,00	25	-	25,00	25		25,00	25		100	100	-	100	-	39,06	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**62,50**		**7,98**	**12,50**		**42,33**	**12,50**		**0,49**	**12,50**		**45,11**	**100**		**95,92**			**69,53**	**#####**	
				Predikat Kinerja							**R**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**S**	**ST**	
4	**Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan**	**2 # 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah Instansi Yang Melakukan PKS Pemanfaatan Data**	**20**	**178.647.965**	**0,00**	-	**8**	**77.350.000**	**2,00**		**17.440.000**	**2,00**		**31.700.820**	**0,00**		**8.520.000**	**0,00**		**19.281.198**	**4,00**		**76.942.018**	**4**	**76.942.018**	**20,00**	**43,07**	**DINDUK CAPIL**
	Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Dengan Instansi	**2 # 04 2 03**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Instansi Yang Melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)**	**20**	**125.847.965**	**0,00**	-	**8**	**77.350.000**	**2,00**		**17.440.000**	**2,00**		**31.700.820**	**2,00**		**8.520.000**	**2,00**		**19.281.198**	**8,00**		**76.942.018**	**8**	**76.942.018**	**40,00**	**61,14**	
	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi	2 # 04 2 03 0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36	73.805.475	0,00	-	12	63.200.000	25,00	3	11.775.000	25,00	3	26.801.204	25,00	3	6.060.000	25,00	3	18.311.198	100	12	62.947.402	12	62.947.402	33,33	85,29	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 # 04 2 03 0004	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12	37.042.490	0,00		4	14.150.000	25,00	1	5.665.000	25,00	1	4.899.616	25,00	1	2.460.000	25,00	1	970.000	100	4	13.994.616	4	13.994.616	33,33	37,78	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung	2 # 04 2 03 0008	Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	3	15.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**2 # 04 2 04**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terealisasi**	**100**	**52.800.000**	**0,00**	**-**	**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	2 # 04 2 04 0003	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	36	52.800.000			12	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**22,55**	**25,00**		**40,98**	**25,00**		**11,01**	**25,00**		**24,93**	**100**		**99,47**			**25,00**	**43,07**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					**6.008.696.140**			**1.109.086.971**			**2.270.707.520**			**974.741.952**			**1.363.856.297**			**5.726.091.488**		**5.726.091.488**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (%)							**30,64**		**18,46**	**25,45**		**37,79**	**15,54**		**16,22**	**28,38**		**22,70**	**100**		**95,30**			**39,61**	**32,56**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (%)							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
		2 #	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**20.537.211.129**				**8.334.542.346**			**1.469.388.561**			**2.695.837.076**			**1.663.064.817**			**2.014.064.693**			**7.842.355.147**		**7.842.355.147**		**38,19**	
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat**	**2 # 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)**	**24,00**	**15.313.048.092**			**24,00**	**4.405.114.977**	**0,00**		**667.005.335**	**19,35**		**1.635.779.107**	**0,00**		**910.151.249**	**0,00**		**949.596.286**	**19,35**		**4.162.531.977**	**19,35**	**4.162.531.977**	**80,63**	**27,18**	**DINPEMDES**
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	**12,00**				**12,00**		**0,00**			**8,04**			**0,00**			**0,00**			**8,04**			**8,04**		**67,00**		
				Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
				Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup	**64,76**				**64,76**		**0,00**			**64,35**			**0,00**			**0,00**			**64,35**			**64,35**		**99,37**		
				Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	**1,95**				**1,95**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	**70,00**				**70,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		2 # 01 2 01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai**	**100**	**261.886.200**			**100**	**78.263.747**	**16,67**		**4.579.878**	**50,00**		**29.005.622**	**33,33**		**19.526.345**	**0,00**		**24.217.400**	**100**		**77.329.245**	**100**	**77.329.245**	**100**	**29,53**	
				Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)	**100**				**100**		**0,00**			**40,00**			**60,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
		2 # 01 2 01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	7	48.667.500			6	45.688.208	16,67	1	4.579.878	50,00	3	13.653.122	33,33	2	19.526.345	0,00	0,00	7.727.400	100	6	45.486.745	6	45.486.745	86	93,46	
		2 # 01 2 01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	5	55.176.105			5	5.000.000	0,00	0,00	-	40,00	2	2.342.500	60,00	3	-	0,00	0,00	2.645.000	100	5	4.987.500	5	4.987.500	100	9,04	
		2 # 01 2 01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	2	19.510.170			2	5.000.000	0,00	0,00	-	50,00	1	1.640.000	50,00	1	-	0,00	0,00	3.285.000	100	2	4.925.000	2	4.925.000	100	25,24	
		2 # 01 2 01 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	2	20.195.340			2	5.000.000	50,00	1		50,00	1	4.697.500	0,00	0,00	-	0,00	0,00	300.000	100	2	4.997.500	2	4.997.500	100	24,75	
		2 # 01 2 01 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	2	19.781.535			2	5.000.000	0,00	0	-	100	2	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	4.585.000	100	2	4.585.000	2	4.585.000	100	23,18	
		2 # 01 2 01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan kinerja yang disusun (laporan)	4	50.815.050			4	7.575.539	0,00	0	-	75,00	3	2.050.000	25,00	1	-	0,00	0,00	5.375.000	100	4	7.425.000	4	7.425.000	100	14,61	
		2 # 01 2 01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	20	47.740.500			8	5.000.000	0,00	0	-	75,00	6	4.622.500	25,00	2	-	0,00	0,00	300.000	100	8	4.922.500	8	4.922.500	40	10,31	
		2 # 01 2 02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai**	**100**	**11.365.005.720**			**100**	**3.233.163.518**	**25,00**		**426.444.895**	**25,00**		**1.308.919.176**	**25,00**		**648.895.546**	**25,00**		**636.974.048**	**100**		**3.021.233.665**	**100**	**3.021.233.665**	**100**	**26,58**	
				Persentase penatausahaan keuangan sesuai	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 # 01 2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji an Tunjangan ASN yang tertangani (bulan)	42	11.365.005.720			14	3.165.619.202	21,43	3	402.170.139	35,71	5	1.304.527.932	21,43	3	626.614.446	21,43	3	621.134.248	100	14	2.954.446.765	14	2.954.446.765	33,33	26,00	
				Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	21				7		100	7		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		100	7	-	7	-	33,33		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	42				42		25,00	42		25,00	42		25,00	42		25,00	42		100	42	-	42	-	100		
		2 # 01 2 02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	154.633.248			12	51.544.416	25,00	3	24.274.756	25,00	3	181.244	25,00	3	13.998.600	25,00	3	12.889.800	100	12	51.344.400	12	51.344.400	100,00		
		2 # 01 2 02 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	2	15.000.000			2	5.000.000	0,00	0	-	50,00	1	4.210.000	0,00	0	-	50,00	1	450.000	100	2	4.660.000	2	4.660.000	100		
		2 # 01 2 02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD (laporan)	40	32.999.700			40	10.999.900	25,00	10		25,00	10	-	25,00	10	8.282.500	25,00	10	2.500.000	100	40	10.782.500	40	10.782.500	100,00		
		2 # 01 2 05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (%)**	**56,25**	**448.344.372**			**56,25**	**74.816.624**	**0,00**		**13.739.634**	**0,00**		**27.324.366**	**0,00**		**17.585.400**	**0,00**		**15.847.200**	**0,00**		**74.496.600**	**0,00**	**74.496.600**	**0,00**	**16,62**	
				Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu (%)	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**		**-**	**25,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
		2 # 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia (stel)	219	111.394.500			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Jumlah pakaian olah raga yang tersedia (stel)	48				0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Jumlah pakaian pawai adat yang tersedia (stel)	171				0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Jumlah paket pakaian dinas beserta stribut kelengkapan (paket)	1				1		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		
		2 # 01 2 05 03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Adminisrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	11	224.449.872			11	74.816.624	27,27	3	13.739.634	36,36	4	27.324.366	27,27	3	17.585.400	9,09	1	15.847.200	100	11	74.496.600	11	74.496.600	100,00	33,19	
		2 # 01 2 05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	30,00	112.500.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 01 2 06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**100**	**998.061.900**			**100**	**254.222.832**	**25,00**		**91.905.412**	**25,00**		**41.709.483**	**25,00**		**52.423.210**	**25,00**		**60.216.560**	**100**		**246.254.665**	**100**	**246.254.665**	**100**	**24,67**	
		2 # 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani (bulan)	36	998.061.900			12	155.684.000	25,00	3	73.585.900	25,00	3	11.116.995	25,00	3	28.976.010	25,00	3	34.829.460	100	12	148.508.365	12	148.508.365	33,33	14,88	
				Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani (bulan)	36				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12				12		25,00	3		25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	100,00		
		2 # 01 2 06 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	12	224.449.872			12	74.816.624	25,00	3	13.739.634	25,00	3	22.944.366	25,00	3	17.585.400	25,00	3	19.854.700	100	12	74.124.100	12	74.124.100	100,00	33,02	
		2 # 01 2 06 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukunan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	12	71.166.624			12	23.722.208	25,00	3	4.579.878	25,00	3	7.648.122	25,00	3	5.861.800	25,00	3	5.532.400	100	12	23.622.200	12	23.622.200	100,00	33,19	
		2 # 01 2 07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**80,00**	**180.000.000**			**80,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 # 01 2 07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	3	165.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		
				Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)					0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		
		2 # 01 2 07 08	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan (paket)	3	15.000.000			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 01 2 07 10	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang diadakan (unit)	1	-			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 01 2 07 12	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atas bangunan lainnya	Jumlah Bangunan gedung Kantor yang diadakan (unit)	1	-			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 01 2 08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)**	**100**	**1.553.895.000**			**100**	**590.361.340**	**25,00**		**103.325.760**	**25,00**		**182.907.016**	**25,00**		**145.229.348**	**25,00**		**143.405.078**	**100**		**574.867.202**	**100**	**574.867.202**	**100**	**37,00**	
				Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	**9**				**3**		**3**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**3**			**3**		**33,33**		
		2 # 01 2 08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (dokumen)	36	1.058.400.000			12	426.127.376	25,00	3	74.353.048	25,00	3	134.285.452	25,00	3	106.875.600	25,00	3	104.490.200	100	12	420.004.300	12	420.004.300	33,33	39,68	
		2 # 01 2 08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet, air dan listrik yang	36	339.570.000			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Jumlah layanan updating website yang tertangani (bulan)	36				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0		0,00		
				Jumlah layanan pengaduan masyarakat yang tertangani (bulan)	36				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0		0,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	12				12	83.992.800	25,00	3	13.233.078	25,00	3	21.627.198	25,00	3	19.018.348	25,00	3	21.577.678	100	12	75.456.302	12	75.456.302	100,00		
		2 # 01 2 08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	155.925.000			12	80.241.164	25,00	3	15.739.634	25,00	3	26.994.366	25,00	3	19.335.400	25,00	3	17.337.200	100	12	79.406.600	12	79.406.600	33,33	50,93	
		2 # 01 2 09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**70,00**	**505.854.900**			**65,00**	**174.286.916,00**	**25,00**		**27.009.756**	**25,00**		**45.913.444**	**25,00**		**26.491.400**	**25,00**		**68.936.000**	**100**		**168.350.600**	**100**	**168.350.600**	#####	**33,28**	
		2 # 01 2 09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	9	325.854.900			8	167.506.916	25,00	2	27.009.756	37,50	3	45.913.444	25,00	2	26.491.400	12,50	1	62.156.000	100	8	161.570.600	8	161.570.600	88,89	49,58	
		2 # 01 2 09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (paket)	3	90.000.000			1	6.780.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	100	1	6.780.000	100	1	6.780.000	1	6.780.000	33,33	7,53	
		2 # 01 2 09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	3	90.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**21,32**		**15,14**	**36,94**		**37,13**	**22,48**		**20,66**	**19,26**		**21,56**	**100**		**94,49**			**18,03**	**27,18**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah**	**2 # 02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi yang baik (%)**	**100**	**725.315.877**			**100**	**87.320.330**	**25,00**		**820.000**	**25,00**		**14.660.805**	**25,00**		**1.920.000**	**25,00**		**61.758.904**	**100**		**79.159.709**	**100**	**79.159.709**	**100**	**10,91**	**DINPEMDES**
		2 # 02 2 01	**Kegiatan Penyelenggaraan**	**Persentase Desa yang tertata dengan Baik**	**100**	**725.315.877**			**100**	**87.320.330**	**25,00**		**820.000**	**25,00**		**14.660.805**	**25,00**		**1.920.000**	**25,00**		**61.758.904**	**100**		**79.159.709**	**100**	**79.159.709**	**100**	**10,91**	
		2 # 02 2 01 01	Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan,	Jumlah Desa yang batasnya ditetapkan (desa)	10	583.167.744			1	79.320.330	0,00	0,00	820.000	0,00	0,00	9.456.905	100	1	1.920.000	0,00	0,00	59.148.904	100	1	71.345.809	1	71.345.809	10,00	12,23	
				Jumlah Desa/Lingkungan yang	4				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Jumlah Desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa (desa)	4				4		25,00	1		25,00	1		25,00	1		25,00	1		100	4	-	4	-	100,00		
		2 # 02 2 01 02	Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang tertata Wilayahnya (desa)	6	142.148.133			1	8.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	5.203.900	100	1	-	0,00	0,00	2.610.000	100	1	7.813.900	1	7.813.900	16,67	5,50	
				Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan Wilayahnya (desa)	2				2		0,00	0,00		50,00	1		50,00	1		0,00	0,00		100	2	-	2,00	-	100,00		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**12,50**		**0,94**	**37,50**		**16,79**	**37,50**		**2,20**	**12,50**		**70,73**	**100**		**90,65**			#####	**8,87**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**S**	**ST**		**ST**			**ST**	**SR**	
3	**Meningkatnya Kinerja Pemerintahanan Desa**	**2 # 04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara**	**100**	**4.498.847.160**			**100**	**1.499.615.720**	**25,00**		**319.683.640**	**25,00**		**434.113.650**	**25,00**		**340.754.980**	**25,00**		**359.011.220**	**100**		**1.453.563.490**	**100**	**1.453.563.490**	**100**	**32,31**	**DINPEMDES**
		2 # 04 2 01	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi**	**Persentase Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel (%)**	**100**	**4.498.847.160**			**100**	**1.499.615.720**	**25,00**		**319.683.640**	**25,00**		**434.113.650**	**25,00**		**340.754.980**	**25,00**		**359.011.220**	**100**		**1.453.563.490**	**100**	**1.453.563.490**	**100**	**32,31**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase BUMDesa yang aktif (%)	75,00				75,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Jumlah unit Usaha Bersama yang dibentuk (unit)	8				8		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Persentase peserta bimbingan dan Pelatihan Aparatur desa yang bernilai	80,00				80,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Persentase Desa/ Kelurahan yang telah mengentry profil secara lengkap an up to date (%)	100				100		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Persentase Desa yang Melaksanakan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Sesuai Ketentuan (%)	100				100		0,00			50,00			0,00			50,00			100			100		100		
				Persentase Tingkat Partipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa dan BPD	78,00				78,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
		2 # 04 2 01 01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	62	39.000.000			62	13.000.000	16,13	10	-	48,39	30	800.000	16,13	10	2.030.000	19,35	12	7.286.780	100	62	10.116.780	62	10.116.780	100,00	25,94	
		2 # 04 2 01 02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	62	9.000.000			62	3.000.000	0,00	0,00		80,65	50	2.305.000	16,13	10	-	3,23	2	300.000	100	62	2.605.000	62	2.605.000	100,00	28,94	
		2 # 04 2 01 03	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	62	24.000.000			62	8.000.000	0,00	0,00		64,52	40	1.620.000	16,13	10	5.140.000	19,35	12	1.240.000	100	62	8.000.000	62	8.000.000	100,00	33,33	
		2 # 04 2 01 04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (dokumen)	6	4.049.065.200			2	1.349.688.400	50,00	1	315.623.640	50,00	1	349.458.650	0,00	0,00	323.957.600	0,00	0,00	323.977.700	100	2	1.313.017.590	2	1.313.017.590	33,33	32,43	
		2 # 04 2 01 05	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	62	9.000.000			62	3.000.000	0,00	0,00	-	50,00	31	1.580.000	16,13	10	-	33,87	21	1.120.000	100	62	2.700.000	62	2.700.000	100,00	0,00	
		2 # 04 2 01 06	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	62	75.838.380			62	25.279.460	0,00	0,00		100,00	62	21.835.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2.368.200	100	62	24.203.200	62	24.203.200	100,00	31,91	
		2 # 04 2 01 07	Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan	62	15.000.000			62	5.000.000	0,00	0,00		48,39	30	410.000	32,26	20	160.000	19,35	12	1.940.000	100	62	2.510.000	62	2.510.000	100,00	16,73	
		2 # 04 2 01 08	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	62	9.000.000			62	3.000.000	0,00	0,00		48,39	30	1.230.000	32,26	20	-	19,35	12	1.430.000	100	62	2.660.000	62	2.660.000	100,00	29,56	
		2 # 04 2 01 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala	62	-			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 # 04 2 01 11	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil desa (dokumen)	81	25.943.580			81	8.647.860	24,69	20	-	37,04	30	4.430.000	37,04	30	-	1,23	1	3.164.600	100	81	7.594.600	81	7.594.600	100,00	29,27	
		2 # 04 2 01 13	Sub Kegiatan Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (dokumen)	62	33.000.000			31	11.000.000	32,26	10	-	32,26	10	6.440.000	16,13	5	2.240.000	19,35	6	2.220.000	100	31	10.900.000	31	10.900.000	50,00	33,03	
		2 # 04 2 01 14	Sub Kegiatan Pembinaan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas (orang)	186	45.000.000			62	15.000.000	16,13	10	820.000	48,39	30	2.125.000	32,26	20	5.997.380	3,23	2	5.454.080	100	62	14.396.460	62	14.396.460	33,33	31,99	
		2 # 04 2 01 18	Sub Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	24	165.000.000			8	55.000.000	25,00	2	3.240.000	37,50	3	41.880.000	25,00	2	1.230.000	12,50	1	8.509.860	100	8	54.859.860	8	54.859.860	33,33	33,25	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							13,68		21,32	53,79		28,95	19,85		22,72	14,31		23,94	100		96,93			79,17	32,31	
				Predikat Kinerja							SR		SR	R		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			T	SR	
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahanan Desa	2 # 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	100	4.769.497.440			100	2.342.491.319	0,00		481.879.586	0,00		611.283.514	0,00		410.238.588	0,00		643.698.283	0,00		2.147.099.971	0,00	2.147.099.971	0,00	45,02	DINPEMDES
		2 # 05 2 01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Persentase Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh Masyarakat	70,00	4.769.497.440			70,00	2.342.491.319	0,00		481.879.586	0,00		611.283.514	0,00		410.238.588	0,00		643.698.283	0,00		2.147.099.971	0,00	2.147.099.971	0,00	45,02	
				Persentase Sarjana Membangun Desa yang aktif	100				100		100			0,00			0,00			0,00			100			100		100		
				Persentase Kelembagaan	100				100		24,19			48,39			0,00			0,00			72,58			100		100		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKK Desa/Kelurahan yang aktif	100				100		100			0,00			0,00			0,00			100			100		100		
				Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan BBGRM	100				100		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			100		100		
		2 # 05 2 01 02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan, Pendayagunaan Kelembagaan, Lembaga Kemasyarkatan Desa/Kelurahan (RT/RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,POSYANDU ,LPM, dan Karang	62	9.000.000			62	3.000.000	24,19	15	-	48,39	30	-	24,19	15	-	3,23	2	2.610.000	100	62	2.610.000	62	2.610.000	100,00	29,00	
		2 # 05 2 01 03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan	1	4.715.497.440			1	1.571.832.480	0,00	0	329.012.436	0,00	0,00	496.747.564	100	1	396.708.000	0,00	0,00	338.912.800	100	1	1.561.380.800	1	1.561.380.800	100,00	33,11	
		2 # 05 2 01 06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tetap Guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi	9	45.000.000			3	15.000.000	33,33	1	-	33,33	1	2.460.000	33,33	1	-	0,00	0,00	12.458.160	100	3	14.918.160	3,00	14.918.160	33,33	33,15	
		2 # 05 2 01 07	Sub Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah BBGRM	1	-			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 05 2 01 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan	62	9.000.000			62	3.000.000	24,19	15	-	48,39	30		0,00	0,00	-	27,42	17	2.802.500	100	62	2.802.500	62,00	2.802.500	100,00	31,14	
		2 # 05 2 01 09	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	81	2.240.012.517			81	746.670.839	24,69	20	152.867.150	37,04	30	112.075.950	18,52	15	13.530.588	19,75	16	284.099.323	100	81	562.573.011	81,00	562.573.011	100,00	25,11	
		2 # 05 2 01 11	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	62	8.964.000			62	2.988.000	24,19	15	-	48,39	30		16,13	10	-	11,29	7	2.815.500	100	62	2.815.500	62,00	2.815.500	100,00	31,41	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							21,77		20,57	35,92		26,10	38,43		17,51	6,85		27,48	100		91,66			88,89	45,02	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			T	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.334.542.346			1.469.388.561			2.695.837.076			1.663.064.817			2.014.064.693			7.842.355.147		7.842.355.147			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (%)							17,32		17,63	41,04		32,35	29,57		19,95	13,23		24,17	100		94,09			71,52	38,19	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			S	SR	
		2 #	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.229.896.972				4.470.990.000			31.092.150			705.391.391			2.123.061.010			212.155.760			4.213.748.721		4.213.748.721		58,28	
1	Meningkatnya Penggunaan Alat Kontraasepsi	2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	cakupan penggunaan alat kontrasepsi MKJP	15,15	1.132.250.164			14,45	2.531.140.000	0,00		28.800.000	0,00		210.580.000	0,00		1.315.150.940	0,00		142.560.000,00	0,00		2.302.503.750	0,00	2.302.503.750	0,00	#####	DP2KBP3A
				Cakupan Peserta KB Aktif	75,10				75,92		0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	-	0,00		
		2 14 03 2 01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan	Presentase Penguatan KIE Bangga Kencana	100	278.339.526			100	1.654.920.000	25,00		28.800.000	25,00		108.190.000	25,00		861.749.000	25,00		142.560.000	100		1.468.678.500	100,00	1.468.678.500	#####	#####	
		2 14 03 2 01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders	32	39.535.359			20	200.000.000	0,00	0,00		25,00	5	9.120.000	40,00	8	44.800.000	35,00	7	142.560.000	100	20	196.480.000	20	196.480.000	62,50	496,97	
		2 14 03 2 01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	4	42.454.075			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 14 03 2 01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6	26.533.796			6	110.000.000	33,33	2		0,00	0,00		33,33	2		33,33	2		100	6	-	6	-	100	0,00	
		2 14 03 2 01 06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	12	53.067.593			12	120.120.000	25,00	3		25,00	3	35.858.000	25,00	3	36.214.000	25,00	3	48.048.000	100	12	120.120.000	12	120.120.000	100	226,35	
		2 14 03 2 01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	12	84.908.148			12	396.800.000	25,00	3	28.800.000	25,00	3	63.212.000	25,00	3	156.460.000	25,00	3	144.779.000	100	12	393.251.000	12	393.251.000	100	463,15	
		2 14 03 2 01 08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	16	31.840.555			2	828.000.000	0,00	0,00		0,00	0,00		50,00	1	624.275.000	50,00	1	134.552.500	100	2	758.827.500	2	758.827.500	12,50	#####	
		2 14 03 2 02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Presentase Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat**	**20**	**233.497.409**			**100**	**243.000.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**20.400.000**	**0,00**		**107.100.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**243.000.000**	**0,00**	**243.000.000**	**0,00**	#####	
		2 14 03 2 02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan Program bangga kencana (Pembangunan keluarga,kependudukan, dan keluarga berencana) di lini	20	47.760.834			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 03 2 02 03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan,penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program Bangga Kencana (pembangunan	8	132.668.982			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 03 2 02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	413	53.067.593			413	243.000.000	0,00	0,00		12,11	50	20.400.000	56,90	235	107.100.000	30,99	128	115.500.000	100	413	243.000.000	413	243.000.000	100,00	457,91	
		2 14 03 2 03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan**	**Persentase Faskes Teregister Pendistribusian Alokon**	**100**	**434.676.654**			**100**	**412.570.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**81.990.000**	**0,00**		**213.114.940**	**0,00**		**68.254.310**	**0,00**		**373.946.250**	**0,00**	**373.946.250**	**0,00**	**86,03**	
		2 14 03 2 03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	51	30.248.528			17	17.100.000	0,00	0,00		35,29	6	2.850.000	29,41	5	5.700.000	35,29	6	8.550.000	100	17	17.100.000	17	17.100.000	33,33	56,53	
		2 14 03 2 03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	572	106.135.186			546	378.020.000	0,00	0,00		18,68	102	78.930.000	39,93	218	200.864.940	41,39	226	59.704.310	100	546	339.499.250	546	339.499.250	95,45	319,87	
		2 14 03 2 03 06	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan	1	5.572.097			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 03 2 03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	8	106.135.188			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 03 2 03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	9	27.860.486			9	17.450.000	22,22	2		11,11	1	210.000	22,22	2	6.550.000	44,44	4	10.587.000	100	9	17.347.000	9	17.347.000	100,00	62,26	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 14 03 2 03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan	13	23.402.808			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 03 2 03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1	79.601.389			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 03 2 03 13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	15	55.720.972			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 03 2 04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi**	**presentase kampung KB yang meningkat**	**20,00**	**185.736.575**			**10,00**	**220.650.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**133.187.000**	**0,00**		**83.692.000**	**0,00**		**216.879.000**	**0,00**	**216.879.000**	**0,00**	#####	
			Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-	**Jumlah kampung kb yang terbentuk**	**25**				**23**		**0,00**			**0,00**			**23**			**0,00**		**83.692.000**	**23**			**0,00**		**0,00**		
		2 14 03 2 04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	53.067.593			1	3.750.000	0,00	0,00		0,00	0,00		100	1	3.730.000	0,00	0,00	-	100	1	3.730.000	1	3.730.000	100	7,03	
		2 14 03 2 03 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	17	79.601.389			17	216.900.000	0,00	0,00		0,00	0,00		71	12	129.457.000	29,41	5	83.692.000	100	17	213.149.000	17	213.149.000	100	267,77	
		2 14 03 2 03 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1	53.067.593			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**9,60**		**1,14**	**13,84**		**8,32**	**44,76**		**51,96**	**31,81**		**5,63**	**100**		**90,97**			**45,19**	#####	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**R**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**ST**	
2	**Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk**	**2 14 02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**ketersediaan kebijakan pengendalilan pendudukan yang disediakan sesuai dengan ketentuan**	**3**	**795.019.295**		**-**	**1**	**167.400.000**	**0,00**		**2.292.150**	**0,00**		**37.901.391**	**0,00**		**41.479.670**	**0,00**		**69.595.760**	**0,00**		**151.268.971**	**0,00**	**151.268.971**	**0,00**	**19,03**	**DP2KBP3A**
		2 14 02 2 01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan**	**14**	**105.723.912**			**2**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 14 02 2 01 05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan	15	53.067.593			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 02 2 01 13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku	15	52.656.319			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 02 2 02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase keluarga yang didata**	**100**	**689.295.383**			**100**	**167.400.000**	**25,00**		**2.292.150**	**25,00**		**37.901.391**	**25,00**		**41.479.670**	**25,00**		**69.595.760**	**100**		**151.268.971**	**100**	**151.268.971**	**100**	**21,95**	
				Persentase Data Keluarga Yg Uptodate dalam Aplikasi SIGA	**100**						**25,00**			**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**		
		2 14 02 2 02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	25.651.966			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 02 2 02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	10	23.402.808			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 02 2 02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga	1	28.331.461			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 02 2 01 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data	10	530.675.930			10	71.400.000	20,00	2		30,00	3	7.600.000	20,00	2	27.100.000	30,00	3	36.700.000	100	10	71.400.000	10	71.400.000	100,00	13,45	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 14 02 2 01 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3	63.681.112			3	96.000.000	33,33	1	2.292.150	33,33	1	30.301.391	0,00	0,00	14.379.670	33,33	1	32.895.760	100	3	79.868.971	3	79.868.971	100,00	125,42	
		2 14 02 2 01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan	2	17.552.106			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**26,67**		**0,00**	**31,67**		**22,64**	**10,00**		**24,78**	**31,67**		**41,57**	**100**		**90,36**			**25,00**	**19,03**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahterah (KS) di seluruh tingkat**	**2 # 04**	**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter**	**164**	**5.302.627.513**			**123**	**1.772.450.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**456.910.000**	**0,00**		**766.430.400**	**0,00**		**-**	**0,00**		**1.759.976.000**	**0,00**	**1.759.976.000**	**0,00**	**33,19**	**DP2KBP3A**
				Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	**60**				**56**		**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		
				Jumlah Kelompok BKL yang Melaksanakan 7 (tujuh) dimensi Lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia	**30**				**26**		**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		**282.714.800**	**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				presentase balai penyuluh KB yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	**100**				**100**		**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		**253.770.800**	**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		2 14 4 2 01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase kelompok kegiatan yang dibina untuk meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan**	**54,32**	**915.745.263**			**34,57**	**329.750.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**325.890.400**	**0,00**		**-**	**0,00**		**326.040.400**	**0,00**	**326.040.400**	**0,00**	**35,60**	
		2 14 4 2 01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan	12	68.987.872			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 4 2 01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13	95.521.667			13	300.000.000	0,00	0,00		0,00	0,00		100	13	296.465.400	0,00	0,00		100	13	296.465.400	13	296.465.400	100,00	310,36	
		2 14 4 2 01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	1	46.805.617			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 4 2 01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	60	35.778.436			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 4 2 01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	687	424.540.744			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 4 2 01 06	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /	187	31.840.555			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 14 4 2 01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	1	53.067.593			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 4 2 01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan	1	159.202.779			1	29.750.000	0,00	0,00		0,00	0,00		100	1	29.425.000	0,00	0,00	150.000	100	1	29.575.000	1	29.575.000	100,00	18,58	
		2 14 4 2 02	**Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan**	**Persentase lemabaga dan organisasi kemasyarakatan yang ikut serta dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**100**	**4.386.882.250**			**100**	**1.442.700.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**456.910.000**	**25,00**		**440.540.000**	**25,00**		**-**	**100**		**1.433.935.600**	**100**	**1.433.935.600**	**100**	**32,69**	
		2 14 4 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	10	58.782.250			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 14 4 2 02 0004	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,	36	2.061.000.000			12	687.000.000	25,00	3		25,00	3	205.380.000	25,00	3	193.700.000	25,00	3	282.714.800	100	12	681.794.800	12	681.794.800	33,33	33,08	
		2 14 4 2 02 0005	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,Pascasalin/ kelahiran,Baduta/Balita	36	2.267.100.000			12	755.700.000	25,00	3		25,00	3	251.530.000	25,00	3	246.840.000	25,00	3	253.770.800	100	12	752.140.800	12	752.140.800	33,33	33,18	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**12,50**		**0,00**	**12,50**		**25,78**	**62,50**		**43,24**	**12,50**		**0,00**	**100**		**99,30**			**24,24**	**19,03**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**R**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**4.470.990.000**						**31.092.150**			**705.391.391**			**2.123.061.010**			**212.155.760**			**4.213.748.721**		**4.213.748.721**			
			Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)								**16,25**		**0,70**	**19,33**		**15,78**	**39,09**		**47,49**	**25,32**		**4,75**	**100**		**94,25**			**31,48**	**80,47**	
			Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**T**	
		2 #	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN**			**24.007.108.339**				**10.387.287.618**		**2.083.978.268**			**3.017.918.224**			**2.491.023.515**			**2.531.233.125**			**10.124.153.132**		**10.124.153.132**		**42,17**	
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat**	**2 # 0 1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah**	**26,00**	**7.938.738.809**			**26,00**	**5.075.736.443**	**0,00**		**978.028.987**	**24,94**		**1.888.056.447**	**0,00**		**1.122.987.714**	**0,00**		**888.384.054**	**24,94**		**4.877.457.202**	**24,94**	**4.877.457.202**	**95,92**	**61,44**	
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	**16,00**				**16,00**		**0,00**			**9,80**			**0,00**			**0,00**			**9,80**			**9,80**		**61,25**		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**68,00**				**68,00**		**0,00**			**54,22**			**0,00**			**0,00**			**54,22**			**54,22**		**79,74**		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**3,00**				**3,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**1,00**				**1,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	**2 # 0 1 2 0 1**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)**	**100**	**128.000.000**			**100**	**124.480.000**	**50,00**		**18.440.000**	**33,33**		**16.310.000**	**16,67**		**34.755.862**	**0,00**		**45.600.000**	**100**		**115.105.862**	**100**	**115.105.862,00**	**100**	**89,93**	
				Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)	**100**				**100**		**50,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 15 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	18	78.000.000,00			6	74.480.000	50,00	3	10.080.000	33,33	2	11.270.000	16,67	1	21.405.862	0,00		24.990.000	100	6	67.745.862	6	**67.745.862**	33,33	86,85	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2 15 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja yang disusun (dokumen)	12	50.000.000,00			4	50.000.000	50,00	2	8.360.000	25,00	1	5.040.000	25,00	1	13.350.000	0,00		20.610.000	100	4	47.360.000	4	47.360.000	33,33	94,72	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat	**2 15 01 2 02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar**	**100**	**3.907.935.823**			**100**	**3.702.894.000**	**25,00**		**735.377.225**	**25,00**		**1.443.825.099**	**25,00**		**826.701.778**	**25,00**		**606.546.005**	**100**		**3.612.450.107**	**100**	**3.612.450.107**	**100**	**92,44**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2 15 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	3.852.935.823			12	3.647.894.000	25,00	3	727.017.225	25,00	3	1.438.785.099	25,00	3	805.500.616	25,00	3	588.846.005	100	12	3.560.148.945	12	3.560.148.945	33,33	92,40	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 15 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	20.000.000			2	20.000.000	0,00	0	-	50,00	1		0,00	0	17.281.162	50,00	1	450.000	100	2	17.731.162	2	17.731.162	33,33	88,66	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	2 15 01 2 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	126	35.000.000			42	35.000.000	23,81	10	8.360.000	26,19	11	5.040.000	23,81	10	3.920.000	26,19	11	17.250.000	100	42	34.570.000	42	34.570.000	33,33	98,77	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan	**2 15 01 2 05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**100**	**103.750.000,00**			**100**	**10.000.000**	**25,00**		**3.840.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**300.000**	**25,00**		**5.130.000**	**100**		**9.270.000**	**100,00**	**9.270.000**	#####	**8,93**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100,00**		#####		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**50,00**				**12,50**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 15 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	9.750.000,00			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 15 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33	10.000.000			11	10.000.000	45,45	5	3.840.000	45,45	5	-	9,09	1	300.000	0,00	0,00	5.130.000	100	11	9.270.000	11	9.270.000	33,33	92,70	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 15 01 2 05 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	84.000.000			5	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	**2 15 01 2 06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**100**	**420.570.000**			**100**	**116.607.858**	**25,00**		**34.898.402**	**25,00**		**19.910.000**	**25,00**		**20.657.935**	**25,00**		**3.492.000**	**100**		**78.958.337**	**100**	**78.958.337**	**100**	**18,77**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 15 01 2 06 0005	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	360.570.000			12	106.607.858	25,00	3	29.568.402	25,00	3	17.450.000	25,00	3	19.557.935	25,00	3	3.042.000	100	12	69.618.337	12	69.618.337	33	19,31	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 15 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	30.000.000			12	10.000.000	25,00	3	5.330.000	25,00	3	2.460.000	25,00	3	1.100.000	25,00	3	450.000	100	12	9.340.000	12	9.340.000	33,33	31,13	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	2 15 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	30.000.000			12	-	25,00	3	-	25,00	3		25,00	3	-	25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana	**2 15 01 2 07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**75,00**	**2.233.053.500**		**-**	**65,00**	**8.053.500**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**8.053.500**	**0,00**		**8.053.500**	**70,00**	**8.053.500**	**70,00**	**0,36**	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 15 01 2 07 0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	800.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 15 01 2 07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	900.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Mebel	2 15 01 2 07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	25.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 15 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	######### #####			1	8.053.500	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		100	1	8.053.500	100	1,00	8.053.500	1	8.053.500	33,33	100,00	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan	2 15 01 2 07 0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	########## ###			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat	**2 15 01 2 08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)**	**100**	**932.189.686,00**			**100**	**967.411.085**	**25,00**		**174.473.360**	**25,00**		**376.007.694**	**25,00**		**232.618.220**	**25,00**		**160.063.602**	**100**		**943.162.876**	**100**	**943.162.876**	**100**	#####	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 15 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	760.809.338,00			12	796.501.596	25,00	3	147.318.400	25,00	3	327.303.300	25,00	3	172.914.095	25,00	3	127.933.953	100	12	775.469.748	12	775.469.748	33,33	101,93	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 15 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	90.362.865,00			12	92.362.865	25,00	3	11.981.960	25,00	3	16.106.594	25,00	3	43.293.725	25,00	3	18.344.249	100	12	89.726.528	12	89.726.528	33,33	99,30	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 15 01 2 08 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	36	81.017.483,00			12	78.546.624	25,00	3	15.173.000	25,00	3	32.597.800	25,00	3	16.410.400,00	25,00	3	13.785.400	100	12	77.966.600	12	77.966.600	33,33	96,23	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	**2 15 01 2 09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**95,00**	**213.239.800**			**75,00**	**146.290.000**	**25,00**		**11.000.000**	**25,00**		**32.003.654**	**25,00**		**7.953.919**	**25,00**		**59.498.947**	**100**		**110.456.520**	**100**	**110.456.520**	**105**	**51,80**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	2 15 01 2 09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45,00	157.639.800			15	135.690.000	26,67	4	11.000.000	26,67	4	32.003.654	26,67	4	6.893.919	20,00	3	59.048.947	100	15	108.946.520	15	108.946.520	33,33	69,11	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 15 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	10.600.000			15	10.600.000	33,33	5		33,33	5	-	20,00	3	1.060.000	13,33	2	450.000	100	15	1.510.000	15	1.510.000	33,33	14,25	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 15 01 2 09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	45.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**26,95**		**19,27**	**27,67**		**37,20**	**19,75**		**22,12**	**25,63**		**17,50**	**100**		**96,09**			**22,73**	**61,44**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**R**	
2	**Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Layanan Transportasi**	**2 15 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Pesentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum**	**62,00**	**16.068.369.530**		**-**	**60,00**	**5.311.551.175**	**0,00**		**1.105.949.281**	**0,00**		**1.129.861.777**	**0,00**		**1.368.035.801**	**0,00**		**1.642.849.071**	**0,00**		**5.246.695.930**	**0,00**	**5.246.695.930**	**0,00**	**32,65**	
	Meningkatnya Manajemen Keselamatan Lalu Lintas			**Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan**	**75,00**				**70,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan	**2 15 02 2 02**	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Jalan**	**2000**	**5.435.219.530**			**1500**	**4.935.419.530**	**0,00**		**1.049.746.328**	**0,00**		**1.059.311.122**	**1600**		**1.285.862.911**	**0,00**		**1.499.571.285**	**1.600**		**4.894.491.646**	**1600**	**4.894.491.646**	**80,00**	**90,05**	
	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan	2 15 02 2 02 0001	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	1560	160.000.000			16	160.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	16	159.464.000	100	16	159.464.000	16	159.464.000	1,03	99,67	
	Tersedianya Perlengkapan Jalan	2 15 02 2 02 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	200	500.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2 15 02 2 02 0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3242	4.725.219.530			3242	4.725.419.530	100	3242	1.049.746.328	0,00	0,00	1.059.311.122	0,00	0,00	1.275.622.911	0,00	0,00	1.300.418.785	100	3242	4.685.099.146	3242	4.685.099.146	100	99,15	
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2 15 02 2 02 0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10.000	50.000.000			1	50.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	1	10.240.000	0,00	0,00	39.688.500	100	1	49.928.500	1	49.928.500	0,01	99,86	
	Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang	**2 15 02 2 03**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C**	**35,00**	**5.700.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	2 15 02 2 03 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	200.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terbangunnya Gedung Terminal	2 15 02 2 03 0009	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1	5.000.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	2 15 02 2 03 0011	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan	2	500.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**2 15 02 2 04**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Titik Potensi Parkir yang Dikelola**	**2**	**200.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraand an Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 15 02 2 04 0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	200.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**2 15 02 2 05**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Kendaraan Bermotor yang Diuji Secara Berkala**	**98,00**	**315.000.000,00**			**90,00**	**150.211.645**	**22,50**		**18.028.290**	**22,50**		**26.907.255**	**22,50**		**37.277.000**	**0,00**		**65.982.000**	**67,50**		**148.194.545**	**67,50**	**148.194.545,00**	**68,88**	**47,05**	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 15 02 2 05 0001	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3	165.000.000			3	150.211.645	100	3	18.028.290	0,00	0,00	26.907.255	0,00	0,00	37.277.000	0,00	0,00	65.982.000	100	3	148.194.545	3	148.194.545	100,00	89,81	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan	2 15 02 2 05 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan	1	100.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	2 15 02 2 05 0008	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	50.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksanannya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	**2 15 02 2 06**	**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**	**24**	**100.000.000**			**4**	**83.620.000**	**1**		**25.821.262**	**1**		**11.883.400**	**1**		**27.957.755**	**1**		**14.932.886**	**4**		**80.595.303**	**4**	**80.595.303**	**16,67**	**80,60**	
	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2 15 02 2 06 0001	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	100.000.000,00			4	83.620.000	25,00	1	25.821.262	25,00	1	11.883.400	25,00	1	27.957.755	25,00	1	14.932.886	100	4	80.595.303	4	80.595.303	33,33	80,60	
	Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin	**2 15 02 2 07**	**Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Andalalin yang Tersusun**	**6**	**50.000.000**			**1**	**42.300.000**	**0,00**		**700.000**	**0,00**		**12.470.000**	**1**		**6.910.000**	**0,00**		**12.649.900**	**1**		**32.729.900**	**1**	**32.729.900**	**16,67**	**65,46**	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 15 02 2 07 0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Junlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3	30.000.000			1	30.000.000	0,00	0,00	-	100	1	10.250.000	0,00		4.510.000	0,00	0,00	11.399.900	100	1	26.159.900	1	26.159.900	33,33	87,20	
	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	2 15 02 2 07 0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3	20.000.000			1	12.300.000	0,00	0,00	700.000	100	1	2.220.000	0,00		2.400.000	0,00	0,00	1.250.000	100	1	6.570.000	1	6.570.000	33,33	32,85	
	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**2 15 02 2 08**	**Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**6,00**	**2.255.100.000,00**			**2,00**	**100.000.000**	**0,00**		**11.653.401**	**0,00**		**19.290.000**	**0,00**		**10.028.135**	**0,00**		**49.713.000**	**0,00**		**90.684.536**	**0,00**	**90.684.536**	**0,00**	**4,02**	
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	2 15 02 2 08 0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten	12	229.000.000,00			4	100.000.000	25,00	1	11.653.401	25,00	1	19.290.000	25,00	1	10.028.135	25,00	1	49.713.000	100	4	90.684.536	4	90.684.536	33,33	39,60	
	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum	**2 15 02 2 09**	**Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Angkutan Umum yang Tersedia**	**41,00**	**1.513.050.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	2 15 02 2 09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	36	513.050.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum		**Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten**	**Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Perdesaan**	**3**	**100.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	3	100.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum		**Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah**	**Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan**	**3**	**100.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan		Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan	3	100.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum		**Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah**	**Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan**	**3**	**100.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	100.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum		**Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Tarif Angkutan yang Sesuai Ketentuan**	**3**	**200.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Terlaksanannya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten		Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Amngkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten	3	100.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas ekonomi Angkutan orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam Satu Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten	3	100.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**31,25**		**20,82**	**31,25**		**21,27**	**18,75**		**25,76**	**18,75**		**30,93**	**100**		**98,78**			**15,92**	**32,65**	
								Predikat Kinerja			**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN	**10.387.287.618**			**2.083.978.268**			**3.017.918.224**			**2.491.023.515**			**2.531.233.125**			**10.124.153.132**		**10.124.153.132**			
								Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinas Perhubungan (%)			**29,10**		**20,06**	**29,46**		**29,05**	**19,25**		**23,98**	**22,19**		**24,37**	**100**		**97,47**			**19,32**	**47,05**	
								Predikat Kinerja Seluruh Program Dinas Perhubungan			**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
		2 #	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**26.125.965.170**		**##########**		**11.405.453.938**			**721.600.049**			**2.558.168.179**			**2.845.847.192**			**3.346.967.168**			**9.472.582.588**		**9.472.582.588**		**36,26**	
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan**	**2 # 0 1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kinerja Perencanaan PD**	**30,00**	**18.019.105.310**		**-**	**29,00**	**6.473.437.552**	**0,00**		**476.715.032**	**24,69**		**1.863.626.136**	**0,00**		**1.826.599.543**	**0,00**		**884.495.073**	**24,69**		**5.051.435.784**	**24,69**	**5.051.435.784**	**82,30**	**28,03**	**DIN KOMINFOTIK**
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	**13,50**				**12,75**		**0,00**			**12,02**			**0,00**			**0,00**			**12,02**			**12,02**		**89,04**		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**72,00**				**68,00**		**0,00**			**66,60**			**0,00**			**0,00**			**66,60**			**66,60**		**92,50**		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**3,90**				**3,50**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan Kinerja Sesuai	**2 # 01 2 01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)**	**100**	**612.972.660**		-	**100**	**147.350.000**	**50,00**		**38.209.656**	**16,67**		**29.062.804**	**33,33**		**35.502.546**	**0,00**		**25.645.216**	**100**		**128.420.222**	**100**	**128.420.222**	**100**	**20,95**	
	Meningkatnya Penyusunan Pelaporan Kinerja Sesuai			**Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)**	**100**				**100**		**50,00**			**25,00**			**25,00**			**50,00**			**150**			**150**		**150**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 16 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD (Dokumen)	18	414.672.660			6	105.800.000	50,00	3	34.909.656	16,67	1	18.862.804	33,33	2	18.662.546	0,00	0,00	15.235.216	100	6	87.670.222	6	87.670.222	33,33	21,14	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2 16 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	198.300.000			4	41.550.000	50,00	2	3.300.000	25,00	1	10.200.000	25,00	1	16.840.000	0,00	0,00	10.410.000	100	4	40.750.000	4	40.750.000	33,33	20,55	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat	**2 16 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang Disusun Sesuai Standar (%)**	**100**	**12.523.071.000**			**100**	**3.683.323.843**	**25,00**		**313.268.943**	**25,00**		**1.528.612.927**	**25,00**		**937.850.690**	**25,00**		**482.506.774**	**100**		**3.262.239.334**	**100**	**3.262.239.334**	**100**	**26,05**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2 16 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	78	12.360.771.000			26	3.661.943.843	25,00	26	313.268.943	25,00	26	1.523.772.927	25,00	26	933.010.690	25,00	26	471.926.774	100	26	3.241.979.334	26	3.241.979.334	33,33	26,23	
	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifika	2 16 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	30.000.000			12	11.250.000	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3	4.840.000	25,00	3	5.290.000	100	12	10.130.000	12	10.130.000	33,33	33,77	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 16 01 2 02 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6	66.150.000			2	10.130.000	50,00	1	-	0,00	0,00	4.840.000	0,00	0,00		50,00	1	5.290.000	100	2	10.130.000	2	10.130.000	33,33	15,31	
		2 16 01 2 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	126	66.150.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	**2 16 01 2 05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)**	**100**	**252.100.000**		-	**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan			**Persentase Pegawai yang mengenakan Atribut Lengkap (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)**	**50,00**				**35,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	2 16 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta perlengkapannya	3	100.300.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 16 01 2 05 0000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	36	30.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 16 01 2 05 0000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26	121.800.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Layanan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah	**2 # 01 2 06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di Perangkat Daerah (%)**	**100**	**434.185.160**		-	**100**	**376.714.000**	**25,00**		**37.514.869**	**25,00**		**55.079.342**	**25,00**		**51.727.243**	**25,00**		**200.445.929**	**100**		**344.767.383**	**100**	**344.767.383**	**100**		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 16 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	357.835.160			12	361.264.000	25,00	3	35.511.537	25,00	3	51.072.678	25,00	3	48.722.245	25,00	3	199.490.540	100	12	334.797.000	12	334.797.000	33,33	93,56	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 16 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	36	30.000.000			12	-	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3	3.004.998	25,00	3	955.389	100	12	3.960.387	12	3.960.387	33,33	13,20	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	2 16 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	46.350.000			12	15.450.000	25,00	3	2.003.332	25,00	3	4.006.664	25,00	3	-	25,00	3	-	100	12	6.009.996	12	6.009.996	33,33	12,97	
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana	**2 # 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah (%)**	**14,15**	**1.469.582.270**			**4,72**	**1.430.079.541**	**0,00**		**-**	**0,00**		**7.000.000**	**4,72**		**659.871.840**	**0,00**		**1.190.000**	**4,72**		**668.061.840**	**4,72**	**668.061.840**	**33,36**		
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 16 01 2 07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang (Unit)	15	287.960.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Mebel Kantor	2 16 01 2 07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (Paket)	3	472.410.000			1	7.367.500	0,00	0,00	-	100	1	7.000.000	0,00	0,00		0,00	0,00	150.000	100	1	7.150.000	1	7.150.000	33,33	1,51	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 16 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	5	19.400.000			5	162.532.041	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	5	136.236.000	0,00	0,00	200.000	100	5	136.436.000	5	136.436.000	100	703,28	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 16 01 2 07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	561.464.735			1	689.340.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	2 16 01 2 07 0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	100	10.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 16 01 2 07 0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	6	118.347.535			4	570.840.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	4	523.635.840	0,00	0,00	840.000	100	4	524.475.840	4	524.475.840	66,67	443,17	
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat	**2 # 01 2 08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah (%)**	**100**	**2.018.506.800**		**-**	**100**	**619.906.962**	**25,00**		**73.483.864**	**25,00**		**201.958.263**	**25,00**		**111.383.692**	**25,00**		**107.605.386**	**100**		**494.431.205**	**100**	**494.431.205**	**100**	**24,49**	**DIN KOMINFOTIK**
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 16 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	1.265.401.305			12	314.852.582	25,00	3	56.094.400	25,00	3	136.085.800	25,00	3	70.911.600	25,00	3	68.054.782	100	12	331.146.582	12	331.146.582	33,33	26,17	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 16 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	519.451.350			12	247.391.508	25,00	3	6.757.064	25,00	3	41.508.363	25,00	3	26.598.492	25,00	3	27.085.804	100	12	101.949.723	12	101.949.723	33,33	19,63	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 16 01 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36	233.654.145			12	57.662.872	25,00	3	10.632.400	25,00	3	24.364.100	25,00	3	13.873.600	25,00	3	12.464.800	100	12	61.334.900	12	61.334.900	33,33	26,25	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	**2 # 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)**	**75,00**	**708.687.420**	**0,00**	**-**	**75,00**	**216.063.206**	**18,75**		**14.237.700**	**18,75**		**41.912.800**	**18,75**		**30.263.532**	**18,75**		**67.101.768**	**75,00**		**153.515.800**	**75,00**	**153.515.800**	**100**		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	2 16 01 2 09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	523.971.420	0,00	-	11	168.153.206	36,36	4	13.641.700	27,27	3	38.986.800	27,27	3	30.263.532	9,09	1	52.876.768	100	11	135.768.800	11	135.768.800	30,56	25,91	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 16 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	111	109.716.000	0,00	-	31	32.460.000	25,81	8	596.000	25,81	8	2.926.000	25,81	8	-	22,58	7	14.225.000	100	31	17.747.000	31	17.747.000	27,93	16,18	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	2 16 01 2 09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3	75.000.000	0,00	-	1	15.450.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**22,90**		**7,36**	**21,93**		**28,79**	**28,41**		**28,22**	**15,65**		**13,66**	**88,89**		**78,03**			**34,73**	**36,26**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**T**		**T**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keberbukaan**	**2 # 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Indeks Keterbukaan Informasi Publik**	**78,00**	**5.101.725.100**	**0,00**	**-**	**100**	**1.633.607.986**	**0,00**		**115.731.481**	**0,00**		**573.464.500**	**0,00**		**195.228.900**	**0,00**		**362.588.895**	**0,00**		**1.247.013.776**	**0,00**	**1.247.013.776**	**0,00**	**24,44**	**DIN KOMINFOTIK**
		2 # 02 # 02	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	**Persentase Informasi dan Dokumentasi yang dikelola (%)**	**100**	**5.101.725.100**	**0,00**	**-**	**100**	**1.633.607.986**	**25,00**		**115.731.481**	**25,00**		**573.464.500**	**25,00**		**195.228.900**	**25,00**		**362.588.895**	**100**		**1.247.013.776**	**100**	**1.247.013.776**	**100**	**24,44**	
				Persentase Informasi publik yang Disampaikan Melalui Media (%)	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase Permohonan Informasi Publik yang Dilayani/Ditindaklanj	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Sapras Pendukung Informasi Publik yang Tersedia (%)	100				100		25,00			25,00			25,00			25,00			100			100		100		
				Persentase SDM Komunikasi Publik yang Memiliki Kompetensi (%)	50,00				25,00		0,00			0,00			0,00			25,00			25,00			25,00		50,00		
	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi	2 # 02 2 01 0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	12	30.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 # 02 2 01 0005	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	108	30.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	2 # 02 2 01 0006	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Dokumen)	36	810.375.000			12	192.852.000	25,00	3	6.310.000	25,00	3	30.087.500	25,00	3	11.502.500	25,00	3	21.770.992	100	12	69.670.992	12	69.670.992	33,33	8,60	
	Tersedianya Layanan Hubungan Media	2 # 02 2 01 0007	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	210	30.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terselenggaranya Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	2 # 02 2 01 0009	Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis (Dokumen)	12	88.770.000			4	28.790.000	0,00	0,00	820.000	50,00	2	-	25,00	1	4.680.000	25,00	1	15.865.784	100	4	21.365.784	4	21.365.784	33,33	24,07	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2 # 02 2 01 0010	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya (orang)	6	1.604.881.980			2	446.467.536	0,00	0,00	68.863.000	50,00	1	114.494.500	50,00	1	86.656.400	0,00	0,00	118.395.600	100	2	388.409.500	2	388.409.500	33,33	24,20	
	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program	2 # 02 2 01 0012	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)	210	2.537.698.120			67	965.498.450	23,88	16	39.738.481	23,88	16	428.882.500	29,85	20	92.390.000	22,39	15	206.556.519	100	67	767.567.500	67	767.567.500	31,90	30,25	
	Penyediaan/ Pengadaan Sarpras Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	2 # 02 2 01 0013	Sub Kegiatan Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	6	30.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							12,22		7,08	37,22		35,10	25,97		11,95	14,48		22,20	100		76,33			32,98	24,44	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		T			SR	SR	
3	**Meningkatnya Jaringan Intra Pemerintah daerah (JIP)**	**2 # 03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan intra Pemerintah (JIP) (%)**	**100**	**3.005.134.760**	**54,38**	**-**	**58,82**	**3.298.408.400**	**0,00**		**129.153.536**	**0,00**		**121.077.543**	**0,00**		**824.018.749**	**58,82**		**2.099.883.200**	**58,82**		**3.174.133.028**	**58,82**	**3.174.133.028**	**58,82**	#####	**DIN KOMINFOTIK**
	Meningkatnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			**Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE (%)**	**66,67**																								
	Meningkatnya Infrastruktur TIK	**2 # 03 2 01**	**Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup**	**Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam Kondisi Baik (%)**	**85,00**	**2.382.605.000**		**-**	**85,00**	**2.382.605.000**	**0,00**		**53.040.482**	**0,00**		**14.480.000**	**0,00**		**772.078.546**	**85,00**		**1.423.064.000**	**85,00**		**2.262.663.028**	**85,00**	**2.262.663.028**	**100**	**94,97**	
	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah	2 # 03 2 01 0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	2.382.605.000			1	2.382.605.000	0,00	0,00	53.040.482	0,00	0,00	14.480.000	100	1	772.078.546	0,00	0,00	1.423.064.000	100	1	2.262.663.028	1	2.262.663.028	100,00	94,97	
	Meningkatnya Penyelenggaraan, Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government)	**2 # 03 # 03**	**Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Domain kebijakan internal**	**2,25**	**622.529.760**		**-**	**2,25**	**915.803.400**	**0,00**		**76.113.054**	**0,00**		**106.597.543**	**0,00**		**51.940.203**	**2,25**		**676.819.200**	**2,25**		**911.470.000**	**2,25**	**911.470.000**	**100**	#####	
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)			**Nilai Domain Layanan SPBE**	**2,25**				**2,25**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**2,25**			**2,25**			**2,25**		**100**		
	Meningkatnya Pengembangan Aplikasi Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik			**Nilai Domain Tata Kelola SPBE**	**2,25**				**2,25**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**2,25**			**2,25**			**2,25**		**100**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 # 03 2 02 0001	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36	164.760.180			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terkelolanya Pusat data Pemerintahan Daerah	2 # 03 2 02 0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola (Pusat	3	30.000.000			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2 # 03 2 02 0004	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dokumen)					0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan	2 # 03 2 02 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi					0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik	2 # 03 2 02 0007	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan (Unit)	5	30.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan					0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	2 # 03 2 02 0010	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	3	592.529.760			1	915.803.400	0,00	0,00	76.113.054	0,00	0,00	106.597.543	0,00	0,00	51.940.203	100	1	676.819.200	100	1	911.470.000	1	911.470.000	33,33	153,83	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00		3,92	0,00		3,67	50,00		24,98	50,00		63,66	100		96,23			16,67	25,64	
										Predikat Kinerja	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		R	ST		ST			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					11.405.453.938				721.600.049			2.558.168.179			2.845.847.192			3.346.967.168			9.472.582.588		9.472.582.588			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Komunikasi dan Informatika (%)							11,71		6,33	19,72		22,43	34,79		24,95	26,71		29,35	96,30		83,05			28,12	36,26	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Komunikasi dan Informatika							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		T			SR	SR	
		2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH			873.739.100				581.184.900			-			281.350.997			21.460.000			227.724.417			530.535.414		530.535.414		60,72	
1	Meningkatnya Koperasi Berklasifikasi A	2 # 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang	45,00	91.000.000			45,00	4.726.300	0,00		-	0,00		4.205.000	0,00		300.000	0,00		-	0,00		4.505.000	0,00	4.505.000	0,00	4,95	DIN PMP2KUKM
		2 # 03 2 01	PeKegiatan meriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Persentase Pembinaan Koperasi (%)	86,00	91.000.000			86,00	4.726.300	21,50		-	21,50		4.205.000	21,50		300.000	21,50		-	86,00		4.505.000	86,00	4.505.000	#####	4,95	
		2 # 03 2 01 0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20	38.000.000			20	300.000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	300.000	100,00	20		100	20	300.000	20	300.000	100,00	0,79	
		2 # 03 2 01 0004	Sub kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	100	53.000.000			100	4.426.300	100	100		0,00	0,00	4.205.000	0,00	0,00		0,00	0		100	100	4.205.000	100	4.205.000	100	7,93	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	50,00		0,00	0,00		88,97	0,00		6,35	50,00		0,00	100		95,32			#####	4,95	
										Predikat Kinerja	SR		SR	SR		T	SR		SR	SR		SR	ST		ST			ST	SR	
2	Meningkatnya Koperasi Berklasifikasi A	2 # 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A (%)	45,00	34.739.100			45,00	700.000	0,00		-	0,00		-	0,00		600.000	0,00		-	0,00		600.000	0,00	600.000	0,00	1,73	DIN PMP2KUKM
		2 # 04 2 01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1	Persentase Pembinaan Koperasi (%)	86,00	34.739.100			86,00	700.000	21,50		-	21,50		-	21,50		600.000	21,50		-	86,00		600.000	86,00	600.000	#####	1,73	
		2 # 04 2 01 0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian	20	34.739.100			20	700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	600.000	100	20		100	20	600.000	20	600.000	100	1,73	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	100		0,00	100		85,71			100	1,73	
										Predikat Kinerja	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		SR	ST		T			ST	SR	
3	Meningkatnya Koperasi Berklasifikasi A	2 # 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang	45,00	235.000.000			45,00	281.346.300	0,00		-	0,00		248.075.997	0,00		-	0,00		18.115.000	0,00		266.190.997	0,00	266.190.997	0,00	#####	DIN PMP2KUKM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 # 05 2 01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten Kota	Persentase Pembinaan Koperasi (%)	86,00	235.000.000			86,00	281.346.300	25,00		-	75,00		248.075.997	0,00		-	0,00		18.115.000	100		266.190.997	100	266.190.997	#####	#####		
		2 # 05 2 01 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	70	235.000.000			70	281.346.300	0,00	0,00	0,00	100	70	248.075.997	0,00	0,00		0,00	0,00	18.115.000	100	70	266.190.997	70,00	266.190.997	100,00	113,27	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	100		88,17	0,00		0,00	0,00		6,44	100		94,61			#####	#####	
				Predikat Kinerja							SR		SR	ST		T	SR		SR	SR		SR	ST		ST			ST	ST	
4	Meningkatnya Omset Usaha Mikro	2 # 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	75,00	128.000.000			75,00	291.412.300	0,00		-	0,00		28.250.000	0,00		18.990.000	0,00		209.609.417	0,00		256.849.417	0,00	256.849.417	0,00	#####		DIN PMP2KUKM
		2 # 07 2 01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro	12,00	128.000.000			12,00	291.412.300	0,00		-	0,00		28.250.000	0,00		18.990.000	0,00		209.609.417	0,00		256.849.417	0,00	256.849.417	0,00	#####		
		2 # 07 2 01 0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	5	15.000.000			5	790.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	5	625.000	0,00	0,00		100	5	625.000	5	625.000	100	4,17		
		2 # 07 3 01 0008	Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1	18.000.000			1	1.610.000	0,00	0,00		0,00	0,00	-	100	1	1.345.000	0,00	0,00		100	1	1.345.000	1	1.345.000	100	7,47		
		2 # 07 4 01 0015	Sub Kegiatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60	95.000.000			60	289.012.300	0,00	0,00	0,00	66,67	40	28.250.000	0,00	0,00	17.020.000	33,33	20	209.609.417	100	60	254.879.417	60	254.879.417	100	268,29		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	22,22		9,69	66,67		6,52	11,11		71,93	100		88,14			100	#####	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	S		SR	SR		S	ST		T			ST	ST	
5	Meningkatnya Omset Usaha Mikro	2 # 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	75,00	385.000.000			75,00	3.000.000	0,00		-	0,00		820.000	0,00		1.570.000	0,00		-	0,00		2.390.000	0,00	2.390.000	0,00	0,62		DIN PMP2KUKM
		2 # 08 2 01	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro	12,00	385.000.000			12,00	3.000.000	0,00		-	0,00		820.000	0,00		1.570.000	0,00		-	0,00		2.390.000	0,00	2.390.000	0,00	0,62		
		2 # 08 2 01 0002	Sub Kegiatan Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	84	385.000.000			84	3.000.000	0,00	0,00	-	45,24	38	820.000	54,76	46	1.570.000	0,00	0,00	-	100	84	2.390.000	84	2.390.000	100,00	0,62		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	45,24		27,33	54,76		52,33	0,00		0,00	100		79,67			#####	0,62		
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	R		R	SR		SR	ST		T			ST	SR		
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						581.184.900			-			281.350.997			21.460.000			227.724.417			530.535.414		530.535.414				
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (%)							10,00		0,00	33,49		48,41	24,29		3,69	32,22		39,18	100		91,29			#####	60,72		
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			ST	R		
		2 #	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL			8.542.144.900				8.308.739.918			654.189.253			3.002.174.431			1.328.242.974			2.814.671.382			7.824.920.440		7.824.920.440		91,60		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	2 # 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	25,00	7.397.744.900			25,25	5.324.215.743	0,00		632.366.150	23,51		2.796.091.970	0,00		1.026.744.880	0,00		569.562.160	23,51		5.050.407.560	23,51	5.050.407.560	94,04	68,27		DIN PMP2KUKM
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	13,00				13,00		0,00			11,50			0,00			0,00			11,50			11,50		88,46			
				Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00				0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		100			
				Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup	67,00				67,00		0,00			62,82			0,00			0,00			62,82			62,82		93,76			
				Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,25				1,25		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			
				Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	87,50				87,50		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			
		2 # 01 2 01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	100	30.000.000			100	11.600.200	50,00		-	25,00		1.114.000	25,00		3.920.000	0,00		5.345.000	100		10.379.000	100	10.379.000	100	34,60		
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100				100		50,00			25,00			25,00			0,00			100			100		100			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 # 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	15.000.000			8	2.609.200	50,00	4	-	25,00	2	1.114.000	25,00	2	-	0,00		450.000	100	8	1.564.000	8	1.564.000	100	10,43		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2 # 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	15.000.000			4	8.991.000	50,00	2	-	25,00	1		25,00	1	3.920.000	0,00		4.895.000	100	4	8.815.000	4	8.815.000	100	58,77	
		2 # 01 2 02	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)**	**100**	**5.668.000.000**			**100**	**4.082.434.380**	**21,43**		**522.080.400**	**28,57**		**2.275.838.180**	**21,43**		**907.423.538**	**28,57**		**285.449.238**	**100**		**3.990.791.356**	**100**	**3.990.791.356**	**100**	**70,41**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2 # 01 3 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	114	5.640.000.000			114	4.072.702.380	25,00	114	522.080.400	25,00	114	2.274.228.180	25,00	114	903.723.538	25,00	114	281.069.238	100	114	3.981.101.356	114	3.981.101.356	100	70,59	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	2 # 01 2 2 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36	18.000.000			12	-	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	2 # 01 3 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	42	10.000.000,00			14	9.732.000	21,43	3	-	28,57	4	1.610.000	21,43	3	3.700.000	28,57	4	4.380.000	100	14	9.690.000	14	9.690.000	33,33	96,90	
		2 # 01 2 05	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi (%)**	**32,61**	**37.600.000**			**10,87**	**15.700.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
				Persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap (%)	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
		2 # 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atribut	6	12.600.000			1	9.250.000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan admnistrasi	11	36.500.000,00			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 01 2 05 0005	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	25.000.000,00			1	6.450.000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 01 2 06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja**	**100**	**313.644.900**			**100**	**192.255.820**	**25,00**		**16.212.900**	**25,00**		**93.700.922**	**25,00**		**12.710.000**	**25,00**		**58.884.280**	**100**		**187.040.502**	**100**	**187.040.502**	**100**	**59,63**	
		2 # 01 2 06 0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	247.644.900			12	165.965.207	25,00	3	13.917.300,00	25,00	3	78.932.922	25,00	3	9.143.800	25,00	3	58.884.280	100	12	160.878.302	12	160.878.302	33,33	64,96	
		2 # 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	36	30.000.000			12	26.290.613	25,00	3	2.295.600	25,00	3	14.768.000	25,00	3	3.566.200	25,00	3	5.532.400	100	12	26.162.200	12	26.162.200	33,33	87,21	
		2 # 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	36.000.000			0	-	0,00		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		2 # 01 2 07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat daerah (%)**	**100**	**108.500.000**			**75,00**	**5.345.730**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**75,00**		**5.340.000**	**75,00**		**5.340.000**	**75,00**	**5.340.000**	**75,00**	**4,92**	
		2 # 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor yang diadakan	5	38.000.000,00			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		
		2 # 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	70.500.000,00			1	5.345.730	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		100	1	5.340.000	100	1	5.340.000	1	5.340.000	8,33	7,57	
		2 # 01 2 08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)**	**100**	**993.000.000**			**100**	**818.546.797**	**25,00**		**76.672.650**	**25,00**		**362.856.594**	**25,00**		**99.531.442**	**25,00**		**160.355.835**	**100**		**699.416.521**	**100**	**699.416.521**	**100**	**70,43**	
		2 # 01 2 08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	795.000.000			12	586.742.229	25,00	3	65.980.650	25,00	3	295.040.850	25,00	3	69.110.750	25,00	3	125.822.900	100	12	555.955.150	12	555.955.150	33,33	70	
		2 # 01 2 08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	125.000.000			12	202.956.945	25,00	3	5.900.800	25,00	3	53.007.744	25,00	3	23.758.892	25,00	3	33.191.735	100	12	115.859.171	12	115.859.171	33,33	92,69	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 # 01 2 08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	73.000.000			12	28.847.623	25,00	3 4.791.200	25,00	3 14.808.000	25,00	3 6.661.800	25,00	3 1.341.200	100	12 27.602.200	12	27.602.200	33,33	37,81	
		2 # 01 2 09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara (%)**	**100**	**247.000.000**			**100**	**198.332.816**	**25,00**	**17.400.200**	**25,00**	**62.582.274**	**25,00**	**3.159.900**	**25,00**	**54.187.807**	**100**	**157.440.181**	**100**	**157.440.181**	**100**	**63,74**	
		2 # 01 2 09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	54	155.000.000			18	157.132.816	11,11	2 17.400.200	38,89	7 62.582.274	27,78	5,00 3.159.900	22,22	4 54.187.807	100	18 137.330.181	18	137.330.181	33,33	88,60	
		2 # 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60	56.000.000			20	20.750.000	10,00	2 -	30,00	6	0,00	0,00	60,00	12 20.110.000	100	20 20.110.000	20	20.110.000	33,33	35,91	
		2 # 01 2 09 0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	3	36.000.000			1	20.450.000	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00 -	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**18,68**	**11,88**	**18,97**	**52,52**	**16,13**	**19,28**	**22,69**	**10,70**	**92,86**	**94,86**			**35,78**	**68,27**	
				Predikat Kinerja							**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**			**SR**	**S**	
2	**Meningkatnya Promosi Penanaman Modal Daerah**	**2 # 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Jumlah Investor**	**100**	**36.000.000**			**100**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DIN PMP2KUKM**
		2 # 02 2 02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota**	**Persentase Koordinasi Untuk Lembaga**	**100**	**36.000.000**			**100**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2 # 02 2 02 0004	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2	36.000.000,00			0	-	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	-	0,00		0,00	0,00 -	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Promosi Penanaman**	**2 # 03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Jumlah Investor**	**100**	**85.880.000**			**100**	**4.043.670**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**2.200.000**	**0,00**	**1.785.000**	**0,00**	**3.985.000**	**0,00**	**3.985.000**	**0,00**	**4,64**	**DIN PMP2KUKM**
		2 # 03 2 01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal yang difasilitasi**	**100**	**85.880.000**			**100**	**4.043.670**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**2.200.000**	**0,00**	**1.785.000**	**0,00**	**3.985.000**	**0,00**	**3.985.000**	**0,00**	**4,64**	
		2 # 03 2 01 02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	85.880.000			1	4.043.670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000	100	1 1.785.000	100	1 3.985.000	1	3.985.000	33,33	4,64	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,41**	**100**	**44,14**	**100**	**98,55**			**33,33**	**4,64**	
				Predikat Kinerja							**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**ST**	**SR**	**ST**	**ST**			**SR**	**SR**	
4	**Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan**	**2 # 04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Perizinan Yang Diselesaikan Dengan Standar Waktu**	**100**	**549.000.000**			**100**	**2.360.064.380**	**25,00**	**14.826.145**	**25,00**	**136.048.243**	**25,00**	**82.036.136**	**25,00**	**1.975.973.836**	**100**	**2.208.884.360**	**100**	**2.208.884.360**	**100**	#####	**DIN PMP2KUKM**
		2 # 04 2 01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah**	**Persentase Perizinan Yang Memenuhi Persyaratan**	**100**	**549.000.000**			**100**	**2.360.064.380**	**25,00**	**14.826.145**	**25,00**	**136.048.243**	**25,00**	**82.036.136**	**25,00**	**1.975.973.836**	**100**	**2.208.884.360**	**100**	**2.208.884.360**	**100**	#####	
		2 # 04 2 01 0006	Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	3000	539.000.000			1000	2.360.064.380	21,50	215 14.826.145	26,40	264 136.048.243	29,10	291 82.036.136,00	23,00	230 1.975.973.836	100	1000 2.208.884.360	1000	2.208.884.360	33,33	409,81	
		2 # 04 2 01 0007	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	144	10.000.000			48	-	16,67	8 -	43,75	21 -	25,00	12	14,58	7	100	48 -	48	-	33,33	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**19,08**	**0,63**	**35,08**	**5,76**	**27,05**	**3,48**	**18,79**	**83,73**	**100**	**93,59**			**33,33**	#####	
				Predikat Kinerja							**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**ST**	**ST**			**SR**	**ST**	
5	**Meningkatnya Pengendalian Penanaman Modal Daerah**	**2 # 05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi**	**100**	**458.520.000**			**100**	**615.478.000**	**0,00**	**6.996.958**	**0,00**	**70.034.218**	**0,00**	**217.261.958**	**0,00**	**263.125.636**	**0,00**	**557.418.770**	**0,00**	**557.418.770**	**0,00**	#####	**DIN DPMP2KUKM**
		2 # 05 2 01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah**	**Persentase Peningkatan Investasi**	**50,00**	**458.520.000**			**83,00**	**615.478.000**	**0,00**	**6.996.958**	**0,00**	**70.034.218**	**0,00**	**217.261.958**	**0,00**	**263.125.636**	**0,00**	**557.418.770**	**0,00**	**557.418.770**	**0,00**	#####	
		2 # 05 2 01 0004	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	50	38.000.000,00			10	92.321.000	20,00	2 -	30,00	3	20,00	2 42.619.600	30,00	3 44.703.040	100	10 87.322.640	10	87.322.640	20,00	229,80	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 # 05 2 01 0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan	200	342.520.000,00			264	338.514.000	25,00	66	6.996.958	25,00	66	27.096.618	25,00	66	151.247.758	25,00	66	138.023.116	100	264	323.364.450	264	323.364.450	132,00	94,41	
		2 # 05 2 01 0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan	50	78.000.000,00			50	184.643.000	24,00	12	-	30,00	15	42.937.600	22,00	11	23.394.600	24,00	12	80.399.480	100	50	146.731.680	50	146.731.680	100,00	188,12	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**23,00**		**1,14**	**28,33**		**11,38**	**22,33**		**35,30**	**26,33**		**42,75**	**100**		**90,57**			**84,00**	**#####**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**T**	**ST**	
6	**Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**	**2 # 06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP**	**100**	**15.000.000**			**100**	**4.938.125**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**4.224.750**	**100**		**4.224.750**	**100**	**4.224.750**	**100**	**28,17**	**DIN DPMP2KUKM**
		2 # 06 2 01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat yang dilakukan**	**100**	**15.000.000**			**100**	**4.938.125**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**4.224.750**	**100**		**4.224.750**	**100**	**4.224.750**	**100**	**28,17**	
		2 # 06 2 01 0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,	6	15.000.000			6	4.938.125	33,33	2	-	33,33	2	-	0,00	0,00	-	33,33	2	4.224.750	100	6	4.224.750	6	4.224.750	100	28,17	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**33,33**		**0,00**	**33,33**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**33,33**		**85,55**	**100**		**85,55**			**#####**	**28,17**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**T**	**ST**		**T**			**ST**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL						**8.308.739.918**			**654.189.253**			**3.002.174.431**			**1.328.242.974**			**2.814.671.382**			**7.824.920.440**		**7.824.920.440**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Bidang Urusan Penanaman Modal (%)							**18,82**		**7,87**	**23,14**		**36,13**	**13,10**		**15,99**	**40,23**		**33,88**	**98,57**		**94,18**			**47,74**	**91,60**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Bidang Urusan Penanaman Modal							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**ST**	
		2 #	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAN DAN OLAHRAGA**			**34.182.922.107**				**4.672.284.674**			**526.398.449**			**28.000.000**			**2.744.169.692**			**369.563.267**			**3.668.131.408**		**3.668.131.408**		**10,73**	
	MENINGKATNYA KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			**PERSENTASE PEMUDA YANG BERDAYA SAING**	**1,18**				**1,18**																				
1	**Meningkatnya Peran dan Aktivitas Kepemudaan**	**2 # 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang Aktif (%)**	**41,06**	**4.965.000.000**			**41,05**	**1.026.981.050**	**0,00**		**224.600.000**	**0,00**		**14.370.000**	**0,00**		**20.687.920**	**0,00**		**56.362.924**	**0,00**		**316.020.844**	**0,00**	**316.020.844**	**0,00**	**6,36**	**DINDIKPORA**
	Meningkatnya Keterampilan dan Kemandirian Pemuda	**2 # 02 2 01**	**Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader**	**Persentase Pemuda Pelopor**	**25,00**	**3.641.000.000**		**-**	**10,00**	**321.981.050**	**0,00**		**224.600.000**	**0,00**		**14.370.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**36.197.600**	**0,00**		**275.167.600**	**0,00**	**275.167.600**	**0,00**	**7,56**	
				Persentase Pemuda yang berwirausaha	**77,03**				**77,03**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**			
				Persentase Pemuda Kader	**20,52**				**20,52**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**			
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	2 # 02 2 01 0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300	662.000.000			100	4.205.300	0,00	0,00	-	50,00	50	1.230.000	0,00	0,00	-	50,00	50		100	100	1.230.000	100,00	1.230.000	33,33	0,19	
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh	2 # 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan	1689	331.000.000			563	1.270.000	0,00	0,00	-	21,49	121	820.000	0,00	0,00	-	78,51	442		100	563	820.000	563	820.000	33,33	0,25	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2 # 02 2 01 0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	450	331.000.000			150	67.815.750	0,00	0,00	900.000	33,33	50	12.320.000	0,00	0,00	-	66,67	100	35.507.600	100	150	48.727.600	150	48.727.600	33,33	14,72	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan	2 # 02 2 01 0004	Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	300	662.000.000			60	-	0,00	0,00	-	50,00	30		0,00	0,00	-	50,00	30		100	60	-	60,00	-	20,00	0,00	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2 # 02 2 01 06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	6	662.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa	2 # 02 2 01 0007	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	2	331.000.000			2	248.690.000	100	2	223.700.000	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	690.000	100	2	224.390.000	2,00	224.390.000	100,00	67,79	
	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh	2 # 02 2 01 0008	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	300	662.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya kapasitas Organisasi Kepemudaan	**2 # 02 2 02**	**Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah**	**Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi**	**100**	**1.324.000.000**		**-**	**100**	**705.000.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**20.687.920**	**0,00**		**20.165.324**	**0,00**		**40.853.244**	**0,00**	**40.853.244**	**0,00**	**3,09**	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	2 # 02 2 02 02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	6	331.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3	993.000.000			1	705.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	20.687.920	100	1	20.165.324	100	1	40.853.244	1	40.853.244	33,33	4,11	
				Rata Rata Capaian Kinerja (%)							**16,67**		**21,87**	**25,80**		**1,40**	**0,00**		**2,01**	**57,53**		**5,49**	**100**		**30,77**			**42,22**	**6,36**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**R**		**SR**	**ST**		**SR**			**SR**	**SR**	
	MENINGKATNYA PRESTASI OLAHRAGA DAERAH			**PERSENTASE CABOR YANG MERAIH MEDALI DALAM TINGKAT PROPINSI**	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**									**0,00**							
2	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA**	**2 # 03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahrga dan**	**100**	**29.217.922.107**		**-**	**100**	**3.645.303.624**	**0,00**		**301.798.449**	**0,00**		**13.630.000**	**0,00**		**2.723.481.772**	**0,00**		**313.200.343**	**0,00**		**3.352.110.564**	**0,00**	**3.352.110.564**	**0,00**	**11,47**	**DINDIKPORA**
				Persentase Sarana Prasarana Olahraga yang Memenuhi	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Sarpras Olahraga Pendidikan yang berstandar	**50,00**				**45,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Atlet Yang Berprestasi	**75,00**				**60,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Sarpras Olahraga Rekreasi yang berstandar	**50,00**				**45,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		2 # 03 2 01	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Cabor Pendidikan yang dibina**	**93,00**	**8.889.500.000**			**79,17**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	6	331.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	6	331.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	15	8.227.500.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 03 2 02	**Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah**	**Jumlah Kejuaraan**	**20,00**	**6.620.000.000**		**-**	**10,00**	**800.400.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**8.200.000**	**0,00**		**585.795.204**	**0,00**		**191.035.200**	**0,00**		**785.030.404**	**0,00**	**785.030.404**	**0,00**	**11,86**	
	Terselenggaranya Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	2 # 03 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/	3	1.986.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat	2 # 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat	3	2.648.000.000			1	745.158.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	8.200.000	100	1	531.865.000	0,00	0,00	190.435.200	100	1	730.500.200	1	730.500.200	33,33	27,59	
	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan	2 # 03 2 02 0003	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	560	1.986.000.000			175	55.242.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	175	53.930.204	0,00	0,00	600.000	100	175	54.530.204	175	54.530.204	31,25	2,75	
		2 # 03 2 03	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan Cabor Prestasi yang dibina**	**100**	**3.144.500.000**		**-**	**100**	**139.200.000**	**0,00**		**11.941.300**	**0,00**		**4.920.000**	**0,00**		**1.230.000**	**0,00**		**26.330.468**	**0,00**		**44.421.768**	**0,00**	**44.421.768**	**0,00**	**1,41**	
	Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	2 # 03 2 03 0001	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	560	165.500.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan	2 # 03 2 03 0002	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu	3	827.500.000			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	2 # 03 2 03 0003	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan	560	496.500.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga	2 # 03 2 03 0004	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	442	1.324.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	2 # 03 2 03 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	331.000.000			1	139.200.000	0,00	0,00	11.941.300	100	1	4.920.000	0,00	0,00	1.230.000	0,00	0,00	26.330.468	100	1	44.421.768	1,00	44.421.768	33,33	13,42	
		2 # 03 2 04	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina (%)**	**100**	**8.577.922.107**		**-**	**100**	**1.793.960.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**1.793.000.000**	**25,00**		**960.000**	**100**		**1.793.960.000**	**100**	**1.793.960.000**	**100**	**20,91**	
		2 # 03 2 04 02	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi	3	8.577.922.107			1	1.793.960.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	1	1.793.000.000	0,00	0,00	960.000	100	1	1.793.960.000	1	1.793.960.000	33,33	20,91	
		2 # 03 2 05	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Tenaga Keolahragaan Rekreasi Yang Memiliki Sertifikat**	**4,00**	**1.986.000.000**		**-**	**4,00**	**911.743.624**	**0,00**		**289.857.149**	**0,00**		**510.000**	**0,00**		**343.456.568**	**0,00**		**94.874.675**	**0,00**		**728.698.392**	**0,00**	**728.698.392**	**0,00**	**36,69**	
	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 # 03 2 05 0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3	662.000.000			1	30.002.000	0,00	0,00	4.216.000	0,00	0,00	510.000	0,00	0,00	-	100	1	8.100.000	100	1	12.826.000	1	12.826.000	33,33	1,94	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara		Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3	331.000.000			0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota yang Berprestasi		Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3	496.500.000			0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3	496.500.000			0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 03 2 05 03	Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	12	14.315.000.000			4	881.741.624	25,00	1	285.641.149	25,00	1	-	25,00	1	343.456.568	25,00	1	86.774.675	100	4	715.872.392	4	715.872.392	33,33	5,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**4,17**		**8,28**	**20,83**		**0,37**	**54,17**		**74,71**	**20,83**		**103,78**	**100**		**91,96**			**28,27**	**11,47**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		S	SR		ST	ST		ST			SR	SR	
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						4.672.284.674				526.398.449			28.000.000			2.744.169.692			369.563.267			3.668.131.408		3.668.131.408			
			Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga (%)								10,42		11,27	23,32		0,60	27,08		58,73	39,18		7,91	100		78,51			35,25	8,92	
			Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga								SR		SR	SR		SR	SR		R	SR		SR	ST		T			SR	SR	
		2 #	URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK			274.530.336			95.083.716				7.051.200			12.446.800			8.471.800			6.132.400			34.102.200		34.102.200		12,42	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan	2 # 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi (%)	58,82	274.530.336			58,82	95.083.716	25,00		7.051.200	25,00		12.446.800	25,00		8.471.800	25,00		6.132.400	100		34.102.200	100	34.102.200	100	12,42	DIN KOMINFOTIK
1		2 # 02 2 01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Sektoral yang Diolah dan Dianalisis (%)	100	274.530.336			100	95.083.716	25,00		7.051.200	25,00		12.446.800	25,00		8.471.800	25,00		6.132.400	100		34.102.200	100	34.102.200	100	12,42	
				Persentase SDM Statistik yang Memiliki Kompetensi	100				100		0,00			0,00			0,00			100			100			100		100		
		2 # 02 2 01 0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang	1	130.262.436			1	46.994.416	0,00	0,00	4.591.200	0,00	0,00	7.636.800	0,00	0,00	5.861.800	100	1	5.532.400	100	1	23.622.200	1	23.622.200	100	18,13	
		2 # 02 2 01 0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Data)	34	144.267.900			34	48.089.300	23,53	8	2.460.000	23,53	8	4.810.000	23,53	8	2.610.000	29,41	10	600.000	100	34	10.480.000	34	10.480.000	100	7,26	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							11,76		7,42	11,76		13,09	11,76		8,91	64,71		6,45	100		35,87			100	12,42	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			ST	SR	
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN STATISTIK						95.083.716				7.051.200			12.446.800			8.471.800			6.132.400			34.102.200		34.102.200			
			Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Statistik(%)								11,76		7,42	11,76		13,09	11,76		8,91	64,71		6,45	100		35,87			100	12,42	
			Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Statistik								SR		SR	SR		SR	SR		SR	R		SR	ST		SR			ST	SR	
		2 #	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN			141.000.000			47.000.000				5.815.000			820.000			3.495.000			21.122.978			31.252.978		31.252.978		22,17	
	Meningkatnya Keamanan Informasi	2 # 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	Indeks KAMI (Kematangan)	1	141.000.000			1	47.000.000	0,00		5.815.000	0,00		820.000	0,00		3.495.000	1		21.122.978	1		31.252.978	1	31.252.978	100	22,17	DIN KOMINFOTIK
1		2 # 02 2 01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Nilai Tata kelola Keamanan Informasi	1	141.000.000			1	47.000.000	0,00		5.815.000	0,00		820.000	0,00		3.495.000	1		21.122.978	1		31.252.978	1	31.252.978	100	22,17	
		2 # 02 2 01 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi (PD)	34	141.000.000			34	47.000.000	23,53	8	5.815.000	23,53	8	820.000	23,53	8	3.495.000	29,41	10	21.122.978	100	34	31.252.978	34	31.252.978	100,00	22,17	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							23,53		12,37	23,53		1,74	23,53		7,44	29,41		44,94	100		66,50			100	22,17	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PERSANDIAN						47.000.000				5.815.000			820.000			3.495.000			21.122.978			31.252.978		31.252.978			
			Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Persandian (%)								23,53		12,37	23,53		1,74	23,53		7,44	29,41		44,94	100		66,50			100	22,17	
			Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Persandian								SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		S			ST	SR	
		2 #	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN			9.049.676.452		-	5.383.763.665				1.053.827.395			1.469.458.237			1.152.456.254			1.300.142.062			4.975.883.948		4.975.883.948		54,98	
				Hasil Evaluasi Perangkat Daerah	81,20				81,20		0,00			74,16			0,00						74,16			74,16		91,33		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP DINPARBUD	26,47	6.870.354.252			26,47	4.880.475.897	0,00		996.185.595	23,78		1.397.449.037	23,78		1.100.324.454	0,00		1.083.184.765	47,56		4.577.143.851	47,56	4.577.143.851	#####	66,62	DINPAR BUDAYA
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	16,90				16,90		0,00			10,68			10,68			0,00			21,36			21,36		#####		
				Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00				0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		100		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	60				60		0,00			64,12			64,12			0,00			128,24			128,24		#####		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			Indeks Kepuasan Pelayanan Jassa Internal Perangkat	3				3		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
	Meningkatnya Kualitas Layanan			Persentase BMD Perangkat Daerah	100				100		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	2 # 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	45.000.000			100	65.000.000	50,00		3.575.000	33,33		-	16,67		20.339.974	0,00		30.163.768	100,00		54.078.742	100,00	54.078.742	#####	#####	
				Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100				100		50,00			25,00			25,00			0,00			100			100		100		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 # 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan kinerja Perangkat Daerah	14	35.000.000			6	55.000.000	50,00	3	2.330.000	33,33	2	-	16,67	1	16.649.974	0,00	0,00	25.098.768	100	6	44.078.742	6	44.078.742	42,86	125,94	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 # 02 21 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	10.000.000			2	10.000.000	50,00	1	1.245.000	0,00	0,00	-	50,00	1	3.690.000	0,00	0,00	5.065.000	100	2	10.000.000	2	10.000.000	14,29	100,00	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	**2 # 01 22 0000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan keuangan Perangkat daerah yang sesuai standar**	**100**	**4.235.532.700**			**100**	**3.256.477.161**	**25,00**		**625.994.195**	**25,00**		**1.074.394.745**	**25,00**		**698.880.755**	**25,00**		**666.238.013**	**100**		**3.065.507.708**	**100**	**3.065.507.708**	**100**	**72,38**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2 # 01 22 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96	4.210.532.700			32	3.216.477.161	25,00	32	618.934.195	25,00	32	1.069.884.745	25,00	32	693.560.755	25,00	32	651.238.013	100	128	3.033.617.708	128	3.033.617.708	133,33	72,05	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 # 02 22 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	15.000.000			2	30.000.000	50,00	1	1.020.000	0,00	0,00	4.510.000	50,00	1	5.320.000	0,00	0,00	11.040.000	100	2	21.890.000	2	21.890.000	40,00	145,93	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	2 # 03 22 0007	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	18	10.000.000			40	10.000.000	25,00	10	6.040.000	25,00	10	-	25,00	10	-	25,00	10	3.960.000	100	40	10.000.000	40	10.000.000	222,22	100,00	
	Meningkatnya kepatuhan terhadap kelengkapan	**2 # 01 25 0000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap**	**100**	**154.151.000**			**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian			**persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			**persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**60,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	2 # 01 25 0002	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3	9.750.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat	**2 # 01 26 0000**	**Kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah**	**100**	**150.000.000**			**100**	**175.000.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**58.069.711**	**25,00**		**38.118.450**	**25,00**		**64.141.204**	**100**		**160.329.365**	**100**	**160.329.365**	#####	#####	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 # 01 26 0009	Sub kegiatan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	150.000.000			12	175.000.000	25,00	3	-	25,00	3	58.069.711	25,00	3	38.118.450	25,00	3	64.141.204	100	12	160.329.365	12	160.329.365	33,33	106,89	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana	**2 # 01 27 0000**	**Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah**	**5%**	**90.000.000**			**0,50**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 # 01 27 0006	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100	90.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat	**2 # 01 28 0000**	**Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah**	**100,00%**	**1.615.000.000**			**100**	**1.252.639.628**	**25,00**		**358.679.600**	**25,00**		**238.708.381**	**25,00**		**314.970.275**	**25,00**		**284.430.980**	**100**		**1.196.789.236**	**100,00**	**1.196.789.236**	#####	**74,10**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 # 01 28 0001	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.500.000.000			12	1.122.881.568	25,00	3	351.042.800	25,00	3	212.265.200	25,00	3	282.926.385	25,00	3	257.730.400	100	12	1.103.964.785	12	1.103.964.785	100,00	73,60	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 # 01 28 0002	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	70.000.000			12	87.598.350	25,00	3	-	25,00	3	21.461.981	25,00	3	11.498.490	25,00	3	19.868.180	100	12	52.828.651	12	52.828.651	100,00	75,47	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 # 01 28 0004	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	45.000.000			12	42.159.710	25,00	3	7.636.800	25,00	3	4.981.200	25,00	3	20.545.400	25,00	3	6.832.400	100	12	39.995.800	12	39.995.800	100,00	88,88	
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat	**5 01 01 29 0000**	**Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100**	**580.670.552**			**100**	**131.359.108**	**25,00**		**7.936.800**	**25,00**		**26.276.200**	**25,00**		**28.015.000**	**25,00**		**38.210.800**	**100**		**100.438.800**	**100,00**	**100.438.800**	#####	**17,30**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	5 01 01 2 09 0002	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	430.670.552			7	101.359.108	28,57	2	7.936.800	28,57	2	26.276.200	42,86	3	18.015.000	0,00	0,00	19.168.400	100	7	71.396.400	7	71.396.400	87,50	16,58	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 01 01 2 09 0006	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	150.000.000			4	30.000.000	25,00	1	-	25,00	1	-	25,00	1	10.000.000	25,00	1	19.042.400	100	4	29.042.400	4	29.042.400	8,00	19,36	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**27,20**		**20,41**	**18,22**		**28,63**	**25,73**		**21,33**	**13,46**		**29,09**	**100**		**93,78**			**67,81**	**66,62**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**S**	**S**	
2	**Meningkatnya pengembangan budaya**	**2 # 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**indeks pengembangan budaya**	**75,00**	**1.880.996.700**			**83,96**	**310.865.560**	**0,00**		**30.880.000**	**0,00**		**63.958.000**	**0,00**		**25.640.000**	**0,00**		**133.868.297**	**0,00**		**254.346.297**	**0,00**	**254.346.297**	**0,00**	**13,52**	**DIN PARBUDAYA**
	Meningkatnya pemanfaatan budaya			**indeks pemanfaatan budaya**	**60,54**				**93,05**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		**DIN PARBUDAYA**
	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**2 # 02 2 01**	**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Objek Budaya yang**	**100**	**1.770.996.700**			**100**	**79.648.560**	**20,00**		**-**	**20,00**		**8.010.000**	**30,00**		**2.460.000**	**30,00**		**29.069.600**	**100**		**39.539.600**	**100**	**39.539.600**	**100**	**2,23**	
				Persentase Objek Budaya yang	**74,05**				**30,00**		**5,00**			**10,00**			**5,00**			**10,00**			**30,00**			**30,00**		**40,51**		
				Persentase Budaya yang dilestarikan	**100**				**100**		**20,00**			**20,00**			**30,00**			**30,00**			**100**			**100**		**100**		
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2 # 02 2 01 0001	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan	19	790.000.000			8	79.648.560	25,00	2	-	25,00	2	8.010.000	25,00	2	2.460.000	25,00	2	29.069.600	100	8	39.539.600	8	39.539.600	42,11	5,01	
	Meningkatnya Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	**2 # 02 2 02**	**Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Seni yang dilestarikan**	**80,00%**	**110.000.000**			**87,00**	**231.217.000**	**0,00**		**30.880.000**	**0,00**		**55.948.000**	**0,00**		**23.180.000**	**0,00**		**104.798.697**	**0,00**		**214.806.697**	**0,00**	**214.806.697**	**0,00**	**#####**	
				Persentase Kelompok Seni yang Berprestasi	**81,57%**				**75,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**	**#####**	
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2 # 02 2 02 0001	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	4	110.000.000			4	231.217.000	25,00	1	30.880.000	25,00	1	55.948.000	25,00	1	23.180.000	25,00	1	104.798.697	100	4	214.806.697	4,0	214.806.697	100,00	195,28	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**9,93**	**25,00**		**20,57**	**25,00**		**10,03**	**25,00**		**43,06**	**100**		**81,82**			**100**	**13,52**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**ST**	**SR**	
2	**Menigkatnya perlindungan budaya daerah**	**2 # 05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Indeks perlindungan budaya**	**74,43**	**298.325.500**			**74,43**	**192.422.208**	**0,00**		**26.761.800**	**0,00**		**8.051.200**	**0,00**		**26.491.800**	**0,00**		**83.089.000**	**0,00**		**144.393.800**	**0,00**	**144.393.800**	**0,00**	**48,40**	**DIN PARBUDAYA**
	Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat	**2 # 05 2 02**	**Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang**	**85,00**	**298.325.500**			**85,00**	**192.422.208**	**85,00**		**26.761.800**	**0,00**		**8.051.200**	**0,00**		**26.491.800**	**0,00**		**83.089.000**	**85,00**		**144.393.800**	**85,00**	**144.393.800**	**100**	**48,40**	
	Terlaksananya Perlindungan Cagar Budaya	2 # 05 2 02 0001	Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	13	298.325.500			13	192.422.208	23,08	3	26.761.800	30,77	4	8.051.200	23,08	3	26.491.800	23,08	3	83.089.000	100	13	144.393.800	13	144.393.800	100	48,40	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**23,08**		**13,91**	**30,77**		**4,18**	**23,08**		**13,77**	**23,08**		**43,18**	**100**		**75,04**			**#####**	**48,40**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**S**			**ST**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN						**5.383.763.665**			**1.053.827.395**			**1.469.458.237**			**1.152.456.254**			**1.300.142.062**			**4.975.883.948**		**4.975.883.948**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan (%)							**25,09**		**19,57**	**24,66**		**27,29**	**24,60**		**21,41**	**20,51**		**24,15**	**100**		**92,42**			**89,27**	**54,98**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**T**	**R**	
		2 23	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN**			**6.441.628.200**		**-**		**4.244.880.720**			**907.179.343**			**1.374.313.699**			**884.634.001**			**1.032.208.414**			**4.106.032.087**		**4.106.032.087**		**63,74**	
1	**MENINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**5 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Nilai kinerja perencanaan perangkat daerah**	**24,00**	**5.991.001.021**			**24,00**	**4.138.997.690**	**0,00**		**855.296.878**	**24,02**		**1.357.168.699**	**0,00**		**862.677.526**	**0,00**		**923.817.119**	**24,02**		**4.005.475.222**	**24,02**	**4.005.475.222**	**#####**	**66,86**	**DKP**
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	**11,79**				**11,79**		**0,00**			**10,70**			**0,00**			**0,00**			**10,70**			**10,70**		**90,75**		
				Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	**0%**				**0%**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	**65,00**				**65,00**		**0,00**			**67,76**			**0,00**			**0,00**			**67,76**			**67,76**		**#####**		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat	**3**				**3**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase BMD Perangkat Daerah	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		5 01 01 2 01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai**	**100**	**50.000.000**			**100**	**28.484.650**	**50,00**		**7.365.000**	**33,33**		**13.911.997**	**16,67**		**1.230.000**	**0,00**		**4.895.000**	**100**		**27.401.997**	**100**	**27.401.997**	**100**	**54,80**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	**100**				**100**		**33,33**			**33,33**			**33,33**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
		5 01 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang Disusun	6	30.000.000			6	17.655.500	50,00	3	4.710.000	33,33	2	10.092.070	16,67	1	-	0,00	0,00	2.090.000	100	6	16.892.070	6	16.892.070	100	56,31	
		5 01 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	6	20.000.000			6	10.829.150	33,33	2	2.655.000	33,33	2	3.819.927	33,33	2	1.230.000	0,00	0,00	2.805.000	100	6	10.509.927	6	10.509.927	100	52,55	
		5 01 01 2 02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar**	**100**	**4.030.994.521**			**100**	**2.929.636.258**	**25,00**		**545.900.432**	**25,00**		**1.125.930.266**	**25,00**		**617.963.874**	**25,00**		**588.482.550**	**100**		**2.878.277.122**	**100**	**2.878.277.122**	**100**	**71,40**	
		5 01 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	4.004.563.021			31	2.920.148.186	25,00	31	541.490.432	25,00	31	1.124.160.266	25,00	31	617.963.874	25,00	31	579.065.050	100	31	2.862.679.622	31	2.862.679.622	33,33	71,49	
		5 01 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36	20.750.500			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	9.417.500	0,00	0,00	9.417.500	0	9.417.500	0,00	45,38	
		5 01 01 2 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan	126	5.681.000			42	9.488.072	23,81	10	4.410.000	26,19	11	1.770.000	23,81	10	-	26,19	11	-	100	42	6.180.000	42	6.180.000	33,33	108,78	
		5 01 01 2 05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**100**	**210.550.000**			**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
				Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	**50,00**				**19,35**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		5 01 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	6	100.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		5 01 01 2 05 03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	33	65.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		5 01 01 2 05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	45.550.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		5 01 01 2 06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah**	**100**	**234.000.000**			**100**	**112.509.219**	**25,00**	**0,00**	**8.300.000**	**25,00**		**25.273.020**	**25,00**		**7.640.000**	**25,00**		**54.062.250**	**100**		**95.275.270**	**100**	**95.275.270**	**100**	**40,72**	
		5 01 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	125.000.000			12	112.509.219	25,00	3	8.300.000	25,00	3	25.273.020	25,00	3	7.640.000	25,00	3	54.062.250	100	12	95.275.270	12,00	95.275.270	33,33	76,22	
		5 01 01 2 06 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	59.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		5 01 01 2 06 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	36	50.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		5 01 01 2 06	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di**	**100**	**1.030.436.000**			**100**	**954.771.255**	**25,00**		**280.394.646**	**25,00**		**186.014.816**	**25,00**		**222.812.952**	**25,00**		**249.333.119**	**100**		**938.555.533**	**100**	**938.555.533**	**100**	**91,08**	
		5 01 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	36	765.000.000			12	673.089.811	25,00	3	214.593.600	25,00	3	126.466.800	25,00	3	155.606.800	25,00	3	170.523.780	100	12	667.190.980	12	667.190.980	33,33	87,21	
		5 01 01 2 06 10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	75.436.000			12	127.607.076	25,00	3	19.980.246	25,00	3	31.700.816	25,00	3	31.835.352	25,00	3	35.660.439	100	12	119.176.853	12	119.176.853	33,33	157,98	
		5 01 01 2 06 11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	36	190.000.000			12	154.074.368	25,00	3	45.820.800	25,00	3	27.847.200	25,00	3	35.370.800	25,00	3	43.148.900	100	12	152.187.700	12	152.187.700	33,33	80,10	
		5 01 01 2 07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah**	**3,10**	**145.500.000**			**3,10**	**330.000**	**0,17**	**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**			**0,17**		**-**	**0,17**	**-**	**5,56**	**0,00**	
		5 01 01 2 07 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mabel	Jumlah unit mabel yang disediakan	3	100.000.000			1	330.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		5 01 01 2 07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15	45.500.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		5 01 01 2 09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**5,99**	**289.520.500**			**5,99**	**113.266.308**	**1,50**		**13.336.800**	**1,50**		**6.038.600**	**1,50**		**13.030.700**	**1,50**		**27.044.200**	**5,99**		**65.965.300**	**5,99**	**65.965.300**	#####	**22,78**	
		5 01 01 2 09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	169.520.500			7	101.936.308	28,57	2	13.336.800	28,57	2	6.038.600	28,57	2	13.030.700	14,29	1	27.044.200	100	7	59.450.300	7,00	59.450.300	33,33	35,07	
		5 01 01 2 09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	20.000.000			20	11.330.000	0,00	0,00	-	50,00	10	-	0,00	0,00		50,00	10	6.515.000	100	20	6.515.000	20,00	6.515.000	33,33	32,58	
		5 01 01 2 09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2	100.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata rata capaian kinerja (%)							**26,07**		**20,66**	**29,64**		**32,79**	**22,74**		**20,84**	**21,55**		**22,32**	**100**		**96,77**			**24,56**	**66,86**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**S**	
2	**MENINGKATNYA LITERASI DAN KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT**	**2 # 02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat**	**62,14**	**450.627.179**			**62,14**	**105.883.030**	**0,00**		**13.145.265**	**0,00**		**11.110.000**	**0,00**		**1.230.000**	**0,00**		**75.071.600**	**0,00**		**100.556.865**	**0,00**	**100.556.865**	**0,00**	**22,31**	**DKP**
				Tingkat Kepuasan Pemustaka	**56,67%**				**56,67%**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan yang Berkualifikasi Sesuai Standar	**66,67%**				**66,67%**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Satuan Pendidikan yang dibina	**47,37%**				**47,37%**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Masyarakat yang Gemar Membaca	**35,28**				**35,28**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		2 # 02	**Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase Jenis Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan**	**71,00%**	**341.095.679**			**71,00%**	**60.977.030**	**0,00**		**13.145.265**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000**	**0,00**		**1.230.000**	**0,00**		**44.169.570**	**0,00**		**59.754.835**	**0,00**	**59.754.835**	**0,00**	**17,52**	
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	**3,75 : 1**				**3,75 : 1**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Pembinaan Perpustakaan Khusus	**33,33%**				**33,33%**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		2 # 02 2 01	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1	60.000.000		-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 02 2 02	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten /	1	81.306.000			1	52.977.030	0,00	0,00	13.145.265	100	1	410.000	0,00	0,00	1.230.000	0,00	0,00	37.144.570	100	1	51.929.835	1,00	51.929.835	100,00	63,87	
		2 # 02 2 04	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	117	25.816.889			117	8.000.000	26,50	31	-	26,50	31	800.000	26,50	31	-	20,51	24	7.025.000	100	117	7.825.000	117,00	7.825.000	100,00	30,31	
		2 # 02 2 05	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional	5	14.500.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 02 2 06	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	25	29.472.790			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 02 2 09	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan Perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	19.751	130.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		2 # 02	**Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Satuan Layanan Pendidikan yang Menerapkan Kegemaran Membaca**	**32,61%**	**109.531.500**			**32,61%**	**44.906.000**	**0,00**		-	**0,00**		**9.900.000**	**0,00**		-	**0,00**		**30.902.030**	**0,00**		**40.802.030**	**0,00**	**40.802.030**	**0,00**	**37,25**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Penggiat Literasi Dasar Baca Tulis dan Literasi Finansial yang	1,79%				1,79%		0,00			0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	-	0,00		
				Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan yang	29,72%				29,72%		0,00			0,00			0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	-	0,00		
		2 # 02 2 02 01	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	40	13.769.000			40	7.506.000	0,00	0,00	-	75,00	30	2.400.000	25,00	10	-	0,00	0,00	5.050.000	100	40	7.450.000	40,00	7.450.000	100,00	54,11	
		2 # 02 2 02 02	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat	24	77.283.000			24	37.400.000	0,00	0,00	-	50,00	12	7.500.000	50,00	12	-	0,00	0,00	25.852.030	100	24	33.352.030	24,00	33.352.030	100,00	43,16	
		2 # 02 2 02 03	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten / Kota yang	15	18.479.500			15	-	80,00	12	-	20,00	3	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	15	-	15,00	-	100,00	0,00	
				Rata rata capaian kinerja (%)	21,30		12,41		54,30		10,49			20,30		1,16	4,10		70,90	100		94,97			55,56	22,31	
				Predikat Kinerja	SR		SR		R		SR			SR		SR	SR		S	ST		ST			R	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PERPUSTAKAAN						4.138.997.690			855.296.878			1.357.168.699			862.677.526			923.817.119			4.005.475.222		4.005.475.222			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Perpustakaan (%)	10,65		20,66		27,15		32,79			10,15		20,84	2,05		22,32	100		96,77			27,78	63,74	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Perpustakaan	SR		SR		SR		SR			SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	R	
		2 24	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN			355.176.000				155.915.370			38.737.200			6.035.000			20.726.475			33.319.695			152.290.855		152.290.855		42,88	
1	MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KEARSIPAN DAERAH	2 # 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	45,00%	355.176.000			45,00%	155.915.370	0,00	0,00	38.737.200	0,00		6.035.000	0,00		20.726.475	0,00		33.319.695	0,00		152.290.855	0,00	152.290.855	0,00	42,88	DKP
				Persentase Nilai Ketertiban Pelaksanaan	55,00%				55,00%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Persentase Nilai Aspek Pengelolaan	35,50%				35,50%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Persentase Nilai Aspek Prasarana dan Sarana Keasripan	40,00%				40,00%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Persentase Nilai Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	48,35%				48,35%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Persentase Nilai Aspek Tenaga Kearsipan	38,35%				38,35%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Persentase Nilai Aspek Program Kearsipan	45,35%				45,35%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Persentase Nilai Aspek Kelembagaan	45,35%				45,35%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
		2 # 02 2 01	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis Daerah Yang Terpelihara baik	55,00%	169.276.000			55,00%	57.587.860	0,00		3.240.000	0,00		3.165.000	0,00		16.381.475	0,00		33.319.695	0,00		56.106.170	0,00	56.106.170	0,00	33,14	
				Persentase Arsip Dinamis inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya dibawah 10 th yang	55,00%						0,00			0,00			0,00			0,00		-	0,00		-	0,00	-	0,00		
		2 # 02 2 01 01	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan	1500	34.000.000			1500	17.220.360	0,00	0,00	1.190.000	66,67	1000	1.190.000	3,33	50	-	30,00	450	14.124.695	100	1500	16.504.695	1500	16.504.695	100	48,54	
		2 # 02 2 01 02	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan	1500	100.276.000			1500	18.917.500	0,67	10	1.230.000	66,00	990	-	3,33	50	5.704.095	30,00	450	11.740.000	100	1500	18.674.095	1500	18.674.095	100	18,62	
		2 # 02 2 01 03	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10	35.000.000			10	21.450.000	20,00	2	820.000	30,00	3	1.975.000	20,00	2	10.677.380	30,00	3	7.455.000	100	10	20.927.380	10	20.927.380	100	59,79	
		2 # 02 2 02	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah	Persentase Ruang Depot Arsip Sesuai	35,50%	75.000.000			35,50%	38.327.510	0,00		7.675.000	0,00		2.050.000	0,00		820.000	0,00		-	0,00		37.888.485	0,00	37.888.485	0,00	50,52	
				Persentase Sarana Depot Arsip Sessui	40,35%				40,35%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Persentase Sarana Arsip AKtif yang	40,00%				40,00%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Persentase Sarana Arsip Inaktif yang Sesuai Standar	45,00%				45,00%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Persentase Arsip Statis Prangkat Daerah Yang diakusisi	38,15%				38,15%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
				Persentase Arsip Statis Prangkat Daerah Yang	40,35%				40,35%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Arsip Statis Daerah Yang Dialih Mediakan	**35,80%**				**35,80%**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		2 # 02 2 02 02	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	100	75.000.000			100	38.327.510	32,00	32	7.675.000	20,00	20	2.050.000	20,00	20	820.000	28,00	28	27.343.485	100	100	37.888.485	100	37.888.485	100	50,52	
		2 # 02 2 03	**Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah, LKD, Kelurahan dan Desa yang Menerapkan SIKD dan JIKN**	**35,55%**	**110.900.000**			**35,55%**	**60.000.000**	**0,00**		**27.822.200**	**0,00**		**820.000**	**0,00**		**3.525.000**	**0,00**			**0,00**		**58.296.200**	**0,00**	**58.296.200**	**0,00**	**52,57**	
				Persentase Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan yang	**38,15%**				**38,15%**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Tenaga Kearsipan PD,LKD, Desa dan Kelurahan yang Berkompetensi	**38,35%**				**38,35%**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		2 # 02 2 03 01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	250	56.900.000			250	28.000.000	22,00	55	-	22,00	55	820.000	22,00	55	3.525.000	34,00	85	23.235.000	100	250	27.580.000	250	27.580.000	100	48,47	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	1	54.000.000			1	32.000.000	100	1	27.822.200	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2.894.000	100	1	30.716.200	1,00	30.716.200	100,00	56,88	
				Rata Rata Capaian Kinerja (%)	**29,11**		**24,85**		**34,11**		**3,87**			**11,44**			**13,29**			**25,33**			**100**		**63,38**			#####	**42,88**	
				Predikat Kinerja	**SR**		**SR**		**SR**		**SR**			**SR**			**SR**			**SR**			**ST**		**R**			**ST**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KEARSIPAN		**155.915.370**				**38.737.200**					**6.035.000**			**20.726.475**			**33.319.695**			**152.290.855**		**152.290.855**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Kerasipan (%)	**29,11**		**24,85**		**34,11**		**3,87**			**11,44**			**13,29**			**25,33**			**100**		**97,68**			#####	**42,88**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Kearsipan	**SR**		**SR**		**SR**		**SR**			**SR**			**SR**			**SR**			**ST**		**ST**			**ST**	**SR**	
		3	**URUSAN PEMERINTAH PILIHAN**																											
		3 #	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**28.879.810.200**				**9.599.750.501**			**941.494.180**			**4.639.056.724**			**2.453.095.670**			**1.331.285.299**			**9.383.731.873**		**9.383.731.873**		**32,49**	
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan**	**3 # 01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah**	**28,65**	**20.780.782.200**		-	**28,25**	**4.960.751.246**	**0,00**		**829.409.300**	**25,86**		**1.751.507.204**	**0,00**		**1.109.161.731**	**0,00**		**1.128.544.299**	**25,86**		**4.837.422.534**	**25,86**	**4.837.422.534**	**0,00**	**23,28**	**DINPERKAN**
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	**11,05**				**12,50**		**0,00**			**10,36**			**0,00**			**0,00**			**10,36**			**10,36**		**0,00**		
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			**Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**72,20**				**72,00**		**0,00**			**62,59**			**0,00**			**0,00**			**62,59**			**62,59**		**0,00**		
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**4,25**				**80,13**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Efektivitas Organisasi dan Tata Laksana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik**	**60,85**				**64,25**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		3 # 01 2 01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai**	**100**	**405.000.000**			**100**	**45.669.768**	**50,00**		**9.209.000**	**25,00**		**4.970.000**	**25,00**		**24.084.448**	**0,00**		**4.354.500**	**100**		**42.617.948**	**100**	**42.617.948**	**100**	**10,52**	
				Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	**100**				**100**		**50,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 # 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	24	255.000.000			8	38.076.768	50,00	4	5.109.000	25,00	2	3.740.000	25,00	2	24.084.448	0,00	0,00	3.704.500	100	8	36.637.948	8	36.637.948	33,33	14,37	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3 # 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	150.000.000			4	7.593.000	50,00	2	4.100.000	25,00	1	1.230.000	25,00	1	-	0,00	0,00	650.000	100	4	5.980.000	4	5.980.000	33,33	3,99	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat	**3 # 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar (%)**	**100**	**13.864.609.000**		-	**100**	**3.765.953.545**	**25,00**		**579.810.340**	**25,00**		**1.463.405.278**	**25,00**		**873.778.869**	**25,00**		**772.972.999**	**100**		**3.689.967.486**	**100**	**3.689.967.486**	**100**	**26,61**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3 # 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	111	13.804.609.000			37	3.762.143.545	25,00	37	578.580.340	25,00	37	1.463.405.278	25,00	37	872.143.869	25,00	37	772.027.999	100	37	3.686.157.486	37	3.686.157.486	33,33	26,70	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	3 # 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	30.000.000			12	3.810.000	25,00	3	1.230.000	25,00	3	-	25,00	3	1.635.000	25,00	3	945.000	100	12	3.810.000	12	3.810.000	33,33	12,70	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tiriulana	3 # 01 2 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	126	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan	**# 01 2 05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap (%)**	**100**	**346.250.000**			**100**	**7.455.000**	**25,00**		**3.840.000**	**25,00**		**1.477.750**	**25,00**		**1.640.000**	**25,00**		**450.000**	**100**		**7.407.750**	**100**	**7.407.750**	**100**	**2,14**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)**	**32,43**				**10,81**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	# 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	94.250.000			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	# 00 1 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33	37.500.000			12	7.455.000	25,00	3	3.840.000	25,00	3	1.477.750	25,00	3	1.640.000	25,00	3	450.000	100	12	7.407.750	12	7.407.750	36,36	19,75	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	# 01 2 05 0005	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	214.500.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Layanan Jasa Administrasi Umum Perangkat	**3 # 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**82,50**	**1.055.000.000**			**82,50**	**226.965.109**	**20,63**		**46.890.693**	**20,63**		**31.122.860**	**20,63**		**28.243.712**	**20,63**		**109.044.329**	**82,50**		**215.301.594**	**82,50**	**215.301.594**	**#####**	**20,41**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 # 01 2 06 0005	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	965.000.000			12	208.920.109	25,00	3	40.472.793	25,00	3	26.743.460	25,00	3	25.140.812	25,00	3	105.041.429	100	12	197.398.494	12	197.398.494	33,33	20,46	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 # 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	36	37.500.000			12	4.995.000	25,00	3	3.315.000	25,00	3	1.230.000	25,00	3	-	25,00	3	450.000	100	12	4.995.000	12	4.995.000	33,33	13,32	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	3 # 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	52.500.000			12	13.050.000	25,00	3	3.102.900	25,00	3	3.149.400	25,00	3	3.102.900	25,00	3	3.552.900	100	12	12.908.100	12	12.908.100	33,33	24,59	
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana	**3 # 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah**	**72**	**815.000.000**		**-**	**71,86**	**24.143.766**	**0,00**		**-**	**0,00**		**5.050.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**23.850.000**	**0,00**	**23.850.000**	**0,00**	**2,93**	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 # 01 2 07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan (Unit)	2	500.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Mebel	3 # 01 2 07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	216	165.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	3 # 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	150.000.000			5	24.143.766	0,00	0,00	-	20,00	1	5.050.000	0,00	0,00	-	80,00	4	18.800.000	100	5	23.850.000	5	23.850.000	33,33		
	Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat	**3 # 01 2 08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah (%)**	**81,78**	**3.398.923.200**		**-**	**81,78**	**753.583.484**	**20,45**		**174.716.848**	**20,45**		**221.390.908**	**20,45**		**163.835.228**	**20,45**		**169.795.048**	**81,78**		**729.738.032**	**81,78**	**729.738.032**	**100**	**21,47**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 # 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	2.770.000.000			12	622.083.314	25,00	3	140.045.100	25,00	3	195.375.600	25,00	3	141.373.200	25,00	3	136.883.100	100	12	613.677.000	12	613.677.000	33,33	22,15	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 # 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	253.923.200			12	69.249.681	25,00	3	12.510.348	25,00	3	10.541.708	25,00	3	10.438.428	25,00	3	21.947.148	100	12	55.437.632	12	55.437.632	33,33	21,83	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 # 01 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	375.000.000			12	62.250.489	25,00	3	22.161.400	25,00	3	15.473.600	25,00	3	12.023.600	25,00	3	10.964.800	100	12	60.623.400	12	60.623.400	33,33	16,17	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	**3 # 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara (%)**	**80,00**	**896.000.000**		-	**80,00**	**136.980.574**	**20,00**		**14.942.419**	**20,00**		**24.090.408**	**20,00**		**17.579.474**	**20,00**		**71.927.423**	**80,00**		**128.539.724**	**80,00**	**128.539.724**	**100**	**14,35**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	3 # 01 2 09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	541.000.000			26	122.320.574	15,38	4	14.942.419	15,38	4	24.090.408	30,77	8	17.579.474	38,46	10	58.077.523	100	26	114.689.824	26	114.689.824	92,86	21,20	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 # 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	38	135.000.000			38	14.660.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	13.849.900	0,00	0,00	13.849.900	0,00	13.849.900	0,00	10,26	
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3 # 01 2 09 0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	70.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 # 01 2 09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	150.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**22,69**		**16,72**	**20,69**		**35,31**	**20,38**		**22,36**	**22,90**		**22,75**	**100**		**97,51**			**33,06**	**23,28**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana**	**3 # 03**	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap**	**72,00**	**4.068.028.000**			**24,00**	**3.781.144.894**	**0,00**		**36.268.100**	**0,00**		**2.789.506.000**	**0,00**		**819.053.400**	**0,00**		**78.987.950**	**0,00**		**3.723.815.450**	**0,00**	**3.723.815.450**	**0,00**	**91,54**	**DINPERKAN**
	Meningkatnya Pelayanan Perikanan Tangkap			**Persentase Nelayan yang Dilayani (%)**	**83,00**				**82,12**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku Perikanan Tangkap			**Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih (%)**	**3,60**				**1,20**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Data Perikanan Tangkap yang valid	**3 # 03 2 01**	**Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah**	**Data Valid Perikanan Tangkap (Dokumen)**	**3**	**1.863.028.000**			**1**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Meningkatnya Prasarana Perikanan Tangkap			**Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Tangkap (%)**	**7,65**				**2,55**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Sarana Perikanan Tangkap			**Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan**	**64,35**				**21,45**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu	3 # 03 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang	3	120.000.000			0	-	0,00		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3 # 03 2 01 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3	1.068.028.000			0	-	0,00		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan	3 # 03 2 01 0003	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan	6	675.000.000			0	-	0,00		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kompetensi Nelayan	**3 # 03 2 02**	**Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan**	**3,60**	**1.575.000.000**		-	**1,20**	**3.699.765.000**	**0,00**		**21.045.000**	**0,00**		**2.762.925.600**	**0,00**		**800.260.000**	**0,00**		**62.132.250**	**0,00**		**3.646.362.850**	**0,00**	**3.646.362.850**	**0,00**	**#####**	
	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Perikanan Tangkap			**Persentase KUB yang Terbentuk (%)**	**2,30**				**0,77**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Perlindungan Nelayan			**Persentase KUB yang Dibina (%)**	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan/ Pembiayaan, Tanggung Jawab (%)	**0,03**				**0,03**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	3 # 03 2 02 0001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (orang)	150	975.000.000			50	3.687.555.000	0,00	0	19.125.000	100	50	2.757.805.600	0,00	0,00	795.780.000	0,00	0,00	61.682.250	100	50	3.634.392.850	50	3.634.392.850	33,33	372,76	
	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	3 # 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	9	225.000.000			3	12.210.000	33,33	1	1.920.000	33,33	1	5.120.000	33,33	1	4.480.000	0,00	0,00	450.000	100	3	11.970.000	3	11.970.000	33,33	5,32	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,	3 # 03 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	15	375.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00		
	Meningkatnya Layanan Perizinan/ Operasional	**3 # 03 2 03**	**Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Sarana dan Prasarana TPI yang Terpenuhi (%)**	**100**	**390.000.000**			**100**	**81.379.894**	**25,00**		**15.223.100**	**25,00**		**26.580.400**	**25,00**		**18.793.400**	**25,00**		**16.855.700**	**100**		**77.452.600**	**100**	**77.452.600**	**100**	**19,86**	
	Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 # 03 2 03 0001	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Dokumen)	1	90.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat	3 # 03 2 03 0002	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	36	300.000.000			12	81.379.894	25,00	3	15.223.100	25,00	3	26.580.400	25,00	3	18.793.400	25,00	3	16.855.700	100	12	77.452.600	0	77.452.600	0,00		
	Meningkatnya Perlindungan Nelayan	**3 # 03 2 04**	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan**	**Persentase Nelayan Kecil yang Memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (%)**	**0,45**	**120.000.000**			**0,15**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		
	Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	3 # 03 2 04 0002	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	30	120.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Perlindungan Nelayan	**3 # 03 2 06**	**Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan**	**Persentase Kapal Perikanan yang Memiliki Buku Kapal Perikanan (%)**	**0,45**	**120.000.000**			**0,15**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	3 # 03 2 06 0002	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	30	120.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**11,67**				**31,67**		**11,67**		**0,96**	**31,67**		**73,77**	**11,67**		**21,66**	**5,00**		**2,09**	**100**		**98,48**		**98,48**	**13,33**	**91,54**	
				Predikat Kinerja	**SR**				**SR**		**SR**		**SR**	**SR**		**S**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**		**ST**	**SR**	**ST**	
3	**Meningkatnya Sarana dan prasarana Perikanan**	**3 # 04**	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan (%)**	**28,86**	**2.391.000.000**			**9,62**	**753.040.361**	**0,00**		**62.716.780**	**0,00**		**57.943.520**	**0,00**		**490.785.539**	**0,00**		**122.253.050**	**0,00**		**733.698.889**	**0,00**	**733.698.889**	**0,00**	**30,69**	**DINPERKAN**
	Meningkatnya Pelayanan Perikanan			**Persentase Pembudidaya yang Dilayani (%)**	**83,00**				**90,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku Perikanan			**Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih (%)**	**76,26**																								
		3 # 04 2 01	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah**	**Prosentase Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Izin Usaha Budidaya Perikanan (%)**	**57,69**	**76.000.000**			**19,23**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		3 # 04 2 01 0002	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan berusaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan /atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Insentif, dan Insentif, serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga	9	76.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kompetensi Pembudidaya Ikan	**3 # 04 2 02**	**Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan**	**50,85**	**505.000.000**		**-**	**16,95**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Perikanan Budidaya			**Persentase POKDAKAN yang Terbentuk (%)**	**15,25**				**5,08**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase POKDAKAN yang Dibina (%)	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase POKDAKAN yang Naik	**5,08**				**1,69**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**	-	**0,00**		
	Meningkatnya Perlindungan Pembudidaya Ikan			**Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan**	**5,08**				**5,08**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	3 # 04 2 02 0001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan	3	85.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3 # 04 2 02 0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	9	90.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,	3 # 04 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	9	105.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 # 04 2 02 0004	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	15	225.000.000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Perlindungan Pembudidaya Ikan	**3 # 04 2 03**	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Persentase Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Tanda Daftar Pencatatan Pembudidayaan Ikan Kecil (%)**	**2,88**	**70.000.000**			**0,96**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi	3 # 04 2 03 0002	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan	15	70.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Data Perikanan Budidaya yang	**3 # 04 2 04**	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Data Valid Perikanan Budidaya (Dokumen)**	**12**	**2.245.000.000**			**4**	**753.040.361**	**0,00**		**62.716.780**	**0,00**		**57.943.520**	**0,00**		**490.785.539**	**0,00**		**122.253.050**	**0,00**		**733.698.889**	**0,00**	**733.698.889**	**0,00**	**32,68**	
	Meningkatnya Prasarana Perikanan Budidaya			**Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Prasarana**	**20,34**				**6,78**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Sarana Perikanan Budidaya			**Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Sarana**	**9,66**				**3,22**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Perikanan			**Persentase pembudidaya ikan yang Dibina (%)**	**5**				**2**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Kompetensi Pembudidaya Ikan			**Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan**	**8,47**				**8,47**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 # 04 2 04 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	9	85.000.000			0	-	0,00		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 # 04 2 04 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	21	1.725.000.000			2	722.590.361	50,00	1	54.356.780	50,00	1	53.653.520	0,00	0,00	481.460.659	0,00	0,00	113.803.050	100	2	703.274.009	2	703.274.009	9,52	40,77	
	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 # 04 2 04 0003	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	6	85.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan	3 # 04 2 04 0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3	85.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	3 # 04 2 04 0005	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	240	90.000.000			80	30.450.000	25,00	20	8.360.000	25,00	20	4.290.000	37,50	30	9.324.880	12,50	10	8.450.000	100	80	30.424.880	80	30.424.880	33,33	33,81	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		
	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	3 # 04 2 04 0006	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang direncanakan, Dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi (Ha)	1	70.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi	3 # 04 2 04 0007	Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	15	105.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**37,50**		**8,33**	**37,50**		**7,69**	**18,75**		**65,17**	**6,25**		**16,23**	**100**		**97,43**			**21,43**	**30,69**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**S**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
4	**Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap**	**3 # 05**	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**	**Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi (%)**	**100**	**675.000.000**		**-**	**100**	**13.010.000**	**25,00**		**6.560.000**	**25,00**		**4.500.000**	**25,00**		**1.050.000**	**0,00**		**900.000**	**75,00**		**13.010.000**	**75,00**	**13.010.000**	**75,00**	**1,93**	**DINPERKAN**
	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Perikanan			**Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidaya ikan yang Diawasi (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**75,00**			**75,00**		**75,00**		
	Meningkatnya Pengawasan Perikanan Tangkap	**3 25 05 2 01**	**Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan**	**Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Taat Aturan (%)**	**100**	**675.000.000**		**-**	**100**	**13.010.000**	**25,00**		**6.560.000**	**25,00**		**4.500.000**	**25,00**		**1.050.000**	**0,00**		**900.000**	**75,00**		**13.010.000**	**75,00**	**13.010.000**	**75,00**	**1,93**	
	Meningkatnya Pengawasan Perikanan			**Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang Taat**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**75,00**			**75,00**		**75,00**		
	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3 25 05 2 01 0001	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan berusaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan /atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Insentif, dan Insentif, serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga	3	95.000.000			1	4.290.000	0,00	0,00	2.880.000	100	1	960.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	450.000	100	1	4.290.000	1	4.290.000	33,33	4,52	
	Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3 25 05 2 01 0002	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		3	580.000.000			1	8.720.000	0,00	0,00	3.680.000	0,00	0,00	3.540.000	100	1	1.050.000	0,00	0,00	450.000	100	1	8.720.000	1	8.720.000	33,33	1,50	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**50,42**	**50,00**		**34,59**	**50,00**		**8,07**	**0,00**		**6,92**	**100**		**100**			**33,33**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**R**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
5	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan**	**3 # 06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan (%)**	**100**	**965.000.000**		**-**	**100**	**91.804.000**	**0,00**		**6.540.000**	**0,00**		**35.600.000**	**0,00**		**33.045.000**	**0,00**		**600.000**	**0,00**		**75.785.000**	**0,00**	**75.785.000**	**0,00**	**7,85**	**DINPERKAN**
	Meningkatnya Data dan Informasi Pengolah dan Pemasar Hasil			**Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (%)**	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Kompetensi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan			**Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih (%)**	**15**				**5**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Perlindungan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	**3 25 06 2 01**	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase Pengolahan Pemasar Hasil Perikanan yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan**	**6**	**165.000.000**			**2**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 25 06 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	3	165.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kompetensi Pengolah dan Pemasar	**3 25 06 2 02**	**Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro**	**Persentase Pengolah dan Pemasar yang Telah Mengikuti Pelatihan (%)**	**0,15**	**455.000.000**		**-**	**0,05**	**91.804.000**	**0,00**		**6.540.000**	**0,00**		**35.600.000**	**0,00**		**33.045.000**	**0,00**		**600.000**	**0,00**		**75.785.000**	**0,00**	**75.785.000**	**0,00**	**16,66**	
	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 25 06 2 02 0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3	455.000.000			1	91.804.000	0,00	0,00	6.540.000	100	1	35.600.000	0,00	0,00	33.045.000	0,00	0,00	600.000	100	1	75.785.000	1	75.785.000	33,33	16,66	
	Meningkatnya Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**3 25 06 2 03**	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase POKLAHSAR yang Mendapatkan Bantuan (%)**	**15**	**345.000.000**		**-**	**5**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	
	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 25 06 2 03 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3	195.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	3 25 06 2 03 0002	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	6	150.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**7,12**	**100**		**38,78**	**0,00**		**36,00**	**0,00**		**0,65**	**100**		**82,55**			**33,33**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**ST**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN						**9.599.750.501**			**941.494.180**			**4.639.056.724**			**2.453.095.670**			**1.331.285.299**			**9.383.731.873**		**9.383.731.873**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Perikanan dan Kelautan (%)							**14,37**		**9,81**	**47,97**		**48,32**	**33,60**		**25,55**	**11,38**		**13,87**	**100**		**97,75**			**26,90**	**32,49**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Perikanan dan Kelautan							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA			**7.578.398.688**		**-**		**5.507.531.655**			**112.297.270**			**1.330.873.133**			**1.256.064.218**			**2.457.435.925**			**5.156.670.546**		**5.156.670.546**		**68,04**	
	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Rata-Rata Lama			**Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)**	**4,74**				**4,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	**2,46**				**2 Hari**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
1	**Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata**	**3 # 02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Indeks Destinasi Pariwisata**	**77,53**	**6.057.649.688**			**77,53**	**4.546.592.174**	**0,00**		**107.677.270**	**0,00**		**1.095.640.633**			**790.715.818**	**0,00**		**2.329.506.423**	**0,00**		**4.323.540.144**	**0,00**	**4.323.540.144**	**0,00**	**71,37**	**DINPAR BUDAYA**
	Meningkatnya pengelolaan daya tarik wisata kabupaten / kota	**3 # 02 2 01**	**Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota**	**Persentase Penilaian Wisatawan terhadap Atraksi Pariwisata**	**100**	**2.232.609.720**			**83,00**	**721.552.206**	**25,00**		**107.677.270**	**25,00**		**366.787.383**	**25,00**		**97.579.880**	**25,00**		**110.527.690**	**100**		**682.572.223**	**100**	**682.572.223**	**100**	**30,57**	
				Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan	**100**				**88,00**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 # 02 2 01 0005	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam daya tarik wisata unggulan Kab/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kab/Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan,berkembang,pemantapan,revitalisasi)	6	1.170.000.000			2	721.552.206	0,00	0,00	107.677.270	50,00	1	366.787.383	50,00	1	97.579.880	0,00		110.527.690	100	2	682.572.223	2	682.572.223	33	58,34	
	terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	**3 # 02 2 02**	**Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota**	**Persentase Prasarana yang Memenuhi**	**100**	**515.000.000**			**77,12**	**515.000.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**412.000.920**	**100**		**412.000.920**	**100**	**412.000.920**	**100**	**80,00**	
				Persentase Sarana yang Memenuhi	**100**			**-**	**54,11**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 # 02 2 02 0004	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasaran yang tersedia dan Terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota	12	515.000.000			4	515.000.000	25,00	1	-	25,00	1		25,00	1	-	25,00	1	412.000.920	100	4	412.000.920	4	412.000.920	33,33	80,00	
	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**3 # 02 2 03**	**Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar**	**77,12**	**3.310.039.968**			**100**	**3.310.039.968**	**0,00**		**-**	**0,00**		**728.853.250**	**0,00**		**693.135.938**	**0,00**		**1.806.977.813**	**0,00**		**3.228.967.001**	**0,00**	**3.228.967.001**	**0,00**	**97,55**	
				Persentase Sarana yang Memenuhi	**54,11**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	3 # 0 2 2 0 3 0004	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Bangka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	100	2.992.788.968			50	2.992.788.968	0,00	0,00		40,00	20	728.853.250	50,00	25	546.639.938	10,00	5	1.690.782.813	100	50	2.966.276.001	50	2.966.276.001	50,00	99,11	
		3 # 0 2 2 0 3 0006	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota	9	317.251.000			3	317.251.000	0,00	0,00		33,33	1		66,67	2	146.496.000	0,00	0,00	116.195.000	100	3	262.691.000	3	262.691.000	33,33	82,80	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							6,25		2,37	37,08		24,10	47,92		17,39	8,75		51,24	100		95,09			37,50	71,37	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		R	ST		ST			SR	S	
3	**Meningkatnya pemasaran pariwisata**	**3 # 0 3**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Indeks Pemasaran Pariwisata**	**76,87**	**660.000.000**			**63,51**	**94.616.045**	**0,00**		**4.620.000**	**0,00**		**20.548.000**			**25.393.000**	**0,00**		**31.533.133**	**0,00**		**82.094.133**	**0,00**	**82.094.133**	**0,00**	**12,44**	**DINPAR BUDAYA**
	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	**3 # 0 3 2 01**	**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota**	**Persentase Ketertarikan atas**	**90,00**	**660.000.000**			**79.93**	**94.616.045**	**30,00**		**4.620.000**	**35,00**		**20.548.000**	**10,00**		**25.393.000**	**4,43**		**31.533.133**	**79,43**		**82.094.133**	**79,43**	**82.094.133**	**79,43**	**12,44**	
				Persentase Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif	**100**				**75,05**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Tindakan atas Produk Wisata	**100**				**75,63**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Bangka	3 # 0 3 2 01 0006	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Bangka	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri	3	660.000.000			2	94.616.045	0,00	0,00	4.620.000	50,00	1	20.548.000	0,00	0,00	25.393.000	50,00	1	31.533.133	100	2	82.094.133	2	82.094.133	66,67	12,44	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		4,88	50,00		21,72	0,00		20,94	50,00		33,33	100		86,77			66,67	12,44	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		T			S	SR	
4	**Meningkatnya kemitraan pariwisata**	**3 # 0 5**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Indeks Kemitraan Pariwisata**	**86,60**	**860.749.000**			**78,36**	**866.323.436**	**0,00**		**-**	**0,00**		**214.684.500**	**0,00**		**439.955.400**	**0,00**		**96.396.369**	**0,00**		**751.036.269**	**0,00**	**751.036.269**	**0,00**	**87,25**	**DINPAR BUDAYA**
	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**3 # 0 5 2 01**	**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Desa Wisata yang Atraktif**	**100**	**860.749.000**			**90,12**	**866.323.436**	**0,00**		**-**	**0,00**		**214.684.500**	**0,00**		**439.955.400**	**90,12**		**96.396.369**	**90,12**		**751.036.269**	**0,00**	**751.036.269**	**0,00**	**87,25**	
				Persentase Peningkatan Kelompok Sadar					**91,67**																					
				Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekonomi	**100**				**80,23**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Peningkatan Serifikat Kompetensi Bidang	**65,00**				**79,77**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3 # 0 5 2 01 0006	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi	30	860.749.000			2	866.323.436	0,00	0,00	-	50,00	1	214.684.500	50,00	1	439.955.400	0,00	0,00	96.396.369	100	2	751.036.269	2	751.036.269	6,67	87,25	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	50,00		24,78	50,00		50,78	0,00		11,13	100		86,69			6,67	87,25	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		R	SR		SR	ST		T			SR	T	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA						5.507.531.655			112.297.270			1.330.873.133			1.256.064.218			2.457.435.925			5.156.670.546		5.156.670.546			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata (%)							2,08		2,04	45,69		24,16	32,64		22,81	19,58		44,62	100		93,63			36,94	68,04	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	S	
		3 #	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN**			**18.049.435.729**				**15.065.807.863**			**289.453.080**			**692.987.180**			**445.047.400**			**11.972.259.245**			**13.399.746.905**		**13.399.746.905**		**74,24**	
1	**Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengunaan Sarana Pertanian**	**3 27 02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Benih/Bibit Unggul**	**100**	**4.181.220.497**			**100**	**465.791.416**	**25,00**		**70.635.800**	**25,00**		**196.598.960**	**25,00**		**83.486.600**	**25,00**		**111.401.045**	**100**		**462.122.405**	**100**	**462.122.405**	**100**	**11,05**	**DIN PANPERTAN**
		3 # 0 2 2 01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Sarana Pertanian**	**9**	**642.074.148**			**3**	**52.244.416**	**0,00**		**11.882.800**	**1**		**15.573.200**	**1**		**13.223.600**	**1**		**11.364.800**	**3**		**52.044.400**	**3**	**52.044.400**	**33,33**	**0,08**	
		3 # 0 2 2 01 0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	9	334.708.180					0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 0 2 2 01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	9	307.365.968			3	52.244.416	0,00	0,00	11.882.800	33,33	1	15.573.200	33,33	1	13.223.600	33,33	1	11.364.800	100	3	52.044.400	3	52.044.400	33,33	16,93	
		3 # 0 2 2 02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Benih/Bibit Unggul Pertanian yang Disediakan (%)**	**100**	**1.479.571.937**			**100**	**150.000.000**	**0,00**		**7.391.000**	**66,67**		**93.857.760**	**33,33**		**3.520.000**	**0,00**		**42.712.245**	**100**		**147.481.005**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
		3 # 0 2 2 02 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6	162.840.000			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 0 2 2 02 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tumbuhan (Dokumen)	6	514.731.937			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		3 # 02 2 02 0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Permurnian	6	802.000.000			3	150.000.000	0,00	0,00	7.391.000	66,67	2	93.857.760	33,33	1	3.520.000	0,00	0,00	42.712.245	100	3	147.481.005	3	147.481.005	50,00	18,39	
		3 # 02 2 03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan yang dilakukan Pengawasan**	**65,00**	**1.075.000.000**			**65,00**	**263.547.000**	**0,00**		**51.362.000**	**0,00**		**87.168.000**	**25,00**		**66.743.000**	**40,00**		**57.324.000**	**65,00**		**262.597.000**	**65,00**	**262.597.000**	**100**	**24,43**	
		3 # 02 2 03 0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,Bahan Pakan/Pakan/Tanaman	36	920.000.000			12	263.547.000	25,00	3	51.362.000	25,00	3	87.168.000	25,00	3	66.743.000	25,00	3	57.324.000	100	12	262.597.000	12	262.597.000	33,33	28,54	
		3 # 02 2 03 0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	36	155.000.000			12		25,00	3	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
		3 # 02 2 05	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Benih/Bibit Ternakyang disediakan**	**100**	**984.574.412**			**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
		3 # 02 2 05 0001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari DaerahKabupaten/Kota	300	744.574.412			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 02 2 05 0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	4,5	240.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**8,33**		**15,16**	**41,67**		**42,21**	**30,56**		**17,92**	**19,44**		**23,92**	**100**		**99,21**			#####	**11,05**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**ST**	**SR**	
2	**Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengunaan Prasarana**	**3 # 03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Penggunaan Sarana**	**100**	**6.065.875.232**			**100**	**13.137.592.799**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**17.425.000**	**0,00**		**11.500.360.000**	**0,00**		**11.517.785.000**	**0,00**	**11.517.785.000**	**0,00**	#####	**DIN PANPERTAN**
		3 # 03 2 02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Penggunaan Sarana**	**100**	**6.065.875.232**			**100**	**13.137.592.799**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**17.425.000**	**0,00**		**11.500.360.000**	**0,00**		**11.517.785.000**	**0,00**	**11.517.785.000**	**0,00**	#####	
		3 # 03 2 02 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi Prasrana Pendukung Pertanian lainnya	3	2.537.592.799			1	2.537.592.799	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		100	1	1.013.360.000	100	1	1.013.360.000	1,00	1.013.360.000	100	39,93	
		3 # 03 2 02 0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	900.000.000			0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 03 2 02 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun,Direhabilitasi	3	452.130.000			41	10.600.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	17.425.000	100	41	10.487.000.000	100	41	10.504.425.000	41	10.504.425.000	#####	#####	
		3 # 03 2 02 0004	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	450.000.000			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 03 2 02 0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	458.477.449			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 03 2 02 0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan	3	305.308.765			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 03 2 02 0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	503.888.770			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 03 2 02 0015	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	458.477.449			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,13**	**100**		**87,54**	**100**		**87,67**			#####	#####	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**	**ST**		**T**			**ST**	**ST**	
3	**Meningkatkan Status Kesehatan**	**3 # 04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)**	**50,00**	**1.755.000.000**			**50,00**	**308.957.664**	**0,00**		**35.929.600**	**0,00**		**82.894.400**	**18,62**		**57.519.400**	**37,18**		**114.884.200**	**55,80**		**291.227.600**	**55,80**	**291.227.600**	#####	**16,59**	**DIN PANPERTAN**
		3 # 04 2 01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah**	**Persentase Pengndalian Penyebaran Wabah dan Penyakit Peternakan**	**100**	**1.405.000.000**			**100**	**308.957.664**	**25,00**		**35.929.600**	**40,25**		**82.894.400**	**18,62**		**57.519.400**	**37,18**		**114.884.200**	**121,05**		**291.227.600**	**121,05**	**291.227.600**	#####	**20,73**	
		3 # 04 2 01 0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12	160.000.000			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3 # 0 4 2 0 1 0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular d dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	1.245.000.000			4	308.957.664	25,00	1	35.929.600	25,00	1	82.894.400	25,00	1	57.519.400	25,00	1	114.884.200	100	4	291.227.600	4	291.227.600	33,33	23,39	
		3 # 0 4 2 0 3	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Laboratorium dan Jasa Medik Venteriner (%)**	**100**	**350.000.000**			**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
		3 # 0 4 2 0 3 0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	36	175.000.000			12		25,00	3	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
		3 # 0 4 2 0 3 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veterinerr	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	36	175.000.000			12		25,00	3	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**11,63**	**25,00**		**26,83**	**25,00**		**18,62**	**25,00**		**37,18**	**100**		**94,26**			**25,00**	**23,39**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
4	**Meningkatkan Pengendalian OPT**	**3 # 0 5**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penurunan Serangan OPT (%)**	**75,00**	**245.000.000**			**0,00**		**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DIN PANPERTAN**
		3 # 0 5 2 0 1	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemanfaatan Tehnologi Pengendalian OPT**	**75,00**	**245.000.000**			**0,00**		**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		3 # 0 5 2 0 1 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	156	909.260.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 0 5 2 0 1 01	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,	20	245.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**	
5	**Meningkatkan Usaha Pertanian yang memiliki izin Usaha**	**3 # 0 6**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Izin Usaha yang memiliki sertifikat (%)**	**100**	**150.000.000**	**0,00**	**-**	**100**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DIN PANPERTAN**
		3 # 0 6 2 0 1	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan,**	**Persentase meningkatnya pengawasan Usaha Petenakan**	**10,00**	**150.000.000**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		3 # 0 6 2 0 1 03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	36	150.000.000					0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**	
6	**Meningkatkan Pemberdayaan Penyuluh**	**3 # 0 7**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Penyuluh Pertanian yang Difsilitasi (%)**	**100**	**5.897.340.000**			**100**	**1.153.465.984**	**25,00**		**182.887.680**	**25,00**		**413.493.820**	**25,00**		**286.616.400**	**25,00**		**245.614.000**	**100**		**1.128.611.900**	**100**	**1.128.611.900**	**100**	**19,14**	**DIN PANPERTAN**
		3 # 0 7 2 0 1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Penyuluh Pertanian yang Difsilitasi (%)**	**100**	**5.897.340.000**			**100**	**1.153.465.984**	**25,00**		**182.887.680**	**25,00**		**413.493.820**	**25,00**		**286.616.400**	**25,00**		**245.614.000**	**100**		**1.128.611.900**	**100**	**1.128.611.900**	**100**	**0,19**	
		3 # 0 7 2 0 1 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	8	4.801.500.000			8	1.153.465.984	25,00	2	182.887.680	25,00	2	413.493.820	25,00	2	286.616.400	25,00	2	245.614.000	100	8	1.128.611.900	8	1.128.611.900	100	23,51	
		3 # 0 7 2 0 1 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan	1204	190.000.000			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 0 7 2 0 1 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	8	605.840.000			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 0 7 2 0 1 0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	6	300.000.000			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**15,86**	**25,00**		**35,85**	**25,00**		**24,85**	**25,00**		**21,29**	**100**		**97,85**			**25,00**	**19,14**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PERTANIAN						**15.065.807.863**			**289.453.080**			**692.987.180**			**445.047.400**			**11.972.259.245**			**13.399.746.905**		**13.399.746.905**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pertanian (%)							**14,58**		**1,92**	**22,92**		**4,60**	**20,14**		**2,95**	**42,36**		**79,47**	**100**		**88,94**			#####	**74,24**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pertanian							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**T**	**ST**		**T**			**ST**	**S**	
		3 #	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**11.642.000.000**				**2.931.995.142**			**476.720.402**			**721.560.948**			**532.864.666**			**1.100.754.110**			**2.831.900.126**		**2.831.900.126**			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya Pelaku Usaha yang memiliki Izin Perdagangan**	**3 # 02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan (%)**	**80,00**	**135.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAKER PERINDAG**
		3 # 02 2 02	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang (%)**	**80,00**	**60.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		3 # 02 2 02 0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3	60.000.000			0	-	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	
		3 # 02 2 05	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkhohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual**	**Persentase pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan Minuman Beralkohol (%)**	**35,00**	**30.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		3 # 02 2 05 0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi	3	30.000.000			0	-	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	
		3 # 02 2 06	**Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat**	**Persentase Fasilitasi Penyimpanan bahan berbahaya (%)**	**40,00**	**45.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		3 # 02 2 06 0002	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pegemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	**3**	45.000.000			0	-	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi**	**3 # 03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana distibusi yang direvitalisasi (%)**	**70**	**9.642.000.000**			**70,00**	**1.952.855.142**	**0,00**	**0,00**	**324.594.402**	**0,00**	**535.108.183**	**0,00**	**355.923.826**	**0,00**	**649.594.729**	**0,00**	**1.865.221.140**	**0,00**	**1.865.221.140**	**0,00**	**19,34**	**DINAKER PERINDAG**
		3 # 03 2 01	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi**	**87,5**	**9.402.000.000**			**62,50**	**1.952.855.142**	**0,00**	**0,00**	**324.594.402**	**0,00**	**535.108.183**	**0,00**	**355.923.826**	**0,00**	**649.594.729**	**0,00**	**1.865.221.140**	**0,00**	**1.865.221.140**	**0,00**	**19,84**	
		3 # 03 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	402.000.000			0,00	-	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00	
		3 # 03 2 01 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3	9.000.000.000			1	1.952.855.142	0,00	0,00	324.594.402	0,00	0,00	535.108.183	100	1	355.923.826	0,00	0,00	649.594.729	100	1	1.865.221.140	1	1.865.221.140	33,33	20,72	
		3 # 03 2 02	**Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat**	**Persentase pembinaan pengelolaan sarana distribusi**	**100**	**240.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		3 # 03 2 02 0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan (Dokumen)	3	240.000.000			0	-	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**16,62**	**0,00**		**27,40**	**100**		**18,23**	**0,00**		**33,26**	**100**		**95,51**			**16,67**	**20,72**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
3	**Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok**	**3 # 04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar (%)**	**100**	**500.000.000**			**90,00**	**923.240.000**	**22,50**		**148.926.000**	**30,00**	**164.202.000**	**0,00**	**162.972.000**	**0,00**	**435.872.000**	**52,50**	**911.972.000**	**52,50**	**911.972.000**	**52,50**	#####	**DINAKER PERINDAG**
		3 # 04 2 02	**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat**	**Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)**	**95,00**	**290.000.000**			**85,00**	**923.240.000**	**22,00**		**148.926.000**	**20,00**	**164.202.000**	**21,25**	**162.972.000**	**21,75**	**435.872.000**	**85,00**	**911.972.000**	**85,00**	**911.972.000**	**89,47**	#####	
		3 # 04 2 02 0001	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku	36	180.000.000			12	35.740.000	25,00	3	2.130.000	25,00	3	11.200.000	25,00	3	9.970.000	25,00	3	10.740.000	100	12	34.040.000	12	34.040.000	33,33	18,91	
		3 # 04 2 02 0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	15	110.000.000			4	887.500.000	25,00	1	146.796.000	25,00	1	153.002.000	25,00	1	153.002.000	25,00	1	425.132.000	100	4	877.932.000	4	877.932.000	26,67	0,00	
		3 # 04 2 03	**Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida (%)**	**80,00**	**210.000.000**			**75,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K			
		3 # 04 2 03 0002	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi (Laporan)	36	105.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
		3 # 04 2 03 0003	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi	36	105.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**16,13**	**25,00**		**17,79**	**25,00**		**17,65**	**25,00**		**47,21**	**100**		**98,78**			**15,00**	#####	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**ST**	
4	**Meningkatnya Pelaku Usaha yang mengikuti Promosi Dagang**	**3 # 05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang (%)**	**100**	**180.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAKER PERINDAG**
		3 # 05 2 01	**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah**	**Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan (%)**	**100**	**180.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		3 # 05 2 01 0003	Sub Kegiatan Pameran Dagai	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	21	180.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**	
5	**Meningkatnya Fasilitasi Promosi terhadap Pelaku Usaha yang menggunakan dan memasarkan Produk Dalam**	**3 # 07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Fasilitasi Promosi terhadap Pelaku usaha yang Menggunakan dan Memasarkan Produk Dalam Negeri (%)**	**75**	**285.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAKER PERINDAG**
		3 # 07 2 01	**Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)**	**75**	**285.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		3 # 07 2 01 0002	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan, dan Jasa	150	285.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**	
6	**Meningkatnya Standarisasi Perlindungan Konsumen**	**3 # 06**	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat standar tera/tera ulang yang dibutuhkan (%)**	**43,13**	**900.000.000**			**31,04**	**55.900.000**	**0,00**	**-**	**3.200.000**	**0,00**		**22.250.765**	**0,00**		**13.968.840**	**0,00**		**15.287.381**	**0,00**		**54.706.986**	**0,00**	**54.706.986**	**0,00**	**6,08**	**DINAKER PERINDAG**
		3 # 06 2 01	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan**	**Persentase UTTP yang ditera/tera ulang (%)**	**94,39**	**900.000.000**			**71,51**	**55.900.000**	**8,24**		**3.200.000**	**4,64**		**22.250.765**	**45,52**		**13.968.840**	**0,00**		**15.287.381**	**58,40**		**54.706.986**	**58,40**	**54.706.986**	**61,87**	**6,08**	
		3 # 06 2 01 0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur, alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	1650	450.000.000			1250	50.000.000	8,24	103	3.200.000	44,64	558	19.425.765	45,52	569	12.168.840	1,60	20	14.437.381	100	1.250	49.231.986	1250	49.231.986	75,76	10,94	
		3 # 06 2 01 0002	Sub Kegiatan Pengawasan /Penyuluhan metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi Legal yang dibina (Orang)	500	450.000.000			500	5.900.000	12,20	61		43,40	217	2.825.000	110,20	551	1.800.000	0,00	0,00	850.000	100	278	5.475.000	278	5.475.000	55,60	1,22	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**10,22**		**5,72**	**44,02**		**39,80**	**77,86**		**24,99**	**0,80**		**27,35**	**100**		**97,87**			**65,68**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**T**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**S**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PERDAGANGAN						**2.931.995.142**			**476.720.402**			**721.560.948**			**532.864.666**			**1.100.754.110**			**2.831.900.126**		**2.831.900.126**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Perdagangan (%)							**11,74**		**16,26**	**23,01**		**24,61**	**67,62**		**18,17**	**8,60**		**37,54**	**100**		**96,59**			**16,22**	**33,85**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Perdagangan							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**S**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
		3 #	**URUSAN PEMERINATAHAN PILIHAN BIDANG**			**1.535.000.000**				**17.357.791.675**			**182.809.206**			**641.320.398**			**4.941.108.870**			**10.772.048.560**			**16.537.287.034**		**16.537.287.034**		#####	
1	**Meningkatnya IKM yang mendapatkan Fasilitasi untuk pengembangan**	**3 # 02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitasi untuk Pengembangan Produk IKM (%)**	**0,80**	**1.280.000.000**			**0,50**	**17.357.791.675**	**0,00**	**0,00**	**182.809.206**	**3,06**	**0,00**	**641.320.398**	**2,96**		**4.941.108.870**	**0,00**	**0,00**	**10.772.048.560**	**6,02**		**16.537.287.034**	**6,02**	**16.537.287.034**	#####	#####	**DINAKER PERINDAG**
		3 # 02 2 01	**Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri**	**30**	**1.280.000.000**			**20,00**	**17.357.791.675**	**0,00**		**182.809.206**	**5,00**	**0,00**	**641.320.398**	**5,00**		**4.941.108.870**	**0,00**	**0,00**	**10.772.048.560**	**10,00**		**16.537.287.034**	**10,00**	**16.537.287.034**	**33,33**	#####	
		3 # 02 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri (Dokumen)	3	130.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		3 # 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan,pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri.	3	90.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 02 2 01 0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat.	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta	3	1.060.000.000			16	17.357.791.675	0,00	0,00	182.809.206	37,50	6	641.320.398	6,25	1	4.941.108.870	56,25	9	10.772.048.560	100	16	16.537.287.034	16	16.537.287.034	533,33	#####	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**1,05**	**37,50**		**3,69**	**6,25**		**28,47**	**18,75**		**62,06**	**100**		**95,27**			#####	#####	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**R**	**ST**		**ST**			**ST**	**ST**	
2	**Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri**	**3 # 03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui SIINAS dan OSS (%)**	**40,00**	**120.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAKER PERINDAG**
		3 # 03 2 01	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)**	**Persentase Penerbitan Pemenuhan komitmen Izin Usaha industri (%)**	**40,00**	**120.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		3 # 03 2 01 0001	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis Fasilitasi Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha	3	60.000.000			**0**	**-**	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 03 2 01 0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkorinisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan	3	60.000.000			**0**	**-**	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**	
3	**Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri nasional**	**3 # 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS (%)**	**20,00**	**135.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAKER PERINDAG**
		3 # 04 02 01	**Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan**	**Persentase Kelengkapan data perusahaan industri yang disampaikan**	**5,00**	**135.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		3 # 04 02 01 0001	Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Insormasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Indsutri	3	45.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		3 # 04 02 01 0002	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam peyampaian data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan industri Lingkup Kabupaten/kota dalam	3	90.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PERINDUSTRIAN						**17.357.791.675**			**182.809.206**			**641.320.398**			**4.941.108.870**			**10.772.048.560**			**16.537.287.034**		**16.537.287.034**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Perindustrian (%)							**0,00**		**1,05**	**37,50**		**3,69**	**6,25**		**28,47**	**6,25**		**62,06**	**100**		**95,27**			**59,26**	#####	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Perindustrian							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**R**	**ST**		**ST**			**R**	**ST**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		4 0	URUSAN PEMERINTAHAN																										
		4 01	SEKRETARIAT DAERAH			264.146.404.000		-		43.329.296.191			4.976.474.550			14.911.764.870			7.327.948.386			14.285.082.969			41.501.270.775		41.501.270.775		15,71	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			**Nilai penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**32**				**30**		**0,00**			**0,00**									**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			**Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	**A(80,50)**				**A (80,00)**		**0,00**			**BB (79,18)**									**BB (79,18)**			**BB (79,18)**		**98,98**		
				% Hasil Temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	**100**				**100**		**0,00**			**100**									**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	**4 01 01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Nilai perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah**	**29,80**	**199.474.200.265**			**29,25**	**38.326.040.659**	**0,00**		**4.862.863.445**	**26,53**		**13.803.666.300**	**0,00**		**6.977.117.798**	**0,00**		**11.336.246.202**	**26,53**		**36.979.893.745**	**26,53**	**36.979.893.745**	**89,03**	**18,54**	**SEKRETARIAT DAERAH**
				Nilai pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	**12,75**				**12,63**		**0,00**			**11,50**			**0,00**			**0,00**			**11,50**			**11,50**		**90,20**		
		4 01 01 2 01	**Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai**	**100**	**2.013.745.266**		-	**100**	**121.343.247**	**33,33**		**24.070.400**	**33,33**		**31.523.600**	**33,33**		**24.965.400**	**0,00**		**30.616.200**	**100**		**111.175.600**	**100**	**111.175.600**	**100**	**5,52**	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	**100**				**100**		**33,33**			**33,33**			**33,33**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	4 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dok)	18	309.806.964			6	8.430.000	33,33	2	1.330.000	33,33	2	920.000	33,33	2	-	0,00	0,00	1.680.000	100	6	3.930.000	6,00	3.930.000	33,33	1,27	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	4 01 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	12	309.806.964			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	4 01 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dok)	12	1.084.324.374			4	105.813.247	25,00	1	21.410.400	25,00	1	28.353.600	50,00	2	24.965.400	0,00	0,00	28.486.200	100	4	103.215.600	4,00	103.215.600	33,33	9,52	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	4 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (lap)	36	309.806.964			12	7.100.000	33,33	4	1.330.000	33,33	4	2.250.000	33,33	4	-	0,00	0,00	450.000	100	12	4.030.000	12,00	4.030.000	33,33	1,30	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI (%)**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	**4 01 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)**	**100**	**64.135.028.042**		-	**100**	**12.779.734.187**	**25,00**		**626.926.594**	**25,00**		**6.096.630.877**	**25,00**		**3.059.748.568**	**25,00**		**2.551.641.891**	**100**		**12.334.947.930**	**100**	**12.334.947.930**	**100**	**19,23**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	4 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan (orang/bulan)	333	61.966.379.294			111/12	12.376.481.199	25,00	111/3	542.784.994	25,00	111/3	5.969.405.793	25,00	111/3	2.983.796.899	25,00	111/3	2.437.105.505	100	111/6	11.933.093.191	111/3	11.933.093.191	0,00	19,26	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 01 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	2.100	1.239.227.856			700	167.750.996	25,00	175	28.297.200	25,00	175	67.955.484	28,57	200	29.057.269	21,43	150	42.334.363	100	700	167.644.316	700,00	167.644.316	33,33	13,53	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 01 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	126	929.420.892			42	235.501.992	28,57	12	55.844.400	23,81	10	59.269.600	23,81	10	46.894.400	23,81	10	72.202.023	100	42	234.210.423	42	234.210.423	33,33	25,20	
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Barang Milik			**Persentase temuan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
		4 01 01 2 03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**persentase pelaporan aset Setda yang disusun sesuai**	**100**	**774.517.410**		-	**100**	-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**		-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang	4 01 01 2 03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	6	154.903.482			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 01 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (lap)	174	*619.613.928,00*			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas ASN Perangkat Daerah								**Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**67,00**				**67,00**		**0,00**			**63,60**			**0,00**			**0,00**			**63,60**			**63,60**		**94,93**		
	Persentase pegawai yang menggunakan atribut lengkap	**4**	**01**	**01**	**2**	**05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang menggunakan atribut lengkap (%)**	**100**	**2.323.552.230**			**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian								**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Persentase pegawau yang mengikuti pendidikan dan								**Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)**	**95,00**				**31,53**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	3	309.806.964			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	01	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dok)	33	774.517.410			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	105	1.239.227.856			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya kualitas layanan jasa internal perangkat daerah								**Indeks kepuasan pelayanan jasa internal Perangkat Daerah**	**4,00**				**4,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum Perangkat Daerah	**4**	**01**	**01**	**2**	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di Perangkat Daerah (%)**	**100**	**34.078.766.040**			**100**	**2.771.005.000**	**25,00**		**582.551.022**	**25,00**		**543.364.598**	**25,00**		**772.401.671**	**25,00**		**867.796.380**	**100**		**2.766.113.671**	**100**	**2.766.113.671**	**100**	**8,12**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	4	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	36	18.588.417.840			12	2.771.005.000	25,00	3	582.551.022	25,00	3	543.364.598	25,00	3	772.401.671	25,00	3	867.796.380	100	12	2.766.113.671	12	2.766.113.671	33,33	14,88	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	01	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dok)	36	7.745.174.100			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00		
	Terlaksananya Dukungan	4	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	36	7.745.174.100			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00		
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat	**4**	**01**	**01**	**2**	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah (%)**	**100**	**34.078.766.040**			**100**	**16.042.989.220**	**25,00**		**2.055.832.788**	**25,00**		**5.766.848.089**	**25,00**		**2.035.049.450**	**25,00**		**5.886.660.221**	**100**		**15.744.390.548**	**100**	**15.744.390.548**	**100**	**46,20**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	36	4.647.104.460,00			12	2.303.940.515	25,00	3	533.783.600	25,00	3	549.247.775	25,00	3	432.240.600	25,00	3	719.950.575	100	12	2.235.222.550	12	2.235.222.550	33,33	48,10	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36	7.745.174.100,00			12	3.205.193.340	25,00	3	517.309.388	25,00	3	1.000.687.299	25,00	3	785.944.240	25,00	3	814.860.376	100	12	3.118.801.303	12	3.118.801.303	33,33	40,27	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	36	21.686.487.480,00			12	10.533.855.365	25,00	3	1.004.739.800	25,00	3	4.216.913.015	25,00	3	816.864.610	25,00	3	4.351.849.270	100	12	10.390.366.695	12	10.390.366.695	33,33	47,91	
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perangkat daerah								**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**95,00**				**97,22**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung	**4**	**01**	**01**	**2**	**07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penambahan aset Perangkat Daerah (%)**	**18,21**	**12.392.278.560**			**6,44**	**1.331.468.588**	**0,00**		**585.460.000**	**0,00**		**228.728.000**	**0,00**		**129.718.000**			**340.088.600**	**0,00**		**1.283.994.600**	**0,00**	**1.283.994.600**	**0,00**	**10,36**	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	4	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (unit)	6	2.478.455.712			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau	4	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan (unit)	10	3.098.069.640			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Mebel	4	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (paket)	3	619.613.928			1	138.035.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	75,00	0,75	90.798.000	25,00	0,25	20.240.000	100	1,00	111.038.000	1	111.038.000	33,33	17,92	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1950	1.549.034.820			650	1.193.433.588	3,69	24	585.460.000	0,15	1	228.728.000	5,23	34	38.920.000	45,23	294	319.848.600	54,31	353	1.172.956.600	353	1.172.956.600	18,10	75,72	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 01 01 2 07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan (unit)	30	3.098.069.640			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	4 01 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan (unit)	450	1.549.034.820			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	**4 01 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara (%)**	**8,05**	**26.953.205.868**			**2,67**	**2.282.264.513**	**0,00**		**572.920.741**	**0,00**		**631.038.076**			**446.764.709**			**548.687.752**	**0,00**		**2.199.411.278**	**0,00**	**2.199.411.278,00**	**0,00**	**8,16**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	4 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak (unit)	57	3.098.069.640,00			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	4 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	390	6.196.139.280			130	1.631.970.800	24,62	32	373.740.741	24,62	32	406.727.026	24,62	32	437.544.259	26,15	34	409.944.752	100	130	1.627.956.778	130,00	1.627.956.778	33,33	26,27	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	471	2.168.648.748			157	148.187.000	0,00	0,00	-	31,85	50	49.122.500	1,91	3	-	57,32	90	38.973.000	91,08	143	88.095.500	143,00	88.095.500	30,36	4,06	
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi(unit)	102	15.490.348.200			34	502.106.713	35,29	12	199.180.000	32,35	11	175.188.550	0,00	0,00	9.220.450	32,35	11	99.770.000	100	34	483.359.000	34,00	483.359.000	33,33	3,12	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah			**Indeks Kualitas Kebijakan**	**60,00**				**53,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
2	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi**			**Nilai Indeks Komponen RB Area Penataan dan Penguatan Organisasi**	**2,80**				**2,50**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Nilai Indeks Komponen RB Area Tata Laksana	**2,80**				**2,50**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase perangkat daerah yang berkinerja baik	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase Peningkatan Pelayanan Terhadap KDH/WKDH	**10,00**				**5,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya pelayanan kegiatan kedinasan			**Persentase Layanan keprotokolan KDH/WKDH sesuai SOP (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Terlaksananya tertib administrasi pelayanan kedinasan	**4 01 01 2 11**	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Kedinasan KDH/WKDH (%)**	**100**	**3.206.502.077**		**-**	**100**	**1.558.649.264**	**25,00**		**190.000.000**	**25,00**		**191.319.760**	**25,00**		**214.199.600**	**25,00**		**597.067.928**	**100**		**1.192.587.288**	**100**	**1.192.587.288**	**100**	**37,19**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 01 01 2 11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/bulan)	6	619.613.928			2	807.119.264,00	25,00	2/3	-	25,00	2/3	49.019.760	25,00	2/3	71.699.600	25,00	2/3	395.227.928	100	2/6	515.947.288	0	515.947.288		83,27	
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 01 01 2 11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (paket)	3	309.806.964,00			1	150.690.000,00	0,00	0,00		100	1	47.300.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	59.340.000	100	1	106.640.000	1	106.640.000	33,33		
	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 01 01 2 11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang)	6	108.432.437,40			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00		
	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala	4 01 01 2 11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	2.168.648.748,00			2	600.840.000,00	25,00	2/3	190.000.000	25,00	2/3	95.000.000	25,00	2/3	142.500.000	25,00	2/3	142.500.000	100	2/3	570.000.000	2/3	570.000.000	0,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**4 01 01 2 12**	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase kebutuhan RT KDH, WKDH, dan Sekretaris Daerah yang dipenuhi (%)**	**100**	**13.166.795.970**			**100**	**1.203.586.640**	**25,00**		**201.116.900**	**25,00**		**276.594.600**	**25,00**		**279.575.400**	**25,00**		**392.541.450**	**100**		**1.149.828.350**	**100**	**1.149.828.350**	**100**	**8,73**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4 01 01 2 12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan (Paket)	3	6.970.656.690,00			1	733.554.240	25,00	0,25	123.908.700	25,00	0,25	166.519.800	25,00	0,25	168.368.200	25,00	0,25	248.906.350	100	1	707.703.050	1,00	707.703.050	33,33	10,15	
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	4 01 01 2 12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan (Paket)	3	3.717.683.568,00			1	93.378.800	25,00	0,25	27.547.200	25,00	0,25	21.364.800	25,00	0,25	23.447.200	25,00	0,25	21.019.600	100	1	93.378.800	1,00	93.378.800	33,33	2,51	
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4 01 01 2 12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan (Paket)	3	2.478.455.712,00			1	376.653.600	25,00	0,25	49.661.000	25,00	0,25	88.710.000	25,00	0,25	87.760.000	25,00	0,25	122.615.500	100	1	348.746.500	1,00	348.746.500	33,33	14,07	
	Terlaksananya tertib adm. Pelayanan kedinasan KDH/WKDH	**4 01 01 2 14**	**Kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persentase data/informasi keg kedinasan yang dipublikasikan (%)**	**100**	**4.027.490.532**			**100**	**135.000.000**	**25,00**		**20.295.000**	**25,00**		**13.560.000**	**25,00**		**11.825.000**	**25,00**		**74.340.980**	**100**		**120.020.980**	**100**	**120.020.980**	**100**	**2,98**	
	Terlaksananya acara kedinasan melalui standar keprotokolan			**Persentase acara kedinasan yang terlaksana melalui keprotokolan sesuai**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	4 01 01 2 14 01	Fasilitasi keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (lap)	36	929.420.892,00			12	135.000.000	25,00	3	20.295.000	25,00	3	13.560.000	25,00	3	11.825.000	25,00	3	74.340.980	100	12	120.020.980	12	120.020.980	33,33	12,91	
	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 01 01 2 14 02	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpin (lap)	12	2.633.359.194,00			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 01 01 2 14 03	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan (lap)	36	464.710.446,00			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Persentase rumusan kebijakan di Bidang Kelembagaan (%)	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Ketata Laksanaan (%)	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan AKIP (%)	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	**4 01 01 2 13**	**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan organisasi minimal bernilai sedang (%)**	**100**	**2.323.552.230**			**100**	**100.000.000**	**0,00**		**3.690.000**	**0,00**		**24.058.700**	**0,00**		**2.870.000**	**0,00**		**46.804.800**	**0,00**		**77.423.500**	**0,00**	**77.423.500,00**	**0,00**	**3,33**	
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pelayanan Publik			**Persentase perangkat daerah dengan IKM minimal 80 (%)**	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase perangkat daerah dengan nilai rata-rata komponen pengungkit minimal 14 (%)	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Peningkatan AKIP			**Persentase Perangkat Daerah yang AKIP-nya dibina (%)**	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 01 01 2 13 01	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (dok)	3	464.710.446,00			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 01 01 2 13 02	Fasilitasi Pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (laporan)	3	464.710.446,00			1	33.000.000	0,00	0,00	1.640.000	0,00	0,00	10.290.000	0,00	0,00	410.000	100	1	18.680.000	100	1	31.020.000	1,00	31.020.000	33,33	6,68	
	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 01 01 2 13 03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (dok)	3	464.710.446,00			1	67.000.000	0,00	0,00	2.050.000	0,00	0,00	13.768.700	0,00	0,00	2.460.000	100	1	28.124.800	100	1	46.403.500	1	46.403.500	33,33	9,99	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 01 01 2 13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (dok)	3	464.710.446,00			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 01 01 2 13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(dok)	3	464.710.446,00			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**20,16**		**12,69**	**25,19**		**36,02**	**22,95**		**18,20**	**29,43**		**29,58**	**97,72**		**96,49**			**20,05**	**14,35**	
									Predikat Kinerja		**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
3	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**			**Persentase batas administrasi kewilayahan yang diselesaikan**	**100**				**96,30**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		**SEKRETARIAT DAERAH**
				Nilai Indeks EKPPD	**3,2911**				**3,275**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
				Persentase pengelolaan dana hibah tepat sasaran	**100**				**100**		**0,00**			**7,00**			**0,00**			**0,00**			**7,00**			**7,00**		**7,00**		
				Nilai indeks RB Komponen Pengelolaan	**3,5**				**2,5**		**0,00**			**23,00**			**0,00**			**0,00**			**23,00**			**23,00**		#####		
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perumusan dan pengendalian kebijakan di bidang pemerintahan	**4 01 02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (%)**	**100**	**59.328.033.606**			**100**	**4.506.704.032**	**12,50**		**47.001.049**	**0,00**		**1.040.873.485**	**62,50**		**252.245.138**	**25,00**		**2.803.642.898**	**100**		**4.143.762.570**	**100**	**4.143.762.570**	**100**		
	Tersedianya rancangan kebijakan KSD, batas adm. Kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	**4 01 02 2 01**	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase rancangan kebijakan KSD, batas adm. Kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang diselesaikan sesuai juknis (%)**	**100**	**1.316.679.597**			**100**	**80.344.785**	**0,00**		**3.880.000**	**0,00**		**4.920.000**	**50,00**		**15.573.150**	**50,00**		**54.116.470**	**100**		**78.489.620**	**100**	**78.489.620**	**100**	**5,96**	
	Tersedianya laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai ketentuan			**Capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya kinerja kecamatan			**Persentase kecamatan dengan kinerja baik (%)**	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	4 01 02 2 01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan(dok)	3	387.258.705,00			1	16.108.245	100,00	1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	15.905.420	100	1	15.905.420	1,00	15.905.420	33,33	4,11	
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 01 02 2 01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan(dok)	9	464.710.446			3	36.352.570	0,00	0,00	2.240.000	33,33	1	3.280.000	33,33	1	9.680.000	33,33	1	20.369.210	100	3	35.569.210	3,00	35.569.210	33,33		
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan	4 01 02 2 01 03	Fasiliasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daearah (dok)	15	464.710.446			5	27.883.970	20,00	1	1.640.000	20,00	1	1.640.000	40,00	2	5.893.150	20,00	1	17.841.840	100	5	27.014.990	5	27.014.990	33,33		
	Meningkatnya kerja sama daerah yang memiliki manfaat dalam kebijakan pemerintah	**4 01 02 2 04**	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase kerjasama daerah yang memiliki manfaat dalam kebijakan pemerintah (%)**	**100**	**542.162.187**		**-**	**100**	**74.655.165**	**25,00**		**1.230.000**	**25,00**		**820.000**	**25,00**		**2.870.000**	**25,00**	**0,00**	**64.480.835**	**100**		**69.400.835**	**100**	**69.400.835**	**100**	**12,80**	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah Dalam Negeri	4 01 02 2 04 01	Fasilitasi Kerjasama Daerah Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri (dok)	12	387.258.705			4	68.585.165	25,00	1	1.230.000	25,00	1	820.000	25,00	1	2.870.000	25,00	1	58.540.905	100	4	63.460.905	4,00	63.460.905	33,33		
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	4 01 02 2 04 02	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (lap)	12	154.903.482			4	6.070.000	25,00	1	-	25,00	1	-	25,00	1	-	25,00	1	5.939.930	100	4	5.939.930	4,00	5.939.930	33,33		
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perumusan dan pengendalian kebijakan di bidang kesra dan kemasyarakatan			**Persentase rumusan kebijakan di bidang kesra dan kemasyarakatan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangann (%)**	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		
	Meningkatnya rumusan kebijakan bidang Bina Mental Spritual	**4 01 02 2 02**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**IKM fasilitasi Pemberian Bantuan Hibah dan peringatan hari besar keagamaan**	**81,70**	**55.145.639.592**			**81,70**	**4.251.704.082**	**0,00**	**0,00**	**27.830.820**	**0,00**	**0,00**	**996.162.485**	**0,00**	**0,00**	**233.801.988**	**0,00**	**0,00**	**2.639.885.593**	**0,00**		**3.897.680.886**	**0,00**	**3.897.680.886**	**0,00**		
	Meningkatnya rumusan kebijakan bidang Kesejahteraan Sosial			**persentase usulan penerima dana hibah di bidang keagamaan dan kemasyarakatan sesuai kriteria**	**100,00**				**100,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 01 02 2 02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (dok)	27	19.672.742.214,00			9	2.350.300.872	0,00	0,00	27.830.820	11,11	1	164.547.485	22,22	2	232.571.988	66,67	6	1.751.792.135	100	9	2.176.742.428	9	2.176.742.428	33,33		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,	4 01 02 2 02 02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB (dok)	5	30.980.696.400,00			5	948.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	5	781.753.458	100	5	781.753.458	5	781.753.458	100,00		
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan	4 01 02 2 02 03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibun linmas(dok)	12	4.492.200.978,00			4	953.403.210	0,00	0,00	-	25,00	1	831.615.000	25,00	1	1.230.000	50,00	2	106.340.000	100	4	939.185.000	4	939.185.000	33,33	20,91	
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi teknis & pengkajian prod hukum serta layanan bantuan			**Persentase produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan(%)**	**100**				**100**		**4,44**			**6,56**			**0,00**			**0,00**			**11,00**		**-**	**11,00**	**-**	**11,00**		
				Persentase permasalahan hukum dan HAM yg terselesaikan (%)	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		
	Meningkatnya Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	**4 01 02 2 03**	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase draf produk hukum daerah yang siap untuk proses penetapan (%)**	**100**	**2.323.552.230**			**100**	**100.000.000**	**6,00**		**14.060.229**	**9,00**		**38.971.000**	**6,00**		**-**	**0,00**		**45.160.000**	**21,00**		**98.191.229**	**0,00**	**98.191.229**	**0,00**		
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum			**Persentase Kasus/ permasalahan hukum yang didampingi dan memenangkan**	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		
	Terlaksananya Pendokumentasian dan Kodefikasi Produk Hukum Daerah			**Persentase produk hukum daerah yang terkodefikasi dan terdokumentasi dengan baik (%)**	**100**				**100**		**15,56**			**27,78**			**26,67**			**30,00**			**100**		**-**	**100**	**-**	**100**		
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum	4 01 02 2 03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun (Produk Hukum)	270	774.517.410,00			90	33.250.000	4,44	4	5.330.000	31,11	28	5.504.400	34,44	31		30,00	27	22.250.000	100	90	33.084.400	90	33.084.400	33,33	4,27	
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	4 01 02 2 03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum (Kasus)	12	1.084.324.374,00			4	33.500.000	25,00	1	7.500.229	25,00	1	3.460.000	25,00	1		25,00	1	22.460.000	100	4	33.420.229	4	33.420.229	33,33		
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	4 01 02 2 03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi (Produk Hukum)	270	464.710.446,00			90	33.250.000	15,56	14	1.230.000	27,78	25	30.006.600	26,67	24		30,00	27	450.000	100	90	31.686.600	90	31.686.600	33,33	6,82	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**19,55**		**1,04**	**20,30**		**23,10**	**23,33**		**5,60**	**36,82**		**62,21**	**100**		**91,95**			**39,39**	**3,28**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**R**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
4	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pembangunan dan**		**Persentase implementasi rekomendasi kebijakan perekonomian**		**100**				**100**		**25,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**25,00**			**25,00**		**25,00**		
			Capaian Realisasi Fisik Pemerintah Daerah		**99,00**				**99,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
			Level Kematangan UKPBJ		**3**				**3**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya kelancaraan pelaksanaan perumusan dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian	**4 01 03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (%)**	**100**	**5.344.170.129**			**100**	**496.551.500**	**25,00**		**66.610.056**	**25,00**		**67.225.085**	**25,00**		**98.585.450**			**145.193.869**	**75,00**		**377.614.460**	**75,00**	**377.614.460**	**75,00**	**7,07**	**SEKRETARIAT DAERAH**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		4 01 03 2 01	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja baik (%)**	**50,00**	**929.420.892**			**50,00**	**300.000.000**	**0,00**		**32.619.556**	**0,00**		**-**	**0,00**		**59.715.450**			**96.995.724**	**0,00**		**189.330.730**	**0,00**	**189.330.730**	**0,00**	**20,37**	
				Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro	**100,00**				**100,00**		**0,00**			**50,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 01 03 2 01 01	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (dok)	3	464.710.446			1	200.000.000	0,00	0	30.194.556	0,00	0	-	100	1	52.730.450	0,00	0,00	60.535.259	100	1	143.460.265	1,00	143.460.265	33,33	30,87	
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 01 03 2 01 02	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Persentase OPD yang melaksanakan pekerjaan fisik sesuai target(lap)	18	464.710.446			6	100.000.000	16,67	1	2.425.000	16,67	1	-	50,00	3	6.985.000	16,67	1	36.460.465	100	6	45.870.465	6,00	45.870.465	33,33	9,87	
	Tersedianya rumusan & pengendalian kebijakan daerah di bidang perekonomiannya data potensi	**4 01 03 2 04**	**Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT) (%)**	**60**	**697.065.669**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**			**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Terlaksananya Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,Pangan, Kehutanan,Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 01 03 2 04 01	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, UMKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (dok)	3	232.355.223			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Koordinasi sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, LH, Kominfo, Perhubungan dan Persandian	4 01 03 2 04 02	Koordinasi sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, LH, Kominfo, Perhubungan dan Persandian(dok)	3	232.355.223			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Koordinasi sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan, Pertanahan	4 01 03 2 04 03	Koordinasi sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan	3	232.355.223			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perumusan kebijakan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan			**Persentase rumusan kebijakan dibidang pembangunan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	**4 01 03 2 02**	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Penyusunan Program Pembangunan Daerah yang difasilitasi(%)**	**100**	**1.239.227.856**			**100**	**84.470.000**	**20,00**		**24.330.500**	**20,00**		**16.405.085**	**20,00**		**8.865.000**	**40,00**		**29.867.895**	**100**		**79.468.480**	**100**	**79.468.480**	**100**	**6,41**	
	Meningkatnya monitoring dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan			**Persentase OPD yang melaksanakan pekerjaan fisik sesuai target TEPRA (%)**	**100**			**-**	**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4 01 03 2 02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (dok)	15	154.903.482			5	20.450.000	20,00	1	7.260.000	40,00	2	6.240.000	20,00	1	920.000	20,00	1	5.780.000	100	5	20.200.000	5,00	20.200.000	33,33	13,04	
	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 01 03 2 02 02	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (lap)	36	154.903.482			12	30.450.000	25,00	3	3.170.000	25,00	3	3.700.000	25,00	3	2.800.000	25,00	3	19.537.895	100	12	29.207.895	12,00	29.207.895	33,33	18,86	
	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	4 01 03 2 02 03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Lap)	36	929.420.892			12	33.570.000	25,00	3	13.900.500	25,00	3	6.465.085	25,00	3	5.145.000	25,00	3	4.550.000	100	12	30.060.585	12,00	30.060.585	33,33	3,23	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya PBJ yang transparan, akuntabel dan tepat waktu			**Persentase Paket PBJ yang transparan, akuntabel dan tepat waktu (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya pengelolaan LPSE	**4 01 03 2 03**	**Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai**	**100**	**2.478.455.712**			**100**	**112.081.500**	**25,00**		**9.660.000**	**27,00**		**50.820.000**	**25,00**		**30.005.000**	**23,00**		**18.330.250**	**100**		**108.815.250**	**100**	**108.815.250**	**100**	**4,39**	
				Persentase tata kelola LPSE yang memenuhi standarisasi (%)	**100**				**100**		**20,00**			**30,00**			**20,00**			**30,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase SDM PBJ yang mengikuti diklat	**100**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	4 01 03 2 03 01	Pengelolaan PBJ	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (dok)	39	1.549.034.820			13	59.531.500	23,08	3	3.000.000	30,77	4	25.820.000	23,08	3	17.505.000	23,08	3	11.780.250	100	13	58.105.250	13	58.105.250	33,33	3,75	
	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 01 03 2 03 02	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil layanan Pengadaan Secara Elektronik (dok)	36	464.710.446			12	52.550.000	25,00	3	6.660.000	25,00	3	25.000.000	33,33	4	12.500.000	16,67	2	6.550.000	100	12	50.710.000	12	50.710.000	33,33	10,91	
	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 01 03 2 03 03	Pembinaan dan advokasi PBJ	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (orang)	765	464.710.446			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**19,25**		**13,41**	**23,21**		**13,54**	**39,49**		**19,85**	**18,06**		**29,24**	**100**		**76,05**			**29,17**	**11,32**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG SEKRETARIAT DAERAH					**43.329.296.191**							**4.976.474.550**			**14.911.764.870**			**7.327.948.386**			**14.285.082.969**			**41.501.270.775**		**41.501.270.775**		
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Sekretariat Daerah (%)							**19,65**		**11,49**	**22,90**		**34,41**	**28,59**		**16,91**	**28,10**		**32,97**	**99,24**		**95,78**			**29,54**	**15,71**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Sekretariat Daerah							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																										
		4 02	**SEKRETARIAT DPRD**			**140.019.887.220**		**-**		**76.853.878.717**			**18.114.611.745**			**23.294.716.432**			**18.589.503.689**			**14.507.170.272**			**74.506.452.138**		**74.506.452.138**		**53,21**	
1	**Meningkatnya Layanan Legislasi Budgeting, dan Pengawasan**	**4 02 02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan tepat waktu**	**100**	**30.177.112.250**		**-**	**100**	**42.727.349.923**	**30,77**		**10.816.423.925**	**23,08**		**15.330.331.817**	**30,77**		**11.796.103.922**	**15,38**		**4.435.044.542**	**100**		**42.378.354.206**	**100,00**	**42.378.354.206**	**#####**	**#####**	**SEKR. DPRD**
	Meningkatnya Layanan Penyerapan	**4 02 02**		**Persentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**		**1.333.118.276**	**75,00**			**75,00**		**75,00**		
		4 02 02 2 01	**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pembentukan Peraturan DPRD**	**Persentase Layanan Legislasi DPRD**	**100**	**646.715.000**			**100**	**543.117.664**	**30,77**		**99.390.000**	**23,08**		**151.700.000**	**30,77**		**118.140.000**	**15,38**		**105.015.000**	**100**		**474.245.000**	**100**	**474.245.000**	**100**	**73,33**	
		4 02 02 2 01 01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan PERDA (Dokumen)	51	646.715.000			13	543.117.664	30,77	4	99.390.000	23,08	3	151.700.000	30,77	4	118.140.000	15,38	2	105.015.000	100	13	474.245.000	13	474.245.000	25,49	73,33	
		4 02 02 2 02	**Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Layanan Budgeting Anggaran**	**100**	**600.000.000**		**-**	**100**	**152.790.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**50,00**		**81.240.000**	**0,00**		**69.270.000**	**100**		**150.510.000**	**100**	**150.510.000**	**100**	**25,09**	
		4 02 02 2 02 01	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	6	300.000.000			2	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		4 02 02 2 02 03	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6	300.000.000			2	152.790.000	0,00	0,00		0,00	0,00	-	100	2	81.240.000	0,00	0,00	69.270.000	100	2	150.510.000	2	150.510.000	33,33	50,17	
		4 02 02 2 03	**Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Layanan Pengawasan DPRD**	**100**	**300.000.000**			**100**	**11.250.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**8.825.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**450.000**	**100**		**9.275.000**	**100**	**9.275.000**	**100**	**3,09**	
		4 02 02 2 03 07	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3	300.000.000			1	11.250.000	0,00	0,00		100	1	8.825.000	0,00		-	0,00		450.000	100	1	9.275.000	1	9.275.000	33,33	3,09	
		4 02 02 2 04	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase layanan peningkatan kapasitas Anggota DPRD**	**100**	**2.509.630.000**			**100**	**1.666.004.420**	**25,00**		**147.015.000**	**25,00**		**174.546.110**	**25,00**		**121.450.000**	**25,00**		**1.158.833.276**	**100**		**1.602.294.386**	**100**	**1.602.294.386**	**100**	**63,85**	
		4 02 02 2 04 02	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	1.600.000.000			2	1.054.714.420	0,00	0	-	50,00	1	76.036.110	50,00	1	-	0,00		968.603.276	100	2	1.044.639.386	2	1.044.639.386	33,33	65,29	
		4 02 02 2 04 03	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum, Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumen Dewan	36	808.940.000			12	600.840.000	25,00	3	141.015.000	25,00	3	98.510.000	25,00	3	121.450.000	25,00	3	190.230.000	100	12	551.205.000	12	551.205.000	33,33	68,14	
		4 02 02 2 04 06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hubungan Masyarakat	12	100.690.000			4	10.450.000	25,00	1	6.000.000	25,00	1	-	25,00	1	-	25,00	1	450.000	100	4	6.450.000	4	6.450.000	33,33	6,41	
I.2		**4 02 02 2 05**	**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Laporan Aspirasi Anggota DPRD yang Tersusun Tepat Waktu**	**100**	**2.420.767.250**		**-**	**100**	**792.607.500**	**33,33**		**257.260.000**	**50,00**		**25.770.000**	**0,00**		**1.400.000**	**16,67**		**296.712.232**	**100**		**581.142.232**	**100**	**581.142.232**	**100**	**24,01**	
				Persentase Laporan Aspirasi Masyrakat yang ditindaklanjuti	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		4 02 02 2 05 01	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6	60.000.000			2	50.600.000	0,00	0	-	50,00	1	-	0,00	0,00	1.400.000	50,00	1	37.402.232	100	2	38.802.232	2	38.802.232	33,33	64,67	
		4 02 02 2 05 02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	9	2.360.767.250			3	742.007.500	33,33	1	257.260.000	33,33	1	25.770.000	33,33	1	-	0,00	0,00	259.310.000	100	3	542.340.000	3	542.340.000	33,33		
		4 02 02 2 08	**Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase pelaporan rekomendasi yang dihasilkan dari kunjungan kerja**	**100**	**23.700.000.000**			**100**	**39.561.580.339**	**25,00**		**10.312.758.925**	**25,00**		**14.969.490.707**	**25,00**		**11.473.873.922**	**25,00**		**2.804.764.034**	**100**		**39.560.887.588**	**100**	**39.560.887.588**	**100**	#####	
		4 02 02 2 08 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan	36	23.700.000.000			12	39.561.580.339	25,00	3	10.312.758.925	25,00	3	14.969.490.707	25,00	3	11.473.873.922	25,00	3	2.804.764.034	100	12	39.560.887.588	12	39.560.887.588	33,33	166,92	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**15,46**		**25,31**	**36,82**						**32,12**		**28,99**	**15,60**		**10,38**	**100**		**99,18**			**29,22**	#####	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**						**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**ST**	
2	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan**	**4 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai kinerja perencanaan perangkat daerah**	**25,12**	**109.842.774.970**			**0,00**	**34.126.528.794**	**0,00**		**7.298.187.820**	**20,76**		**7.964.384.615**	**0,00**		**6.793.399.767**	**0,00**		**10.072.125.730**	**20,76**		**32.128.097.932**	**20,76**	**32.128.097.932**	**82,64**	**29,25**	**SEKR. DPRD**
				Nilai kinerja pelaporan perangkat	**10,00**				**27,00**		**0,00**			**10,45**			**0,00**			**0,00**			**10,45**			**10,45**		#####		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan			**Persentase temuan pengelolaan keuangan perangkat daerah**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**64,00**				**0,00**		**0,00**			**60,85**			**0,00**			**0,00**			**60,85**			**60,85**		**95,08**		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**3,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik**	**100**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Layanan Administrasi bagi DPRD			**Persentase layanan administrasi bagi DPRD**	**100**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		4 02 01 2 01	**Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar**	**100**	**90.000.000**		**-**	**100**	**-**	**0,00**		**-**	**50,00**		**-**	**50,00**		**-**	**0,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	**100**				**100**		**25,00**			**50,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
		4 02 02 2 01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	6	45.000.000			2		0,00	0	-	50,00	1	-	50,00	1	-	0,00	0,00		100	2	-	2	-	33,33	0,00	
		4 02 02 2 01 06	Sub Kegiatan Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	12	45.000.000			4		25,00	1	-	50,00	2	-	25,00	1	-	0,00	0,00		100	4	-	4	-	33,33	0,00	
		4 02 01 2 02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai**	**100**	**16.532.262.000**			**100**	**4.273.450.761**	**25,00**		**943.605.653**	**25,00**		**1.476.309.002**	**25,00**		**887.435.238**	**25,00**		**811.530.710**	**100**		**4.118.880.603**	**100**	**4.118.880.603**	**100**	**24,91**	
		4 02 02 2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang	42	16.442.262.000			14	4.273.450.761	25,00	14	943.605.653	25,00	14	1.476.309.002	25,00	14	887.435.238	25,00	14	811.530.710	100	14	4.118.880.603	14	4.118.880.603	33,33	25,05	
		4 02 02 2 02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2250	45.000.000			629		27,19	171	-	24,17	152	-	26,87	169	-	21,78	137		100	629	-	629	-	27,96	0,00	
		4 02 02 2 02 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan	42	45.000.000			14		21,43	3	-	35,71	5	-	28,57	4	-	14,29	2		100	14	-	14	-	33,33	0,00	
	Meningkatnya kepatuhan terhadap kelengkapan atribut pegawai	**4 02 01 2 05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**100**	**136.000.000**			**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya pegawaian yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**42,86**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		4 02 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	6	35.310.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		4 02 01 2 05 03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	36	10.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		4 02 01 2 05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	54	90.690.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	**4 02 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah**	**100**	**4.603.643.200**			**100**	**2.186.493.116**	**25,00**		**504.514.247**	**25,00**		**238.808.127**	**25,00**		**184.442.839**	**25,00**		**1.049.122.011**	**100**		**1.976.887.224**	**100**	**1.976.887.224**	**100**	**42,94**	
		4 02 01 2 06 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3	800.000.000			1	453.248.116	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	100	1	291.578.300	100	1	291.578.300	1	291.578.300	33,33	36,45	
		4 02 01 2 06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	36	1.350.000.000			12	310.735.000	25,00	3	77.676.690	25,00	3	28.290.570	25,00	3	51.008.940	25,00	3	132.490.890	100	12	289.467.090	12	289.467.090	33,33	21,44	
		4 02 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	2.300.000.000			12	1.346.910.000	25,00	3	416.347.122	25,00	3	194.613.765	25,00	3	117.518.655	25,00	3	603.449.350	100	12	1.331.928.892	12	1.331.928.892	33,33	57,91	
		4 02 01 2 06 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	36	48.753.200			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		4 02 01 2 06 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	36	104.890.000			12	75.600.000	25,00	3	10.490.435	25,00	3	15.903.792	25,00	3	15.915.244	25,00	3	21.603.471	100	12	63.912.942	12	63.912.942	33,33	60,93	
	Terlaksananya layanan jasa penunjang perangkat daerah	**4 02 01 2 08**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah**	**100**	**11.795.532.270**			**100**	**3.657.311.048**	**25,00**		**492.288.057**	**25,00**		**1.038.868.854**	**25,00**		**692.555.968**	**25,00**		**1.089.250.560**	**100**		**3.312.963.439**	**100**	**3.312.963.439**	**100**	**28,09**	
		4 02 01 2 08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36	7.511.003.280			12	2.183.327.855	25,00	3	381.469.600	25,00	3	732.253.500	25,00	3	495.641.200	25,00	3	527.182.150	100	12	2.136.546.450	12	2.136.546.450	33,33	28,45	
		4 02 01 2 08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang	36	2.100.000.000			12	486.236.700	25,00	3	41.950.457	25,00	3	96.790.854	25,00	3	73.125.968	25,00	3	103.823.560	100	12	315.690.839	12	315.690.839	33,33	15,03	
		4 02 01 2 08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36	2.184.528.990			12	987.746.493	25,00	3	68.868.000	25,00	3	209.824.500	25,00	3	123.788.800	25,00	3	458.244.850	100	12	860.726.150	12	860.726.150	33,33	39,40	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana	**4 02 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah**	**16,13**	**1.400.000.000**		**-**	**100**	**953.961.589**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**100**		**904.455.000**	**100**		**904.455.000**	**100**	**904.455.000**	#####	**64,60**	
		4 02 01 2 07 01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas	1	500.000.000			1	689.544.555	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	1	648.840.000	100	1	648.840.000	1	648.840.000	100,00	129,77	
		4 02 01 2 07 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	300.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		4 02 01 2 07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perlengkapan dan mesin lainnya yang	75	500.000.000			1	264.417.034	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	1	255.615.000	100	1	255.615.000	1	255.615.000	1,33	51,12	
		4 02 01 2 07 09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	100.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	**4 02 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**2,42**	**1.800.000.000**			**1,42**	**445.926.340**	**0,01**		**12.600.000**	**1,00**		**102.146.250**	**0,28**		**54.928.000**	**0,28**		**178.328.400**	**1,57**		**348.002.650**	**1,57**	**348.002.650**	**65,05**	**19,33**	
		4 02 01 2 09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	48	900.000.000			16	278.405.400	25,00	4	12.600.000	25,00	4	79.406.250	25,00	4	29.504.000	25,00	4	66.464.400	100	16	187.974.650	16	187.974.650	33,33	20,89	
		4 02 01 2 09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	81	300.000.000			81	65.330.940	0,00	0,00	-	22,22	18	22.740.000	46,91	38	25.424.000	30,86	25	11.174.000	100	81	59.338.000	81	59.338.000	100,00	19,78	
		4 02 01 2 09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	3	600.000.000			3	102.190.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	3	100.690.000	100	3	100.690.000	3	100.690.000	100,00	16,78	
	Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	**4 02 01 2 15**	**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diselenggarakan sesuai SOP**	**100**	**72.235.337.500**			**100**	**22.008.545.940**	**25,00**		**5.244.446.033**	**25,00**		**4.953.942.782**	**25,00**		**4.826.595.942**	**25,00**		**5.874.682.109**	**100**		**20.899.666.866**	**100**	**20.899.666.866**	**100**	**28,93**	
		4 02 01 2 15 01	Sub Kegiatan Penyelenggaran Administrasi Keuangan	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan anggota	105	70.154.505.000			35	21.616.060.940	25,71	9	5.244.446.033	25,71	9	4.953.942.782	25,71	9	4.826.595.942	22,86	8	5.489.297.109	100	35	20.514.281.866	35	20.514.281.866	33,33	29,24	
		4 02 01 2 15 02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	35	1.920.832.500			35	392.485.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	35	385.385.000	100	35	385.385.000	35	385.385.000	100,00	20,06	
		4 02 01 2 15 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Checkup DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical checkup DPRD	105	160.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya layanan administrasi kebutuhan rumah tangga DPRD	**4 02 01 2 16**	**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Layanan Administrasi Kebutuhan Rumah Tangga DPRD**	**100**	**1.250.000.000**			**100**	**600.840.000**	**25,00**		**100.733.830**	**25,00**		**154.309.600**	**25,00**		**147.441.780**	**25,00**		**164.756.940**	**100**		**567.242.150**	**100**	**567.242.150**	**100**	**45,38**	
		4 02 01 2 16 03	Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	36	200.000.000			12		25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
		4 02 01 2 16 04	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang	9	1.050.000.000			4	600.840.000	25,00	1	100.733.830	25,00	1	154.309.600	25,00	1	147.441.780	25,00	1	164.756.940	100	4	567.242.150	4	567.242.150	44,44	54,02	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**16,63**		**21,39**	**21,80**		**23,34**	**21,57**		**19,91**	**39,99**		**29,51**	**100**		**94,14**			**33,59**	**29,25**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD						**76.853.878.717**			**18.114.611.745**			**23.294.716.432**			**18.589.503.689**			**14.507.170.272**			**74.506.452.138**		**74.506.452.138**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Sekretariat DPRD							**16,05**		**23,57**	**29,31**		**30,31**	**26,85**		**24,19**	**27,79**		**18,88**	**100**		**96,95**			**31,40**	**53,21**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Sekretariat DPRD							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**R**	
		5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																										
		5 01	**PERENCANAAN**			**36.715.034.810**				**6.806.394.737**			**1.148.763.262**			**1.989.721.881**			**1.012.122.753**			**1.271.895.434**			**5.438.213.530**		**5.438.213.530**		**14,81**	
		5 01	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**																										
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat**	**5 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah**	**30,00**	**27.680.125.260**			**30,00**	**5.937.064.215**	**0,00**		**1.097.568.922**	**30,00**		**1.830.990.667**	**0,00**		**903.363.809**	**0,00**		**1.055.128.496**	**30,00**		**4.887.051.894**	**30,00**	**4.887.051.894**	**100**	**17,66**	**BAPPEDA**
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	**15,00**				**13,93**		**0,00**			**15,00**			**0,00**			**0,00**			**15,00**			**15,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**72,00**				**68,00**		**0,00**			**73,43**			**0,00**			**0,00**			**73,43**			**73,43**		#####		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**4,00**				**4,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			**Indeks Sarana dan Prasarana**	**75,00**				**75,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	**5 01 01 2 01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)**	**100**	**94.575.000**			**100**	**-**	**30,00**		**-**	**20,00**		**-**	**50,00**		**-**	**0,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	**100**				**100**		**30,00**			**20,00**			**50,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 01 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	30	47.287.500			10		30,00	3		20,00	2		50,00	5		0,00	0,00		100	10	-	100	-	333	#####	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5 01 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	47.287.500			10		30,00	3		20,00	2		50,00	5		0,00	0,00		100	10	-	100	-	333	#####	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat	**5 01 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang Disusun Sesuai Standar (%)**	**100**	**20.280.439.510**			**100**	**4.725.166.418**	**25,00**		**932.262.194**	**25,00**		**1.552.058.325**	**25,00**		**661.537.435**	**25,00**		**763.964.952**	**100**		**3.909.822.906**	**100**	**3.909.822.906**	**100**	**19,28**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5 01 01 2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96	20.040.464.510			32	4.703.238.288	25,00	32	929.762.194	25,00	32	1.545.183.325	25,00	32	661.537.435	25,00	32	763.514.952	100	32	3.899.997.906	32	3.899.997.906	33,33	19,46	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 01 01 2 02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36	115.850.000			12	21.928.130	25,00	3	2.500.000	25,00	3	6.875.000	25,00	3	-	25,00	3	450.000	100	12	9.825.000	12	9.825.000	33,33	8,48	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	5 0 1 0 1 2 0 2 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	126	124.125.000			42		50,00	21	-	9,52	4	-	9,52	4	-	30,95	13		100	42	-	42	-	33,33	0,00	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan	**5 0 1 0 1 2 0 5**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap (%)**	**50,00**	**580.320.650**			**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)**	**50,00**				**50,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	5 0 1 0 1 2 0 5 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	5	155.550.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	5 0 1 0 1 2 0 5 03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	33	120.815.000			11		9,09	1		45,45	5		27,27	3		18,18	2		100	11	-	11,00	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 0 1 0 1 2 0 5 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27	303.955.650			0	-	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	**5 0 1 0 1 2 0 6**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)**	**100**	**1.614.187.288**			**100**	**525.925.758**	**25,00**		**69.579.265**	**25,00**		**91.714.526**	**25,00**		**120.093.315**	**25,00**		**114.614.616**	**100**		**396.001.722**	**100**	**396.001.722**	**100**	**24,53**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5 0 1 0 1 2 0 6 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	1.614.187.288			12	399.795.000	25,00	3	55.701.355	25,00	3	71.794.016	25,00	3	98.950.805	25,00	3	95.748.956	100	12	322.195.132	12	322.195.132	33,33	19,96	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 0 1 0 1 2 0 6 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	36	139.090.500			12	30.121.748	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.636.800	25,00	3	5.861.800	25,00	3	5.532.400	100	12	23.622.200	12	23.622.200	33,33	16,98	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	5 0 1 0 1 2 0 6 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	370.908.000			12	96.009.010	25,00	3	9.286.710	25,00	3	12.283.710	25,00	3	15.280.710	25,00	3	13.333.260	100	12	50.184.390	12	50.184.390	33,33	13,53	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung	**5 0 1 0 1 2 0 7**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**14,06**	**1.412.000.000**		**-**	**5,35**	**39.049.615**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**5,35**		**35.854.125**	**5,35**		**35.854.125**	**5,35**	**35.854.125**	**38,05**	**2,54**	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 0 1 0 1 2 0 7 000 2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	937.000.000			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 0 1 0 1 2 0 7 000 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	45	475.000.000			3	39.049.615	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	3	35.854.125	100	3	35.854.125	3	35.854.125	6,67	7,55	
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat	**5 0 1 0 1 2 0 8**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)**	**100**	**2.143.895.862**			**100**	**477.210.216**	**25,00**		**76.098.306**	**25,00**		**154.265.769**	**25,00**		**93.886.609**	**25,00**		**103.289.389**	**100**		**427.540.073**	**100**	**427.540.073**	**100**	**19,94**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 0 1 0 1 2 0 8 000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	1.642.950.582			12	351.124.266	25,00	3	56.084.400	25,00	3	132.297.200	25,00	3	72.321.600	25,00	3	67.204.450	100	12	327.907.650	12	327.907.650	33,33	19,96	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 0 1 0 1 2 0 8 000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	346.400.280			12	84.882.890	25,00	3	13.972.706	25,00	3	11.931.769	25,00	3	13.953.209	25,00	3	19.702.309	100	12	59.559.993	12	59.559.993	33,33	17,19	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 0 1 0 1 2 0 8 000 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	154.545.000			12	41.203.060	25,00	3	6.041.200	25,00	3	10.036.800	25,00	3	7.611.800	25,00	3	16.382.630	100	12	40.072.430	12	40.072.430	33,33	25,93	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat	**5 0 1 0 1 2 0 9**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**75,00**	**1.554.706.950**			**75,00**	**169.712.208**	**18,75**		**19.629.157**	**18,75**		**32.952.047**	**18,75**		**27.846.450**	**18,75**		**37.405.414**	**75,00**		**117.833.068**	**75,00**	**117.833.068**	#####	**7,58**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	5 0 1 0 1 2 0 9 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	693.620.000			6	138.112.208	33,33	2 19.629.157	33,33	2 32.952.047	16,67	1 23.589.600	16,67	1 34.167.914	100	6 110.338.718	6	110.338.718	33,33	15,91	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 0 1 0 1 2 0 9 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	111.086.950			25	31.600.000	12,00	3	0,00	0,00 -	20,00	5 4.256.850	68,00	17 3.237.500	100	25 7.494.350	25	7.494.350	20,83	6,75	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 0 1 0 1 2 0 9 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	750.000.000			0	-	0,00		0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 -	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							22,78		18,49	20,52		30,84	23,34		15,22	27,11		17,77	100		82,31				55,83	17,66	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		T				R	SR	
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas			**Indeks Kualitas Perencanaan**	**8,91**				**7,56**		**0,00**			**0,00**									**0,00**			**0,00**			**0,00**		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan		**Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam Akip Daerah**	**Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam AKIP Daerah**	**25,75**				**24,25**		**0,00**			**0,00**									**0,00**			**0,00**			**0,00**		
2	**Meningkatnya kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**5 0 1 0 2**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**100**	**7.860.367.550**			**100**	**717.954.047**	**0,00**		**50.719.340**	**0,00**		**147.254.545**	**0,00**		**94.078.944**	**0,00**		**196.415.938**	**0,00**		**504.178.967**	**0,00**	**504.178.967**	**0,00**	**6,41**	**BAPPEDA**
	Meningkatnya pemenuhan data perencanaan Pembangunan Daerah			**Indeks Pemenuhan Data Pembangunan Daerah**	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		
	Meningkatnya kualitas Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah			**Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**75,00**			**75,00**			**75,00**		
	Meningkatnya kepatuhan terhadap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah yang	**5 0 1 0 2 2 0 1**	**Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan**	**100**	**5.717.091.500**			**100**	**443.145.935**	**25,00**		**23.587.500**	**25,00**		**104.805.450**	**50,00**		**56.707.720**	**0,00**		**123.026.367**	**100**		**308.127.037**	**100**	**308.127.037**	**100**	**5,39**	
	Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunanan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi			**Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi**	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**100**			**0,00**			**100**			**100**			**100**		
	Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunanan daerah dengan dokumen perencanaan daerah lainnya			**Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)**	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**100**			**0,00**			**100**			**100**			**100**		
	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam	5 0 1 0 2 2 0 1 0001	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	6	220.274.000			2	91.144.000	50,00	1	0,00	0,00	10.455.276	50,00	1	41.300.000	0,00	0,00	600.000	100	2	52.355.276	2	52.355.276	33,33	23,77	
	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	5 0 1 0 2 2 0 1 0002	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	3	231.817.500			1	54.060.000	0,00	0,00		0,00	0,00 -	0,00	0,00	8.247.720	100	1 37.995.547	100	1	46.243.267	1	46.243.267	33,33	19,95	
	Terlaksananya konsultasi Publik	5 0 1 0 2 2 0 1 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	4	250.000.000			2	27.681.740	100	2 16.097.500	0,00	0,00 670.000	0,00	0,00 -	0,00	0,00 150.000	100	2 16.917.500	2	16.917.500	50,00	6,77	
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 0 1 0 2 2 0 1 0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4	175.000.000			2	29.825.230	100	2 -	0,00	0,00 25.092.915	0,00	0,00 -	0,00	0,00 150.000	100	2 25.242.915	2	25.242.915	50,00	14,42	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	5 01 02 2 01 0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5	2.100.000.000			2	47.814.965	100	2	7.490.000	0,00	0,00	17.102.456	0,00	0,00	-	0,00	0,00	150.000	100	2	24.742.456	2	24.742.456	40,00	1,18	
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5 01 02 2 01 0007	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	8	2.740.000.000			4	192.620.000	0,00	0	-	25,00	1	51.484.803	75,00	3	7.160.000	0,00	0,00	83.980.820	100	4	142.625.623	4	142.625.623	50,00	5,21	
	Meningkatnya data sektoral bidang infrastruktur dan kewilayahan yang sesuai Dengan prinsip satu Data Pembangunan daerah	**5 01 02 2 02**	**Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase ketersediaan data tabular bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100**	**957.915.900**			**100**	**114.677.312**	**25,00**		**11.176.425**	**25,00**		**26.216.495**	**25,00**		**12.276.240**	**25,00**		**8.664.805**	**100**		**74.044.165**	**100**	**74.044.165**	**100**	**7,73**	
	Meningkatnya data sektoral bidang pemerintahan dan sumberdaya manusia yang sesuai Dengan prinsip satu Data Pembangunan daerah			**Persentase ketersediaan data tabular bidang pemerintahan dan sumber daya manusia**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya data sektoral bidang ekonomi dan SDA yang sesuai Dengan prinsip satu Data Pembangunan daerah			**Persentase ketersediaan data tabular bidang ekonomi dan SDA**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	5 01 02 2 02 01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun pada tahun berkenaan	9	803.887.500			3	70.694.232	33,33	1	10.766.425	33,33	1	20.420.900	33,33	1	-	0,00	0,00	15.710.200	100	3	46.897.525	3	46.897.525	33,33	5,83	
	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	5 01 02 2 02 02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi pada tahun berkenaan (Orang)	204	154.028.400,00			68	43.983.080	0,00	0	410.000	50,00	34	5.795.595	0,00	0,00	12.276.240	50,00	34	8.664.805	100	68	27.146.640	68	27.146.640	33,33	17,62	
	Meningkatnya pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan sesuai ketentuan	**5 01 02 2 03**	**Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%)**	**100**	**1.185.360.150**			**100**	**160.130.800**	**25,00**		**15.955.415**	**25,00**		**16.232.600**	**25,00**		**25.094.984**	**25,00**		**64.724.766**	**100**		**122.007.765**	**100**	**122.007.765**	**100**	**10,29**	
	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai ketentuan			**Persentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	5 01 02 2 03 01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	408	788.179.500			136	85.443.600	25,00	34	14.165.415	25,00	34	-	25,00	34	13.554.805	25,00	34	37.458.647	100	136	65.178.867	136	65.178.867	33,33	8,27	
	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 01 02 2 03 03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9	397.180.650			3	74.687.200	33,33	1	1.790.000	33,33	1	16.232.600	33,33	1	11.540.179	0,00	0,00	27.266.119	100	3	56.828.898	3	56.828.898	33,33	14,31	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**44,17**		**9,96**	**16,67**		**10,14**	**21,67**		**15,67**	**17,50**		**40,42**	**100**		**76,19**			**39,00**	**6,41**	
									Predikat Kinerja		**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**SR**	**SR**	
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah	**5 01 03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah**	**100**	**1.174.542.000**		**-**	**100**	**151.376.475**	**25,00**		**475.000**	**25,00**		**11.476.669**	**25,00**		**14.680.000**	**25,00**		**20.351.000**	**100**		**46.982.669**	**100**	**46.982.669**	**100**	**4,00**	
	Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**5 01 03 2 01**	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)**	**100**	**432.726.000**		**-**	**100**	**66.313.395**	**25,00**		**475.000**	**25,00**		**7.758.902**	**25,00**		**2.350.000**	**25,00**		**5.780.000**	**100**		**16.363.902**	**100**	**16.363.902**	**100**	**3,78**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 01 03 2 01 0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	27	154.545.000			9	18.844.880	33,33	3	475.000	33,33	3	150.000	33,33	3	-	0,00	0,00	2.760.000	100	9	3.385.000	9	3.385.000	33,33	2,19	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5 01 03 2 01 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	15	77.272.500			5	31.461.075	0,00	0		40,00	2	5.968.902	40,00	2	-	20,00	1	-	100	5	5.968.902	5	5.968.902	33,33	7,72	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD.	5 01 03 2 01 0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12	200.908.500			4	16.007.440	50,00	2		25,00	1	1.640.000	25,00	1	2.350.000	0,00	0,00	3.020.000	100	4	7.010.000	4	7.010.000	33,33	3,49	
	Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**5 01 03 2 02**	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA,**	**100**	**401.817.000**		**-**	**100**	**32.093.080**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**5.620.000**	**25,00**		**2.090.000**	**100**		**7.710.000**	**100**	**7.710.000**	**100**	**1,92**	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan	5 01 03 2 02 0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15	200.908.500			5	15.923.080	60,00	3		20,00	1		20,00	1	3.780.000	0,00	0,00	2.090.000	100	5	5.870.000	5	5.870.000	33,33	2,92	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 01 03 2 02 0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6	200.908.500			2	16.170.000	50,00	1		0,00	0,00		0,00	0,00	1.840.000	50,00	1	-	100	2	1.840.000	2	1.840.000	33,33	0,92	
	Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**5 01 03 2 03**	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dengan RENSTRA, RPDP**	**100**	**339.999.000**			**100**	**52.970.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**3.717.767**	**25,00**		**6.710.000**	**25,00**		**12.481.000**	**100**		**22.908.767**	**100**	**22.908.767**	**100**	**6,74**	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 01 03 2 03 0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15	169.999.500			5	27.300.000	40,00	2		20,00	1	3.717.767	20,00	1,00	4.660.000	20,00	1	9.755.500	100	5	18.133.267	5	18.133.267	33,33	10,67	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 01 03 2 03 0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	18	169.999.500			8	25.670.000	50,00	4		12,50	1		25,00	2,00	2.050.000	12,50	1	2.725.500	100	8	4.775.500	8	4.775.500	44,44	2,81	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**40,48**		**0,31**	**21,55**		**7,58**	**23,33**		**9,70**	**14,64**		**13,44**	**100**		**31,04**			**34,92**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PERENCANAAN						**6.806.394.737**			**1.148.763.262**			**1.989.721.881**			**1.012.122.753**			**1.271.895.434**			**5.438.213.530**		**5.438.213.530**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Perencanaan (%)							**35,81**		**16,88**	**19,58**		**29,23**	**22,78**		**14,87**	**19,75**		**18,69**	**100**		**79,90**			**43,25**	**14,81**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Perencanaan							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**SR**	**SR**	
		5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
		5 02	**KEUANGAN**			**919.261.024.375**				**168.757.359.972**			**21.703.238.114**			**15.105.734.885**			**24.653.770.205**			**100.662.883.449**			**162.125.626.653**		**162.125.626.653**		**17,64**	
		5 02	**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**																											

No	Sasaran	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3							4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH									**INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH**	**28,5**	**88.369.905.625**				**17.395.685.752**			**2.613.919.107**			**4.507.331.766**			**3.155.489.869**			**5.263.697.057**			**15.540.437.799**		**15.540.437.799**			
	MENINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH									**HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH**	**AA (90,01)**	**88.369.905.625**				**17.395.685.752**			**2.613.919.107**			**4.507.331.766**			**3.155.489.869**			**5.263.697.057**			**15.540.437.799**		**15.540.437.799**			
1		**5**	**02**	**01**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**88.369.905.625**		**-**		**17.395.685.752**			**2.613.919.107**			**4.507.331.766**			**3.155.489.869**			**5.263.697.057**			**15.540.437.799**		**15.540.437.799**			
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat									**Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah**	**29,53**	**381.975.000**	**0**	**-**	**30,00**	**60.000.000**	**0,00**		**9.512.500**	**24,41**		**7.255.000**	**0,00**		**19.716.470**	**0,00**		**20.632.500**	**24,41**		**57.116.470**	**24,41**	**57.116.470**	**82,66**	**14,95**	**BPPKAD**
										Nilai Kinerja Pelaporan	**13,00**		**0**		**13,50**		**0,00**			**11,59**			**0,00**			**0,00**				**11,59**			**11,59**		**89,15**		
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	**5**	**02**	**01**	**2**	**01**			**Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**100**	**190.987.500**	**0**	**-**	**100**	**60.000.000**	**50,00**		**9.512.500**	**33,33**		**7.255.000**	**16,67**		**19.716.470**	**0,00**		**20.632.500**	**100**		**57.116.470**	**100**	**57.116.470**	**100**	**29,91**	
										Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	**100**	**190.987.500**	**0**	**-**	**100**		**60,00**			**20,00**			**20,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
		5	02	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	190.987.500	0	-	6	35.000.000	50,00	3	2.387.500	33,33	2	7.255.000	16,67	1	10.808.660	0,00	0,00	12.980.000	100	6	33.431.160	6	33.431.160	25,00	17,50	
		5	02	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	190.987.500	0	-	5	25.000.000	60,00	3	7.125.000	20,00	1	-	20,00	1	8.907.810	0,00	0,00	7.652.500	100	5	23.685.310	5	23.685.310	41,67	12,40	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	**5**	**02**	**01**						**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI**	**0%**	**68.009.780.625**	**-**			**14.354.479.839**	**0,00**		**2.195.396.770**	**0,00**		**3.741.714.757**			**2.664.990.616**			**4.146.570.672**	**0,00**		**12.748.672.815**	**0,00**	**12.748.672.815**	**100**	18,75	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	**5**	**02**	**01**	**2**	**02**			**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar**	**100%**	**68.009.780.625**	**0**	**-**	**100**	**14.354.479.839**	**25,00**		**2.195.396.770**	**25,00**		**3.741.714.757**	**25,00**		**2.664.990.616**	**25,00**		**4.146.570.672**	**100**		**12.748.672.815**	**100**	**12.748.672.815**	**100**	**18,75**	
		5	02	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	321 Orang/36 bulan (159 Laki-laki dan 162 Perempua	67.627.805.625	0	-	12	14.304.479.839	25,00	3	2.191.276.770	25,00	3	3.724.079.757	25,00	3	2.653.898.266	25,00	3	4.131.200.672	100,00	12	12.700.455.465	12	12.700.455.465	0,33	18,78	
		5	02	01	2	02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	190.987.500		-	12	25.000.000	25,00	3	4.120.000	25,00	3	9.990.000	25,00	3	7.804.750	25,00	3	2.135.000	100	12	24.049.750	12	24.049.750	0,33	12,59	
		5	02	01	2	02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	54 Laporan	190.987.500		-	26	25.000.000	23,08	6	-	26,92	7	7.645.000	11,54	3	3.287.600	38,46	10	13.235.000	100	26	24.167.600	26	24.167.600	0,48	12,65	
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat	**5**	**02**	**01**						**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**72,00**	**966.212.500**	**-**			**-**	**0,00**		**-**	**65,67**			**0,00**			**-**				**65,67**		**-**	**65,67**	**-**	**91,21**	**0,00**	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan	**5**	**02**	**01**	**2**	**05**			**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**100**	**254.350.000**	**0**	**-**	**50,00**	**-**	**0,50**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,50**		**-**	**0,50**	**-**	**0,50**	**0,00**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian									**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100**	**190.987.500**	**0**	**-**	**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**			**25,00**			**25,00**				**100**		**-**	**100**	**-**	**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan									**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**30**	**520.875.000**	**0**	**-**	**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**			**25,00**			**25,00**				**100**		**-**	**100**	**-**	**#####**		
		5	02	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	254.350.000	0	-	1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
		5	02	01	2	05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	190.987.500	0	-	11	-	36,36	4	-	18,18	2		27,27	3		18,18	2		100	11	-	11	-	1,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		5 02 01 2 05 09	Perndidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 orang (18 Laki dan 18 Perempuan)	520.875.000	0	-	12	-	16,67	2	-	8,33	1		25,00	3		50,00	6		100	12	-	12	-	0,33	0,00	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	**5 02 01**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**5,00**	**11.025.187.500**	**-**			**2.471.555.941**			**341.066.303**			**661.895.013**			**431.495.983**			**845.357.458**			**2.279.814.757**		**2.279.814.757**			
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	**5 02 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah**	**100**	**2.604.375.000**	**0**	**-**	**100**	**428.584.500**	**25,00**		**48.705.612**	**25,00**		**42.236.230**	**25,0**		**-**	**25,00**		**322.135.966**	**100**		**413.077.808**	**100**	**413.077.808**	**100**	**15,86**	
		5 02 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	2.083.500.000	0	-	12	416.259.500	25,00	3	48.705.612	25,00	3	36.396.230	25,00	3	-	25,00	3	317.960.966	100	12	403.062.808	12	403.062.808	0,33	19,35	
		5 02 01 2 06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	225.712.500		-	12	12.325.000	25,00	3	-	25,00	3	5.840.000	25,00	3	-	25,00	3	4.175.000	100	12	10.015.000	12	10.015.000	0,33	4,44	
		5 02 01 2 06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	295.162.500		-	12	-	25,00	3	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	0,33	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat	**5 02 01 2 08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah**	**100%**	**8.420.812.500**	**0**	**-**	**100**	**2.042.971.441**	**25,00**		**292.360.691**	**25,00**		**619.658.783**	**25,00**		**431.495.983**	**25,00**		**523.221.492**	**100**		**1.866.736.949**	**100**	**1.866.736.949**	**100**	**22,17**	
		5 02 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	3.038.437.500	0	-	12	714.311.249	25,00	3	105.597.600	25,00	3	247.409.740	25,00	3	130.009.600	25,00	3	145.997.300	100	12	629.014.240	12	629.014.240	0,33	20,70	
		5 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	2.083.500.000	0	-	12	638.130.715	25,00	3	45.219.291	25,00	3	149.279.243	25,00	3	135.833.183	25,00	3	227.484.092	100	12	557.815.809	12	557.815.809	0,33	26,77	
		5 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	3.298.875.000	0	-	12	690.529.477	25,00	3	141.543.800	25,00	3	222.969.800	25,00	3	165.653.200	25,00	3	149.740.100	100	12	679.906.900	12	679.906.900	0,33	20,61	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	**5 02 01**		**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**90%**	**7.986.750.000**	**-**			**509.649.972**			**67.943.534**			**96.466.996**			**39.286.800**			**251.136.427**			**454.833.757**		**454.833.757**			
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana	**5 02 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah**	**15%**	**4.601.062.500**	**0**	**-**	**80,00**	**46.557.180**	**0,00**		**-**	**0,00**		**44.000.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**450.000**	**0,00**		**44.450.000**	**0,00**	**44.450.000**	**0,00**	**0,97**	
		5 02 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit kendaraan Roda empat,	3.646.125.000	0	-	4	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		5 02 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	105 Unit	954.937.500	0	-	51	46.557.180	0,00	0,00	-	100	51	44.000.000	0,00	0,00	-	0,00		450.000	100	51	44.450.000	51	44.450.000	0,49	4,65	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**5 02 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**65**	**3.385.687.500**	**0**	**-**	**85,00**	**463.092.792**	**25,00**		**67.943.534**	**25,00**		**52.466.996**	**25,00**		**39.286.800**	**25,00**		**250.686.427**	**100**		**410.383.757**	**100**	**410.383.757**	**#####**	**12,12**	
		5 02 01 2 09 02	Pengedaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit Kendaraan Roda Empat, 180 Unit Kendaraan	1.562.625.000	0	-	65	339.942.792	16,92	11	67.943.534	38,46	25	14.426.996	23,08	15	39.286.800	21,54	14	183.831.427	100	65	305.488.757	65	305.488.757	0,29	19,55	
		5 02 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	225 Unit	868.125.000	0	-	110	123.150.000	20,91	23	-	27,27	30	38.040.000	27,27	30	-	24,55	27	66.855.000	100	110	104.895.000	110	104.895.000	0,49	12,08	
		5 02 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Gedung Kantor BPPKAD	954.937.500	0	-	9	-	0,00	0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		-	0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	26,50		15,03	29,53		25,91	21,93		18,14	22,05		30,26	100		89,34			3,81	0,00	
										Predikat Kinerja	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		T			SR	SR	
	MENINGKATKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	**5 02**		**PERSENTASE PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**100%**	**799.326.093.750**		-		**145.567.303.342**			**18.305.901.022**			**9.269.344.807**			**20.310.275.221**			**93.347.825.796**			**141.233.346.846**		**141.233.346.846**			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH			**CAKUPAN DIMENSI INDEKS KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**100%**	**799.326.093.750**				**145.567.303.342**			**18.305.901.022**			**9.269.344.807**			**20.310.275.221**			**93.347.825.796**			**141.233.346.846**		**141.233.346.846**			
2	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**	**5 02 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**100**	**787.884.206.250**	**0**	**-**	**100**	**143.847.561.296**	**25,00**		**18.028.291.745**	**25,00**		**8.853.808.550**	**25,00**		**20.022.400.921**	**25,00**		**92.836.980.999**	**100**		**139.741.482.215**	**100**	**139.741.482.215**	**100**	**17,74**	**BPPKAD**
				Penetapan APBD Tepat Waktu	**100**	**6.510.937.500**	**0**		**100**	**930.307.040**	**25,00**		**5.865.340**	**25,00**		**90.880.000**	**25,00**		**184.844.935**	**25,00**		**564.635.710**	**100**		**846.225.985**	**100**	**846.225.985**	**100**		
	Meningkatnya Koordinasi Dan Penyusunan Anggaran Daerah Sesuai Peraturan Yang Berlaku	**5 02 02 2 01**	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Alokasi anggaran belanja APBD sesuai dengan peraturan perundang undangan (Mandatory Spending)**	**55,00**	**6.510.937.500**	**0**	**-**	**50,00**	**930.307.040**	**25,00**		**5.865.340**	**25,00**		**90.880.000**	**25,00**		**184.844.935**	**25,00**		**564.635.710**	**100**		**846.225.985**	**100**	**846.225.985**	**#####**	**13,00**	
		5 02 02 2 01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	538.237.500	0	-	2	105.587.190	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	2	92.335.935	0,00	0,00	8.774.000	100	2	101.109.935	2	101.109.935	0,33	18,79	
		5 02 02 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	538.237.500	0	-	2	96.518.400	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	2	83.600.000	0,00	0,00	9.491.000	100	2	93.091.000	2	93.091.000	0,33	17,30	
		5 02 02 2 01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	329.887.500	0	-	34	-	100	34		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		100	34	-	34		0,50	0,00	
		5 02 02 2 01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	260.437.500	0	-	34	-	0,00	0,00		0,00	0,00		100	34		0,00	0,00		100	34	-	34		0,50	0,00	
		5 02 02 2 01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	190.987.500	0	-	34	-	100	34		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		100	34	-	34		0,50	0,00	
		5 02 02 2 01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	121.537.500	0	-	34	-	0,00	0,00		0,00	0,00		100	34		0,00	0,00		100	34	-	34		0,50	0,00	
		5 02 02 2 01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	3 Dokumen	1.649.437.500	0	-	1	281.082.650	0,00	0,00	5.045.340	0,00	0,00	-	100	1	8.173.000	0,00	0,00	248.735.994	100	1	261.954.334	1	261.954.334	0,33	15,88	
		5 02 02 2 01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	3 Dokumen	1.649.437.500	0	-	1	350.886.230	0,00	0,00	820.000	0,00	0,00	90.880.000	100	1	-	0,00	0,00	212.166.541	100	1	303.866.541	1	303.866.541	0,33	18,42	
		5 02 02 2 01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang	3 Dokumen	329.887.500	0	-	1	96.232.570	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	1	736.000	0,00	0,00	85.468.175	100	1	86.204.175	1	86.204.175	0,33	26,13	
		5 02 02 2 01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3 Dokumen	190.987.500	0	-	1	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		5 02 02 2 01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	3 Dokumen	190.987.500	0	-	1	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		5 02 02 2 01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	3 Dokumen	121.537.500	0	-	1	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		5 02 02 2 01 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	204 Orang (laki dan perempuan)	399.337.500	0	-	68	0	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Persentase Layanan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah Sesuai SOP	**100**	**6.102.918.750**		**-**	**100**	**1.075.996.624**	**25,00**		**188.739.700**	**25,00**		**262.534.420**	**25,00**		**102.485.400**	**25,00**		**431.631.235**	**100**		**985.390.755**	**100,00**	**985.390.755**	**#####**	**16,15**	
	Meningkatnya Koordinasi Dan Tata Kelola Perbendaharaan Daerah	**5 02 02 2 02**	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Anggaran Kas Terhadap Belanja Daerah**	**100**	**6.102.918.750**		**-**	**100**	**1.075.996.624**	**25,00**		**188.739.700**	**25,00**		**262.534.420**	**25,00**		**102.485.400**	**25,00**		**431.631.235**	**100**		**985.390.755**	**100**	**985.390.755**	**100**	**16,15**	
				Persentase SP2D yang diterbitkan Tepat waktu	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase Penerimaan Dana Transfer	**97,00**				**95,00**		**23,75**			**23,75**			**23,75**			**23,75**			**95,00**			**95,00**		**97,94**		
		5 02 02 2 02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 Dokumen	1.302.187.500	0	-	1	162.960.000	0,00	0,00	5.343.600	0,00	0,00	28.745.020	100	1	11.700.000	0,00	0,00	56.029.358	100	1	101.817.978	1	101.817.978	0,33	7,82	
		5 02 02 2 02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dokumen (34 OPD x 4 Tw x 3	1.441.087.500	0	-	136	264.840.000	25,00	34	90.530.000	25,00	34	45.760.000	25,00	34	-	25,00	34	107.319.180	100	136	243.609.180	136	243.609.180	0,33	16,90	
		5 02 02 2 02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	36 Dokumen/ 36 Bulan	1.336.912.500	0	-	12	84.816.624	25,00	3	16.643.600	25,00	3	25.370.400	25,00	3	17.585.400	25,00	3	24.717.200	100	12	84.316.600	12	84.316.600	0,33	6,31	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		5 02 02 2 02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3 Dokumen	190.987.500	0	-	1	55.000.000	0,00	0,00	16.530.000	0,00	0,00	-	100	1	-	0,00	0,00	37.370.360	100	1	53.900.360	1	53.900.360	0,03	28,22	
		5 02 02 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	36 Laporan/ 36 Bulan	954.937.500	0	-	12	182.200.000	25,00	3	22.830.000	25,00	3	76.935.000	25,00	3	27.600.000	25,00	3	54.282.103	100	12	181.647.103	12	181.647.103	0,33	19,02	
		6 02 02 3 02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang	3 Dokumen	190.987.500	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 02 02 4 02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	36 Dokumen/ 36 Bulan	95.493.750	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		5 02 02 2 02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen	190.987.500	0	-	1	166.180.000	0,00	0,00	5.530.000	0,00	0,00	46.445.000	100	1	34.500.000	0,00	0,00	76.594.623	100	1	163.069.623	1	163.069.623	0,33	85,38	
		5 02 02 2 02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	204 Orang (laki dan perempuan)	399.337.500	0	-	35	160.000.000	20,00	7	31.332.500	22,86	8	39.279.000	5,71	2	11.100.000	42,86	15	75.318.411	91,43	32	157.029.911	32	157.029.911	0,16	39,32	
				Penyusunan Dan Penyampaian LKPD Sesuai SAP Tepat Waktu	**100**	**4.809.412.500**			**100**	**631.856.545**	**25,00**		**135.987.900**	**25,00**		**54.340.750**	**25,00**		**147.709.750**	**25,00**		**149.206.763**	**100**		**487.245.163**	**100**	**487.245.163**	**100**		
	Meningkatnya Koordinasi Dan Tata Kelola Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	**5 02 02 2 03**	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Sesuai SAP**	**100**	**4.809.412.500**	**0**	**-**	**100**	**631.856.545**	**25,00**		**135.987.900**	**25,00**		**54.340.750**	**25,00**		**147.709.750**	**25,00**		**149.206.763**	**100**		**487.245.163**	**100**	**487.245.163**	**100**	**10,13**	
		5 02 02 2 03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	3 Laporan	399.337.500	0	-	1	1.330.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	1	-	0,00	0,00	1.330.000	100	1	1.330.000	1	1.330.000	0,33	0,33	
		5 02 02 2 03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	36 Laporan Bulanan, 12 Laporan	1.649.437.500	0	-	18	95.710.000	22,22	4	1.230.000	16,67	3	-	17	3	38.550.750	44,44	8	29.127.489	100	18	68.908.239	18	68.908.239	0,50	4,18	
		5 02 02 2 03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dokumen Rancangan PERDA, 3 Dokumen Rancangan PERBUP	1.579.987.500	0	-	2	376.122.545	0,00	0,00	133.527.900	50,00	1	20.654.750	50,00	1	77.723.000	0,00	0,00	102.529.274	100	2	334.434.924	2	334.434.924	0,33	21,17	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		5 02 02 2 03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	3 Dokumen	190.987.500	0	-	1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		5 02 02 2 03 07	'Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan	3 Dokumen	190.987.500	0	-	1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		5 02 02 2 03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	3 Dokumen	399.337.500	0	-	1	30.894.000	0,00	0,00	1.230.000	100	1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	8.070.000	100	1	9.300.000	1	9.300.000	0,33	2,33	
		5 02 02 2 03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	204 Orang (laki dan perempuan)	399.337.500	0	-	15	127.800.000	0,00	0,00		40,00	6	33.686.000	40,00	6	31.436.000	6,67	1	8.150.000	86,67	13	73.272.000	13	73.272.000	0,06	18,35	
				Persentase Layanan Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan	**100**	**767.422.500.000**			**100**	**141.100.245.647**	**25,00**		**17.683.344.500**	**25,00**		**8.446.053.380**	**25,00**		**19.587.360.836**	**25,00**		**91.604.460.425**	**100**		**137.321.219.141**	**100**	**137.321.219.141**	**100**	**17,89**	
	Meningkatnya Tata Kelola Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**5 02 02 2 04**	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penyaluran Anggaran Yang dialokasikan untuk Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai**	**100**	**767.422.500.000**	**0**	**-**	**100**	**141.100.245.647**	**25,00**		**17.683.344.500**	**25,00**		**8.446.053.380**	**25,00**		**19.587.360.836**	**25,00**		**91.604.460.425**	**100**		**137.321.219.141**	**100**	**137.321.219.141**	**100**	**17,89**	
		5 02 02 2 04 07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	36 Laporan	10.417.500.000	0	-	12	500.840.000	25,00	3	58.086.190	25,00	3	53.076.450	25,00	3	45.524.400	25,00	3	37.043.350	100	12	193.730.390	12	193.730.390	0,33	1,86	
		5 02 02 2 04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	3 Laporan	642.412.500.000	0	-	1	126.502.189.400	0,00	0,00	17.238.125.310	0,00	0,00	8.059.350.000	100	1	14.259.350.000	0,00	0,00	86.945.364.090	100	1	126.502.189.400	1	126.502.189.400	0,33	19,69	
		5 02 02 2 04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	36 Laporan	76.395.000.000	0	-	12	5.466.697.947	25,00	3	387.133.000	25,00	3	333.626.930	25,00	3	707.744.286	25,00	3	566.276.835	100	12	1.994.781.051	12	1.994.781.051	0,33	2,61	
		5 02 02 2 04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3 Laporan	38.197.500.000	0	-	1	8.630.518.300	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	1	4.574.742.150	0,00	0,00	4.055.776.150	100	1	8.630.518.300	1	8.630.518.300	0,33	22,59	
				Persentase Layanan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertangani	**100**	**3.038.437.500**			**100**	**109.155.440**	**25,00**		**14.354.305**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**87.046.866**	**100**		**101.401.171**	**100**	**101.401.171**	**100**	**3,34**	
	Meningkatnya Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	**5 02 02 2 05**	**Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase Data Informasi Keuangan Daerah tersistematis berbasis IT**	**100**	**3.038.437.500**	**0**	**-**	**100**	**109.155.440**	**25,00**		**14.354.305**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**87.046.866**	**100**		**101.401.171**	**100**	**101.401.171**	**100**	**3,34**	
		5 02 02 2 05 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan	3 Dokumen	260.437.500	0	-	1	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		5 02 02 2 05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	868.125.000	0	-	1	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		5 02 02 2 05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	612 Orang	1.909.875.000	0	-	20	109.155.440	10,00	2	14.354.305	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	85,00	17	87.046.866	95,00	19	101.401.171	19	101.401.171	0,28	5,31	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**10,48**		**12,53**	**9,85**		**6,15**	**42,71**		**13,92**	**8,44**		**64,54**	**98,97**		**97,15**			**0,24**	**11,05**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**R**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik**	**5 02 03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Indek Kinerja Pengelolaan BMD**	**100**	**11.441.887.500**	**0**	**-**	**100**	**1.719.742.046**	**25,00**		**277.609.277**	**25,00**		**415.536.257**	**25,00**		**287.874.300**	**25,00**		**510.844.797**	**100**		**1.491.864.631**	**100**	**1.491.864.631**	**100**	**13,04**	**BPPKAD**
				Persentase Penyusunan dan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	**100**		**0**		**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	MENINGKATNYA TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT	**5 02 03 2 01**	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah Disusun Tepat Waktu**	**100**	**11.441.887.500**	**0**	**-**	**100**	**1.719.742.046**	**0,00**		**277.609.277**	**0,00**		**415.536.257**	**0,00**		**287.874.300**	**0,00**		**510.844.797**	**0,00**		**1.491.864.631**	**0,00**	**1.491.864.631**	**0,00**	**13,04**	
				Persentase Barang Milik Daerah yang dilakukan	**39,00**		**0**		**13,33**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola yang	**100**		**0**	**-**	**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
				Persentase Laporaan Barang Pengguna (PD) yang disusun dan disampaikanTepat	**100**		**0**	**-**	**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
		5 02 03 2 01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	607.687.500	0	-	1	38.980.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	19.335.000	100	1	3.250.000	0,00	0,00	300.000	100	1	22.885.000	1	22.885.000	0,33	3,77	
		5 02 03 3 01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	260.437.500	0	-	1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	32.140.000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	32.140.000	0	32.140.000	0,00	12,34	
		5 02 03 2 01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	260.437.500	0	-	1	34.404.600	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	100	1	1.410.000	100	1	1.410.000	1	1.410.000	0,33	0,54	
		5 02 03 2 01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	520.875.000	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		5 02 03 2 01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	295.162.500	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		5 02 03 2 01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Laporan	295.162.500	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		5 02 03 2 01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1.736.250.000	0	-	1	166.534.416	0,00	0,00	35.745.427	0,00	0,00	24.129.350	100	1	15.223.600	0,00	0,00	59.272.828	100	1	134.371.205	1	134.371.205	0,33	7,74	
		5 02 03 2 01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	1.215.375.000		-	1	342.187.125	0,00	0,00	102.243.400	0,00	0,00	-	100	1	98.323.000	0,00	0,00	134.729.869	100	1	335.296.269	1	335.296.269	0,33	27,59	
		5 02 03 2 01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	260.437.500	0	-	0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		5 02 03 2 01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	3 Dokumen	3.993.375.000	0	-	1	481.321.505	0,00	0,00	52.169.450	0,00	0,00	240.243.907	0,00	0,00	52.856.200	100	1	97.461.600	100	1	442.731.157	1	442.731.157	0,33	11,09	
		5 02 03 2 01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	260.437.500		-	2	121.676.235	50,00	1	18.390.000	0,00	0,00	38.374.000	50,00	1	9.745.000	0,00	0,00	34.720.500	100	2	101.229.500	2	101.229.500	0,33	38,87	
		5 02 03 2 01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	6 Laporan	1.336.912.500	0	-	2	534.638.165	50,00	1	69.061.000	0,00	0,00	61.314.000	50,00	1	108.476.500	0,00	0,00	182.950.000	100	2	421.801.500	2	421.801.500	0,33	31,55	
		5 02 03 2 01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	204 Orang (laki dan perempuan)	399.337.500	0	-	68	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
											7,69		**16,14**	**0,00**		**24,16**	**30,77**		**16,74**	**15,38**		**29,70**	**100**		**86,75**			**0,18**	**10,27**	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**SR**	**SR**	
	OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			**PERSENTASE REALISASI PAD TERHADAP TARGET PAD**	**100,00%**	**20.123.137.500**				**4.074.628.832**			**505.808.708**			**913.522.055**			**900.130.815**			**1.540.515.799**			**3.859.977.377**		**3.859.977.377**			
4	**Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah**	**5 02 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah**	**100%**	**20.123.137.500**	**0**	**-**	**42,50**	**4.074.628.832**	**0,00**		**505.808.708**	**0,00**		**913.522.055**	**0,00**		**900.130.815**	**0,00**		**1.540.515.799**	**0,00**		**3.859.977.377**	**0,00**	**3.859.977.377**	**0,00**	**19,18**	**BPPKAD**
	MENINGKATNYA TATA KELOLA PAJAK DAERAH SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU	**5 02 04 2 01**	**KegiatanKegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase Peningkatan Pajak Daerah**	**7.5%**	**20.123.137.500**	**0**	**-**	**7,5%**	**4.074.628.832**	**0,00**		**505.808.708**	**0,00**		**913.522.055**	**0,00**		**900.130.815**	**0,00**		**1.540.515.799**	**0,00**		**3.859.977.377**	**0,00**	**3.859.977.377**	**0,00**	**19,18**	
		5 02 04 2 01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	225.712.500	**0**		1	31.623.138	0,00	0	2.870.000	100	1	4.795.000	0,00	0,00	-	0,00		21.574.500	100	1	29.239.500	1	29.239.500	0,33	12,95	
		5 02 04 2 01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	399.337.500	0	-	1	85.334.440	0,00	0,00	2.050.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	1	81.455.270	100	1	83.505.270	1	83.505.270	0,33	20,91	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		5 02 04 2 01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	434.062.500	0	-	1	64.041.696	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	1	58.258.127	100	1	58.258.127	1	58.258.127	0,33	13,42	
		5 02 04 2 01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	525 Unit	2.257.125.000	0	-	50	173.547.800	0,00	0,00	16.000.000	0,00	0,00	24.000.000	50,00	25	24.000.000	50,00	25	82.535.000	100	50	146.535.000	50	146.535.000	0,10	6,49	
		5 02 04 2 01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daera	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek	3 Laporan	8.681.250.000	0	-	1	2.236.854.629	0,00	0	383.795.908	0,00	0,00	656.929.350	0,00	0,00	474.509.000	100	1	676.816.251	100	1	2.192.050.509	1	2.192.050.509	0,33	25,25	
		5 02 04 2 01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	607.687.500	0	-	1	92.812.558	0,00	0	9.182.400	0,00	0,00	15.273.600	0,00	0,00	28.301.150	100	1	35.469.985	100	1	88.227.135	1	88.227.135	0,33	14,52	
		5 02 04 2 01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	70.000 NJOP	434.062.500	0	-	30.000,00	95.323.870	0,00	0,00	-	0,00	0,00	56.539.305	0,00	0,00	12.194.125	100	####	18.385.000	100	####	87.118.430	30000	87.118.430	0,43	20,07	
		5 02 04 2 01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36 Dokumen	434.062.500	0	-	12	-	25,00	3	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	0,33	0,00	
		5 02 04 2 01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	36 Bulan	1.215.375.000	0	-	12	288.398.240	25,00	3	26.640.400	25,00	3	39.414.000	25,00	3	102.897.940	25,00	3	98.226.930	100	12	267.179.270	12	267.179.270	0,33	21,98	
		5 02 04 2 01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	36 Dokumen	190.987.500	0	-	12	-	25,00	3		25,00	3		25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	0,33	0,00	
		5 02 04 2 01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	36 Dokumen	3.646.125.000	0	-	12	779.811.601	25,00	3	63.490.000	25,00	3	114.160.800	25,00	3	258.228.600	25,00	3	264.305.190	100	12	700.184.590	12	700.184.590	0,33	19,20	
		5 02 04 2 01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	36 Dokumen	190.987.500	0	-	12	35.243.670	25,00	3	480.000	25,00	3	480.000	25,00	3	-	25,00	3	33.294.500	100	12	34.254.500	12	34.254.500	0,33	17,94	
		5 02 04 2 01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak	36 Dokumen	954.937.500	0	-	12	161.206.425	25,00	3	1.300.000	25,00	3	1.930.000	25,00	3	-	25,00	3	140.872.846	100	12	144.102.846	12	144.102.846	0,33	15,09	
		5 02 04 2 01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi	3 Laporan	190.987.500	0	-	1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		6 02 04 3 01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan	260.437.500	0	-	1	30.430.765	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	1	29.322.200	100	1	29.322.200	1	29.322.200	0,33	11,26	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							10,71		12,41	17,86		22,42	14,29		22,09	57,14		37,81	100		94,73	#####		0,30	13,27	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	R		SR	ST		ST			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEUANGAN						168.757.359.972			21.703.238.114			15.105.734.885			24.653.770.205			100.662.883.449			162.125.626.653		162.125.626.653			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Penunjang Urusan Keuangan (%)							13,85		12,86	14,31		8,95	27,42		14,61	25,75		59,65	99,74		96,07			1,13	8,65	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Penunjang Urusan Keuangan							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		R	ST		ST			SR	SR	
		5	**PENUNJANG URUSAN BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN**		100	25.366.417.677				6.943.684.506			1.216.876.089			2.009.853.676			1.578.806.758,00			1.588.080.722,00			6.393.617.245		6.393.617.245		25,21	
		5 03	**KEPEGAWAIAN**																											
	Meningkat Akuntabilitas Kinerja Perangkat			Hasil Evaluasi Akip Perangkat Daerah	BB (75,00)				BB (75,00)		0,00			BB (73,66)									BB (73,66)			BB (73,66)		98,21		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	25,00	25.366.417.677		-	28,00	6.943.684.506	0,00		1.216.876.089	24,94		2.009.853.676	0,00		1.578.806.758	0,00		1.588.080.722	24,94		6.393.617.245	24,94	6.393.617.245	99,76	25,21	BKPSDMD
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat	13,00				14,00		0,00			11,11			0,00			0,00			11,11			11,11		85,46		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00				0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		100		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64,00				63,20		0,00			84,35			0,00			0,00			84,35			84,35		#####		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4,00				3,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100				100		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	**5 03 01 2 01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**100**	**66.729.800**		-	**100**	**31.029.860**	**37,50**		**4.510.000**	**25,00**		**5.687.500**	**37,50**		**-**	**0,00**		**7.990.000**	**100**		**18.187.500**	**100**	**18.187.500**	**100**	**27,26**	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	**100**				**100**		**50,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 03 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Perencanaan, Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	24	44.349.800			8	10.860.000	37,50	3	820.000	25,00	2	3.927.500	37,50	3		0,00	0,00	1.680.000	100	8	6.427.500	8	6.427.500	33,33	14,49	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5 03 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun (laporan)	12	22.380.000			4	20.169.860	50,00	2	3.690.000	25,00	1	1.760.000	25,00	1		0,00	0,00	6.310.000	100	4	11.760.000	4	11.760.000	33,33	52,55	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat	**5 03 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)**	**100**	**19.426.985.082**			**100**	**5.793.087.556**	**25,00**		**1.092.038.923**	**25,00**		**1.734.071.939**	**25,00**		**1.408.713.092**	**25,00**		**1.185.468.308**	**100**		**5.420.292.262**	**100**	**5.420.292.262**	**100**	**27,90**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5 03 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	19.311.135.082			50	5.793.087.556	25,00	50	1.092.038.923	25,00	50	1.734.071.939	25,00	50	1.408.713.092	25,00	50	1.185.468.308	100	50	5.420.292.262	50	5.420.292.262	92,59	28,07	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	5 03 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36	115.850.000			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	5 03 01 2 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	126	124.125.000			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan	**5 03 01 2 05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**100**	**211.910.000**			**75,82**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**50,00**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	5 03 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang	5	57.365.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 03 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36	120.815.000			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 03 01 2 05 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20	154.545.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat	**5 03 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah**	**100**	**1.194.326.925**			**100**	**302.055.174**	**25,00**		**32.082.560**	**25,00**		**106.070.428**	**25,00**		**63.657.856**	**25,00**		**57.804.730**	**100**		**259.615.574**	**100**	**259.615.574**	**100**	**21,74**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5 03 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	1.039.781.925			12	302.055.174	25,00	3	32.082.560	25,00	3	106.070.428	25,00	3	63.657.856	25,00	3	57.804.730	100	12	259.615.574	12	259.615.574	33,33	24,97	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis	5 03 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	154.545.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	5 03 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	154.545.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana	**5 03 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**4,23**	**610.000.000**			**4,60**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 03 01 27 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (unit)	1	400.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 03 01 27 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	45	210.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		5 03 01 28	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**	**100**	**3.121.780.870**			**100**	**719.267.916**	**25,00**		**88.244.606**	**25,00**		**133.987.006**	**25,00**		**98.655.810**	**25,00**		**304.968.509**	**100**		**625.855.931**	**100**	**625.855.931**	**100**	**20,05**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 03 01 28 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	2.009.056.870			12	488.645.775	25,00	3	42.015.800	25,00	3	74.248.488	25,00	3	54.602.312	25,00	3	254.920.544	100	12	425.787.144	12	425.787.144	33,33	21,19	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 03 01 28 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	618.180.000			12	150.418.223	25,00	3	32.305.206	25,00	3	28.757.618	25,00	3	26.268.098	25,00	3	33.600.765	100	12	120.931.687	12	120.931.687	33,33	19,56	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 03 01 28 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	494.544.000			12	80.203.918	25,00	3	13.923.600	25,00	3	30.980.900	25,00	3	17.785.400	25,00	3	16.447.200	100	12	79.137.100	12	79.137.100	33,33	16,00	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan	**5 03 01 27**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)**	**4,60**	**50.000.000**			**1,00**	**2.814.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**1,00**		**2.814.000**	**1,00**		**2.814.000**	**1**	**2.814.000**	**1**	**5,63**	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 03 01 27 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	15	50.000.000			1	2.814.000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		100	1	2.814.000	100	1	2.814.000	1	2.814.000	6,67	5,63	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat	**5 03 01 29**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik**	**100**	**684.685.000**			**100**	**95.430.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**30.036.803**	**25,00**		**7.780.000**	**25,00**		**29.035.175**	**100**		**66.851.978**	**100**	**66.851.978**	**100**	**9,76**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	5 03 01 29 0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	463.635.000			5	60.690.000	20,00	1		40,00	2	30.036.803	20,00	1	7.780.000	20,00	1	20.260.175	100	5	58.076.978	5	58.076.978	33,33	12,53	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 03 01 29 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	96.050.000			65	34.740.000	7,69	5	-	35,38	23		0,00	0,00		56,92	37	8.775.000	100	65	8.775.000	65	8.775.000	92,86	9,14	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 03 01 29 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	125.000.000			0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**24,02**		**17,52**	**25,04**		**28,95**	**20,75**		**22,74**	**20,19**		**22,87**	**100**		**92,08**			**22,04**	**25,21**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
	Meningkatnya Manajemen SDM dan Pelayanan Kepegawaian Yang Handal			**Persentase Aspek Manajemen SDM yang dikelola sesuai NSPK**	**74,00**				**72,00**																				
2	**Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi, kinerja dan**	**5 03 02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Rencana kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan**	**100**	**5.343.941.843**		**-**	**100**	**1.678.168.766**	**0,00**		**159.391.613**	**100**		**178.545.632**	**0,00**		**566.346.534**	**0,00**		**436.594.589**	**100**		**1.340.878.368**	**100**	**1.340.878.368**	**100**	**25,09**	**BKPSDMD**
				Persentase pengadaan ASN sesuai dengan Rencana Kebutuhan	**16,09**				**14,47**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya nilai NSPK dalam elemen mutasi dan promosi ASN	**5 03 02 21 01**	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi**	**100**	**721.000.643**			**100**	**131.060.000**	**25,00**		**6.073.454**	**25,00**		**-**	**0,00**		**24.085.548**	**0,00**		**86.398.891**	**50,00**		**116.557.893**	**50,00**	**116.557.893**	**50,00**	**16,17**	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	5 03 02 21 0002	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3	92.727.000			1	131.060.000	0,00	0,00	6.073.454	100	1		0,00	0,00	24.085.548	0,00	0,00	86.398.891	100	1	116.557.893	1	116.557.893	33,33	125,70	
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 03 02 21 0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3	486.092.243			1		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan	5 03 02 21 0004	Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	3	61.818.000			1		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	5 03 02 21 0006	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	605	80.363.400			200		8	15		33,50	67		36,00	72		23,00	46		100	200	-	200	-	33,06	0,00	
	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	5 03 02 21 0007	Sub Kegiatan Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian	3	61.818.000			1		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi, kinerja dan			**Persentase Data Kepegawaian yang Up to date, Akurat, Cepat, Tepat**	**100**	**312.120.000**		**-**	**100**	**425.337.031**	**25,00**		**15.432.926**	**25,00**		**21.909.704**	**25,00**		**221.418.507**	**25,00**		**112.022.453**	**100**		**370.783.590**	**100**	**370.783.590**	**100**	**#####**	-
	Terpenuhinya data dan informasi kepegawaian yang akurat			**Persentase kesesuaian kebutuhan diklat aparatur setiap PD**	**87,00**	**312.120.000**		**-**	**87,00**	**425.337.031**	**0,00**		**15.432.926**	**0,00**		**21.909.704**	**0,00**		**221.418.507**	**0,00**		**112.022.453**	**0,00**		**370.783.590**	**0,00**	**370.783.590**	**0,00**	**#####**	-
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 03 02 21 0010	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	104.040.000			1	65.020.000	0,00	0,00	4.100.000	100	1	11.345.682	0,00	0,00	3.280.000	0,00	0,00	36.445.797	100	1	55.171.479	1,00	55.171.479	0,33	0,00	-
	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	5 03 02 21 0011	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4050	100.980.000			4050	35.162.031	25,80	1045		24,89	1008	4.112.756	39,06	1582	8.625.441	10,25	415	22.008.160	100	4050	34.746.357	4050,00	34.746.357	1,00	34,41	
	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	5 03 02 21 0012	Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12	107.100.000			4	325.155.000	25,00	1	11.332.926	25,00	1	6.451.266	25,00	1	209.513.066	25,00	1	53.568.496	100	4	280.865.754	4	280.865.754	33,33	262,25	-
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi , kinerja dan			**Persentase Penempatan SDM sesuai Standar Kompetensi**	**74,00**	**339.999.000**		**-**	**70,00**	**280.073.735**	**0,00**		**14.230.233**	**0,00**		**16.946.731**	**0,00**		**67.243.161**	**0,00**		**41.027.231**	**0,00**		**139.447.356**	**0,00**	**139.447.356**	**0,00**	**41,01**	
	Meningkatnya nilai NSPK dalam elemen mutasi dan promosi ASN	**5 03 02 22 0**	**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Mutasi dan Promosi ASN sesuai NSPK**	**100**	**339.999.000**			**80,00**	**280.073.735**	**0,00**		**14.230.233**	**0,00**		**16.946.731**	**0,00**		**67.243.161**	**0,00**		**41.027.231**	**0,00**		**139.447.356**	**0,00**	**139.447.356**	**0,00**	**41,01**	
	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN	5 03 02 22 0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3	108.181.500			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat	5 03 02 22 0002	Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1440	108.181.500			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	5 03 02 22 0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3	123.636.000			1	280.073.735	0,00	0,00	14.230.233,00	0,00	0,00	16.946.731	0,00	0,00	67.243.161	100	1	41.027.231	100	1	139.447.356	1	139.447.356	33,33	112,79	-
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi , kinerja dan			**Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS**	**0,49**	**3.300.096.900**		**-**	**0,33**	**593.522.000**	**0,00**		**100.000.000**	**0,00**		**103.805.600**	**0,00**		**235.821.818**	**0,00**		**136.566.382**	**0,00**		**576.193.800**	**0,00**	**576.193.800**	**0,00**	**17,46**	
	Terpenuhinya perangkat daerah yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	**5 03 02 23 0**	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi**	**100**	**3.300.096.900**		**-**	**76,47**	**593.522.000**	**29,41**		**100.000.000**	**29,41**		**103.805.600**	**29,41**		**235.821.818**	**0,00**		**136.566.382**	**88,24**		**576.193.800**	**88,24**	**576.193.800**	**88,24**	**17,46**	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kinerja	5 03 02 23 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	740	92.727.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	5 03 02 23 0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	3	46.363.500			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan	5 03 02 23 0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	21	2.141.009.400			5	593.522.000	40,00	2	100.000.000	40,00	2	103.805.600	20,00	1	235.821.818	0,00	0,00	136.566.382	100	5	576.193.800	5	576.193.800	23,81	26,91	-
	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama	5 03 02 23 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan	3	108.181.500			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	5 03 02 23 0006	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi	200	92.727.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan	5 03 02 23 0007	Sub Kegiatan evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	3	92.727.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersusunnya Administrasi Diklat dan	5 03 02 23 0008	Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi	550	77.272.500			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama	5 03 02 23 0009	Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan	3	108.181.500			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	5 03 02 23 0010	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	67	92.727.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	5 03 02 23 0011	Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	3	77.272.500			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	5 03 02 23 0012	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	3	108.181.500			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional	5 03 02 23 0013	Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	320	92.727.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	5 03 02 23 03 0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	67	61.818.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	5 03 02 23 03 0015	Sub Kegiatan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	3	108.181.500			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi ,			**Persentase Perangkat daerah Dengan Kinerja ASN Sesuai**	**100**	**160.726.800**		**-**	**100**	**98.234.000**	**100**		**17.390.000**	**0,00**		**25.240.265**	**0,00**		**16.582.500**	**0,00**		**33.208.608**	**100**		**92.421.373**	**100**	**92.421.373**	**100**	**57,50**	
	Tercapainya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang efektif sesuai	**5 03 02 24**	**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang efektif sesuai ketenteuan**	**100**	**160.726.800**		**-**	**100**	**98.234.000**	**25,00**		**17.390.000**	**25,00**		**25.240.265**	**25,00**		**16.582.500**	**25,00**		**33.208.608**	**100**		**92.421.373**	**100**	**92.421.373**	**100**	**57,50**	
	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 03 02 24 0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	83.454.300			1	98.234.000	100	1	17.390.000	0,00	0,00	25.240.265	0,00	0,00	16.582.500	0,00	0,00	33.208.608	100	1	92.421.373	1	92.421.373	33,33	110,74	
	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja	5 03 02 24 0003	Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	77.272.500					0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi , kinerja dan			**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan**	**100**	**509.998.500**			**100**	**149.942.000**	**25,00**		**6.265.000**	**25,00**		**10.643.332**	**25,00**		**1.195.000**	**25,00**		**27.371.024**	**100**		**45.474.356**	**100**	**45.474.356**	**100**	**8,92**	
	Meningkatnya kedisiplinan ASN	**5 03 02 24**	**Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai**	**Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan**	**100**	**509.998.500**		**-**	**95,00**	**149.942.000**	**0,00**		**6.265.000**	**0,00**		**10.643.332**	**0,00**		**1.195.000**	**0,00**		**27.371.024**	**0,00**		**45.474.356**	**0,00**	**45.474.356**	**0,00**	**8,92**	
	Terlaksananya Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	5 03 02 24 0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	45	77.272.500,00			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	5 03 02 24 0005	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda	1030	61.818.000,00			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	5 03 02 24 0006	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatka Pembinaan Kedisiplinan	3	77.272.500,00			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pembinaan Disiplin ASN	5 03 02 24 0007	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian	900	77.272.500,00			200	149.942.000	28,50	57	6.265.000	20,50	41	10.643.332	24,50	49	1.195.000	26,50	53	27.371.024	100	200	45.474.356	200	45.474.356	22,22	58,85	
	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 03 02 24 0008	Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	3	77.272.500,00			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	5 03 02 24 0009	Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	6	61.818.000,00			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Evaluasi Disiplin	5 03 02 24 0010	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah usulan kenaikan pangkat	3	77.272.500			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,20**		**9,50**	**38,21**		**10,64**	**16,06**		**33,75**	**20,53**		**26,02**	**100**		**79,90**			**10,18**	**25,09**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAH URUSAN KEPEGAWAIAN					**8.621.853.272**			**1.376.267.702**			**2.188.399.308**			**2.145.153.292**			**2.024.675.311**			**7.734.495.613**		**7.734.495.613**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Penunjang Urusan Kepegawaian (%)							**24,61**		**15,96**	**31,62**		**25,38**	**18,41**		**24,88**	**20,36**		**23,48**	**100**		**89,71**			**16,11**	**25,15**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Penunjang Urusan Kepegawaian							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**SR**	**SR**	
			URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**1.381.708.090**		**-**		**788.238.294**			**28.349.945**			**136.663.294**			**11.836.682**			**291.697.000**			**468.546.921**		**468.546.921**		**33,91**	
	Meningkatnya SDM Yang Berkualitas			**Persentase Perangkat Daerah dengan IP-ASN pada rentang nilai > 64**	**67,34**				**66,5**																					
	Meningkatnya Nilai Dimensi Kompetensi ASN	**5 04 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Nilai Dimensi Kompetensi ASN**	**35,00**	**1.381.708.090**		**-**	**25,00**	**788.238.294**	**0,00**		**28.349.945**	**0,00**		**136.663.294**	**0,00**		**11.836.682**	**0,00**		**291.697.000**	**0,00**		**468.546.921**	**0,00**	**468.546.921**	**0,00**	**33,91**	**BKPSDMD**
	Meningkatnya nilai dimensi kompetensi	**5 04 02 21**	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi diklat**	**100**	**822.725.000**			**82,06**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	5 04 02 2 01 0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	240	822.725.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**5 04 02 2 02**	**Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**28,99**	**558.983.090**			**8,88**	**788.238.294**	**0,00**		**28.349.945**	**0,00**		**136.663.294**	**0,00**		**11.836.682**	**0,00**		**291.697.000**	**0,00**		**468.546.921**	**0,00**	**468.546.921**	**0,00**	**83,82**	
	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah	5 04 02 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah	Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup Kabupaten/Kota	330	92.727.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	5 04 02 2 02 0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah dokumen pelaksanaan kerjasama antar lembaga	17	92.727.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 04 02 2 02 0007	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	3	373.529.090			1	788.238.294	0,00	0,00	28.349.945	0,00	0,00	136.663.294	0,00	0,00	11.836.682	100	1	291.697.000	100	1	468.546.921	1	468.546.921	33,33	125,44	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**3,60**	**0,00**		**17,34**	**0,00**		**1,50**	**100**		**37,01**	**100**		**59,44**			**33,33**	**#####**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**			**SR**	**SR**	
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG DIKLAT						**788.238.294**			**28.349.945**			**136.663.294**			**11.836.682**			**291.697.000**			**468.546.921**		**468.546.921**			
			Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan (%)								**0,00**		**3,60**	**0,00**		**17,34**	**0,00**		**1,50**	**100**		**37,01**	**100**		**59,44**			**33,33**	**#####**	
			Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan								**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**	**ST**		**R**			**SR**	**ST**	
		5 05	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**1.756.262.000**				**293.120.048**			**3.279.767**			**33.757.000**			**54.393.360**			**107.784.536**			**199.214.663**		**199.214.663**		**11,34**	
1	**Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Perumusan**	**5 05 02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah (%)**	**100**	**1.756.262.000**			**25,00**	**293.120.048**	**0,00**		**3.279.767**	**0,00**		**33.757.000**	**0,00**		**54.393.360**	**0,00**		**107.784.536**	**0,00**		**199.214.663**	**0,00**	**199.214.663**	**0,00**	**11,34**	**BAPPEDA**
	Meningkatnya Kerjasama Kelitbangan dalam Menciptakan			**Indeks Inovasi Daerah**	**90,21**				**70,69**		**0,00**			**0,00**			**100**						**100**			**100**		#####		
	Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian/Kajian Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	**5 05 02 2 01**	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Menjadi**	**100**	**486.038.650**			**25,00**	**139.340.048**	**0,00**		**-**	**0,00**		**2.050.000**	**25,00**		**48.993.360**	**0,00**		**63.089.144**	**25,00**		**114.132.504**	**25,00**	**114.132.504**	**25,00**	**23,48**	
	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	5 05 02 2 01 0012	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	4	486.038.650			1	139.340.048	0,00			0,00	0,00	2.050.000	100	1	48.993.360	0,00	0,00	63.089.144	100	1	114.132.504	1	114.132.504	25,00	23,48	
	Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian/Kajian Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan	**5 05 02 2 02**	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan**	**100**	**468.487.850**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	5 05 02 2 02 0001	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	6	468.487.850			0,00	-	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian/Kajian Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**5 05 02 2 03**	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan**	**100**	**247.459.750**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5 05 02 2 03 0004	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3	247.459.750			0,00	-	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Meningkatkatnya Inovasi Daerah Yang Diimplementasik	**5 05 02 2 04**	**Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Inovasi dan Teknologi yang Diterapkan**	**100**	**554.275.750**			**89,24**	**153.780.000**	**25,00**		**3.279.767**	**25,00**		**31.707.000**	**25,00**		**5.400.000**	**25,00**		**44.695.392**	**100**		**85.082.159**	**100**	**85082159**	**100**	**15,35**	
	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 05 02 2 04 0001	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3	554.275.750			1	153.780.000	0,00		3.279.767	0,00		31.707.000	0,00		5.400.000	100	1	44.695.392	100	1,00	85.082.159	1	85.082.159	33,33	15,35	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**1,12**	**0,00**		**11,52**	**50,00**		**18,56**	**50,00**		**36,77**	**100**		**67,96**			**14,58**	**11,34**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**S**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**293.120.048**			**3.279.767**			**33.757.000**			**54.393.360**			**107.784.536**			**199.214.663**		**199.214.663**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Penelitian dan Pengembangan (%)							**0,00**		**1,12**	**0,00**		**11,52**	**50,00**		**18,56**	**50,00**		**36,77**	**100**		**67,96**			**14,58**	**11,34**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Penelitian dan Pengembangan							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**S**			**SR**	**SR**	
		6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																										
		6 04	**INSPEKTORAT DAERAH**			**34.351.070.200**				**7.353.700.563**			**1.076.093.585**			**2.416.520.930**			**1.561.843.334**			**1.532.672.312**			**6.590.430.161**		**6.590.430.161**		**19,19**	
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**6 01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah**	**30,00**	**32.412.049.501**			**30,00**	**7.083.575.563**	**0,00**		**1.051.118.585**	**28,37**		**2.413.120.930**	**0,00**		**1.508.187.334**	**0,00**		**1.401.292.312**	**28,37**		**6.377.019.161**	**28,37**	**6.377.019.161**	**94,57**	**19,67**	**INSPEKTORAT**
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	**13,50**				**15,00**		**0,00**			**13,55**			**0,00**			**0,00**			**13,55**			**13,55**		#####		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**67,00**				**78,30**		**0,00**			**83,04**			**0,00**			**0,00**			**83,04**			**83,04**		#####		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**4,00**				**70,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**1,00**				**93,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		6 01 01 2 01	**Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai**	**100**	**216.046.874**			**100**	**19.790.000**	**25,00**		**8.820.000**	**25,00**		**820.000**	**50,00**		**-**	**0,00**		**4.500.000**	**100**		**14.140.000**	**100,00**	**14.140.000**	#####	**6,54**	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	**100**				**100**		**25,00**			**50,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100,00**		#####		
		6 01 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	24	108.023.437			8	9.270.000	25,00	2	3.500.000	25,00	2	820.000	50,00	4	-	0,00	0,00	4.050.000	100	8	8.370.000	8	8.370.000	33,33	7,75	
		6 01 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	12	108.023.437			4	10.520.000	25,00	1	5.320.000	50,00	2	-	25,00	1		0,00	0,00	450.000	100	4	5.770.000	4	5.770.000	33,33	5,34	
		6 01 01 2 02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)**	**100**	**23.057.417.494**			**100**	**5.962.859.807**	**25,00**		**915.213.568**	**25,00**		**2.109.435.188**	**25,00**		**1.292.431.362**	**25,00**		**1.128.858.609**	**100**		**5.445.938.727**	**100**	**5.445.938.727**	**100**	**23,62**	
		6 01 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129	22.833.654.660			43	5.962.859.807	25,00	43	915.213.568	25,00	43	2.109.435.188	25,00	43	1.292.431.362	25,00	43	1.128.858.609	100	172	5.445.938.727	172	5.445.938.727	133,33	23,85	
		6 01 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36	108.023.437			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		6 01 01 2 02 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan	126	115.739.397			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		6 01 01 2 05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**100**	**1.797.262.628**			**100**	**62.100.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**31.756.735**	**25,00**		**14.688.477**	**25,00**			**100**		**49.745.212**	**100**	**49.745.212**	**100**	**2,77**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan	**50,00**				**50,00**		**25,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**25,00**			**25,00**		**50,00**		
		6 01 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	5	177.345.164			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		6 01 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	33	108.023.437			11	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	11		100	11	-	11	-	33,33	0,00	
		6 01 01 2 05 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	81	1.511.894.027			5	62.100.000	0,00	0,00	-	20,00	1	31.756.735	20,00	1	14.688.477	60,00	3	3.300.000	100	5	49.745.212	5	49.745.212	6,17	3,29	
		6 01 01 2 06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)**	**100**	**3.080.251.915**			**100**	**368.617.498**	**25,00**		**51.347.527**	**25,00**		**59.845.807**	**25,00**		**104.703.698**	**25,00**		**105.225.108**	**100**		**321.122.140**	**100**	**321.122.140**	**100**	**10,43**	
		6 01 01 2 06 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	308.638.391			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		6 01 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	2.447.543.212			12	368.617.498	25,00	3	51.347.527	25,00	3	59.845.807	25,00	3	104.703.698	25,00	3	105.225.108	100	12	321.122.140	12	321.122.140	33	13,12	
		6 01 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	92.591.518			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		6 01 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	231.478.794			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		6 01 01 2 07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)**	**11,16**	**1.404.998.163**		**-**	**3,30**	**64.227.775**	**0,00**		**-**	**3,30**		**58.444.000**	**0,00**			**0,00**		**690.000**	**3,30**		**59.134.000**	**3,30**	**59.134.000**	**29,57**	**4,21**	
		6 01 01 2 07 0001	Sub. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1	324.763.790			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		6 01 01 2 07 0002	Sub. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	6	154.319.197			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		6 01 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	47	462.957.588			1	64.227.775	0,00	0,00	-	100	1	58.444.000	0,00	0,00		0,00	0,00	690.000	100	1	59.134.000	1	59.134.000	2,13	12,77	
		6 01 01 2 07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3	462.957.588			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		6 01 01 2 08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di**	**100**	**1.757.504.934**			**100**	**418.550.483**	**25,00**		**53.087.490**	**25,00**		**130.292.700**	**25,00**		**63.716.697**	**25,00**		**126.901.145**	**100**		**373.998.032**	**100**	**373.998.032**	**100**	**21,28**	
		6 01 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	36	1.109.167.680			12	238.220.048	25,00	3	24.396.000	25,00	3	80.323.550	25,00	3	24.587.200	25,00	3	85.505.850	100	12	214.812.600	12	214.812.600	33,33	19,37	
		6 01 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	345.894.131			12	104.374.345	25,00	3	14.817.890	25,00	3	22.603.050	25,00	3	21.344.097	25,00	3	24.948.095	100	12	83.713.132	12	83.713.132	33,33	24,20	
		6 01 01 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	36	302.443.123			12	75.956.090	25,00	3	13.873.600	25,00	3	27.366.100	25,00	3	17.785.400	25,00	3	16.447.200	100	12	75.472.300	12	75.472.300	33,33	24,95	
		6 01 01 2 09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100**	**1.098.567.493**			**100**	**187.430.000**	**25,00**		**22.650.000**	**25,00**		**22.526.500**	**25,00**		**32.647.100**	**25,00**		**35.117.450,00**	**100**		**112.941.050,00**	**100**	**112.941.050**	**100**	**10,28**	
		6 01 01 2 09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	21	679.004.463			7	167.090.000	28,57	2	22.650.000	28,57	2	22.526.500	28,57	2	32.647.100	14,29	1	30.163.000	100	7	107.986.600	7	107.986.600	33,33	15,90	
		6 01 01 2 09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	120	110.924.639			40	20.340.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		100	40	4.954.450	100	40	4.954.450	40	4.954.450	33,33	4,47	
		6 01 01 2 09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3	308.638.391			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**16,96**		**14,84**	**29,05**		**34,07**	**20,71**		**21,29**	**33,27**		**19,78**	**100**		**90,03**			**36,80**	**19,67**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Peran dan Layanan APIP**	**6 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL**	**Nilai Hasil Kapabilitas APIP**	**3**	**977.612.106**			**3**	**118.565.000**	**0,00**		**24.975.000**	**0,00**		**3.400.000**	**0,00**		**4.100.000**	**0,00**		**55.790.000**	**0,00**		**88.265.000**	**0,00**	**88.265.000**	**0,00**	**9,03**	**INSPEKTORAT**
		6 01 02 2 01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja**	**100**	**844.434.640**			**100**	**101.615.000**	**25,00**		**23.015.000**	**25,00**		**3.400.000**	**25,00**		**4.100.000**	**25,00**		**52.190.000**	**100**		**82.705.000**	**100**	**82.705.000**	**100**	**9,79**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		6 01 02 2 01 0001	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	18	176.849.802			6	27.950.000	33,33	2	5.200.000	33,33	2	3.400.000	33,33	2	-	0,00	0,00	450.000	100	6	9.050.000	6	9.050.000	33,33	5,12	
		6 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dokumen Keuangan	33	192.281.718			11	41.700.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	11	41.690.000	100	11	41.690.000	11	41.690.000	33,33	21,68	
		6 01 02 2 01 0003	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	9	159.566.048			3	11.150.000	33,33	1	10.700.000	33,33	1	-	33,33	1	-	0,00	0,00	450.000	100	3	11.150.000	3	11.150.000	33,33	6,99	
		6 01 02 2 01 0004	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan	6	83.178.046			2	7.565.000	50,00	1	7.115.000	0,00	0,00	-	50,00	1	-	0,00	0,00	450.000	100	2	7.565.000	2	7.565.000	33,33	9,09	
		6 01 02 2 01 0005	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30	100.461.796			10	8.700.000	0,00	0,00	-	50,00	5	-	0,00	0,00	-	50,00	5	8.700.000	100	10	8.700.000	10	8.700.000	33,33	8,66	
		6 01 02 2 01 0006	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	6	61.264.720			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		6 01 02 2 01 0007	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	70.832.510			1	4.550.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	1	4.100.000	0,00	0,00	450.000	100	1	4.550.000	1	4.550.000	33,33	6,42	
		6 01 02 2 2	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan**	**Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu**	**100**	**133.177.466**			**100**	**16.950.000**	**25,00**		**1.960.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**3.600.000**	**100**		**5.560.000**	**100**	**5.560.000**	**100**	**4,17**	
		6 01 02 2 02 0001	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3	78.548.470			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		6 01 02 2 02 0002	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30	54.628.996			10	16.950.000	20,00	2	1.960.000	30,00	3	-	0,00	0,00	-	50,00	5	3.600.000	100	10	5.560.000	10	5.560.000	33,33	10,18	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**19,52**		**21,06**	**20,95**		**2,87**	**30,95**		**3,46**	**28,57**		**47,05**	**100**		**74,44**			**25,93**	**9,03**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**S**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Manajemen Resiko OPD**	**6 01 02**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP**	**3**	**961.408.593**			**3**	**151.560.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**49.556.000**	**0,00**		**75.590.000**	**0,00**		**125.146.000**	**0,00**	**125.146.000**	**0,00**	**13,02**	**INSPEKTORAT**
		6 01 02 2 01	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**961.408.593**			**100**	**151.560.000**	**29,41**		**-**	**29,41**		**-**	**20,59**		**49.556.000**	**20,59**		**75.590.000**	**100**		**125.146.000**	**100**	**125.146.000**	**100**		
				Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penilaian	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**100**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase Jumlah Wajib LHKPN dan LHKAS yang telah melaporkan harta	**100**				**100**		**100**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Pembangunan Zona	**100**				**100**		**0,00**			**0,00**			**100**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
		6 01 02 2 01 01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	102	180.553.463			34	29.950.000	29,41	10	-	29,41	10	-	20,59	7		20,59	7,00	17.850.000	100	34	17.850.000	34	17.850.000	33,33	9,89	
		6 01 02 2 01 02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi	102	91.819.921			34	8.700.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	34	6.050.000	100	34	6.050.000	34	6.050.000	33,33	6,59	
		6 01 02 2 01 03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	6	597.215.288			2	109.710.000	0,00	0,00	-	50,00	1	-	50,00	1	49.556.000	0,00	0,00	48.950.000	100	2	98.506.000	2	98.506.000	33,33	16,49	
		6 01 02 2 01 04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15	91.819.921			5	3.200.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	5	2.740.000	100	5	2.740.000	5	2.740.000	33,33	2,98	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**7,35**		**0,00**	**19,85**		**0,00**	**17,65**		**32,70**	**55,15**		**49,87**	**100**		**82,57**			**33,33**	**13,02**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**R**		**SR**	**ST**		**T**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		**7.353.700.563**							**1.076.093.585**			**2.416.520.930**			**1.561.843.334**			**1.532.672.312**			**6.590.430.161**		**6.590.430.161**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Pengawasan Urusan Pemerintahan (%)							**14,61**		**14,63**	**23,28**		**32,86**	**23,10**		**21,24**	**39,00**		**20,84**	**100**		**89,62**			**32,02**	**19,19**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Pengawasan Urusan Pemerintahan							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**SR**	**SR**	
		7	**URUSAN KEWILAYAHAN**																											
		7 01	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN SUNGAILIAT**			**69.596.309.800**		**-**		**18.411.813.321**			**3.132.512.799**			**5.286.988.324**			**4.207.339.720**			**4.954.035.830**			**17.580.876.673**		**17.580.876.673**			
1	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah**	**7 01 01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai perencanaan kinerja Perangkat Daerah (Nilai)**	**26,00**	**40.595.970.124**			**25,40**	**9.925.960.080**	**0,00**		**2.126.951.710**	**22,16**		**3.250.239.010**	**0,00**		**2.152.415.173**	**0,00**		**2.297.499.284**	**22,16**		**9.827.105.177**	**22,16**	**9.827.105.177**	**85,23**	**24,21**	**KEC. SUNGAILIAT**
				Nilai Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	**12,20**				**11,60**		**0,00**		**-**	**9,84**			**0,00**			**0,00**			**9,84**			**9,84**		**80,66**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)**	**0,00**				**0,00**		**0,00**	-	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)**	**61,50**				**61,00**		**0,00**	-	**55,29**		**0,00**		**0,00**		**55,29**		**55,29**		**89,90**		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Nilai)**	**3,50**				**3,00**		**0,00**	-	**0,00**		**0,00**		**3,00**		**3,00**		**3,00**		**85,71**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)**	**99,00**				**95,00**		**0,00**	-	**0,00**		**0,00**		**95,00**		**95,00**		**95,00**		**95,96**		
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	**7 01 01 2 01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai**	**100**	**142.074.125**			**100**	**6.432.410**	**50,00**	-	**25,00**	-	**25,00**	**375.000**	**0,00**	**5.411.450**	**100**	**5.786.450**	**100**	**5.786.450**	**100**	**4,07**	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	**100**	-			**100**	-	**50,00**		**25,00**		**25,00**		**0,00**		**100**		**100**		**100**		
		7 01 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	24	70.273.625			8	6.432.410	50,00 4	-	25,00 2		25,00 2	375.000	0,00 0,00	5.411.450	100 8	5.786.450	8	5.786.450	33,33	8,23	
		7 01 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun (dokumen)	12	71.800.500			4	-	50,00 2	-	25,00 1		25,00 1	-	0,00 0,00	-	100 4	-	4	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat	**7 01 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)**	**100**	**34.738.943.500**			**100**	**9.140.223.292**	**25,00**	**1.987.934.800**	**25,00**	**2.969.141.236**	**25,00**	**1.996.132.107**	**25,00**	**2.112.064.665**	**100**	**9.065.272.808**	**100**	**9.065.272.808**	**100**	**26,10**	
		7 01 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang menerima gaji dan tunjangan pada tahun berkenaan	306	34.678.506.250			102	9.140.223.292	25,00 26	1.987.934.800	25,00 26	2.969.141.236	25,00 26	1.996.132.107	25,00 26	2.112.064.665	100 26	9.065.272.808	26	9.065.272.808	8,50	26,14	
		7 01 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	36	17.223.250			0	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00		0,00 0,00	-	0,00 0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun (laporan)	126	43.214.000			0	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	**7 01 01 2 05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap (%)**	**100**	**560.401.606**			**100**	-	**25,00**	-	**25,00**	-	**25,00**	-	**25,00**	-	**100**	-	**100**	-	**100**	**0,00**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)**	**100**				**100**		**25,00**		**25,00**		**25,00**		**25,00**		**100**		**100**		**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)**	**89,00**				**44,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		
		7 01 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	3	381.921.875			0	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	3	25.710.981			0	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 05 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	9	152.768.750			0	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)**	**100**	**926.091.250**			**100,00**	**113.241.264**	**25,00**	**23.798.432**	**25,00**	**30.499.831**	**25,00**	**23.326.264**	**25,00**	**30.836.848**	**100**	**108.461.375**	**100**	**108.461.375**	**100**	**11,71**	
		7 01 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	595.000.000			12	33.350.000	25,00 3	-	25,00 3	13.685.000	25,00 3	2.600.000	25,00 3	12.634.000	100 12	28.919.000	12	28.919.000	33,33	4,86	
		7 01 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	36	183.322.500			12	46.844.416	25,00 3	17.782.400	25,00 3	6.673.600	25,00 3	11.723.600	25,00 3	10.464.800	100 12	46.644.400	12	46.644.400	33,33	25,44	
		7 01 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	36	147.768.750			12	33.046.848	25,00 3	6.016.032	25,00 3	10.141.231	25,00 3	9.002.664	25,00 3	7.738.048	100 12	32.897.975	12	32.897.975	33,33	22,26	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		7 01 01 2 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)	20	405.805.000			0,00	-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	3	401.250.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00		
		7 01 01 2 07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor Yang Diadakan (unit)	45	161.375.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00		
		7 01 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	30	244.430.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00		
		7 01 01 2 07 0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang diadakan (unit)	3	277.500.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
		7 01 01 2 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah (%)	100	2.628.920.893			100	604.540.906	25,00		105.915.378	25,00		231.910.543	25,00		122.424.002	25,00		132.276.721	100		592.526.644	100	592.526.644	100	22,54		
		7 01 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	36	2.230.750.775			12	529.706.003	25,00	3	91.917.800	25,00	3	211.487.023	25,00	3	101.328.902	25,00	3	115.048.900	100	12	519.782.625	12	519.782.625	33,33	23,30		
		7 01 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	161.170.118			12	25.951.773	25,00	3	5.106.378	25,00	3	4.858.720	25,00	3	7.630.696	25,00	3	6.663.021	100	12	24.258.815	12	24.258.815	33,33	15,05		
		7 01 01 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	237.000.000			12	48.883.130	25,00	3	8.891.200	25,00	3	15.564.800	25,00	3	13.464.404	25,00	3	10.564.800	100	12	48.485.204	12	48.485.204	33,33	20,46		
		7 01 01 2 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	16,00	1.193.733.750			8	61.522.208	4,00		9.303.100	2,00		18.687.400	1,00		10.157.800	1,00		16.909.600	8,00		55.057.900	8,00	55.057.900	50,00	4,61		
		7 01 01 2 09 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	21	274.983.750			7	54.172.208	28,57	2	9.303.100	28,57	2	18.687.400	28,57	2	10.157.800	14,29	1	12.229.600	100	7	50.377.900	7	50.377.900	33,33	18,32		
		7 01 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (unit)	90	90.750.000			30	7.350.000	16,67	5	-	40,00	12		0,00	0,00	-	43,33	13	4.680.000	100	30	4.680.000	30	4.680.000	33,33	5,16		
		7 01 01 2 09 0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	6	828.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							26,69		21,43	24,46		32,74	21,13		21,68	19,38		23,15	100		99,00			16,28	24,21		
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR		
2	Meningkatnya Tertib Administrasi	7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP (%)	100,00	21.691.733.676	0	-	100,00	6.021.422.141	25,00		857.269.589	25,00		1.802.939.988	25,00		1.326.177.673	25,00		1.737.552.128	100		5.723.939.378	100	5.723.939.378	100	26,39	KEC. SUNGAILIAT	
	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan	7 01 02 2 01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu (%)	100	21.521.164.926	0	-	100	6.017.755.126	25,00		857.269.589	25,00		1.799.982.238	25,00		1.326.177.673	25,00		1.737.102.128	100		5.720.531.628	100	5.720.531.628	100	26,58		
		7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sungailiat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka (dokumen)	36	2.809.354.000	0	-	12	744.792.082	25,00	3	84.906.310	25,00	3	255.894.170	25,00	3	181.894.340	25,00	3	202.095.600	100	12	724.790.420	12	724.790.420	33,33	25,80	KEL. SUNGAILIAT	
		7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Paritpadang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kel.Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka (dokumen)	36	1.890.823.626	0	-	12	499.306.249	25,00	3	69.229.144	25,00	3	119.623.072	25,00	3	100.772.892	25,00	3	146.155.896	100	12	435.781.004	12	435.781.004	33,33	23,05	KEL. PARIT PADANG	
		7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Srimenanti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kel. Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka (dokumen)	36	2.109.827.000	0	-	12	663.893.687	25,00	3	106.671.028	25,00	3	185.174.328	25,00	3	147.406.048	25,00	3	211.021.528	100	12	650.272.932	12	650.272.932	33,33	30,82	KEL. SRIMENANTI	
		7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sinar Baru	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kel. Sinar Baru Kec. Sungailiat Kab. Bangka (dokumen)	36	1.612.882.000	0	-	12	417.718.502	25,00	3	51.520.993	25,00	3	104.809.413	25,00	3	74.066.000	25,00	3	141.101.100	100	12	371.497.506	12	371.497.506	33,33	23,03	KEL. SINAR BARU	
		7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Kenanga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka (dokumen)	36	1.657.058.550	0	-	12	466.980.678	25,00	3	78.337.753	25,00	3	134.504.289	25,00	3	113.554.947	25,00	3	129.143.878	100	12	455.540.867	12	455.540.867	33,33	27,49	KEL. KENANGA	
		7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Kuday	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka (dokumen)	36	1.586.166.550	0	-	12	497.607.606	25,00	3	82.818.404	25,00	3	138.023.516	25,00	3	112.091.600	25,00	3	118.652.230	100	12	451.585.750	12	451.585.750	33,33	28,47	KEL. KUDAY	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Bukit Betung	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka (dokumen)	36	1.699.699.475	0	-	12	546.794.839	25,00	3	78.831.918	25,00	3	174.663.587	25,00	3	120.320.460	25,00	3	156.467.970	100	12	530.283.935	12	530.283.935	33,33	31,20	KEL. BUKIT BETUNG
		7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sinar Jaya Jelutung	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kel. Sinar jaya Jelutung Kec. Sungailiat Kab. Bangka (dokumen)	36	1.775.376.000	0	-	12	472.361.003	25,00	3	71.176.350	25,00	3	148.268.905	25,00	3	101.439.806	25,00	3	144.297.657	100	12	465.182.718	12	465.182.718	33,33	26,20	KEL. SINAR JAYA JELUTUNG
		7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Lubuk Kelik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kel. Lubuk Kelik Kec. Sungailiat Kab. Bangka (dokumen)	36	1.312.363.600	0	-	12	356.339.385	25,00	3	49.601.100	25,00	3	106.373.840	25,00	3	67.307.200	25,00	3	107.342.600	100	12	330.624.740	12	330.624.740	33,33	25,19	KEL. LUBUK KELIK
		7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Matras	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kel. Matras Kec. Sungailiat Kab. Bangka (dokumen)	36	1.727.538.375	0	-	12	486.836.488	25,00	3	79.416.300	25,00	3	151.585.011	25,00	3	116.552.400	25,00	3	135.566.250	100	12	483.119.961	12	483.119.961	33,33	27,97	KEL. MATRAS
		7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Surya Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kel. Surya Timur Kec. Sungailiat Kab. Bangka (dokumen)	36	1.740.784.500	0	-	12	492.992.826	25,00	3	73.935.660	25,00	3	160.340.740	25,00	3	108.551.020	25,00	3	125.101.600	100	12	467.929.020	12	467.929.020	33,33	26,88	KEL. SURYA TIMUR
		7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Jelitik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab.	36	1.599.291.250	0	-	12	372.131.781	25,00	3	30.824.629	25,00	3	120.721.367	25,00	3	82.220.960	25,00	3	120.155.819	100	12	353.922.775	12	353.922.775	33,33	22,13	KEL. JELITIK
	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan	**7 01 02 2 04**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak**	**Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu (%)**	**100**	**170.568.750**	**0**	**-**	**100**	**3.667.015**	**25,00**		**-**	**25,00**		**2.957.750**	**25,00**		**-**	**25,00**		**450.000**	**100**		**3.407.750**	**100,00**	**3.407.750**	**#####**	**2,00**	
		7 01 02 2 04 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	170.568.750	0	-	12	3.667.015	25,00	3	-	25,00	3	2.957.750	25,00	3	-	25,00	3	450.000	100	12	3.407.750	12	3.407.750	33,33	2,00	KEC. SUNGAILIAT
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**25,00**		**14,24**		**25,00**		**29,94**	**25,00**		**22,02**	**25,00**		**28,86**	**100**		**95,06**				**33,33**	**23,25**	
				Predikat Kinerja	**SR**		**SR**		**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**				**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	**7 01 03**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang (%)**	**100**	**7.099.465.000**	**0**	**-**	**100**	**2.464.431.100**	**100**		**148.291.500**	**0,00**		**233.809.326**	**0,00**		**728.746.874**	**0,00**		**918.984.418**	**100**		**2.029.832.118**	**100**	**2.029.832.118**	**100**	**28,59**	**KEC. SUNGAILIAT**
	Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan			**Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)**	**100**		**0**	**-**	**100**	**-**	**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**	**-**	**100**		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	**7 01 03 2 01**	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/kecamatan (%)**	**100**	**637.630.000**	**0**	**-**	**100**	**34.070.000**	**100**		**-**	**0,00**		**10.985.000**	**0,00**		**6.150.000**	**0,00**		**15.230.000**	**100**		**32.365.000**	**100**	**32.365.000**	**100**	**5,08**	
	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (%)**	**100**		**0**	**-**	**100**	**-**	**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
		7 01 03 2 01 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa (lembaga)	273	62.630.000	0	-	91	7.950.000	0,00	0,00	-	100	91	6.985.000	0,00	0,00	50.000	0,00		150.000	100	91	7.185.000	91	7.185.000	33,33	11,47	KEC. SUNGAILIAT
		7 01 03 2 01 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	3	575.000.000	0	-	1	26.120.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	4.000.000	100	1	6.100.000	0,00		15.080.000	100	1	25.180.000	1	25.180.000	33,33	4,38	KEC. SUNGAILIAT
	Meningkatnya bantuan sapras di kelurahan	**7 01 03 2 02**	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Lingkungan Kelurahan yang mendapatkan bantuan sarpras (%)**	**100**	**6.461.835.000**	**0**	**-**	**100**	**2.430.361.100**	**10,00**		**148.291.500**	**40,00**		**222.824.326**	**30,00**		**722.596.874**	**20,00**		**903.754.418**	**100**		**1.997.467.118**	**100**	**1.997.467.118**	**100**	**30,91**	
		7 01 03 2 02 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Sungailiat	21	23.486.250	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		7 01 03 2 02 0001		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	21	23.486.250	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 03 2 02 0001		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	21	23.486.250	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 03 2 02 0001		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	21	23.486.250	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 03 2 02 0001		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	21	23.486.250	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 03 2 02 0001		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	21	23.486.250	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 03 2 02 0001		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Sinar Jaya Jelutung (lembaga)	21	23.486.250	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 03 2 02 0001		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Lubuk Kelik (lembaga)	21	23.486.250	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 03 2 02 0001		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	21	23.486.250	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 03 2 02 0001		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	21	23.486.250	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 03 2 02 0001		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	21	23.486.250	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungailiat	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungailiat (unit)	3	515.000.000	0	-	1	202.532.000	10,00	0,10	10.900.000	40,00	0,40	15.850.000	40,0	0,40	30.670.000	10,00	0,10	122.092.400	100	1	179.512.400	1	179.512.400	33,33	34,86	KEL. SUNGAILIAT
		7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Paritpadang	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Paritpadang (unit)	3	515.000.000	0	-	1	202.500.000	10,00	0,10	16.302.500	40,00	0,40	18.061.098	40,0	0,40	114.663.902	10,00	0,10	23.364.000	100	1	172.391.500	1	172.391.500	33,33	33,47	KEL. PARIT PADANG
		7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Srimenanti	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Srimenanti (unit)	3	515.000.000	0	-	1	202.542.000	10,00	0,10	13.665.000	40,00	0,40	15.240.000	40,0	0,40	19.033.900	10,00	0,10	107.312.800	100	1	155.251.700	1	155.251.700	33,33	30,15	KEL. SRIMENANTI
		7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sinar Baru	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sinar Baru (unit)	3	515.000.000	0	-	1	202.531.900	10,00	0,10	11.100.000	40,00	0,40	23.420.000	40,0	0,40	34.250.000	10,00	0,10	110.390.100	100	1	179.160.100	1	179.160.100	33,33	34,79	KEL. SINAR BARU
		7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kenanga	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kenanga (unit)	3	515.000.000	0	-	1	202.531.900	10,00	0,10	12.400.000	40,00	0,40	18.096.978	40,0	0,40	48.759.400	10,00	0,10	88.195.000	100	1	167.451.378	1	167.451.378	33,33	32,51	KEL. KENANGA
		7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kuday	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kuday (unit)	3	515.000.000	0	-	1	202.531.900	10,00	0,10	13.800.000	40,00	0,40	16.800.000	40,0	0,40	98.834.400	10,00	0,10	12.450.000	100	1	141.884.400	1	141.884.400	33,33	27,55	KEL. KUDAY
		7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bukit Betung	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bukit Betung (unit)	3	515.000.000	0	-	1	202.531.900	10,00	0,10	8.200.000	40,00	0,40	13.550.000	40,0	0,40	37.557.916	10,00	0,10	123.231.918	100	1	182.539.834	1	182.539.834	33,33	35,44	KEL. BUKIT BETUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sinar Jaya Jelutung	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sinar jaya Jelutung (unit)	3	515.000.000	0	-	1	202.531.900	10,00	0,10	13.260.000	40,00	0,40	18.210.000	40,00	0,40	93.578.000	10,00	0,10	34.576.200	100	1	159.624.200	1	159.624.200	33,33	30,99	KEL. SINAR JAYA JELUTUNG
		7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Lubuk Kelik	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Lubuk Kelik (unit)	3	515.000.000	0	-	1	202.531.900	10,00	0,10	12.690.000	40,00	0,40	15.250.000	40,00	0,40	19.334.400	10,00	0,10	114.880.000	100	1	162.154.400	1	162.154.400	33,33	31,49	KEL. LUBUK KELIK
		7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Matras	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Matras (unit)	3	515.000.000	0	-	1	202.531.900	10,00	0,10	13.935.000	40,00	0,40	21.146.250	40,00	0,40	102.135.400	10,00	0,10	16.050.000	100	1	153.266.650	1	153.266.650	33,33	29,76	KEL. MATRAS
		7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Surya Timur	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Surya Timur (unit)	3	515.000.000	0	-	1	202.531.900	10,00	0,10	10.139.000	40,00	0,40	23.850.000	40,00	0,40	50.095.156	10,00	0,10	83.352.000	100	1	167.436.156	1	167.436.156	33,33	32,51	KEL. SURYA TIMUR
		7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jelitik	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jelitik (unit)	3	515.000.000	0	-	1	202.531.900	10,00	0,10	11.900.000	40,00	0,40	23.350.000	40,00	0,40	73.684.400	10,00	0,10	67.860.000	100	1	176.794.400	1	176.794.400	33,33	34,33	KEL. JELITIK
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							8,57		6,02	41,43		9,49	41,43		29,57	8,57		37,29	100		82,37			33,33	16,10	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		T			SR	SR	
4	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga**	**7 01 04**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga**	**100**	**66.200.000**	**0**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. SUNGAILIAT**
	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan dengan Tomas/Toga/Top	**7 01 04 2 03**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Terlaksananya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa**	**100**	**66.200.000**	**0**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		7 01 04 2 03 0002	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	66.200.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**7 01 06**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa (%)**	**100**	**142.941.000**			**100**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**100**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	**KEC. SUNGAILIAT**
	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Desa	**7 01 06 2 01**	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev (%)**	**100**	**142.941.000**			**100**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**100**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
		7 01 06 2 01 0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	12	142.941.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 06 2 01 0005	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	12	142.941.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 06 2 01 0017	Sub Kegiatan Pendampingan desa diwilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di	12	142.941.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	0,00		SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAILIAT						18.411.813.321		3.132.512.799			5.286.988.324			4.207.339.720			4.954.035.830			17.580.876.673		17.580.876.673			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Bidang Urusan Kewilayahan Kecamatan Sungailiat (%)							20,09		17,01	30,30		28,72	29,19		22,85	17,65		26,91	100		95,49			27,65	21,19	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Urusan Kewilayahan Kecamatan Sungailiat							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
		7	**URUSAN KEWILAYAHAN**																										
		7 01	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN PEMALI**			**4.008.847.400**				**2.059.295.812**			**410.534.708**			**646.968.550**			**463.946.797**			**441.108.302**			**1.986.513.757**		**1.986.513.757**		**49,55**	
1	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan**	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah**	**26,25**	**3.753.847.400**			**25,90**	**2.023.945.812**	**0,00**		**403.054.708**	**24,45**		**641.568.550**	**0,00**		**461.111.797**	**0,00**		**423.738.302**	**24,45**		**1.953.428.757**	**24,45**	**1.953.428.757**	**93,14**	**52,04**	**KEC. PEMALI**
				Nilai kinerja pelaporan Perangkat Daerah	**12,50**				**10,50**		**0,00**			**10,24**			**0,00**			**0,00**			**10,24**			**10,24**		**81,92**		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**62,50**				**62,00**		**0,00**			**56,68**			**0,00**			**0,00**			**56,68**			**56,68**		**90,69**		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**4**				**3**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**90,00**				**90,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		7 01 01 2 02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar (%)**	**100**	**2.490.300.000**			**100**	**1.436.281.837**	**25,00**		**292.390.772**	**25,00**		**447.589.465**	**25,00**		**338.621.197**	**25,00**		**299.746.950**	**100**		**1.378.348.384**	**100**	**1.378.348.384**	**100**	**55,35**	
		7 01 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan (orang)	15	2.490.300.000			5	1.436.281.837	25,00	5	292.390.772	25,00	5	447.589.465	25,00	5	338.621.197	25,00	5	299.746.950	100	5	1.378.348.384	5	1.378.348.384	33,33	55,35	
		7 01 01 2 05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkapi (%)**	**100**	**125.000.000**			**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
				Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
				Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan	**44**				**44**		**11,00**			**0,00**			**11,00**			**0,00**			**22,00**			**22,00**		**50,00**		
		7 01 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	12	95.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	33	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)**	**100**	**249.547.400**			**100**	**175.367.247**	**25,00**		**43.324.205**	**25,00**		**50.096.591**	**25,00**		**34.314.000**	**25,00**		**45.802.000**	**100**		**173.536.796**	**100**	**173.536.796**	**100**	**69,54**	
		7 01 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	107.547.400			14	58.706.207	21,43	3	20.368.205	28,57	4	11.912.591	28,57	4	5.005.000	21,43	3	20.090.000	100	14	57.375.796	14	57.375.796	33,33	53,35	
		7 01 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	36	57.000.000			12	46.694.416	25,00	3	9.182.400	25,00	3	15.273.600	25,00	3	11.723.600	25,00	3	10.314.800	100	12	46.494.400	12	46.494.400	33,33	81,57	
		7 01 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	36	85.000.000			12	69.966.624	25,00	3	13.773.600	25,00	3	22.910.400	25,00	3	17.585.400	25,00	3	15.397.200	100	12	69.666.600	12	69.666.600	33,33	81,96	
		7 01 01 2 07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)**	**7**	**250.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		7 01 01 2 07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan (unit)	3	180.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (paket)	6	30.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	42	40.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 07 0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1	-			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0	-	0,00	#####	
		7 01 01 2 08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan layanan jasa Penunjang di**	**90**	**530.000.000**			**90**	**357.077.020**	**22,50**		**62.548.531**	**22,50**		**130.045.694**	**22,50**		**76.911.100**	**22,50**		**78.189.352**	**90,00**		**347.694.677**	**90,00**	**347.694.677**	**100**	**65,60**	
		7 01 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	36	400.000.000			12	256.509.327	25,00	3	45.912.000	25,00	3	95.255.184	25,00	3	54.276.200	25,00	3	55.006.600	100	12	250.449.984	12	250.449.984	33,33	62,61	
		7 01 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	40.000.000			12	28.550.000	25,00	3	3.462.931	25,00	3	9.457.110	25,00	3	5.049.500	25,00	3	7.735.552	100	12	25.705.093	12	25.705.093	33,33	64,26	
		7 01 01 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	90.000.000			12	72.017.693	25,00	3	13.173.600	25,00	3	25.333.400	25,00	3	17.585.400	25,00	3	15.447.200	100	12	71.539.600	12	71.539.600	33,33	79,49	
		7 01 01 2 09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)**	**9**	**109.000.000**			**9**	**55.219.708**	**2,00**		**4.791.200**	**3,00**		**13.836.800**	**3,00**		**11.265.500**	**1,00**			**9,00**		**53.848.900**	**9,00**	**53.848.900**	#####	**49,40**	
		7 01 01 2 09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8	70.000.000			3	52.309.708	33,33	1	4.791.200	33,33	1	13.836.800	33,33	1	11.265.500	0,00		21.095.400	100	3	50.988.900	3	50.988.900	37,50	72,84	
		7 01 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	24	19.000.000			8	2.910.000	25,00	2	-	25,00	2		0,00	0,00		50,00	4	2.860.000	100	8	2.860.000	8	2.860.000	33,33	15,05	
		7 01 01 2 09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	20.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**20,89**		**19,91**	**21,54**		**31,70**	**19,26**		**22,78**	**24,60**		**20,94**	**100**		**96,52**			**39,76**	**52,04**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	R	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	R	
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Publik	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP (%)	100	55.000.000			100	1.150.000	25,00		500.000	25,00		-	25,00		-	25,00		650.000	100		1.150.000	100	1.150.000	100	2,09	KEC. PEMALI
		7 01 02 2 02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu (%)	100	55.000.000			100	1.150.000	25,00		500.000	25,00		-	25,00		-	25,00		650.000	100		1.150.000	100	1.150.000	100	2,09	
		7 01 02 2 02 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	36	55.000.000			12	1.150.000	25,00	3	500.000	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3	650.000	100	12	1.150.000	12	1.150.000	33,33	2,09	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							25,00		43,48	25,00		0,00	25,00		0,00	25,00		56,52	100		100			33,33	2,09	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		R	ST		ST			SR	SR	
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100	120.000.000			100	31.900.000	100		6.480.000	0,00		5.400.000	0,00		1.910.000	0,00		16.570.000	100		30.360.000	100	30.360.000	100	25,30	KEC. PEMALI
	Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100				100		25,00			25,00			25,00			25,00			100			100		100		
		7 01 03 2 01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/kel/kecamatan	100	120.000.000			100	31.900.000	100		6.480.000	0,00		5.400.000	0,00		1.910.000	0,00		16.570.000	100		30.360.000	100	30.360.000	100	25,30	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (%)	100				100		25,00			25,00			25,00			25,00			100			100		100		
		7 01 03 2 01 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	126	10.000.000			42	1.300.000	100	42	980.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	300.000	100	42	1.280.000	42	1.280.000	33,33	12,80	
		7 01 03 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	78	110.000.000			26	30.600.000	11,54	3	5.500.000	15,38	4	5.400.000	38,46	10	1.910.000	34,62	9	16.270.000	100	26	29.080.000	26	29.080.000	33,33		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							55,77		20,31	7,69		16,93	19,23		5,99	17,31		51,94	100		95,17			33,33	12,80	
				Predikat Kinerja							R		SR	SR		SR	SR		SR	SR		R	ST		ST			SR	SR	
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Tratibum	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum (%)	100	20.000.000			95	1.150.000	25,00		500.000	25,00		-	25,00		500.000	25,00		150.000	100		1.150.000	100	1.150.000	100	5,75	KEC. PEMALI
		7 01 04 2 01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksanaya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100	20.000.000			100	1.150.000	25,00		500.000	25,00		-	25,00		500.000	25,00		150.000	100		1.150.000	100	1.150.000	100	5,75	
		7 01 04 2 01 0002	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	36	20.000.000			12	1.150.000	25,00	3	500.000	25,00	3	-	25,00	3	500.000	25,00	3	150.000	100	12	1.150.000	12	1.150.000	33,33	5,75	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							25,00		43,48	25,00		0,00	25,00		43,48	25,00		13,04	100		100			33,33	5,75	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		SR			SR	SR	
5	Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa (%)	100	60.000.000			100	1.150.000	25,00		-	25,00		-	25,00		425.000	25,00		-	100		425.000	100	425.000	100	0,71	KEC. PEMALI
		7 01 06 2 01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev (%)	100	60.000.000			100	1.150.000	25,00		-	25,00		-	25,00		425.000	25,00		-	100		425.000	100	425.000	100	0,71	
		7 01 06 2 01 0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	420	60.000.000			140	1.150.000	25,00	35	-	25,00	35		25,00	35	425.000	25,00	35		100	140	425.000	140	425.000	33,33	0,71	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							25,00		0,00	25,00		0,00	25,00		36,96	25,00		0,00	100		36,96			33,33	0,71	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN PEMALI						2.059.295.812			410.534.708			646.968.550			463.946.797			441.108.302			1.986.513.757		1.986.513.757			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program (%)							30,33		19,94	20,85		31,42	22,70		22,53	23,38		21,42	100		96,47			34,62	14,68	
				Predikat Kinerja Seluruh Program							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
		7	URUSAN KEWILAYAHAN																										
		7 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN MERAWANG			12.714.031.050				2.366.012.125			393.228.086			856.082.172			505.560.536			497.937.233			2.253.008.027		2.253.008.027		17,72	

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan**	**7**	**0 1**	**0 1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah**	**26,25**	**11.932.669.050**			**25,90**	**2.318.392.125**	**25,90**		**388.368.086**	**23,78**		**843.557.172**	**0,00**		**503.000.536**	**0,00**		**497.337.233**	**25,90**		**2.232.263.027**	**25,90**	**2.232.263.027**	**98,67**	**18,71**	**KEC. MERAWANG**
									Nilai kinerja pelaporan Perangkat Daerah	**12,50**				**10,50**		**10,50**			**11,04**			**0,00**			**0,00**			**10,50**			**10,50**		**84,00**		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi								**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah								**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**62,50**				**62,00**		**62,00**			**56,90**			**0,00**			**0,00**			**62,00**			**62,00**		**99,20**		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah								**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**4**				**3**		**3**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**3**			**3,00**		**75,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat								**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**90,00**				**90,00**		**90,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**90,00**			**90,00**		**100**		
		7	**0 1**	**0 1**	**2 1**			**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai**	**100**	**92.727.000**			**100**	**1.300.000**	**50,00**		**-**	**33,33**		**900.000**	**16,67**		**100.000**	**0,00**		**300.000**	**100**		**1.300.000**	**100**	**1.300.000**	**100**	**1,40**	
									Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	**100**				**100**		**50,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
		7	0 1	0 1	2 1	0 1	000 1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	18	46.363.500			6	650.000	50,00	3	-	33,33	2	400.000	16,67	1	100.000	0,00		150.000	100	6	650.000	6	650.000	33,33	1,40	
		7	0 1	0 1	2 1	0 1	000 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12	46.363.500			4	650.000	50,00	2	-	25,00	1	500.000	25,00	1		0,00		150.000	100	4	650.000	4	650.000	33,33	1,40	
		7	**0 1**	**0 1**	**2 2**			**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar (%)**	**100**	**8.154.867.000**			**100**	**1.575.778.615**	**25,00**		**273.161.326**	**25,00**		**593.680.107**	**25,00**		**345.591.196**	**25,00**		**320.150.993**	**100**		**1.532.583.622**	**100**	**1.532.583.622**	**100**	**18,79**	
		7	0 1	0 1	2 2	0 2	000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan (orang)	54	7.691.232.000			18	1.504.411.991	25,00	18	259.387.726	25,00	18	569.789.707	25,00	18	328.005.796	25,00	18	304.353.793	100	18	1.461.537.022	18	1.461.537.022	33,33	19,00	
		7	0 1	0 1	2 2	0 2	000 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	386.362.500			12	70.716.624	25,00	3	13.773.600	25,00	3	23.390.400	25,00	3	17.585.400	25,00	3	15.647.200	100	12	70.396.600	12	70.396.600	33,33	18,22	
		7	0 1	0 1	2 2	0 2	000 7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	126	77.272.500			42	650.000	23,81	10	-	26,19	11	500.000	23,81	10	-	26,19	11	150.000	100	42	650.000	42	650.000	33,33	0,84	
		7	**0 1**	**0 1**	**2 5**			**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkapi (%)**	**100**	**262.726.500**			**100**	**900.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**750.000**	**100**		**750.000**	**100**	**750.000**	**100**	**0,29**	
									Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
									Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan	**44,00**				**44,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		7	0 1	0 1	2 5	0 5	000 2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	18	154.545.000			6	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7	0 1	0 1	2 5	0 5	000 3	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	33	30.909.000			11	900.000	27,27	3	-	27,27	3	-	27,27	3		18,18	2	750.000	100	11	750.000	11	750.000	33,33	2,43	
		7	0 1	0 1	2 5	0 5	000 9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	24	77.272.500			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7	**0 1**	**0 1**	**2 6**			**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)**	**100**	**614.190.805**			**100**	**103.900.734**	**25,00**		**15.176.400**	**25,00**		**23.283.600**	**25,00**		**13.543.600**	**25,00**		**37.758.800**	**100**		**89.762.400**	**100**	**89.762.400**	**100**	**14,61**	
		7	0 1	0 1	2 6	0 6	000 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	428.736.805			14	56.756.318	21,43	3	5.994.000	28,57	4	8.010.000	21,43	3	1.820.000	28,57	4	26.994.000	100	14	42.818.000	14	42.818.000	33,33	9,99	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		7 0 1 0 1 2 0 6 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	36	92.727.000			12	23.572.208	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.636.800	25,00	3	5.861.800	25,00	3	5.382.400	100	12	23.472.200	12	23.472.200	33,33	25,31	
		7 0 1 0 1 2 0 6 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	36	92.727.000			12	23.572.208	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.636.800	25,00	3	5.861.800	25,00	3	5.382.400	100	12	23.472.200	12	23.472.200	33,33	25,31	
		7 0 1 0 1 2 0 7	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)**	**7**	**409.050.000**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		7 0 1 0 1 2 0 7 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan (unit)	3	106.050.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7 0 1 0 1 2 0 7 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (paket)	18	106.050.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7 0 1 0 1 2 0 7 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	60	106.050.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7 0 1 0 1 2 0 7 0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	3	90.900.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7 0 1 0 1 2 0 8	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan layanan jasa Penunjang di**	**90**	**2.039.994.000**			**90**	**573.920.568**	**22,50**		**95.239.160**	**22,50**		**206.036.665**	**22,50**		**132.736.440**	**22,50**		**118.055.040**	**90,00**		**552.067.305**	**90,00**	**552.067.305**	**100**	**27,06**	
		7 0 1 0 1 2 0 8 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	36	1.669.086.000			12	459.206.874	25,00	3	82.731.600	25,00	3	159.210.875	25,00	3	105.782.400	25,00	3	92.333.200	100	12	440.058.075	12	440.058.075	33,33	26,37	
		7 0 1 0 1 2 0 8 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	139.090.500			12	32.715.805	25,00	3	2.970.760	25,00	3	12.422.590	25,00	3	7.718.640	25,00	3	7.924.640	100	12	31.036.630	12	31.036.630	33,33	22,31	
		7 0 1 0 1 2 0 8 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	231.817.500			12	81.997.889	25,00	3	9.536.800	25,00	3	34.403.200	25,00	3	19.235.400	25,00	3	17.797.200	100	12	80.972.600	12	80.972.600	33,33	34,93	
		7 0 1 0 1 2 0 9	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)**	**9**	**359.113.745**			**9**	**62.592.208**	**2,00**		**4.791.200**	**3,00**		**19.656.800**	**2,00**		**11.029.300**	**2,00**		**20.322.400**	**9,00**		**55.799.700**	**9,00**	**55.799.700**	**100**	**15,54**	
		7 0 1 0 1 2 0 9 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	9	216.363.000			3	54.322.208	33,33	1	4.791.200	33,33	1	16.236.800	33,33	1	11.029.300	0,00	0	17.022.400	100	3	49.079.700	3	49.079.700	33,33	22,68	
		7 0 1 0 1 2 0 9 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	75	77.272.500			25	8.270.000	28,00	7	-	32,00	8	3.420.000	20,00	5		20,00	5	3.300.000	100	25	6.720.000	25	6.720.000	33,33	8,70	
		7 0 1 0 1 2 0 9 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	65.478.245			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**29,20**		**16,75**	**27,19**		**36,39**	**24,47**		**21,70**	**19,14**		**21,45**	**100**		**96,28**			**36,78**	**10,93**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Publik**	**7 0 1 0 2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP (%)**	**100**	**46.363.500**			**100**	**3.800.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**150.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**150.000**	**100**		**300.000**	**100**	**300.000**	**100**	**0,65**	**KEC. MERAWANG**
		7 0 1 0 2 2 0 2	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu (%)**	**100**	**46.363.500**			**100**	**3.800.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**150.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**150.000**	**100**		**300.000**	**100**	**300.000**	**100**	**0,65**	
		7 0 1 0 2 2 0 2 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	36	46.363.500			12	3.800.000	25,00	3	-	25,00	3	150.000	25,00	3		25,00	3	150.000	100	12	300.000	12	300.000	33,33	0,65	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**0,00**	**25,00**		**3,95**	**25,00**		**0,00**	**25,00**		**3,95**	**100**		**7,89**			**33,33**	**0,65**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	**7 0 1 0 3**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang (%)**	**100**	**355.453.500**			**100**	**36.320.000**	**25,00**		**4.860.000**	**25,00**		**12.375.000**	**25,00**		**2.400.000**	**25,00**		**300.000**	**100**		**19.935.000**	**100**	**19.935.000**	**100**	**5,61**	**KEC. MERAWANG**
	Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan			**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
		7 0 1 0 3 2 0 1	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/kel/kecamatan**	**100**	**355.453.500**			**100**	**36.320.000**	**100**		**4.860.000**	**0,00**		**12.375.000**	**0,00**		**2.400.000**	**0,00**		**300.000**	**100**		**19.935.000**	**100**	**19.935.000**	**100**	**5,61**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (%)	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
		7 01 03 2 01 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	210	46.363.500			70	7.370.000	100	70	4.860.000	0,00	0,00	1.975.000	0,00	0,00		0,00		150.000	100	70	6.985.000	70	6.985.000	33,33	15,07	
		7 01 03 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	78	309.090.000			26	28.950.000	34,62	9	-	34,62	9	10.400.000	15,38	4	2.400.000	15,38	4	150.000	100	26	12.950.000	26	12.950.000	33,33		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**67,31**		**13,38**	**17,31**		**34,07**	**7,69**		**6,61**	**7,69**		**0,83**	**100**		**54,89**			**33,33**	**15,07**	
				Predikat Kinerja							**S**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**R**			**SR**	**SR**	
4	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Tratibum**	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum (%)**	**100**	**30.909.000**			**95**	**3.550.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	**KEC. MERAWANG**
		7 01 04 2 01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Terlaksanaya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa**	**100**	**30.909.000**			**100**	**3.550.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
		7 01 04 2 01 0002	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	36	30.909.000			12	3.550.000	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3		25,00	3		100	12	-	12	-	33,33	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**0,00**	**25,00**		**0,00**	**25,00**		**0,00**	**25,00**		**0,00**	**100**		**0,00**			**33,33**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**			**SR**	**SR**	
5	**Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa (%)**	**100**	**348.636.000**			**100**	**3.950.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**160.000**	**25,00**		**150.000**	**100**		**510.000**	**100**	**510.000**	**100**	**0,15**	**KEC. MERAWANG**
		7 01 06 2 01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev (%)**	**100**	**348.636.000**			**100**	**3.950.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**160.000**	**25,00**		**150.000**	**100**		**510.000**	**100**	**510.000**	**100**	**0,15**	
		7 01 06 2 01 0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)	420	123.636.000			140	2.150.000	25,00	35	-	25,00	35		25,00	35	160.000	25,00	35	150.000	100	140	310.000	140	310.000	33,33	0,25	
		7 01 06 2 01 0006	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dokumen)	3	50.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 06 2 01 0009	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan	3	87.500.000			1	900.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 06 2 01 0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di	3	87.500.000			1	900.000	0,00	0,00		0,00	0,00		100	1	50.000	0,00	0,00	150.000	100	1	200.000	1	200.000	33,33	0,23	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**6,25**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**7,44**	**0,00**		**6,98**	**66,67**		**12,91**			**16,67**	**0,12**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**S**		**SR**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MERAWANG						**2.366.012.125**		**393.228.086**			**856.082.172**			**505.560.536**			**497.937.233**			**2.253.008.027**		**2.253.008.027**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program (%)							**30,55**		**16,62**	**18,90**		**36,18**	**16,43**		**21,37**	**15,37**		**21,05**	**93,33**		**95,22**			**30,69**	**5,35**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
		7	**URUSAN KEWILAYAHAN**																										
		7 01	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN BAKAM**			**10.415.288.300**				**1.997.297.202**			**391.304.521**			**669.093.732**			**432.854.408**			**451.577.691**			**1.945.255.352**		**1.945.255.352**		**18,68**	
1	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan**	**7 01 01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah (30)**	**26,00**	**9.686.829.300**		**-**	**26,00**	**1.957.707.202**	**0,00**		**382.537.021**	**22,16**		**656.148.732**	**0,00**		**428.116.908**	**0,00**		**440.370.191**	**22,16**		**1.907.172.852**	**22,16**	**1.907.172.852**	**85,23**	**19,69**	**KEC.BAKAM**
				Nilai kinerja pelaporan Perangkat	**11,00**				**11,00**		**0,00**			**11,59**			**0,00**			**0,00**			**11,59**			**11,59**		#####		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Adminstrasi Keuangan			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			**Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah (Nilai)**	**61,25**				**61,25**		**0,00**			**61,71**			**0,00**			**0,00**			**61,71**			**61,71**		#####		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Nilai)**	**3,00**				**3,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik (%)**	**90,00**				**90,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	**7 01 01 2 01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai**	**100**	**165.000.000**			**100**	**3.330.000**	**50,00**		**630.000**	**33,33**		**1.125.000**	**16,67**		**525.000**	**0,00**		**1.050.000**	**100**		**3.330.000**	**100**	**3.330.000**	**100**	**2,02**	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	**100**				**100**		**50,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
		7 01 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	18	82.500.000			6	2.430.000	50,00	3	630.000	33,33	2	600.000	16,67	1	375.000	0,00	0,00	825.000	100	3	2.430.000	3	2.430.000	16,67	2,95	
		7 01 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	12	82.500.000			4	900.000	50,00	2	-	25,00	1	525.000	25,00	1	150.000	0,00	0,00	225.000	100	2	900.000	2	900.000	16,67	1,09	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat	**7 01 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar (%)**	**100**	**6.529.490.000**			**100**	**1.458.980.764**	**21,43**		**301.341.421**	**21,43**		**497.563.102**	**28,57**		**325.039.028**	**28,57**		**302.579.155**	**100**		**1.426.522.706**	**100**	**1.426.522.706**	**100**	**21,85**	
		7 01 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan (orang)	45	6.454.490.000			15	1.457.390.764	25,00	15	301.341.421	25,00	15	496.858.102	25,00	15	324.664.028	25,00	15	302.219.155	100	15	1.425.082.706	15	1.425.082.706	33,33	22,08	
		7 01 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	37.500.000			12	720.000	25,00	3	-	25,00	3	225.000	25,00	3	225.000	25,00	3	120.000	100	12	570.000	12	570.000	33,33	1,52	
		7 01 01 2 01 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /	126	37.500.000			42	870.000	21,43	9	-	21,43	9	480.000	28,57	12	150.000	28,57	12	240.000	100	42	870.000	42	870.000	33,33	2,32	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan	**7 01 01 2 05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap (%)**	**100**	**314.150.000**			**100**	**600.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**600.000**	**100**		**600.000**	**100**	**600.000**	**100**	**0,19**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian (%)**	**100**				**100**		**36,36**			**9,09**			**27,27**			**27,27**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)**	**40,00**				**40,00**		**0,00**			**50,00**			**50,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
		7 01 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	15	186.650.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33	37.500.000			11	600.000	36,36	4	-	9,09	1		27,27	3	-	27,27	3	600.000	100	11	600.000	11	600.000	33,33	1,60	
		7 01 01 2 05 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	18	90.000.000			6	-	0,00	0,00	-	50,00	3		50,00	3	-	0,00	0,00	-	100	6	-	6	-	33,33	0,00	
		7 01 01 2 06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan umum di Perangkat Daerah**	**100,00**	**508.500.000**			**100,00**	**82.380.748**	**25,00**		**17.389.900**	**25,00**		**30.403.600**	**25,00**		**15.181.100**	**25,00**		**18.081.132**	**100**		**81.055.732**	**100**	**81.055.732**	**100**	**15,94**	
		7 01 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	313.500.000			14	35.236.332	21,43	3	8.207.500	28,57	4	15.130.000	21,43	3	3.457.500	28,57	4	7.316.332	100	14	34.111.332	14	34.111.332	33,33	10,88	
		7 01 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	36	97.500.000			12	23.572.208	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.636.800	25,00	3	5.861.800	25,00	3	5.382.400	100	12	23.472.200	12	23.472.200	33,33	24,07	
		7 01 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	36	97.500.000			12	23.572.208	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.636.800	25,00	3	5.861.800	25,00	3	5.382.400	100	12	23.472.200	12	23.472.200	33,33	24,07	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		7 01 01 2 07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase penambahan aset Perangkat Daerah (%)**	**27,00**	**697.017.500**			**27,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		7 01 01 2 07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan (unit)	3	105.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (paket)	9	135.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	15	165.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 07 0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan banngunan lainnya yang disediakan	3	292.017.500			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 01 2 08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang di**	**100**	**1.022.724.700**			**100**	**317.405.256**	**25,00**		**53.659.500**	**25,00**		**106.970.230**	**25,00**		**72.262.680**	**25,00**		**79.371.504**	**100**		**312.263.914**	**100**	**312.263.914**	**100**	**30,53**	
		7 01 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	36	722.224.700			12	235.227.512	25,00	3	41.820.800	25,00	3	81.374.750	25,00	3	52.981.200	25,00	3	55.933.600	100	12	232.110.350	12	232.110.350	33,33	32,14	
		7 01 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	112.500.000			12	32.775.150	25,00	3	2.656.300	25,00	3	10.121.880	25,00	3	7.477.880	25,00	3	11.174.680	100	12	31.430.740	12	31.430.740	33,33	27,94	
		7 01 01 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	188.000.000			12	49.402.594	25,00	3	9.182.400	25,00	3,00	15.473.600	25,00	3	11.803.600	25,00	3	12.263.224	100	12	48.722.824	12	48.722.824	33,33	25,92	
		7 01 01 2 09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)**	**25,00**	**449.947.100**			**6,00**	**95.010.434**	**1,50**		**9.516.200**	**1,50**		**20.086.800**	**1,50**		**15.109.100**	**1,50**		**38.688.400**	**6**		**83.400.500**	**6,00**	**83.400.500**	**24,00**		
		7 01 01 2 09 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	27	307.447.100			9	87.510.434	11,11	1	9.516.200	22,22	2	20.086.800	44,44	4	15.109.100	22,22	2	32.448.400	100	9	77.160.500	9	77.160.500	33,33	25,10	
		7 01 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	36	37.500.000			11	7.500.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	11	6.240.000	100	11	6.240.000	11	6.240.000	30,56	16,64	
		7 01 01 2 09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	3	105.000.000			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**24,36**		**19,54**	**24,31**		**33,52**	**25,89**		**21,87**	**25,44**		**22,49**	**100**		**97,42**			**22,09**	**19,69**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan**	**7 01 02**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**82,50**	**90.000.000**			**82,50**	**5.050.000**	**0,00**		**1.787.500**	**0,00**		**450.000**	**0,00**		**525.000**	**0,00**		**2.062.500**	**0,00**		**4.825.000**	**0,00**	**4.825.000**	**0,00**	**5,36**	**KEC.BAKAM**
	Meningkatnya Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	**7 01 02 2 04**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi yang tepat waktu**	**100**	**90.000.000**			**100**	**5.050.000**	**25,00**		**1.787.500**	**25,00**		**450.000**	**25,00**		**525.000**	**25,00**		**2.062.500**	**100**		**4.825.000**	**100**	**4.825.000**	**100**	**5,36**	
		7 01 02 2 04 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	36	90.000.000			12	5.050.000	25,00	3	1.787.500	25,00	3	450.000	25,00	3	525.000	25,00	3	2.062.500	100	12	4.825.000	12	4.825.000	33,33	5,36	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**35,40**	**25,00**		**8,91**	**25,00**		**10,40**	**25,00**		**40,84**	**100**		**95,54**			**33,33**	**5,36**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan**	**7 01 03**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**340.459.000**			**100**	**21.340.000**	**25,00**		**6.980.000**	**25,00**		**11.670.000**	**25,00**		**750.000**	**25,00**		**1.220.000**	**100**		**20.620.000**	**100**	**20.620.000**	**100**	**6,06**	**KEC.BAKAM**
	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	**7 01 03 2 01**	**Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisifasi dalam Musrenbang Desa/ Kelurahan**	**100**	**340.459.000**			**100**	**21.340.000**	**100**		**6.980.000**	**0,00**		**11.670.000**	**0,00**		**750.000**	**0,00**		**1.220.000**	**100**		**20.620.000**	**100**	**20.620.000**	**100**	**6,06**	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam			**Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
		7 01 03 2 01 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	189	33.000.000			63	7.140.000	100,00	63	5.630.000	0,00	0,00	1.150.000	0,00	0,00	-	0,00			100	63	6.780.000	63	6.780.000	33,33	20,55	
		7 01 03 2 01 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	78	307.459.000			26	14.200.000	26,92	7	1.350.000	23,08	6	10.520.000	23,08	6	750.000	26,92	7	1.220.000	100	26	13.840.000	26	13.840.000	33,33	4,50	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**63,46**		**32,71**	**11,54**		**54,69**	**11,54**		**3,51**	**13,46**		**5,72**	**100**		**96,63**			**33,33**	**6,06**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Predikat Kinerja							R		SR	SR		R	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
4	Meningkatnya Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum (%)	100	72.500.000			100	3.600.000	25,00		-	25,00		-	25,00		1.200.000	25,00		2.287.500	100		3.487.500	100	3.487.500	100	4,81	KEC.BAKAM
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 01 04 23	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum******)	Persentase terlaksananya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100	72.500.000			100,00	3.600.000	25,00		-	25,00		-	25,00		1.200.000	25,00		2.287.500	100		3.487.500	100	3.487.500	100	4,81	
		7 01 04 23 0002	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******)	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	36	72.500.000			12	3.600.000	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3	1.200.000	25,00	3	2.287.500	100	12	3.487.500	12	3.487.500	33,33	4,81	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							25,00		0,00	25,00		0,00	25,00		33,33	25,00		63,54	100		96,88			33,33	4,81	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
5	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	7 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100	225.500.000			100	9.600.000	25,00		-	25,00		825.000	25,00		2.262.500	25,00		5.637.500	100		9.150.000	100	9.150.000	100	4,06	KEC.BAKAM
	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Umum	7 01 06 21	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase desa yg menindaklanjuti hasil monev (%)	100	225.500.000			100	9.600.000	25,00		-	25,00		825.000	25,00		2.262.500	25,00		5.637.500	100		9.150.000	100	9.150.000	100	4,06	
	Terlaksananya Pembinaan keuangan desa	7 01 06 21 0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	627	150.500.000			209	5.050.000	3,35	7	-	46,89	98		22,49	47	525.000	27,27	57	4.300.000	100	209	4.825.000	209	4.825.000	33,33	3,21	
		7 01 06 21 0009	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	3	37.500.000			1	3.100.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	825.000	100	1	1.737.500	0,00		425.000	100	1	2.987.500	1	2.987.500	33,33	7,97	
		7 01 06 21 0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	3	37.500.000			1	1.450.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	100,00	1	1.337.500	100	1	1.337.500	1	1.337.500	33,33	3,57	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							1,12		0,00	15,63		8,59	40,83		23,57	42,42		58,72	100		95,31			33,33	4,06	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		R			ST			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BAKAM						1.997.297.202			391.304.521			669.093.732			432.854.408			451.577.691			1.945.255.352		1.945.255.352			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program (%)							27,79		19,59	20,30		33,50	25,65		21,67	26,27		22,61	100		97,39			31,08	7,99	
				Predikat Kinerja Seluruh Program							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
		7	URUSAN KEWILAYAHAN																										
		7 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN PUDING BESAR			11.863.869.400				2.344.845.235			483.639.740			777.234.277			547.167.630			512.075.489			2.320.117.136		2.320.117.136		19,56	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26,84	11.134.829.400			26,78	2.314.745.235	0,00		479.399.740	22,86		768.409.277	0,00		543.792.630	0,00		499.835.489	22,86		2.291.437.136	22,86	2.291.437.136	85,17	20,58	KEC. PUDING BESAR
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,43				11,41		0,00			10,53			0,00			0,00			10,53			10,53		92,13		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Adminstrasi Keuangan			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00				0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		100		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62,75				62,45		0,00			62,83			0,00			0,00			62,83			62,83		#####		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4,00				3,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)	100				100		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
	Meningkatnya perencanaan kinerja sesuai standar	7 01 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	60.000.000	0	-	100	-	50,00		-	33,33		-	16,67		-	0,00		-	100		-	100	-	100	0,00	
	Meningkatnya pelaporan kinerja sesuai standar			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100				100		50,00			25,00			25,00			0,00			100			100		100		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 01 01 21 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	18	30.000.000			6	-	50,00	3	-	33,33	2	-	16,67	1	-	0,00		-	100	6	-	6	-	33,33	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	7 01 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan)	12	30.000.000			4	-	50,00	2	-	25,00	1	-	25,00	1	-	0,00		-	100	4	-	4	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	**7 01 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)**	**100**	**7.183.431.600**		**-**	**100**	**1.574.102.943**	**25,00**		**333.916.440**	**25,00**		**538.371.977**	**25,00**		**354.843.230**	**25,00**		**331.810.189**	**100**		**1.558.941.836**	**100**	**1.558.941.836**	**100**	**21,70**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7 01 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)	52	7.123.431.600			14	1.574.102.943	25,00	14	333.916.440	25,00	14	538.371.977	25,00	14	354.843.230	25,00	14	331.810.189	100	14	1.558.941.836	14	1.558.941.836	26,92	21,88	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	7 01 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	36	45.000.000			12	-	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3	-	100	12	-	12	-	33,33	0,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	7 01 01 2 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	126	15.000.000			42	-	23,81	10		26,19	11	-	23,81	10	-	26,19	11	-	100	42	-	42	-	33,33	0,00	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	**7 01 01 2 05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**100**	**262.261.500**		**-**	**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100**				**100**		**25,00**		**25,00**				**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**52,94**				**52,94**		**0,00**		**0,00**				**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 01 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan(Paket)	15	121.050.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 01 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 01 01 2 05 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	12	111.211.500			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat	**7 01 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah**	**100**	**829.200.000**	**0**	**0**	**100**	**166.422.832**	**25,00**		**34.264.800**	**25,00**		**38.032.200**	**25,00**		**56.887.200**	**25,00**		**34.109.600**	**100**		**163.293.800**	**100**	**163.293.800**	**100**	**19,69**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 01 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	42	487.800.000			14	72.734.000	21,43	3	15.900.000	28,57	4	7.485.000	28,57	4	33.440.000	21,43	3	13.180.000	100	14	70.005.000	14	70.005.000	33,33	14,35	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 01 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	36	170.700.000			12	46.844.416	25,00	3	9.182.400	25,00	3	15.273.600	25,00	3	11.723.600	25,00	3	10.464.800	100	12	46.644.400	12	46.644.400	33,33	27,33	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 01 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	170.700.000			12	46.844.416	25,00	3	9.182.400	25,00	3	15.273.600	25,00	3	11.723.600	25,00	3	10.464.800	100	12	46.644.400	12	46.644.400	33,33	27,33	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung	**7 01 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)**	**17,93**	**665.626.800**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. PUDING BESAR**
	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 01 01 2 07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan(Unit)	7	400.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya mebel kantor yang diadakan	7 01 01 2 07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (paket)	3	148.650.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	7 01 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	27	116.976.800			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 0 1 0 1 2 07 0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan (unit)	3	263.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat	**7 01 01 2 08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah**	**100**	**1.779.159.500**			**100**	**509.360.752**	**25,00**		**106.427.300**	**25,00**		**164.373.600**	**25,00**		**117.050.400**	**25,00**		**117.586.300**	**100**		**505.437.600**	**100**	**505.437.600**	**100**	**28,41**	**KEC. PUDING BESAR**
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 0 1 0 1 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	36	1.396.162.125			12	401.692.873	25,00	3	87.294.800	25,00	3	128.128.800	25,00	3	94.058.800	25,00	3	89.242.400	100	12	398.724.800	12	398.724.800	33,33	28,56	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 0 1 0 1 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	119.897.375			12	34.093.699	25,00	3	2.574.900	25,00	3	13.334.400	25,00	3	5.206.200	25,00	3	12.496.700	100	12	33.612.200	12	33.612.200	33,33	28,03	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 0 1 0 1 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	36	263.100.000			12	73.574.180	25,00	3	16.557.600	25,00	3	22.910.400	25,00	3	17.785.400	25,00	3	15.847.200	100	12	73.100.600	12	73.100.600	33,33	27,78	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat	**7 01 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**18,91**	**355.150.000**			**18,00**	**64.858.708**	**4,50**		**4.791.200**	**4,50**		**27.631.500**	**4,50**		**15.011.800**	**4,50**		**16.329.400**	**18,00**		**63.763.900**	**18,00**	**63.763.900**	**95,19**	**17,95**	**KEC. PUDING BESAR**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	7 0 1 0 1 2 09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	60	225.000.000			12	56.088.708	25,00	3	4.791.200	25,00	3	23.246.500	25,00	3	15.011.800	25,00	3	12.269.400	100	12	55.318.900	12	55.318.900	20,00	24,59	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 0 1 0 1 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	81	55.150.000			27	8.770.000	0,00	0,00	-	51,85	14	4.385.000	0,00	0,00	-	48,15	13	4.060.000	100	27	8.445.000	27	8.445.000	33,33	15,31	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	7 0 1 0 1 2 09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	18	75.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**26,56**		**20,71**	**28,07**		**33,20**	**22,62**		**23,49**	**22,75**		**21,59**	**100**		**98,99**			**28,15**	**11,25**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Publik**	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP**	**100**	**45.000.000**		-	**100**	**5.300.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**2.175.000**	**25,00**		**900.000**	**25,00**		**2.225.000**	**100**		**5.300.000**	**100**	**5.300.000**	**100**	**11,78**	**KEC. PUDING BESAR**
	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan	**7 01 02 2 02**	**Kegiatan Penyelenggaraan, Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu (%)**	**100**	**45.000.000**		-	**100**	**5.300.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**2.175.000**	**25,00**		**900.000**	**25,00**		**2.225.000**	**100**		**5.300.000**	**100**	**5.300.000**	**100**	**11,78**	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	7 0 1 0 2 2 04 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	36	45.000.000			12	5.300.000	25,00	3	-	25,00	3	2.175.000	25,00	3	900.000	25,00	3	2.225.000	100	12	5.300.000	12	5.300.000	33,33	11,78	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**0,00**	**25,00**		**41,04**	**25,00**		**16,98**	**25,00**		**41,98**	**100**		**100**			**33,33**	**11,78**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan**	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang (Persentase)**	**100**	**352.590.000**		-	**100**	**17.200.000**	**100**		**4.240.000**	**0,00**		**5.000.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**6.540.000**	**100**		**15.780.000**	**100**	**15.780.000**	**100**	**4,48**	**KEC. PUDING BESAR**
	Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan			**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (persentase)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100,00**			**100,00**		#####		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kel/Kec	**7 01 03 2 01**	**Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrebang desa/kel/kecamatan (%)**	**100**	**352.590.000**		-	**100**	**17.200.000**	**100**		**4.240.000**	**0,00**		**5.000.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**6.540.000**	**100**		**15.780.000**	**100**	**15.780.000**	**100**	**4,48**	**KEC. PUDING BESAR**
	Meningkatnya Pembinaan Lembaga			**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	7 0 1 0 3 2 01 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	147	30.000.000			49	4.940.000	100	49	4.240.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	100	49	4.240.000	49	4.240.000	33,33	14,13	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	7 0 1 0 3 2 01 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	78	322.590.000		-	26	12.260.000	23,08	6		38,46	10	5.000.000	23,08	6	-	15,38	4	6.540.000	100	26	11.540.000	26	11.540.000	33,33	3,58	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							61,54		24,65	19,23		29,07	11,54		0,00	7,69		38,02	100		91,74			33,33	8,86	
				Predikat Kinerja							R		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
4	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum (%)	100,00	42.450.000		-	100,00	3.800.000	25,00		-	25,00		1.650.000	25,00		1.275.000	25,00		875.000	100		3.800.000	100	3.800.000	100	8,95	KEC. PUDING BESAR
	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan dengan Tomas/Toga/Topa	7 01 04 2 01	Kegiaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksanaya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100,00	42.450.000		-	100,00	3.800.000	25,00		-	25,00		1.650.000	25,00		1.275.000	25,00		875.000	100		3.800.000	100	3.800.000	100	8,95	
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 01 04 2 01 0002	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	36	42.450.000			12	3.800.000	25,00	3		25,00	3	1.650.000	25,00	3	1.275.000	25,00	3	875.000	100	12	3.800.000	12	3.800.000	33,33	8,95	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							25,00		0,00	25,00		43,42	25,00		33,55	25,00		23,03	100		100			33,33	8,95	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
5	Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa(%)	100	289.000.000		-	100	3.800.000	25,00		-	25,00		-	25,00		1.200.000	25,00		2.600.000	100		3.800.000	100	3.800.000	100	1,31	KEC. PUDING BESAR
	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Desa	7 01 06 2 01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa (%)	100	289.000.000		-	100	3.800.000	25,00		-	25,00		-	25,00		1.200.000	25,00		2.600.000	100		3.800.000	100	3.800.000	100	1,31	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	7 01 06 2 01 0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	420	229.000.000			140	3.800.000	25,00	35	-	28,57	40	-	25,00	35	1.200.000	21,43	30	2.600.000	100	140	3.800.000	140	3.800.000	33,33	1,66	
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	7 01 06 2 01 0009	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	3	30.000.000			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan	7 01 06 2 01 0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya(Dokumen)	3	30.000.000			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							25,00		0,00	28,57		0,00	25,00		31,58	0,00		68,42	100		100			33,33	1,66	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		S	ST		ST			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM KECAMATAN PUDING BESAR					2.344.845.235				483.639.740			777.234.277			547.167.630			512.075.489			2.320.117.136		2.320.117.136			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Kecamatan Puding Besar (%)							32,62		20,63	25,18		33,15	21,83		23,33	16,09		21,84	100		98,95			32,30	8,50	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Kecamatan Puding Besar							SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
		7	URUSAN KEWILAYAHAN																											
		7 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN MENDO BARAT			13.576.682.750				2.858.370.896			511.521.475			1.059.344.868			588.518.497			616.931.574			2.776.316.414		2.776.316.414		20,45	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	26,00	12.808.682.750	0,00	-	25,10	2.783.935.896	0,00		501.741.475	22,16		1.043.879.868	0,00		569.450.497	0,00		600.104.574	22,16		2.715.176.414	22,16	2.715.176.414	85,23	21,20	KEC. MENDO BARAT
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12,25				11,35		0,00			11,07			0,00			0,00			11,07			11,07	-	90,37		
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	7 01 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100	89.000.000			100	2.750.000	50,00		-	33,33		1.725.000	16,67		875.000	0,00		150.000	100		2.750.000	100	2.750.000	100	3,09	
				Persentase Pelaporan kinerja yang disusun Sesuai standar	100				100		50,00			25,00			25,00			0,00			100			100	-	100		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 01 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	70.000.000			6	2.750.000	50,00	3	-	33,33	2	1.725.000	16,67	1	875.000	0,00	0,00	150.000	100	6	2.750.000	6	2.750.000	33,33	3,93	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	7 01 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	19.000.000			4	-	50,00	2	-	25,00	1	-	25,00	1	-	0,00	0,00	-	100	4	-	4	-	33,33	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan			**Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Dalam LHP BPK-RI**	**0,00**	**7.397.542.400**			**0,00**	**1.619.902.310**	**0,00**		**342.948.894**	**0,00**		**552.646.791**	**0,00**		**362.427.413**	**0,00**		**323.425.116**	**0,00**		**1.581.448.214**	**0,00**	**1.581.448.214**	**100**	**21,38**	**KEC. MENDO BARAT**
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7 01 01 2 02**		**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar**	**100**	**7.397.542.400**			**100**	**1.619.902.310**	**25,00**		**342.948.894**	**25,00**		**552.646.791**	**25,00**		**362.427.413**	**25,00**		**323.425.116**	**100**		**1.581.448.214**	**100**	**1.581.448.214**	**100**	**21,38**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7 01 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	7.290.542.400			17	1.613.602.310	25,00	17	342.948.894	25,00	17	550.621.791	25,00	17	358.477.413	25,00	17	323.125.116	100	17	1.575.173.214	17	1.575.173.214	106,25	21,61	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	7 01 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	85.000.000			12	6.300.000	25,00	3	-	25,00	3	2.025.000	25,00	3	3.950.000	25,00	3	300.000	100	12	6.275.000	12	6.275.000	33,33	7,38	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	7 01 01 2 01 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	126	22.000.000			40	-	25,00	10	-	25,00	10	-	25,00	10	-	25,00	10	-	100	40	-	40	-	31,75	0,00	
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			**Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah**	**64,00**	**265.500.000**			**64,44**	**-**	**0,00**		**-**	**56,90**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**56,90**		**-**	**56,90**	**-**	**88,91**	**0,00**	**KEC. MENDO BARAT**
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	**7 01 01 2 05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**100**	**265.500.000**			**100**	**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**	**-**	**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**67,00**				**39,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut	7 01 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18	190.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksanannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 01 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Adiministrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33	5.500.000			11	-	27,27	3	-	27,27	3	-	27,27	3	-	18,18	2	-	100	11	-	11	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 01 01 2 05 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	70.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**3,70**	**3.812.640.350**			**3,00**	**873.761.378**	**0,00**		**152.474.581**	**0,00**		**267.622.077**	**0,00**		**200.286.284**	**3,00**		**230.391.358**	**3,00**		**850.774.300**	**3,00**	**850.774.300**	**81,08**	**22,31**	**KEC. MENDO BARAT**
	Terlaksananya Layanan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah	**7 01 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah**	**100**	**826.607.411**			**100,00**	**111.485.383**	**25,00**		**11.057.400**	**25,00**		**35.491.600**	**25,00**		**21.616.600**	**25,00**		**31.666.800**	**100**		**99.832.400**	**100**	**99.832.400**	**100**	**12,08**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 01 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	640.607.411			14	64.340.967	21,43	3	1.875.000	28,57	4	20.218.000	28,57	4	9.893.000	21,43	3	20.902.000	100	14	52.888.000	14	52.888.000	33,33	8,26	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 01 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	93.000.000			12	23.572.208	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.636.800	25,00	3	5.861.800	25,00	3	5.382.400	100	12	23.472.200	12	23.472.200	33,33	25,24	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	7 01 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	93.000.000			12	23.572.208	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.636.800	25,00	3	5.861.800	25,00	3	5.382.400	100	12	23.472.200	12	23.472.200	33,33	25,24	
	Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	**7 01 01 2 08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjanng di Perangkat Daerah**	**100**	**2.986.032.939**			**100**	**762.275.995**	**25,00**		**141.417.181**	**25,00**		**232.130.477**	**25,00**		**178.669.684**	**25,00**		**198.724.558**	**100**		**750.941.900**	**100**	**750.941.900**	**100**	**25,15**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 01 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	2.672.629.722			12	690.768.284	25,00	3	129.713.600	25,00	3	213.757.900	25,00	3	164.370.400	25,00	3	174.909.900	100	12	682.751.800	12	682.751.800	33,33	25,55	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 0 1 0 1 2 0 8 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	97.000.000			12	18.277.094	25,00	3 2.421.181	25,00	3 2.948.977	25,00	3 2.425.684	25,00	3 7.673.390	100	12 15.469.232	12	15.469.232	33,33	15,95	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 0 1 0 1 2 0 8 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	216.403.217			12	53.230.617	25,00	3 9.282.400	25,00	3 15.423.600	25,00	3 11.873.600	25,00	3 16.141.268	100	12 52.720.868	12	52.720.868	33,33	24,36	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik**	**87,00**	**1.244.000.000**			**2,05**	**287.522.208**	**0,00**	**6.318.000**	**0,00**	**221.886.000**	**0,00**		**2,05**		**2,05**	**228.204.000**	**2,05**	**228.204.000**	**2,36**	**18,34**	**KEC. MENDO BARAT**
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja	**7 01 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah**	**22,00**	**785.000.000**			**20,00**	**199.400.000**	**0,00**	**-**	**20,00**	**199.400.000**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**20,00**	**199.400.000**	**20,00**	**199.400.000**	**90,91**	**25,40**	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 0 1 0 1 2 0 7 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	390.000.000			0	-	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Mebel	7 0 1 0 1 2 0 7 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	80.000.000			0	-	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	7 0 1 0 1 2 0 7 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	100.000.000			0	-	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 0 1 0 1 2 0 7 0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1	215.000.000			1	199.400.000	0,00	0,00 -	100	1 199.400.000	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	100	1 199.400.000	1	199.400.000	100	92,74	
	Terpelihara Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	**7 01 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**100**	**459.000.000**			**100**	**88.122.208**	**25,00**	**6.318.000**	**25,00**	**22.486.000**	**25,00**	**5.861.800**	**25,00**	**46.138.100**	**100**	**80.803.900**	**100**	**80.803.900**	**100**	**17,60**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	7 0 1 0 1 2 0 9 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	312.000.000			6	81.372.208	33,33	2 6.318.000	33,33	2 22.486.000	16,67	1 5.861.800	16,67	1 39.593.100	100	6 74.258.900	6	74.258.900	100,00	23,80	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 0 1 0 1 2 0 9 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	47.000.000			15	6.750.000	0,00	0,00 -	53,33	8 -	0,00	0,00 -	46,67	7 6.545.000	100	15 6.545.000	15	6.545.000	33,33	13,93	
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan	7 0 1 0 1 2 0 9 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	100.000.000			0	-	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	-	0,00	0,00 -	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**29,39**		**18,02**	**38,53**		**37,50**	**24,17**		**20,45**	**23,30**		**21,56**	**100**		**97,53**			**33,56**	**21,20**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Publik**	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP**	**100**	**23.000.000**			**100**	**2.700.000**	**25,00**	**-**	**25,00**	**800.000**	**25,00**	**800.000**	**25,00**	**1.100.000**	**100**	**2.700.000**	**100**	**2.700.000**	**100**	**11,74**	**KEC. MENDO BARAT**
	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan	**7 01 02 2 02**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit**	**Persentase Layanan Administrasi yang Tepat Waktu**	**100**	**23.000.000**			**100**	**2.700.000**	**25,00**	**-**	**25,00**	**800.000**	**25,00**	**800.000**	**25,00**	**1.100.000**	**100**	**2.700.000**	**100**	**2.700.000**	**100**	**11,74**	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	7 0 1 0 2 2 0 2 03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	36	23.000.000			12	2.700.000	25,00	3 -	25,00	3 800.000	25,00	3 800.000	25,00	3 1.100.000	100	12 2.700.000	12	2.700.000	33,33	11,74	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**0,00**	**25,00**		**29,63**	**25,00**		**29,63**	**25,00**		**40,74**	**100**		**100**			**33,33**	**11,74**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa/Kel yang Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang**	**100**	**485.000.000**			**100**	**35.465.000**	**100**	**9.780.000**	**0,00**	**9.715.000**	**0,00**	**3.855.000**	**0,00**	**10.595.000**	**100**	**33.945.000**	**100**	**33.945.000**	**100**	**7,00**	**KEC. MENDO BARAT**
	Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan			**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**				**100**		**25,00**	**-**	**25,00**		**25,00**		**25,00**		**100**	**-**	**100**	**-**	**100**		**KEC. MENDO BARAT**
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kel/ Kecamatan	**7 01 03 2 01**	**Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang Desa/Kel/ Kecamatan**	**100**	**78.000.000**			**100**	**35.465.000**	**100**	**9.780.000**	**0,00**	**9.715.000**	**0,00**	**3.855.000**	**0,00**	**10.595.000**	**100**	**33.945.000**	**100**	**33.945.000**	**100**	**43,52**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina**	**100**	**407.000.000**			**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**	-	**100**		
	Meningkatnya Partsipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	7 0 1 0 3 2 0 1 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	105	78.000.000			105	10.450.000	100	105	9.780.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		150.000	100	105	9.930.000	105	9.930.000	100	12,73	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	7 0 1 0 3 2 0 1 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78	407.000.000			26	25.015.000	30,77	8	-	30,77	8	9.715.000	30,77	8,00	3.855.000	7,69	2	10.445.000	100	26	24.015.000	26	24.015.000	33,33	5,90	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**65,38**		**27,58**	**15,38**		**27,39**	**15,38**		**10,87**	**3,85**		**29,87**	**100**		**95,71**			**66,67**	**9,32**	
				Predikat Kinerja							**S**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**S**	**SR**	
4	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Trantibum**	**7 0 1 0 4**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tomas/Toga/Topa yg Berperan Aktif Dalam Menjaga Trantibum**	**100**	**35.000.000**			**100**	**4.800.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**2.100.000**	**25,00**		**1.875.000**	**25,00**		**825.000**	**100**		**4.800.000**	**100**	**4.800.000**	**100**	**13,71**	**KEC. MENDO BARAT**
	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan dengan Tomas/Toga/Topa	**7 0 1 0 4 2 0 3**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa**	**100**	**35.000.000**			**100**	**4.800.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**2.100.000**	**25,00**		**1.875.000**	**25,00**		**825.000**	**100**		**4.800.000**	**100**	**4.800.000**	**100**	**13,71**	**KEC. MENDO BARAT**
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 0 1 0 4 2 0 1 0002	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	36	35.000.000			12	4.800.000	25,00	3	-	25,00	3	2.100.000	25,00	3	1.875.000	25,00	3	825.000	100	12	4.800.000	12	4.800.000	33,33	13,71	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**0,00**	**25,00**		**43,75**	**25,00**		**39,06**	**25,00**		**17,19**	**100**		**100**			**33,33**	**13,71**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**			**SR**	**SR**	
5	**Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**7 0 1 0 6**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Desa**	**100**	**225.000.000**			**100**	**31.470.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**2.850.000**	**25,00**		**12.538.000**	**25,00**		**4.307.000**	**100**		**19.695.000**	**100**	**19.695.000**	**100**	**8,75**	**KEC. MENDO BARAT**
	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Desa	**7 0 1 0 6 2 0 1**	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Monev**	**100**	**225.000.000**			**100**	**31.470.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**2.850.000**	**25,00**		**12.538.000**	**25,00**		**4.307.000**	**100**		**19.695.000**	**100**	**19.695.000**	**100**	**8,75**	**KEC. MENDO BARAT**
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	7 0 1 0 6 2 0 1 0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	951	167.000.000			316	20.950.000	25,00	79	-	25,00	79	2.850.000	25,00	79	12.538.000	25,00	79	4.307.000	100	316	19.695.000	316	19.695.000	33,23	11,79	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7 0 1 0 6 2 0 1 0006	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	15.000.000			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	Kasi Tapem
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 0 1 0 6 2 0 1 0009	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3	21.000.000			1	3.350.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.000.000	0,00	0,00	-	100	1	2.230.000	100	1	3.230.000	1	3.230.000	33,33	15,38	
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 0 1 0 6 2 0 1 0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3	22.000.000			1	7.170.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	975.000	100	1	1.535.000	0,00	0,00	4.160.000	100	1	6.670.000	1	6.670.000	33,33	30,32	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**8,33**		**0,00**	**8,33**		**13,60**	**41,67**		**59,85**	**41,67**		**20,56**	**100**		**94,01**			**24,97**	**14,37**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**R**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM KECAMATAN MENDO BARAT		**2.858.370.896**							**511.521.475**			**1.059.344.868**			**588.518.497**			**616.931.574**			**2.776.316.414**		**2.776.316.414**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Kecamatan Mendo Barat (%)							**30,62**		**17,90**	**22,45**		**37,06**	**26,24**		**20,59**	**23,76**		**21,58**	**100**		**97,13**			**38,37**	**14,07**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Mendo Barat							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
		7	**URUSAN KEWILAYAHAN**																											
		7 0 1	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN RIAU SILIP**			**9.952.420.800**		**-**		**2.052.233.004**			**417.275.488**			**651.489.946**			**470.493.971**			**527.385.260**			**2.069.404.665**		**2.069.404.665**		**20,79**	
1	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan**	**7 0 1 0 1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)**	**30,00**	**9.440.476.150**		**-**	**25,00**	**2.023.008.004**	**0,00**		**414.750.488**	**21,92**		**649.689.946**	**0,00**		**470.493.971**	**0,00**		**509.740.260**	**21,92**		**2.044.674.665**	**21,92**	**2.044.674.665**	**73,07**	**21,66**	**KEC. RIAU SILIP**
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	**11,70**				**10,20**		**0,00**			**10,85**			**0,00**			**0,00**			**10,85**			**10,85**		**92,74**		

No	Sasaran	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3							4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah									**Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah**	**64,00**				**63,80**		**0,00**			**61,47**			**0,00**			**0,00**			**61,47**			**61,47**		**96,05**		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah									**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**3,00**				**60,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah									**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**70,00**				**1,50**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	**7**	**01**	**01**	**2**	**01**			**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**100**	**30.000.000**			**100**	**1.050.000**	**50,00**		**75.000**	**33,33**		**600.000**	**16,67**		**-**	**0,00**		**300.000**	**100**		**975.000**	**100**	**975.000**	**100**	**3,25**	
										Persentase Pelaporan kinerja yang disusun Sesuai standar	**100**				**100**		**50,00**			**25,00**			**25,00**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	01	01	2	01	0001		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19	15.000.000			6	525.000	50,00	3	-	33,33	2	300.000	16,67	1	-	0,00	0,00	150.000	100	6	450.000	6	450.000	31,58	3,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	7	01	01	2	01	0006		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57	15.000.000			4	525.000	50,00	2	75.000	25,00	1	300.000	25,00	1	-	0,00	0,00	150.000	100	4	525.000	4	525.000	7,02	3,50	
	Meningkatnya pelaporan keuangan sesuai	**7**	**01**	**01**	**2**	**02**			**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai**	**100**	**6.265.050.000**			**100**	**1.341.458.128**	**25,00**		**305.403.888**	**25,00**		**465.304.106**	**25,00**		**320.899.916**	**25,00**		**346.635.154**	**100**		**1.438.243.064**	**100**	**1.438.243.064**	**100**	**22,96**	
		7	01	01	2	02	0001		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tertangani (bulan)	16	6.237.000.000			14	1.340.408.128	25,00	14	304.728.888	25,00	14	465.229.106	25,00	14	320.899.916	25,00	14	346.335.154	100	56	1.437.193.064	56	1.437.193.064	350,00	23,04	
		7	01	01	2	02	0003		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	15.550.000			12	525.000	25,00	3	300.000	25,00	3	75.000	25,00	3	-	25,00	3	150.000	100	12	525.000	12	525.000	33,33	3,38	
		7	0 1	0 1	2	0 2	0007		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	126	12.500.000			42	525.000	35,71	15	375.000	23,81	10	-	23,81	10,00	-	16,67	7	150.000	100	42	525.000	42	525.000	33,33	4,20	
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Kelengkapan	**7**	**01**	**01**	**2**	**05**			**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap**	**100**	**188.000.000**			**100**	**10.275.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**375.000**	**25,00**		**525.000**	**100**		**900.000**	**100**	**900.000**	**100**	**0,48**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian									**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan									**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**43,00**				**43,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
		7	0 1	0 1	2	0 5	0002		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	14	173.000.000			4	9.750.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7	01	01	2	05	0003		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	33	15.000.000			11	525.000	27,27	3	-	27,27	3		27,27	3	375.000	18,18	2	525.000	100	11	900.000	11	900.000	33,33	6,00	
	Terlaksananya Layanan Jasa Administrasi Umum Perangkat	**7**	**01**	**01**	**2**	**06**			**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**80**	**790.411.550**			**80**	**108.931.009**	**20,00**		**9.456.200**	**20,00**		**24.719.160**	**20,00**		**22.494.580**	**20,00**		**24.030.400**	**80,00**		**80.700.340**	**80,00**	**80.700.340**	**100**	**10,21**	
		7	0 1	0 1	2	0 6	0009		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani (bulan)	52	610.711.550			14	65.660.197	21,43	3	4.865.000	28,57	4	17.082.360	28,57	4	16.632.780	21,43	3	18.798.000	100	14	57.378.140	14	57.378.140	26,92	9,40	
		7	01	01	2	06	0001		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	91.200.000			12	21.635.406	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.636.800	25,00	3	5.861.800	25,00	3	5.232.400	100	12	23.322.200	12	23.322.200	33,33	25,57	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		7 01 01 2 06 0001	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	88.500.000			12	21.635.406	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3	-	100	12	-	12	-	33,33	0,00	
		7 01 01 2 07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**80,00**	**134.165.900**			**47,00**	**25.150.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		7 01 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	17	134.165.900			2	25.150.000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat	**7 01 01 2 08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah**	**100**	**1.807.617.900**			**100**	**479.318.461**	**25,00**		**92.324.200**	**25,00**		**153.829.880**	**25,00**		**122.490.675**	**25,00**		**98.386.100**	**100**		**467.030.855**	**100**	**467.030.855**	**100**	**25,84**	
		7 01 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	36	1.536.000.000			12	414.171.483	25,00	3	78.305.400	25,00	3	132.413.700	25,00	3	106.286.175	25,00	3	81.853.400	100	12	398.858.675	12	398.858.675	33,33	25,97	
		7 01 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	72.617.900			12	19.650.000	25,00	3	4.836.400	25,00	3	4.241.400	25,00	3	4.480.900	25,00	3	5.767.900	100	12	19.326.600	12	19.326.600	33,33	26,61	
		7 01 01 2 08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	36	199.000.000			12	45.496.978	25,00	3	9.182.400	25,00	3	17.174.780	25,00	3	11.723.600	25,00	3	10.764.800	100	12	48.845.580	12	48.845.580	33,33	24,55	
		7 01 01 2 09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**100**	**225.230.800**			**100**	**56.825.406**	**25,00**		**7.491.200**	**25,00**		**5.236.800**	**25,00**		**4.233.800**	**25,00**		**39.863.606**	**100**		**56.825.406**	**100**	**56.825.406**	**100**	**25,23**	
		7 01 01 2 09 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	16	193.500.000			12	50.945.406	25,00	3	7.491.200	25,00	3	5.236.800	25,00	3	4.233.800	25,00	3	33.983.606	100	12	50.945.406	12	50.945.406	75,00	26,33	
		7 01 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (paket)	101	31.730.800			1	5.880.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	100	1	5.880.000	100	1	5.880.000	1	5.880.000	0,99	18,53	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**24,03**		**20,50**	**21,12**		**32,12**	**20,08**		**23,26**	**22,27**		**25,20**	**100**		**101,07**			**47,39**	**12,94**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Publik**	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**86,00**	**36.300.000**			**86,00**	**1.950.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**900.000**	**0,00**		**-**	**86,00**		**900.000**	**86,00**		**1.800.000**	**86,00**	**1.800.000**	**100**	**4,96**	**KEC. RIAU SILIP**
	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan	**7 01 02 2 04**	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan**	**Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan**	**100**	**36.300.000**			**100**	**1.950.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**900.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**900.000**	**100**		**1.800.000**	**100**	**1.800.000**	**100**	**4,96**	
		7 01 02 2 02 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	36.300.000			12	1.950.000	25,00	3	-	25,00	3	900.000	25,00	3		25,00	3	900.000	100	12	1.800.000	12	1.800.000	33,33	4,96	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**0,00**	**25,00**		**46,15**	**0,00**		**0,00**	**25,00**		**46,15**	**100**		**92,31**			**0,00**	**4,96**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam**	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang**	**100**	**316.300.000**			**100**	**19.775.000**	**100**		**2.525.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**15.695.000**	**100**		**18.220.000**	**100**	**18.220.000**	**100**	**5,76**	**KEC. RIAU SILIP**
	Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan			**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**100**						**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kel/Kec	**7 01 03 2 01**	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrebang desa/kel/kecamatan**	**100**	**316.300.000**			**100**	**19.775.000**	**100**		**2.525.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**15.695.000**	**100**		**18.220.000**	**100**	**18.220.000**	**100**	**5,76**	
	Meningkatnya Pembinaan Lembaga			**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
		7 01 03 2 01 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	89	28.500.000			1	2.825.000	100	1	2.525.000	0,00	0		0,00	0	-	0,00	0	2.675.000	100	1	5.200.000	1	5.200.000	1,12	18,25	
		7 01 03 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	78	287.800.000			9	16.950.000	33,33	3	-	33,33	3	-	11,11	1	-	22,22	2	13.020.000	100	9	13.020.000	9	13.020.000	11,54	4,52	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**66,67**		**12,77**	**16,67**		**0,00**	**5,56**		**0,00**	**11,11**		**79,37**	**100**		**92,14**			**6,33**	**11,38**	
				Predikat Kinerja							**S**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**T**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
4	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga**	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga**	**100**	**31.000.000**			**75,00**	**1.500.000**	**18,75**		**-**	**18,75**		**-**	**18,75**		**-**	**18,75**		**-**	**75,00**		**-**	**75,00**	**-**	**75,00**	**24,71**	**KEC. RIAU SILIP**
	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan dengan Tomas/Toga/Top	**7 01 04 2 03**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum******)**	**Persentase Terlaksanaya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa**	**77,80**	**31.000.000**			**75,00**	**1.500.000**	**18,75**		**-**	**18,75**		**-**	**18,75**		**-**	**18,75**		**-**	**75,00**		**-**	**75,00**	**-**	**96,40**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		7 01 04 2 01 0002	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	72	31.000.000			2	1.500.000	0,00	0	-	0,00	0		0,00			100	2		100	2	-	2	-	2,78	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100**		**0,00**	**100**		**0,00**			**2,78**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**	**ST**		**SR**			**SR**	**SR**	
5	**Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa**	**100**	**128.344.650**			**100**	**6.000.000**	**22,22**		**-**	**33,33**		**900.000**	**22,22**		**-**	**22,22**		**1.050.000**	**100**		**4.710.000**	**100**	**4.710.000**	**100**	**3,67**	**KEC. RIAU SILIP**
	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Desa	**7 01 06 2 01**	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev**	**100**	**128.344.650**			**100**	**6.000.000**	**22,22**		**-**	**33,33**		**900.000**	**22,22**		**-**	**22,22**		**1.050.000**	**100**		**4.710.000**	**100**	**4.710.000**	**100**	**3,67**	
		7 01 06 2 01 0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	21	99.844.650			9	1.950.000	*22,22*	2	-	33,33	3	900.000	22,22	2		22,22	2	1.050.000	100	9	1.950.000	9	1.950.000	42,86	1,95	
		7 01 06 2 01 0006	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan	1	2.500.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7 01 06 2 01 0005	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	6	13.000.000			2	2.025.000	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0,00		100,00	2	825.000	100	2	825.000	2	825.000	33,33	6,35	
		7 01 06 2 01 0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinmasi Pendampingan Desa Di	3	13.000.000			9	2.025.000	22,22	2	-	33,33	3	-	33,33	3		11,11	1	1.935.000	100	9	1.935.000	9	1.935.000	300,00	14,88	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**14,81**		**0,00**	**22,22**		**46,15**	**18,52**		**0,00**	**44,44**		**53,85**	**100**		**100**			**94,05**	**8,42**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**R**	**ST**		**ST**			**ST**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN RIAU SILIP					**2.052.233.004**			**417.275.488**			**651.489.946**			**470.493.971**			**527.385.260**			**2.069.404.665**		**2.069.404.665**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Kecamatan Riau Silip(%)							**26,10**		**20,33**	**17,00**		**31,75**	**8,83**		**22,93**	**40,56**		**25,70**	**100**		**100,84**			**30,11**	**7,54**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Kecamatan Riau Silip							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
		7	**URUSAN KEWILAYAHAN**																											
		7 01	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN BELINYU**			**35.750.929.500**				**8.743.307.189**			**1.537.935.644**			**2.364.785.990**			**1.814.463.081**			**2.669.507.303**			**8.385.342.018**		**8.385.342.018**		**23,45**	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja																											
1	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan**	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah (30)**	**26,53**	**8.569.731.378**			**26,43**	**4.596.181.732**	**0,00**		**949.040.103**	**24,47**		**1.449.078.062**	**0,00**		**1.033.031.245**	**0,00**		**1.063.812.245**	**24,47**		**4.493.611.655**	**24,47**	**4.493.611.655**	**92,24**	**52,44**	**KEC. BELINYU**
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat	**11,55**				**11,50**		**0,00**			**12,02**			**0,00**			**0,00**			**12,02**			**12,02**		#####		
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat			**Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah**	**65,00**				**62,50**		**0,00**			**58,14**			**0,00**			**0,00**			**58,14**			**58,14**		**89,45**		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**3,20**				**3,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)**	**90,00**				**90,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	**7 01 01 2 01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)**	**100**	**49.571.360**			**100**	**17.568.000**	**33,33**		**2.000.000**	**33,33**		**3.375.000**	**33,33**		**1.720.000**	**0,00**		**10.025.000**	**100**		**17.120.000**	**100**	**17.120.000**	**100**	**34,54**	
			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	**Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)**	**100**				**100**		**66,67**			**0,00**			**33,33**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 01 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	18	27.309.680			6	8.970.000	33,33	2	1.000.000	33,33	2	800.000	33,33	2	1.320.000	0,00	0,00	5.580.000	100	6	8.700.000	6	8.700.000	33,33	31,86	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	7 01 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	22.261.680			3	8.598.000	66,67	2	1.000.000	0,00	0	2.575.000	33,33	1	400.000	0,00	0,00	4.445.000	100	3	8.420.000	3	8.420.000	25,00	37,82	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7 01 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar %)**	**100**	**6.628.840.144**			**100**	**3.842.401.928**	**21,43**		**823.272.168**	**28,57**		**1.218.418.724**	**28,57**		**857.881.026**	**21,43**		**872.137.736**	**100**		**3.771.709.654**	**100**	**3.771.709.654**	**100**	**56,90**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7 01 01 2 02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	12	6.502.974.944			12	3.827.591.928	25,00	3	822.252.168	25,00	3	1.214.063.724	25,00	3	855.191.026	25,00	3	865.507.736	100	12	3.757.014.654	12	3.757.014.654	100	57,77	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 01 01 2 02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	62.427.800			12	7.910.000	25,00	3	1.020.000	25,00	3	1.680.000	25,00	3	810.000	25,00	3	4.380.000	100	12	7.890.000	12	7.890.000	100	12,64	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan	7 01 01 2 02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	42	63.437.400			14	6.900.000	21,43	3	-	28,57	4	2.675.000	28,57	4	1.880.000	21,43	3	2.250.000	100	14	6.805.000	14	6.805.000	33,33	10,73	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan	**7 01 01 2 05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap (%)**	**100**	**167.771.620**			**100**	**7.775.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**400.000**	**25,00**		**950.000**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**	**0,00**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)**	**20,83**				**8,33**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut	7 01 01 2 05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Paket)	2	23.649.880			2	6.425.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 01 01 2 05 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	11	88.189.900			11	1.350.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	11	400.000	0,00	0,00	950.000	100	11		11	-	100,00		
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 01 01 2 05 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	55.931.840			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	-	0,00		
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat	**7 01 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**80,00**	**270.799.200**			**60,00**	**80.155.000**	**15,00**		**7.625.795**	**15,00**		**23.628.704**	**15,00**		**17.652.734**	**15,00**		**18.979.010**	**60,00**		**67.886.243**	**60,00**	**67.886.243**	**60,00**	**25,07**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	7 01 01 2 06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	184.443.800			12	62.355.000	25,00	3	3.975.000	25,00	3	19.552.796	25,00	3	13.520.000	25,00	3	14.425.000	100	12	51.472.796	12	51.472.796	33,33	27,91	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 01 01 2 06 0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	36	30.052.900			12	1.350.000	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3		25,00	3	-	100	12	-	12	-	33,33	0,00	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	7 01 01 2 06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	56.302.500			12	16.450.000	25,00	3	3.650.795	25,00	3	4.075.908	25,00	3	4.132.734	25,00	3	4.554.010	100	12	16.413.447	12	16.413.447	33,33	29,15	
		7 01 01 2 07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja**	**97,99**	**671.062.609**			**60,00**	**150.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 01 01 2 07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1	431.077.660			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Mebel	7 01 01 2 07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	26.495.438			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	7 01 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	17	111.075.687			17	150.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunannya	7 01 01 2 07 0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	102.413.824			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat	**7 01 01 2 08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**100**	**471.184.300**			**100**	**574.879.296**	**25,00**		**108.368.900**	**25,00**		**188.943.050**	**25,00**		**145.963.600**	**25,00**		**125.950.300**	**100**		**569.225.850**	**100**	**569.225.850**	**100**	**#####**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat	7 01 01 2 08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	36	295.441.200			12	438.840.394	25,00	3	82.641.600	25,00	3	148.655.100	25,00	3	110.512.400	25,00	3	92.218.200	100	12	434.027.300	12	434.027.300	33,33	146,91	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 01 01 2 08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	59.200.900			12	42.350.070	25,00	3	7.362.500	25,00	3	9.740.750	25,00	3	12.004.000	25,00	3	12.802.500	100	12	41.909.750	12	41.909.750	33,33	70,79	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 0 1 0 1 2 0 8 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36	116.542.200			12	93.688.832	25,00	3	18.364.800	25,00	3	30.547.200	25,00	3	23.447.200	25,00	3	20.929.600	100	12	93.288.800	12	93.288.800	33,33	80,05	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	**7 01 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)**	**100**	**310.502.145**			**100**	**73.252.508**	**25,00**		**7.773.240**	**25,00**		**14.712.584**	**25,00**		**9.413.885**	**25,00**		**35.770.199**	**100**		**67.669.908**	**100**	**67.669.908**	**100**	**21,79**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	7 0 1 0 1 2 0 9 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	9	102.824.873			9	59.002.508	33,33	3	7.773.240	33,33	3	14.712.584	33,33	3	9.413.885	0,00	0	24.100.199	100	9	55.999.908	9	55.999.908	100	54,46	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 0 1 0 1 2 0 9 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	37	24.068.864			37	14.250.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100,00	37,00	11.670.000	100	37	11.670.000	37	11.670.000	100	48,49	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	7 0 1 0 1 2 0 9 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2	183.608.408			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**22,17**		**20,65**	**18,45**		**31,53**	**26,79**		**22,48**	**20,09**		**23,15**	**100**		**97,77**			**49,48**	**33,33**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan**	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP (%)**	**100**	**4.365.373.262**			**100**	**2.686.924.657**	**25,00**		**545.596.059**	**25,00**		**718.143.401**	**25,00**		**616.119.468**	**25,00**		**745.322.087**	**100**		**2.625.181.015**	**100**	**2.625.181.015**	**100**	**60,14**	**KEC. BELINYU**
	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan	**7 01 02 2 01**	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	**Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu (%)**	**100**	**4.332.631.934**			**100**	**2.676.934.657**	**25,00**		**545.596.059**	**25,00**		**718.143.401**	**25,00**		**611.849.468**	**25,00**		**739.802.087**	**100**		**2.615.391.015**	**100**	**2.615.391.015**	**100**		
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Kelurahan Kuto Panji	Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Kuto Panji	36	621.402.220,00			12	451.537.740,00	25,00	3	92.283.575	25,00	3	120.667.370	25,00	3	104.564.896	25,00	3	127.139.496	100	12	444.655.337	12	444.655.337	33,33	71,56	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Kelurahan Bukit Ketok	Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Bukit Ketok	36	653.186.448,00			12	385.487.258,00	25,00	3	83.907.834	25,00	3	101.199.540	25,00	3	86.985.513	25,00	3	108.274.731	100	12	380.367.618	12	380.367.618	33,33	58,23	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Kelurahan Air Jukung	Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Air Jukung	36	613.653.640,00			12	405.620.164,00	25,00	3	78.533.787	25,00	3	106.464.303	25,00	3	93.260.050	25,00	3	112.044.450	100	12	390.302.590	12	390.302.590	33,33	63,60	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Kelurahan Air Asam	Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Air Asam	36	749.867.250,00			12	314.494.872,00	25,00	3	65.033.843	25,00	3	84.328.658	25,00	3	72.079.701	25,00	3	88.077.486	100	12	309.519.688	12	309.519.688	33,33	41,28	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Kelurahan Belinyu	Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Belinyu	36	560.391.770,00			12	420.025.456,00	25,00	3	83.908.920	25,00	3	111.524.840	25,00	3	95.077.400	25,00	3	119.732.840	100	12	410.244.000	12	410.244.000	33,33	73,21	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Kelurahan Remodong Indah	Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Remodong	36	571.518.026,00			12	337.206.664,00	25,00	3	66.676.555	25,00	3	91.294.456	25,00	3	79.428.808	25,00	3	89.996.668	100	12	327.396.487	12	327.396.487	33,33	57,29	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 01 02 2 01 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Kelurahan Mantung	Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Mantung	36	562.612.580,00			12	362.562.503,00	25,00	3	75.251.545	25,00	3	102.664.234	25,00	3	80.453.100	25,00	3	94.536.416	100	12	352.905.295	12	352.905.295	33,33	62,73	
	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan	**7 01 02 2 04**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu (%)**	**100**	**32.741.328**			**100**	**9.990.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**4.270.000**	**25,00**		**5.520.000**	**100**		**9.790.000**	**100**	**9.790.000**	**100**	**29,90**	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah	7 01 02 2 04 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (PATEN)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	36	32.741.328			12	9.990.000	25,00	3	-	25,00	3	-	25,00	3	4.270.000	25,00	3	5.520.000	100	12	9.790.000	12	9.790.000	33,33	29,90	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**20,38**	**25,00**		**26,83**	**25,00**		**23,02**	**25,00**		**27,84**	**100**		**98,07**			**33,33**	**60,14**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**R**	
3	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam**	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang**	**100**	**1.523.663.740**			**100**	**1.445.810.800**	**100**		**43.299.482**	**0,00**		**191.689.527**	**0,00**		**165.312.368**	**0,00**		**853.412.971**	**100**		**1.253.714.348**	**100**	**1.253.714.348**	**100**	**82,28**	**KEC. BELINYU**
	Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan			**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,0**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	**7 01 03 2 01**	**Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrebang Desa/Kecamatan (%)**	**100**	**117.606.140**			**100**	**22.937.500**	**100**		**6.605.000**	**0,00**		**3.720.000**	**0,00**		**4.635.000**	**0,00**		**600.000**	**100**		**15.560.000**	**100**	**15.560.000**	**100**	**13,23**	
	Meningkatnya Pembinaan Lembaga			**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	7 01 03 2 01 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	120	10.499.840			40	10.447.500	100	40	4.805.000	0,00	0,00	1.760.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	150.000	100	40	6.715.000	40	6.715.000	33,33	63,95	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	7 01 03 2 01 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	26	107.106.300			12	12.490.000	25,00	3	1.800.000	25,00	3	1.960.000	25,00	3	4.635.000	25,00	3	450.000	100	12	8.845.000	12	8.845.000	46,15	8,26	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	**7 01 03 2 02**	**Kegiatan Pembedayaan Kelurahan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrebang Kelurahan/Kecamatan**	**100**	**1.406.057.600**			**100**	**1.422.873.300**	**100**		**36.694.482**	**0,00**		**187.969.527**	**0,00**		**160.677.368**	**0,00**		**852.812.971**	**100**		**1.238.154.348**	**100**	**1.238.154.348**	**100**	**88,06**	
	Meningkatnya Bantuan Sapras di Kelurahan			**Persentase RT yang Mendapatkan Bantuan Sarpras (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	7 01 03 2 02 0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40	6.057.600			40	5.150.000	100	40	2.860.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	150.000,0	100	40	3.010.000	40	3.010.000	100	49,69	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana	7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuto Panji	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	200.000.000			1	202.531.900	0,00	0,00	4.750.000	0,00	0,00	29.220.000	100	1	19.650.000	0,00	0,00	120.712.121	100	1	174.332.121	1	174.332.121	50,00	87,17	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bukit	7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Ketok	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	200.000.000			1	202.531.900	0,00	0,00	3.070.002	0,00	0,00	28.252.539	100	1	30.618.954	0,00	0,00	119.109.131	100	1	181.050.626	1	181.050.626	50,00	90,53	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana	7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Jukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	200.000.000			1	202.531.900	0,00	0,00	4.100.000	0,00	0,00	25.600.000	0,00	0,00	17.340.158	100	1	121.169.494	100	1	168.209.652	1,00	168.209.652	50,00	84,10	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana	7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Asam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	200.000.000			1	202.531.900	0,00	0,00	6.612.597	0,00	0,00	28.000.189	100	1	21.900.015	0,00	0,00	122.034.495	100	1	178.547.296	1	178.547.296	50,00	89,27	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana	7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belinyu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	200.000.000			1	202.531.900	0,00	0,00	3.800.000	0,00	0,00	25.340.000	0,00	0,00	19.710.000	100	1	120.309.400	100	1	169.159.400	1,00	169.159.400	50,00	84,58	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Remodong Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	200.000.000			1	202.531.900	0,00	0,00	7.081.816	0,00	0,00	27.306.799	100	1	25.593.102	0,00	0,00	124.000.138	100	1	183.981.855	1	183.981.855	50,00	91,99	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana	7 01 03 2 02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mantung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	200.000.000			1	202.531.900	0,00	0,00	4.420.067	0,00	0,00	24.250.000	100	1	25.865.139	0,00	0,00	125.328.192	100	1	179.863.398	1	179.863.398	50,00	89,93	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**22,50**		**2,99**	**2,50**		**13,26**	**52,50**		**11,43**	**22,50**		**59,03**	**100**		**86,71**			**52,95**	**82,28**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**R**		**SR**	**SR**		**R**	**ST**		**T**			**R**	**T**	
4	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga**	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tomas/Toga /Topa yang berperan aktif dalam menjaga**	**100**	**21.201.600.000**			**80,00**	**5.300.000**	**20,00**		**-**	**20,00**		**500.000**	**20,00**		**-**	**0,00**		**4.800.000**	**60,00**		**5.300.000**	**60,00**	**5.300.000**	**60,00**	**0,02**	**KEC. BELINYU**
	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan dengan Tomas/Toga/Top	**7 01 04 2 03**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Terlaksanaya Koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa**	**94,00**	**21.201.600.000**			**80,00**	**5.300.000**	**20,00**		**-**	**20,00**		**500.000**	**20,00**		**-**	**20,00**		**4.800.000**	**80,00**		**5.300.000**	**80,00**	**5.300.000**	**85,11**	**0,02**	
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 01 04 2 03 02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	36	21.201.600.000			12	5.300.000	25,00	3	-	25,00	3	500.000	25,00	3	4.800.000	25,00	3	4.800.000	100	12	5.300.000	12	5.300.000	33,33	0,02	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**25,00**		**0,00**	**25,00**		**9,43**	**25,00**		**0,00**	**25,00**		**90,57**	**100**		**100**			**33,33**	**0,02**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**			**SR**	**SR**	
5	**Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Desa (%)**	**100**	**90.561.120**			**100**	**9.090.000**	**21,37**		**-**	**21,37**		**5.375.000**	**42,74**		**-**	**14,53**		**2.160.000**	**100**		**7.535.000**	**100**	**7.535.000**	**100**	**8,32**	**KEC. BELINYU**
	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Desa	**7 01 06 2 01**	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Monev (%)**	**100**	**90.561.120**			**100**	**9.090.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**5.375.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**2.160.000**	**100**		**7.535.000**	**100**	**7.535.000**	**100**	**8,32**	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	7 01 06 2 01 0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	117	70.369.120			117	7.340.000	21,37	25	-	21,37	25	3.850.000	42,74	50		14,53	17	2.160.000	100,00	117	6.010.000	117	6.010.000	100	8,54	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 01 06 2 01 0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3	10.096.000			1	1.600.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.525.000	0,00	0,00		100	1	-	100	1	1.525.000	1	1.525.000	33,33	15,10	
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di	7 01 06 2 01 0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3	10.096.000			1	150.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	1	-	100	1	-	1	-	33,33	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							7,12		0,00	7,12		52,45	14,25		0,00	71,51		29,43	100		81,88			55,56	8,32	
				Predikat Kinerja							SR		SR	SR		R	SR		SR	S		SR	ST		T			R	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BELINYU						**8.743.307.189**		**1.537.935.644**			**2.364.785.990**			**1.814.463.081**			**2.669.507.303**			**8.385.342.018**		**8.385.342.018**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Bidang Urusan Kewilayahan Kecamatan Belinyu (%)							**20,36**		**17,59**	**15,61**		**27,05**	**28,71**		**20,75**	**32,82**		**30,53**	**100**		**95,91**			**44,93**	**23,45**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Urusan Kewilayahan Kecamatan Belinyu							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM BIDANG URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN						**40.833.174.784**		**7.277.952.461**			**12.311.987.859**			**9.030.344.640**			**10.670.558.682**			**39.316.834.042**		**39.316.834.042**			
				Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Bidang Urusan Kewilayahan Kecamatan (%)							**27,31**		**17,82**	**21,32**		**30,15**	**22,45**		**22,12**	**24,49**		**26,13**	**99,17**		**96,29**			**33,72**	**12,85**	
				Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Urusan Kewilayahan Kecamatan							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
		8	**PEMERINTAHAN UMUM**																										
		8 01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**89.761.131.000**		-		**33.806.315.468**			**1.000.899.170**			**24.644.101.518**			**5.972.636.033**			**1.808.159.543**			**33.425.946.264**		**33.425.946.264**		**37,24**	
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Badan**	**8 01 01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Nilai kinerja Perencanaan Badan Kesbangpol**	**26,00**	**17.290.515.247**			**25,00**	**2.880.091.563**	**0,00**		**934.189.361**	**20,98**		**597.641.918**	**0,00**		**690.600.858**	**0,00**		**528.581.749**	**20,98**		**2.751.163.886**	**20,98**	**2.751.163.886**	**80,69**	**15,91**	**BADAN KESBANGPOL**
				Nilai Kinerja Pelaporan Badan	**12,00**				**12,00**		**0,00**			**10,18**			**0,00**			**0,00**			**10,18**			**10,18**		**84,83**		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan			**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)**	**0,00**				**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**100**		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat			**Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah**	**64,82**				**64,76**		**0,00**			**76,57**			**0,00**			**0,00**			**76,57**			**76,57**		#####		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat			**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**3,15**				**1,95**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat			**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**100,00**				**70,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai	**8 01 01 2 01**	**Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standarr (%)**	**100**	**146.797.838**			**100**	**41.955.800**	**50,00**		**11.330.000**	**37,50**		**-**	**12,50**		**14.370.000**	**0,00**		**15.990.000**	**100**		**41.690.000**	**100**	**41.690.000**	**100**	**28,40**	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	**100**	**74.077.800**			**100**		**33,33**			**33,33**			**33,33**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 01 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (dok)	24	146.797.838			8	30.425.000	50,00	4	3.570.000	37,50	3	-	12,50	1	11.680.000	0,00	0	15.170.000	100	8	30.420.000	8	30.420.000	33,33	20,72	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	8 01 01 2 01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	36	74.077.800			12	11.530.800	33,33	4	7.760.000	33,33	4	-	33,33	4	2.690.000	0,00	0	820.000	100	12	11.270.000	12	11.270.000	33,33	15,21	
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**8 01 01 2 02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)**	**100**	**11.203.377.919**			**100**	**2.057.530.235**	**23,81**		**634.760.009**	**26,19**		**482.101.452**	**26,19**		**523.794.971**	**23,81**		**321.455.418**	**100**		**1.962.111.850**	**100**	**1.962.111.850**	**100**	**17,51**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	8 01 01 2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang	23	10.963.402.919			18	2.031.897.485	25,00	18	624.632.509	25,00	18	482.101.452	25,00	18	513.694.971	25,00	18	316.105.418	100	18	1.936.534.350	18	1.936.534.350	78,26	17,66	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	8 01 01 2 02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dok)	36	115.850.000			12	13.600.500	25,00	3	6.145.000	25,00	3	-	25,00	3	4.190.000	25,00	3	3.260.000	100	12	13.595.000	12	13.595.000	33,33		
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	8 01 01 2 02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD (laporan)	126	124.125.000			42	12.032.250	23,81	10	3.982.500	26,19	11	-	28,57	12	5.910.000	21,43	9	2.090.000	100	42	11.982.500	42	11.982.500	33,33		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan	**8 01 01 2 05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkapi (%)**	**100**	**463.234.500**			**100**	**10.000.000**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**-**	**25,00**		**8.805.784**	**100**		**8.805.784**	**100**	**8.805.784**	**100**	**1,90**	
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)**	**100**				**100**		**25,00**			**25,00**			**25,00**			**25,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)**	**43,48**				**100**		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 01 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	3	148.784.500			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 01 01 2 05 03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dok)	33	66.200.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 01 01 2 05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	248.250.000			2	10.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	2	8.805.784	100	2	8.805.784	2	8.805.784	6,67		
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat	**8 01 01 2 06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)**	**100**	**854.776.050**			**100**	**165.093.948**	**25,00**		**71.831.280**	**25,00**		**13.092.400**	**25,00**		**21.844.800**	**25,00**		**55.665.355**	**100**		**162.433.835**	**100**	**162.433.835**	**100**	**19,00**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	8 01 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	662.000.000			12	117.949.532	25,00	3	56.630.480	25,00	3	3.910.000	25,00	3	7.580.000	25,00	3	47.441.755	100	12	115.562.235	12	115.562.235	33,33	17,46	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 01 01 2 06 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	36	96.388.025			12	23.572.208	25,00	3	7.600.400	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.132.400	25,00	3	4.111.800	100	12	23.435.800	12	23.435.800	33,33	24,31	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	8 01 01 2 06 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	96.388.025			12	23.572.208	25,00	3	7.600.400	25,00	3	4.591.200	25,00	3	7.132.400	25,00	3	4.111.800	100	12	23.435.800	12	23.435.800	33,33	24,31	
	Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat	**8 01 01 2 08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah**	**100**	**1.406.750.000**			**100**	**431.032.322**	**25,00**		**124.464.172**	**25,00**		**89.406.866**	**25,00**		**117.571.187**	**25,00**		**84.747.892**	**100**		**416.190.117**	**100**	**416.190.117**	**100**	**29,59**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 01 01 2 08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	993.000.000			12	328.677.614	25,00	3	100.045.200	25,00	3	65.195.050	25,00	3	92.891.200	25,00	3	60.349.230	100	12	318.480.680	12	318.480.680	33,33	32,07	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8 01 01 2 08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Lap)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	148.950.000			12	50.014.853	25,00	3	9.118.172	25,00	3	10.900.166	25,00	3	10.415.187	25,00	3	15.475.062	100	12	45.908.587	12	45.908.587	33,33	30,82	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 01 01 2 08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (lap)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	264.800.000			12	52.339.855	25,00	3	15.300.800	25,00	3	13.311.650	25,00	3	14.264.800	25,00	3	8.923.600	100	12	51.800.850	12	51.800.850	33,33	19,56	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana	**8 01 01 2 07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)**	**65,96**	**1.762.575.000**			**40,00**	**85.023.050**	**100**		**76.616.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**200.000**	**100**		**76.966.000**	**100**	**76.966.000**	**#####**	**4,37**	
	Tersedianya Mebel	8 01 01 2 07 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	331.000.000			1	49.488.660	100	1	48.416.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	150.000	100	1	48.566.000	1	48.566.000	33,33	14,67	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	8 01 01 2 07 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	33	413.750.000			4	35.534.390	100	4	28.200.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	200.000	100	4	28.400.000	4	28.400.000	12,12	6,86	
	Tersedianya Kendaraan Dinas	8 01 01 2 07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (Unit)	3	1.017.825.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	**8 01 01 2 09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)**	**142,07**	**1.378.926.140**			**65,00**	**89.456.208**	**16,25**		**15.187.900**	**16,25**		**13.041.200**	**16,25**		**13.019.900**	**16,25**		**41.717.300**	**65,00**		**82.966.300**	**65,00**	**82.966.300**	**45,75**	**6,02**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	8 01 01 2 09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	7	303.176.140			7	82.086.208	28,57	2	15.187.900	28,57	2	13.041.200	28,57	2	13.019.900	14,29	1	36.021.300	100	7	77.270.300	7	77.270.300	100,00	25,49	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 01 01 2 09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	20	82.750.000			20	7.370.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100	20	5.696.000	100	20	5.696.000	20	5.696.000	100,00	6,88	
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 01 01 2 09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	993.000.000			0		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**33,48**		**32,44**	**20,35**		**20,75**	**18,94**		**23,98**	**27,23**		**18,35**	**100**		**95,52**			**33,19**	**15,91**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter**	**8 01 02**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100**	**4.859.487.500**			**100**	**1.021.900.000**	**0,00**		**32.088.969**	**0,00**		**7.270.000**	**0,00**		**220.595.495**	**0,00**		**715.106.865**	**0,00**		**975.061.329**	**0,00**	**975.061.329**	**0,00**	**20,07**	**BADAN KESBANGPOL**
	Meningkatnya Peran Serta Generasi Muda dalam Memahami Idiologi Pancasila dan Karakter	**8 01 02 2 01**	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)**	**100**	**4.859.487.500**			**100**	**1.021.900.000**	**0,00**		**32.088.969**	**0,00**		**7.270.000**	**100**		**220.595.495**	**0,00**		**715.106.865**	**100**		**975.061.329**	**100**	**975.061.329**	**100**	**20,07**	
	Meningkatnya Koordinasi terhadap Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila			**Persentase Koordinasi Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilakukan (%)**	**100**				**100**	**-**	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Meningkatnya Pembinaan terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter			**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ideologi Pancasila dan**	**100**				**100**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**		
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	8 01 02 2 01 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	180	3.998.312.500			60	1.021.900.000	0,00	0,00	32.088.969	0,00	0,00	7.270.000	100	60	220.595.495	0,00	0,00	715.106.865	100	60	975.061.329	60	975.061.329	33,33	24,39	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	8 01 02 2 01 0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Ghineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	540	553.612.500			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	8 01 02 2 01 0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	123.025.000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan	8 01 02 2 01 0005	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peingkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya penghayatan dan Pengamalan Pancsila dalam semua aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (Dokumen)	3	184.537.500			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**3,14**	**0,00**		**0,71**	**100**		**21,59**	**0,00**		**69,98**	**100**		**95,42**			**8,33**	**0,00**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**SR**	**SR**		**S**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat**	**8 01 03**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan**	**Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol (%)**	**100**	**62.182.650.128**			**100**	**29.631.082.984**	**0,00**		**26.250.840**	**0,00**		**24.030.499.600**	**100**		**5.047.534.324**	**0,00**		**349.896.232**	**100**		**29.454.180.996**	**100**	**29.454.180.996**	**100**	**47,37**	**BADAN KESBANGPOL**
				Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan	**100**	**-**			**100**		**0,00**			**0,00**			**100**			**0,00**			**100**			**100**		**100**		
	Meningkatnya Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	**8 01 03 2 01**	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,**	**Persentase Verifikasi Bantuan hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik (%)**	**100**	**62.182.650.128**			**100**	**29.631.082.984**	**0,00**		**26.250.840**	**0,00**		**24.030.499.600**	**100**		**5.047.534.324**	**0,00**		**349.896.232**	**100**		**29.454.180.996**	**100**	**29.454.180.996**	**100**	**47,37**	
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pemula			**Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang siswanya mendapatkan Pendidikan politik (	**100**	**-**			**100**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**100**		**-**	**0,00**		**-**	**100**		**-**	**100**	**-**	**100**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah,	8 0 1 0 3 2 0 1 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	208.704	61.767.150.128			206805	29.504.664.386	0,00	0,00	1.230.000	100	####	24.019.019.600	0,00	0,00	5.041.384.316	0,00	0,00	315.612.840	100	####	29.377.246.756	206805	29.377.246.756	99,09	47,56	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	8 0 1 0 3 2 0 1 0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah(laporan)	3	415.500.000			1	126.418.598	0,00	0,00	25.020.840	0,00	0,00	11.480.000	100	1	6.150.008	0,00	0,00	34.283.392	100	1	76.934.240	1	76.934.240	33,33	18,52	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,09**	**50,00**		**81,10**	**50,00**		**17,03**	**0,00**		**1,18**	**100**		**99,40**			**66,21**	**47,37**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**T**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**ST**			**S**	**SR**	
4	**Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun**	**8 0 1 0 4**	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas yang aktif (%)**	**100,00**	**369.075.000**			**70,00**	**20.000.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**17.584.894**	**0,00**		**17.584.894**	**0,00**	**17.584.894**	**0,00**	**4,76**	**BADAN KESBANGPOL**
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	**8 0 1 0 4 2 0 1**	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi**	**Persentase Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)**	**70,00**	**369.075.000**			**70,00**	**20.000.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**17.584.894**	**0,00**		**17.584.894**	**0,00**	**17.584.894**	**0,00**	**4,76**	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	8 0 1 0 4 2 0 1 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (orang)	216	184.537.500			40,00	20.000.000	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		100	40	17.584.894	100	40	17.584.894	40	17.584.894	18,52	9,53	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	8 0 1 0 4 2 0 1 0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya(laporan)	3	184.537.500			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**87,92**	**100**		**87,92**			**9,26**	**4,76**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**T**	**ST**		**T**			**SR**	**SR**	
5	**Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial**	**8 0 1 0 5**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)**	**100**	**3.536.968.750**			**100**	**155.460.420**	**0,00**		**3.280.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**150.460.000**	**0,00**		**153.740.000**	**0,00**	**153.740.000**	**0,00**	**4,35**	**BADAN KESBANGPOL**
	Meningkatnya Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**8 0 1 0 5 2 0 1**	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan**	**Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan**	**100**	**3.536.968.750**			**100**	**155.460.420**	**0,00**		**3.280.000**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**150.460.000**	**0,00**		**153.740.000**	**0,00**	**153.740.000**	**0,00**	**4,35**	
	Meningkatnya Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan**	**100**	**-**			**100**		**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
	Tersusunnya Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	8 0 1 0 5 2 0 1 0003	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosail, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosail, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (fDok)	33	430.587.500			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		5 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	8 01 05 2 01 0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (orang)	4002	2.798.818.750			1334	155.460.420	0,00	0,00	3.280.000	0,00	0,00	-	89,96	1200	-	10,04	134	150.460.000	100	1334	153.740.000	1334	153.740.000	33,33	5,49	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	8 01 05 2 01 0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9	307.562.500			0		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**2,11**	**0,00**		**0,00**	**89,96**		**0,00**	**10,04**		**96,78**	**100**		**98,89**			**11,11**	**4,35**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**T**		**SR**	**SR**		**ST**	**ST**		**ST**			**SR**	**SR**	
6	**Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial**	**8 01 06**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)**	**100**	**1.522.434.375**			**100**	**97.780.501**	**0,00**		**5.090.000**	**0,00**		**8.690.000**	**0,00**		**13.905.356**	**0,00**		**46.529.803**	**0,00**		**74.215.159**	**0,00**	**74.215.159**	**0,00**	**4,87**	**BADAN KESBANGPOL**
	Meningkatnya Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**8 01 06 2 01**	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan (%)**	**100**	**1.522.434.375**			**100**	**97.780.501**	**0,00**		**5.090.000**	**0,00**		**8.690.000**	**0,00**		**13.905.356**	**0,00**		**46.529.803**	**0,00**		**74.215.159**	**0,00**	**74.215.159**	**0,00**	**4,87**	
	Meningkatnya Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			**Persentase cakupan desa/kelurahan yang dilakukan Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**	**37,04**	**-**			**100**	**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**		
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	8 01 06 2 01 01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,(Orang)	300	461.343.750			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	8 01 06 2 01 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	150	230.671.875			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	8 01 06 2 01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (laporan)	9	461.343.750			3	33.040.000	0,00	0,00	820.000	66,67	2	2.800.000	33,33	1	11.038.500	0,00	0,00	12.889.000	100	3	27.547.500	3	27.547.500	33,33	5,97	
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	8 01 06 2 01 0006	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3	369.075.000			1	64.740.501	0,00	0,00	4.270.000	0,00	0,00	5.890.000	100	1	2.866.856	0,00	0,00	33.640.803	100	1	46.667.659	1	46.667.659	33,33	12,64	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**		**5,21**	**33,33**		**8,89**	**66,67**		**14,22**	**0,00**		**47,59**	**100**		**75,90**			**16,67**	**4,87**	
				Predikat Kinerja							**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**S**		**SR**	**SR**		**SR**	**ST**		**T**			**SR**	**SR**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									33.806.315.468			1.000.899.170			24.644.101.518			5.972.636.033			1.808.159.543			33.425.946.264		33.425.946.264			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (%)									5,58		2,96			17,28		72,90	54,26		17,67	6,21		5,35	100		98,87			24,13	37,24	
Predikat Kinerja Seluruh Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									SR		SR			SR		S	R		SR	SR		SR	ST		ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH URUSAN KABUPATEN BANGKA									1.309.023.615.502			148.803.622.795			335.299.338.007			302.347.772.670			471.194.996.127			1.259.765.119.032		1.259.765.119.032			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Urusan Kabupaten Bangka (%)									15,71		11,37			25,72		25,61	25,14		23,10	28,95		36,00	99,59		96,24			45,66	63,83	
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Kabuapten Bangka									SR		SR			SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		ST			SR	R	

2.2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Per Urusan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 295 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD dalam rangka untuk melihat adanya ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap tahapan pelaksanaan sehingga dapat dilakukan perbaikan/penyempurnaan dan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Daerah. Disamping itu, ketentuan ini juga secara langsung mengatur mengenai capaian kinerja dan penyerapan anggaran. Secara detail predikat capaian kinerja program dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.88
Skala Nilai Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
2	76% ≤ 90%	Tinggi	T
3	66% ≤ 75%	Sedang	S
4	51% ≤ 65%	Rendah	R
5	≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Pelaksanaan program pada RPJMD tahun 2019-2023 bermuara pada pencapaian sasaran daerah yang dapat ditunjukkan melalui capaian indikator (tolok ukur) kinerja yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dan prediksi target akhir RPJMD Tahun 2019-2023 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.89
Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dan Prediksi Target Akhir RPJMD Tahun 2019-2023

NO	URUSAN	RKPD TAHUN 2023		RKPD TAHUN 2023 TERHADAP TARGET RPJMD S/D TAHUN 2023		KETERANGAN
		CAPAIAN	KATEGORI	CAPAIAN	KATEGORI	
1.	Bidang Pendidikan	97,56	ST	154,14	ST	Tercapai
2.	Bidang Kesehatan	97,49	ST	96,26	ST	Tidak Tercapai
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94,39	ST	115,75	ST	Tercapai
4.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	95,42	ST	75,62	T	Tidak Tercapai
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	99,75	ST	88,53	T	Tidak Tercapai
6	Bidang Sosial	100	ST	116,11	ST	Tercapai
7.	Bidang Tenaga Kerja	100	ST	105,28	ST	Tercapai
8.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	ST	135,59	ST	Tercapai
9.	Bidang Pangan	89,26	T	74,10	S	Tidak Tercapai
10.	Bidang Pertanahan	75,39	T	177,04	ST	Tercapai
11.	Bidang Lingkungan Hidup	99,75	ST	69,04	S	Tidak Tercapai
12.	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98,01	ST	69,42	S	Tidak Tercapai
13.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98,61	ST	111,60	ST	Tercapai
14.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97,48	ST	388,15	ST	Tercapai
15.	Bidang Perhubungan	100	ST	81,65	T	Tidak Tercapai
16.	Bidang Komunikasi dan Informatika	100	ST	91,57	ST	Tidak Tercapai
17.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	ST	441,90	ST	Tercapai
18.	Bidang Penanaman Modal	99,27	ST	148,35	ST	Tercapai

NO	URUSAN	RKPD TAHUN 2023		RKPD TAHUN 2023 TERHADAP TARGET RPJMD S/D TAHUN 2023		KETERANGAN
		CAPAIAN	KATEGORI	CAPAIAN	KATEGORI	
19.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	100	ST	149,15	ST	Tercapai
20.	Bidang Statistik	100	ST	293,33	ST	Tercapai
21.	Bidang Persandian	100	ST	123,53	ST	Tercapai
22.	Bidang Kebudayaan	100	ST	51,84	R	Tidak Tercapai
23.	Bidang Perpustakaan	97,03	ST	62,59	R	Tidak Tercapai
24.	Bidang Kearsipan	99,91	ST	112,42	ST	Tercapai
25.	Bidang Kelautan dan Perikanan	100	ST	76,40	T	Tidak Tercapai
26.	Bidang Pariwisata	98,86	ST	69,78	S	Tidak Tercapai
27.	Bidang Pertanian	99,72	ST	82,24	T	Tidak Tercapai
28.	Bidang Perdagangan	100	ST	70,64	S	Tidak Tercapai
29.	Bidang Industri	100	ST	14,17	SR	Tidak Tercapai
30.	Sekretariat Daerah	100	ST	80,69	T	Tidak Tercapai
31.	Sekretariat DPRD	99,01	ST	60,63	R	Tidak Tercapai
32.	Urusan Perencanaan	95,83	ST	90,34	ST	Tidak Tercapai
33.	Urusan Keuangan	98,88	ST	129,37	ST	Tercapai
34.	Kepegawaian	100	ST	63,66	R	Tidak Tercapai
35.	Urusan Pendidikan dan Pelatihan	100	T	87,41	T	Tidak Tercapai
36.	Urusan Penelitian dan Pengembangan	75	S	71,43	S	Tidak Tercapai
37.	Unsur Pengawas Unsur Pemerintahan	92,20	ST	86,94	T	Tidak Tercapai
38.	Unsur Kewilayahan	100	ST	79,05	T	Tidak Tercapai
39.	Unsur Pemerintahan Umum	91,67	ST	44,10	SR	Tidak Tercapai
Capaian Kabupaten Bangka		**95,61**	**ST**	**111,14**	**ST**	

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2024

Dari hasil evaluasi capaian kinerja Kabupaten Bangka Tahun 2023 terhadap 39 urusan, indikator yang tercapai sebanyak 15.

2.2.2 Evaluasi Capaian *Sustainable Development Go*als (SDG's)

Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara dari Majelis Umum PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang akan dicapai pada tahun 2030 ke depan. Program yang diluncurkan meliputi program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama (Sustainable Development Goals (SDGs), menggantikan program sebelumnya Millennium Development Goals (MDGs) yang akan selesai pada akhir tahun 2015.

Gambar 2.9
Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Agenda ini mendorong keterlibatan seluruh organisasi dunia untuk terlibat mengatasi entitas permasalahan pembangunan di berbagai negara di dunia. RKPD Kabupaten Bangka tahun 2025 sudah menjadikan SDG's sebagai salah satu referensi pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2025. Secara detail, sinkronisasi SDG's dan indikator pembangunan Bangka tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.90
Bidang dan Tujuan Utama
***Sustainable Development Goals* (SDG's), Capaian**
Kinerja Daerah Tahun 2024 dan Target RAD SDG's Tahun 2024

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Target RAD SDG'S Tahun 2024	Capaian SDG's Tahun 2024*	Kategori
1	Kemiskinan	Mengurangi kemiskinan dalam berbagai bentuk dan aspek	Angka Kemiskinan (%)	4,82	4,32	T
			Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,30	0,67	BT

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Target RAD SDG'S Tahun 2024	Capaian SDG's Tahun 2024*	Kategori
			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,05	0,15	BT
2	Makanan	Mengurangi kelaparan melalaui peningkatan ketahanan pangan, perbaikan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan	Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama per 1.000 Penduduk (Kg/1000 Penduduk)	111.580	111.580	T
			Cakupan Bina Wilayah Peningkatan Ketahanan Pangan (%)	8 kecamatan	8 Kecamatan	T
			Ketersediaan Energi Per Kapita Kapita (Kkal)	2.688	2.626	BT
			Ketersediaan Protein Per Kapita (gram)	77,31	83,72	T
3	Kesehatan	Mengkampanyekan pola hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,44	73,24	T
			Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	4.22	9,54	BT
			Angka Kematian Ibu Melahirkan per 1.000 Kelahiran Hidup	56,71	97,31	BT
			Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0	0,02	T
4	Pendidikan	Memastikan kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,04	8,45	BT
			Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,95	13,12	T
5	Perempuan	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	89,13	62,61	BT
			Indeks Pembangunan Gender	88,91	89,42	T
6	Air	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan sumber daya air dan sanitasi untuk semua	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih (%)	100	92,04	BT
			Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	100	100	T
7	Energi	Memastikan akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua	Rasio Elektrifikasi	100	100	T

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Target RAD SDG'S Tahun 2024	Capaian SDG's Tahun 2024*	Kategori
8	Ekonomi	Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan ekonomi berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua	Pertumbuhan Ekonomi (%)	10,12	-0,44	BT
			Peningkatan PDRB per Kapita (%)	4,97	2,41	BT
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,12	4,91	T
9	Infrastruktur	Membangun infrastruktur, mempromosikan pembangunan inklusif dan industrialisasi yang berkelanjutan dan mendorong inovasi	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	80,24	63,94	BT
			Rasio Jaringan Irigasi (%)	100	89,03	BT
			Persentase Panjang Jembatan Baik di Kabupaten	97,15	2,06	BT
10	Ketimpangan	Mengurangi ketidaksetaraan dalam dan diantara negara-negara	Indeks Gini	0,264	0,211	BT
			Indeks Williamson	0,177	0,219	BT
			Kriteria Bank Dunia	-	0,187	
11	Hunian	Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Rasio Rumah Layak Huni per Satuan Penduduk			
			▪ Rasio Pemukiman Layak Huni	100	99,8794	BT
			▪ Rasio Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0065	0,12	BT
12	Konsumsi	Memastikan pola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,60	91,5*	T
			Persentase Pengeluaran Konsumsi RT untuk Makanan (%)	45,11	56,40*	T
			Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Makanan (%)	54,89	43,60*	BT
13	Iklim	Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	32,4	30,75	BT
			Ketaatan terhadap RTRW	100	100	T
			Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air (%)	75	86	T

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Target RAD SDG'S Tahun 2024	Capaian SDG's Tahun 2024*	Kategori
			Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Sumber yang tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara (%)	50	86	T
14	Ekosistem Laut	Menghemat dan menggunakan sumber daya samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Praktik *Illegal Fishing* dan Perusakan Sumber Daya Kelautan	Kewenangan provinsi	Kewenangan provinsi	Kewenangan provinsi
15	Ekosistem	Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan berhenti dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati	Rasio Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	95	93,00*	BT
			Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100	100*	T
			Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis di Kabupaten Bangka (%)	8,43	0	BT
16	Lembaga	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Hasil Evaluasi AKIP	A	BB	BT
			Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP	WTP	T
			Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	85,40	98,35	T
			Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	15,4	54,64	T
			Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	34.79	20,00	BT
			Peningkatan Keterampilan Perempuan dalam Pembangunan	100	100	T
			Perlindungan dan Pembinaan KDRT	100	100	T
17	Keberlanjutan	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Kuantitas Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Swasta serta Perguruan Tinggi	100	99*	BT

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2024

Keterangan :
T = Tercapai
BT = Belum Tercapai

Dari evaluasi capaian SDG's diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dari 17 goal terdapat 46 indikator daerah. Indikator dengan kategori tercapai sebesar 47,83% terdiri dari 22 indikator dan kategori yang belum tercapai sebesar 52,17% terdiri dari 24 indikator .
2. Dari 52,17% yang belum tercapai, dikelompokkan menjadi :
   a. Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator :
      - Hasil Evaluasi AKIP
   b. Kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator :
      - Indeks Kedalaman Kemiskinan
      - Indeks Keparahan Kemiskinan
      - Angka Kematian Ibu Melahirkan per 1.000 Kelahiran Hidup
      - Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
      - Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
      - Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
      - Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
   c. Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur dengan indikator :
      - Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih (%)
      - Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)
      - Rasio Jaringan Irigasi (%)
      - Persentase Panjang Jembatan Baik di Kabupaten
      - Rasio Rumah Layak Huni per Satuan Penduduk
   d. Transformasi Ekonomi dengan indikator :
      - Ketersediaan Energi Per Kapita Kapita (Kkal)
      - Pertumbuhan Ekonomi (%)
      - Peningkatan PDRB per Kapita (%)
      - Indeks Gini
      - Indeks Williamson
      - Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Makanan (%)
      - Kuantitas Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Swasta serta Perguruan Tinggi
   e. Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator :
      - Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

- Rasio Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan
- Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis di Kabupaten Bangka

2.2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada tahun 2024 Kabupaten Bangka melaksanakan 6 (enam) urusan pelayanan dasar yang terdiri dari urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan permukiman, urusan keamanan dan ketertiban umum dan urusan sosial.

Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Bangka tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pendidikan

SPM Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan kesetaraan. Target dan capaian SPM Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.91
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan
Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Kategori
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	79,33%	Tuntas Madya

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Kategori
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs/SLB)	100%	97,19%	Tuntas Utama
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	84,19%	Tuntas Madya

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Bangka, 2024

B. Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan Kesehatan balita, Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan Kesehatan pada usia produktif, Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(human immunodeficiency virus)*. Target dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan
Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Kategori
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	86,41%	Tuntas Madya
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	89,80%	Tuntas Madya
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	90,10%	Tuntas Utama
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94,36%	Tuntas Utama
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	99,90%	Tuntas Utama

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Kategori
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	91,44%	Tuntas Utama
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	92,41%	Tuntas Utama
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	Tuntas Paripurna
9.	Pelayanan Kesehatan penderita DM	Jumlah warga negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	Tuntas Paripurna
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	Tuntas Paripurna
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	Tuntas Paripurna
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (Human Innunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bangka Tahun 2024, Pemkab Bangka, 2025

C. Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Target dan realisasi capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Kategori
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	Tuntas Paripurna

2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bangka Tahun 2024, Pemkab Bangka, 2025

Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar Urusan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi : penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. Target dan realisasi pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	**Kategori**
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	Tuntas Paripurna
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bangka Tahun 2024, Pemkab Bangka, 2025

D. Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum

Jenis pelayanan dasar Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi : pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhaap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Target dan realisasi pencapaian SPM

Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Kategori
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Masyarakat yang terkena dampak akibat penegakan hukum perda dan perkada	100%	100%	Tuntas Paripurna
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	Tuntas Paripurna
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	Tuntas Paripurna
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	100%	100%	Tuntas Paripurna
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	Tuntas Paripurna

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bangka Tahun 2024, Pemkab Bangka, 2025

E. Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi :

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

Target dan pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.96
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial
Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Kategori
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	99,69%	Tuntas Utama
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	Tuntas Paripurna
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	Tuntas Paripurna
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	90%	Tuntas Madya
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	Tuntas Paripurna

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bangka Tahun 2024, Pemkab Bangka, 2025

Adapun status capaian SPM terhadap prediksi akhir RPJMD Tahun 2019-2023 dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97
Status Capaian SPM terhadap Prediksi Akhir RPJMD Tahun 2019-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RPJMD TAHUN 2023	CAPAIAN SPM TAHUN 2023	KATEGORI
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	T
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs/SLB)	100%	99%	BT
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan Pendidikan Dasar dan	100%	41%	BT

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RPJMD TAHUN 2023	CAPAIAN SPM TAHUN 2023	KATEGORI
		Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87,26%	BT
5.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	92,55%	BT
6	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,49%	BT
7.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98,16%	BT
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	103,52%	T
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	76,08%	BT
10.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	85,63%	BT
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	61,99%	BT
12.	Pelayanan kesehatan penderita *Diabetes melitus*	Jumlah warga negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98,19%	BT
13.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	T
14.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,14%	T
15.	Pelayanan kesehatan orang	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi	100%	100,05%	BT

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RPJMD TAHUN 2023	CAPAIAN SPM TAHUN 2023	KATEGORI
	dengan risiko terinfeksi HIV	virus yang melemahkan daya tubuh manusia (Human Innunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan			
16.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari- hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	88%	BT
17.	Penyediaan layanan pengolahan air limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	95%	BT
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	T
19.	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	T
20.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	T
21.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	87,89%	BT
22.	Pelayanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	T
23.	Pelayanan Penyelamatan	Jumlah warga negara yang memperoleh	100%	100%	T

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RPJMD TAHUN 2023	CAPAIAN SPM TAHUN 2023	KATEGORI
	dan evakuasi korban bencana	layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana			
24.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	T
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	T
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	T
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di Luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	77%	BT
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	T
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	44%	BT

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2024 (Data diolah)

Keterangan :
T = Tercapai
BT = Belum Tercapai

Dari evaluasi capaian SPM diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dari 29 jenis pelayanan dasar dengan kategori tercapai sebesar 44,83% terdiri dari 13 indikator dan kategori yang belum tercapai sebesar 55,17% terdiri dari 16 indikator jenis pelayanan dasar.
2. Dari 55,17% yang belum tercapai, indikatornya adalah sebagai berikut :

- Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs/SLB)
- Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
- Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan
- Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan
- Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
- Jumlah balita yang mendapatkan layanan Kesehatan
- Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan
- Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan
- Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan
- Jumlah warga negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan
- Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (Human Innunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan Kesehatan
- Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
- Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
- Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

2.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (*gap*) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan. Sementara isu adalah permasalahan-permasalahan yang dinilai penting dan patut dipertimbangkan.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan

urusan pemerintah daerah yang dihadapai saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada Tahun 2025 serta solusi dari permasalahan tersebut.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja per urusan, capaian SDG's dan capaian SPM Tahun 2023, permasalahan pembangunan tahun 2025 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.98
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan dari Hasil Capaian Kinerja Per Urusan, Capaian SDG's dan Capaian SPM

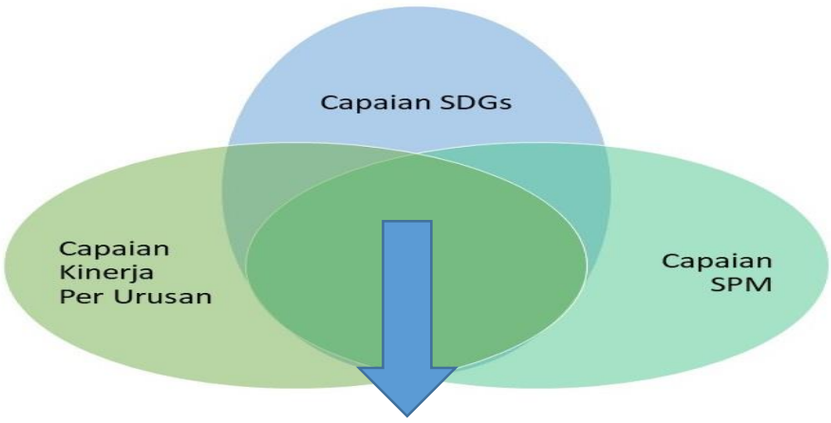

URUSAN PEMERINTAHAN	CAPAIAN TAHUN 2024 BERBANDING TARGET RPD 2026	RUMUSAN MASALAH
Pemerintahan Umum	Belum Tercapai (44,10)	Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Pengawas	Belum Tercapai (86,94)	
Kepegawaian	Belum Tercapai (63,66)	
Perencanaan	Belum Tercapai (90,34)	Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel
Keuangan	Belum Tercapai (80,00)	
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum Tercapai (69,42)	Kualitas Pelayanan Publik
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Belum Tercapai (88,53)	
Kearsipan	Belum Tercapai (62,86)	
Pendidikan	Belum Tercapai (76,85)	Kualitas Pendidikan
Perpustakaan	Belum Tercapai (62,59)	
Pendidikan dan Pelatihan	Belum Tercapai (87,41)	
Kepemudaan dan Olah Raga	Belum Tercapai (52,94)	
Penelitian dan Pengembangan	Belum Tercapai (71,43)	
Kesehatan	Belum Tercapai (96,26)	Kualitas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum Tercapai (98,87)	Laju Pertumbuhan Penduduk
Sosial	Belum Tercapai (55,42)	Standar Hidup Layak
Tenaga Kerja	Belum Tercapai (50,96)	
Pangan	Belum Tercapai (74,10)	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum Tercapai (70,34)	
Pekerjaan Umum	Tercapai (100)	Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tercapai (100)	
Perhubungan	Tercapai (100)	
Pariwisata	Belum Tercapai (69,78)	Jumlah Uang Yang Dibelanjakan Masyarakat
Kebudayaan	Belum Tercapai (51,84)	
Kelautan dan Perikanan	Belum Tercapai (76,40)	Produksi Barang Jasa Sektor Unggulan
Pertanian	Belum Tercapai (82,24)	
Perdagangan	Belum Tercapai (70,64)	
Industri	Belum Tercapai (14,17)	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Belum Tercapai (65,25)	Pemerataan Pendapatan
Penanaman Modal	Belum Tercapai (89,77)	
Pertanahan	Tercapai (100)	

URUSAN PEMERINTAHAN	CAPAIAN TAHUN 2024 BERBANDING TARGET RPD 2026	RUMUSAN MASALAH
Kewilayahan	Belum Tercapai (79,05)	
Lingkungan Hidup	Tercapai (100)	Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel di atas, permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

   Akuntabilitas kinerja menjadi suatu hal yang penting dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terus menerus dilakukan, namun ada beberapa permasalahan diantaranya adalah:

   - Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.
   - Belum optimalnya capaian evaluasi reformasi birokrasi, karena ada beberapa area perubahan yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.
   - Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.
   - Belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran berdampak pada kurang optimalnya pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan.
   - Belum sempurnanya seluruh unsur-unsur kunci dalam perencanaan (tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama) pada seluruh Perangkat daerah serta keberlanjutan impelementasi manajemen kinerja.
   - Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
   - Belum optimalnya cakupan akses teknologi, informasi dan komunikasi .
   - Belum optimalnya integrasi sistem informasi .
   - Belum terpetakannya secara keseluruhan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan.
   - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk layanan administrasi kepegawaian.
   - Belum optimalnya program pengembangan kompetensi sebagai salah satu infrastruktur pendukung manajemen talenta ASN.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

   Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa hal yang menjadi permasalahan diantaranya :

   - Belum optimalnya manajemen pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.
   - Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD sehingga pembiayaan pembangunan daerah masih sangat bergantung dengan dana dari pemerintah pusat.

3. Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat

   Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif, sarana pelayanan publik yang inklusif, open government melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan diantaranya :

   - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.
   - Belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik.
   - Belum optimalnya peran teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan indek SPBE masih dalam kategori cukup.

4. Kualitas Pendidikan Masyarakat

   Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian, pembangunan pendidikan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

   - Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang berkisar 8,45 tahun atau setara kelas VIII akibat masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan antar jenjang pendidikan.
   - Terjadi kenaikan Angka Putus Sekolah (APUS) SD/ MI dan Angka Putus Sekolah (APUS) SMP/ MTs serta cakupan PAUD yang masih sangat rendah.
   - Akar masalah yang mempengaruhi capaian kemampuan literasi SD/MI dan SMP/MTs adalah masih kurangnya Indeks Distribusi Guru yaitu Tahun 2024 sebesar 0,6 untuk jenjang SD dan 0,28 untuk jenjang SMP/MTs dalam kategori masih kurang, serta masih kurangnya Kecukupan Formasi Guru ASN untuk Sekolah sebesar 38,97% untuk jenjang SMP/Mts.

- Akar masalah yang memengaruhi capaian Kemampuan Numerasi SD/MI dan SMP/MTs tahun 2024 meliputi Indeks Distribusi Guru sebesar 0,6 untuk jenjang SD/MI dalam kategori masih kurang dan 0,28 untuk jenjang SMP/MTs.
- Rendahnya Iklim inklusivitas SD/MI (57,29) dan SMP/MTs (58,07).
- Masih rendahnya angka harapan lama sekolah yang berkisar 13,12 masih dibawah angka nasional.
- Kualitas dan kapasitas tenaga pengajar masih perlu ditingkatkan.
- Ketersediaan tenaga pengajar antar wilayah belum merata.
- Akses menuju sarana pendidikan jauh.
- Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan yang sesuai SPM.

5. Kualitas Kesehatan Masyarakat

   Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain :

   - Masih rendahnya angka harapan hidup yaitu 73,24 masih di bawah angka nasional.
   - Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil.
   - Belum maksimalnya sosialisasi terkait konsumsi gizi ibu hamil, dan pencegahan kehamilan di usia dini.
   - Masih tingginya kasus penyakit tidak menular yang menjadi faktor penyerta pada komplikasi kehamilan.
   - Masih belum meratanya kemampuan layanan fasilitas kesehatan, khususnya di tingkat primer dalam menangani kedaruratan kehamilan.
   - Belum optimalnya pelaksanaan Deteksi Dini terhadap Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.
   - Kondisi lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan lingkungan sehingga meningkatkan angka penyakit menular.

6. Laju Pertumbuhan Penduduk

   Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, akan tetapi juga dapat menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini akan terjadi apabila

pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, serta kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan. Dalam pelaksanaannya, dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain :

- Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah
- Pelaksanaan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi belum efektif
- Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak
- Pengembangan Data base kependudukan yang belum optimal

7. Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

   Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Dalam peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda terdapat beberapa permasalahan antara lain :

   - Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan gender
   - Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
   - Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender
   - Angka rata-rata perkawinan usia anak yang masih di atas angka rata-rata nasional
   - Belum optimalnya penanganan terhadap anak korban bencana/konflik
   - Belum optimalnya pembentukan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak

8. Standar Hidup Layak Masyarakat

   Untuk meningkatkan standar hidup layak masyarakat ditemukan berbagai permasalahan antara lain :

   - Pendidikan angkatan kerja yang relatif rendah
   - *Soft sklill* angkatan kerja yang kurang
   - Sebaran tenaga kerja yang tidak merata
   - Pendataan yang belum maksimal baik untuk program jaminan sosial, rumah tangga miskin dan rentan, dan penerima bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan Nasional.

- Masyarakat miskin belum sepenuhnya tercover layanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan
- Perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang masalah sosial belum optimal.

Bertambahnya jumlah penduduk akan menghasilkan angkatan kerja yang lebih banyak yang jika dipekerjakan dengan baik tentunya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini tentunya hanya dapat dicapai jika angkatan kerja terserap sepenuhnya ke dalam kesempatan kerja dimana kesempatan kerja menggambarkan tersedianya kesempatan kerja di masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi masalah tenaga kerja, namun demikian dalam upaya pemenuhanya masih ditemukan permasalahan yang harus dihadapi, yaitu :

- Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja Indonesia.
- Besarnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja berarti tidak semua angkatan kerja terserap ke dalam pekerjaan (pengangguran).

9. Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur

a. Jalan dan Jembatan

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan serta untuk meningkatkan arus distribusi barang, jasa, dan orang utamanya dalam mendukung perekonomian. Dalam pelaksanaanya yang masih perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- Kondisi jalan dan jembatan yang semakin menurun karena menurunnya kemampuan daerah untuk melakukan pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan pembangunan jembatan, padahal masih terdapat jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar
- Terdapat ruas jalan non status yang mempunyai fungsi strategis dan perlu penanganan

b. Sumber Daya Air

Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian. Sehingga dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Belum adanya pengujian kualitas Sungai dan penggunaan air Sungai sebagai sumber air baku.
- Belum adanya identifikasi cadangan air baku yang *sustainable* dan memiliki kapasitas yang cukup untuk melayani rumah tangga.
- Kondisi sumber air baku eksisting yang tidak terpelihara dan tercemar aktivitas pertambangan
- Masih adanya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sedang dan rusak ringan.
- Kebutuhan terhadap infrastruktur penampung air, seperti embung, kolam retensi dan waduk buatan sebagai sumber air minum dan irigasi
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melindungi sumber – sumber air bersih.

c. Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi yaitu:

- Keterbatasan kuantitas dan kualitas air minum di wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai standar SDG's sehingga pelayananan air minum perkotaan dan perdesaan belum optimal serta keterbatasan sumber daya pengelolaan air minum
- Akses air minum aman sesuai dengan Permenkes 2 Tahun 2023 masih rendah
- Akses penyediaan air bersih, khususnya jaringan perpipaan masih terfokus ke wilayah perkotaan, sedangkan wilayah perdesaan Sebagian besar masih mengandalkan air tanah dan sumber – sumber air permukaan lainnya.
- Akses pelayanan sanitasi air limbah domestik masih harus dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perlunya peningkatan kapasitas pengelola instalasi pengolahan limbah domestik komunal.
- Belum maksimalnya ketersediaan sistem air limbah setempat maupun sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
- Masih rendahnya keberfungsian infrastruktur air minum dan air limbah terbangun
- Belum maksimalnya pengelolaan air limbah domestik (lumpur tinja) sehingga akses sanitasi aman masih sangat rendah
- Belum maksimalnya pengelolaan persampahan, ditandai dengan tidak berfungsinya infrastruktur TPS3R terbangun

- Kurangnya keterlibatan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan persampahan, seperti pemilahan sampah rumah tangga di rumah tangga, pengelolaan sampah di TPS-TPS, dan kontribusi iuran persampahan

e. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- Masih tingginya angka Backlog/kebutuhan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- Beragamnya besaran alokasi bantuan stimulan penanganan RTLH dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota maupun CSR berpotensi ketidaksamaan ketuntasan penanganan RTLH sebagai bagian dari penanganan kemiskinan; keterbatasan APBD untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni
- Penanganan kawasan kumuh

f. Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- Diperlukannya integrasi antar moda transportasi dalam mendukung pengembangan pelayanan angkutan umum untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah
- Belum optimalnya kondisi sebagian sarana dan prasarana lalu lintas yang ada
- Belum maksimalnya penyediaan lampu penerangan jalan umum
- Belum optimalnya pendapatan daerah dari prasarana perhubungan yang terbangun dan menjadi kewenangan kabupaten.

10. Jumlah Uang yang Dibelanjakan Masyarakat

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembanganya terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian, yaitu:

- Belum optimalnya penataan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW)

- Sarana promosi dan informasi pariwisata yang belum sesuai dengan tren teknologi informasi dan komunikasi
- Masih terbatasnya kualitas pelayanan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masih terbatasnya infrastruktur fisik maupun teknologi informasi komunikasi (TIK) yang dibutuhkan pelaku ekonomi kreatif
- Masih kurangnya kemitraan dan kerja sama lintas sektor, publik dan privat.
- Belum optimalnya kemitraan dan keterpaduan antara sektor pariwisata dengan sektor pendukung lainnya
- Minimnya pembinaan bagi pelaku pariwisata (pokdarwis, pengelola usaha pariwisata, seniman, kelompok seni budaya, pemandu wisata, aparatur terkait).

11. Produksi Barang dan Jasa di Sektor Ekonomi Unggulan Daerah

    Kondisi kapasitas dan daya saing perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan, yang didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.

    a. Perindustrian

       Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu:

       - Perkembangan industri di Kabupaten Bangka masih didominasi oleh industri pengolahan timah sebagai pengungkit perekonomian. Industri ini sangat rentan terhadap pengaruh kebijakan harga dan permintaan luar negeri. Efeknya sangat berpengaruh pada lapangan usaha jasa lainnya.
       - Industri pertanian dan pariwisata sebagai alternatif pengungkit ekonomi daerah belum berkembang optimal seperti yang diharapkan
       - Kendala pengembangan industri lokal yaitu ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor dari luar daerah dan luar negeri

b. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

- Masih rendahnya produktivitas beberapa komoditas pada sektor pertanian terutama tanaman pangan, perkebunan dan peternakan
- Keterbatasan akses petani sebagai kelompok masyarakat masyarakat miskin terhadap akses sumber daya pertanian
- Kenaikan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida yang berimbas pada kenaikan biaya produksi sehingga pendapatan petani cenderung stagnan atau turun
- Masih lemahnya kelembagaan usaha tani;
- Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan;
- Masih terbatasnya akses petani ke permodalan dan teknologi;

c. Perikanan

Pembangunan sektor perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dengan menjaga produksi perikanan, mengoptimalkan usaha pengolahan ikan, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi sektor perikanan yaitu:

- Belum optimalnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya perikanan, teknologi pengolahan perikanan, dukungan rantai tata niaga/pemasaran komoditi ikan.
- Sarana prasarana perikanan tangkap masih belum memadai
- Ketersediaan Stok Sumber Daya Ikan yang semakin menurun akibat terganggunya ekosistem laut oleh aktivitas penambangan di wilayah laut oleh masyarakat dan perusahaan
- Masih adanya *illegal fishing* (penggunaan alat tangkap terlarang, bahan peledak) akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat
- Masih rendahnya produksi perikanan budidaya
- Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan tidak seimbang dengan tingkat kerusakan yang terjadi
- Biaya produksi untuk perikanan budidaya cukup tinggi

12. Pemerataan Pendapatan

Indikator penting terkait pemerataan pendapatan adalah kesenjangan wilayah dimana akses antar daerah dalam rangka peningkatan konektivitas dan kemudahan distribusi barang dan jasa antar daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah. Selain itu persebaran pusat-pusat pertumbuhan yang belum merata juga menjadi persoalan penting yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah.

Penanaman modal diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan penanaman modal antara lain :

- Kurang optimalnya akses masyarakat terhadap pemenuhan atas legalitas usaha sebagai akibat dampak pandemi dan penyesuaian regulasi.
- Masih adanya disparitas penyebaran pelaksanaan penanaman modal di wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka.
- Kurang intensifnya upaya untuk melakukan strategi promosi investasi karena keterbatasan anggaran dan SDM.
- Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi
- Kurangnya kesiapan infrastruktur pendukung, ketersediaan dan kompetensi tenaga kerja

Pemberdayaan dan peningkatan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan serta memperkuat struktur perekonomian nasional dan daerah, menggerakkan aktivitas ekonomi sektor riil, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi UMKM masih ditemukan permasalahan antara lain :

- Kelembagaan Usaha, masih banyak koperasi yang belum mengimplementasikan prinsip dan jatidiri perkoperasian serta menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sedangkan dari sisi UMKM, masih banyak UMKM yang bersifat informal dan belum memiliki badan usaha atau ijin berusaha;
- Produksi dan pemasaran koperasi dan UMKM masih menghadapi kendala keterbatasan sarana prasarana produksi, sistem manajemen produksi yang

kurang efisien, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses produksi dan pemasaran produk, dan kurang tanggap atas tren pasar yang ada

- Sumber daya manusia, baik bagi koperasi dan UMKM adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus/pengelola sehingga belum dapat menerapkan manajemen usaha modern dalam pengelolaan usahanya.

13. Kualitas Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaanya, ditemukan permasalahan meliputi:

- Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan;
- Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah
- Infrastruktur pembuangan akhir sampah yang sudah melebihi kapasitas sehingga perlu usaha daur ulang sampah yang lebih intensif hingga pembangunan infrastruktur pembuangan atau pengolah sampah yang minim residu
- Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti PDU, truk sampah, kontainer, TPS
- Masih minimnya jumlah dan pengelolaan bank sampah dan TPS3R
- Penanganan Kerusakan DAS, lahan kritis dan penurunan kualitas sumberdaya air
- Penambangan yang belum menerapkan *Good Mining Practice*
- Belum optimalnya integrasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- Belum ada *early warning system* terkait kebencanaan dan rendahnya kesadaran masyarakat yang masih mendiami daerah rawan bencana
- Masih rendahnya kualitas/skills dan kuantitas SDM bidang kebencanaan
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana, terlihat dari masih adanya aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan bencana seperti *illegal loging, illegal mining,* membuang sampah sembarangan, dan sebagainya

2.3.2. Isu Strategis

Identifikasi isu strategis merupakan inti dari proses perencanaan strategis. Isu strategis berperan penting dalam pengambilan keputusan politis. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai

isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu tersebut ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Dalam menentukan isu strategis pembangunan daerah, terdapat beberapa komponen yang diperhatikan untuk mendapatkan inti permasalahan yang harus menjadi prioritas pembangunan didaerah. Untuk melihat keterkaitan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99
Konsistensi Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis

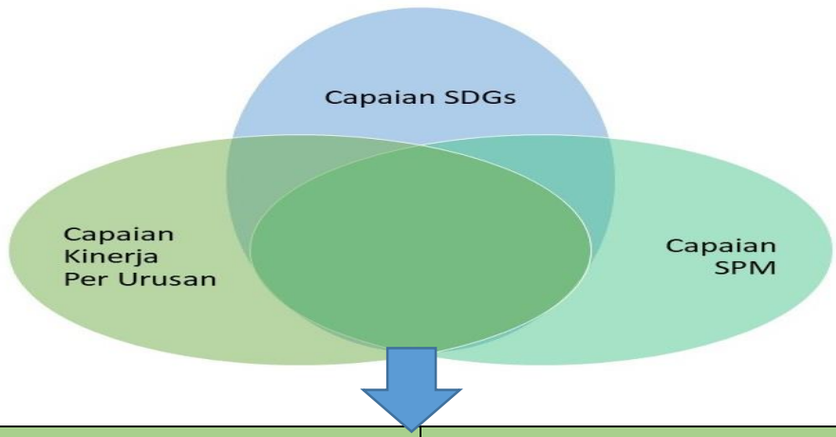

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS
• Akuntabilitas Kinerja Birokrasi • Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel • Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik
• Kualitas Pendidikan Masyarakat • Kualitas Kesehatan Masyarakat • Laju Pertumbuhan Penduduk • Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda • Standar Hidup Layak Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemiskinan Ekstrem
• Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Penguatan Akses dan Pemerataan Infrastruktur
• Jumlah Uang yang Dibelanjakan Masyarakat • Produksi Barang dan Jasa di sektor ekonomi unggulan daerah • Pemerataan Pendapatan	Transformasi Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Unggulan Daerah

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS
• Kualitas lingkungan hidup	Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang Berdampak Bencana

Berdasarkan informasi dalam permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi isu strategis di Kabupaten Bangka sebagai berikut :

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan bagian dari area reformasi birokrasi. Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 telah mengamanatkan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi instansi pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Bangka yang hasilnya ditunjukkan dalam bentuk Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu : mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka pada tahun 2024 sebesar 80,74 dengan kategori “A-” mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 70,78. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka sudah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, antara lain :

a. Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan revisi atau pencabutan beberapa peraturan yang dinilai tidak harmonis
b. Menyusun peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja RPD dan pengembangan *e-gov* telah dilakukan, namun masih fokus pada kebutuhan tata kelola internal; dan
c. Melakukan evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis yang telah disusun guna memastikan keselarasan struktur organisasi dengan peta proses bisnis yang juga telah ditindaklanjuti dengan rencana restrukturisasi di beberapa OPD.

Walaupun Indeks Reformasi Birokrasi sudah mendapat kategori “A-”, akan tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan dalam implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Bangka antara lain :

a. Telah melakukan penunjukan agen perubahan, namun agen perubahan yang ditunjuk belum mampu memberikan kontribusi dalam perubahan budaya kerja di masing-masing unit kerjanya.
b. Penataan sistem manajemen SDM belum berjalan secara maksimal, seperti: belum dilakukannya *assessment* terhadap seluruh pegawai, belum adanya sistem perencanaan pengembangan kapasitas SDM yang terpadu dan belum adanya penetapan kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi;
c. Hasil pengukuran kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian *reward & punishment,* pengembangan karir serta kompetensi pegawai;
d. Telah menetapkan unit kerja Zona Integritas pada unit kerja strategis dan memberikan pelayanan secara langsung ke masyarakat, namun upaya-upaya pembangunan ZI pada unit kerja tersebut dinilai belum optimal.
e. Belum meratanya peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap OPD, peningkatan hanya terlihat dari pemanfaatan aplikasi dan penerapan kebijakan yang bersifat umum, belum terlihat adanya inovasi-inovasi dari masing-masing OPD dalam memecahkan permasalahan terkait birokrasi maupun upaya dalam peningkatan kepuasan pengguna layanan.
f. Hasil pengukuran Indeks Integritas Jabatan sebesar 2,73 dari skala 4 dan Indeks Integritas Organisasi sebesar 3,20 dari skala 0-4 menunjukkan masih ada *gap* sehingga masih ada ruang perbaikan yang diperlukan dalam penerapan sistem integritas.
g. Hasil survey persepsi pelayanan menunjukkan Indeks 3,33 dalam skala 4. Hal ini menunjukkan masih ada *gap* atau selisih antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.
h. Hasil survey pesepsi korupsi dengan Indeks 3,31 dalam skala 4 menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

Selain RB, untuk penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik diperlukan teknologi yang memadai karena setiap aktivitas masyarakat sedapat mungkin dilakukan menggunakan teknologi agar mempercepat dan mempermudah dalam mendapatkan pelayanan. Tata kelola pelayanan publik sebagai salah satu entitas output kegiatan pemerintahan sudah selayaknya menjadi yang terdepan dalam melakukan inovasi agar jangkauan pelayanan maupun kualitas pelayanan menjadi semakin lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan berbasis teknologi informasi diharapkan akan muncul kemudahan, efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarkat luas.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator yang digunakan secara universal untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan komposit dari indikator pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indikator pendidikan direpresentasikan oleh harapan lama sekolah dan rataan lama pendidikan. Indikator kesehatan direpresentasikan oleh tingkat harapan hidup saat lahir. Indikator perekonomian direpresentasi-kan oleh *purchasing power parity* atau paritas daya beli masyarakat.

IPM Kabupaten Bangka mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan.

Selama periode 2019-2024, IPM Kabupaten Bangka terus mengalami peningkatan dari 71,80 di tahun 2019 hingga 74,34 di tahun 2023 dan di tahun 2024 menjadi 74,66. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan IPM setiap tahunnya. Angka pertumbuhan IPM Kabupaten Bangka belum optimal, hanya meningkat 0,32 persen di tahun 2024 akan tetapi terus terjadi peningkatan IPM dalam kurun waktu lima tahun terakhir hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka sudah dijalankan dalam koridor yang benar.

Pertumbuhan angka IPM dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka tahun 2023 sebesar 73,03 masih di bawah angka Nasional sebesar 73,93, dan di tahun 2024 sebesar 13,12. demikian juga dengan angka rata-rata lama sekolah dan usia harapan sekolah. Pengeluaran per kapita sendiri naik 0,44 persen di tahun 2023 dan di tahun 2024 sebesar 8,45. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan agar kualitas sumber daya manusia meningkat yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Pendidikan direpresentasikan oleh harapan lama sekolah dan rataan lama pendidikan. Jika dilihat dari angka pencapaian indikator, belum tercapainya angka standar sesuai dengan program nasional untuk pendidikan dasar. Hal ini disebabkan kurangnya kualitas dan kemampuan tenaga pendidik, penyebaran tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi tidak merata, kurangnya fasilitas dan alat peraga pendidikan, lingkungan sosial dan ekonomi anak didik yang tidak mendukung sehingga banyak anak yang putus sekolah, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan dapat meghambat penerimaan pelayanan.

Sedangkan untuk indikator keberhasilan layanan kesehatan direpresentasikan oleh tingkat harapan hidup saat lahir. Pembangunan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dan pembangunan ekonomi. Generasi sehat dan sejahtera adalah generasi yang diharapkan akan membawa bangsa Indonesia menjadi negara maju. Kesehatan menjadi podasi penting dalam pembangunan, dengan rumusan bahwa (1) pencapaian standar tertinggi kesehatan merupakan hak asasi setiap individu, tanpa membedakan suku, agama, kepentingan politik, maupun kondisi ekonomi dan sosial; (2) ketimpangan dalam promosi kesehatan dan penanggulangan penyakit, akan berkoleraasi negatif dengan kemajuan pembangunan; (3) kesehatan aset sekaligus sumber daya untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. (4) indikator kesehatan berhubungan eran dengan kinerja perekonomian dan kesejahteraan.

Perhatian nasional dan daerah terhadap kesehatan sudah sangat tinggi akan tetapi pelaksanaan yang belum maksimal dikarenahan beberapa faktor belum maksimal dalam pencapaian target, misalnya sumber daya manusia di bidang kesehatan masih kurang dan belum tersebar secara merata, dan kurangnya partisipasi/kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

Untuk Indikator perekonomian masyarakat direpresentasikan oleh *purchasing power parity* atau paritas daya beli masyarakat. Pengeluaran per kapita menjadi indikator penting dalam menghitung angka kemiskinan penduduk. Untuk menekan angka kemiskinan salah satunya dengan integrasi penyaluran bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah. Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bangka, masih terkendala pada pendataan yang belum maksimal, baik untuk program jaminan sosial, rumah tangga miskin dan rentan, dan penerima bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan Nasional. Pendataan yang akurat menjamin penduduk miskin, rumah tangga miskin dan rentan dapat diintervensi dengan tepat pengeluaran per kapita tidak mengalami penurunan, sehingga angka kemiskinan tidak mengalami kenaikan.

Selain itu, pelayanan sosial pada hakekatnya diperlukan oleh semua orang. Kita semua pada suatu masa tertentu dalam kehidupan, pasti memerlukan pelayanan sosial baik atas nama pribadi atau bagi anggota keluarga lainnya. Pelayanan sosial sangat diperlukan pada saat krisis menerpa masyarakat yang mengalami berbagai gangguan seperti gangguan kesehatan mental, kelahiran bayi dengan kecacatan, perceraian keluarga atau kematian seseorang yang menjadi “tulang punggung” keluarga. Masyarakat akan menjadi sangat tergantung dengan pelayanan sosial yang diberikan oleh Pemerintah. Oleh

karena itu sangat diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk menjamin kompetensi yang dimiliki dalam melakukan pelayanan publik dan perlindungan sosial yang berkeadilan.

3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Ekonomi melambat sebagai situasi yang kurang menguntungkan dalam perekonomian, dan jelas berdampak pada sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak nyata yang disebabkan oleh ekonomi melambat diantaranya peningkatan jumlah pengangguran, pengangguran bisa menyebabkan ekonomi melambat, namun pada saat yang sama juga bisa terjadi karena ekonomi yang melambat.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebesar 4,91 dengan jumlah pengangguran sebesar 8.683 jiwa angka pengangguran ini sebagai akibat perlambatan ekonomi yang begitu kuat pengaruhnya pada sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dengan kata lain strandar hidup layak yang semakin memburuk.

Standar kehidupan masyarakat sulit naik, tingginya angka pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi bahwa masyarakat suatu negara hidup dengan layak. Meskipun kesenjangan sosial masih sangat kentara, namun jika standar kehidupan masyarakat semakin naik artinya jarak antara pendapatan absolut dalam masyarakat semakin memudar.

Sebaliknya, jika ekonomi melambat maka pendapatan masyarakat menjadi stagnan, bahkan semakin menurun. Saat pendapatan mereka menurun, maka standar kehidupan mereka pun ikut menurun. Hal ini menyebabkan daya beli masyarkat rendah dan berakibat pada bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebesar 4,24% (Per Maret 2024) dengan angka kemiskinan ekstrem sebesar 1,13%, untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Bangka bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial.

4. Penguatan Akses dan Pemerataan Infrastruktur

Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi Kabupaten Bangka ke depan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada

pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan harus terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan.

Perlu upaya percepatan pemenuhan pelayanan insfrastruktur wilayah dengan meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur pengembangan pusat-pusat produksi wilayah, meningkatkan pelayanan perumahan-permukiman, meningkatkan pelayanan irigasi, meningkatkan prasarana dan sarana gedung kantor, mewujudkan identitas perkotaan, meningkatkan pelayanan angkutan dan sapras perhubungan, pengembangan kegeologian dan energi, meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi wilayah, serta meningkatkan pelayanan pertanahan.

Pembangunan infrastruktur memiliki peran diantaranya sebagai katalisator antara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai *social overhead capital* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah ternyata belum dapat memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur (yang meliputi transportasi, energi, ketenagalistrikan, pos dan telematika, sumberdaya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan/sanitasi) belum maksimal. Hal ini terutama karena keterbatasan APBD Kabupaten Bangka. Sementara keterlibatan swasta sangat minim dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur yang bersifat komersial.

Pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastuktur karena ketersediaan infrastruktur memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian (investasi, pariwisata, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, dll), serta kualitas SDM (kesehatan, pendidikan, perumahan, pemukiman, sanitasi, dll), yang akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, harus diperhatikan juga pemerataan penyediaan infrastruktur antar wilayah Kecamatan agar terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kecamatan.

5. Transformasi Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Unggulan Daerah

Perekonomian daerah diindikasikan dari Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka dalam kurun waktu tahun 2019-2024. Trend pertumbuhan ekonomi terlihat cenderung mengalami perlambatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,51%, kemudian mengalami perlambatan yang sangat siginifikan hingga menyentuh -0.73% saja pada tahun 2020.

Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka kembali menguat menjadi 7,48% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 4,87%, pada tahun 2023 menurun menjadi 4,44% dan pada tahun 2024 menjadi 0,44%.

Pembangunan industri pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru belum maksimal padahal sektor ini memiliki peran meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan masyarakat wisata pada umumnya dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Secara umum nilai tambah (*value added*) dari bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan masih harus dioptimalkan.

Selanjutnya, struktur dan kinerja industri dan pertanian masih lemah karena hampir seluruh komoditas pertanian berorientasi ekspor sehingga rentan terhadap kondisi perekonomian global. Berbagai langkah dilakukan untuk melakukan transformasi ekonomi sudah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pembangunan sektor strategis namun masih belum memadai dan perlu dipercepat untuk menggerakkan sektor riil, mengejar ketertinggalan, dan menghadapi persaingan yang meningkat.

Minat investasi meskipun meningkat belum sebesar yang diharapkan. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang besar dalam menyerap lapangan kerja belum diimbangi oleh kualitas UMKM yang memadai.

Ada beberapa Sektor Unggulan Daerah antara lain :

a. Sektor Pariwisata

Sektor Pariwisata adalah sektor ekonomi potensial dan bersifat *sustainable* di Kabupaten Bangka sehingga diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi masa depan. Hal ini ditunjukkan dari perkembangan dalam 5 (lima) tahun terakhir di mana jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan trend peningkatan dengan rata-rata 86.966 orang per tahun, yang diikuti dengan peningkatan *spending of money tourism.*

Pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pembangunan pariwisata salah satunya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Sungailiat. Pengembangan ini dimungkinkan karena sesuai peruntukan tata ruang wilayah Kabupaten Bangka (RTRW) bahwa daerah sepanjang pantai timur Kabupaten Bangka diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata. Melalui penetapan KEK Pariwisata diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan pariwisata dan perekonomian Kabupaten Bangka. Kemungkinan hal ini sangat besar bisa terwujud karena KEK menawarkan sejumlah kemudahan bagi

investor dalam berinvestasi mulai dari insentif fiskal, jaminan investasi, kepastian hukum, pelayanan satu pintu, hingga pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi beberapa hal juga masih menjadi kendala dan penghambat dalam pembangunan pariwisata antara lain :

- Penyediaan infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata unggulan terkendala dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah
- Kemitraan antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha pariwisata belum optimal

b. Sektor Industri

Penurunan aktivitas masyarakat dan dunia usaha adalah imbas dari Pandemi Covid19, sehingga tentu mengganggu rantai pasok dan utilitas industri. Oleh karena itu, strategi pemulihan ekonomi harus berfokus kepada pemilihan industri yang memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja dan memiliki *multiflier effect* terkait dengan transpormasi ekonomi. Perekonomian Kabupaten Bangka juga tidak bisa dilepaskan dari industri pengolahan, pariwisata, pertanian, perkebunan, perdagangan besar dan eceran dan lain-lain yang adalah merupakan sektor-sektor unggulan daerah. Fokus pembangunan industri dilaksanakan berbasiskan sektor industri yang menggunakan bahan baku pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Karenanya fokus industrialisasi harus beriringan dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan seluruh sub sektornya untuk menjamin ketersediaan input industri. Berikut merupakan grafik kontribusi 5 sektor unggulan ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Bangka.

Sektor industri pengolahan berperan penting dalam upaya mengenjot nilai investasi dan ekspor sehingga menjadi sektor andalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Bangka mulai kurun waktu 2016 investor mulai tertarik untuk berinvestasi di bidang perdagangan dan industri. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) namun tidak diiringi dengan kenaikan investasi pada Penamaman Modal Dalam Negeri (PMDN), oleh karena itu perlu upaya lebih bagi Pemerintah Kabupaten Bangka untuk meningkatkan nilai investasi.

c. Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian memiliki beberapa peranan yaitu mensejahterakan petani, menyediakan kebutuhan pangan, sebagai wahana pemerataan pembangunan, sebagai pasar input bagi pengembangan agroindustri, menghasilkan devisa, menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan

nasional, dan mempertahankan kelestarian sumber daya. Selain itu secara statistik dapat dilihat besarnya kontribusi sektor pertanian dalam membentuk PDRB Kabupaten Bangka dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi yang kuat di era pandemi covid 19 dengan tetap tumbuh positif sebesar 6,26%. Akan tetapi laju pertumbuhan yang positif tersebut belum mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) di Kabupaten Bangka cenderung bersifat fluktuatif , besar kecilnya angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan produk-produk lain.

Pertanian juga memiliki fungsi ketahanan pangan. Dalam ketahanan pangan, hal-hal yang perlu diperhatikan antaralain adalah, kualitas pangan, ketersediaan pangan dalam jangka panjang dan juga keanekaragaman jenis pangan sehingga penduduk Kabupaten Bangka bebas dari kelaparan. Salah satu bentuk pembangunan pangan berkelanjutan adalah melalui diversifikasi pangan. Melalui diversifikasi pangan diharapkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok berupa beras dapat ditekan, pola pangan harapan dapat terwujud, serta dapat meningkatkan pemanfaatan atau pengoptimalan potensi lokal, baik berupa potensi tanaman lokal maupun sumber daya manusia.

Selain ketahanan pangan, pertanian juga berperan penting dalam penyedia lapangan pekerjaan. Sekitar 30 persen penduduk Kabupaten Bangka bekerja di sektor pertanian. Pembangunan industri pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru belum maksimal padahal sektor ini memiliki peran meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan pada umumnya serta meningkatkan nilai tambah tenaga kerja pertanian, semakin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Secara umum nilai tambah (*value added*) dari bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan masih harus dioptimalkan.

d. Sektor UMKM

Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global. Sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian bangka dengan kontribusi mencapai ±57,24 persen dari total PDRB Kabupaten Bangka. Berdasarkan data Dinas UMKM, sebanyak 99,99 persen dari total pelaku usaha atau setara dengan 11.000 pelaku usaha berasal dari UMKM dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, yakni mencapai 79,01 persen dari total tenaga kerja.

Secara umum kinerja UMKM Kabupaten Bangka masih relatif rendah untuk itu ada beberapa hal yang masih harus dibenahi untuk meningkatkan daya saing UMKM seperti, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, perluasan area pemasaran, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Pelaku UMKM juga sangat membutuhkan bantuan modal usaha, keringanan tagihan listrik, relaksasi/penundaan bayaran pinjaman, penundaan pembayaraan pajak, serta kemudahan administrasi dalam pengajuan pinjaman. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri terutama untuk bersaing dengan produk asing.

6. Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan Hidup Yang Berdampak Bencana

Isu lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang harus menjadi fokus pemerintah pada perencanaan pembangunan tahun 2025 dengan alasan sebagai berikut :

a. Kabupaten Bangka dengan potensi pertambangan timah yang besar tentu saja memiliki potensi perusakan lingkungan yang tidak kecil baik di daratan maupun di perairan dan laut. Data menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka tahun 2023 berada pada angka 65,84.
b. Isu *Green Economy* yaitu pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Ekonomi hijau dilandasi dengan model pembangunan ekonomi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis.
c. Pelestarian lingkungan hidup masih menghadapi permasalahan terkait lemahnya kesadaran masyarakat dalam prilaku menjaga alam, rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan, rendahnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, konflik regulasi pemanfaatan sumber daya alam antar pemerintah pusat dan daerah.
d. Pelestarian lingkungan hidup harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka karena dampak kerusakan lingkungan yang massif pada akhirnya dapat mengakibatkan bencana seperti banjir, longsor, wabah penyakit dan sebagainya yang akan memerlukan biaya sangat besar untuk menanganinya.
e. Pembangunan Rendah Karbon (PRK) adalah kebijakan, rencana, program dan pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Rendah Karbon meminimalisir *trade-off* antara pembangunan

ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembangunan Rendah Karbon menjadi bagian dalam pencapaian target SDGs, dengan menempatkan isu perubahan iklim (SDG's Goal 13) sebagai basis utama untuk mendukung pilar ekonomi, sosial dan lingkungan. Potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Bangka didominasi oleh kegiatan Pembangunan Rendah Karbon di sektor kehutanan & lahan gambut, sektor pertanian, serta sektor energi.

f. Belum optimalnya perbaikan pengelolaan SDA dan kualitas mutu lingkungan hidup. Kabupaten Bangka masih terdampak besar dalam lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan, penebangan hutan dan ekploitasi legal perikanan. Pelestarian lingkungan lingkungan hidup merupakan kebijakan yang harus dilakukan karena terkait dengan permasalahan ketahahan pangan, kesehatan, perubahan iklim, serta keselamatan generasi mendatang. Pelestarian lingkungan hidup masih menghadapi permasalahan terkait lemahnya kesadaran masyarakat dalam prilaku menjaga alam, rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan, rendahnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, konflik regulasi pemanfaatan sumber daya alam antar pemerintah pusat dan daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah pada prinsipnya ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta menyelesaikan permasalahan isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Dengan demikian arah kebijakan ekonomi daerah perlu disusun berdasarkan kajian mendalam serta berpedoman pada dokumen RPJPD 2025-2029 dan RPD 2024-2026. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan formula bagi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bangka tahun 2026 yang keberhasilannya dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi makro untuk mencapai tujuan pembangunan serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi.

Mencermati proyeksi kondisi ekonomi yang semakin membaik setelah pada tahun 2024-2025 kebijakan dan program strategis yang dilakukan dinilai berhasil sekaligus untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2026 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dan harus diselaraskan dengan arah pembangunan RPD 2024-2026 tahun ke-3 (pertama) yang diarahkan untuk “Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Kesejahteraan”.

Untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dalam kaitannya dengan ekonomi daerah, perlu dilakukan analisis kondisi perekonomian Kabupaten Bangka secara menyeluruh yaitu memotret kondisi perekonomian baik di level internasional, nasional maupun regional. Mengingat Kabupaten Bangka atau Provinsi Bangka Belitung ialah wilayah yang memiliki struktur perekonomian yang berbasis komoditi ekspor dan impor. Menjadi penting untuk Pemerintah Kabupaten Bangka memahami

konstelasi Geo Economic di tengah arus era globalisasi dalam konteks perdagangan dunia.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024 dan 2025

3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Dunia

Sepanjang tahun 2024, dunia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. tantangan global yang tengah terjadi saat ini ke dalam tiga hal besar. Pertama, konflik geopolitik. Kedua, perubahan kepemimpinan politik di banyak negara. Ketiga, proyeksi ekonomi global dan negara-negara besar di dunia yang masih lemah. saat ini dunia memang berada dalam situasi global yang tidak pasti. Efek perang Ukraina-Rusia masih terasa. Konflik geopolitik di Timur Tengah dan di Laut Cina Selatan juga masih belum usai, bahkan ada kecenderungan kian memanas.

Tahun ini banyak negara melakukan pemilihan umum sehingga muncul pimpinan negara baru, baik di negara maju maupun berkembang. Lebih dari 60 negara melakukan pemilihan umum dan melibatkan empat miliar orang di dunia. Perubahan kepemimpinan ini dipastikan akan menimbulkan perbedaan arah kebijakan. Pemilihan umum juga berlangsung di Indonesia dan menciptakan pergantian pimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.

Gambar. 3.1
Proyeksi Ekonomi Dunia World Economic Forum 2024 & 2025

Data diatas menunjukkan bahwa Pertumbuhan di negara-negara berkembang dan berkembang di Asia diproyeksikan akan menurun dari 4,4 persen pada tahun 2023 menjadi 4,2 persen pada tahun 2024, kemudian mengalami stagnanasi sebesar 4,2 persen pada tahun 2025.

Melihat perkembangan diatas Indonesia terus menerus ada di dalam zona ekspansi yang cukup bertahan semenjak pandemi berakhir. Sekitar 45% dari aktivitas ekonomi Indonesia ditopang oleh hanya tiga sektor, yaitu pertanian, pengolahan, dan perdagangan. Ketiga sektor ini melanjutkan tren pertumbuhan di bawah rata-rata nasional. Stagnansi yang persisten terjadi di sektor pengolahan menguatkan indikasi terjadinya deindustrialisasi prematur. Lebih lanjut, pertumbuhan perdagangan besar dan eceran di bawah 5% menyiratkan adanya potensi pelemahan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Hal ini juga kemungkinan dipengaruhi oleh potensi deindustrialisasi prematur yang membatasi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja akibat lemahnya pertumbuhan produktivitas dari aktivitas produksi di Indonesia. Di sisi lain, performa sektor pertanian cukup mengecewakan, dipengaruhi oleh produktivitas yang rendah akibat berbagai faktor, dari rendahnya keterampilan tenaga kerja dan kualitas bahan baku hingga minimnya skema penjaminan untuk petani. Kondisi ini diperparah oleh faktor musiman El-Nino. Untuk itu pemerintah harus berupaya optimal dalam mempertahankan ekonomi Indonesia ditengah kondisi global yang tidak pasti

3.1.1.2 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia dalam periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 5 persen di tengah melambatnya ekonomi global, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian itu, pemerintah akan terus berupaya menjaga inflasi tetap rendah di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Adapun inflasi pada November 2024 sebesar 1,55 persen year-on-year dan termasuk yang terendah di dunia. Selain inflasi yang masih rendah, konsumsi masyarakat juga tetap terjaga dan ekspor menunjukkan tren yang meningkat. Tercatat, neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus 54 bulan berturut-turut pada Oktober 2024. hal ini menunjukkan daya tahan sekaligus potensi perekonomian Indonesia di sektor-sektor yang mampu

menghasilkan barang komoditas ekspor seperti manufaktur dan juga sektor yang tumbuh di dalam negeri seperti perdagangan dan konstruksi.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp5.638,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.279,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,50 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 6,06 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,44 persen. Ekonomi Indonesia triwulan III-2024 terhadap triwulan III-2023 tumbuh sebesar 4,95 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,95 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,69 persen. Sampai dengan triwulan III-2024, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,29 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,10 persen.

Secara spasial, perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencatat pertumbuhan (y-on-y) yang stabil. Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar dengan peranan sebesar 56,84 persen dari PDB nasional dan mencatat pertumbuhan sebesar 4,92 persen (y-on-y).

Gambar. 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 3 Tahun 2024

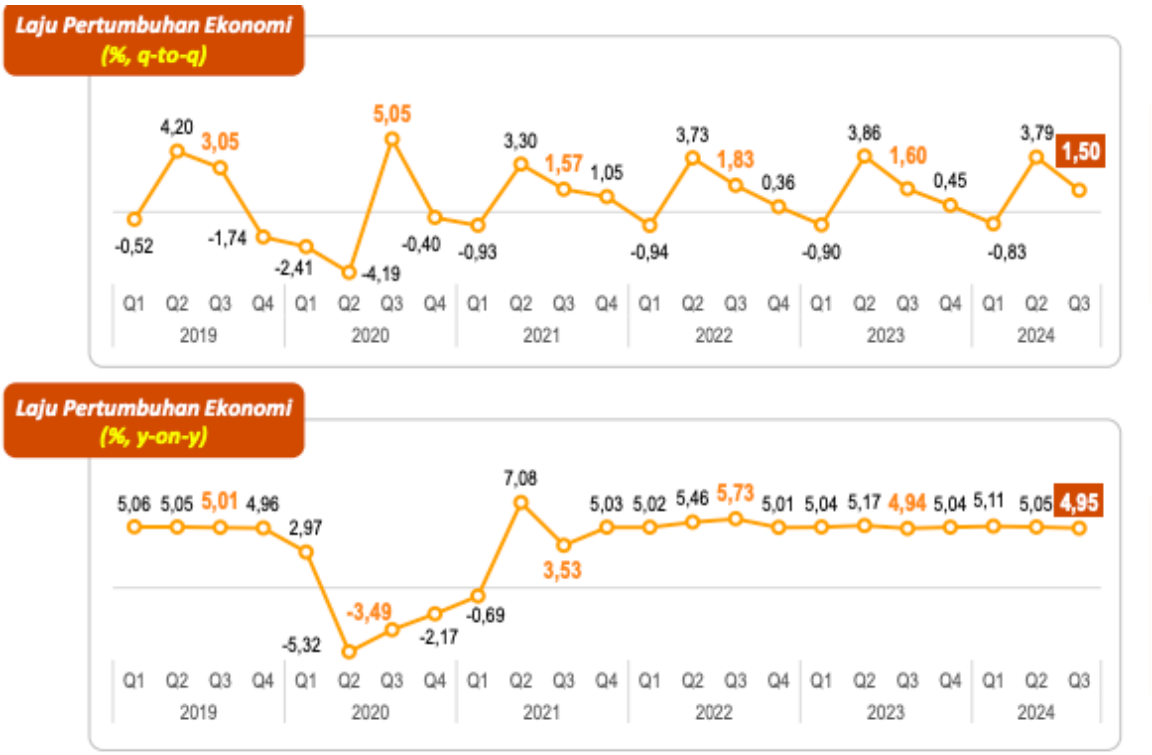

Dari sisi Distribusi Perekonomian, Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap

ekonomi, yakni Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Pertambangan menunjukkan pertumbuhan positif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tinggi meliputi: Transportasi & Pergudangan sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang seluruh moda angkutan dan peningkatan pengiriman barang.

Akomodasi & Makan Minum didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisman, kegiatan

MICE maupun event berskala nasional dan internasional, seperti Moto GP Mandalika, PON XXI, dan International Sustainability Forum.

Gambar. 3.3
Distribusi Ekonomi Indonesia Triwulan 3 Tahun 2024

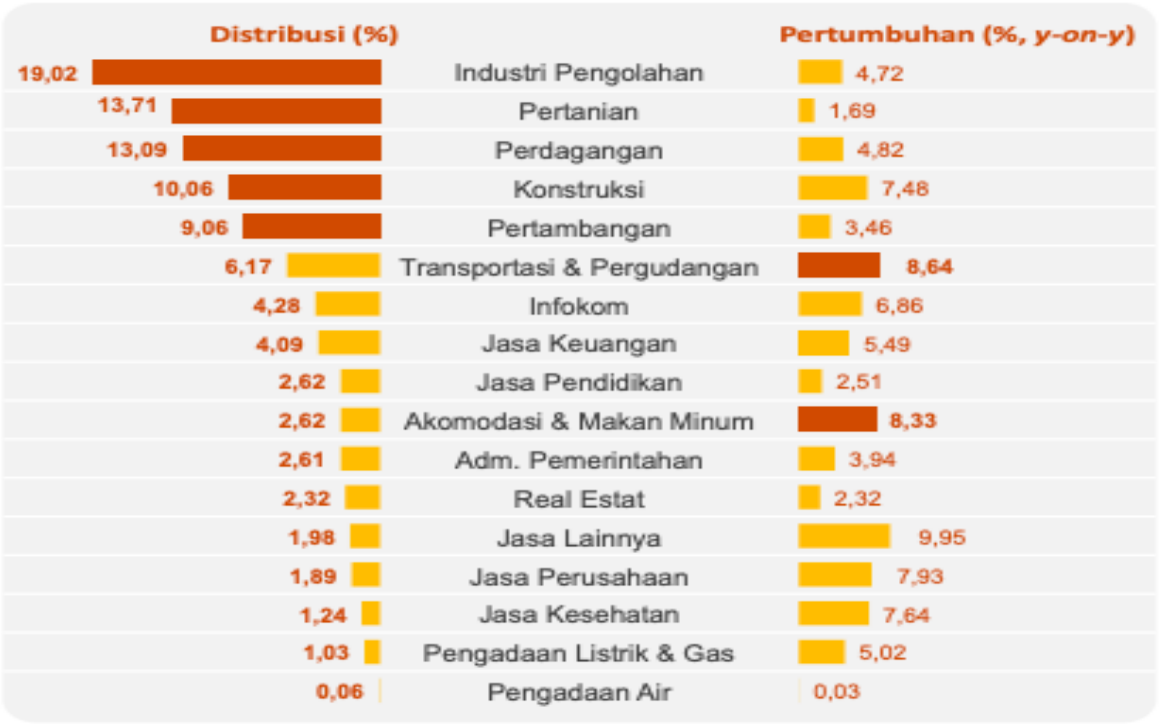

Melihat kondisi ekonomi Indonesia beserta tantangan serta peluang yang akan dihadapi pada tahun-tahun mendatang yang mana prospek ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026 cukup baik dan diperkirakan mampu bertahan menghadapi berbagai isu ketidakpastian global. Indonesia memiliki keunggulan dalam mengoptimalkan perekonomian domestik dibandingkan dengan negara-negara yang terlalu bertumpu kepada kinerja ekspor. Maka proyeksi ekonomi Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Proyeksi Ekonomi Indonesia Tahun 2025 dan 2026

Indikator Makro (Nasional)	2023	Resiliensi	Consolidation and Reform	
		2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	1,50 (Q3)	5,0- 5,2	5,80-6,30
Pengangguran (%)	5,32	4,91	4,67–4,81	4,44-4,96
Angka Kemiskinan (%)	9,36	9,03 (Q1)	8,01–9,01	6,50-7,50
Gini Rasio	0,388	0,374 (Q1)	0,360 - 0,374	0,337 - 0,380
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n.a	n.a	n.a	n.a

Indikator Makro (Nasional)	2023	Resiliensi	Consolidation and Reform	
		2024	2025	2026
Penurunan Intensitas Emisi GRK	n.a	n.a	35,12	37,14

Pada tahun 2025, belanja negara sebesar Rp3.621,3 miliar, sedangkan 2026–2029 diperkirakan sebesar Rp18.852,7– Rp24.191,8 miliar. Jika mengikuti proporsi 2025, belanja mengikat dan pembayaran kewajiban lainnya tahun 2026-2029 membutuhkan anggaran sebesar Rp9.281,8–Rp11.901,4 miliar. Dengan demikian untuk belanja operasional K/L, belanja Non K/L, pendanaan prioritas, termasuk untuk ruang gerak Presiden Terpilih sebesar Rp4.390,3–Rp5.588,8 miliar. Pemanfaatan ruang gerak jangka menengah akan digunakan untuk Terpilih, atau proyek tahun 2020–2024 yang masih sesuai dengan RPJMN Tahun 2025–2029, serta untuk RPJMN 2025–2029.

Tabel. 3.2

Kebutuhan Pendanaan Belanja K/L Tahun 2025–2029

Uraian	Usulan Kementerian/Lembaga[a)]					
	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah
Prioritas Nasional	345,97	480,78	515,44	487,55	453,45	2.283,20
Non Prioritas Nasional	1.494,73	1.652,09	1.535,85	1.486,24	1.362,41	7.531,32
Kebutuhan Pendanaan	1.840,70	2.132,87	2.051,29	1.973,79	1.815,86	9.814,52
Resource Envelope[b)]	1.160,10	1.176,9–1.326,5	1.253,8–1.546,9	1.354,2–1.784,9	1.478,0–2.054,3	5.262,9–6.712,6
GAP	(-680,90)	(-955,9)–(-806,4)	(-797,5)–(-504,4)	619,59–(-188,9)	(-337,9)–238,4	(-4.551,6)–(-3.101,9)

Keterangan:
a) Sumber data dari Renstra K/L 2025-2029 (sebagai usulan K/L)
b) Resource Envelope Kedeputian Bidang Ekonomi 14 Oktober 2024

Transformasi ekonomi dilakukan melalui 5 arah pembangunan, yaitu: (i) iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; (ii) penerapan ekonomi hijau; (iii) transformasi digital; (iv) integrasi ekonomi domestik dan global; (v) perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Iptek dan inovasi merupakan pendorong percepatan

produktivitas sektor-sektor ekonomi dan penopang kekuatan struktur ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu pusat pengembangan Iptek dan Inovasi di kawasan Asia bahkan di dunia terutama dalam bidang kemaritiman, biodiversitas teknologi material, serta kebencanaan dan mitigasi bencana. Pembangunan IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi dilakukan dengan mengembangkan industrialisasi, ekonomi dan keuangan syariah, modernisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, produktivitas BUMN, Produktivitas UMKM dan koperasi dan produktivitas tenaga kerja. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 berdasarkan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 akan difokuskan pada Inovasi dan dengan skenario pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50% – 7,60%. Untuk lebih jelasnya kerangka tahapan transformasi ekonomi nasional dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar. 3.4
Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2025–2029

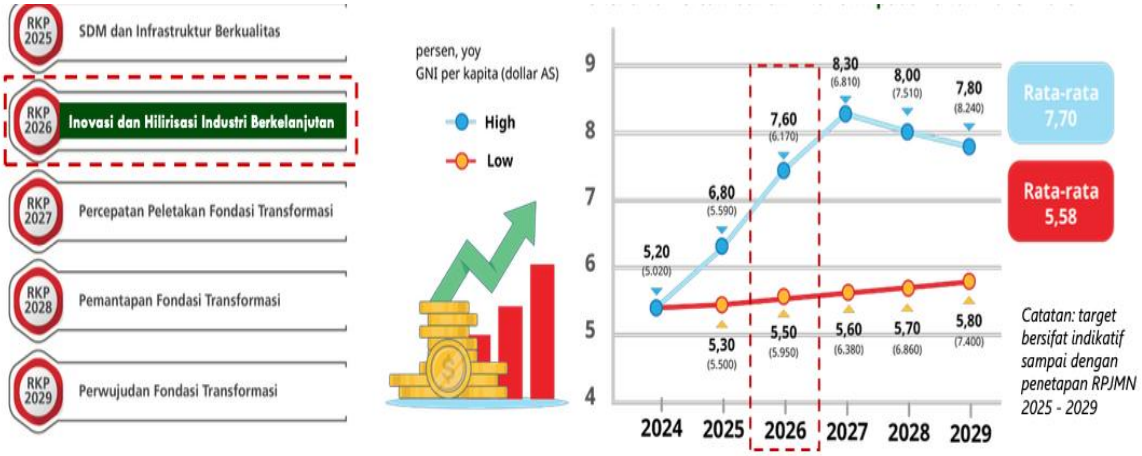

3.1.1.3 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Wilayah Provinsi Bangka Belitung

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan III-2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 27,05 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp15,22 triliun. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kumulatif Triw III-2024 dibandingkan dengan kumulatif Triw III-2023 tumbuh sebesar 0,71 persen.

Dari sisi produksi, Industri Pengolahan dengan kontribusi 21,23 persen terkontraksi dengan Subkategori industri logam dasar yang ditopang oleh logam timah mengalami penurunan cukup dalam dibandingkan triwulan III-2023. Selain itu, Produksi CPO dan turunannya serta produksi industri karet juga mengalami penurunan. Sektor Pertanian tumbuh positif dengan subkategori Perikanan yang merupakan kontributor terbesar kategori ini mengalami peningkatan. Sementara Perkebunan Tahunan seperti produksi kelapa sawit mengalami penurunan. Secara keseluruhan lapangan usaha Pertanian masih tumbuh positif meski melambat dibandingkan triwulan III-2023.

Gambar 3.5
Struktur dan Pertumbuhan PDRB sektor Triwulan 3 tahun 2024

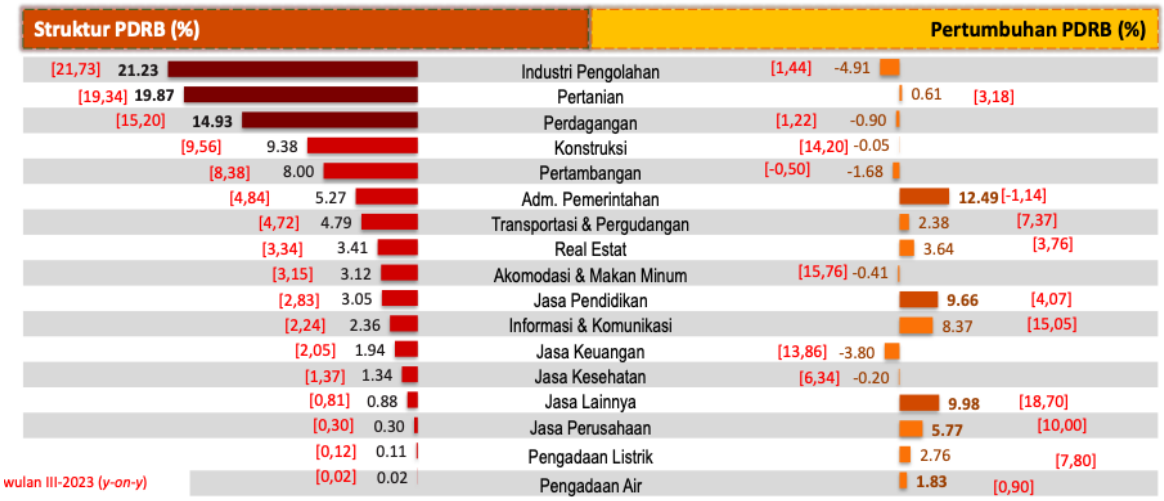

Dari uraian diatas Berikut merupakan prediksi Capaian indikator makro Provinsi Bangka Belitung tahun 2024 dan 2025.

Tabel 3.3
Proyeksi Ekonomi Bangka Belitung Tahun 2025 dan 2026

Indikator Makro (Nasional)	2023	Reseliensi	Consolidation and Reform	
		2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,38	0,71 (Q3)	2,69-4,46	2,30-3,30
Pengangguran (%)	4,56	4,63	4,23-4,79	4,38-5,08
Angka Kemiskinan (%)	4,52	4,55 (Q1)	4,91-4,96	4,79-4,84
Penurunan Intensitas Emisi GRK	n.a	n.a	32,11	49,29-54,63
Gini Rasio	0,245	0,244	0,167	0,237-0,247
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,85	74,55	75,11	76,97

Sumber : RKPD Provinsi Bangka Belitung 2026

3.1.1.4 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bangka

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Secara makro ekonomi kondisi perekonomian Kabupaten Bangka diimplementasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didalamnya memuat berbagai indikator ekonomi baik secara pendekatan output maupun menurut penggunaanya, Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi (PE) serta tingkat inflasi maupun indikator lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja perekonomian seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Struktur Perekonomian Kabupaten Bangka pada tahun 2024 yang tercermin dari peranan masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB, mengalami sedikit perubahan pola dari tahun-tahun sebelumnya. Perubahan pola tersebut diakibatkan adanya perubahan tahun dasar perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2010 menjadi tahun dasar 2020. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional termasuk di daerah. Dampak dari Pandemi COVID 19 merupakan beberapa contoh perubahan yang diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Selengkapnya perkembangan PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2022 tersaji pada Grafik dibawah ini.

Gambar 3.6
Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2019– 2024

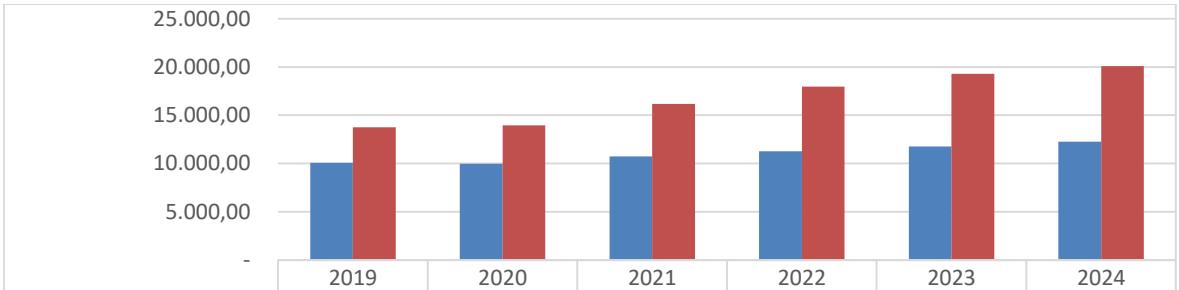

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
HK	10.060,45	9.986,93	10.733,24	11.256,07	11.756,29	12.270,81
HB	13.770,53	13.944,33	16.174,59	17.958,83	19.298,85	20.104,69

Sumber : PDRB Kab. Bangka, diolah, 2024

Di proyeksikan Secara makro struktur perekonomian Kabupaten Bangka berdasarkan PDRB Harga Berlaku pada tahun 2024 didominasi oleh sektor sekunder

dan tersier dengan kontribusi masing-masing sebesar 35,27 persen dan 34,93 persen. Berdasarkan hasil analisis, perekonomian Kabupaten Bangka akan didominasi oleh 4 (empat) sektor utama yang diproyeksi sebagai the nextcore business Kabupaten Bangka dalam beberapa tahun kedepan dengan core sector (1) industri pengolahan; (2) pertanian, kehutanan dan perikanan; (3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. (4) Konstruksi. Selengkapnya, nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Bangka lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Distribusi PDRB Kabupaten Bangka
Menurut Sektor Tahun 2018-2024

SEKTOR	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRIMER	30,65	29,4	31,01	31,02	30,59	27,54	29,81
SEKUNDER	32,39	32,23	32,03	34,08	34,24	34,24	35,27
TERSIER	36,96	38,38	36,96	34,89	35,18	38,21	34,93

Sumber : PDRB Kab. Bangka, diolah, 2024

Tahun 2018 sampai 2024, industri pengolahan masih merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar. Pada tahun 2024 kontribusi sektor ini sebesar 25,67 persen. Namun trend perkembangan lapangan usaha ini cenderung terus mengalami peningkatan walaupun terjadi penurunan pada subkategori industri logam dasar dengan komoditas utamanya timah. Tingginya tingkat ketergantungan sektor tersebut terhadap timah dengan tingkat produksi yang terus berkurang maka peranannya diproyeksikan akan digeser oleh sektor unggulan lainnya terutama lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Kontributor terbesar kedua adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 21,84 persen. Kedepan, lapangan usaha ini diproyeksikan akan menjadi kontributor terbesar PDRB Kabupaten Bangka. Sejak tahun tahun 2018, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai tambah yang mengalahkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan kebijakan daerah yang mengedepankan lapangan usaha ini. Sektor ini adalah salah satu sektor

ekonomi yang dapat bertahan dan justru memnberikan trend positif di tengah pandemi yang melanda dunia. Prioritas utama pada lapangan usaha ini dimaksudkan untuk memperkuat fondasi menuju Kabupaten Bangka sebagai pusat industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian (perkebunan), perikanan dan pariwisata. Semakin menurunnya sektor pertambangan dan penggalian lebih disebabkan tingkat produksi yang semakin berkurang, harga output yang fluktuatif, sifatnya yang unrenewable serta daya degradasi lahan dan landscape yang sangat tinggi. Dengan pertumbuhan yang fluktuatif tersebut, menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian tidak dapat terus menerus dijadikan andalan perekonomian. Walaupun lapangan usaha ini dengan komoditas utama berupa timah sangat identik dengan Kabupaten Bangka dan telah menjadi jantung kehidupan ekonomi masyarakat Bangka sejak belum merdeka. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diproyeksikan sebagai the next prime mover karena sektor ini mampu (1) memberikan kontribusi besar dalam perekonomian, (2) memiliki derajat kepekaan dan derajat penyebaran yang tinggi, dan (3) merupakan sektor utama yang banyak memberikan pengaruh positif terhadap sektor lain. Diharapkan kedepan lapangan usaha ini, menjadi dasar pertumbuhan Kabupaten Bangka menjadi pusat industri dan perdagangan. Untuk lebih jelasnya kontribusi dan pertumbuhan sektor rill lapangan usaha perekonomian kabupaten bangka dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

Gambar. 3.7
Peranan Sektoral PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tahun 2024

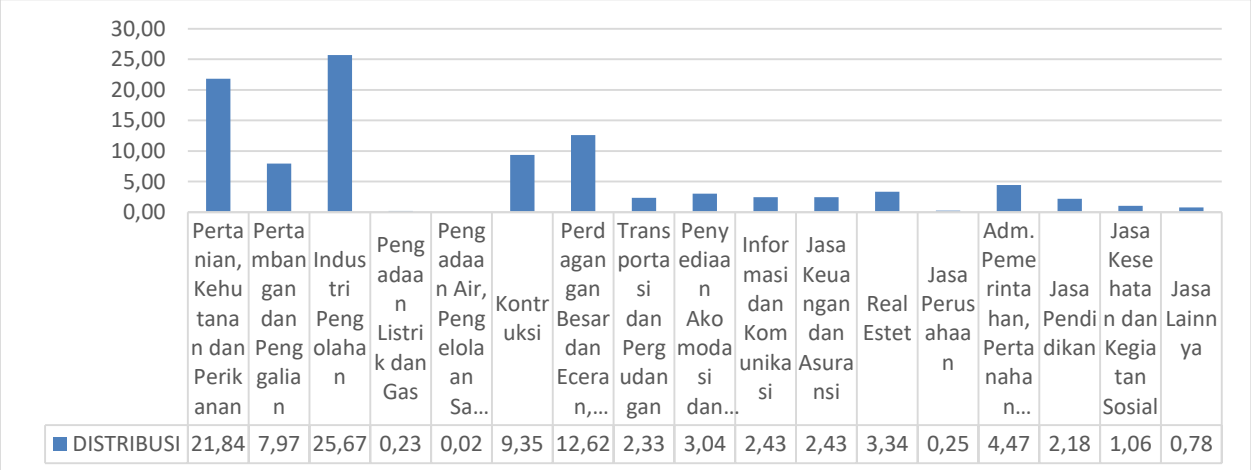

Sumber : BPS Kab. Bangka, diolah, 2025

Dari gambaran perekonomian di atas dapat diprediksi bahwa dalam beberapa tahun kedepan ketika deposit timah sudah habis terkuras, maka core business dan posisi relatif masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka akan mengalami pergeseran. Potret kondisi perekonomian ini sekaligus juga memberikan gambaran bagaimana prospek perekonomian di masa depan. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tetap akan mendominasi. Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian diperkirakan tidak lagi menjadi bagian core business yang bisa dikembangkan, sebagai gantinya pengembangan perekonomian harus diarahkan kepada lapangan usaha industri pengolahan khususnya subkategori industri makanan dan minuman dan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai representasi dari pariwisata.Untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di masa depan, mulai beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Bangka sudah mulai mempersiapkan infra dan suprastruktur pengembangan sektor-sektor prospektif yang akan menjadi core business beberapa tahun kedepan, melalui beberapa kegiatan pembangunan dan berbagai regulasi yang dapat dijadikan akseleratornya.

beberapa variabel yang telah diuraikan diatas adalah bagian dari analisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah yang akan menjadi pertimbangan dalam menyusun kerangka ekonomi kedepan dalam perencanaan pembangunan yang lebih berdampak inklusif. Resesi global yang dipicu perang antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan sepanjang tahun 2022 hingga 2024 memberikan andil terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Selain itu, seiring tekanan perekonomian global akibat penurunan permintaan serta stagnasi harga komoditas dunia dan ketegangan dan konflik politik di sejumlah kawasan terutama Timur Tengah dan Laut China Selatan. Menyikapi hal2 tersebut diatas Untuk lebih jelasnya prediksi perkembangan ekonomi ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2026

Indikator Makro (Bangka)	2023	2024 (Resiliens)	Proyeksi	
			2025	2026
Perekonomian:				
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,44	(0,44)	3,79	4,33
PDRB Per Kapita (Juta Rp) HK	35,69	34,21	35,49	36,95
PDRB Per Kapita (Juta Rp) HB	57,38	56,77	60,75	63,95
Laju Indeks Implisit PDRB (%)	5,93	4,21	4,39	4,13
Ketenagakerjaan:				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,39	4,91	4,77	4,49
Jumlah Penganggur (orang)	8.855	8.807	8.658	8.298
Kemiskinan:				
• Angka Kemiskinan (%)	4,32	4,24	4,23	4.13
• Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	14,87	14,76	14,48	14,47
Ketimpangan:				
• Rasio Gini	0,219	0,211	0,207	0,202
• Indeks Williamson (ketimpangan wilayah)	0,183	0,219	0,192	0,191
• Ketimpangan Kriteria Bank Dunia (Pendapatan)→ (40 persen terbawah)	23,26	23,14	23,22	23,23
Indikator Makro RPJPD daerah:				
• PDRB Perkapita (Juta Rp.)	57,38	56,77	60,75	63,95
• Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	24,78	23,21	24,07	24,45
• Tingkat Kemiskinan	4,32	4,24	4,23	4,13
• Rasio Gini	0,219	0,211	0,207	0,202
• Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi (%)	19,48	19,25	19,64	19,90

Indikator Makro (Bangka)	2023	2024 (Resiliens)	Proyeksi	
			2025	2026
• Pertumbuhan Ekonomi	4,44	(0,44)	3,79	4,33
• Indeks Inovasi Daerah	84,98	88,78	89,00	93,99
• Penurunan emisi GRK	n.a	28,17	31,17	34,19
• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,84	64,71	65,95	66,05

Sumber : Bappeda Kab. Bangka (Diolah), 2025

Beberapa Indikator Makro yang memiliki kesamaan baik di level provinsi dan pusat Telah dilakukan sinkronisasi berdasarkan hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan yang difasilitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut merupakan tabel sinkronisasi indikator makro pembangunan daerah tahun 2026

No.	Indikator Makro	Target RKP 2026	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Bangka
		Nasional	Target RKPD 2026	Target RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.80 - 6.30	2.30 - 3.30	4,33
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.44 - 4.96	4.38 - 5.08	4,49
3	Tingkat Kemiskinan	6.50 - 7.50	4.79 - 4.84	4,13
4	Rasio Gini	0.337 - 0.380	0.237 - 0.247	0,202
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK	37,14	49.29 - 54.63	34,19
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		76,97	66,05

Agar pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut diatas dapat terealisasi dengan optimal, maka perlu dilakukan kalkulasi ekonomi secara komprehensif dengan menggunakan komposit yang dibutuhkan sehingga daerah tidak menemui kesulitan yang berarti dalam menentukan besaran kebutuhan dana/investasi yang diperlukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. Selengkapnya kerangka pemikiran kebutuhan pendanaan tahun 2026 tersaji pada gambar berikut ini.

Gambar 3.8
Kerangka Pemikiran Kebutuhan Pendanaan Tahun 2026

Berdasarkan hasil kerangka pemikiran diatas disusunlah analisis yang dilihat pada tabel dibawah. Tabel tersebut menunjukkan hampir seluruh sektor dalam struktur perekonomian memiliki potensi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut menimbang sektor –sektor tersebut mempunyai keunggulan komperatif dibandingkan dengan sektor perekonomian lainnya seperti sektor pengadaan listrik dan dengan nilai LQ mencapai 2,14, kemudian sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,49 sektor pertambangan dan penggalian 1,05 dan sektor perekonomian lainnya dengan rentang 0,72 – 1,13. Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan progress yang cukup baik dengan rataan diatas 3 persen, walaupun demikian mencermati hampir dipastikan pada tahun 2023 ekonomi akan mengalami perlambatan akibat resesi global, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksi yakni hanya sebesar 4,77 persen. Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dilakukan untuk mengetahui efektivitas tingkat produksi dan memperkirakan kebutuhan dana yang dapat diinvestasikan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah.

sehingga diperkirakan kebutuhan pendanaan tahun 2026 mencapai 2,93 triliun rupiah Selengkapnya analisis terkait kebutuhan pendanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Analisis Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangka Tahun 2026

Sektor Ekonomi	Rataan LQ 2018 - 2024	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (2026)	Proyeksi PDRB 2026 (Milyar Rp)	Rataan ICOR	Kebutuhan Investasi (Milyar Rp)
Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	1,04	7,87%	2.695,41	3,72	788,74
Pertambangan & Penggalian	1,19	-0,36%	1.463,94	6,26	0,44
Industri Pengolahan	1,12	7,49%	3.020,53	5,77	1305,77
Pengadaan Listrik Dan Gas	2,02	3,16%	25,86	4,61	3,77
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	1,16	3,53%	2,59	4,83	0,44
Konstruksi	0,95	0,36%	977,42	4,22	14,72
Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	0,83	4,01%	1.439,42	3,28	189,26
Transportasi Dan Pergudangan	0,58	7,84%	328,71	8,47	218,32
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0,96	1,44%	341,18	3,21	15,82
Informasi Dan Komunikasi	1,09	6,66%	486,98	6,28	203,80
Jasa Keuangan Dan Asuransi	1,40	0,04%	317,63	4,10	0,55
Real Estate	1,03	3,64%	457,14	3,81	63,42
Jasa Perusahaan	0,82	4,06%	27,14	4,61	5,09
Adm. Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	0,85	-3,00%	552,46	4,91	-81,47
Jasa Pendidikan	0,73	0,41%	260,17	4,88	5,21
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	0,78	4,93%	151,39	3,94	29,41
Jasa Lainnya	0,88	-2,87%	123,25	6,53	-23,08
Kab. Bangka	1,02	4,33%	12.671,19	4,91	2740,20

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2025, Data diolah

Sebagai stimulus dalam perekonomian daerah, implementasi investasi diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, mendorong berkembangnya sector ekonomi daerah dan mempersempit kesenjangan antar wilayah dan antar pendapatan masyarakat yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sector dan ekonomi. Secara keseluruhan, investasi bangunan dan non bangunan yang

dilakukan pemerintah daerah diprediksi berada dikisaran 30,39 persen atau sebesar 832,75 milyar rupiah, kemudian sektor swasta dengan proporsi mencapai 31,99 persen atau setara 876,59 milyar rupiah dan peran APBN dan APBD provinsi masing – masing diperkirakan hanya sebesar 18,14 persen dan 8,96 persen saja. Selengkapnya proporsi kebutuhan pendanaan Kabupaten Bangka Tahun 2026 menurut pelaku ekonomi tersaji pada grafik berikut ini.

Gambar 3.9
Proprosi Kebutuhan Pendanaan Kab. Bangka Tahun 2026
Menurut Pelaku Ekonomi (Milyar Rp. & Persentase)

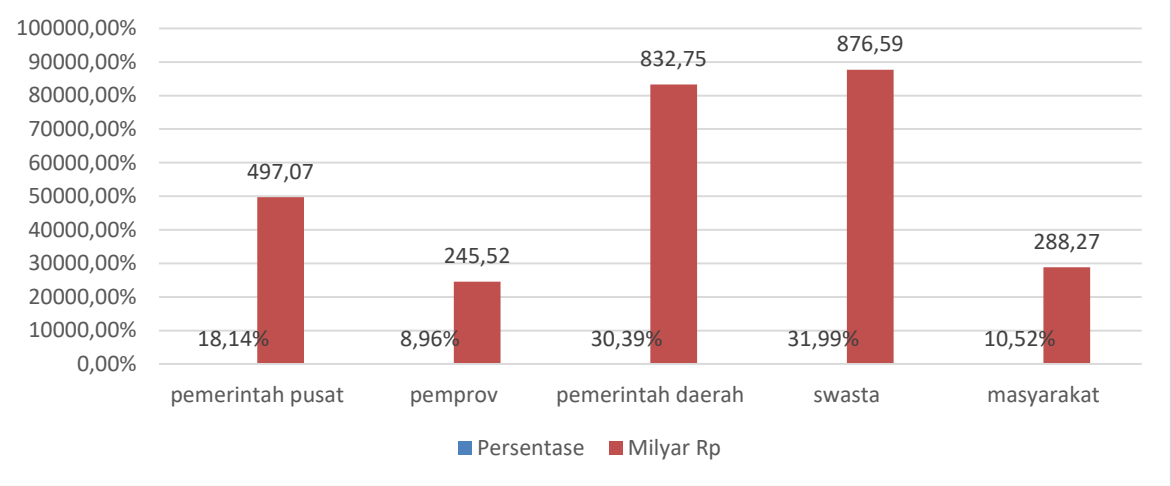

Kedepan, fokus pemerintah daerah selain terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu diperhatikan permasalahan distribusi pendapatan masyarakat agar tidak terjadi gap yang cukup besar antar kelompok masyarakat kecil, menengah dan kaya. Realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Bangka tahun 2023-2024 dan proyeksi tahun 2025-2026 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Realisasi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bangka
2023-2024 dan Proyeksi Tahun 2025 – 2026

No	Indikator Makro	Realisasi		Bertambah/Berkurang	Proyeksi	
		2023	2024		2025	2026
1	**PDRB (Milyar Rupiah)**					
	a. Harga Berlaku	19.298,85	20.003,46	704,61	20.786,06	21.925,92

No	Indikator Makro	Realisasi		Bertambah/Berkurang	Proyeksi	
		2023	2024		2025	2026
	b. Harga Konstan	11.756,29	11.702,39	-53,90	12.145,62	12.671,19
2	**Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**	**4,44**	**-0,44**	-4,88	**3,79**	**4,33**
3	**Laju Indeks Implisit PDRB**	**5,93**	**n.a**		**n.a**	**n.a**
4	**Distribusi Persentase ADHB**					
	Primer	**28,76**	**29,38**	0,62	**29,95**	**30,48**
	a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,38	21,21	0,83	22,33	23,23
	b. Pertambangan dan Penggalian	8,38	8,17	-0,21	7,62	7,25
	Sekunder	**34,99**	**33,67**	-1,32	**33,84**	**34,18**
	c. Industri Pengolahan	25,26	24,24	-1,02	24,07	24,45
	d. Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,22	0,00	0,23	0,23
	e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02
	f. Kontruksi	9,49	9,18	-0,30	9,52	9,48
	Tersier	**36,25**	**36,95**	0,70	**36,21**	**35,34**
	g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,13	13,09	-0,04	13,30	12,86
	h. Transportasi dan Pergudangan	2,51	2,60	0,09	2,38	2,38
	i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,12	3,21	0,09	3,14	3,17
	j. Informasi dan Komunikasi	2,45	2,62	0,17	2,53	2,56

No	Indikator Makro	Realisasi		Bertambah/Berkurang	Proyeksi	
		2023	2024		2025	2026
	k. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,87	2,81	-0,07	2,35	2,23
	l. Real Estet	3,35	3,39	0,03	3,49	3,38
	m. Jasa Perusahaan	0,27	0,28	0,01	0,26	0,26
	n. Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,44	4,61	0,16	4,49	4,41
	o. Jasa Pendidikan	2,25	2,44	0,19	2,37	2,21
	p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,06	1,05	-0,01	1,09	1,09
	q. Jasa Lainnya	0,80	0,87	0,07	0,82	0,80
5	**Ketenagakerjaan**					
	a. Tk. Penangguran Terbuka (%)	5,36	4,91	-0,45	4,77	4,49
	b. Jumlah Pengangguran (Jiwa)	8.899	8.807	-91,62	8658	8298
6	**% Penduduk Miskin**	**4,32**	**4,24**	-0,08	**4,23**	**4,13**
	a. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	14,87	14,76	-0,11	14,48	14,47
7	**PDRB Perkapita (Juta Rp)**	**57**	**58**	1,09	**60,75**	**63,95**

Sumber : Bappeda Kab. Bangka, diolah, 2025

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan 2026

3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan 2026

Untuk mencapai perekonomian yang ideal yaitu suatu kondisi dimana perekonomian terus menerus tumbuh disertai dengan stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas, merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh

pemerintah Kabupaten Bangka disamping meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan derajat kehidupan berdemokrasi. Semua tujuan tersebut pada tahun 2026 diimplementasikan dengan melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan yang akan mempercepat terlaksananya pencapaian tujuan tersebut. Diharapkan pelaksanaan pembangunan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Secara nasional sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun 5 tahun terakhir cukup stabil dan cukup tinggi di sekitar 5% begitu pula Kabupaten Bangka secara khusus. Progress perbaikan Indonesia ini sudah menuai hasil. Sesuai dengan klasifikasi yang dibuat Bank dunia tahun 2019, Indonesia mulai menjadi upper middle income country.

Namun demikian, tantangan selanjutnya adalah berapa lama Indonesia dapat lulus dari predikat middle income country menjadi high income country. Khusus Kabupaten Bangka Beberapa tantangan perekonomian antara lain tingkat produktivitas yang masih perlu di perbaiki, terutama di tiga sumber pertumbuhan yaitu kapital, tenaga kerja dan total factory productivity. Kemudahan berusaha di Kabupaten Bangka juga masih perlu ditingkatkan. Selain itu, modal demografi masih belum dimanfaatkan optimal. Kabupaten Bangka perlu memaksimalkan angkatan kerja menganggur untuk meningkatkan pertumbuhan dalam jangka pendek. Dari sisi adopsi teknologi, mayoritas produk-produk yang menjadi komoditas ekspor didukung oleh teknologi yang masih relatif rendah sehingga nilai tambah yang dihasilkan dari produk tersebut menjadi kurang optimal.

Selain isu domestik, yang menjadi tantangan ekonomi juga datang dari eksternal seperti resesi ekonomi global tahun 2023 dan berlanjut di 2024. Resesi ekonomi ini menjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memberikan guncangan pada sisi permintaan dan penawaran, serta memberikan efek domino ke berbagai aspek. Oleh karena itu, APBD 2026 diarahkan untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi menuju Kabupaten Bangka dapat bermain peran penting dalam rangka peningkatan ekonomi secara regional maupun nasional. Namun, untuk

mecapai tujuan strategis pembangunan yaitu mendorong investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, APBD saja tidak cukup, Kabupaten Bangka perlu reformasi yang lebih komprehensif.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2024 dan tahun berjalan 2025, maka tantangan pokok sehubungan dengan perekonomian daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Kabupaten Bangka pada tahun 2026, yakni:

1) **Stagnasi Ekonomi di karenakan melemahnya permintaan ekspor.**

   Faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan daerah adalah perlambatan ekonomi global. Hal tersebut terlihat dari melemahnya permintaan ekspor Indonesia yang berdampak juga terhadap ekspor wilayah bangka, terutama dari China, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

2) **Minimnya peran investasi di sektor industri pengolahan dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi.**

   Rendahnya kontribusi investasi di sektor tersebut dipengaruhi oleh kualitas dan kontinuitas produk pertanian yang masih terbatas, kemampuan ekspor yang masih rendah, kurangnya daya dukung infrastruktur pertanian, dan masih lemahnya kemitraan antara agroindustri skala besar/sedang dengan agroindustri skala kecil/rumah tangga.

   Iklim usaha yang sehat dan kondusif akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan investasi yang sehat dan kondusif menjadi syarat mutlak bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif ini merupakan salah satu tantangan yang cukup berat bagi pemerintah daerah saat ini. Komitmen perbaikan iklim investasi ini berupa perbaikan dibidang perundang-undangan (simplifikasi regulasi), pelayanan dan penyederhanaan prosedur serta birokrasi perlu semakin diperkuat dan dimplementasikan.

3) **Masih rendahnya akselerasi pembangunan sektor pariwisata daerah sebagai core bussines baru dalam perekomonian daerah.**

Sektor pariwisata mempunyai peran strategis dalam menciptakan nilai tambah perekonomian daerah. Selain sebagai nilai tambah, sektor pariwisata juga mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga diharapkan sektor pariwisata merupakan sektor yang paling efektif dalam menjawab kebutuhan peningkatan nilai tambah ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan (pro poor) dan penyediaan lapangan pekerjaan (pro job). Tantangan nya ialah bagaimana ketika pandemi ini berakhir kabupaten bangka dapat mendorong kembali pengembangan sektor pariwisata dengan beberapa inovasi sehingga pariwisata kabupaten bangka siap dalam menghadapi kondisi krisis seperti yang kita alami di dua tahun terakhir.

4) **Kontribusi terbesar PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Bangka didominasi oleh ekspor**

dengan kisaran sebesar 36 – 67 persen, terutama yang berasal dari komoditi unggulan seperti karet, kelapa sawit, lada, perikanan, CPO, timah dan industri turunannya. Dengan demikian beberapa sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, agroindustri sangat dipengaruhi oleh praktek perdagangan internasional. transaksi perdagangan internasional sektor unggulan daerah seperti sektor pertanian, pariwisata, agro industri, jasa – jasa, pertambangan dan industri logam dasar akan melahirkan pasar yang tidak sehat dan melebarkan ketidakadilan. Kecenderungan struktur pasar tanpa melalui interaksi penawaran dan permintaan oleh perusahaan merupakan bentuk kegagalan pasar yang akan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

5) **Lemahnya tata kelola kelembagaan ekonomi desa dan pengembangan kemitraan usaha sektor pertanian** dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani lada, karet, kelapa sawit, ubi kasesa dan tapioka. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih dibawah kisaran 100,00. Rendahnya kekuatan posisi tawar petani disisi hulu menyebabkan tingkat keuntungan yang diperoleh atas

penjualan produk pertanian menjadi rendah, tingkat keuntungan yang seharusnya diperoleh petani justru diperoleh para pedagang dan pelaku usaha lainnya di sektor hilir.

6) Pengembangan Rantai nilai (Value Chain) produksi komoditas sektor unggulan masih belum berjalan dengan baik. Berdasarkan laporan World Bank, partisipasi Indonesia dalam sistem rantai nilai global (global value chain) masih belum maksimal akibat ketidakfokusan dalam pengembangan produk perdagangan dan inefisiensi biaya pelabuhan. Untuk itu menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Bangka dengan kekayaan komoditi unggulan untuk mengembangkan value chain komoditas agar bilai tambah produk dapat tercipta yang pada ujungnya berdampak pada membaiknya ekonomi secara inklusif.

7) **Keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang masih rapuh.** Sehingga berdampak pada kinerja sektor unggulan (sektor basis) yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian sebagai sumber pertumbuhan. Selanjutnya, rendahnya keunggulan komparatif sektor unggulan tersebut mengakibatkan pemenuhan kebutuhan wilayah termasuk ke daerah lain belum dapat terpenuhi sepenuhnya. Perlu adanya suatu konsep pengembangan wilayah dimana dapat mengintegrasikan satu pusat pertumbuhan ekonomi dengan pusat pertumbuhan lainnya sehingga terjadi kesinambungan dalam proses input output produksi sektor unggulan yang akhirnya dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar.

8) **Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian** akan tetapi belum didukung dengan pembiayaan yang optimal. Sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian bangka dengan kontribusi mencapai ±57,24 persen dari total PDRB Kabupaten Bangka. Berdasarkan data Dinas UMKM, sebanyak 99,99 persen dari total pelaku usaha atau setara dengan 11.000 pelaku usaha berasal dari UMKM dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, yakni mencapai 79,01 persen dari total tenaga kerja. Permasalahan terbatasnya daya dukung pembiayaan jangka panjang dari sektor keuangan formal dalam pembangunan daerah melalui pengembangan skema

mikro kredit tanpa agunan dan tanpa bunga. Kondisi jasa keuangan saat ini masih didominasi oleh sektor perbankan yang memiliki basis sumber dana jangka pendek sedangkan pemanfaatan pasar modal masih terbatas sehingga akses perkreditan melalui bank konvensional sulit untuk dipenuhi oleh UMKM.

9) **Inkonsistensi komitmen bersama dalam penguatan dan kerjasama** yang kooperatif antar daerah untuk mengurangi kesenjangan dalam kebijakan perekonomian sehingga mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tahan terhadap krisis. Peran penting pemerintah provinsi menjadi krusial dalam menjaga stabilitas regional. Keberhasilan pembangunan daerah merupakan hasil kolaborasi yang harmonis melalui kerjasama daerah baik pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi maupun dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Kurangnya implementasi terhadap kesepakatan kebijakan yang diambil dalam forum koordinasi daerah menyebabkan permasalahan yang seharusnya dapat diatasi menjadi terulang kembali.

3.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bangka pada tahun 2023 baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Untuk melihat gambaran kondisi perekonomian untuk tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8
Prediksi Kondisi Ekonomi
Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan Tahun 2026

No	Indikator Makro	2025				2026			
	Lapangan Usaha (HK)	PDRB Harga Konstan (Milyar)	%	PDRB Harga Berlaku (Milyar)	%	PDRB Harga Konstan (Milyar)	%	PDRB Harga Berlaku (Milyar)	%
1	Lapangan Usaha (HK)								
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.498,84	20,57	4.641,50	22,33	2.695,41	21,27	5.092,82	23,23
	Pertambangan dan Penggalian	1.469,17	12,10	1.583,69	7,62	1.463,94	11,55	1.589,84	7,25
	Industri Pengolahan	2.810,00	23,14	5.002,80	24,07	3.020,53	23,84	5.360,55	24,45
	Pengadaan Listrik dan Gas	25,07	0,21	47,41	0,23	25,86	0,20	49,50	0,23
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	2,50	0,02	4,74	0,02	2,59	0,02	4,99	0,02

No	Indikator Makro	2025				2026			
	Lapangan Usaha (HK)	PDRB Harga Konstan (Milyar)	%	PDRB Harga Berlaku (Milyar)	%	PDRB Harga Konstan (Milyar)	%	PDRB Harga Berlaku (Milyar)	%
	Kontruksi	973,94	8,02	1.979,73	9,52	977,42	7,71	2.079,52	9,48
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.383,94	11,39	2.763,80	13,30	1.439,42	11,36	2.819,00	12,86
	Transportasi dan Pergudangan	304,81	2,51	495,30	2,38	328,71	2,59	521,70	2,38
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	336,32	2,77	652,46	3,14	341,18	2,69	694,74	3,17
	Informasi dan Komunikasi	456,55	3,76	525,16	2,53	486,98	3,84	561,22	2,56
	Jasa Keuangan dan Asuransi	317,49	2,61	489,10	2,35	317,63	2,51	489,10	2,23
	Real Estet	441,08	3,63	725,47	3,49	457,14	3,61	740,15	3,38
	Jasa Perusahaan	26,08	0,21	53,45	0,26	27,14	0,21	56,35	0,26
	Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	569,57	4,69	933,21	4,49	552,46	4,36	967,68	4,41
	Jasa Pendidikan	259,10	2,13	491,73	2,37	260,17	2,05	484,90	2,21
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,27	1,19	225,91	1,09	151,39	1,19	239,12	1,09
	Jasa Lainnya	126,89	1,04	170,60	0,82	123,25	0,97	174,75	0,80
	JUMLAH	12.145,62	100,00	20.786,06	100,00	12.671,19	100,00	21.925,92	100,00
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	3,79				4,33			
3	Tingkat Laju Indeks Implisit PDRB	4,39				4,13			
4	Pengangguran Terbuka	4,77				4,49			
5	Angka Kemiskinan	4,23				4,13			
6	PDRB Per Kapita	60,75				63,95			

Sumber : Bappeda Kab. Bangka, diolah, 2025

Dari proyeksi prospek ekonomi diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2026 ada tiga kontributor ekonomi utama kabupaten bangka yakni sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi masing-masing sebesar 24,45 % untuk industri pengolahan, 23,23% untuk sektor pertanian,kehutanan,perikanan dan 12,98% untuk Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara untuk sektor pertambangan di proyeksikan mengalami penurunan menjadi 12,86% pada tahun 2026 Fenomena ekonomi ini menunjukkan bahwa kabupaten bangka dengan upaya-upaya dibeberapa tahun kebelakang telah berhasil menghilangkan ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan atau telah

bertransformasi ekonomi dari yang semula bergantung kepada sektor pertambangan menjadi ke sektor industri pengolahan dan pertanian. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan besar juga mengindikasikan adanya keberhasilan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah selama ini dalam mendorong pembangunan kepariwisataan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan kabupaten bangka.

Adapun intervensi kebijakan spesifik 2026 dalam mendorong pencapaian target pembangunan jangka pendek daerah antara lain :

1) Mendorong Laju Produksi Sektor Unggulan Daerah terutama Perkebunan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Industri dan Pariwisata sebagai upaya transformasi ekonomi. Pengembangan potensi sektor unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi akan terus dilakukan termasuk pengembangan industri yang disertai penguatan kapasitas produksi dan pemasaran. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama UMKM dilakukan melalui pemberian keterampilan, pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan, bantuan pinjaman modal usaha, pengembangan wirausaha baru dan pemberian subsidi dan sarana dan prasarana produksi target-target usaha kecil dalam mendorong penguatan daya saing produk termasuk fasilitasi promosi produk-produk industri dan promosi pariwisata serta menjalin kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata.

Gambar 3.10
Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Trend Pertumbuhan Ekonomi yang terus Melambat

2) Perluasan Pasar Ekspor Komoditi Unggulan Daerah. Kebijakan ini mutlak diperlukan mengingat adanya hambatan perdagangan terhadap komoditi minyak sawit (palm oil) dari Uni Eropa mengingat kawasan tersebut menjadi importir terbesar sehingga untuk menyelamatkan ekspor daerah perlu dilakukan perluasan akses pemasaran ke negara - negara potensial lainnya terutama dikawasan Afrika dan Asia agar porsi ekspor menjadi lebih besar di masa yang akan datang. Fakta tersebut diperkuat dengan laporan analisis lembaga keuangan dan ekonomi dunia yang menyebutkan kawasan asia menjadi barometer perdagangan dunia (emerging market)dalam beberapa tahun mendatang, mengingat hampir 30 - 40 persen output dunia berasal dari kawasan tersebut dan potensi ini perlu segera disiasati melalui penguatan dan perluasan kerjasama perdagangan.

3) Mendorong Investasi Berbasis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kearah Sektor - Sektor Ekonomi yang Produktif dan Efisien. Peranan investasi perekonomian daerah cukup signifikan dengan rataan tingkat pertumbuhan dan kontribusi masing – masing mencapai 5,69 persen dan 23,74 persen. Investasi yang digelontorkan dalam perekonomian ibaratkan suplemen utama yang akan mendrive siklus bisnis berjalan lebih aktif dan ekonomis. Namun dalam banyak kasus seringkali investasi yang ditanamkan kadang memiliki hasil (return) yang

tidak maksimal dibandingkan hasil yang seharusnya diterima. Oleh sebab itu, pendekatan ICOR sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kebocoran/inefektif sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).Tingkat kebocoran pembangunan daerah sendiri jika dibandingkan dengan nasional hampir sebesar 7,04 persen, sehingga nantinya investasi yang akan mendanai pembangunan daerah diprioritaskan pada sektor – sektor ekonomi yang ICOR-nya tergolong baik yakni berada dikisaran 3 – 4 seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

4) Meningkatkan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Kewirausahaan dewasa ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu daerah. Semakin besar jumlah wirausahawan menunjukkan semakin maju dan mapan suatu daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemuda sebagai pionir dan pelopor perubahan dapat diikutsertakan dalam menggerakkan sektor perekonomian daerah melalui pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda yang belum memulai usaha, pelatihan penguatan usaha bagi pemuda yang baru memiliki usaha dan pelatihan pengembangan usaha bagi pemuda yang usahanya telah berkembang.

5) Mengurangi Ketergantungan terhadap Sektor Pertambangan. Meskipun memberikan kontribusi besar, namun pertumbuhan sektor ini menunjukkan trend yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung fluktuatif tersebut, menunjukkan bahwa sektor ini tidak dapat terus menerus dijadikan andalan perekonomian. Hal ini disebabkan karena tingkat produksi yang terus berkurang, harga output yang fluktuatif, sifatnya yang unrenewable serta degradasi lahan dan landscape yang sangat tinggi. Sebagai gantinya pengembangan perekonomian harus diarahkan pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi dan real estate.

6) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan descent job. Mengingat kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan masih terbatas, maka diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pada sektor-sektor yang mempunyai efek penggandaan yang tinggi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan seperti Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan penerapan industri 4,0 dan kebijakan padat karya (labor intensive).

7) Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki peran strategis dalam meningkatan perekonomian daerah. Banyaknya kegiatan perekonomian yang dapat dilakukan baik yang dapat memberikan pemasukan keuangan bagi daerah maupun memberikan manfaat kepada masyarakat. Disamping itu, perkembangan perekonomian global yang sarat dengan kompetensi menutut setiap BUMD untuk dapat mengelola bidang usahanya secara produktif, efisien, kompetitif dan berkelanjutan (sustainable competitive advantage). Sehubungan dengan peningkatan daya saing tersebut, PD. Agro Lestari Mandiri dan PDAM Tirta Bangka harus memiliki corporate plan yang jelas baik dengan kemampuan SDM yang memiliki komitmen untuk mengembangkan perusahaan yang pada akhirnya dapat menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan jasa dan penyediaan kebutuhan tertentu dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran.

8) Peninggkatan supply komoditi unggulan berdaya saing diiringi dengan proteksi sosial. Kebijakan ini diambil dalam menghadapi resesi global yang akan berdampak secara massif sehingga perlu peningkatan produktifitas komoditi unggulan yang terhilirisasi agar stabilitas ekonomi terjaga dan diiringi dengan jaminan perlindungan sosial untuk menghadapi potensi krisis ekonomi

9) Mendorong Investasi Agro Industri dan Industri Hilir Pertanian yang akan Berdampak Signifikan terhadap Aktivitas Perekonomian Daerah. Komoditi investasi yang didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah investasi industri biogas, tapioka, karet dan CPO. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, investasi industri di sektor unggulan semakin meningkat, salah satunya akan dioperasikannya pabrik tapioka Puding Besar, Pertumbuhan investasi inilah yang memiliki keterkaitan backwardlinkage dan forward linkage

yang mampu memperbaiki kondisi perekonomian saat ini. Peningkatan investasi pada sektor unggulan akan menciptakan jenis usaha-usaha baru yang mampu memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

10) Memperbaiki Tata Niaga Pertanian. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pasar domestik dan memperkuat daya saing produk pertanian. Kebijakan daerah terkait tata niaga lebih kearah penguatan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut terdiri dari tarif/pajak/regulasi terkait ekspor dan impor produk pertanian yang dilakukan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri ditengah ketidakpastian kondisi perekonomian global yang mempengaruhi harga komoditas unggulan daerah.

11) Mendorong Pembangunan Infrastruktur Pertanian. Peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah sangat vital dengan memberikan kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka 2024 hingga sebesar 21,84 persen sehingga pemerintah daerah terus berusaha untuk menyediakan infrastuktur yang memadai mulai dari proses industri hingga pemasaran. Akses jalan yang memadai sangat mempermudah akses hasil usaha tani ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke pelabuhan. Konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertambangan diarahkan pada perbaikan dampak dari kerusakan tanah yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas pertanian.

12) Memperkuat Kelembagaan Kelompok Petani. Semakin ketatnya persaingan di bidang perekonomian dewasa ini menyebabkan pelaku usaha yang efisienlah yang akan memenangi persaingan. Perhimpunan antara kelompok petani dan pengusaha kecil yang sebagian besar mendominasi pelaku ekonomi di daerah diharapkan dapat memperoleh manfaat yang sangat besar bagi tingkat kesejahteraan daerah. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan kelompok petani, pengembangan jaringan kemitraan bisnis dan peningkatan daya saing.

13) Merubah Struktur Pasar Olygopsoni pada Komoditi Pertanian. Munculnya fenomena pasar oligopsoni pada komoditi pertanian terutama komiditas unggulan daerah (lada, karet, sawit, dan perikanan) menyebabkan terjadinya kegagalan pasar (market failure) yang berdampak terhadap disparitas penguasaan sumber daya yang dapat menyebabkan pengaturan harga. Price taker seharusnya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar (supply dan demand) bukan berdasarkan kesepakatan harga di tingkat penjual. Regulasi terkait perijinan usaha dan kemudahan investasi melalui PTSP akan mendorong partisipasi perusahan baru dan ikut dalam persaingan usaha yang berdampak pada perubahan struktur pasar menjadi lebih kompetetif (clearing market). diantaranya dengan resi Gudang, menjual langsung ke negara end user dan pembentukan BUMD pertanian dan menjalankan program contract farming.

14) Pemasaran Pariwisata Daerah. Tourism Marketing identik dengan konsep yang ditawarkan baik branding, advertising, selling, paid media, social media, endorsement yang bertujuan untuk dapat menarik sebanyak mungkin wisatawan untuk dapat meraup sebesar – besarnya pendapatan dari wisatawan tersebut. Disamping itu, pentingnya meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positip pariwisata daerah yang disertai identifikasi terhadap destinasi pariwisata melalui pendekatan segmen pasar personal, pasar bisnis dan pemerintah. Triatlon Sungailiat sebagai “wisata ciptaan” perlu dikemas secara khusus dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata Bangka yang mendunia.

15) Pembangunan Destinasi dan Industri Pariwisata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata dalam rangka menunjang daya saing pariwisata daerah. Pembangunan infrastruktur penunjang yang terintegrasi terutama terhadap destinasi wisata unggulan seperti Tanjung Pesona Beach, Parai Tenggiri Beach, Kebun Raya Rimbe Mambang dan Puri Tri Agung yang memiliki keunggulan komperatif terhadap daya dukung KEK Pantai Timur Sungailiat. Pengembangan destinasi wisata seperti kuliner (nasi aruk), sejarah (situs kota kapur) dan religi (mandi belimau) dan wisata ekologi dan pertualangan (Desa Berbura) melalui

penguatan kelompok sadar wisata, fasilitasi investasi usaha pariwisata dan menerapkan standar green hotel di zona pengembangan wisata bahari dan ekologi.

16) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata. Penguatan jaringan kelembagaan pariwisata yang telah ada terutama kelembagaan pariwisata di tingkat masyarakat menimbang embrio tersebut sudah lama terbentuk. Selain itu, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) akan mendorong pembangunan pariwisata ketitik yang lebih tinggi. BPPD yang terdiri dari elemen pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan media (pentahelix) sangat mutlak diperlukan mengingat keberhasilan pariwisata tanpa adanya dukungan manajerial disisi kelembagaan akan sulit tercapai.

    Pembangunan sektor pariwisata tentu saja harus dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan spending of money yang akan berdampak pada peningkatan kontribusi PDRB sektor pariwisata daerah. Apalagi ditengah ketidakpastian sekarang ini, sektor pariwisata dituntutuntuk mampuberadaptasi di segala kondisi. Begitu juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bergerak di sektor ini. Penambahan jurusan pariwisata di jenjang sekolah menengah kejuruan melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan dukungan beasiswa ke sekolah tinggi kepariwisataan menjadi bentuk komitmen daerah dalam menjawab tantangan dan permasalahan terkait sumber daya manusia.

17) Pengembangan Wilayah Berbasis Karakter Sumber Daya, Penataan Ruang dan Cluster. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka mendorong terjadinya pertumbuhan wilayah secara lebih optimal, maka diperlukan pemetaan potensi wilayah berdasarkan sumber daya seperti karekteristik fisik, kependudukan dan ekonomi yang dapat dikembangkan di masing-masing wilayah. Identifikasi kedua dengan melakukan mapping sektok basis. Pengembangan wilayah Kecamatan Sungailiat dan Pemali difokuskan kepada pembangunan sektor industri, jasa-jasa, komunikasi dan administrasi pemerintahan, hiburan dan rekreasi. Sedangkan wilayah lainnya difokuskan kepada sektor air minum (Merawang), Kehutanan (Belinyu), Mendo Barat (Tanaman Pangan), Riau Silip (kehutanan), Bakam

(Tanaman Pangan) dan Puding Besar (Perkebunan). Dalam dimensi spasial, kebijakan pengembangan daerah tersebut tetap memperhatikan pola tata ruang.

18) Stimulus Fiskal untuk Sektor Pertanian, IKM & UMKM. Pengembangan kapasitas industri dan produksi sektor pertanian dan UMKM melalui penjaminan mikro kredit melalui JAMKRIDA, skema mikro kredit tanpa bunga dan tanpa anggunan untuk IKM dan UMKM melalui Bank Sumsel Babel, mikro kredit tanpa Bunga tanpa agunan khusus petani Kelapa Sawit Rakyat di Bank Syariah Indonesia, subsidi sarana produksi untuk petani dan BBM untuk nelayan melalui APBD dan bantuan yang tidak dalam bentuk fiskal antara lain bantuan bibit tanaman, ikan dan bantuan sarana produksi untuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan.
19) Mendorong Peran Pemerintah Desa dalam Perekonomian. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan melalui Alokasi Anggaran Desa (ADD) melalui APBD yang besarannya terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan ADD ini digunakan untuk mengintervensi dan mendorong perekonomian desa. ADD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan.
20) Proteksi Input dan Ouput Produksi. Proses transformasi input produksi menjadi output produksi menjadi prasyarat penting dalam peningkatan kapasitas produksi dalam rangka menjaga momentum perekonomian daerah. Disisi input, bentuk proteksi dilakukan melalui kestabilan harga bahan baku komoditas ungulan daerah (lada, karet, sawit, perikanan dan bijih timah), menjamin ketersediaan dan distribusi bahan baku dalam rangka memperlancar proses produksi. Di sisi output, proteksi dilakukan melalui peningkatan nilai tambah produk (value added), penentuan harga ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, memperkuat regulasi perizinan, investasi dan kemudahan berusaha, memperluas akses pemasaran produk melalui penguatan koperasi dan UMKM, promosi produk unggulan daerah dan kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya.

21) Menjaga Inflasi Daerah. Stabilitas harga dilakukan melalui kebijakan fiskal daerah untuk mengurangi sisi permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS) melalui kebijakan menaikkan tarif pajak daerah terhadap sektor usaha diluar kelompok bahan makanan atau dengan mengenakan pajak daerah baru dalam koridor UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melakukan efisiensi pengeluaran belanja pemerintah terutama terhadap program dan kegiatan yang tidak memiliki keunggulan kompetitif dan keuanggulan komperatif serta memberikan stimulus bantuan pinjaman modal usaha pada UMKM yang bergerak sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, kelauatan, perikanan, industri dan pariwisata).

22) Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Perekonomian antar Daerah. Menimbang krusialnya peran pemerintah daerah, diperlukan suatu wadah yang mensinergikan arah kebijakan ekonomi antar daerah dalam rangka mendorong pengembangan perekonomian daerah sekaligus membahas berbagai isu strategis terkait dengan perekonomian daerah sekaligus menghasilkan arah kebijakan yang bersifar strategis bagi kepentingan daerah. Diharapkan, koordinasi ini mampu mendorong wadah ini juga mampu mendorong upaya perbaikan iklim usaha dan investasi daerah, peningkatan ekspor, dan percepatan program hilirnisasi industri.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Hasil analisis dan prakiraan sumber-sumber pendapatan daerah, pagu serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 sampai dengan 2026 disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2024 s/d 2026

No	Uraian	Proyeksi		
		Tahun Berjalan 2024 (n-2)	Rencana Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026 (n)
A	Pendapatan Daerah	1.274.451.441.612	1.180.791.433.200	1.190.791.433.200
1	Pendapatan Asli Daerah	182.921.732.588	207.092.732.600	212.092.732.600

No	Uraian	Proyeksi		
		Tahun Berjalan 2024 (n-2)	Rencana Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026 (n)
	a Hasil Pajak Daerah	77.325.500.000	103.001.800.000	108.001.800.000
	b Hasil Retribusi Daerah	93.938.402.588	93.890.402.600	93.890.402.600
	c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.300.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000
	d Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.357.830.000	3.700.530.000	3.700.530.000
2	**Pendapatan Transfer**	**1.091.529.709.024**	**973.698.700.600**	**978.698.700.600**
	a Transfer Pemerintah Pusat	**1.000.239.675.000**	**915.665.812.000**	**915.665.812.000**
	1 Dana Perimbangan	**917.804.940.000**	**839.972.482.000**	**839.972.482.000**
	a Dana Transfer Umum	**679.931.938.000**	**669.155.277.000**	**669.155.277.000**
	1 Dana Bagi Hasil	131.303.430.000	100.568.122.000	100.568.122.000
	2 Dana Alokasi Umum	548.628.508.000	568.587.155.000	568.587.155.000
	b Dana Transfer Khusus	**237.873.002.000**	**170.817.205.000**	**170.817.205.000**
	1 DAK Fisik	103.188.726.000	23.631.350.000	23.631.350.000
	2 DAK Non Fisik	134.684.276.000	147.185.855.000	147.185.855.000
	2 Insentif Fiskal	**22.958.813.000**	**15.785.588.000**	**15.785.588.000**
	3 Dana Otonomi Khusus	-	-	-
	4 Dana Keistimewaan	-	-	-
	5 Dana Desa	**59.475.922.000**	**59.907.742.000**	**59.907.742.000**
	b Transfer Antar Daerah	**91.290.034.024**	**58.032.888.600**	**63.032.888.600**
	1 Pendapatan Bagi Hasil	86.290.034.024	58.032.888.600	58.032.888.600
	2 Bantuan Keuangan	5.000.000.000	-	5.000.000.000
3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	-	-	-
	a Hibah	-	-	-
	b Dana Darurat	-	-	-
	c Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-

Sumber : BPPKAD Kabupaten Bangka, diolah, 2025

Berdasarkan pada proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut diatas, maka penerimaan pendapatan daerah diperkirakan mengalami stagnasi. Jika pada tahun 2025 pendapatan daerah mencapai 1,180 triliun rupiah,-, maka pada tahun 2026 diproyeksikan meningkat menjadi 1,190 triliun rupiah..

Kemampuan penerimaan berimplikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan dan sangat berperan terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Kemampuan pembiayaan pembangunan daerah merupakan cerminan dari penerimaan pendapatan daerah, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut berasal dari beberapa komponen sumber pendapatan daerah dengan rincian sebagaimana tabel diatas.

1) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 diproyeksikan sebesar 207,09 milyar rupiah, diperkirakan pada tahun 2026 meningkat menjadi sebesar 212,09 milyar rupiah. PAD tahun 2026 diproyeksikan berasal dari :
   - Pajak Daerah diperkirakan sebesar 108,01 milyar rupiah;
   - Retribusi Daerah diperkirakan sebesar 93,89 milyar rupiah;
   - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperkirakan sebesar 6,5 milyar rupiah;
   - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan sebesar 3,7 milyar rupiah.
2) Penerimaan Pendapatan Transfer tahun 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan yakni sebesar 978,69 Milyar rupiah atau naik sebesar 0,51 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun 2025 yang hanya mencapai 973,69 Milyar rupiah yang berasal dari :
   - Transfer Pemerintah Pusat di perkirakan sebesar 915,66 milyar rupiah;
   - Transfer antar daerah diperkirakan sebesar 63,03 milyar rupiah;

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (public service function), dan melaksanakan pembangunan (development function). Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2026 di fokuskan adalah sebagai berikut :

1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah yang Memiliki Keunggulan Komperatif dan Kompetitif.

   Pilihan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam memobilisasi dana, terutama sumber-sumber dana yang secara langsung telah dikelola dan dapat dikembangkan seperti pajak daerah dan retribusi daerah, dengan melihat pendapatan daerah yang memang memiliki nilai potensi yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain, memiliki efek pengganda yang besar bagi pendapatan daerah dan dipastikan memiliki potensi yang lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan daerah lainnya.
   Sejalan dengan hal tersebut, upaya peningkatan Pendapatan Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

   (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi dan diversifikasi pajak dan retribusi daerah.
   Intensifikasi pendapatan daerah merupakan upaya peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun

belum tergarap atau terjaring pajak/retribusi serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi pendapatan dapat dilakukan dengan cara: penyempurnaan administrasi pajak/retribusi, peningkatan mutu pegawai dan petugas pungut, serta penyempurnaan regulasi pajak/retribusi.

Intensifikasi pendapatan antara lain dilakukan dengan memperbaiki administrasi pajak, mempermudah pembayaran pajak melalui e-banking, membuka payment point Bank Sumsel Babel di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka, pembayaran pajak dan retribusi melalui mekanisme non tunai, pembayaran IMB melalui Kecamatan melalui program PATEN, memperbanyak dan meningkatkan kualitas petugas pungut, dan melakukan perubahan terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Ekstensifikasi pendapatan merupakan upaya memperluassubyek dan obyek pajak/retribusi serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pendapatan dapat dilakukan dengan cara: perluasan wajib pajak/retribusi, penyempurnaan tarif, dan perluasan objek pajak/retribusi.

Ekstensifikasi pajak yang dilakukan adalah dengan meninjau ulang tarif PAD yang bersumber dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, BPHTB, dan PBB. Peninjauan ulang dan rasionalisasi tersebut dapat meningkatkan PAD yang berasal pajak daerah. Selanjutnya untuk retribusi daerah dilakukan dengan cara penyesuaian tarif pada retribusi pelayanan retribusi umum, retribusi pelayanan sampah, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi tempat parkir khusus, retribusi IMB dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Selain itu juga dengan memperluas wajib pajak/retribusi dan objek pajak/retribusi.

Diversifikasi Pendapatan adalah upaya untuk memperbanyak sumber pendapatan lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan antara lain melalui peningkatan target dividen dari Bank Sumsel

Babel dan Bank Syariah Bangka, meningkatkan kontribusi asset yang dikerjasamakan dan penjualan asset lainnya. Selain itu juga dengan mencari sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

(2) Optimaliasai PAD dari sisi Pajak dengan pemanfaatan Aplikasi Sedulang.

(3) Meningkatkan koordinasi antara SKPD yang mengelola pendapatan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait bidang pendapatan daerah. Koordinasi ini ditujukan untuk meningkatkan dana perimbangan dan Dana Bantuan dari Pusat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kabupaten Bangka.

(4) Melakukan peninjauan ulang (reviu) terhadap seluruh pemanfaatan asset daerah (Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)) terutama terkait Kerjasama Pemanfaatan dan KSPI.

(5) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha yang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Bangka agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah antara lain melalui deviden dari Bank Sumsel Babel, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung, PT. Jaminan Kredit Daerah (PT. Jamkrida), Bank Rakyat Indonesia dan PD.Agro Alam Lestari, Perumda. Tirta Bangka.

(6) Optimalisasi pendapatan daerah melalui inventarisasi dan pendayagunaan kepemilikan-aset daerah, melalui optimalisasi penggunaan aset Pemda dan penjualan kekayaan daerah lainnya.

(7) Menerapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dan memberikan reward kepada wajib pajak maupun petugas pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan melampaui target. Upaya ini dilakukan melalui pemasangan banner terhadap objek pajak/retribusi yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu untuk meningkatkan pembayaran IMB maka dilakukan program pemutihan IMB.

2) Mendorong Kepemilikan Saham PT. Timah Tbk untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Secara historis, Kepulauan Bangka Belitung telah dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar di dunia yang telah dilakukan semenjak abad ke – 7 yang lampau. Eksplorasi pertambangan yang dilakukan secara masif tersebut, tentu saja menjadikan Sektor pertambangan dan penggalian sebagai katalisator utama penggerak perekonomian daerah sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Namun tragisnya, sektor unggulan ini memiliki keterbatasan dan akan habis pada suatu waktu, sehingga perlu dilakukan transformasi ekonomi dari sector pertambangan ke sektor pariwisata.

Kebijakan ini dilakukan dengan mengajukan permintaan atas kepemilikan saham PT. Timah Tbk terhadap komposisi saham yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Selama ini daerah hanya mendapat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan bagi hasil atas ekspor bijih timah. Kepemilikan saham ini diharapkan mampu mendorong penerimaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Peningkatan Pendapatan Melalui Reformasi dan Regulasi Pendapatan Daerah.

Kebijakan ini dilakukan dengan menderegulasi perda-perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan penyesuaian tarifpajakdan retribusi daerah dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha dan menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan perdagangan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam menunjang kemandirian fiskal sekaligus penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka berdasarkan hasil intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh objek Pendapatan Asli Daerah diperoleh beberapa objek PAD yang memang mempunyai keunggulan komperatif dan kompetitif dibandingkan objek PAD lainnya yakni (1) lain-lain PAD yang sah; dan (2) pajak daerah.

4) Mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer Daerah.

Upaya yang dilakukan dalam mendorong pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer daerah adalah sebagai berikut:

1) Memperbaiki kinerja pemerintahan dibidang – bidang pemerintah yang menjadi formula pengalokasian Dana Insentif Daerah yang dibagi menjadi 4 kategori kinerja utama yaitu i) pengelolaan keuangan meliputi aspek peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; ii) pelayanan pemerintahan umum meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), inovasi pelayanan publik dan kemudahan investasi; iii) pelayanan dasar publikmeliputi pelayanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastruktur, daniv) kesejahteraan yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat. (DID regular dan DID kinerja)
2) Memperbaiki struktur data yang menjadi penentu dalam variabel perhitungan DAU dan DAK.
3) Meningkatkan upaya rekonsiliasi data wajib pajak baik orang pribadi maupun badan pasca amnesti pajak terutama adanya penambahan wajib pajak baru yang akan berimbas positip bagi daerah pada masa mendatang.
4) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan pengawasan produksi perusahaan pertambangan dan migas.
5) Meningkatkan upaya rekonsiliasi data produksi pertambangan, land rent dan tambang timah.
6) Meningkatkan upaya rekonsiliasi data produksi perikanan dan kehutanan.
7) Meningkatkan sistem informasi kelautan perikanan secara terpadu.
8) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada perairan darat dan melakukan rasionalisasi upaya tangkap pada perairan.
9) Mengingkatkan pengawasan dan pengendalian guna menjamin pengelolaan sumber daya kelautan secara efektif.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dari sisi belanja daerah, reformasi dilakukan agar kualitas belanja terus meningkat sehingga berbagai program prioritas dengan berorientasi hasil dapat diakomodir. Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, belanja APBD diarahkan untuk membantu masyarakat serta pembangunan infrastruktur, bukan untuk pembangunan kantor dan kendaraan dinas pemerintah. Hal ini diharapkan mampu menjaga perekonomian kita tetap stabil dan mampu bertahan dari berbagai krisis yang hadir. Pemerintah Kabupaten Bangka akan terus mendesain, belanja itu menjadi komponen automatic stabilizer. Artinya, waktu ekonomi menekan masyarakat kita membantu, waktu ekonomi membaik maka APBD akan menurun atau scaling down. Sehingga APBD tetap fleksibel dan relatif bisa dijaga sustainabilitas dan kesehatannya.

Selain belanja yang dilakukan OPD, belanja pemerintah daerah yang dananya berasal dari Transfer juga ditingkatkan kualitasnya. DAU dan DBH digunakan untuk mendorong layanan publik. Dana transfer khusus (termasuk DAK fisik dan nonfisik) dialokasikan untuk membantu pelayanan dasar di masyarakat. Sedangkan dana desa digunakan untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi pada tingkat desa. Uraian umum kebijakan belanja perangkat daerah 2026 adalah sebagai berikut:

1) Redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based)

   Reformasi dilakukan agar kualitas belanja terus meningkat sehingga berbagai program prioritas dengan berorientasi hasil dapat diakomodir. Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas baik di Kabupaten maupun di desa. Dengan demikian, belanja APBD diarahkan untuk membantu masyarakat serta pembangunan infrastruktur,pencapaian sasaran pembangunan daerah, bukan untuk pembangunan kantor dan kendaraan dinas pemerintah.

2) Penggunaan e-catalog lokal dan penguatan kandungan Lokal

   Pemerintah Kabupaten Bangka harus membelokkan minimal 40% anggaran belanja untuk membeli produk dalam negeri dengan kebijakan penggunaan e-

catalog lokal ini. Diharapkan geliat perekonomian kabupaten bangka akan meningkat sesuai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang mana telah diuraikan sebelumnya.

3) Peningkatan Belanja dalam rangka optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery) .

4) Meningkatkan efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses bisnis

   Dengan memperhatikan perubahan proses bisnis pemerintahan yang cenderung lebih memanfaatkan teknologi informasi sebagai tools birokrasi, penajaman biaya operasional yang selama ini lebih cenderung gemuk dengan kebutuhan-kebutuhan operasional akan di pertajam sedemikian rupa hingga menemukan titik efisien dan efektif.

5) Peningkatan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan

   Pelayanan Kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas akan tetapi bagaimana pemerintah kabupaten bangka mendorong pemenuhan kebutuhan dasar dengan kerja sama antar daerah atau dengan pihak-pihak terkait sehingga ditengah keterbatasan, APBD dapat menjadi tools Automatc Stabilizer for Economic yang artinya waktu ekonomi menekan masyarakat kita membantu dan waktu ekonomi membaik maka APBD akan menurun atau scaling down.

6) Memprioritaskan belanja untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memperhatikan arahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta arahan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bangka tahun 2024 – 2026 yang menyasar pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah yakni (1) pembangunan SDM; (2) pemulihan ekonomi, (3) pemerataan kesejahteraan; (4) pengembangan destinasi pariwisata; (5) infrastruktur; (6) lingkungan hidup; dan (7) reformasi birokrasi.

7) Memprioritaskan alokasi dana hibah terutama untuk mencapai sasaran pembangunan manusia khususnya kepada lembaga-lembaga yang secara langsung

membantu capaian kinerja pemerinatah daerah seperti MUI, PMI, KONI, BAZNAS, Pramuka, insentif GTT/PTT tingkat SD/SMP swasta, BOS tingkat SD/SMP swasta, insentif guru TK, guru PAUD serta beberapa lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Dan mengealokasikan dana hibah untuk mendukung rangkaian kebijakan pemilukada ulang tahun 2025.

8) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan manusia yang difokuskan pada pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.
9) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan sektor unggulan yang difokuskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pariwisata dan UMKM.
10) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pemerataan antar kelompok pendapatan merupakan bentuk lain dari penanggulangan kemiskinan. Percepatan pengurangan kemiskinan dilakukan melalui penguatan sector keuangan mikro dan koperasi, perluasan kesempatan dan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan pelayanan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pertama berupa program bantuanberbasis keluarga, kedua program pemberdayaan masyarakat, ketiga program pemberdayaan usaha kecil dan mikro dan keempat program pro rakyat. Pembangunan kewilayahan diarahkan pada penguatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa, peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Di lain sisi, pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan menjadi sangat penting bagi perkembangan wilayah karena variabel ini menjadi bagian integral dari pembangunan perekonomian dan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Prioritas penggunaannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat serta meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui dukungan pelayanan prasarana sesuai dengan perkembangan kebutuhan khususnya pada koridor-korodor utama perekonomian kecamatan.

11) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi berwawasan lingkungan.

Fungsi lingkungan mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim dan gangguan bencana lainnya. Arah kebijakan belanja diarahkan pada:

- Optimalisasi Pengelolaan Persampahan
- Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Runag
- Revitalisasi Sektor pertanian
- Pengendalian Kerusakan Lingkungan
- Peningkatan Kemampuan Penanggulangan Bencana

12) Mengalokasikan Belanja Tidak Terduga. pengalokasian belanja tidak terduga dalam menghadapi berbagai kemungkinan menjadi hal yang sangat penting agar ketika krisis melanda Kabupaten Bangka sudah menyiapkan anggaran untuk meminimalisir dampak akibat krisis.

13) Mengelola difisit anggaran dalam batas yang diperkenankan.

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menjaga momentum dan akselarasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan besaran defisit tidak lebih dari 3 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sertaPeraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah.

Selengkapnya pagu dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka tahun 2024 - 2026 tersaji pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2024 s.d. 2026

No	Uraian	Proyeksi		
		Tahun Berjalan 2024 (n-2)	Rencana Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026 (n)
B	**Belanja Daerah**	**1.306.517.923.673**	**1.188.782.587.415**	**1.199.825.540.800**
1	**Belanja Operasi**	**996.021.912.769**	**958.143.692.892**	**961.811.962.000**
	a Belanja Pegawai	489.543.850.453	581.244.163.607	581.356.485.400
	b Belanja Barang dan Jasa	441.562.181.482	351.424.136.713	354.980.084.100
	c Belanja Bunga	-	-	-
	d Belanja Subsidi	1.321.936.250	1.350.000.000	1.100.000.000
	e Belanja Hibah	57.405.410.586	19.126.402.072	19.326.402.000
	f Belanja Bantuan Sosial	6.188.533.998	4.998.990.500	5.048.990.500
2	**Belanja Modal**	**169.795.097.652**	**87.070.007.760**	**93.401.738.600**
	a Belanja Tanah	-	-	-
	b Belanja Peralatan dan Mesin	37.970.105.780	32.379.517.152	33.115.717.600
	c Belanja Bangunan dan Gedung	41.737.420.571	33.203.399.000	33.703.829.100
	d Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	85.641.346.251	21.397.091.608	26.477.191.900
	e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.426.426.400	-	-
	f Belanja Modal Aset Lainnya	19.798.650	90.000.000	105.000.000
3	**Belanja Tidak Terduga**	**5.570.425.552**	**5.957.046.563**	**6.500.000.000**
4	**Belanja Transfer**	**135.130.487.700**	**137.611.840.200**	**138.111.840.200**
	a Belanja Bagi Hasil	8.629.378.300	11.184.708.300	11.684.708.300
	b Belanja Bantuan Keuangan	126.501.109.400	126.427.131.900	126.427.131.900
	Surplus/(Defisit)	**(32.066.482.061)**	**(7.991.154.215)**	**(9.034.107.600)**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Bangka, diolah, 2025

Belanja daerah tahun 2026 akan di proyeksikan sedikit mengalami peningkatan menjadi 1,199 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 1,188 triliun rupiah. Proyeksi belanja yang demikian apabila dibandingkan dengan proyeksi pendapatan sebagaimana diatas maka terdapat defisit penyediaan dana (penerimaan kurang). Kondisi yang demikian diproyeksikan akan ditutup dari pos pembiayaan yakni sebesar 9,03 milyar rupiah,-.

Mengingat terbatasnya anggaran, maka diperlukan skala prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka tahun 2026 yang diproyeksikan membutuhkan dana belanja operasi sebesar 961,81 milyar rupiah,-, untuk membiayai belanja modal sebesar 93,40 milyar rupiah, belanja tak terduga 6,5 milyar rupiah dan belanja transfer sebesar 141,32 milyar rupiah.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2026 diarahkan pada :

1) Meningkatkan akses pembiayaan permodalan melalui Bank Sumsel Babel.
2) Upaya untuk menutup difisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
3) Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan menjadi piutang daerah dan sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah;
4) Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

Selengkapnya pagu dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Bangka tahun 2024 – 2026 tersaji pada Tabel dibawah ini

Tabel 3.11
Pagu dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2024 s.d. 2026

No	Uraian			Proyeksi		
				Tahun Berjalan 2024 (n-2)	Rencana Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026 (n)
C	**Pembiayaan Daerah**			**34.066.482.061**	**7.991.154.215**	**9.034.107.600**
	a	**Penerimaan Pembiayaan**				
		1)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	33.066.482.061	7.991.154.215	9.034.107.600

No	Uraian			Proyeksi		
				Tahun Berjalan 2024 (n-2)	Rencana Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026 (n)
		2)	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
		3)	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
		4)	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
		5)	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
		6)	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
		Jumlah Penerimaan Pinjaman		**33.066.482.061**	**7.991.154.215**	**9.034.107.600**
	b	**Pengeluaran Pembiayaan**				
		1)	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
		2)	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1.000.000.000	-	-
		3)	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
		4)	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**1.000.000.000**	-	-
	Pembiayaan Netto			**32.066.482.061**	**7.991.154.215**	**9.034.107.600**
	c	**Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**		**-**	**-**	**-**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Bangka, diolah, 2025

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tema, sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka pada Tahun 2026 disusun melalui sinkronisasi dan integrasi seluruh Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Bangka, Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dokumen Perencanaan Nasional, Dokumen Perencanaan Sektoral, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, isu-isu penting pembangunan di tingkat daerah, regional, nasional dan global yang harus segera ditindaklanjuti dan menjadi isu prioritas di daerah serta hasil evaluasi capaian kinerja Kabupaten Bangka Tahun 2024. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan yang telah disusun dapat mewujudkan visi jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 dan tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 serta RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai tema, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2026 sebagai berikut.

4.1. Tema Pembangunan Daerah

Tema pembangunan daerah merupakan gambaran untuk menentukan arah pembangunan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pada tahun yang ditetapkan. Pada tahun 2026, Kabupaten Bangka menghadapi persoalan dan tantangan pembangunan terkait isu-isu di tingkat daerah, regional, nasional dan internasional. Isu-isu yang bersifat strategis harus direspon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka untuk diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah.

Tema pembangunan dimaksudkan sebagai arah pembangunan yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026 disusun dengan menggunakan prinsip

efisiensi, efektifitas, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta terukur secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangundan daerah, tujuan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tujuan pembangunan nasional.

Secara tematik, penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026 didasarkan dengan memperhatikan sasaran strategis pembangunan pada tingkat daerah, regional, nasional dan global yang tertuang dalam beberapa dokumen perencanaan yang meliputi (dapat dilihat pada Gambar 4.1):

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045;
5. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029;
6. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045;
8. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
9. Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Dokumen Ketataruangan Kabupaten Bangka;
11. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2035;
12. Ekonomi Hijau *(Green Economy)* dan Ekonomi Biru *(Blue Economy);*
13. Isu dan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG's);

14. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bangka;
15. Isu Strategis Daerah, Regional, Nasional dan Global; dan
16. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024.

Gambar 4.1
Dasar Penentuan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

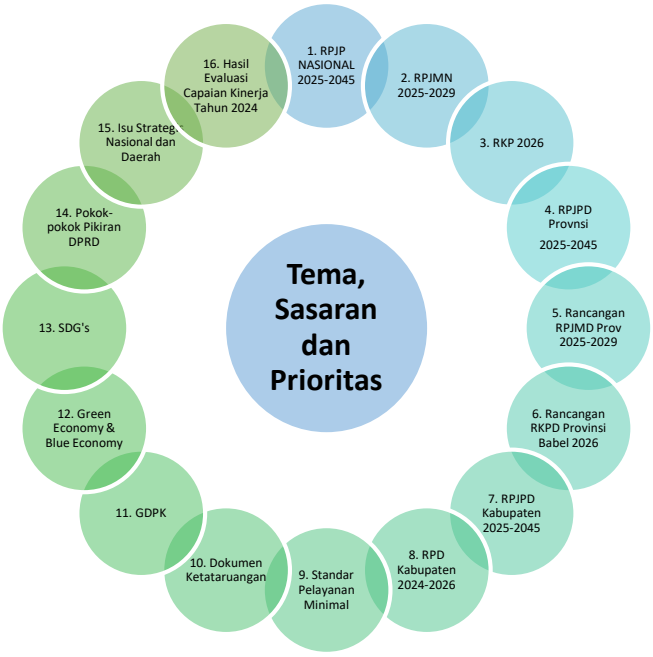

Dengan demikian, tema pembangunan Kabupaten Bangka pada Tahun 2026 didasarkan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. RPJPN Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 mengusung Visi Indonesia Emas Tahun 2045 "**Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**" dengan berlandaskan kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia yang meliputi 1) kependudukan, modal manusia, modal sosial, budaya, kekayaan alam dan kekuatan maritim; 2) perkembangan megatren global dan 3) pencapaian pembangunan periode

sebelumnya. Visi Indonesia Emas Tahun 2045 dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah ini.

Gambar 4.2
Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Sumber : Dokumen RPJP Nasional 2025-2045 (Bappenas RI)

Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dijabarkan melalui 8 (delapan) agenda misi pembangunan 2045 yang dibagi menjadi 3 (tiga) kerangka utama yaitu Tranformasi Indonesia dengan Agenda 1. Transformasi Sosial, Agenda 2. Transformasi Ekonomi, Agenda 3. Transformasi Tata Kelola. Landasan transformasi dengan Agenda 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dan Agenda 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Kerangka Implementasi Transformasi dengan Agenda 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, Agenda 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan dan Agenda 8. Kesinambungan

Pembangunan. Ringkasan misi pembangunan 2045 dapat dilihat pada Gambar 4.3. di bawah ini.

Gambar 4.3
Misi Pembangunan Indonesia 2045 dalam RPJPN Tahun 2025-2045

Sumber : RPJP Nasional 2025-2045 (Bappenas RI)

2. RPJMN Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengusung Tema "Penguatan Transformasi". RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Visi RPJMN ini adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam RPJMN ini mengusung 8 (delapan) misi/asta cita/prioritas nasional yaitu 1) memperkokoh Idiologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi

Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, 3), Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi, 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Ketaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milineal dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas, 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai di Dalam Negeri, 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan, dan 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2026 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2026 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi.

RKP Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Tema pembangunan dalam RKP Tahun 2026 ditetapkan berdasarkan arahan presiden, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, hasil evaluasi kinerja tahun 2024, sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPN untuk mewujudkan Visi

Indonesia Emas 2025-2045, kerangka ekonomi makro, dinamika ketidakpastian global dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian pemerintah maka RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".***

Sesuai dengan tema, RKP Tahun 2026 dijabarkan dalam 2 (dua) fokus yaitu :

1) Pangan dan energi dititikberatkan pada swasembada pangan, energi, dan air yang ditekankan pada optimalisasi BULOG, pelaksanaan *food estate, p*eningkatan bauran ethanol dan biodiesel, energi terbarukan, serta pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
2) Ekonomi dititikberatkan pada :
   a. Ekonomi produktif terdiri dari :
      - Pendidikan dan Kesehatan ditekankan pada ekosistem makan bergizi gratis, percepatan renovasi sekolah, sekolah unggulan, cek kesehatan dan percepatan rumah sakit daerah.
      - Deregulasi dan Kepastian Hukum ditekankan pada reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis dan ketertarikan investasi.
      - Adopsi Teknologi dan Inovasi ditekankan pada transformasi digital serta riset dan Inovasi.
      - Pertahanan Semesta ditekankan pada komponen cadangan pemenuhan alutsista dan penguatan kemampuan territorial.
      - Fiskal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi
   b. Ekonomi inklusif terdiri dari :
      - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi ditekankan pada percepatan hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia dan optimalisasi potensi SWF Danantara.
      - Percepatan Pengentasan Kemiskinan ditekankan pada data tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, 3 juta rumah dan 70.000 koperasi merah putih.

Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

4. RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024. Dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 mengusung Visi "**Babel Bertuah" : Berkelanjutan, Transformatif, Unggul, Maju dan Harmonis.**

Visi **"Babel Bertuah"** dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 ini dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi yaitu :

- Misi 1. SDM Unggul dan Berdaya Saing;
- Misi 2. Ekonomi Biru dan Hijau;
- Misi 3. Transformasi Tata Kelola;
- Misi 4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
- Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- Misi 6. Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung yang Merata dan Berkeadilan;
- Misi 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- Kesinambungan Pembangunan

Gambar 4.4
Misi RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045

Sumber : RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

5. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045 yang mengusung Tema “Fondasi” yaitu Penguatan SDM, ekonomi biru dan ekonomi hijau berbasis agromaritim yang tangguh, hilirisasi timah, serta inisiasi *community-based geo-ecotourism* dan ekonomi kreatif serta bioprospeksi, tata kelola pemerintahan yang mengedepankan supremasi hukum, keamanan,

ketentraman dan pemenuhan sarana prasarana serta mempertahankan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Saat ini, penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 memasuki tahap Rancangan RPJMD. Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 yaitu **"BABEL BERDAYA 2029" Mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berdaya Saing, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera**. Dalam rancangan RPJMD ini mengusung 5 (lima) misi yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial budaya, memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya, meningkatkan daya saing perekonomian dan mengelola sumber daya secara bijak dan berkelanjutan.

6. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

Tema Pembangunan Kabupaten Bangka dalam RKPD Tahun 2026 juga mengacu pada tema pembangunan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka dapat bersinergi dengan pembangunan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026.

Berdasarkan keselarasaan penyusunan perencanaan daerah terhadap arah kebijakan pusat yang tertuang dalam Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RKP Tahun 2026 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045, maka ditetapkan **Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2026** adalah ***"Penguatan Inovasi Menuju Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah secara Berkelanjutan".*** Sesuai dengan tema RKPD ini mengusung 3 (tiga) prioritas daerah yaitu 1) Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, 2) Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan, dan 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Bangka Nomor 7 Tahun 2024 pada tanggal 24 Oktober 2024. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 mengusung Visi Kabupaten Bangka 2045 "**Maju, Mandiri, Berkelanjutan dan Beradab".**

Visi Kabupaten Bangka 2045 "**Maju, Mandiri, Berkelanjutan dan Beradab"** dalam RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 ini dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan daerah yaitu :

- Misi 1. Transformasi Sosial
- Misi 2. Transformasi Pembangunan Ekonomi
- Misi 3. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
- Misi 4. Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Misi 5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi
- Misi 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- Misi 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- Misi 8. Kesinambungan Pembangunan

Dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka tahun 2025 – 2045, tahapan pembangunan ditetapkan dengan 4 (empat) tema pembangunan untuk mewujudkan Bangka Maju, Mandiri dan Berkelanjutan, yaitu Penguatan Pondasi Pembangunan, Akselerasi Pembangunan, Peningkatan Daya Saing di Tingkat Regional dan Nasional, dan Pemantapan Kabupaten Bangka yang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan. Keempat tema Pembangunan ini berfokus pada transformasi Pembangunan, yang diharapkan akan mewujukan Pembangunan Kabupaten Bangka yang kompetitif, produktif dan berkelanjutan. Pada lima tahun pertama (2025-2029), tahapan pembangunan Kabupaten Bangka ditekankan pada

Penguatan Pondasi Pembangunan. Pada lima tahun kedua (2030-2034), tahapan pembangunan Kabupaten Bangka ditekankan pada Akselerasi Pembangunan. Pada lima tahun ketiga (2035-2039), tahapan pembangunan Kabupaten Bangka ditekankan pada Peningkatan Daya Saing di Tingkat Regional dan Nasional. Pada lima tahun terakhir (2040-2045), tahapan pembangunan Kabupaten Bangka ditekankan pada Pemantapan Kabupaten Bangka yang Maju, Mandiri dan Bekelanjutan. Tema pembangunan dua puluh tahunan dapat dilihat pada gambar 4.5 di bawah ini.

Gambar 4.5
Tema Pembangunan Dua Puluh Tahunan

Sumber : RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 (Bappeda Kab. Bangka)

Arah kebijakan pembangunan lima tahunan pada RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang. Selanjutnya, perumusan arah kebijakan pembangunan dibagi ke dalam empat periode RPJMD yaitu periode I (2025-2029), periode II (2030- 2034), periode III (2035-2039), periode IV (2040-2045) yang disajikan pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.1
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 – 2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BANGKA MAJU, MANDIRI, BERKELANJUTAN DAN BERADAB	**Misi 1**: Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	Percepatan Akses Pelayanan dasar & pembangunan SDM berkualitas	Penguatan Daya Saing SDM	Pemantapan Daya Saing SDM dan Keberlanjutan Kesejahteraan Masyarakat
	Misi 2: Transformasi Pembangunan Ekonomi	Penguatan Ekosistem Pendorong Perekonomian	Peningkatan Produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Penguatan Daya Saing ekonomi	Pemantapan Daya Saing Ekonomi berkelanjutan
	Misi 3: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kelembagaan tepat fungsi dan kapabilitas ASN	Peningkatan Kelembagaan Kolaboratif	Penguatan Meritokrasi dan integritas kelembagaan	Pemantapan Meritokrasi dan Integritas Kelembagaan
	Misi 4: Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas, Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas, Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas, Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas, Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan Penguatan pengendalian inflasi daerah

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Misi 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan ketahanan sosial budaya & ekologi sebagai modal dasar pembangunan	Pemantapan ketahanan sosial budaya & ekologi sebagai pendorong ekonomi yang inklusif	Peningkatan ketangguhan daya dukung sosial budaya dan ekologi dalam menghadapi berbagai perubahan	Pemantapan kabupaten bangka sebagai wilayah pembangunan yang berkelanjutan
	Misi 6: Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan	Peningkatan Pemerataan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan hingga level desa	Peningkatan Pemerataan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan hingga level desa	Peningkatan Pemerataan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan hingga level desa	Peningkatan Pemerataan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan hingga level desa
	Misi 7: Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan	Peningkatan Pemerataan Infrastruktur dalam mendukung kemandirian wilayah hingga level desa	Peningkatan Pemerataan Infrastruktur dalam mendukung kemandirian wilayah hingga level desa	Peningkatan Pemerataan Infrastruktur dalam mendukung kemandirian wilayah hingga level desa	Peningkatan Pemerataan Infrastruktur dalam mendukung kemandirian wilayah hingga level desa
	Misi 8: Kesinambungan Pembangunan	Peningkatan Peningkatan kapasitas fiskal dan mendorong pembiayaan kolaboratif dalam mendukung pembangunan wilayah	Peningkatan Peningkatan kapasitas fiskal dan mendorong pembiayaan kolaboratif dalam mendukung pembangunan wilayah	Peningkatan Peningkatan kapasitas fiskal dan mendorong pembiayaan kolaboratif dalam mendukung pembangunan wilayah	Peningkatan Peningkatan kapasitas fiskal dan mendorong pembiayaan kolaboratif dalam mendukung pembangunan wilayah

Sumber : RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045, Bappeda Kabupaten Bangka, 2024

Posisi RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 dalam RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 yaitu pada Tahap Pertama Tahun 2025-2029 dengan Tema Pembangunan "Penguatan Pondasi Pembangunan" yang dapat dilihat pada Gambar 4.6 sebagai berikut.

Gambar 4.6
Posisi RKPD 2026 dalam RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045

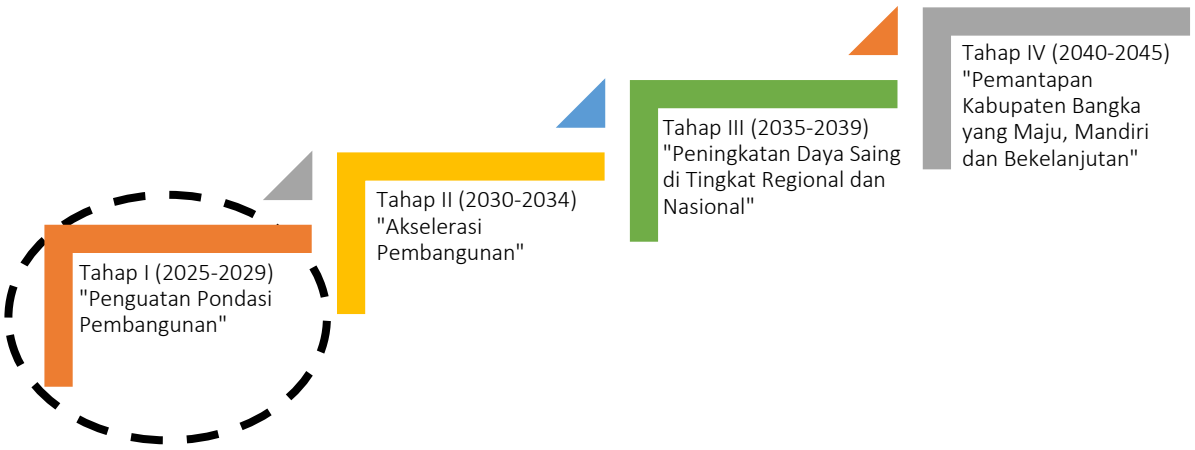

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

Pembangunan Kabupaten Bangka pada periode pertama diarahkan untuk **Penguatan Pondasi Pembangunan.** Prinsip transformasi sebagaimana diusung dalam misi RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 – 2045 pada tahapan pertama (2025 – 2029) ini adalah pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, penguatan ekosistem pendorong perekonomian, peningkatan kelembagaan tepat fungsi dan kapabilitas ASN, penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas, peningkatan kapasitas fiskal daerah dan penguatan pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai modal dasar pembangunan, peningkatan pemerataan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan hingga level desa, peningkatan pemerataan infrastruktur dalam mendukung kemandirian wilayah hingga level desa, dan peningkatan kapasitas fiskal dan mendorong pembiayaan kolaboratif dalam mendukung pembangunan wilayah.

Perubahan besar yang terjadi pada sektor sosial adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran ekonomi dan kemajuan budaya. **Transformasi sosial** akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan yang lebih besar. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka pada baseline tahun 2023 hanya mencapai 8,32 dan harapan lama sekolah diangka 13,11. Data ini menunjukkan bahwa eksisting sumber daya manusia di Kabupaten Bangka sebagian besar hanya menamatkan pendidikannya pada jenjang pendidikan wajib 9 tahun. Hal itu terjadi dikarenakan terkait akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangka masih belum cukup optimal untuk mendorong pendidikan yang inklusif. Sarana-prasarana sekolah yang masih terbatas khususnya di daerah-daerah perdesaan, dan jumlah tenaga pendidik yang masih minim. Belum lagi dari aspek kesehatan dan perlindungan sosial yang mana angka Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten bangka masih dibawah 80 persen dan juga SDM Kesehatan yang masih cenderung terbatas khususnya ketersediaan dokter spesialis di faskes yang ada. Oleh sebab itu, untuk mentransformasi kondisi yang terjadi saat ini, perlu adanya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan melalui terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan formal dan non formal. Selain itu, terwujud juga pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan khususnya terhadap masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kesehatan berfokus pada meningkatnya penyuluhan tentang gizi dan imunisasi. Peningkatan kualitas tenaga kerja ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja berkualitas dengan minimal lulusan pendidikan menengah pertama. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat.

Perubahan besar pada sektor ekonomi adalah bagaimana kita memutuskan ketergantungan perekonomian Kabupaten Bangka dari sektor pertambangan ke sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor pertambangan masih menempati urutan ke tiga menjadi kontributor utama perekonomian Kabupaten Bangka yakni sebesar 8,38% berada

dibawah sektor pertanian dan industri pengolahan yang masing-masing sebesar 20,38% dan 25,26%. Itupun industri pengolahan didominasi oleh industri olahan timah sebesar 46,71% dari total PDRB sektor Industri pengolahan. Untuk mendorong perubahan ketergantungan ekonomi ini, **Tranformasi ekonomi** dilakukan melalui upaya penguatan ekosistem sektor non pertambangan, antara lain inovasi dan stimulasi produktivitas UMKM, digitalisasi pariwisata, dan penanaman industri manufaktur. Pada periode ini, struktur perekonomian mulai tumbuh yang dipacu oleh tersedianya infrastruktur-infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Kegiatan pertanian didukung oleh tersedianya infrastruktur penunjang dan fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan produksi maupun distribusi pertanian. Pengembangan pariwisata ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata yang meliputi akses dan akomodasi. Ketersediaan infrastruktur penunjang dan fasilitas pendukung diarahkan pada pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa. Tersedianya fasilitas penunjang tersebut diarahkan agar dapat mendukung terciptanya IKM dan UMKM di Kabupaten Bangka sebagai salah satu bentuk kegiatan perekonomian lokal.

Kabupaten Bangka memiliki tantangan bagaimana menciptakan kelembagaan yang efektif dengan proses bisnis yang adaptif. Hal tersebut membutuhkan manajemen talenta yang berbasis meritokrasi dan integritas. Indeks Profesionalisme ASN pada tahun 2023 Kabupaten Bangka tergolong kategori rendah dimana angkanya sebesar 64%, yang disebabkan oleh kompetensi ASN yang masih belum sesuai dengan peta jabatan dan pengembangan karir yang belum berbasiskan kinerja. Indeks reformasi birokrasi masih pada level B yang memerlukan banyak perbaikan guna mewujudkan akuntabilitas kinerja dan birokrasi yang efektif dan efisien. **Transformasi tata kelola pemerintahan** difokuskan pada peningkatan kelembagaan yang tepat untuk memaksimalkan fungsi dan kapabilitas ASN daerah. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, diarahkan pada optimalisasi penyediaan pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan teknologi informasi. Sementara arahan untuk pelayanan publik berupa semakin

baiknya sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian waktu dan biaya.

Tantangan dalam penegakan **Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum** karena minimnya literasi dan pemberdayaan serta akses masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan, sehingga arah kebijakan ini difokuskan pada penguatan keamanan dan ketertiban yang mendorong optimalisasi fungsi seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, peningkatan kapasitas fiskal daerah dan penguatan pengendalian inflasi daerah.

Tantangan yang paling besar pada sektor sosial budaya dan ekologi adalah tergerusnya pembangunan karakter manusia dan tergerusnya nilai – nilai kebudayaan dan kearifan lokal akibat kemajuan teknologi, dan degradasi lingkungan. Sehingga **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan, pelestarian kebudayaan, peningkatan ketahanan keluarga sejahtera dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Peningkatan ketahanan pangan ditunjukkan dengan kebutuhan pangan pokok mulai terpenuhi dan terkendalinya harga terutama harga barang-barang kebutuhan pokok. Sementara, pembangunan manusia diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin baik. Pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan mulai diarahkan dengan ditetapkannya regulasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Resiko bencana sudah mulai berkurang dengan optimalnya sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang sudah terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan. Pembentukan sistem untuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi arahan dalam mengendalikan penataan ruang. Pengembangan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati diarahkan pada peningkatan alokasi lahan untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau serta bioprospeksi keanekaragaman hayati sebagai upaya awal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari keanekaragaman hayati. Pengendalian pertumbuhan penduduk ditandai dengan

meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengendalian kelahiran dan penggunaan alat kontrasepsi.

Selanjutnya, ketahanan ekologi difokuskan pada perlindungan lingkungan hidup. Degradasi lingkungan telah menjadi hambatan bagi Pembangunan daerah. Pada tahun 2023, Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka sebesar 65,84, persentase penanganan sampah sebesar 81,9% dan persentase pengurangan sampah sebesar 15,07%. Rendahnya kemampuan daerah dalam pengelolaan persampahan diakibatkan daya tampung TPA yang semakin berkurang, pertambahan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah, dan ketersediaan sarana prasarana persampahan yang masih minim. Nilai IKLH masih menunjukkan potensi pencemaran air, udara dan berkurangan luasan tutupan lahan yang akan berkorelasi dengan ketersediaan sumber pangan.

Untuk **Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan** difokuskan pada peningkatan pemerataan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan hingga level desa. Pemerataan pembangunan kewilayahan dilakukan sesuai dengan karakteristik potensi wilayah sehingga dapat mendukung perekonomian wilayah melalui pemanfaatan infrastruktur yang ada. Langkah awal yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan wilayah, salah satunya adalah konsolidasi tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur publik.

Selanjutnya**, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan** yang difokuskan pada pemerataan infrastruktur hingga ke level desa guna mendukung kemandirian. Pembangunan diarahkan pada pemerataan dan berkeadilan. Adanya peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah. Pelayanan kesehatan sudah semakin meningkat ditandai dengan meningkatnya akses pelayanan kesehatan khusus bagi penduduk miskin. Dari sarana transportasi dan perhubungan, terpenuhinya pembangunan jalan, jembatan, serta simpul-simpul transportasi. Adanya pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta pengelolaan air limbah. Terwujudnya kebersihan lingkungan ditandai dengan terpenuhinya sarana dan prasarana penunjangnya.

Pembangunan perdesaan difokuskan pada tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat desa.

Selanjutnya, kebijakan **kesinambungan pembangunan** diarahkan pada peningkatan kapasitas fiskal dan mendorong pembiayaan kolaboratif melalui peningkatan pendapatan daerah, penyediaan pembiayaan pembangunan melalui perbankan dan peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama pembangunan. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan melalui perluasan populasi wajib pajak serta melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (dalam hal ini swasta) dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah serta melibatkan partisipasi publik dalam hal pengawasan serta menerapkan sistem "*Reward and Punishment*" bagi wajib pajak dan petugas pajak.

8. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan masa transisi kepemimpinan kepala daerah yang berlaku selama 3 (tiga) tahun. Dokumen ini disusun karena kebijakan pemerintahan pusat tentang pemilihan serentak seluruh kepala daerah sehingga tidak ada visi dan misi dalam dokumen perencanaan tersebut.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 pada tanggal 10 Maret 2023. Dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 hanya memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan 5 (lima) tujuan dan 13 (tiga belas) sasaran strategis daerah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten
				Indeks SPBE
				Indeks Profesionalitas ASN
			Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
			Sasaran1.3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
				Angka Harapan Lama Sekolah
			Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
				Angka Stunting
			Sasaran 2.3 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total
			Sasaran 2.4 : Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
				Status Kabupaten Layak Anak
3	Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah	Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pemerataan Infrastruktur
				Indeks Williamson
4	Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah	Sasaran 4.1 : Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi
				Pengeluaran Per Kapita
				Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku)
			Sasaran 4.2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan
				Tingkat Pengangguran Terbuka
			Sasaran 4.3: Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan	*Spending of Money Tourism*
			Sasaran 4.3 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini
5	Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Sasaran 5.1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
				Indeks Ketahanan Bencana Daerah

Sumber : Dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

Tema Tahunan Pembangunan RPD merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan kebijakan yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan perencanaan. Tema merasionalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap

tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema Pembangunan selama tiga tahun dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 4.7
Tema Fokus Pembangunan pada RPD Tahun 2024-2026

Sumber: RPD Kabupaten Bangka 2024-2026

Isu strategis dan permasalahan dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dilaksanakan melalui intervensi kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025, dengan isu sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Permasalahan yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan perilaku dan mentalitas birokrat. Salah satu aspek reformasi yang sangat penting selain reformasi struktur adalah melakukan perombakan *mindset* para birokrat. Hal ini terkait dengan transformasi perubahan kultural (nilai-nilai dan perilaku). Permasalahan terkait perubahan perilaku dan mentalitas dan *mindset* birokrat yang cenderung menempatkan dirinya sebagai agen kekuasaan dari pada agen pelayanan. Perilaku ini berpengaruh dengan sikap birokrat seperti rendahnya lambatnya pelayanan publik, sikap disiplin pegawai, resistensi terhadap perubahan, distribusi tugas dan tanggungjawab yang kurang proporsional. Beberapa

permasalahan di atas dapat menyebabkan rendahnya profesionalitas birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu aspek yang terpenting dalam melakukan perubahan perilaku dan mentalitas birokrat adalah dengan penyusunan dan pelaksanaan sistem pemberian penghargaan dan sanksi (r*eward and punishment)* kepada ASN secara konsisten dan proporsional.

Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi saat ini ingin membangun birokrasi ASN yang memiliki daya *adaptif* dan *agile* yaitu birokrasi yang mampu beradaptasi dalam segala situasi disrupsi saat ini dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat. Birokrasi ASN ini harus melaksanakan *core values* ASN berahlak yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yaitu Berorinetasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

2. Meningkatkan pengawasan internal. Upaya pengawasan internal perlu ditingkatkan dalam rangka meminimalisir kesalahan dan penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan level penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), menambah aparatur pengawasan baik secara kualitas maupun kuantitas serta menerapkan mekanisme pengawasan berjenjang pada masing level organisasi.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Permasalahan ini terkait dengan pembiayaan pembangunan yang masih memerlukan perencanaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Upaya untuk meningkatkan kinerja masih kurang. Hal ini terlihat dari regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan masih bersifat dinamis dan masih terdapat beberapa perencanaan yang bersifat rutinitas sehingga belum berdampak pada perubahan pembangunan secara mendasar.
4. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan profesional. Permasalahan yang muncul dalam meningkatkan pelayanan publik adalah sistem, prosedur pelayanan masih harus ditingkatkan dan kepatuhan terhadap pelayanan publik masih terdapat kekurangan. Berdasarkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun 2022 masih belum mencapai target RPJMD 2019-2023, dimana pada Tahun 2022 angka IKM 85,27, sedangkan target RPJMD 85,40. Pemanfaatan teknologi dan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) belum optimal, budaya kerja melayani oleh petugas, SOP pelayanan yang masih belum dilaksanakan dengan baik, kompetensi SDM dalam bidang Informasi Teknologi masih perlu ditingkatkan.

5. Kurangnya Profesionalitas ASN**.** Hal ini terlihat mulai dari proses pengangkatan dan penempatan PNS pada Jabatan Struktural masih ada yang belum sesuai kompetensi, pangkat dan golongan serta pola rekruitment masih berorientasi pada Hubungan Patrimonial. Profesionalitas ASN diukur **dari riwayat pendidikan formal, riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, penilaian prestasi kerja ASN dan riwayat penjatuhan hukuman disiplin. Pada tahun 2022,** Indeks Profesionalitas ASN sebesar 64,00 dan termasuk dalam kategori masih rendah.

6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah diukur dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Saat ini, **hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka tahun 2022 capaiannya baru mencapai 71,31 dengan predikat BB. Untuk meningkatkan nilai AKIP ini perlu upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja yang SMART (***Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded), pelaporan kinerja dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan teknologi informasi, evaluasi kinerja yang berjenjang dan berkesinambungan serta capaian kinerja yang sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.*

7. Meningkatkan penerapan *E-Government*. Hal ini terlihat dari penguatan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan TIK, sarana dan prasarana untuk mendukung TIK masih harus ditingkatkan, belum terintegrasinya aplikasi dan keterbukaan informasi publik. Penerapan E-Government tersebut dilihat dari **Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bangka yang masih rendah yaitu sebesar 1,85 pada tahun 2022**

karena kebijakan internal terkait dengan pelaksanaan SPBE masih bersifat parsial atau sektoral.

b. *Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah*

Kualitas Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan, Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat. Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Bangka berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain belum optimalnya akses dan mutu pendidikan, belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh sektor ekstratif skala besar. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi SDM yang belum berkualitas adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Permasalahan terkait pendidikan dan kesehatan tersebut terangkum dalam sebuah indikator *impact* yakni Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2022, capaian IPM Kabupaten Bangka mencapai nilai 72,95. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 72,45 bahkan lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional yang hanya mencapai 72,91. Jika dibandingkan dengan dengan nilai IPM kota/kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung, nilai IPM Kabupaten Bangka menemati urutan ke 3 yaitu di bawah Kota Pangkal Pinang dan

Kabupaten Belitung. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kabupaten Bangka masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM. Capaian indikator komposit IPM Kabupaten Bangka pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: (1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 71,37; (2) Harapan Lama Sekolah *(Expected Years of Schooling)* sebesar 12,80 tahun; serta (3) Rata-rata Lama Sekolah *(Mean Years of Schooling)* sebesar 8,27 tahun; dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di angka 12.860.000.

c. Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Belum Optimal

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kabupaten Bangka akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif dan berkelanjutan. Belum optimalnya kinerja pelayanan dan infrastruktur kota menjadi permasalahan di Kabupaten Bangka.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum

optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan.

d. Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan

Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan poin penting mengingat kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan finansial atau kebutuhan. Salah satu problem yang menghambat percepatan kemajuan Kabupaten Bangka adalah masih belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah, terutama untuk produk-produk usaha mikro. Selain itu masih belum optimalnya inovasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing. Secara teori, variabel daya saing ini menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah Kabupaten Bangka menarik investasi dalam kerangka meningkatkan struktur perekonomian. Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam peningkatan kualitas pembangunan perekonomian adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan pertumbuhan Ekonomi.** Sampai saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka masih menghadapi permasalahan dan tantangan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar dapat memberikan dukungan maksimal bagi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Beberapa fenomena yang mewarnai pertumbuhan perekonomian berkaitan dengan masih rentannya pertumbuhan tersebut pada gejolak ekonomi dunia, masih belum mampu memberikan dukungan secara maksimal pada upaya untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.
2. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor-sektor unggulan.** Beberapa sektor ekonomi unggulan seperti pertaniaan, perikanan, agro industri, dan sektor perdagangan, dan periwisata perlu didorong untuk

agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Bangka. Beberapa permasalahan terkait dengan upaya ini adalah:
Pertama, pertumbuhan sub sektor pertanian dalam PDRB perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi produktivitas pertanian, pendapatan petani dan daya saing produk pertanian perlu ditingkatkan, dukungan seluruh *stakeholder* dalam rantai tata niaga dan laju alih fungsi lahan pertanian yang perlu dikendalikan.

Kedua, pertumbuhan sub sektor Perikanan dalam PDRB perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi produktivitas perikanan tangkap dan budidaya perikanan, teknologi pengolahan perikanan, dukungan rantai tata niaga/ pemasaran komoditi ikan.

Ketiga, kontribusi pertumbuhan pariwisata masih perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi kunjungan wisatawan, kawasan wisata yang berkualitas dan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata yang perlu ditingkatkan.

Keempat, pertumbuhan sub sektor agroindustri dalam PDRB perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi ketersediaan bahan baku perlu ditingkatkan kualitasnya, fasilitas permodalan harus didukung oleh *stakeholder*, adanya dukungan ketersediaan pasar, dukungan infrastruktur bidang agroindustri, penelitian dan pengembangan produk, kualitas produksi, kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri harus ditingkatkan serta peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing.

Kelima, pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam PDRB perlu ditingkatkan juga. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi pengawasan terhadap barang dan jasa beredar di Kabupaten Bangka yang masih perlu ditingkatkan, tertib ukur untuk tera dan tera ulang alat UTTP, terpenuhinya ketersediaan barang kebutuhan pokok barang penting serta informasi harga kebutuhan pokok, pembangunan pengelolaan sarana distribusi perdagangan masih harus ditingkatkan, perlunya peningkatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi, pertemuan dengan

stakeholder Ekpor Impor masih harus ditingkatkan, perlunya penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor dan keikutsertaan Kabupaten Bangka dalam pameran promosi dagang baik tingkat nasional maupun lokal masih harus ditingkatkan.

3. **Peningkatan investasi.** Nilai investasi di Kabupaten Bangka selama tahun 2019-2022 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Penurunan investasi yang signifikan terjadi pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi covid-19, sedangkan invetasi pada tahun 2022 sudah mengalami peningkatan baik PMA maupun PMDN. Permasalahan yang muncul disebabkan oleh *pertama*, Penanaman Modal Asing (PMA) masih perlu ditingkatkan, terkait beberapa aspek seperti pelayanan perizinan ditingkatkan dan keamanan berinvestasi yang harus dijaga. *Kedua*, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), terkait beberapa aspek seperti kerjasama pananaman modal perlu ditingkatkan dan jaminan ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.

e. Kualitas Lingkungan Hidup yang Semakin Terdegradasi

Kerusakan lingkungan hidup menjadi permasalahan yang mendasar di Kabupaten Bangka terutama dampak dari aktivitas penambangan baik di darat, daerah aliran sungai serta penambangan di laut, aktivitas perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat serta cemaran pada aliran sungai akibat aktivitas pabrik yang membuang limbah cair ke badan sungai. Berdasarkan data Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Bangka pada tahun 2021 memiliki skor 66,38 dengan perhitungan dari 4 (empat) indeks komposit yaitu Indeks Kualitas Udara yang memiliki skor 84,50, Indeks Kualitas Air yang rendah dengan nilai 55,50, Indeks Kualitas Air Laut 60,50 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Laut dengan skor 65,50. IKLH Kabupaten Bangka Tahun 2021 lebih rendah dari skor IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai 72,05 dan lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 71,43. Sedangkan pada tahun 2022, IKLH Kabupaten Bangka mengalami penurunan dengan skor 64,91 menurun sebesar 1,47 poin atau 2,21 persen dari tahun 2021 yang memiliki skor 66,38. Penurunan IKLH pada tahun 2022 disebabkan indeks kualitas air mengalami penurunan menjadi 60,00 dibandingkan

dengan tahun 2021 yang sebesar 63,14. Namun, jika dilihat dari tolak ukur kualitas air, maka kualitas air di Kabupaten Bangka masih masuk kategori tercemar ringan. Untuk hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 sebesar 86,55, mengalami penurunan dibanding hasil pengukuran IKU pada tahun 2021 memiliki nilai 87,36. Hasil pengukuran ini termasuk kategori baik. Hal ini dikarenakan konsentrasi NO_2 yang rata-rata berasal dari sektor transportasi masih rendah begitu juga dengan konsentrasi SO_2 yang rata-rata berasal dari sektor industri juga masih rendah. Untuk hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), luas tutupan lahan di Kabupaten Bangka seluas 35.589,8730 hektar dari luas wilayah administrasi 302.879,47 hektar sehingga skor IKTL pada tahun 2022 sebesar 33.31. Nilai ini meningkat dari angka IKTL Kabupaten Bangka pada tahun 2021 sebesar 33,15. Dengan skor IKTL Kabupaten Bangka tahun 2022 sebesar 33,31 menunjukkan bahwa indeks kualitas lahan Kabupaten Bangka berada pada kriteria kurang. Untuk itu perlu upaya untuk penambahan luas dan kualitas tutupan lahan dan ruang terbuka hijau (RTH) melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dan perlu publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan lahan.

Kerusakan lingkungan hidup ini juga berdampak pada intensitas kejadian bencana di wilayah Kabupaten. Pada tahun 2022, Indeks Resiko Bencana (IRB) di Kabupaten Bangka sebesar 168,40 dengan kategori beresiko tinggi sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai IRB yang lebih rendah yaitu 158,52 dengan kategori resiko tinggi yang artinya Kabupaten Bangka memiliki resiko bencana yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan jika dibandingkan dengan IRB Nasional yang nilainya 134,16 maka IRB Kabupaten Bangka maupun IRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jauh lebih tinggi atau beresiko tinggi terjadinya Bencana.

IRB Kabupaten Bangka yang tinggi ini dikarenakan daerah rawan bencana ada di 6 (enam) Kecamatan yaitu Sungailiat, Riau Silip, Belinyu, Merawang, Mendo Barat dan Pemali dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Kejadian Bencana pada tahun 2024 yang terjadi terutama bencana banjir/genangan air akibat

dari tutupan lahan yang terus berkurang dan pendangkalan aliran sungai akibat penambangan, kebakaran lahan, angin puting beliung dan banjir rob akibat pasangan tinggi air laut.

9. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dengan 6 (enam) jenis urusan pelayanan dasar yang harus dipenuhi meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Urusan Sosial.

Capaian Standar Pelayanan Minimal yang diperoleh setiap warga negara pada setiap jenis pelayanan dasar masing-masing urusan wajib pada tahun 2024 yaitu:

a. Urusan Pendidikan

   Capaian SPM urusan pendidikan pada tahun 2024 untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini sebesar 79.33 persen, pendidikan dasar sebesar 97,19 persen dan pendidikan kesetaraan sebesar 84,19 persen.

b. Urusan Kesehatan

   Capaian SPM urusan kesehatan pada tahun 2024 untuk jenis pelayanan dasar kesehatan ibu hamil sebesar 4.443 orang (86,41 persen), pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 4.607 orang (89,80 persen), pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 4.573 orang (90,10 persen), pelayanan kesehatan balita sebesar 19.690 orang (94,36 persen), pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 57.281 orang (99,90 persen), pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 197.097 orang (91,44 persen), pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 29.238 orang (92,41 persen), pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 19.641 orang (100 persen), pelayanan kesehatan penderita *Diabetes mellitus* sebesar 6.693 orang (100 persen), pelayanan kesehatan orang dengan ganguan jiwa berat sebesar 654 orang (100 persen), pelayanan kesehatan orang

dengan TB sebesar 7.033 orang (100 persen), pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sebesar 7.336 orang (100 persen).

c. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian SPM urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2024 untuk jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 100 persen dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic sebesar 100 persen.

d. Urusan Perumahan Rakyat

Capaian SPM urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2024 untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebesar 100 persen dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebesar 100 persen.

e. Urusan Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian SPM urusan Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 untuk jenis pelayanan dasar atas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 100 persen, pelayanan informasi rawan Bencana sebesar 100 persen, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar 100 persen, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100 persen dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 100 persen.

f. Urusan Sosial

Capaian SPM urusan Sosial pada tahun 2024 untuk jenis pelayanan dasar atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sebesar 99,69 persen, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sebesar 100 persen, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 100 persen, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebesar 90 persen, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota sebesar 100 persen.

10. Posisi RKPD dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka 2024-2044

Pembangunan Daerah Tahun 2026 merupakan bagian dari periode tahap III (2024-2026) pembangunan spasial. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka 2024-2044 yang menitikberatkan pada upaya mengimplementasikan Pemantapan Sistem Perkotaan, Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah, Rencana Pola Ruang, dan Kawasan Strategis yang diarahkan pada pengembangan kawasan budidaya, kawasan strategis kabupaten termasuk upaya untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah.

11. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangka 2019-2035

Pemerintah Kabupaten Bangka telah menyusun dokumen perencanaan bidang kependudukan yaitu *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai dokumen induk untuk merancang pembangunan kependudukan dalam merespon bonus demografi. Grand Design Kependudukan Kabupaten Bangka merupakan dokumen yang berisi tentang perencanaan pembangunan kependudukan Kabupaten Bangka pada periode tahun 2019-2035. Aspek pembangunan kependudukan dimaksud antara lain mencakup 5 (lima) aspek yaitu : kuantitas penduduk, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan dan pengarahan mobilitas serta penataan administrasi kependudukan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi dari masing-masing aspek kebijakan pembangunan kependudukan di Kabupaten Bangka. Pada periode jangka panjang, kebijakan pembangunan kependudukan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, kualitas, pertumbuhan, serta persebaran penduduk.

12. *Green Economy* (Ekonomi Hijau) dan *Blue Economy* (Ekonomi Biru)

Ekonomi hijau merupakan isu pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida

dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Ekonomi hijau dilandasi dengan model pembangunan ekonomi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis.

Kabupaten Bangka sebagai wilayah kepulauan perlu menerapkan pembangunan berkonsep ekonomi biru. Pembangunan berkonsep ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Tujuan ekonomi biru yaitu penggunaan sumber daya alam secara efisien, tanpa limbah, memberikan pendapatan bagi masyarkat dan menjaga ekosistem kelautan. Sektor yang termasuk dalam kategori ekonomi biru antara lain perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Manfaat melakukan pengembangan ekonomi biru adalah kelestarian keanekaragaman hayati laut dan ekosistem laut dan pesisir serta mata pencaharian bisa berlangsung secara berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

13. *Sustainable Development* Goals (SDG's)

Isu penting yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bangka dalam mendukung pencapaian SDG's ada 7 (tujuh) isu yang termuat dan terakomodir dalam perencanaan tahun 2026 yaitu: *Pertama*, isu bidang kesehatan. *Kedua*, isu bidang pendidikan. *Ketiga*, isu pelstarian lingkungan hidup. *Keempat*, isu kemiskinan. *Kelima*, isu perekonomian. *Keenam*, isu kesejahteraan sosial. *Ketujuh*, isu keamanan pangan. Beberapa capaian tujuan pembangunan SDG's di Kabupaten Bangka memerlukan perhatian diantara: percepatan penurunan angka kemiskinan, akses terhadap pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan, prevalensi stunting pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) dan bayi di bawah dua tahun (baduta) masih relatif tinggi, masih terdapatnya angka Kematian Ibu (AKI) dan bayi (AKB), kasus beberapa penyakit menular dan penyakit mematikan yang masih tinggi, penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar belum menjangkau seluruh penduduk, pertumbuhan ekonomi masih rendah serta tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup.

14. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bangka

Untuk menampung aspirasi masyarakat secara komprehensif, Dokumen RKPD Kabupaten Bangka tahun 2026 memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat mekanisme politik anggaran melalui aspirasi yang disalurkan melalui anggota DPRD Kabupaten Bangka. Proses ini dilakukan lewat kegiatan penjaringan permasalahan di lapangan yang kemudian aspirasi tersebut disampaikan dan dilakukan pembahasan dalam musyawarah perencanaan daerah untuk diusulkan sebagai program dan kegiatan dalam rangka memecahkan permaslahan di masyarakat dalam dokumen perencanaan daerah.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bangka yang disampaikan melalui aplikasi SIPD pada tahun 2026 sebanyak 390 usulan dari 35 anggota DPRD di Kabupaten Bangka, sebanyak 334 usulan diteruskan ke Perangkat Daerah, 20 usulan tidak diteruskan karena usulan tidak lengkap sedangkan 36 usulan dibatalkan. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 akan dikelompokan sesuai dengan Perangkat Daerah pengampuh urusan sehingga pokok-pokok pikiran DPRD menjadi rujukan untuk mengusung tema pembangunan tahunan daerah.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bangka untuk tahun 2026 didominasi pada pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2026 ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam penyusunan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2026.

15. Tantangan Pembangunan 2026

Mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2024 dan proyeksi ekonomi 2026, maka tantangan pokok sehubungan dengan perekonomian daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Kabupaten Bangka pada tahun 2026, yakni :

a. Stagnasi Ekonomi di karenakan melemahnya permintaan ekspor;
b. Minimnya peran investasi di sektor industri pengolahan dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi;

c. Masih rendahnya akselerasi pembangunan sektor pariwisata daerah sebagai core bussines baru dalam perekomonian daerah;

d. Kontribusi terbesar PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Bangka didominasi oleh ekspor;

e. Lemahnya tata kelola kelembagaan ekonomi desa dan pengembangan kemitraan usaha sektor pertanian;

f. Pengembangan Rantai nilai (*Value Chain*) produksi komoditas sektor unggulan masih belum berjalan dengan baik;

g. Keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang masih rapuh.

h. Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian;

i. Inkonsistensi komitmen bersama dalam penguatan dan kerjasama.

16. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV, capaian kinerja RKPD Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu realisasi kinerja termasuk **Kategori Sangat Tinggi** dengan nilai **99,59 persen** dan capaian realisasi anggaran termasuk **Kategori Sangat Tinggi** dengan nilai **96,24 persen**.

Faktor pendorong pencapaian realisasi kinerja RKPD Tahun 2024 yaitu:

1. Adanya komitmen dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Pembagian tugas dan fungsi serta tata kerja yang jelas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah.
3. Perencanaan, Monitoring dan Pengendalian yang dilakukan Kepala Daerah beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk saling bersinergi menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dan mencari solusi apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat pencapaian realisasi kinerja RKPD Tahun 2024 antara lain:

1. Penggunaan SIPD Penataausahaan yang baru diterapkan secara penuh pada tahun 2024 masih belum optimal sehingga sering terjadi kendala dalam pencairan anggaran yang akhirnya harus dilakukan pergeseran-pergeseran anggaran kas pada Perangkat Daerah;
2. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik dari Kementerian Teknis yang terlambat diterbitkan sehingga Perangkat Daerah belum dapat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan;
3. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran DAU *specific grant* baru diterapkan pada tahun 2024 sehingga perlu penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah;
4. Pada pelaksanaan pengadaan barang jasa Tahun 2024, beberapa Perangkat Daerah terlambat dalam menyiapkan RAP dan Gambar sehingga pelaksanaan lelang menjadi terlambat.

Hasil dari evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 menjadi dasar dalam menentukan permasalahan yang masih tersisa dalam pembangunan daerah tahun sebelumnya. Permasalahan ini merupakan perbedaan *(gap)* antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan. Sementara isu adalah permasalahan-permasalahan yang dinilai penting dan harus dipertimbangkan.

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2024, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan RKPD 2026, dan tantangan pembangunan 2026 maka ditetapkan Tema Pembangunan Tahun 2026 Kabupaten Bangka sebagai pelaksanaan Tahun Ketiga RPD Tahun 2024-2026 dan Tahap I pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 yang menunjukkan titik berat pelaksanaan agenda pembangunan sebagai berikut:

"INOVASI DAN HILIRISASI SEKTOR EKONOMI UNGGULAN SECARA BERKELANJUTAN"

Tema dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 di atas berfokus pada 3 (tiga) komponen-komponen fondasi utama pembangunan yang terdiri dari

pengembangan inovasi dan penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan hilirisasi sektor ekonomi unggulan dan berkelanjutan. Penjabaran komponen utama pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.8
Komponen Utama Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026

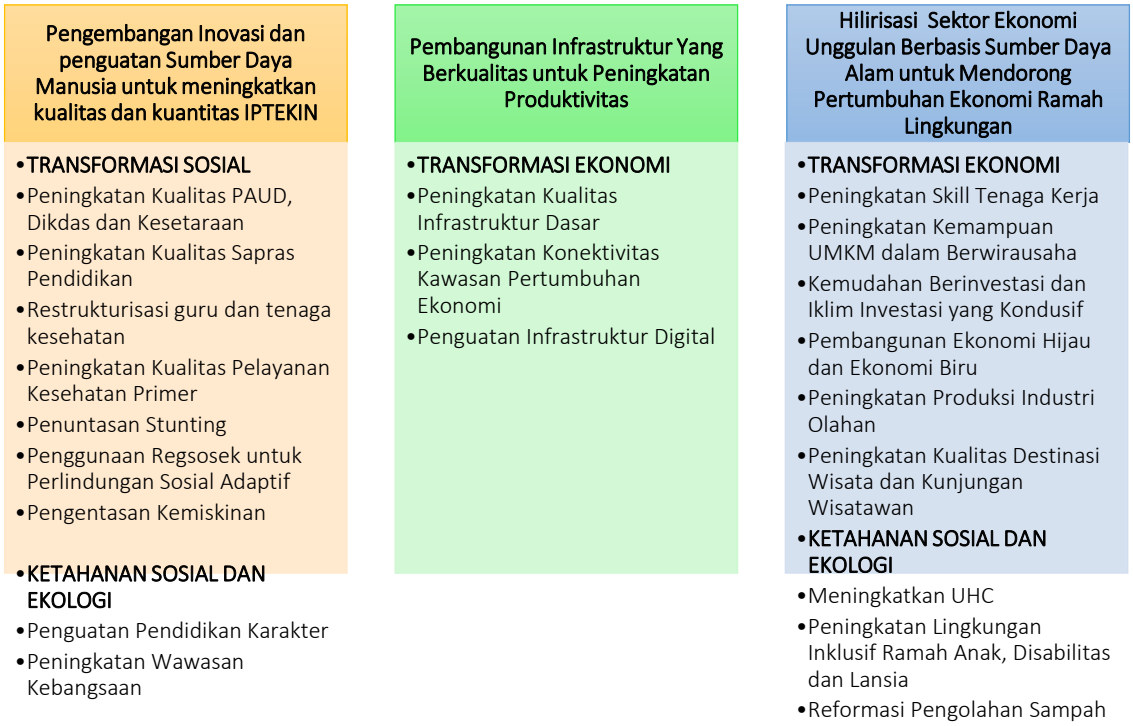

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan penetapan tema tersebut, terdapat keterkaitan yang erat antara Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026, Tema RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dan Tema RKP Tahun 2026 (RPJMN). Sedangkan integrasi dan sinkronisasi Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 (RPJMN) dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :

Gambar 4.9
Intergrasi dan Sinkronisasi Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Tahun 2026 merupakan program yang direncanakan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045. Namun, secara spesifik perencanaan tahun 2026 berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan daerah transisi yang disusun karena kebijakan Pemerintah Pusat tentang pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024. Tujuan dan Sasaran Pembangunan untuk Tahun 2026 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 agar tetap terjaga kesinambungannya yang diukur dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2023.

Berpedoman dan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan sebagaimana dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 beserta indikator kinerjanya ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dijelaskan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Matriks Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Bangka
Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia
Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah
Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah
Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Sumber: RPD Kabupaten Bangka 2024-2026

Berangkat dari tujuan serta indikator kinerja tujuan maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta indikatornya pada setiap tujuan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Matriks Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten
				Indeks SPBE
				Indeks Profesionalitas ASN
			Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
			Sasaran1.3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
				Angka Harapan Lama Sekolah
			Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
				Angka Stunting
			Sasaran 2.3 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total
			Sasaran 2.4 : Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender
				Status Kabupaten Layak Anak

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
3	Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah	Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pemerataan Infrastruktur
				Indeks Williamson
4	Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah	Sasaran 4.1 : Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi
				Pengeluaran Per Kapita
				Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku)
			Sasaran 4.2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan
				Tingkat Pengangguran Terbuka
			Sasaran 4.3: Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan	*Spending of Money Tourism*
			Sasaran 4.3 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini
5	Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Sasaran 5.1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
				Indeks Ketahanan Bencana Daerah

Sumber: RPD Kabupaten Bangka 2024-2026

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut terkait dengan instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana aspek tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 dipakai dasar untuk menentukan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu sasaran strategis Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja selanjutnya. Setiap tahun Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemrintah Daerah (RKPD) yang sasaran dan indikator kinerjanya berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sedangkan target indikator kinerja sasarannya berpedoman pada Dokumen RPD Tahun 2024-2026, RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045, capaian indikator kinerja Tahun 2024 dan perkembangan terkini pembangunan daerah pada tahun 2025. Sasaran, indikator kinerja dan target RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA 2026
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori/ Nilai	BB (72,65)
	Indeks SPBE	Nilai	2,90
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	78,21
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	86,37
Sasaran1.3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,21
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,49

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA 2026
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23
Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,31
	Angka Stunting	Persentase	0,95
Sasaran 2.3 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total	Anak	2,00
Sasaran 2.4 : Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	89,55
	Status Kabupaten Layak Anak	Status/ Nilai	Utama (815)
Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Nilai	0,185
	Indeks Williamson	Nilai	0,173
Sasaran 4.1 : Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,33
	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	13,961
	Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku)	Ribu Rupiah	21,724
Sasaran 4.2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persentase	4,13
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,49
Sasaran 4.3: Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan	*Spending of Money Tourism*	Milyar Rupiah	232,69
Sasaran 4.3 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	Nilai	0,202
Sasaran 5.1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	66,38
	Indeks Ketahanan Bencana Daerah	Nilai	0,55

Sumber: RPD Kabupaten Bangka 2024-2026

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Penentuan prioritas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan capaian makro pembangunan, capaian Indikator Kinerja Utama, hasil evaluasi RKPD Tahun 2024, isu strategis pembangunan baik lokal, regional maupun nasional serta Tema Pembangunan Daerah Tahun 2026. Untuk mendukung Tema Pembangunan Daerah Tahun 2026 yaitu yaitu **"Inovasi dan Hilirisasi Sektor Ekonomi Unggulan secara Berkelanjutan"**, prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.10
Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan tersebut untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Tema dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 dapat diihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.6
Keterkaitan antara Prioritas, Tema dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Tema :		
INOVASI DAN HILIRISASI SEKTOR EKONOMI UNGGULAN SECARA BERKELANJUTAN		
No.	**Prioritas**	**Sasaran**
1.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat
2.	Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Pemerataan Pendapatan
3.	Pembangunan SDM	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak
4.	Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan
5.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

Untuk melihat keterkaitan antara permasalahan dan isu strategis dengan penentuan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis
dengan Prioritas Pembangunan dalam RKPD Tahun 2026

NO.	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1.	• Akuntabilitas Kinerja Birokrasi • Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel • Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik	Penguatan Kapasitas Birokrasi
2.	• Jumlah Uang yang Dibelanjakan Masyarakat • Produksi Barang dan Jasa di sektor ekonomi unggulan daerah • Pemerataan Pendapatan • Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	• Transformasi ekonomi inklusif berbasis sektor unggulan daerah • Penguatan akses dan pemerataan infrastruktur	Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)
3.	• Kualitas Pendidikan Masyarakat • Kualitas Kesehatan Masyarakat • Laju Pertumbuhan Penduduk • Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pembangunan SDM
4.	Standar Hidup Layak Masyarakat	Kemiskinan Ektrem Pengangguran	Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
5.	Kualitas lingkungan hidup	Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang berdampak bencana	Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

Perumusan prioritas pembangunan RKPD 2026 berpedoman pada arah kebijakan RPD Tahun 2024-2026. RKPD Tahun 2026 memiliki prioritas pembangunan yang selaras dengan kerangka perencanaan jangka menengah atau RPD Tahun 2024-2026. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPD 2024-2026 dengan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD 2024-2026 dengan Prioritas RKPD 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS RKPD 2026
1	2	3	4	5
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	**1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi** **1.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel** **1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat**	❖ Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Institusionalisasi Inovasi dan Reformasi Birokrasi dalam Proses Bisnis Di Semua Level Pemerintahan ❖ Melakukan Akselerasi Pembangunan Melalui Optimalisasi Teknologi Informasi dan Membangun Sistem Pengendalian yang Berorientasi pada Hasil	❖ Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat ❖ Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi dan penegakan peraturan daerah ❖ Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi informasi ❖ Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yangbersih dan efisien ❖ Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalammonitoring dan evaluasi pembangunan dari tahap perencanaan, penganggaran,	❖ Penguatan Kapasitas Birokrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS RKPD 2026
			pelaksanaan yang berorientasi padahasil ❖ Mengembangkan sistem monitoring berbasis IT terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kinerjapembangunan daerah ❖ Fasilitasi dan Pendampingan Aparatur Pemerintah desadalam pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan danpembangunan	
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	**2.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat** **2.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat** **2.3 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk** **2.4 Meningkatnya Kualitas Anak dan Perempuan**	❖ Membangun Generasi Yang Handal melalui Jaminan Kesehatan yang Komprehensif dan Pengembangan Pendidikan Yang Berorientasi Pada Potensi Daerah guna meningkatkan standar hidup layak masyarakat ❖ Pengarusutamaan Gender Berbasis Penguatan Kelembagaan Perempuan Dalam Peran Serta Aktif Dalam Pembangunan	❖ Jaminan akan akses dan kualitas Pendidikan bagi seluruh masyarakat ❖ Jaminan akan akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat ❖ Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan pendidikan ❖ Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan kesehatan ❖ Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh-tokoh pembangunan perempuan	❖ Pembangunan SDM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS RKPD 2026
			❖ Penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial ❖ Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	**3.1 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur**	❖ Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian melalui kemitraan (*partnership*) Pembiayaan Pembangunan	❖ Memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antarKawasan ❖ Penguatan investasi dalam dan luar negeri, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership. ❖ sistem jaringan infrastruktur yang mendukung struktur ruang ❖ Pemenuhan kebutuhan ketersediaan air bersih bagi masuarakat ❖ Pemenuhan kebutuhan ketersediaan perumahan yang layak bagi masyarakat ❖ Pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas kumuh	❖ Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS RKPD 2026
			❖ Penciptaan sanitasi yang layak bagi masyarakat	
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	**4.1** **Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa** **4.2** **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat** **4.3** **Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan** **4.4**	❖ Penciptaan Inklusivitas Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Industrialisasi Pertanian serta Penumbuhan Kewirausahaan melalui UMKM	❖ Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatansektor pertanian, UMKM dan Ekonomi Kreatif ❖ Pengembangan perencanaan terintegratif terhadap potensi pariwisata dan pertanian ❖ Penguatan kelembagaan ekonomi dan menjamin kemudahan usaha melalui regulasi yang afirmatif ❖ Pengembangan KEK Pariwisata ❖ Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan pertanian ❖ Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan pertanian ❖ Pemberian insentif kemudahan investasi dalam mendorong industrialisasi pertanian ❖ Pemanfaatan E-commerce dalam efisiensi tata niaga produk pertanian ❖ Peningkatan produktivitas komoditi unggulan pertanian	❖ Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS RKPD 2026
	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan		❖ Optimalisasi pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan sinergis ❖ Pengintegrasian perencanaan penganggaran daerah dan desa dalam menekan angka kemiskinan	❖ Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	**5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	❖ Melaksanakan Pembangunan yang Berorinetasi pada Pro Environment	❖ Melaksanakan Pembangunan yang Berorientasi pada *Pro Environment*	❖ Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

Keselarasan pembangunan di Kabupaten Bangka dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional menjadi fokus perencanaan terintegrasi sehingga akan dapat menyelesaikan tantangan pembangunan lebih cepat dan tepat. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka dalam RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka dalam RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RKPD Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026

KABUPATEN BANGKA	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	NASIONAL
Penguatan Kapasitas Birokrasi	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan

KABUPATEN BANGKA	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	NASIONAL
		Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan	PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
Pembangunan SDM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milineal dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan	PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, Bappelitbangda Prov. Babel dan Bappenas, 2025

Sementara keterkaitan sasaran, indikator kinerja dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Nasional Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10
Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka dalam RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RKPD Tahun 2026 dan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Prioritas RKPD Kab. Bangka	Prioritas RKPD Provinsi	Prioritas Nasional
1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
	Indeks SPBE			
	Indeks Profesionalitas ASN			
1.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya			
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			
1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat			
2.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Pembangunan SDM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milineal dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
	Angka Harapan Lama Sekolah			
2.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup			
	Angka Stunting			
2.3 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total			
2.4 Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender			
	Status Kabupaten Layak Anak			
3.1 Meningkatnya Kualitas dan	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Penguatan Sektor ekonomi unggulan	Meningkatkan Daya Saing	PN 3. Melanjutkan Pengembangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Prioritas RKPD Kab. Bangka	Prioritas RKPD Provinsi	Prioritas Nasional
Pemerataan Infrastruktur	Indeks Williamson	industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Perekonomian secara Berkelanjutan	Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
4.1 Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran Perkapita Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku)	Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan	PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

Sasaran	Indikator Kinerja	Prioritas RKPD Kab. Bangka	Prioritas RKPD Provinsi	Prioritas Nasional
				untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
4.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka	Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
4.3 Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	*Spending of Money Tourism*	Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan	PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
4.4 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks Ketahanan Bencana Daerah	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan	PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai

Sasaran	Indikator Kinerja	Prioritas RKPD Kab. Bangka	Prioritas RKPD Provinsi	Prioritas Nasional
				Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, Bappelitbangda Prov. Babel dan Bappenas, 2025

Selanjutnya, keselarasan antara sasaran dan indikator kinerja utama pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 dengan sasaran dan indikator kinerja RKP Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Keselarasan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Sasaran Strategis Kabupaten Bangka	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka	Sasaran Strategis Provinsi Kep. Bangka Belitung	Indikator Kinerja Utama Provinsi Kep. Bangka Belitung	Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional
1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	▪ Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten ▪ Indeks SPBE ▪ Indeks Profesionalitas ASN	Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani	Indeks Pelayanan Publik	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	*Global Power Indeks*
1.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	▪ Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumny ▪ Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani	Indeks Pelayanan Publik		
1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani	Indeks Pelayanan Publik		
2.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	▪ Angka Rata-Rata Lama Sekolah ▪ Angka Harapan Lama Sekolah	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata lama Sekolah	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia
2.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	▪ Angka Harapan Hidup ▪ Angka Stunting	Terwujudnya kesehatan untuk semua	▪ Usia Harapan Hidup ▪ Prevalensi Stunting		
2.3 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total	Terwujudnya kesehatan untuk semua	▪ Usia Harapan Hidup ▪ Prevalensi Stunting		
2.4 Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	▪ Indeks Pembangunan Gender ▪ Status Kabupaten Layak Anak	Terwujudnya pembangunan masyarakat yang berkualitas	Indeks Pembangunan Kebudayaan		

Sasaran Strategis Kabupaten Bangka	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka	Sasaran Strategis Provinsi Kep. Bangka Belitung	Indikator Kinerja Utama Provinsi Kep. Bangka Belitung	Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional
3.1 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	▪ Indeks Pemerataan Infrastruktur ▪ Indeks Williamson	Meningkatnya akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	Meningkatnya Pendapatan Per Kapita Menuju Setara Negara Maju	▪ Pertumbuhan Ekonomi ▪ GNI Per Kapita ▪ Kontribusi PDB Maritim ▪ Kontribusi PDB Manufaktur
4.1 Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	▪ Pertumbuhan Ekonomi ▪ Pengeluaran Perkapita ▪ Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku)	▪ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ▪ Meningkatnya Daya Saing Daerah ▪ Meningkatnya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan	▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi ▪ Indeks daya saing daerah ▪ Indeks Ketahanan pangan		
4.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	▪ Angka Kemiskinan ▪ Tingkat Pengangguran Terbuka	▪ Menurunnya tingkat kemiskinan ▪ Meningkatnya pemerataan pendapatan	▪ Tingkat Kemiskinan ▪ Tingkat Pengangguran Terbuka	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	▪ Tingkat Kemiskinan ▪ Rasio Gini ▪ Kontribusi KTI
4.3 Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	*Spending of Money Tourism*	▪ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ▪ Meningkatnya Daya Saing Daerah	▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi ▪ Indeks daya saing daerah	Meningkatnya Pendapatan Per Kapita Menuju Setara Negara Maju	▪ Pertumbuhan Ekonomi ▪ GNI Per Kapita ▪ Kontribusi PDB Maritim ▪ Kontribusi PDB Manufaktur

Sasaran Strategis Kabupaten Bangka	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka	Sasaran Strategis Provinsi Kep. Bangka Belitung	Indikator Kinerja Utama Provinsi Kep. Bangka Belitung	Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional
4.4 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	▪ Tingkat Kemiskinan ▪ Rasio Gini ▪ Kontribusi KTI
5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Menurunnya emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas emisi GRK	Intensitas emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*	▪ Penurunan Intensitas Emisi GRK Pengolahan Sampah ▪ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

Keselarasan perencanaan tahunan daerah juga dilakukan terhadap Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan prioritas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diuraikan sebagai berikut :

1. **Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Penguatan Kapasitas Birokrasi" dengan Program Daerah**

   Penguatan kapasitas birokrasi dalam prioritas pembangunan daerah dan prioritas nasional dilaksanakan dalam rangka menguatkan tranformasi tata kelola dalam rangka mewujudkan pemeritahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif. Sejalan dengan hal tersebut, daerah melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan regulasi terkait pelayanan publik, penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang profesional.

   Sasaran strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator dalam prioritas penguatan kapasitas birokrasi, dilaksanakan dengan menetapkan sasaran prioritas sebagai berikut : meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Capaian idikator terhadap sasaran ini akan tercapai dengan baik apabila infrastuktur digital terpenuhi secara maksimal. Selanjutnya konsistensi prioritas Penguatan Kapasitas Birokrasi dengan program prioritas daerah, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Penguatan Kapasitas Birokrasi" dengan Program Prioritas Nasional dan Program Daerah Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	1. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi 2. Pencegahan dan pemberantasan korupsi 3. Pencegahan dan pemberantasan narkoba 4. Penyempurnaan sistem penerimaan negara	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	1. Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah 2. Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah 3. Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Kelembagaan 4. Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Ketatalaksanaan 5. Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan AKIP 6. Persentase Layanan Administrasi bagi DPRD
						Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Indeks Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
							Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah 2. Indeks Inovasi Daerah
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase rumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Persentase rumusan kebijakan di bidang kesra dan kemasyarakatan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Persentase produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
							peraturan perundang-undangan 4. Persentase permasalahan hukum dan HAM yang terselesaikan
						Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2. Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Pembangunan yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3. Persentase Paket PBJ yang Transparan, Akuntabel dan Tepat Waktu
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Presentase Produk Hukum Daerah yang diselesaikan Tepat Waktu 2. Presentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
					Indeks SPBE	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) 2. Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral yang terintegrasi
						Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI
						Program Pengelolaan Arsip	1. Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif 2. Persentase Nilai Ketertiban Pelaksanaan Penyusunan Arsip 3. Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Statis

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
							4. Persentase Nilai Aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan 5. Persentase Nilai Aspek Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-Undangan 6. Persentase Nilai Aspek Tenaga Kearsipan 7. Persentase Nilai Aspek Program Kearsipan 8. Persentase Nilai Aspek Kelembagaan
					Indeks Profesionalitas ASN	Program Kepegawaian Daerah	1. Persentase Rencana kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan 2. Persentase pengadaan ASN sesuai dengan Rencana Kebutuhan ASN 3. Persentase Penempatan SDM sesuai standar kompetensi 4. Persentase Data Kepegawaian yang Up to date, Akurat, Cepat, Tepat 5. Persentase Perangkat daerah dengan kinerja ASN sesuai ekspektasi 6. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
							7. Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi kompetensi ASN
				Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Kapabilitas APIP
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penetapan APBD Tepat waktu 2. Persentase Layanan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah sesuai SOP 3. Penyusunan dan Penyampaian LKPD sesuai SAP Tepat Waktu 4. Persentase Layanan Penunjang Kewenangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
							Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertangani 5. Persentase Layanan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertangani
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Indeks Kinerja Pengelolaan BMD 2. Persentase Penyusunan dan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Penerbitan KIA 2. Persentase Penerbitan KK 3. Persentase Perekaman KTP EL
						Program Pencatatan Sipil	1. Persentase cakupan penerbitan Akta Kematian 2. Persentase cakupan penerbitan Akta Perkawinan 3. Persentase cakupan penerbitan Akta Kelahiran

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Instansi yang melakukan PKS pemanfaatan data
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan)	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP
						Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada 2. Presentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak
PN 1. Memperkokoh Idiologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)			Penguatan Kapasitas Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan
						Program Peningkatan Peran Partai	1. Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik 2. Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
						Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	mendapatkan pendidikan politik
						Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif
						Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
						Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

2. Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)" dengan Program Daerah

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sangat penting dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi local, regional dan dan nasional, yang didukung oleh capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang baik pasca terpuruknya ekonomi daerah di tahun 2025 yang mengalami kontraksi sebesar (0,44) persen.

Peningkatan ekonomi melalui penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru) juga harus didukung dengan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur pendukung perekonomian sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, keselarasan pembangunan perkotaan sebagai pusat aglomerasi kegiatan perekonomian serta pembanguann wilayah perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini juga harus didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan. Peningkatan kualitas infrastruktur juga menjadi hal yang penting dalam pembangunan kewilayahan. Keberlanjutan pembangunan infrastuktur berkualitas yang mendukung transformasi ekonomi yang fokus pada infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.

Selaras dengan agenda transformasi pembangunan nasional dalam RKP 2026 untuk ekonomi inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya dengan konsep pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, memproduksi barang dan jasa ramah lingkungan melalui industrialisasi pertanian dan UMKM serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Upaya untuk pencapaian indikator kinerja pembangunan ekonomi yang mendukung capaian pembangunan nasional dan pembanguann Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melakukan upaya strategis daerah dengan sasaran prioritas meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur, meningkatkan jumlah uang yang dibelanja wisatawan dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Upaya pencapaian strategis daerah untuk prioritas ini dilaksanakan dalam program daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13
Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)" dengan Program Daerah Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya 2. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan	Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pemerataan Infrastruktur Indeks Williamson	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi yang baik 2. Persentase Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik
						Program Pengelolaan dan Pengembangan	Persentase Rumah tangga yang menggunakan air minum

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
						Sistem Penyediaan Air Minum	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik
						Program Penataan Bangunan Gedung	Ketaatan terhadap Penataan Bangunan Gedung
						Program Penyelenggaraan Jalan	Persentajaringan jalan dalam kondisi mantap
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase SDM jasa kontruksi yang terlatih
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana yang Direkonstruksi
						Program Kawasan Pemukiman	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh
						Program Perumahan dan Kawasan	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
						Permukiman Kumuh	
						Program Peningkatan Prasanan Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah yang Memiliki Akses Sarana dan Prasarana Perumahan yang Layak
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penurunan Konflik Pertanahan
						Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah yang Terselesaikan
						Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Membuka Tanah
						Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Lahan Pemda yang Tersedia untuk Kegiatan Pembangunan
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	1. Pesentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
						Angkutan Jalan (LLAJ)	2. Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan 3. Persentase Wilayah yang terlayani angkutan umum
				Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	*Spending of Manoey (Milyar Rupiah)*	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Indeks Destinasi Pariwisata
						Program Pemasaran Pariwisata	Indeks Pemasaran Pariwisata
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks Kemitraan dan ekonomi kreatif bidang Pariwisata
						Program Pengembangan Kebudayaan	Indeks pengembangan budaya Indeks pemanfaatan budaya
						Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Indeks Perlindungan Budaya
				Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pengeluaran Perkapita	Program Pengawasan dan	Persentase Koperasi yang Aktif

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
					(Ribu Rupiah) 3. Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku) Ribu Rupiah	Pemeriksaan Koperasi	
						Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang mempunyai Kompetensi
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha
						Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro naik kelas
						Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Investasi
						Program Pelayanan	IKM Bidang Pelayanan Perizinan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
						Penanaman Modal	
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian investor yang melakukan penanaman modal
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola
PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai di Dalam Negeri	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi			Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah) 3. Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku) Ribu Rupiah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitasi untuk Pengembangan Produk IKM
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana distibusi yang direvitalisasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar
						Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	1. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan interansional yang kondusif 2. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air 3. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani			Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah) 3. Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku) Ribu Rupiah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Benih Unggul Pertanian
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Sapras Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner	Persentase Penyakit Ternak Yang Ditangulangi
						Program Pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian	Persentase Serangan OPT yang dapat dikendalikan
						Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Persentase Nelayan yang Dilayani 2. Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih 3. Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan 2. Persentase Pembudidaya yang Dilayani

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
							3. Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi 2. Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidaya ikan yang Diawasi
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan 2. Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 3. Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

3. Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial" dengan Program Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial melalui berbagai program dan kebijakan bantuan sosial yang sejalan dengan program prioritas nasional dan provinsi dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrim. Upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut antara lain dengan 1) Peningkatan Akurasi Data Penerima Bantuan; 2) Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran; 3) Pemberdayaan Ekonomi Lokal; 4) Peningkatan Akses Layanan Sosial; 5) Penanganan Khusus Kemiskinan Ekstrem; dan 6) Kolaborasi dan Kemitraan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*), keterlibatan LSM, akademisi dan masyarakat secara menyeluruh.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juag berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik sehingga akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diturunkan. Semakin kondusifnya perekonomian daerah diharapkan akan sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka akan menurun. Upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja; penumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; belanja pemerintah yang bersifat padat karya; dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif. Kemudian, strategi penyiapan kebekerjaan dan keahlian angkatan kerja dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, serta reformasi sistem perlindungan sosial.

Berdasarkan dua strategi besar pengurangan kemiskinan, yaitu strategi makro dan mikro, maka dibutuhkan kondisi yang optimal di masing-masing strategi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dijaga inklusif serta stabilitas inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat

utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan sarana dan prasarana dasar; akses terhadap informasi; layanan dasar; serta kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Kebijakan mikro atau program-program afirmasi disempurnakan dalam payung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui beberapa fokus, yaitu (1) pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk melakukan pensasaran program; (2) peningkatan kapasitas pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti; (3) penguatan dan pelaksanaan skema graduasi program-program bantuan sosial dan komplementaritasnya dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (4) integrasi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan dengan pendekatan adaptif dan penyaluran nontunai; (5) penyempurnaan sasaran program utamanya untuk pilar peningkatan pendapatan masyarakat sehingga secara tepat menyasar kelompok miskin dan rentan; (6) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat; serta (7) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan terutama yang berada di luar keluarga.

Untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi, membutuhkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah kebijakan yang dapat mempertahankan daya beli dan meningkatkan pendapatan. Sementara, untuk masyarakat berpenghasilan tinggi, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan yang dapat menciptakan redistribusi yang merata. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan : (1) pemanfaatan registrasi sosial-ekonomi; (2) peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial; (3) integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) penguatan bantuan permodalan bagi

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; (5) penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata, utamanya ditujukan untuk kelompok berpenghasilan tinggi; (6) meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi kebijakan terkait relaksasi pajak; dan (7) pemberian bantuan sosial langsung untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

Tabel 4.14
Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial" dengan Program Daerah Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya	Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Angka Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial
						Program Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan
						Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang kompeten
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
						Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
							syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan
				Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa yang Memiliki Administrasi yang Baik 2. Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (8 Kec)	1. Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang 2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (7 Kecamatan)	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum
						Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (8 Kecamatan)	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

4. Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Pembangunan SDM" dengan Program Daerah

Pembangunan Manusia masih terbatas pada komponen kuantitas yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta kehidupan layak (pengeluaran per kapita). Akan dilakukan penyesuaian dengan Indeks Modal Manusia yang terdiri dari penilaian capaian aspek kesehatan (prevalensi balita tidak stunting, peluang bertahan hidup balita dan peluang bertahan hidup usia produktif) dan pendidikan (harapan lama sekolah) dan *harmonized test scores.*

Upaya pencapaian target pembangunan manusia dilakukan melalui upaya peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Upaya eningkatan kesehatan untuk semua : (1) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; (2) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (3) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; dan (4) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. Untuk akses dan kualitas pendidikan, akan ditingkatkan melalui (1) percepatan Wajib Belajar 13 Tahun mencakup perluasan 1 tahun pra-sekolah (perluasan Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal) dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang disertai penguatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; (2) peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan tinggi, melalui peningkatan efektivitas bantuan pendidikan, khususnya bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, berasal dari daerah afirmasi, dan berprestasi; (3) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, peningkatan kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

Selaras dengan agenda pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam RKP 2026 yaitu sumber daya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan

Sumber Daya yang Berdaya Saing dan Produktif, dilakukan upaya strategis daerah dengan sasaran prioritas meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas perempuan dan anak. Upaya pencapaian strategis daerah untuk prioritas ini dilaksanakan dalam program prioritas daerah secara rinci dapat dilihat pada dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15
Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Pembangunan SDM" dengan Program Daerah Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milineal dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	1. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi 2. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat 3. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan	Pembangunan SDM	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2. Angka Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	1. APM SD 2. APM AMP 3. Kualitas Pembelajaran Jenjang SD 4. Kualitas Pembelajaran Jenjang SMP 5. APM 5-6 6. Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan 7. Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
						Program Pengembangan Kurikulum	1. Kualitas pengelolaan kurikulum sekolah 2. Muatan Pengembangan Kurikulum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
						Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Proporsi GTK bersertifikat jenjang SD 2. Proporsi GTK bersertifikat jenjang SMP 3. Indeks Distribusi Guru 4. Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar pada Pendidikan Non Formal
						Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Tingkat kepatuhan terhadap penyelenggara perizinan
						Program Pembinaan Perpustakaan	1. Tingkat Kepuasan Pemustaka

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
							2. Persentase Masyarakat yang Gemar Membaca
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persetase Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang Aktif
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Persentase Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahrga dan Organisasi Olahraga 2. Persentase sarana dan prasarana olehraga yang memenuhi standar 3. Persentase atlet yang berprestasi
				Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup 2. Angka Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan 2. Indeks Keluarga Sehat 3. Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
						Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas SDMK sesuai standar
						Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase pengawasan toko obat, apotek, dan keamanan pangan yang beredar sesuai standar
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pengawasan toko obat, apotek, dan keamanan pangan yang beredar sesuai standar
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks rumah tangga yang berPHBS
						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase Cadangan Pangan Pemerintah 2. Persentase peningkatan kelancaran distribusi pangan 3. Persentase Peningkatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
							Konsumsi Umbi Umbian
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Masyarakat
				Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total	Program Pengendalian Penduduk	Ketersediaan kebijakan pengendalilan pendudukan yang disediakan sesuai dengan ketentuan
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Cakupan penggunaan alat kontrasepsi MKJP 2. Cakupan Peserta KB Aktif

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter 2. Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe 3. Jumlah Kelompok BKL yang Melaksanakan 7 (tujuh) dimensi Lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia 4. Persentase balai penyuluh KB yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga
				Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	1. Indeks Pembangunan Gender	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
						Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menerapkan PPRG
						Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Yang Terselesaikan
					2. Status Kabupaten Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga PHA yang berkualitas
						Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase Kasus Kekerasan Anak yang Terselesaikan

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

5. Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Pengelolaan Lingkungan Hidup" dengan Program Daerah

Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam dapat dilakukan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang memperhatikan keseimbangan siklus alam**,** seperti siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, dan daur ulang materi organik**.** Pengelolaan ini mencakup praktik ramah lingkungan seperti pelestarian hutan, pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle), pemanfaatan energi terbarukan, serta pertanian dan perikanan berkelanjutan. Dengan menjaga agar siklus-siklus alam tidak terganggu oleh aktivitas manusia, maka fungsi ekologis dapat terus berjalan dan mendukung kehidupan seluruh makhluk hidup secara seimbang dan berkelanjutan.

Terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca yang menjadi permasalahan dalam pembangunan lingkungan hidup menjadi prioritas utama pemerintah pusat maupun daerah. Komitmen nasional untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, dapat tercapai apabila di dukung oleh pencapaian daerah. Dalam hal ini untuk mendukung gerakan penurunan emisi gas rumah kaca dengan penerapan ekonomi hijau melalui pengelolaan lingkungan hidup terutama pengelolaan hutan lestari sekaligus untuk menanggulangi kebencanaan.

Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui penyusunan kebijakan dan regulasi daerah, pemetaan potensi sumber energi lokal seperti tenaga surya, mikrohidro, biomassa, serta penyediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur EBT skala kecil. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam melakukan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat dan tenaga teknis lokal, mendorong penggunaan EBT di fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas, serta menjalin kemitraan dengan swasta, LSM, dan lembaga pemerintah lainnya. Upaya ini mendukung percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kesiapsiagaan bencana yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang harus dilakukan melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembentukan tim tanggap darurat, dan pelatihan masyarakat agar siap menghadapi risiko bencana. Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam penguatan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengelolaan data risiko, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti BNPB, TNI, Polri, dan relawan. Peran ini juga mencakup penyediaan anggaran darurat, logistik, serta layanan evakuasi dan rehabilitasi pascabencana guna meminimalkan dampak serta mempercepat pemulihan masyarakat terdampak secara efektif dan terencana.

Upaya penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam dan kesiapsiagaan dalam bencana dilaksanakan melalui sasaran strategis daerah dengan prioritas untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pencapaian strategis daerah untuk prioritas ini dilaksanakan dalam program daerah secara rinci dapat dilihat pada dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.16
Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Daerah "Pengelolaan Lingkungan Hidup" dengan Program Daerah Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1. Menjamin pelestarian lingkungan hidup 2. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	Mengelola Sumber Daya secara Bijak dan Berkelanjutan	Pengelolaam Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Indeks Ketahanan Bencana Daerah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati yang dikelola
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah	Persentase Penghasil Limbah B3 yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan baik

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
						Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
						Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengawasan ketaatan pelaku usaha/kegiatan secara administrasi meupun teknis
						Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Perda tentang pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diselesaikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pelayanan dan Fasilitasi pengaduan lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Persampahan	1. Persentase Pengurangan Sampah 2. Persentase Penanganan Sampah
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang
						Program Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran 2. Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi 3. Presentase Investigasi Kejadian Kebakaran
						Program Penanganan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat terhadap Kejadian Pasca Bencana

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

Secara keseluruhan program prioritas daerah sudah selaras dengan program prioritas nasional. Untuk keselarasan kegiatan prioritas utama (prioritas nasional) dengan program prioritas daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.17
Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Program Prioritas Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
1.	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggungjawab, Edukatif, Jujur, objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
			Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.	Prioritas Nasional 2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah	
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan	
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan	
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			Kagiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
			Kagiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
			Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
			Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Sub Kegiatan Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			Kagiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
			Kagiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
			Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
		Pembangunan pangan hewani	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
			Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
			Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Keci
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		Peningkatan penyediaan energi	
		Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi	
		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan	
		Konservasi sumberdaya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
			Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
			Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
			Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
			Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
			Sub Kegiatan Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Sub KegiatanOptimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
			Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa	
		Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
			Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
			Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
			Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
			Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
			Sub KegiatanPenguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
			Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
			Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
			Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
			Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Kegaiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
			Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan susut dan sisa pangan	
		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
			Sub KegiatanPengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Peningkatan kualitas ekosistem gambut	
		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Kegiatan Pengelolaan Sampah
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
			Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Kegiatan Pengelolaan Sampah
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	
3.	Prioritas Nasional 3	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	
		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
			Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur Yogyakarta-Prambanan	
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena	
		Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas labuhan Bajo	
		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	
		Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
			Pengembangan Usaha Mikro

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
4.	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah berkualitas	
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g.pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
			Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi	
		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
			Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
		Penurunan Kematian ibu dan anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
		Pencegahan dan penurunan stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
			Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil. Ibu menyusui dan balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
			Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Sub Kegiatan Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
			Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
		Eliminasi penyakit kusta&Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Investasi pelayanan kesehatan primer	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
			Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
			Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
			Pengembangan Rumah Sakit
			Pengembangan Puskesmas
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan manajemen Talenta nasional (MTN) seni budaya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		Pengembangan manajemen Talenta nasional (MTN) riset dan inovasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		Pengembangan manajemen Talenta nasional (MTN) olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
			Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
5.	Prioritas Nasiomal 5	Pengembangan hilirisasi Nikel	
		Pengembangan hilirisasi Tembaga	
		Pengembangan hilirisasi Bauksit	
		Pengembangan hilirisasi Timah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengawasan Penanaman Modal
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
			Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengawasan Penanaman Modal
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan hilirisasi Kelapa	
		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut	
		Pengembangan hilirisasi Kimia	
		Pengembangan industri semikonduktor	
		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil	
		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja	
		Pengembangan industri dirgantara	
		Pengembangan KEK Sei Mangkei	
		Pengembangan KIT Batang	
		Pengembangan KI Weda bay	
6.	Prioritas Nasiomal 6	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITATENAGA KERJA
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke ibu Kota Nusantara	
		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	PROGRAM PENATAAN DESA
			Penyelenggaraan Penataan Desa
			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
7	Prioritas Nasional 7	Pencegahan tindak pidana korupsi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
			Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Sub Keg.Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
			Sub Keg. Pengelolaan Promosi ASN
		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMIUNIKASI PUBLIK
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
			Pelayanan Informasi Publik
		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Sub.Keg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
			Sub.Keg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
			Sub.Keg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
			Sub.Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
			Sub.Keg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
			Sub.Keg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
			Sub.Keg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
			Sub.Keg Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
			Sub.Keg Penagihan Pajak Daerah
			Sub.Keg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
			Sub.Keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
			Sub.Keg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
		Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
8	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
			Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
			Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
			Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka
			Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
			Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
		Pemanfaatan khazanah budaya dan Pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Sub. Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Sub. Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
			Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
			Sub. Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD TAHUN 2026
			Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
			Sub. Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
			Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
			Sub. Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
			Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

4.3.3. Dukungan Program Unggulan Daerah untuk Percepatan Pencapaian Prioritas Nasional

Untuk percepatan pencapaian indikator prioritas nasional, maka daerah melaksanakan program unggulan sebagai berikut :

4.3.3.1. Program Unggulan Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Upaya daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat dibagi atas 3 jenis program intervensi. Yakni program dalam kelompok intervensi peningkatan produksi barang dan jasa sektor unggulan, program terkait stimulus fiskal untuk usaha kecil dan program dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

a. Modernisasi Pertanian dan Perikanan

Moderisasi pertanian dan perikanan yaitu berupa sarana prasarana produksi pertanian yang menggunakan teknologi terkini dan sarana prasarana produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal tangkap modern yang dilengkapi mesin dengan kapasitas diatas 5 GT dilengkapi serta *fish finder.* Modernisasi ini untuk mengatasi konflik zona penangkapan ikan dengan zona penambangan laut yang sebagaian besar berada di atas 0-2 mil.

b. Revitalisasi UMKM dan Pariwisata

Program unggulan revitalisasi UMKM dan pariwisata berupa pemberian pinjaman tanpa bunga tanpa aggunan bagi UMKM yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang disalurkan melalui Bank Sumsel Babel, bunga pinjaman ini disubsidi atau ditanggung melalui APBD Kabupaten Bangka sehingga pelaku UMKM hanya membayar pokok pinjamannya saja. Sedangkan revitalisasi pariwisata dilakukan dengan membangun fasilitas galeri dan pusat UMKM di lokasi wisata Pantai Matras.

c. Revitalisasi industri makanan dan minuman skala rumah tangga

Struktur perekonomian Indonesia sangat didominasi oleh sektor industri dengan kontribusi sebesar 19,82 % dari total PDB, dimana 32,69 % diantaranya disumbangkan oleh industri makanan dan minuman. Selaras dengan Indonesia,

struktur perekonomian Kabupaten Bangka juga didominasi sektor industri. BPS Kabupaten Bangka menyebutkan bahwa kontribusi sektor industri dalam pembentukan PDRB Tahun 2023 mencapai 25,26 % dan menjadi kontributor utama dalam perekonomian daerah. Dari jumlah tersebut, industri pengolahan makanan dan minuman mengambil peran dominan dengan kontribusi 54,07% dari total kontribusi sektor industri. Fakta perekonomian tersebut menjustifikasi bahwa penguatan industri makanan dan minuman, dipastikan dapat memperkuat sector industri secara agregat dan pada gilirannya juga dapat mempercepat pertumbuhan dan pemulihan perekonomian, Dari sekian banyak jenis produk industri makanan dan minuman yang beredar dipasaran, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan komoditi industri pangan utama dengan peran dominan dalam perekonomian daerah Kabupaten Bangka dan nasional.

d. Percepatan Belanja APBD melalui e-Katalog Lokal dan Penguatan Kandungan Lokal

Program unggulan lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka yaitu percepatan belanja APBD melalui e-katalog lokal dan penguatan kandungan lokal yang diinisiasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bangka agar belanja Perangkat Daerah dilakukan melalui e-katalog lokal yang tersedia di Aplikasi LPSE. Katalog lokal yang tersedia berupa jasa makan dan minum serta alat tulis kantor yang ditawarkan oleh penyedia jasa lokal yang ada di Kabupaten Bangka. Sedangkan untuk kandungan lokal disetiap pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah diupayakan lebih dari 70 persen. Subsidi sarana produksi sektor pertanian/perikanan/UMKM/IKM.

Di tengah pandemik, Pemerintah Kabupaten Bangka perlu menjaga stabilitas pangan dan produk hasil pertanian agar masyarakat mampu mendapatkan pangan serta kebutuhan pokok. Bantuan sarana produksi juga diberikan kepada UMKM dan IKM yang mengalami permasalahan permodalan sarana prasarana.

e. Sertifikasi halal

Salah satu permasalahan mendasar UMKM adalah belum terjaminnya kehalalan dan keamanan produk sehingga mempersulit pemasarannya. Pemerintah Kabupaten Bangka telah mengeluarkan regulasi Peraturan Bupati No 7B tentang Roadmap Pengembangan Industri Makanan dan Minuman dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penggunaan Aplikasi SMART-IN PIRT dalam Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Bangka dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 441/1475/DINKES/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat sektor UMKM termasuk sertifikasi Halal bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka Nomor.

f. Aplikasi Khusus Penjaman Makanan

Lahirnya PP No. 05 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sector kesehatan memerlukan adaptasi cepat untuk mengimplementasi regulasi. Pada peraturan baru ini salah satu kegiatan usaha yang diatur terkait tata cara penerbitan laik hygiene sanitasi usaha di sektor pangan siap saji termasuk depot air minum diharuskan melalui aplikasi OSS dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Sertifikat food handler/penjamah makanan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan jika pengusaha/karyawan telah mengikuti baik berupa penguatan kapasitas/pelatihan/kursus penjamah makanan dengan materi terkait hygiene sanitasi pangan.

Permasalahan selanjutnya muncul yaitu tidak tersedianya anggaran untuk melakukan kursus penjamah makanan secara LURING (luar jaringan) yaitu berupa anggaran konsumsi, sewa gedung, nara sumber dan lain-lain. Dari permasalahan diatas setelah dilakukan diskusi maka dicetus ide untuk membuat aplikasi kursus secara DARING (dalam jaringan) yang bisa diakses oleh sasaran dan tidak memerlukan biaya sama sekali sehingga muncul inovasi “APLIKASI KURSUS PENJAMAH MAKANAN DAN DEPOT AIR MINUM”, Aplikasi ini dapat

diikuti melalui handphone android type apapun, sederhana, mudah dimengerti oleh para pengusaha pangan siap saji dan depot air minum isi ulang. Di dalam aplikasi ini dimasukkan modul standar dari kemenkes yang dapat didownload, dipelajari, kemudian jika sudah paham peserta dapat mengikuti ujian, jika peserta memperoleh nilai minimal 75 maka peserta akan bisa memiliki sertifikat penjamah makanan setelah dilakukan approve/persetujuan. Kelompok sasaran inovasi para pengusaha mulai dari usaha kecil sampai besar yang bergerak di sektor pangan siap saji yang berjumlah 839 unit usaha. Tujuan Inovasi ini adalah membantu dan mempermudah para pengusaha rumah makan, restoran, makanan jajanan dan depot air minum, gerai pangan jajanan untuk memahami tata cara pengolahan pangan sesuai standard dan dapat memiliki sertifikat penjamah makanan/depot air minum sebagai persyaratan untuk mendapat sertifikat laik hygiene sanitasi.

g. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dilakukan melalui program Padat Karya, pemberdayaan UKM, Peningkatan Industri Rumah Tangga, BUMDes, dan Kelompok Tani.

Program pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup Padat Karya pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya.

Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan melalui Alokasi Anggaran Desa (ADD) melalui APBD yang besarannya terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan ADD ini digunakan untuk mengintervensi dan mendorong perekonomian desa. ADD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan.

4.3.3.2. Program Unggulan Aspek Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan tingkat pengangguran, sehingga diperlukan adanya program unggulan dalam mengatasi tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka. Beberapa program dalam mengurangi tingkat pengangguran, antara lain:

a. Pelatihan Entrepreneurship Terintegrasi Bursa Kerja

Dengan jumlah kelompok usia produktif yang cukup tinggi, Indonesia sedang mengalami bonus demografi, yang menjadi aset pemerintah untuk meningkatkan kualitas produktivitas perekonomian. Sehingga saat ini adalah waktu yang tepat, untuk segera melakukan pembangunan sektor Sumber Daya Manusia, melalui menciptakan SDM yang unggul, produktif dan berdaya saing dalam berwirausaha, salah satunya melalui Program Pelatihan Entrepreneurship Terintegrasi Bursa Kerja. Pemberdayaan masyarakat yang dikemas melalui pelatihan Entrepreneurship Terintegrasi Bursa Kerja. Ini dilakukan agar masyarakat bisa bertahan di tengah pandemi sekaligus menghadirkan wirausaha baru yang akan menyerap tenaga kerja.

Pelatihan entrepreneurship terintegrasi bursa kerja untuk mendorong pemerintah daerah dan stakeholder untuk secara bersama-sama meningkatkan perekonomian, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menyiapkan wirausaha produktif di berbagai bidang. Tujuan pelatihan entrepreneurship terintegrasi bursa kerja adalah untuk menyiapkan wirausaha produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing, meningkatkan kompetensi manajerial melalui pelatihan, coaching dan mentoring dan memperoleh output, outcome, benefit dan impact yang signifikan; meningkatkan mutu kemasan produk; meningkatkan skill pemasaran online dan offline; serta memfasilitasi akses perizinan dan legalitas melalui dinas terkait.

Program unggulan pelatihan entrepreneurship terintegrasi bursa kerja yang dituangkan dalam program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja,

program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial dan program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif.

b. Padat Karya

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk program padat karya yang akan menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.

Untuk meminimalisasi kenaikan angka pengguran yang tersebar di pedesaan dan perkotaan. Pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bangka diarahkan pada program padat seperti pembangunan drainase dan jalan usaha tani dan yang lainnya melalui dikeluarkannya Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Jenis Kegiatan padat karya dapat dilakukan melalui: (1) Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan Desa, antara lain: perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala Desa, tambatan perahu; (2) pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; atau (3) kegiatan produktif lainnya yg memberikan nilai tambah kepada masyarakat dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada dan sifatnya berkelanjutan. (4) Pemberdayaan Masyarakat, antara lain: Pengelolaan sampah; Pengelolaan limbah; Pengelolaan lingkungan pemukiman; Penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita).

Program unggulan padat karya dituangkan dalam program pengelolaan sumber daya air (SDA), program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengembangan permukiman, program penyelenggaraan jalan, program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program

perumahan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh dan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

Adapun tujuan dari Program Padat Karya yaitu untuk mengurangi pengangguran, dan masyarakat miskin; Memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat; Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat; Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat; Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan Padat Karya tunai.

c. Fasilitasi Kemudahan Investasi

Dalam upaya meningkatkan realisasi investasi, ada beberapa strategi yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka. Beberapa di antaranya seperti proses perizinan yang dipercepat dan tersedia dalam sistem online. Saat ini juga sudah tersedia sistem *Online Single Submission* (OSS), sehingga para pelaku usaha tidak perlu mengunjungi langsung kantor yang mengurusi perizinan. OSS ini juga membantu para pelaku usaha untuk berhubungan dengan *stakeholders*, menyimpan data perizinan yang sudah diperoleh, melaporkan isu terkait izin, dan lain-lain. Untuk memfasilitasi kemudahan investasi Pemerintah Kabupaten Bangka telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka.

Pemberian insentif dapat berbentuk: (a)Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; (b) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; (c). Pemberian dana stimulan; dan (d). Pemberian bantuan modal.

Pemberian kemudahan dapat berbentuk : (a). Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; (b). Penyediaan sarana dan prasarana; (c). Penyediaan lahan atau lokasi; (d). Pemberian bantuan teknis; dan (e). Percepatan pemberian perizinan. Dengan adanya fasilitas penanaman modal pelaku usaha akan semakin

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan lapangan pekerjaan terbuka luas. Dalam upaya untuk mengurangi pengangguran adalah dengan memberi kemudahan kepada para investor dalam berinvestasi di Kabupaten Bangka. Semakin banyak investor yang berinvestasi akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak sehingga akan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak dan pada akhirnya mengurangi tingkat pengangguran. Program unggulan fasilitasi kemudahan investasi dituangkan dalam Program perencanaan dan pembangunan industri, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program promosi penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

d. Bursa Kerja Online *(labor market information)*.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung perencanaan tenaga kerja yang tepat. Berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan sangat tergantung dari ketersediaan informasi yang cepat dan valid. Untuk mengetahui implementasi keberhasilan program penanggulangan pengangguran baik yang di kota maupun di desa perlu disusun sistem informasi untuk memonitor keadaan pasar kerja yang tersedia.

e. Pengembangan dan bimbingan usaha secara mandiri.

Program ini merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran terdidik baik di perkotaan maupun di pedesaan melalui pembentukan kelompok- kelompok usaha kecil dengan fasilitasi dari pemerintah daerah. Kelompok-kelompok usaha ini perlu dibimbing dan difasilitasi baik dari segi ketrampilan berwirausaha, pendanaan, manajemen usaha, sampai dengan pemasaran dari produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya kelompok usaha mandiri yang sudah dapat berdiri sendiri dan mapan, dapat secara bergantian dan berantai memfasilitasi kelompok usaha baru lainnya, maka upaya ini akan dapat menyerap banyak tenaga kerja baru.

f. Penempatan tenaga kerja secara langsung di pasar kerja.

Program penempatan bagi para pencari kerja atau pengangguran dilaksanakan melalui sistem informasi pasar kerja dan bursa tenaga kerja terpadu. Dengan pengembangan sistem informasi yang baik, maka setiap kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja akan dapat terdeteksi secara cepat dan tepat. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pencari kerja, mereka perlu dibekali dengan pelatihan kerja atau pemagangan dengan cara on-the job training maupun off-the job training. Para pencari kerja yang telah mendapat bekal tersebut dapat dipastikan akan lebih kompetitif di dalam perebutan bursa tenaga kerja, sehingga mereka akan lebih mudah ditempatkan karena mereka telah siap memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Di samping itu, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang baik memungkinkan para pencari kerja dapat meningkatkan mobilitasnya dalam rangka mengisi setiap lowongan kerja yang tersedia.

4.3.3.3. Program Unggulan Aspek Kemiskinan

a. Integrasi dan Transformasi Bantuan Sosial

Beberapa upaya dilakukan Pemkab Bangka untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin khususnya miskin ekstrem. Salah satu permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial yang menyebabkan masih tingginya inclusion dan exclusion error dalam penyaluran program. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bangka menjadikan Integrasi dan Transformasi Bantuan Sosial sebagai program unggulan melalui pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Beberapa aspek akan diperkuat pelaksanaannya, yaitu (1) perluasan pendataan penduduk miskin dan rentan dengan pengembangan Registrasi Sosial-Ekonomi dan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan, khususnya di lokasi penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam; (3) pengembangan mekanisme penyaluran bantuan melalui pemanfaatan berbagai platform pembayaran digital; (4) reformasi skema pembiayaan yang inovatif,

ekspansif, dan berkesinambungan; (5) integrasi program untuk meningkatkan kecukupan manfaat dan efektivitas dampak terhadap kemiskinan; dan (6) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi dan berkelanjutan untuk program-program bantuan sosial. Melalui pelaksanaan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung pemulihan kondisi ekonomi diharapkan angka kemiskinan semakin menurun.

b. Mikro Kredit Tanpa Bunga Tanpa Agunan Untuk UMKM

Pemkab Bangka membuat Program Unggulan Mikro Kredit Tanpa Bunga Tanpa Agunan Untuk UMKM (Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Tanpa Bunga dan Tanpa Agunan untuk Usaha Mikro se Kabupaten Bangka agar Omset Meningkat dan Bertambah) ini mensinergikan lima pilar pembangunan dan penggerak ekonomi, Pemerintah Pusat sebagai pemilik Program, Pemerintah Kabupaten Bangka selaku Penanggung dana bunga pinjaman, Perbankan (Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel)selaku penyalur dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bangka selaku penerima manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa bunga dan tanpa agunan sehingga bunga pinjaman 0%, dan Media Massa baik Elektronik mmaupun cetak sebagai corong informasi.

c. *Universal Health Coverage* (UHC)

Permasalahan Kesehatan di Kabupaten Bangka diantaranya Sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang belum tercukupi, baik dari jumlahnya maupun pemerataan sebarannya, kelengkapan sarana prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan progress pencapaian UHC Kabupaten Bangka pada thingga bulai Mei Tahun 2025 sebesar: 98,39 % artinya hamper semua masyarakat Kabupaten Bangka mendapatkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten bangka menjadikan Universal health Coverage (UHC) sebagai program unggulan, hal ini sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sejalan dengan upaya-upaya yang dicanangkan dalam Program Kerja WHO.

Dalam Sidang WHO Executive Board ke 144 tahun 2019, telah disepakati WHO 13th General Program of Work untuk dicapai pada tahun 2023 oleh semua negara anggota WHO, termasuk Indonesia.Target-target tersebut mencakup: 1) Satu milyar orang mendapatkan manfaat UHC, 2). Satu milyar orang lebih terlindungi dari kedaruratan kesehatan; dan 3). Satu milyar orang menikmati hidup yang lebih baik dan sehat.

4.3.3.4. Program Unggulan Aspek Pembangunan Manusia

Untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, indikator penting yang di gunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan dan pendapatan. IPM Kabupaten Bangka tahun 2024 sebesar 74,66 sudah masuk dalam kategori tinggi, namun pertumbuhannya belum signifikan, masih di bawah provinsi dan nasional. Untuk meningkatkan IPM, Pemerintah Kabupaten Bangka memiliki beberapa program di tiga aspek tersebut.

Gambar 4.11
Program Pemerintah Kabupaten Bangka untuk Meningkatkan IPM

a. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan diukur dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk

dalam kegiatan bersekolah. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka tahun 2024 sebesar 8,45 hal ini menunjukkan penduduk Kabupaten Bangka usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,45 tahun atau setara dengan jenjang kelas IX. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Aspek pendidikan juga di ukur dari Angka Harapan Lama Sekolah. Indikator Angka Harapan Sekolah digunakan untuk mengetahui pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang pendidikan. Di tahun 2024 angka harapan lama sekolah Kabupaten Bangka sebesar 13,12 menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun memiliki harapan untuk menikmati pendidikan selama 12,12 tahun atau setara jenjang diploma 2.

- **PANTAS**

Aspek pendidikan diukur dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka tahun 2024 sebesar 8,45 hal ini menunjukkan penduduk Kabupaten Bangka usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,45 tahun atau setara dengan jenjang kelas IX. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Aspek pendidikan juga di ukur dari Angka Harapan Lama Sekolah. Indikator Angka Harapan Sekolah digunakan untuk mengetahui pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang pendidikan. Di tahun 2024 angka harapan lama sekolah Kabupaten Bangka sebesar 13,12 menunjukkan bahwa anak usia 7 memiliki harapan untuk menikmati pendidikan selama 13,12 tahun atau setara jenjang diploma 2.

Program unggulan yang mendukung bidang pendidikan adalah Program Pengentasan Anak Putus Sekolah. Merupakan Program Pemerintah Kabupaten

Bangka menjaring anak-anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi maupun non ekonomi, untuk disekolahkan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dan Beasiswa Pendidikan. Pemerintah pro aktif menjaring anak yang putus sekolah dan diedukasi agar mereka berkeinginan untuk sekolah. Program ini adalah Inisiatif kemitraan penjaringan anak putus sekolah untuk mewujudkan Bangka Bebas Putus Sekolah. Anak putus sekolah dijaring untuk diperoleh data anak-anak putus sekolah di seluruh desa, pemerintah juga melakukan edukasi terhadap objek anak putus sekolah agar dapat melanjutkan sekolahnya dan diberikan bantuan langsung berupa beasiswa maupun melalui program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pemerintah Derah juga membentuk satgas penjaringan anak putus sekolah dimana satgas tersebut dianggotakan seluruh perwakilan kecamatan, desa dan lembaga masyarakat yang ada di desa. Langkah pertama Satgas bergerak untuk mendata berapa jumlah anak putus sekolah di wilayahnya masing-masing by name by address dan penyebab putus sekolah kemudian untuk dilaporkan ke UPT Pendidikan yang berada di kecamatannya masing-masing untuk dientri ke dalam aplikasi. Data tersebut kemudian dipilah mana anak putus sekolah yang masih berada di usia sekolah yang intervensinya dikembalikan ke sekolah melalui beasiswa apabila kurang mampu dan mana anak putus sekolah yang sudah diluar usia sekolah yang mana intervensinya melalui sekolah paket PKBM.

- **Penguatan Kapasitas Pendidikan Non Formal**

Pendidikan nasional, sebagai salah satu sistem dari supra sistem pembangunan nasional, memiliki tiga subsistem pendidikan salah satunya adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pemerintah Kabupaten Bangka menyelenggarakan program pendidikan Non Formal berupa pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan Non Formal lainnya

yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangka juga mendorong pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kecamatan se-Kabupaten Bangka.

- **Beasiswa Pendidikan**

Pemerintah Kabupaten Bangka mengeluarkan program beasiswa yang terdiri dari beasiswa siswa miskin di Kabupaten Bangka (Bangka Cerdas) dan Beasiswa Utusan Daerah. Penerima beasiswa miskin bagi pelajar tidak mampu di tetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bangka, sasaran penerima program beasiswa miskin terdiri dari pelajar tingkat SD dan SMP.

Program Beasiswa miskin (Bangka Cerdas) merupakan bantuan langsung berupa bantuan tunai pendidikan menyasar 500 (lima ratus) peserta didik setiap tahunnya, pelaksanaannya di kendalikan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka yang berkoordinasi langsung dengan seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bangka dan bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel sebagai penyalur beasiswa kepada siswa yang berhak berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Aspek pendidikan juga di ukur dari Angka Harapan Lama Sekolah. Indikator Angka Harapan Sekolah digunakan untuk mengetahui pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang pendidikan. Program unggulan yang mendukung peningkatan angka harapan lama sekolah yaitu:

- Pemerataan Sarana dan Prasarana pendidikan antar wilayah

Kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) memberikan kesempatan sekolah-sekolah untuk membebaskan biaya pendidikan, sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), serta beasiswa Bangka Cerdas memberikan bantuan biaya untuk memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Bangka dapat menikmati pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari pengelolaan, pengadaan, pemanfaatan,

pemeliharaan dan pengawasan. Pemerintah Daerah menggunakan sumber anggaran APBN, DAK, DID, APBD dan CSR untuk memastikan ketersedian sarana dan prasarana yang merata di seluruh Kabupaten Bangka.

- Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan

Kebijakan perluasan akses pendidikan memberikan harapan besar bagi anak-anak Kabupaten Bangka untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong pihak sekolah untuk mewujudkan Program Sekolah Penggerak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang akan mendorong satuan pendidikan sekolah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Pemerintah kabupaten Bangka juga menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa atau sesuai dengan kebutuhan.

b. Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Tahun 2024 angka harapan hidup Kabupaten Bangka sebesar 71,80 artinya setiap bayi yang lahir di tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,80 tahun. Program unggulan pemerintah Kabupaten Bangka yang mendukung peningkatan angka harapan hidup adalah:

- **Peningkatan Kapasitas RSUD dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama**

Aspek kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Tahun 2024 angka harapan hidup Kabupaten Bangka sebesar 71,80 artinya setiap bayi yang lahir di tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,80 tahun. Program unggulan pemerintah Kabupaten Bangka yang

mendukung peningkatan angka harapan hidup adalah Peningkatan Kapasitas RSUD dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara; Peningkatan kualitas Puskesmas di semua Kecamatan menjadi Puskesmas rawat inap yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana memadai; Pembangunan Rumah Sakit Pratama tipe D di Kecamatan Belinyu dan Rumah Sakit Pratama di Kec. Puding Besar dilengkapi dengan prasarana, tenaga medis, dan dokter spesialis; Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat; Pembangunan Puskesmas Pariwisata; Layanan SPGDT PSC 119, merupakan Program layanan kesehatan tanggap darurat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangka melalui mobil operasional yang terintegrasi melalui aplikasi berbasis android, dengan layanan cepat dan dokter berpengalaman.

- **Program Kesehatan Ibu Hamil**

Pemerintah Kabupaten Bangka mmemberikan pelayanan kesehatan ibu hamil melalui beberapa program layanan antara lain; BUMILRESTI (Perburuan Ibu Hamil Beresiko Tinggi), merupakan program Pemerintah Daerah untuk penyelamatkan ibu hamil yang beresiko tinggi dengan cara mencatat, menginformasikan, mengunjungi dan memberikan perlakuan kesehatan untuk mengurangi resiko kematian; SI RESTI CIKAR (Sistem Informasi Ibu Hamil Resiko Tinggi Catat Informasikan Kunjungi Atasi Resiko) adalah upaya pendeteksian dan pemantauan kepada ibu hamil terutama untuk ibu hamil dengan resiko tinggi dengan "sistem pencatatan dan pelaporan yang ada pada ibu hamil;

- **Program Pengelolaan Stunting**

Stunting merupakan persoalan krusial yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, persoalan stunting bukan hanya berbicara tentang gizi pada anak Balita, akan tetapi menyangkut semua aspek. Dengan menggunakan metode kolaboratif, Stunting di Kabupaten Bangka berdasarkan EPPGBM terjadi penurunan angka stunting. Pengelolaan stunting di Kabupaten Bangka melalui 3 (Tiga) pendekatan:

1. Pendekatan Kolaboratif dengan pendekatan pentahelix, yaitu Pemerintah sebagai aktor utama (Pemkab Bangka, Kementrian Agama, KODIM 0413), Perguruan Tinggi (UGM,UBB,STISIPOL, STIKES ABDI NUSA, STIKES PERMATA NUSANTARA, AKBID SUNGAILIAT), Media Massa (Komunitas Wartawan Bangka, RRI Sungailiat, TV Sungailiat Channel), Pelaku Usaha (Forum CSR, PT. CPF Charoroen, PT. BAA, SAMSUNG), Masyarakat: FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), MAKIN (Majelis Agama Konghucu Indonesia) dan Lembaga Masyarakat.
2. Pendekatan Tata Kelola melalui pendekatan penuntasan hulu ke hilir dengan 1) Pengelolaan Pernikahan; 2) Pengelolaan Kehamilan; 3) Pengelolaan pengasuhan; 4) Pengelolaan Sanitasi dan Lingkungan; 5) Pengelolaan Advokasi; 6) Pengelolaan Kelembagaan; dan 7) Pengelolaan Inovasi.
3. Pengelolaan inovasi melalui: Pengelolaan Pernikahan dilakukan dengan 5 pendekatan inovatif. Pengelolaan Kehamilan dilakukan dengan 7 pendekatan inovatif, Pengelolaan pengasuhan dilakukan dengan 9 pendekatan inovatif pendekatan inovatif; Pengelolaan Sanitasi dan Lingkungan dilakukan dengan 5 pendekatan inovatif, Pengelolaan Advokasi dilakukan dengan 4 pendekatan inovatif, Pengelolaan Kelembagaan dilakukan dengan 3 pendekatakan inovatif;

Pemerintah Kabupaten Bangka juga memastikan target penurunan stunting dan target capaian layanan yang terdiri dari 32 indikator sebagai berikut :

Tabel 4.18
Target Cakupan Layanan Indikator Stunting Tahun 2026

No	Target	Baseline (2024)	Target (2026)
1	Presentase Prevalensi Stunting	1,33	1,31
2	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	83,77	85,00
3	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS)	88,46	92,00
4	Ibu hamil mengonsumsi makanan beragam	0,00	0,00
5	Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	74,00	82,00

No	Target	Baseline (2024)	Target (2026)
6	Keluarga Berencana dan jarak kelahiran	75,00	75,00
7	Praktik Inisisasi Menyusu Dini	58,00	55,00
8	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif	68,50	76,00
9	Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan	60,90	76,00
10	Pemberian ASI Ekslusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun	55,50	64,00
11	BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	91,56	92,00
12	BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	24,00	55,00
13	BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	76,30	70,00
14	BADUTA mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap	89,00	93,00
15	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA	100,00	100,00
16	Pemberian obat cacing pada anak BADUTA	80,00	85,00
17	Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi	100,00	100,00
18	Stimulasi dan Pemantauan Perkembangan pada BALITA	71,00	55,00
19	Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	76,30	70,00
20	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan	100,00	100,00
21	Penemuan kasus pneumonia balita	40,00	45,00
22	Pemberian obat cacing Pada anak BALITA	80,00	85,00
23	Remaja putri yang Konsumsi TTD	61,30	65,00
24	Remaja putri yang diskrining anemia	73,68	77,00
25	Pemeriksaan kesehatan pranika	75,00	75,00
26	Bimbingan perkawinan materi Pencegahan Stunting	70,00	73,00
27	Akses terhadap Air Minum Aman	66,19	67,52
28	Akses terhadap Sanitasi Aman	24,90	25,90
29	Kepemilikan JKN	97,00	98,10
30	Pendampingan keluarga 1000 HPK	80,00	90,00
31	Pembaruan data kependudukan (Kepemilikan Akta Kelahiran dan NIK)	98,27	99,50
32	Desa/kelurahan yang memiliki program pemanfaatan pekarangan	70,00	85,00

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2025

- **Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Kesehatan dasar dan Rujukan**

  Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Kesehatan dasar dan Rujukan. Peningkatan kualitas Puskesmas di semua Kecamatan menjadi Puskesmas rawat inap yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana memadai; Pembangunan Rumah Sakit Pratama tipe D di Kecamatan Belinyu dan Rumah Sakit Pratama di Kec. Puding Besar dilengkapi dengan prasarana, tenaga medis, dan dokter spesialis; Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat; Layanan SPGDT PSC 119 merupakan program layanan kesehatan tanggap darurat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangka melalui mobil operasional yang terintegrasi melalui aplikasi berbasis android, dengan layanan cepat dan dokter berpengalaman.

- **Bebas Biaya Kesehatan Untuk Masyarakat Kurang Mampu**

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program Universal Access (akses kesehatan untuk seluruh masyarakat) dengan membebaskan biaya kesehatan untuk masyarakat kurang mampu dengan perluasan Penerima Bantuan Iuran melalui APBD. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan warga tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang yang iurannya dibiayai Pemerintah sebagai peserta Jaminan Kesehatan PBI APBD merupakan program pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Layanan ini diperuntukkan bagi keluarga miskin yang sedang mendapatkan layanan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan dasar maupun lanjutan.

c. Aspek Ekonomi

- **Proteksi Input dan Output Produksi Sektor Unggulan**

Dalam kerangka peningkatan produksi barang jasa sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Bangka berupaya untuk Mendorong Laju Produksi Sektor Unggulan Daerah terutama Sektor Industri yang berbasis Perkebunan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan, sebagai upaya pemulihan dan transformasi ekonomi. Pengembangan potensi sektor unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi akan terus dilakukan termasuk

pengembangan industri yang disertai penguatan kapasitas produksi dan pemasaran. Kemudian program juga akan diarahkan untuk Proteksi Input dan Ouput Produksi. Proses transformasi input produksi menjadi output produksi menjadi prasyarat penting dalam peningkatan kapasitas produksi dalam rangka menjaga momentum perekonomian daerah. Disisi input, bentuk proteksi dilakukan melalui berbagai stimulus input produksi (saprodi dan alsintan) untuk komoditi unggulan, menjamin ketersediaan dan distribusi bahan baku dalam rangka memperlancar proses produksi. Di sisi output, proteksi dilakukan melalui peningkatan nilai tambah produk (value added), memperkuat regulasi perizinan, investasi dan kemudahan berusaha, memperluas akses pemasaran produk melalui penguatan koperasi dan UMKM, promosi produk unggulan daerah dan kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya. Mendorong investasi sektor-sektor unggulan. perbaikan faktor ekonomi daerah dan infrastruktur fisik akan mendorong investasi sektor unggulan di kabupaten Bangka, selanjutnya investasi ini membawa manfaat bagi masyarakat di kabupaten Bangka seperti peluang berusaha, peluang kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

- **Program Akselerasi Investasi**

Memberikan kemudahan perizinan investasi untuk komoditi agro-industri: CPO, Tapioka, Perikanan, Pariwisata, dan Industri Makanan dan Minuman.

- **Program Pemulihan Industri dan Perdagangan**

Dilaksanakan melalui kegiatan memberikan subsidi sarana produksi pertanian, perikanan, UMKM dan IKM, Optimalisasi *Competitive Advantage I*ndustri Unggulan (CPO, Tapioka, Sagu, *Crumb Rubber*, Udang), Pasar Online Pemda-Perbankan, Sertifikasi New Normal Pelaku Usaha, Food Estate Berbasis Sagu dan Tapioka, Kerjasama Pemasaran Produk UMKM melalui retail dan market place, Revitalisasi Industri Makanan dan Minuman.

4.3.3.5. Program Unggulan Aspek Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program mekanisasi dan pembangunan infrastruktur secara masif dilakukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Ketimpangan pendapatan akan diukur dengan menggunakan Indeks Gini, sedangkan ketimpangan antar wilayah akan diukur melalui Indeks Williamson. Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan wilayah perlu mengakslerasi program-program, salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan adalah Gini Ratio. Nilai Rasio Gini berkisar antara nol dan satu. Bila nilai Rasio Gini sama dengan 0 maka distribusi pendapatan merata sempurna dan bila Rasio Gini sama dengan satu diartikan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna. Secara umum kinerja pemerintah daerah cukup efektif dalam mengendalikan ketimpangan ekonomi. Meskipun demikian, pemerintah masih tetap berupaya untuk menjaga tingkat gini ratio yang telah dicapai dan meningkatan redistribusi ekonomi kepada 40 persen masyarakat ekonomi terbawah secara berkelanjutan. Program tersebut dapat dilaksanakan antara lain melalui Fasilitasi Pusat Petumbuhan Ekonomi Baru (Lokasi Industri Cpo, Ltd, Tambak), Revitalisasi Industri Makanan Dan Minuman Berbasis Wilayah.

a. Fasilitasi Pusat Petumbuhan Ekonomi Baru

Mengarahkan lokasi investasi di wilayah-wilayah baru. Investasi industri Logam Tanah Jarang di arahkan di Kecamatan Merawang. Investasi CPO di Kecamatan Puding Besar dan Bakam. Industri Tapioka di Kecamatan Riau Silip dan Puding Besar. Industri tambak udang diarahkan di beberapa wilayah kecamatan yang jauh dari ibu kota. Investasi pariwisata diarahkan di Kecamatan Merawang.

Investasi industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru belum maksimal padahal sektor ini memiliki peran meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan

masyarakat wisata pada umumnya dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Secara umum nilai tambah (*value added*) dari bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan masih harus dioptimalkan. Sektor perkebunan memiliki potensi terbesar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Pengembangan potensi sektor perkebunan ini mencakup perkebunan besar, sedang, kecil, dan perkebunan rakyat. Pengembangan potensi perkebunan besar/sedang/kecil untuk komoditas perkebunan seperti: sawit dan singkong. Pengembangan potensi perkebunan rakyat untuk komoditas berupa: lada, karet, dan singkong. Secara keseluruhan, potensi perkebunan ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka, memiliki luas kurang lebih 98.662,13 ha atau 32,66% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Untuk usaha perkebunan memiliki potensi luas kurang lebih 56.297,17 ha atau 18,64% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Untuk perkebunan rakyat memiliki potensi luas kurang lebih 42.364,96 ha atau 14,02% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Selain ketahanan pangan, pertanian juga berperan penting dalam penyedia lapangan pekerjaan. Sekitar 30 persen penduduk Kabupaten Bangka bekerja di sektor pertanian. Pembangunan industri pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru belum maksimal padahal sektor ini memiliki peran meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan pada umumnya serta meningkatkan nilai tambah tenaga kerja pertanian, semakin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Secara keseluruhan, potensi perkebunan ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka, memiliki luas kurang lebih 98.662,13 ha atau 32,66% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Untuk usaha perkebunan memiliki potensi luas kurang lebih 56.297,17 ha atau 18,64% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Untuk perkebunan rakyat memiliki potensi luas kurang lebih 42.364,96 ha atau 14,02% dari luas wilayah Kabupaten Bangka.

Percepatan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka dalam beberapa tahun terakhir melalui percepatan investasi di berbagai sektor unggulan daerah seperti pembangunan Industri Tapioka, Olah Pangan Sagu dan Tambak Udang sebagai penggerak perekonomian dan kesejahateraan masyarakat. Secara ekonomi kewilayahan, subsektor perikanan yang menjadi bagian dari sektor pertanian menempati posisi strategis sebagai sektor basis di kabupaten ini guna peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi yang sekarang sedang marak dikembangkan di Kabupaten Bangka yaitu budi daya tambak udang, industri tapioka dan olah pangan sagu.

Budidaya tambak udang, olah pangan sagu dan industri tapioka saat ini menjadi salah satu sektor strategis yang sedang berkembang pesat untuk meningkatkan perekonomian daerah. Tingginya pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan mengurangi pengangguran dan kemiskinan tidak terlepas dari kebijakan mendorong pertumbuhan investasi industri pertanian secara cepat berbasis pada pengembanagn sektor unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka sedang mempercepat pertumbuhan investasi di sektor pertanian melalui industrialisasi, periode 2019-2022 telah berdiri 3 perusahaan tapioka berskala besar di Kecamatan Puding, Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Riau Silip serta tambak udang yang tersebar di Kecamatan Sungailiat, Merawang, Belinyu dan Riau Silip.

b. Revitalisasi Industri Makanan dan Minuman Berbasis Wilayah

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh,serta pekerjaan yang layak untuk semua. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, Kontribusi sub sektor industri makanan dan minuman terhadap sektor industri, Persentase tenaga kerja industri pengolahan, Persentase tenaga kerja industri pengolahan

makanan dan minuman, Proporsi lapangan kerja sektor industri pengolahan, Proporsi lapangan kerja sub sektor industri pengolahan makanan dan minuman.

Peningkatan ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah melalui penguatan industri pengolahan makanan dan minuman. Hal ini sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 54,07% dari total kontribusi sektor industri diantaranya disumbangkan industri makanan dan minuman yang didominasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Kekhawatiran krisis pangan juga diperparah dengan laju pertumbuhan penduduk sangat agresif sebesar 2,07% lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional yang hanya 1,25%.

4.3.3.6. Program Unggulan Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Adapun program unggulan terbagi atas bidang yakni 1) bidang Tata Kelola Pemerintahan, Bidang Kolaborasi, dan Bidang Pelayanan Publik Inklusif.

a. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Penyelenggara Pelayanan Publik Yang Efektif, Efisien dan Berkinerja Tinggi

- **Program Sungailiat APP**

Pelayanan publik non-digital menimbulkan masalah inefisiensi, ketidakefektifan, ketidakadilan, kurangnya akuntabilitas, dan kurangnya transparansi. Proses manual seperti pengisian formulir, antrian panjang, dan pencatatan manual menyebabkan kesalahan, biaya tinggi, serta keterbatasan akses. Menurut McKinsey Global Institute (2016), digitalisasi sektor publik dapat memangkas waktu pelayanan 25–30%. BPKP (2019) juga menemukan bahwa sistem manual memakan waktu 2–3 kali lebih lama daripada digital. UU No. 25/2009 pun

mendorong transformasi digital pelayanan publik. Sebelum inovasi, Kelurahan Sungailiat sebagai unit pelayanan publik terdepan, mengalami permasalahan yang sama seperti tingginya biaya pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, antrian panjang pelayanan, serta prosedur pelayanan yang panjang. Untuk itu, perlu langkah serius untuk mengatasi permasalahan ini melalui inovasi pelayanan publik berbasis digital. Sungailiat APP merupakan inovasi digital oleh Kelurahan Sungailiat berhasil berdampak mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, akuntabel, dan transparansi. Aplikasi inovasi ini menyediakan 6 (enam) layanan administrasi gratis yang cepat, transparan, praktis, dan akuntabel: (1) SI PACAK: Pelayanan pengantar catatan kepolisian (2) SAKU CELANA: Surat keterangan usaha cepat (3) SI GESIT: Pengaduan ketertiban masyarakat terintegrasi (4) SI MASTURA: Informasi harga sampah berbasis aplikasi (5) SI OYA MENGGODA: Pendataan pernikahan digital (6) BCL: Pengecekan lokasi tanah via barcode.

- **Program Bangka Mudah Mendapatkan Akte (Bang Muda) Terintegrasi**

Kabupaten Bangka merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan 19 (Sembilan belas) Kelurahan dan 62 (enam puluh dua) Desa. Jarak wilayah merupakan faktor penting dalam pembuatan dokumen adminduk. Jarak yang cukup jauh membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi membuat masyarakat enggan untuk datang langsung ke Dindukpencapil. Untuk mengatasi permasalahan, Dindukpencapil menyusun strategi guna mengatasi kendala jarak yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan dokumen adminduk. Dindukpencapil Kabupaten Bangka melalui petugas pro aktif atau jemput bola melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik (disabilitas, lansia, sakit, ibu hamil, ODGJ dan warga binaan). Pelayanan ini dilakukan dengan berkunjung ke desa/kelurahan, tempat tinggal penduduk, rumah sakit, rumah sakit jiwa dan lembaga pemasyarakatan. Pelayanan ini melengkapi pelayanan yang sebelumnya telah dilakukan dengan manual dan aplikasi. Inovasi pelayanan ini

merupakan kombinasi informasi teknologi, manual dan pelayanan langsung. Untuk pelayanan adminduk yang berbasis teknologi, komunikasi dan informasi masyarakat cukup menggunakan android dengan mengupload semua data pendukung melalui website : www.pesonadukcapilbangka.go.id

Keunikan inovasi pelayanan serentak dan terpadu "SERDADU EMAS" ini berupa kegiatan menjangkau warga dari petugas Dindukpencapil, yakni pelayanan langsung dokumen adminduk dan perekaman KTP-el dan KIA menuju tempat tinggal masyarakat, terutama masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik (disabilitas, lansia, sakit, ibu hamil, ODGJ dan warga binaan) dan sekolah-sekolah. Selain memudahkan penduduk, layanan ini juga mempercepat ketersediaan data penduduk yang akurat. Perlahan inovasi pelayanan ini ikut berkontribusi dalam kinerja Dindukpencapil Kabupaten Bangka, yaitu berupa peningkatan cakupan kepemilikan dokumen adminduk, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan untuk kesekian kalinya mendapatkan **Zona Hijau** atau **Predikat Kepatuhan Tinggi** terhadap Standar Pelayanan publik dari Komisi Ombudsman RI Tahun 2023. Perlahan inovasi ini telah memberikan kemudahan kepada masyarakat, meringankan biaya transportasi dan mengurangi kepadatan antrian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.

- **Program Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan**

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Kesehatan dasar dan Rujukan, mulai dari Poskesdes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Utama, RS Depati Bahrin, RS Eko Maulana Ali dan RS Syafri Rahman.

- **Program Sistem Pelayanan Tepat Akurat dan Medik**

Permasalahan utama sebelum adanya program ini adalah tingginya tingkat kematian pasien di RSUD Depati Bahrin, terlihat dari data sebagai berikut; pada tahun 2015 total jumlah pasien yang meninggal adalah 348 orang, pada tahun 2016 meningkat menjadi 364 orang dari penelitan mini yang dibuat salah satu

faktor penyebabnya adalah sering kali terjadinya keterlambatan waktu pembacaan hasil pemeriksaan penunjang medis (hasil alboratorium dan atau hasil radiologi) yang menyebabkan keterlambatan menentukan diagnosa medis sehingga terjadi keterlambatan dalam memberikan advice dan tindakan serta terapi oleh DPJP kepada pasien. pendekatan sistem Aplikasi " SIMPANAN CANTIK" RSUD DB adalah berbasis Android, dengan paradigma baru pelayanan publik, agar lebih efektif dan efisien. Sebelumnya, masyarakat harus lama menunggu dokter untuk mengetahui hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi atau sebelumnya masyarakat lama mendapatkan obat dikarenakan dokter belum mendapat laporan dari perawat terkait hasil pemeriksaan penunjang medis, sehingga dapat terjadi resiko keterlambatan proses pengobatan, Sekarang dipastikan dengan Aplikasi Android " SIMPANAN CANTIK" RSUD DB, masyarakat tidak perlu resah menunggu pelayanan yang lama.

- **Program Pelayanan Prioritas Untuk Pasien Disablitas (Duduk Langsung Nyaman Dilayani)**

Program ini berangkat dari prinsip pelayanan prima bagi pasien disabilitas. Dalam prekteknya, pasien disabilitas yang mendapatkan penanganan di RS mendapat keistimewaan pelayanan dari Petugas khusus RS, mulai dari pendaftaran, pengobatan, resep hingga kepulangan.

- **Program PSC 119 Sepintu Sedulang Terintegrasi, "KOLABORASI PENANGGULANGAN KEGAWATDARURATAN LAUT".**

WHO (2022) menegaskan hak semua warga atas layanan kesehatan dan kegawatdaruratan, tetapi wilayah pesisir seperti Kabupaten Bangka menghadapi tantangan berat. Data Kementerian Kesehatan (2023) menunjukkan peningkatan 23% kasus gawat darurat pesisir sejak 2018, dengan 65% terkait kecelakaan laut dan penyakit akut. Respons kegawatdaruratan di laut rata-rata 8 jam jauh lebih lambat dari standar internasional 2 jam (Syahbandar, 2023). Keterlambatan (>6jam) meningkatkan risiko kematian 35% (*Journal of Tropical Medicine*, 2022), sementara angka kematian kecelakaan laut mencapai 15% (WHO, 2022).

Kab.Bangka, dengan pantai 186 km dan laut seluas 196.003 ha (40% wilayahnya, rentan kegawatdaruratan akibat konflik ruang laut di zona 0-4 mil. Aktivitas tambang ilegal (6.200 tambang apung pada 2011), nelayan (6.831 orang tahun 2024), dan wisatawan bahari (10.000 orang, Maret-April 2025) memicu lonjakan insidensi 30% sejak 2020 dan kematian 15% (Basarnas Babel, 2023).

Problematika insidensi kegawatdaruratan laut tersebut, akan terus melonjak jika tidak direspons dengan tepat dan dipastikan berdampak terhadap peningkatan angka kematian, penurunan angka harapan hidup dan IPM serta kegagalan pencapaian Asta Cita. Pemkab Bangka meresponnya dengan melaunching "Inovasi Kolaborasi Penanganan Kegawatdaruratan Laut" Tahun 2022. Hingga akhir tahun 2024, inovasi ini berhasil menyelamatkan 147 korban laut dengan tingkat kematian 0%, dan menjadi solusi kritis bagi keselamatan pesisir.

- **Program SI RESTI CIKAR (Sistem Informasi Ibu Hamil Beresiko Tinggi, Catat, Informasikan, Kunjungi untuk Atasi Resiko)**

SI RESTI CIKAR memiliki peran penting dalam penyediaan data ibu hamil secara elektronik, karena sebelumnya pelayanan kesehatan ibu hamil tercatat dalam buku kohort manual, sehingga membutuhkan energi lebih bagi bidan untuk memetakan ibu hamil sesuai dengan faktor risiko, sedangkan jumlah ibu hamil setiap tahunnya mencapai angka di atas 6.000. Inisiatif ini memiliki dampak sangat positif bagi ibu hamil terutama ibu hamil dengan faktor risiko dan ibu hamil dengan risiko tinggi. Ibu hamil merupakan salah satu kelompok rentan yang menjadi target prioritas dalam pelayanan kesehatan. Dengan pemetaan ibu hamil faktor risiko dan risiko tinggi, maka ibu hamil tersebut mendapatkan pendampingan secara rutin dan sesuai kebutuhan, sehingga bisa menjalani kehamilan yang sehat dan faktor risiko kehamilan bisa dikendalikan dan ditangani secara dini. SI RESTI CIKAR membantu memastikan Ibu hamil dengan faktor risiko dan risiko tinggi mampu untuk merencanakan persalinan dengan aman dan selamat mulai dari identifikasi risiko kehamilan, keluhan selama

kehamilan, rujukan jika diperlukan, pelayanan ANC yang berkualitas, USG, calon pendonor, pendamping persalinan dan penolong persalinan

- **Program PINTU KITE (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Terintegrasi Secara Elektronik di DPMP2KUKM)**

Aspek sosial dan ekonomi : melalui PINTU KITE terjadi peningkatan pembuatan perizinan dan nilai investasi sehingga berdampak terciptanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka. Aspek lingkungan : Lingkungan kerja menjadi nyaman, tertata dengan baik, terjalinnya kerjasama yang informatif kolaboratif integratif transparan efisien dan menciptakan suasana yang lebih kekeluargaan atas dasar kepentingan dan kemajuan bersama. Terjadinya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana di pedesaan, berkurangnya tingkat pengangguran sehingga menjadikan Kabupaten Bangka wilayah yang aman dan nyaman.

- **Program PORTCATWIN (Pelaporan Pencatatan Perkawinan Dapat 5 Dokumen (2 KTP, 2 KK, dan 1 KIA)**

Program Porcatwin 5 in 1 ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan pelayanan publik. Kondisi sebelumnya masih kecilnya capaian realisasi pelaporan data perkawinan secara agama Islam melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Bangka, dikarenakan pelaporan nya masih secara manual belum secara online dan terbatas nya sumber daya manusia di KUA. Jarak yang cukup jauh ke Dinas Dukpencapil sehingga masyarakat enggan untuk pengurusan Dokumen kependudukan yaitu KTP dan KK . Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah : (1) kemudahan dalam mendapatkan KTP, KK serta pindah jiwa bagi pasangan yang menikah di KUA karena di entry secara online. Warga tidak perlu lagi datang ke Dinas Dukpencapil untuk mengurus KTP dan KK nya dikarenakan perubahan status di KTP dan KK nya, yakni dari belum kawin menjadi kawin sekaligus perubahan KK orang tuanya masing-masing karena pengurangan anggota keluarga. Kemudahan tersebut diberikan tanpa biaya serta dapat ditangani secara cepat, tepat, efektif

dan efisien. Hal ini dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka dalam pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah laporan perkawinan dari KUA sebanyak 42.692 orang; dan (2) manfaat lainnya yang dirasakan adalah pelaporan perkawinan dari KUA kepada Dinas Dukpencapil telah secara online tidak manual lagi. Dalam hal ini cakupan penerbitan akta perkawinan realisasinya meningkat.

Pelayanan publik non-digital menimbulkan masalah inefisiensi, ketidakefektifan, ketidakadilan, kurangnya akuntabilitas, dan kurangnya transparansi. Proses manual seperti pengisian formulir, antrian panjang, dan pencatatan manual menyebabkan kesalahan, biaya tinggi, serta keterbatasan akses. Menurut McKinsey Global Institute (2016), digitalisasi sektor publik dapat memangkas waktu pelayanan 25–30%. BPKP (2019) juga menemukan bahwa sistem manual memakan waktu 2–3 kali lebih lama daripada digital. UU No. 25/2009 pun mendorong transformasi digital pelayanan publik. Sebelum inovasi, Kelurahan Sungailiat sebagai unit pelayanan publik terdepan, mengalami permasalahan yang sama seperti tingginya biaya pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, antrian panjang pelayanan, serta prosedur pelayanan yang panjang. Untuk itu, perlu langkah serius untuk mengatasi permasalahan ini melalui inovasi pelayanan publik berbasis digital. Sungailiat APP merupakan inovasi digital oleh Kelurahan Sungailiat berhasil berdampak mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, akuntabel, dan transparansi. Aplikasi inovasi ini menyediakan 6 (enam) layanan administrasi gratis yang cepat, transparan, praktis, dan akuntabel: (1) SI PACAK: Pelayanan pengantar catatan kepolisian (2) SAKU CELANA: Surat keterangan usaha cepat (3) SI GESIT: Pengaduan ketertiban masyarakat terintegrasi (4) SI MASTURA: Informasi harga sampah berbasis aplikasi (5) SI OYA MENGGODA: Pendataan pernikahan digital (6) BCL: Pengecekan lokasi tanah via barcode.

b. Bidang Kolaborasi

- **Layanan "one Stop Service" Penuntasan Stunting Kabupaten Bangka**

Stunting tetap menjadi tantangan nasional dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Data E-PPGBM 2018 menunjukan angka stunting di Indonesia 24,58% dan Stunting Kabupaten Bangka 12,01%. Tingginya Angka stunting ini disebabkan karena penangannya masih menggunakan pendekatan parsial tanpa menyentuh akar permasalahan. Jika pendekatan ini masih dilakukan, maka angka stunting cenderung terus meningkat. Karenanya diperlukan pendekatan Simultan yang mengintervensi seluruh faktor determinan penyebab stunting.

Analisis E-PPGBM menyimpulkan terdapat 7 **faktor determinan penyebab stunting di Kabupaten Bangka** yaitu Penanganan balita nyaris stunting, penyakit penyerta, malnutrisi, riwayat kekurangan energi kronis pada ibu hamil, riwayat anemia pada saat remaja, keluarga tidak memiliki akte kependudukan dan BPJS serta perilaku orang tua dan anak yang buruk.

Untuk mengatasinya, Pemkab Bangka menginisiasi inovasi **One Stop Service Penuntasan Stunting**. Inovasi ini dilaksanakan disemua desa stunting secara reguler dengan melibatkan stakeholders determinan: dokter spesialis anak/kandungan/gizi klinis, nutrisionis, psikolog, BPJS, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, Puskesmas, Dinas KB, Pemdes, Poltekkes dan Forum CSR. Dalam prakteknya, setiap bulan, seluruh bayi, balita, remaja putri, ibu hamil dan kepala keluarga dihadirkan di posyandu dan secara simultan diberikan penanganan sesuai karakteristik permasalahannya. Inovasi ini berhasil menurunkan **desa stunting dari 14 menjadi 9** dan prevalensi stunting anjlok dari **12,01% (2018) menjadi 0,99% (2024)**.

- **KIPAS TERBANG (Kolaborasi Pengentasan Tuberkulosis Kabupaten Bangka)**

Menurut Global TB Report, 2025, TB menjadi masalah utama kesehatan dan penyakit paling mematikan didunia. Angka kematian TB meningkat nyaris 12

persen. WHO, 2024 mencatat setiap tahun 1,6 juta orang meninggal dengan korban terbesar berasal dari usia produktif antara 25-45 tahun.

Pada 2021, estimasi terdiagnosis TB secara global sebanyak 10,6 juta kasus/naik sekitar 600.000 kasus pada tahun 2020. Terdapat 60,3% telah menjalani pengobatan dan 39,7% belum terdiagnosis. Indonesia berada pada posisi kedua di dunia setelah India, dengan kasus sebanyak 969.000 dengan Insidensi 354 per 100.000 penduduk.

Kab.Bangka juga mengalami permasalahan yang sama. Periode 2019-2024, temuan kasus TB meningkat dari 522 menjadi 618, sementara *case detection rate* dari 3.349 menjadi 7.331 dengan angka kematian terus meningkat mencapai 9,3%. Jika dibiarkan, permasalahan ini berpotensi meningkatkan angka penularan, angka kesakitan, menurunkan derajat kesehatan dan mengancam produktivitas, pada akhirnya menurunkan angka usia harapan hidup, meningkatkan kemiskinan serta mengancam pencapaian IPM dan target SDGs. Harus ada upaya serius dilakukan. Pendekatan parsial yang dilakukan harus ditinggalkan. Kerjasama antar stakeholders menjadi keharusan. Inovasi Penuntasan TB berbasis kolaborasi Pentahelix menjadi solusinya. Inovasi ini berhasil menurunkan Insidensi tuberkulosis dari 266,28 menjadi 182,97 per 100.000 penduduk, meningkatkan keberhasilan pengobatan dari 83,88% menjadi 87,69%, dan menurukan kematian dari 19,34% menjadi 16,28%.

- **Program OJEG LANSIA**

Puskesmas Penagan merupakan salah satu Puskesmas di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang masuk kategori puskesmas terpencil, memiliki wilayah kerja sebanyak empat desa, yaitu Penagan, Kota Kapur, Rukam dan Air Buluh. Sebagai satu-satunya puskesmas dengan kategori terpencil, akses menuju pelayanan kesehatan tentunya harus menjadi prioritas bagi masyarakat terutama kelompok rentan seperti lansia. Pelayanan kesehatan pada lansia merupakan satu dari dua belas indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Salah satu upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada lansia di Puskesmas Penagan adalah dengan menyelenggarakan layanan di POSYANDU LANSIA sesuai dengan standar. Puskesmas Penagan memiliki 4 posyandu lansia dengan angka kunjungan pada tahun 2017 sebagai berikut: posyandu desa penagan sebanyak 65.47 %, Kotakapur 91,56%, Rukam 100%, Airbuluh 89,53%. Kunjungan ke posyandu desa Penagan sangat rendah sekali dibandingkan dengan 3 desa lainnya, hal ini disebabkan oleh tidak adanya anggota keluarga yang mengantar lansia untuk datang ke posyandu sesuai jadwal pelayanan karena sibuk bekerja, ada lansia yang hidup sendiri dan ada juga lansia yang tidak memiliki kendaraan, sedangkan desa Penagan merupakan desa terpencil sehingga ketersediaan transportasi umum hanya sekali dalam satu hari. Untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada kaum lansia di Desa Penaga, maka munculah program "Ojek Lansia" pada 28 Februari 2018. Inovasi "Ojek Lansia " bertujuan untuk menjemput lansia di wilayah desa Penagan untuk datang ke Posyandu dan mengantarkan kembali pulang ke rumah setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia. Program ini berhasil meningkatan kunjungan lansia yang signifikan di desa penagan yaitu dari 65.47% dari 242 orang lansia di tahun 2017 meningkat menjadi 84.29% ditahun 2018 dan diharapkan bisa mencapai 100% di tahun 2019 dengan demikian Target Standar Pelayanan Minimal dapat dicapai, dan derajat kesehatan lansia meningkat.

c. Bidang Pelayanan Publik Inklusif

- **Program Ransel Si Dora (Rangkul Calon Pendonor, Stok Darah Terintegrasi dalam Aplikasi Donor Darah)**

Unit layanan kesehatan masih kesulitan memenuhi kebutuhan darah di Indonesia yang mencapai 5,1 juta kantong pertahun berdasarkan standar WHO tentang jumlah kebutuhan darah di Indonesia pada tahun 2017. Masyarakat sering kesulitan mencari informasi tentang darah. Untuk informasi terkait donor darah, masyarakat harus datang ke PMI, sehingga tidak efisien dan efektif. Demikian juga

calon pendonor yang berniat mendonorkan darahnya tetapi tidak tahu bagaimana caranya dan tidak mengetahui informasi masyarakat yang memerlukan darah. Hal ini dikarenakan Palang Merah Indonesia (PMI) atau Unit transfusi Darah (UTD) belum mempunyai data base pendonor yang dapat diakses dengan cepat. Perlu ditemukan pemecahan masalah yang ada dengan menggagas sebuah inovasi yang menyediakan informasi layanan donor darah yang mudah di akses oleh masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan layanan donor darah di Kabupaten Bangka, Dinas Kesehatan KabupatenBangka menyusun strategi dengan menyediakan Aplikasi Donor Darah berbasis WEB (SI DORA) secara online Inovasi Bidang Pelayanan Publik Inklusif untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat yang dilaunching tanggal 26 Januari 2018. Dengan digagasnya RANSEL SI DORA, masyarakat yang membutuhkan informasi donor darah di Kabupaten Bangka dapat mengakses informasi tersebut secara cepat dan real time, dengan mengakses web sidora.bangka.go.id. SI DORA menyajikan informasi data Stok Darah di UTDRS Depati Bahrin dan Unit Donor Darah PMI Sungailiat, data pendonor yang siap donor, identitas dan nomor kontak pendonor di wilayah Kabupaten Bangka, form registrasi calon pendonor dan informasi singkat seputar donor darah. Sebelum adanya program RANSEL SI DORA, data pendonor tersedia secara manual. Setelahnya tersedia data base pendonor secara elektronik tahun 2018 sebanyak 1.346 orang pendonor (data manual 153 pendonor). Dengan SI DORA data stok darah bisa dilihat setiap saat oleh masyarakat yang membutuhkan, sebelumnya masyarakat yang membutuhkan darah harus membuang waktu untuk datang ke PMI ataupun menghubungi PMI, serta permintaan darah yang tidak terpenuhi menurun tajam sebanyak 215 kantong dari kekurangan 670 kantong pada tahun 2017 menjadi 464 kantong pada tahun 2018.

- **Program Lada Putih (Layanan Dini Akselerasi Penurunan Kematian Ibu dan Bayi dengan Komprehensif) RSUD Depati Bahrin**

RSUD Depati Bahrin adalah RSUD milik pemerintah Kabupaten Bangka yang merupakan salah satu Kabupaten dari 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh karena RSUD DB salah satu instansi penyumbang Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bangka pada periode tahun 2015–2016. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus kegawatdaruratan pada kehamilan, persalinan dan nifas, tidak ada data by name by address dan by case untuk ibu hamil resti se- Kabupaten Bangka, keterlambatan tim medis dalam memberikan tindakan pada kasus perdarahan, hipertensi pada kehamilan, partus macet, infeksi dan komplikasi aborsi dan tidak adanya monitoring langsung oleh dokter spesialis kandungan terhadap ibu hamil resti pada masa kehamilan maupun pada masa nifas. Begitu pula dokter spesialis anak tidak dapat memonitoring langsung kondisi bayi resti se- Kabupaten Bangka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dr. Jasminar selaku Direktur membentuk sebuah strategi all out berupa pelayanan publik yang komprehensif guna percepatan penurunan kematian ibu dan bayi resiko tinggi. Inovasi pelayanan publik tersebut penggabungan antara Program kegiatan yaitu ”Lada Putih” yang didukung dengan Aplikasi “SiLada Putih” berbasis android yang terkoneksi dengan Command Center Kebidanan 24 jam. Aplikasi “SiLada Putih” connecting dengan Command center kebidanan merupakan inovasi original yang belum pernah ada di Indonesia.

Adanya inovasi ini, Penanganan kasus gawat darurat obstetric dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif dan komprehensif, sejak masa kehamilan bumil risti dan bayi dengan komplikasi sudah dilakukan pendampingan oleh dokter spesialis obgyn dan spesialis anak, penatalaksanaan tindakan oleh dokter dan tim di RSUD DB semakin cepat. Pendampingan juga dilakukan di masa nifas, selalu dipantau ketat oleh dokter tersebut.

4.3.3.7. Program Unggulan Aspek Ketertiban

Peristiwa tindak kejahatan luar biasa dan gangguan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini mengingatkan kembali mengenai pentingnya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing secara bersama-sama. Dengan kepedulian menjaga lingkungan bersama berarti turut serta dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara untuk membangun ketertiban umum, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Memiliki rasa peduli terhadap kondisi di lingkungan sekitar menjadi awal yang baik dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan gangguan keamanan lainnya. Kepedulian itu perlu ditumbuhkan lagi di tengah-tengah masyarakat perkotaan yang cenderung dianggap individualis.

RKPD Kabupaten Bangka tahun 2026 juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka pendek tahunan yang bersifat berkelanjutan dan menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Aspek holistik dalam dokumen perencanaan difokuskan dalam menangani prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka tahun 2026 dengan dukungan program yang ditetapkan. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang (*holistic*) yang salah satunya adalah Reformasi Birokrasi, Dalam Reformasi Birokrasi penegakan hukum di berbagai tindakan kejahatan masih menjadi masalah utama yaitu tingginya potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat menghalangi pelaksanaan pembangunan. Program unggulan Kabupaten Bangka dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sebagai berikut :

a. Program Kampung Tegep Mandiri

Kabupaten Bangka dalam hal ini membentuk kampung Tegep Mandiri guna mendorong masyarakat bergotong royong, menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan konduksif, melalui Program Trantibum yang ada di OPD Kesatuan Polisi Pamong Praja (POLPP) kabupaten bangka diharapkan kampung Tegep Mandiri dapat menjadi pelopor dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, untuk saat ini telah ditetapkan sebanyak 8 Kampung Tegep Mandiri yang ditetapkan di tiap-tiap Kecamatan yang ada di kabupaten Bangka.

b. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak dan Pemuda juga dibentuk dalam membantu terwujudnya keamanan dan ketertiban yang ada di Kabupaten Bangka, dengan adanya program-program khusus untuk perlindungan anak dan pemuda diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan juga diskriminasi, serta terpenuhinya hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya generasi dan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat, cerdas dan ceria serta terampil dan inovatif. Pembentukan Kabupaten Layak Anak memerlukan komitmen serta menyatukan persepsi seluruh elemen agar semua ini tercapai, kesadaran dan peran aktif dari lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh adat, pemuda, media, keluarga dan anak harus bersinergi untuk mewujudkannya.

c. Program SATPOL-PP Khusus Pariwisata

Salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bangka ialah bagaimana mewujudkan pariwisata berskala internasional sebagai upaya transformasi ketergantungan dari sektor pertambangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan wisata ialah salah satunya keamanan dan ketertiban objek destinasi wisata. untuk itu di aspek ketertiban pemerintah kabupaten bangka melaksanakan program satpol PP Pariwisata. Pol PP Pariwisata ini mempunyai tugas untuk menjaga keamanan, dan memberikan

pelayanan kepada masyarakat, yang ada ditempat-tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh masyarakat.

4.3.3.8. Program Unggulan Aspek Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses rangakaian yang dimulai dari perencanaan, penganggaran dan penatausahaan yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Untuk mengelola proses itu menggunakan SIPD (Sistem Infromasi Pemerintah Daerah). Jika dilihat dari APBD, Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Salah satu komponen belanja daerah adalah belanja transfer Dana Desa kepada Pemerintah Desa. Dalam pengelolaan APBDes menggunakan program unggulan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Dari aspek pendapatan ada beberapa program unggulan yang dilaksanakan yakni program *e-smartgov*, diantaranya mellaui digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program tersebut diyakini dapat meningkatkan tata kelola pemungutan dan penerimaan pajak daerah melalui perbaikan bank data, membangun sistem pendapatan daerah secara terintegrasi berbasis elektronik (e-*mapping*, *smart-mapping, e-filling, e-registration, e-payment* dan *e-councelling,* sistem informasi zonasi harga tanah) dalam satu aplikasi terpadu e-smartgov. Kemudian program Mobil Mas Jempol yakni Layanan keliling bekerjasama dengan Mobil Layanan Keliling Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat mendatangi warga untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Dengan adanya layanan penerimaan pembayaran PBB-P2 keliling ini diharapkan pula bisa membantu masyarakat yang mempunyai kendala dilapangan. Kemudian Program Pemasangan Tapping Box untuk Usaha Restoran di Kabupaten Bangka. Tapping box adalah alat yang di pasang di restoran yang merupakan wajib pajak untuk merekam catatan transaksi. Fungsinya, sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan. Dengan

pemasangan tapping box, disinyalir bisa menghindari kebocoran pajak daerah. Kemudian dalam pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan dilakukan dengan Program Kerjasama Penggunaan Aset Pemerintah Daerah yang di fokuskan kepada sektor ekonomi potensial.

Dari aspek pembiayaan program unggulan ialah program penyertaan modal BUMD sektor unggulan Kabupaten Bangka. Yakni PD. Alam yang bergerak di sektor agro. Kemudian Program Pembiayaan Infrastruktur Menggunakan Kerjasama Pihak Swasta yang akan di laksanakan dalam membangun infrastruktur yang memiliki nilai ekonomi di Kabupaten Bangka.Kemudian dari sisi aspek penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah kabupaten bangka memiliki program reward kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dimana bagi perangkat daerah yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah akan diberikan reward tambahan anggaran yang dimanfaatkan dalam pencapaian indikator strategis kinerja perangkat daerah tersebut.

4.3.3.9. Program Unggulan Aspek Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, terdapat 4 (empat) program unggulan yang menjadi fokus, yaitu *Kerja sama Akuntabilitas Pengelolaan APBD dengan BPKP dan Kejaksaan Negeri Bangka, Festival Anggaran, Keterbukaan Informasi Publik, dan LAPOR.* Kerja sama Akuntabilitas Pengelolaan APBD dengan BPKP dan Kejaksaan Negeri Bangka merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan APBD dengan mengedepankan pendampingan dan konsultasi kepada pihak eksternal. Festival APBD dan APBDes merupakan wujud transparansi pengelolaan anggaran yang dapat diakses publik luas. Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat yang dalam penerapannya diperkuat dengan aspek regulasi berupa Peraturan Kepala Daerah. Sementara Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) mempermudah masyarakat dalam mengakses laporan masyarakat agar ditindak lanjuti. Pejabat penghubung menerima laporan masuk dari masyarakat, diterima dan ditindak lanjuti ke kepala perangkat daerah terkait. Bagi sebagian masyarakat yang tidak bisa menggunakan

website, untuk mempermudah pengaduan bisa disampaikan menggunakan SMS di nomor 1708 dengan format Kab_Bangka, Nama Pelapor, isi laporan, dan identitas pelapor agar bisa diterima 1x24 jam dari pusat dan bisa masuk ke aplikasi Lapor.

Dalam aspek Akuntabilitas dilakukan dengan pelaksanaan Program Manajemen Akuntabilitas Kinerja dengan peningkatan kualitas di 5 (lima) aspek yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja yang menjadi dasar dalam pemberian *reward and punishment* bagi perangkat daerah.

4.3.3.10. Program Unggulan Aspek Capaian Pembangunan Spesifik Daerah

Dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka selain mendorong pencapaian pembangunan makro, pemerintah Kabupaten Bangka memiliki sasaran kinerja pembangunan spesifik yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah. Adapaun sasaran pembangunan spesifik daerah tersebut diantaranya indeks eksploitasi ekonomi dan indeks pemerataan infrastruktur.

Perlu dipahami bahwa sebagai daerah yang ekonominya bergantung kepada sektor primer (pertambangan, Industri dan perkebunan) Kabupaten Bangka memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan memliki trend positif yang mana sebagian ahli ekonomi memandang pertumbuhan ekonomi yang baik akan berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tetapi kenyataanya tidak.

Pemerintah Kabupaten Bangka termasuk Kabupaten yang memiliki indeks eksploitasi ekonomi yang tinggi, bersama daerah kaya SDA lainnya seperti kalimantan Riau, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bangka merumuskan program unggulan dalam hal menyikapi eksploitasi ekonomi tersebut dalam kerangka bagaimana masyarakat menengah ke bawah mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan memilik peningkatan pendapatan yakni dalam kerangka Industrialisasi Pangan Hasil Olah Perikanan Tangkap, Fasilitasi Industri Kecil Berbasis Timah, dan Peningkatan Akses Menuju Sentra Ekonomi Wilayah Kecamatan.

Gambar 4.12
Program Unggulan untuk Menekan Eksploitasi Ekonomi di Kabupaten Bangka

Dengan pelaksanaan Program tersebut diharapkan nanti tingkat eksploitasi ekonomi akan semakin menurun sehingga ekonomi lebih cenderung banyak dinikmati masyarakat dan pembangunan sebagai dampak pertumbuhan akan terjadi.

Selain itu ketika program dalam upaya penurunan tingkat eksploitasi dilaksanakan harus diiringi pemerataan infrastruktur yang memadai sebagai pendukung masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi yang sudah diberikan stimulus berupa program diatas. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pembangunan infrastruktur atau fasilitas pelayanan *(man made capital)* di Kabupaten Bangka adalah ketimpangan yang sangat mencolok antara Sungailiat dan kecamatan lainnya.

Urutan hirarki yang telah diperoleh kemudian dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga kelompok kecamatan berdasarkan selang hirarki-nya. Kelompok pertama untuk kecamatan yang memiliki fasilitas infrastruktur lengkap dengan indeks perkembangan yang cepat. Kelompok kedua untuk kecamatan-kecamatan yang memiliki fasilitas infrastruktur pelayanan yang cukup lengkap dengan indeks perkembangan yang relatif cukup cepat. Kelompok ketiga untuk kecamatan-

kecamatan yang memiliki fasilitas infrastruktur pelayanan yang tidak lengkap dengan indeks perkembangan yang relatif lambat.

Selang hirarki dan ketimpangan tersebut lebih disebabkan karena berbagai kebijakan pembangunan di masa lalu yang cenderung Sungailiat sentris dengan mengadopsi konsep *Growth Pole Theory*, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antar kecamatan yang dalam jangka panjang dapat berdampak bagi instabililitas pembangunan. Padahal keseimbangan antar kecamatan sangat penting karena keterkaitan yang bersifat simetris akan mampu mengurangi disparitas wilayah dan pada akhirnya mampu memperkuat pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh. Seperti halnya bagian tubuh manusia, ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah kecamatan akan mengakibatkan kondisi yang tidak stabil. Meskipun belum terlihat mencolok, namun gejala negatif dari disparitas kecamatan ini mulai menimbulkan banyak permasalahan sosial, ekonomi dan politik lokal. Untuk itu dibutuhkan kebijakan program yang mampu mangatasi disparitas antar kecamatan dan perencanaan yang mampu mewujudkan pembangunan kecamatan interregional berimbang. Kegagalan dalam perencanaan akan memberikan justifikasi bagi masyarakat bahwa memang Pemkab Bangka merencanakan kegagalan. Berikut merupakan program pemerataan infrastruktur yang akan dilakukan :

Gambar 4.13
Program Pemerataan Infrastruktur di Kabupaten Bangka

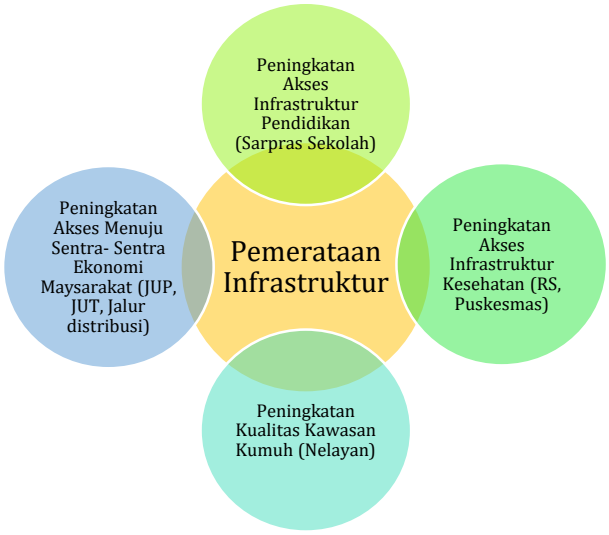

Peningkatan Akses Infrastruktur pendidikan dilakukan dengan meningkatkan kualitas sarana prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan akan terpelihara dan jelas kegunaanya. Dalam pengelolaan pihak sekolah harus dapat bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana terutama kepala sekolah yang langsung menangani sarana dan prasarana tersebut. Dan pihak sekolahpun harus dapat memelihara dan memperhatikan sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada. Maka dengan adanya sarana dan prasarana di sekolah siswa dapat belajar dengan maksimal dan seefesien mungkin. Dengan kualitas sarana prasarana pendidikan yang baik kegiatan belajar mengajar akan menghasilkan kualitas siswa yang baik sehingga pembangunan manusia Kabupaten Bangka Meningkat dan dapat menghadapi dunia kerja agar tenaga kerja lokal dapat terserap ke sektor-sektor ekonomi yang ada.

Peningkatan Akses Infrastruktur Kesehatan dilakukan dengan Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif melalui Penguatan Fasilitas Pelayanan Dasar (PUSTU, PUSKESMAS, PSC 199) dan Fasilitas Pelayanan Rujukan (RS-Depati Bahrin, RS-Eko Maulana Ali Soeroso, RS-Syafrie Rachman). Kemudian Peningkatan akses menuju sentra-sentra ekonomi dilakukan dengan meningkatkan kualitas jalan usaha perkebunan, jalan usaha tani dan jalur distribusi untuk akses ke kawasan industri. Serta mentransformasi kawasan kumuh nelayan menjadi salah satu kawasan wisata dalam kota.

4.3.4. Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming)* Tahun 2026

Pengarusutamaan bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan baik sektor wilayah, dengan memperhatikan lingkungan serta pelaksanaan yang inklusif.

Dukungan RKPD Tahun 2026 terhadap arah kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming)* pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik,

gender, modal sosial budaya dan transformasi melalui program prioritas, yang diuraikan sebagai berikut :

4.3.4.1. Kebijakan Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDG's

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Strategi pencapaian SDG's menggunakan formula yang menyelaraskan tiga elemen inti dari pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, tatanan sosial yang inklusif dan perlindungan terhadap lingkungan. Indikator pencapaian dari ke-tiga elemen tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan merata, mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan standar kehidupan dasar, mendorong pengembangan sosial yang inklusif dan setara, dan mempromosikan pengelolaan sumber daya dan ekosistem yang terpadu dan berkelanjutan serta melindungi sumberdaya alam dan ekosistem

Pengintegrasian TPB/SDGs dalam pembangunan nasional tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan nasional, pemerintah daerah melakukan integrasi TPB/SDG's dalam pembangunan daerah. Pelaksanaan SDG's dilaksanakan secara bersama OPD dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan memperluas sember pendanaan dengan melibatkan Organisasi Kemasyaratan (Ormas), media, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi.

Pencapaian indikator SDG's yang terintegrasi dalam indikator program pembangunan Kabupaten Bangka diurakan pada tabel berikut :

Tabel 4.19
Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 selaras dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional 2026

No.	Pengarusutamaam (Mainstreaming)	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Program Daerah
1	Tanpa kemiskinan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Angka Kemiskinan	a) Program Pemberdayaan Sosial b) Program Rehabilitasi Sosial c) Program Perlindungan Jamninan Sosial
2	Tanpa kelaparan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	- Persentase Angka Kemiskinan - Angka Stunting	a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat c) Program Penanganan Kerawanan Pangan d) Program Pengawasan Keamanan Pangan e) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian f) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian g) Program Pengendalian Kesehatan Masyarakat dan Veteriner h) Program Pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian i) Program Penyuluh Pertanian j) Program Perizinan Usaha Pertanian k) Program Pengelolaan Perikanan Tanggap l) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

No.	Pengarusutamaam (Mainstreaming)	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Program Daerah
				c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4	Pendidikan berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah	a) Program Pengelolaan Pendidikan b) Program Pengembangan Kurikulum c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan d) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan e) Program Pembinaan Perpustakaan f) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan g) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5	Keseteraan gender	Meningkatnya Kualitas anak dan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	a) Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan b) Program Perlindungan Perempuan c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga d) Program Perlindungan Khusus Anak
6	Air bersih dan sanitasi layak	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Indeks Pemerataan Infrastruktur	a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase e) Program Penyelenggaraan Jalan f) Program Pengembangan Perumahan g) Program Kawasan Pemukiman

No.	Pengarusutamaam (Mainstreaming)	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Program Daerah
				h) Program Peningkatan Prasanan Sarana dan Utilitas Umum (PSU
7	Energi bersih dan terjangkau			Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	a) Program Perencanaan Tenaga Kerja b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja c) Program Penempatan Tenaga Kerja d) Program Hubungan Industrial e) Program Perlindungan Jaminan Sosial
		Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi	f) Program Perekonomian dan Pembangunan g) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri h) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota i) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional j) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan k) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan l) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting m) Program Pengembangan Ekspor n) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen o) Program Pengguna dan Pemasaran Produk dalam Negeri p) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

No.	Pengarusutamaam (Mainstreaming)	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Program Daerah
				q) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian r) Program Pengendalian Kesehatan Masyarakat dan Veteriner s) Program Pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian t) Program Penyuluh Pertanian u) Program Perizinan Usaha Pertanian v) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap w) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya x) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan y) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan z) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi aa) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi bb) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian cc) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dd) Program Promosi Penanaman Modal ee) Program Pelayanan Penanaman Modal ff) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal gg) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur	Indeks Kualitas Pemerataan Infrastruktur	a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

No.	Pengarusutamaam (Mainstreaming)	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Program Daerah
		Ekonomi yang Berkualitas		b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional d) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan e) Program Pengguna dan Pemasaran Produk dalam Negeri f) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
10	Berkurangnya kesenjangan	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	a) Program Administrasi Pemerintahan Desa b) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (8 Kec)
11	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Indeks Pemerataan Infrastruktur	a) Program Pengembangan Perumahan b) Program Kawasan Pemukiman c) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat c) Program Pengawasan Keamanan Pangan d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

No.	Pengarusutamaam (Mainstreaming)	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Program Daerah
13	Penanganan perubahan iklim,	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) e) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) f) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH g) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat h) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat i) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup j) Program Pengelolaan Persampahan
14	Ekosistem lautan	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

No.	Pengarusutamaam (Mainstreaming)	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Program Daerah
15	Ekosistem daratan	- Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	d) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) e) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup f) Persentase Penghasil Limbah B3 yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan baik g) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup h) Program Pengelolaan Persampahan
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	1) Program Pendaftaran Penduduk 2) Program Pencatatan Sipil 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan) 5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan) 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan) 7) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 8) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan

No.	Pengarusutamaam (Mainstreaming)	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Program Daerah
				Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 9) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 10) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 11) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 12) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 13) Program Pengelolaan Arsip 14) Program Penataan Desa
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1) Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 5) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 6) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan RakyatProgram Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (7) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (8) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

No.	Pengarusutamaam (Mainstreaming)	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Program Daerah
				(9) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (10) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (11) Program Kepegawaian Daerah (12) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (13) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		2) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1) Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya 2) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1) Program Penyelenggaraan Pengawasan 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3) Program Penyelenggaraan Pengawasan 4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

4.3.4.2. Kebijakan dan Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2026 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

dan sosial serta beberapa prioritas lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Urusan Pendidikan yang terdiri dari jenis pelayanan dasar sebagai berikut : 1) Pendidikan anak usia dini 2) Pendidikan Dasar 3) Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 4.20
Program Prioritas RKPD 2026 dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi SPM Tahun 2024	Target SPM Kinerja Tahun 2026	Program Daerah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	79,33 %	100 %	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah WargaNegara Usia 7-15 Tahun berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ Mi, SMP /MTs /SLB)	97,19 %	100 %	
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah WargaNegara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesai-kan Pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan.	84,19 %	100 %	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, 2025

b. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan yang terdiri dari jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*)

Tabel 4.21
Program Prioritas RKPD 2026 dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM Urusan Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2026	Program Daerah
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	86,41 %	100 %	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	89,80 %	100 %	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat layanan kesehatan	90,10 %	100 %	
4.	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	94,36 %	100 %	
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	99,90 %	100 %	
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	91,44 %	100 %	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	92,41 %	100 %	
8.	Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2026	Program Daerah
9.	Pelayanan kesehatan penderita DM	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %	
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	100 %	
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksivirus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immuno deficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2025

c. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang terdiri dari jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

Tabel 4.22
Program Prioritas RKPD 2026 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2026	Program Daerah
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	100 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2026	Program Daerah
					Minum
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	100 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, 2025

d. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.

Tabel 4.23
Program Prioritas RKPD 2026 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM Urusan Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2026	Program Daerah
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %	Program Pengembangan Perumahan
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Bagi masyarakat yang	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang Memperoleh fasilitasi penyediaan rumah	100 %	100 %	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2026	Program Daerah
	terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	yang layak huni			

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, 2025

e. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

Tabel 4.24
Program Prioritas RKPD 2026 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2026	Program Daerah
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	100 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	Program Penanggulangan Bencana
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Program Penanggulangan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2026	Program Daerah
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	100 %	100 %	Program Penanggulangan Bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negarang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, 2025

f. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Urusan Sosial yang terdiri dari jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

Tabel 4.25
Program Prioritas RKPD 2026 Dalam Rangka Mendukung Target Pencapaian SPM Urusan Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2026	Program Daerah
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	99,69 %	100 %	Program Rehabilitasi Sosial

2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	Program Rehabilitasi Sosial
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	Program Rehabilitasi Sosial
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	90%	100 %	Program Rehabilitasi Sosial
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	Program Rehabilitasi Sosial

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bangka, 2025

4.3.5. Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan, akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Penguatan regulasi dan kelembagaan terkait gender sudah dilakukan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dituangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender di

Daerah, diikuti dengan regulasi teknis Peraturan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Bangka.

Capaian program terkait Pengarusutamaan Gender pada Tahun 2024 dan target 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.26
Program Daerah Mendukung Pengarusutamaan Gender
Kabupaten Bangka Tahun 2026*

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Yang Terselesaikan (%)	100%	100%
2	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	100%	100%
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan	14,71%	38,5%

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Bangka, Tahun 2025

Selanjutnya untuk penguatan integrasi PUG dalam pembangunan daerah, seiring dengan kebijakan yang ditetapkan nasional, maka kebijakan yang dilaksanakan daerah pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di seluruh proses pembangunan daerah; dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran berbasis PUG dan memenuhi fasilitas pemerintah dan umum sesuai standard PUG;
2. Perluasan akses dan kesempatan perempuan di ekonomi, khususnya bagi perempuan dengan disabilitas, kepala keluarga, miskin, serta penyintas kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan, literasi keuangan,

dan literasi digital, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan peningkatan kapasitas perempuan, pemberian modal usaha, dan fasilitasi dalam bursa kerja.

3. peningkatan representasi perempuan di parlemen dan penguatan agency perempuan dalam keluarga dan masyarakat, melalui pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup, kepemimpinan, dan politik, kaderisasi.
4. penguatan sistem pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) secara komprehensif, melalui penguatan regulasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) inovatif yang masif dan berkelanjutan;
5. pelibatan laki-laki, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender online;
6. peningkatan cakupan dan kualitas layanan KTP yang terpadu dan komprehensif sesuai kebutuhan korban;
7. peningkatan kolaborasi multipihak antarlembaga penyedia layanan, peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan;
8. penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan standardisasi lembaga layanan;
9. optimalisasi pemanfaatan DAK Nonfisik.

4.3.6. Arah Kebijakan Lintas Bidang Kerentanan Bencana, Perubahan Iklim, Peningkatan Karbon dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Arah kebijakan lintas bidang Kerentanan Bencana, Perubahan Iklim, Peningkatan Karbon dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Bangka lebih kepada pencegahan dan penanggulangan bencana. Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bangka adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya pencegahan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka diselenggarakan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana Daerah. Di dalam perda tersebut, penanggulangan bencana memiliki tujuan antara lain :

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. melaksanakan dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
4. menghargai budaya lokal;
5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
8. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka dengan dasar hukum berupa peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait seperti TNI/Polri, masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga masyarakat dan lembaga internasional.

Peningkatan karbon di atmosfer, terutama melalui emisi gas rumah kaca (GRK), merupakan pendorong utama perubahan iklim. Peningkatan penyimpanan karbon secara langsung membantu menurunkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, sehingga mendukung dalam mitigasi perubahan iklim, peningkatan kualitas udara dan peningkatan ketahanan lingkungan. Strategi Penurunan Emisi GRK melalui Peningkatan Karbon dilakukan melalui:

a. Pembentukan Kampung Proklim
b. Penghijauan dan reboisasi
c. Rehabilitasi mangrove dan hutan
d. Pengurangan deforestasi
e. Pertanian ramah lingkungan

Dampak dari strategi peningkatan karbon dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) antara lain: memperlambat laju pemanasan global, meningkatkan ketahanan pangan menjaga keanekaragaman hayati dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.

Pada tahun 2026, penanggulangan bencana, Perubahan Iklim, Peningkatan Karbon dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Bangka dilaksanakan dalam beberapa program sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.27
Program Daerah Tahun 2026 Mendukung Penanggulangan Bencana, Perubahan Iklim, Peningkatan Karbon dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	0,5	0,35
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran	0	100
		Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi	100	100
		Presentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100	100
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan	50	100
4	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	100	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati yang dikelola	100	100
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penurunan kasus lingkungan hidup	100	100
7	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Penghasil Limbah B3 yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan baik	100	100
8	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	22,89	30
		Persentase Penanganan Sampah	73,96	70

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

4.3.7. Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKPD 2026 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan perencanaan berbasis **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).** Konsep THIS dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2026 diimplementasikan pada setiap prioritas pembangunan tahun 2026 sebagai tema.

1. Konsep THIS prioritas pertama Penguatan Kapasitas Birokrasi dengan tema Reformasi Birokrasi yang mendukung pencapaian prioritas. Kegiatan integrasi yang direncanakan untuk mencapai target pembangunan pada tematik ini adalah penyediaan akses jaringan internet cepat pada institusi pemerintah baik di kecamatan hingga ke desa, untuk mempermudah akses internet di daerah

pedesaan. Dampak dari penyediaan akses internet ini adalah perizinan UMKM dan pendataan penduduk dapat dilakukan di desa. Selain itu dengan adanya penyediaan internet ini, proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan dapat dilakukan dengan lebih transparan. Kebijakan dan kegiatan yang mendukung tema reformasi birokrasi ini dikerjakan secara lintas sektoral secara holistik oleh Dinas Komunikasi, Imformatika dan Statistik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappeda, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. Secara spasial, pelaksanaan perencanaan ini dilakukan di delapan kecamatan di Kabupaten Bangka.

2. Konsep THIS perioritas kedua Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial.

   Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial merupakan dua elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, sejahtera, dan resilien. Kedua konsep ini bertujuan untuk melindungi kelompok rentan, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Komponen Utama Kesejahteraan Sosial antara lain: Pendidikan yang Merata terkait dengan akses pendidikan berkualitas untuk semua kelompok masyarakat, Pelayanan Kesehatan terkait dengan Ketersediaan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Kesempatan Kerja terkait dengan Program pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja. Kondisi Hidup Layak terkait dengan akses terhadap perumahan yang layak dan lingkungan yang aman. **Perlindungan Sosial** Merujuk pada sistem kebijakan dan program yang dirancang untuk melindungi individu atau kelompok dari risiko sosial, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan, usia lanjut, dan kemiskinan ekstrem**. Komponen Utama Perlindungan Sosial antara lain: Jaminan Sosial berupa** Program asuransi sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja. **Bantuan Sosial** berupa Program bantuan langsung tunai (BLT), sembako, atau subsidi bagi kelompok rentan. **Jaringan Pengaman Sosial** Sistem

yang dirancang untuk mengatasi dampak krisis, seperti bencana alam atau pandemi. **Regulasi Tenaga Kerja** Perlindungan hak-hak pekerja, termasuk upah minimum, waktu kerja, dan kebebasan berserikat. **Program Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Program Keluarga Harapan (PKH)** Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan. **BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan** Sistem jaminan sosial untuk mengurangi risiko kesehatan dan tenaga kerja. Kegiatan pada perioritas pembangunan ini merupakan sinergi dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, Praktek Dokter Swasta, DP2KBP3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Institusi Pendidikan Tinggi, institusi pendidikan nonformal, DINPERKPP, BPPKAD, Kegiatan ini secara spasial dilaksanakan di delapan kecamatan di Kabupaten Bangka.

3. Konsep THIS perioritas ketiga Pembangunan SDM. **Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)** merupakan proses strategis untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan karakter individu sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan pribadi maupun organisasi. Pembangunan SDM merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong kemajuan suatu bangsa atau perusahaan, karena manusia adalah faktor utama penggerak perubahan. Aspek Penting dalam Pembangunan SDM meliputi: Pendidikan dan Pelatihan, Pengembangan Kompetensi, Kesehatan dan Kesejahteraan. Pada Tema ini Kabupaten Bangka fokus di dua bidang. Pada bidang kesehatan kegiatan integrasi yang dilakukan adalah Universal Health Coverage, penanganan stunting, penguatan layanan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, promosi kesehatan serta peningkatan kapasitas RSUD dan FTKP. Semua rencana ini untuk memberikan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Sementara untuk tenaga kesehatan, rencana kegiatan integrasi adalah pemberian beasiswa bagi tenaga kesehatan. Pada bidang pendidikan,

kolaborasi kegiatan dilaksanakan baik pada pendidikan formal dan pendidikan nonformal, antara lain pemberian makan siang bergisi gratis. penjaringan anak putus sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, pelatihan enterprenership terintegrasi bursa kerja. Sementara itu bagi tenaga pendidik, dilakukan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, baik melalui pemberian beasiswa pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis, serta pemberian penghasilan tambahan. Keterlibatan lintas sektor dalam kolaborasi kegiatan pada tema ini antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, Praktek Dokter Swasta, DP2KBP3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , TNI/Polri, Institusi Pendidikan Tinggi, dan institusi pendidikan nonformal. Kegiatan ini secara spasial dilaksanakan di delapan kecamatan di Kabupaten Bangka.

4. Konsep THIS perioritas keempat Penguatan sektor ekonomi unggulan. Industri dan Pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru). Pada bidang industri pertanian, integrasi kegiatan meliputi revitalisasi dan hilirisasi industri pertanian, khususnya tanaman lada dan kelapa sawit, penyediaan akses terhadap bahan baku dan alat produksi bersama IKM terevitalisasi, standarisasi produk untuk laik ekspor, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha olahan lada, pendampingan dan pembinaan petani lada dan kelapa sawit, fasilitasi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pada bidang pertanian, integrasi kegiatan meliputi modernisasi pertanian dan perikanan, pengamanan lahan pertanian dan sawah berkelanjutan, padat karya revitalisasi jaringan irigasi, pendampingan dan pelatihan pertanian, perikanan dan perkebunan, pemberian mikro kredit bagi pelaku usaha pertanian, perkebunan dan perikanan, kemitraan perkebunan kelapa sawit dan singkong rakyat. Pada bidang UMKM, integrase kegiatan meliputi pendataan dan revitalisasi UMKM, pemdampingan dan pembinaan pelaku usaha UMKM, pemberian mikro kredit bagi pelaku UMKM, digitalisasi periizinan untuk memberi akses kemudahan perizinan dan investasi. Pada bidang pariwisata, kegiatan integratif meliputi pembangunan amenitas pariwisata, revitalisasi amenitas pariwisata, sertifikasi lahan peruntukan

pariwisata, festival seni budaya daerah, home industry, produksi local daerah, pemasaran produk – produk local daerah, pengembangan atraksi budaya local, serta penanganan infrastruktur menuju sentra pariwisata, seperti jalan daerah, saran dan prasarana perhubungan. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara lintas sektor yang melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, DINPMP2KUKM, DINAKERINDAG, Sekretariat Daerah, DINPERKPP, BPPKAD, DPUPR, Dinas Perhubungan PT. Timah, Perusahaan Lokal, Perbankan, DPRD, Masyarakat. Pelaksanakan kegiatan pada bidang industry secara khusus difokuskan pada Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Bakam, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Merawang. Pelaksanaan kegiatan pada bidang pertanian difokuskan pada Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Bakam, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Riau Silip, Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Merawang. Pelaksanaan kegiatan pada bidang UMKM difokuskan pada Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Pemali, Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Merawang. Pelaksanaan kegiatan pada bidang pariwisata difokuskan pada Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Merawang, Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Mendo Barat, yang juga merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, Kawasan Prioritas Pariwisata Nasional, serta Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Pantai Timur Sungailiat.

Prioritas penguatan sektor ekonomi unggulan didukung dengan Penguatan infrastruktur dan Sumber Daya Air (SDA). Penguatan infrastruktur dan sumber daya air adalah langkah strategis yang mencakup berbagai aspek untuk memastikan ketersediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan air yang berkelanjutan serta mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan kegiatan integratif pada tema ini meliputi Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung, serta Pengentasan Kumuh. Penyediaan infrastruktur dasar dimulai dari penyediaan lahan yang diikuti oleh sertifikasi lahan, penyediaan sarana air minum dan air limbah di wilayah perkotaan maupun perdesaan, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan infrastruktur pendukung dimulai dari penyiapan lahan, pembangunan

jalan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, penanganan dan pemeliharaan jalan kabupaten, penanganan dan pemeliharaan jalan provinsi, penanganan dan pemeliharaan jalan nasional, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, seperti rambu–rambu, lampu lalu lintas, PJU, halte, terminal, serta angkutan barang/jasa. Selanjutnya pengentasan kumuh, yang tidak hanya menjadi prioritas daerah namun juga menjadi target nasional. Dalam pengentasan kumuh, kolaborasi integrase kegiatan adalah peningkatan kualitas kawasan kumuh, pembangunan rumah layak huni, sertifikasi lahan rumah layak huni, pembangunan rumah layak huni di kawasan pencegahan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di kawasan kumuh dan kawasan pencegahan kumuh, penyediaan prasarana air minum, air limbah, listrik, sarana persampahan, prasarana jalan, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan teknis UMKM, promosi kesehatan, penanamang mangrove sebagai greenbelt wilayah kumuh pesisir, serta penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi masyarakat nelayan di kawasan kumuh pesisir. Kolaborasi kegiatan tersebut dilaksanakan secara holistik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, DINPMP2KUKM, Kantor ATR/BPN, BPPW Bangka Belitung, DPUPR Provinsi, P2JN, BUMD, CSR Perusahaan Swasta/Lokal, BAZNAS. Secara spasial kegiatan pada infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung dilaksanakan di delapan kecamatan di Kabupaten Bangka, sedangka kegiatan pengentasan kumuh fokus dilaksanakan di kawasan kumuh Kabupaten Bangka, yaitu Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu, dan kawasan pencegahan kumuh Kabupaten Bangka, yaitu semuaa kecamatan terutama Kecamatan Mendo Barat.

4. Konsep THIS perioritas kelima Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tema pemantauan kualitas lingkungan dan penanggulangan dan penanganan bencana. Perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca merupakan upaya penting dalam mengatasi perubahan iklim dan memitigasi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Kualitas lingkungan dipantau melalui kegiatan pemantauan kualitas

tanah, air, dan udara, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha, sosialisasi/penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, perlindungan hutan dan masyarakat adat, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta penanganan persampahan. Penanggungan dan penanganan bencana dilakukan melalui kegiatan penceahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan kebakaran, pendataan informasi daerah rawan bencana, Tim Tanggap Bencana, pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW/RDTR, perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR, BPPW Bangka Belitung, BPBD, Satpol-PP, DINPERKPP, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa, serta masyarakat. Kegiatan tersebut secara spasial dilaksanakan di di delapan kecamatan di Kabupaten Bangka, dengan kekhususan perlindungan hutan dan masyarakat adat di Kecamatan Bakam, Kecamatan Riau Silip, dan Kecamatan Belinyu, sedangkan penanganan persampahan perkotaan dikhususkan di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Sungailiat.

4.3.8. Pembangunan Kewilayahan

Arah pembangunan wilayah adalah upaya yang mendorong perkembangan sosial dan ekonomi yang baik, serta menjaga keberlangsungan hidup melalui pelestarian lingkungan. Pembangunan wilayah juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan memperkecil kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan infrastruktur untuk mengurangi kemiskinan.

4.3.8.1. Arah Pembangunan Kewilayahan Nasional

Pengembangan Wilayah Sumatera difokuskan pada peran strategis untuk mewujudkan swasembada pangan, air, dan energi. Perekonomian Wilayah Sumatera akan didorong oleh kinerja industri seiring dengan pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan (karet, kelapa sawit, dan perikanan, serta penguatan industri kimia dasar). Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 tema kewilayahan untuk wilayah Sumatera yaitu "Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya

Saing dan Berkelanjutan". Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung.

4.3.8.2. Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029

Arah pembangunan kewilayahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berfokus pada diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor pariwisata dan pariwisata berbasis laut, serta pemanfaatan potensi wilayah secara optimal. Pembangunan berimbang antar wilayah, dengan Pangkalpinang sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan industri, juga menjadi fokus utama.

Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 yaitu :

A. Kawasan Pertumbuhan yang terdapat pada :
   1. Kawasan Perkotaan Pangkalpinang;
   2. Kawasan Pengembangan Industri Pangkalpinang-Sungailiat;
   3. Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Belitung;
   4. Kawasan Perkotaan Tanjing Pandan;
   5. KEK Tanjung Kelayang.

B. Kawasan Komoditas Unggulan Timah, Bauksit dan Lada yang terdapat pada :
   1. Bangka (Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan).

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi yang terdapat pada Kabupaten Bangka Selatan.

D. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana terdapat pada:
   1. TN Gunung Maras;
   2. Geopark Belitung.

Tema Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah **"Mandala Pengembangan Quality Tourism dan Ekonomi Biru"**. Untuk pengembangan kawasan strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) difokuskan pada sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur. Salah satu fokus

utama adalah pengembangan kawasan strategis di Tanjung Pendam, Belitung, melalui perencanaan kota terintegrasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengembangkan kawasan Belinyu-Sungailiat dan sekitarnya dengan fokus pada tema pariwisata yang melibatkan masyarakat.

Pengembangan kawasan strategis (KSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada :

A. KSP dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu :
   1. Kawasan Industri Tanjung Ular dan Tanjung Kalian di Kabupaten Bangka Barat;
   2. Kawasan Industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
   3. Kawasan Pertanian Buleng di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
   4. Kawasan Pariwisata Pulau Belitung di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur; dan
   5. Kawasan Perkotaan Pangkal Pinang, Merawang, dan Pangkalan Baru di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkal Pinang.
B. KSP dari sudut Kepentingan Sosial Budaya terdapat pada Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;
C. KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdapat pada Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove Pulau Lepar dan Pulau Pongok di Kabupaten Bangka Selatan.

4.3.8.3. Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029

Berdasarkan RPJMN 2025-2029 arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan arah pembangunan kewilayahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

A. Kawasan pertumbuhan yang terdapat pada kawasan pengembangan industri Pangkalpinang-Sungailiat.
B. Kawasan konservasi/rawan bencana yang terdapat pada TN Gunung Maras.

Tema pembangunan kewilayahan Kabupaten Bangka adalah **"pengembangan agroindustri, ecotourism, dan pusat pendidikan dan religi".** Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka 2024-2044 untuk pengembangan Kawasan Strategis (KSP) Kabupaten Bangka terbagi menjadi 2 kawasan yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Kawasan strategis kabupaten terdiri dari :

A. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi merupakan kawasan yang diperkirakan akan tumbuh dengan cepat dan memberikan pengaruh positif bagi pengembangan kawasan. Kawasan strategis ini memiliki beberapa tipologi yaitu tipologi kawasan perkotaan, perdesaan, tumbuh cepat dan koridor ekonomi. Kawasan strategis ini direncanakan dengan pertimbangan kriteria:

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
3. Memiliki potensi ekspor;
4. Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
6. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
7. Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
8. Memiliki pusat kegiatan birokrasi, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
9. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
10. Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

11. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
12. Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau;
13. Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :

1. Hinterland Kota Pangkalpinang yang berada di Kecamatan Mendo Barat dengan luas kurang lebih 2.551 (dua ribu lima ratus lima puluh satu) hektar;
2. Kawasan Industri Jelitik Sungailiat di Kecamatan Sungailiat dengan luas kurang lebih 265 (dua ratus enam puluh lima) hektar;
3. Kawasan Industri Air Anyir yang berada di Kecamatan Merawang dengan luas kurang lebih 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar;
4. Kawasan Industri Terpadu Teluk Kelabat yang berada di Kecamatan Belinyu dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;
5. Kawasan Pantai Timur Bangka yang berada di Kecamatan sungailiat dengan luas kurang lebih 844 (delapan ratus empat puluh empat) hektar dan Kecamatan Merawang.

Salah satu Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Kabupaten Bangka sudah sesuai dengan Kawasan Strategis Provinsi yaitu berada di Kecamatan Merawang.

B. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya

Rencana kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan yang menjadi prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri kabupaten atau provinsi atau merupakan aset kabupaten, provinsi, atau nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan. Kawasan strategis ini ditetapkan berdasarkan kriteria berikut :

1. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;

2. Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
3. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
4. Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
5. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
6. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Bangka, meliputi :

1. Kawasan pendidikan Balun Ijuk yang berada di Kecamatan Merawang dengan luas kurang lebih 1.208 (seribu dua ratus delapan) hektar;
2. Kawasan cagar Budaya Kota Kapur yang berada di Kecamatan Mendo Barat dengan luas kurang lebih 101 (seratus satu) hektar;

Salah satu Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya yang ditetapkan Kabupaten Bangka sudah sesuai dengan Kawasan Strategis Provinsi yaitu terdapat pada Situs Kota Kapur.

Keselarasan pembangunan kewilayahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.28
Keselarasan Pembangunan Kewilayahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

KODE	RKP TAHUN 2026		RKPD TAHUN 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHTINTERVENSI*	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
A1/A2	Kawasan Perkotaan Pangkalpinang (A1) dan Kawasan Pengembangan Industri Pangkalpinang-Sungailiat (A2): · Kota Pangkalpinang · Kab. Bangka	Preservasi jalan ruas Pangkalpinang– Sungailiat–Muntok dan Pangkalpinang–Koba–Toboali;	Kecamatan Merawang dan kecamatan sungailiat	**Program:** Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan/ **Kegiatan**: Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /**Sub Kegiatan:** Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Ruas Pangkalpinang Sungailiat merupakan kewenangan pemerintah pusat. Keterlibatan pemerintah daerah ialah dalam hal pembebasan lahan untuk pelebaran jalan

KODE	RKP TAHUN 2026		RKPD TAHUN 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHTINTERVENSI*	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Sungailiat.	Kecamatan Sungailiat, Kelurahan Jelitik	**Program:** Penyelenggaraan Jalan / **Kegiatan:** Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ **Sub Kegiatan:** Pemeliharaan Berkala Jalan	Memperbaiki akses menuju Pelabuhan perikanan sungailiat
				Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri/ **Kegiatan:** Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ **Sub Kegiatan :** Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Di Kawasan di sekitar PPN Sungailiat akan dibentuk UPTD Sentra Industri yang didalamya terdapat industri komoditas perikanan

KODE	RKP TAHUN 2026		RKPD TAHUN 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	***HIGHLIGHTINTERVENSI***	**LOKASI PRIORITAS**	**DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**KETERANGAN**
				Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap/ **Kegiatan:** Pengelolaan dan Penyelenggaran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) /**Sub Kegiatan :** Pelayanan Penyelenggaraan TPI	Fasilitas Pendukung Jual Beli Komoditas Perikanan disekitar PPN Sungailiat
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Timah, Bauksit, dan Lada Bangka : · Kab. Bangka · Kab. Bangka Barat · Kab. Bangka Tengah · Kab. Bangka Selatan	Peningkatan tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri timah dan bauksit;	Kecamatan Sungailiat, Kelurahan Jelitik	**Program :** Perencanaan dan Pembangunan Industri/ **Kegiatan:** Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ **Sub Kegiatan :** Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Koordinasi Pengaktifan Kembali Kawasan Industri Semelter Jelitik dalam mendukung Hilirisasi Timah

KODE	RKP TAHUN 2026		RKPD TAHUN 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHTINTERVENSI*	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (lada);	Kawasan Pertanian Lada Bangka	**Program:** Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ **Kegiatan:** Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme/ **Sub Kegiatan:** Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Bantuan Sarana Pertanian Pendukung Lada
				Program: Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian /**Kegiatan:** Pengembangan Prasarana Pertanian/ **Sub Kegiatan:** Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Bantuan Prasarana Pertanian Pendukung Lada

KODE	RKP TAHUN 2026		RKPD TAHUN 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHTINTERVENSI*	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (lada);	Kawasan Pertanian Lada Bangka	**Program:** Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian/ **Kegiatan:** Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian/ **Sub Kegiatan:** Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Bantuan Pengendalian OPT
		Peningkatan mutu produk pertanian (lada);	Kawasan Pertanian Lada Bangka	Program: Penyuluhan Pertanian/ Kegiatan: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/ Sub Kegiatan: Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Penyuluhan Peningkatan Produktivitas Pertanian Lada

KODE	RKP TAHUN 2026		RKPD TAHUN 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHTINTERVENSI*	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
E1	Kawasan Konservasi TN Gunung Maras: • Kab. Bangka · Kab. Bangka Barat	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Desa Berbura, Desa Dalil	**Program:** Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan/ **Kegiatan**: Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /**Sub Kegiatan:** Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Ruas Lumut – Maras Senang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang manjadi akses menuju. Kawasan TN gn. Maras. Keterlibatan pemerintah daerah ialah dalam hal pembebasan lahan untuk pelebaran jalan

KODE	RKP TAHUN 2026		RKPD TAHUN 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHTINTERVENSI*	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				Program: Peningkatan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata/ Sub Kegiatan: Pengadaan /Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Bantuan Sarana Pendukung Wisata TN. Gunung Maras

KODE	RKP TAHUN 2026		RKPD TAHUN 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHTINTERVENSI*	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar/ Sub Kegiatan: Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Bantuan Pembentukan Kelembagaan Pengelola Wisata TN. Gunung Maras

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

4.3.9. Pengembangan Wilayah Berbasis Kecamatan

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bangka tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah kecamatan khususnya wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan dalam pencapaian indikator ekonomi dan indikator sosial dalam upaya tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah kecamatan dan meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan.

4.3.9.1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bangka

Pengembangan wilayah kecamatan pada tahun 2026 bertujuan untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah ekonomi kecamatan dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah kecamatan serta memelihara konektivitas hubungan antar wilayah kecamatan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan wilayah kecamatan akan dilakukan dengan strategi pertumbuhan atau transformasi sosial ekonomi wilayah kecamatan dan strategi pemerataan. Strategi pengembangan wilayah kecamatan tersebut tersebut secara spasial ditunjukkan oleh koridor pertumbuhan ekonomi dan koridor pemerataan wilayah dan pemetaan risiko bencana pada masing-masing wilayah kecamatan.

Transformasi sosial ekonomi wilayah kecamatan dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah kecamatan yang mengalami pelambatan yang didukung pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan penataan kawasan perkotaan, penguatan konektivitas antarwilayah kecamatan, serta peningkatan intensitas perdagangan antarwilayah kecamatan. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah pengembangan kawasan strategis secara terpadu dan peningkatan investasi khususnya di Kawasan Strategis Daerah, kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan. Pengembangan kawasan strategis tersebut perlu didukung dengan Rencana Detail Tata Ruang yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pengembangan kawasan strategis daerah di atas akan dilakukan dengan meningkatkan penerimaan Dana Insentif Daerah serta penerimaan insentif fiskal dan non fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka penyediaan penyediaan infrastruktur strategis di sekitar kawasan. Oleh karena itu, pembangunan strategis diharapkan dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik, serta perluasan kerja sama antardaerah melalui pengembangan transportasi, pengelolaan transportasi publik, penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, pengolahan limbah dan persampahan yang aman, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana tata ruang dan didukung oleh layanan pertanahan modern berbasis digital, dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis pulau/kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi keunggulan dan isu strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah pembangunan tersebut adalah Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Merawang, Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Riau Silip, Kecamatan Bakam, dan Kecamatan Pemali.

Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur antar wilayah, menegaskan perbedaan strategi pertumbuhan, pemerataan, dan risiko bencana di setiap wilayah. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari ancaman bencana seperti wabah atau pandemi, banjir, tanah longsor dan kebakaran lahan dan hutan. Dengan adanya resiko ini menegaskan bahwa strategi pembangunan wilayah perlu memperhitungkan ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan, kapasitas pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan serta kecepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

Sasaran pengembangan wilayah kecamatan tahun 2026 adalah penguatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah kecamatan dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah, dan meningkatkan pemerataan pembangunan kecamatan.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, pembangunan wilayah kecamatan tahun 2026 diarahkan pada pembangunan dengan fokus pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, pengembangan wilayah kecamatan harus memperhatikan dengan cermat RTRW Kabupaten Bangka. Dalam hirarki rencana sistem tata kota di Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Puding Besar dan Kecamatan Belinyu menjadi Pusat Kegiatan Lokal. Kecamatan Belinyu, Kecamatan Merawang dan Mendo Barat menjadi Pusat Pelayanan Kawasan, sedangkan Kecamatan Bakam, Kecamatan Merawang, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Puding Besar dan Kecamatan Pemali menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan. Dari dimensi perekonomian, untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kondisi perekonomian dalam rangka menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka adalah dengan cara mendorong sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing, produktivitas dan *multiplier effect* yang tinggi dan *sustainable.* Perekonomian dengan produktivitas rendah dan cenderung stagnan hanya akan memberikan upah dan tingkat pengembalian modal yang rendah. Persaingan global yang semakin ketat akan mengakibatkan aktivitas perekonomian tersebut semakin lama semakin terpinggirkan. Sebaliknya perekonomian yang produktivitasnya tinggi dan dapat dipertahankan secara berkelanjutan akan memungkinkan pemberian upah dan tingkat pengembalian modal yang tinggi. Selain itu, upah yang tinggi akan mendorong masyarakat meningkatkan kualitas sumber daya ekonomi dan sumber daya manusianya.

Dalam konteks inilah, implikasi kebijakan pengembangan perekonomian di berbagai kecamatan adalah dengan terus mendorong, mengembangkan dan meningkatkan daya saing sektor yang memiliki tingkat keunggulan komparatif, kompetitif dan *sustainable.* Untuk memenuhi persyaratan *sustainable* ini, maka sektor-sektor dan komoditi yang berbasis *unrenewable resource* (pertambangan non migas, penggalian, industri logam dasar dan barang galian non logam) meskipun secara faktual mampu memberikan kontribusi perekonomian (PDRB) yang besar, namun tidak akan dikategorikan dalam kelompok unggulan dan berdaya saing tinggi. Sektor

dan komoditi yang memiliki keunggulan daya saing tersebut selanjutnya harus dikelompokkan dalam beberapa prioritas pengembangan.

Dengan konsep pembangunan yang menggabungkan aspek spasial dan ekonomi tersebut, kedepan diharapkan permasalahan disparitas pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Bangka dapat dituntaskan dan keseimbangan antara pertumbuhah ekonomi kecamatan maju dan tertinggal melalui investasi sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, sumberdaya buatan dan sumberdaya alam dapat dikedepankan. Pentingnya pemecahanan masalah disparitas pembangunan di Kabupaten Bangka disebabkan beberapa hal berikut: (1) untuk mencapai pembangunan perekonomian yang stabil; (2) untuk medapatkan percepatan pertumbuhan ekonomi; (3) dalam rangka pemanfaatan dan konservasi sumberdaya secara berkelanjutan; (4) untuk menciptakan dan promosi kesempatan kerja; (5) untuk mengurangi tekanan beban penduduk pada sektor primer terutama sektor pertambangan; (6) untuk mengurangi tekanan dan dampak negatif ”urbanisasi” dan polusi; (7) untuk menghindari konflik dan stabilitas politik daerah; dan (8) untuk menjaga stabilitas ketahanan daerah.

4.3.8.2. Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bangka

4.3.8.2.1. Pembangunan Wilayah Kecamatan Sungailiat

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2026, yang *pro job*, *pro poor* dan *pro growth* dengan tanpa meninggalkan *pro sustainable*. Pembangunan kecamatan Sungailiat, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Sungailiat adalah sebagai Pusat Kegiatan Lokal.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan, selain Sungailliat wilayah pengembangan juga mencakup Kecamatan Belinyu, Kecamatan Merawang dan Kecamatan Puding Besar. Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Sungailiat pada tahun 2026 adalah sebagai:

1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka;
2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;
3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland*;
4) Pendorong perkembangan wilayah;
5) Penyedia sarana dan prasarana kota;
6) Pusat perdagangan & jasa;
7) Kegiatan Wisata;
8) Kesehatan; dan
9) Pendidikan.

Gambar 4.14
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Sungailiat
Tahun 2026

WP
1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka;
2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;
3) Wilayah pemasaran bagi produksi
4) Pendorong perkembangan wilayah;
5) Penyedia sarana dan prasarana kota;
6) Pusat perdagangan & jasa;
7) Kegiatan Wisata;
8) Kawasan Industri Jelitik;
9) Kegiatan Wisata (Kawasan Ekonomi Wisata Lintas Timur);
10) Kesehatan; dan
11) Pendidikan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Sungailiat diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.29
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Sungailiat

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Jasa Perusahaan
2	II	Industri Pengolahan
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Real Estate
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
3	III	Pengadaan Listrik dan Gas
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Jasa Lainnya
4	IV	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
		Pertambangan dan Penggalian
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		Transportasi dan Pergudangan

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan

4.3.8.2.2. Pembangunan Wilayah Kecamatan Belinyu

Pembangunan kecamatan Belinyu, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Belinyu adalah sebagai Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Belinyu pada tahun 2026 adalah sebagai:

1) Pusat pemerintahan kecamatan;
2) Pelabuhan Pengumpan Regional;
3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru;
4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung Kegiatan lainnya.
5) Kawasan Wisata Belinyu (Penyusuk dan sekitarnya)
6) Kawasan Kepelabuhanan dan Industri Belinyu (tanjung Gudang)

Gambar 4.15
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Belinyu
Tahun 2026

WP

1) Pusat pemerintahan kecamatan;
2) Pelabuhan Pengumpan Regional;
3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru;
4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung Kegiatan lainnya.
5) Kawasan Wisata Belinyu (Penyusuk dan sekitarnya)
6) Kawasan Kepelabuhanan dan Industri Belinyu (tanjung Gudang)

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Belinyu diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.30
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Belinyu

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Pertambangan dan Penggalian
		Pengadaan Listrik dan Gas
2	II	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Real Estat
		Jasa Perusahaan
3	III	Industri Pengolahan
		Jasa Lainnya
4	IV	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Konstruksi
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan

4.3.8.2.3. Pembangunan Wilayah Kecamatan Mendo Barat

Pembangunan Kecamatan Mendo Barat, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Mendo Barat adalah sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Mendo Barat pada tahun 2026, adalah sebagai:

1) Pusat pemerintahan kecamatan;
2) Pelabuhan Laut Regional
3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru
4) Adanya kegiatan Industri Perikanan
5) Pusat pendidikan
6) Hinterland Pangkal pinang

Gambar 4.16
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Mendo Barat
Tahun 2026

WP

1) Pusat pemerintahan kecamatan;
2) Pelabuhan Laut Regional
3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru
4) Adanya kegiatan Industri Perikanan
5) Pusat pendidikan
6) Hinterland Pangkal pinang

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Kecamatan Mendo Barat diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.31
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Mendo Barat

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1.	I	Pengadaan Listrik dan Gas
2	II	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Konstruksi
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Jasa Perusahaan
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
3	III	Industri Pengolahan
		Jasa Lainnya
4	IV	Perikanan
		Pertambangan dan Penggalian
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Real Estate
		Jasa Pendidikan
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan

4.3.8.2.4. Pembangunan Wilayah Kecamatan Merawang

Pembangunan kecamatan Merawang, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan

Merawang adalah sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Merawang pada tahun 2026 adalah sebagai :

1) Pusat pemerintahan kecamatan
2) Pelabuhan Laut Regional
3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru
4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung kegiatan
5) Pusat pendidikan
6) Hinterland Pangkal pinang

Gambar 4.17
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Merawang
Tahun 2026

WP
1) Pusat pemerintahan kecamatan;
2) Pelabuhan Laut Regional
3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru
4) Adanya kegiatan Industri Perikanan terpadu mendukung kegiatan
5) Pusat pendidikan
6) Hinterland Pangkal pinang

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Merawang diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.32
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Merawang

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Industri Pengolahan
2	II	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Jasa Perusahaan
3	III	Jasa Lainnya
4	IV	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Pertambangan dan Penggalian
		Transportasi dan Pergudangan
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Real Estate
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan

4.3.8.2.5. Pembangunan Wilayah Kecamatan Pemali

Pembangunan kecamatan Pemali, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Pemali adalah sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Pemali pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka;
2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;
3) Wilayah pemasaran bagi produksi
4) Kawasan Industri Jelitik
5) Pendorong perkembangan wilayah;
6) Penyedia sarana dan prasarana kota;
7) Kegiatan Wisata;
8) Pusat perdagangan & jasa;
9) Kegiatan Wisata (Kawasan Ekonomi Wisata Lintas Timur)
10) Kesehatan; dan
11) Pendidikan.

Gambar 4.18
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Pemali
Tahun 2026

WP

1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka;
2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;
3) Wilayah pemasaran bagi produksi
4) Kawasan Industri Jelitik
5) Pendorong perkembangan wilayah;
6) Penyedia sarana dan prasarana kota;
7) Kegiatan Wisata;
8) Pusat perdagangan & jasa;
9) Kegiatan Wisata (Kawasan Ekonomi Wisata Lintas Timur)
10) Kesehatan; dan
11) Pendidikan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Pemali diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.33
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Pemali

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Pengadaan Listrik dan Gas
2	II	Pertambangan dan Penggalian
		Konstruksi
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Real Estate
		Jasa Perusahaan
		Jasa Pendidikan
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
3.	III	Industri Pengolahan
		Jasa Lainnya
4.	IV	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Transportasi dan Pergudangan
		Informasi dan Komunikasi
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan

4.3.8.2.6. Pembangunan Wilayah Kecamatan Riau Silip

Pembangunan Kecamatan Riau Silip diarahkan pada reformasi perekonomian

sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem tata kota yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Riau Silip adalah sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Riau Silip pada tahun 2026 adalah sebagai;

1) Pusat pemerintahan kecamatan;
2) Pelabuhan Pengumpan Regional;
3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru;
4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung Kegiatan lainnya.
5) Kawasan Wisata Belinyu (Penyusuk dan sekitarnya)
6) Kawasan Kepelabuhanan dan Industri Belinyu (tanjung Gudang)

Gambar 4.19
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Riau Silip
Tahun 2026

WP

1) Pusat pemerintahan kecamatan;
2) Pelabuhan Pengumpan Regional;
3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru;
4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung Kegiatan lainnya.
5) Kawasan Wisata Belinyu (Penyusuk dan sekitarnya)
6) Kawasan Kepelabuhanan dan Industri Belinyu (tanjung Gudang)

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Riau Silip diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.34
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Riau Silip

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	-
2	II	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Pertambangan dan Penggalian
3	III	Industri Pengolahan
		Pengadaan Listrik dan Gas
		Jasa Lainnya
4	IV	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Real Estate
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan

4.3.8.2.7. Pembangunan Wilayah Kecamatan Bakam

Pembangunan Kecamatan Bakam, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan

memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Bakam adalah sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Bakam pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian;
2) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland;*
3) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;
4) Agropolitan; dan
5) Perkebunan;

Gambar 4.20
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Bakam
Tahun 2026

WP
1) Pusat pemerintahan kecamatan;
2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian;
3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland;*
4) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;
5) Agropolitan; dan
6) Perkebunan;

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Bakam diarahkan pada pengembangan sektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.35
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Bakam

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	Industri Pengolahan
2	II	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
3	III	Pengadaan Listrik dan Gas
		Jasa Lainnya
4	IV	Pertambangan dan Penggalian
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Informasi dan Komunikasi
		Jasa Keuangan dan Asuransi
		Real Estat
		Jasa Perusahaan
		Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan

4.3.8.2.8. Pembangunan Wilayah Kecamatan Puding Besar

Pembangunan kecamatan Puding Besar, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Puding Besar adalah sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Puding Besar pada tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1) Pusat pemerintahan kecamatan;
2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian;
3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland;*
4) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;
5) Agropolitan; dan
6) Perkebunan;

Gambar 4.21
Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Puding Besar
Tahun 2026

WP
1) Pusat pemerintahan kecamatan;
2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian;
3) Wilayah pemasaran bagi produksi *hinterland;*
4) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya;
5) Agropolitan; dan
6) Perkebunan;

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Puding Besar diarahkan pada pengembangan sub sektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.36
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Puding Besar

No	Prioritas Pengembangan	Sektor
1	I	-
2.	II	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Jasa Pendidikan
3.	III	Industri Pengolahan
4.	IV	Jasa Lainnya

Sumber : Diolah dari PDRB Kecamatan

4.3.8.3. Strategi Pengembangan Wilayah Kecamatan

Pada tahun 2026, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi wilayah kecamatan dilakukan dengan enam langkah, yaitu:

1. Mendorong operasionalisasi dan peningkatan investasi di kawasan-kawasan strategis daerah khususnya kawasan pariwisata dan industri pertanian dan kelutan dan perikanan.
2. Memacu pengembangan kawasan pariwisata unggulan khususnya di wilayah pantai timur Sungailiat.
3. Mengintegrasikan sistem transportasi penghubung antar wilayah untuk memperkuat konektivitas dan percepatan pembangunan wilayah.
4. Meningkatkan produktivitas budidaya dan industri pertanian, perkebunan dan perikanan, pariwisata dan UMKM.
5. Mengembangkan kawasan strategis sebagai pusat pelayanan dan aglomerasi wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan fokus peningkatan infrastruktur penyediaan layanan dasar seperti perumahan, akses pada energi, air

minum, sanitasi dan pengelolaan persampahan, pengembangan sistem drainase, penataan kawasan permukiman, dan ruang terbuka hijau publik di perkotaan.

6. Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antar daerah dalam peningkatan daya saing daerah.

Sementara strategi pemerataan di wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka akan dilakukan dengan 6 (enam) langkah yaitu:

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi. Simultan dengan arah kebijakan dan strategi percepatan industrialisasi wilayah. Peningkatan akses dan mutu pendidikan difokuskan pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak serta pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kecamatan dengan fokus jalan penghubung antar kecamatan dan penghubung pada kawasan-kawasan stretgis daerah untuk memperlancar jasa transportasi perdagangan, moda transportasi publik serta infrastruktur publik bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pada desa dengan melakukan advokasi perencanaan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan desa.
5. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan dan keuangan) pemerintah kecamatan dan desa dalam rangka mempercepat pembangunan pada tinbgkat kecamatan dan pedesaan.
6. Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan melalui fokus pada peningkatan infrastruktur fisik dan sosial untuk mempercepat status desa mandiri.

Pelestarian lingkungan hidup juga menjadi perhatian Pemerintah daerah Kabupaten Bangka karena dampak perusakan lingkungan dapat menimbulkan bencana alam. Dalam upaya mengatasi dan mengantisipasi kerawanan bencana seperti banjir, kebakaran hutan, angin puting beliung, tanah longsor dan musibah penyakit di beberap wilayah kecamatan dan desa, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan mitigasi dan penguatan ketahanan bencana dengan memantapkan sistem dan deteksi dini bencana, dukungan pendanaan kerawanan bencana dalam penganggaran dan perencanaan, penguatan kelembagaan kebencanaan, peningkatan kapasitas tenaga kebencanaan, peningkatan kesadaran risiko bencana di masyarakat, dan meningkatkan kerja sama lintas daerah dan multipihak mitigasi bencana. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana juga dilakukan untuk mengeliminasi sejak dini resiko kebencanaan.

4.4. Inovasi Daerah

Inovasi bagian dari upaya mencimptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Penguatan aspek inovasi dalam perencanaan mengarahkan pengembangan inovasi di berbagai bidang dalam berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka dan nasional. Komitmen untuk melaksanakan inovasi di Kabupaten Bangka dengan membentuk laboratorium inovasi ditetapkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 62 Tahun 2019 tentang Laboratorium Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, selanjutnya untuk memperluas jangkauan inovasi maka dilakukan penguatan regulasi dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah.

Strategi inovasi dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah Mengembangkan Sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan Reformasi Birokrasi dalam Proses Bisnis di semua Level Pemerintahan, dengan arah kebijakan (1) membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat; dan (2) Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi dan penegakan peraturan daerah.

Penguatan dan pengembangan inovasi daerah terus dilakukan, sejak tahun 2021 Kabupaten Bangka sudah melaksana program *One Agency One Innovation* diharapkan menimbulkan dampak luas bagi percepatan reformasi birokrasi. Disamping program program Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi(One Agency One Innovation), pada tahun 2022 diluncurkan program 1000 inovasi yang diikuti dengan sekolah inovasi yang diikuti oleh seleruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkup Kabupaten Bangka.

Penguatan dan pengembangan inovasi daerah terus dilaksanakan mengingat inovasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Berikut inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam berbagai bidang, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.37
Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2024

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
1	Kurang terintergasinya sistem perencanaan pembangunan	SI MAPAN (Sistem Perencanaan dan Penganggaran)	Bidang Perencanaan Pembangunan		BAPPEDA	BAPPEDA	APBD/APBN/SWASTA/PT/MASYARAKAT	Tersedianya system perencanaan terintergratif	Jumlah program dan kegiatan yang selaras dan terintergasi	Reflikasi	Belum	2019-2021
2	Belum meningkatnya inovasi secara progresif	LA REPUBLIKA (Laboratorium Inovasi Kabupaten Bangka)	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi pembentukan wadah bersifat kelembagaan dalam fungsi mengkoordinir, memfasilitasi, menumbukan gagasan dalam penciptaan inovasi yang tematik mendukung prioritas pembangunan.Laboratorium Inovasi diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk melaksanakan fungsi itu. Laboratorium juga berfungsi dalam penataan regulasi	BAPPEDA	BAPPEDA	APBD	Peningkatan jumlah inovasi di Kabupaten Bangka	Jumlah Inovasi yang diaplikasikan dalam kebijakan dan industri	Modifikasi	Belum	2018-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				untuk inovasi, pembinaan, penilaian dan verifikasi inovasi								
3	Penanganan stunting masih bersifat parsial	SI TUMBUH CERDAS (Aksi Kolaborasi Penurunan Stunting Agar Bayi Tumbuh Cerdas dan Sehat)	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi penurunan stunting \"Si Tumbuh Cerdas\" dilakukan melalui intervensi terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program percepatan penurunan stunting yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, Kementerian Agama, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat/filantr	Seluruh OPD dan Swasta	BAPPEDA	APBD/APBN/SWASTA	Sistem penangana Stunting terpadu dan terintegrasi	Persentase penurunan stunting	Asli	Sudah	2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				opi serta masyarakat								
4	Belum optimalnya pengelolaan lahan bekas eks tambang	GERBANG LESTARI (Gerakan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup)	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi pengelolaan lahan kritis bekas pertambangan timah menjadi lahan produktif melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, perusahaan pertambangan Timah, Perguruan Tinggi, Pemerintah Desa, perguruan tinggi Austria, lembaga riset Negara Jerman Institut Federal untuk Geosains dan Sumber Daya Alam BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe	BAPPEDA, LH, Dinas Pertanian dan Perkebunan	BAPPEDA	APBD/SWASTA/ MASYARAKAT	2 Lokus model pelestarian lingkungan	Luasan lahan tambangyang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
5	Pendataan kemiskinan belum masih manual dan belum menggunakan sistem informasi	KEMBANG DESA (Kesejahteraan Masyarakat Bangka Dengan Sistem dan Aplikasi	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi aplikasi sistem KEMBANG DESA (Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Bangka Dengan Sistem dan Aplikasi). Sistem ini memiliki keunggulan: by name, karena memperoleh nama RumahTangga Sasaran (RTS) dengan tepat, by address, karena memperoleh alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) ANdengan tepat, by photo, karena menampilkan photo Individu Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan tepat, by coordinate, karena menampilkan titik kordinat alamat Individu Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan tepat,	BAPPEDA	BAPPEDA	APBD	Tersedianya data kemiskinan terpadu	Data masyarakat miskin yang tepat dan akurat	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				by profile, karena menampilkan profil lengkap sesuai dengan data Rumah Tangga Sasaran, by charity, karena menampilkan semua program kemiskinan yang disalurkan ke Rumah Tangga Sasaran (RTS), by navigation, karena menampilkan navigasi yang mampu menuntun kita menuju arah alamat rumah tangga sasaran								
6	Pelacakan sisitem informasi air minum belum menggunakan sistem terintegrasi	SIM DATA AMPL BANGKA	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi ini merupakan tatakelola air minum dan penyehatan lingkungan berbasis teknologi informasi di bidang pendataan, perencanaan, pendataan, kebijakan dan implementasi	BAPPEDA	BAPPEDA	APBD	Tersedianya data terpadu AMPL	Peningkatan jumlah akses air minum bersih bagi masyarakat	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				dalam tatakelola air minum dan penyehatan lingkungan.								
7	Masih tingginya angka putus sekolah	BUNAKTUSLAH	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi BUNAKTUSLAH (Perburuan Anak Putus Sekolah) yaitu dengan konsep pemerintah memburu anak-anak yang putus sekolah untuk di sekolahkan melalui PKBM dan Beasiswa Pendidikan.Pola lama yang hanya menunggu orang yang mendaftar ke sekolah harus dihilangkan.	Pendidikan dan BAPPEDA	BAPPEDA	APBD	Data anak putus sekolah	Meingkatnya partisipasi anak sekolah	Asli		2019-2023
8	Penataan ruang masih bersifat parsial dan belum sistemik	Majelis Sabtu	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi "MAJELIS SABTU!!"menciptakan tata kelola penataan ruang yang tadinya sektoral dan parsial, tidak	BAPPEDA	BAPPEDA	APBD	Tatakelola penataan ruang terpadu	Persentase konflik penataan ruang	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				memberikan titik temu rekomendasi pemanfaatan ruang jelas sehingga perizinan terhambat menjadi pendekatan koordinatif mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.								
9	Pemberdayaan oraang tua belum dilakukan secara optimal	BU RATU HIRI	Bidang Tatakelola Pemerintahan	Inovasi pendataan seluruh orang tua di Kabuoaten Bangka yang hidup seorang diri (tanpa keluarga).Hasil pendataan tersebut akan digunakan sebagai bahan intervensi kebijakan pemberinan bantuan sosial dan pemberdayaan orang tua agar terbebas dari perangkap kemiskinan dan keterlantaran.	Sosial dan BAPPEDA	BAPPEDA	APBD	Tersedianya data orang tua hidup sendiri	Persentase orang tua hidup sendiri yang tertangani	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
10	Pendataan sistem informasi di bidang perawatan kesehatan belum optimal	SIMPANAN CANTIK	Bidang Kesehatan	Inovasi "SIMPANAN CANTIK" RSUD berbasis android memberikan solusi dalam upaya menurunkan angka kematian pasien di rawat jalan, IGD, maupun rawat inap.	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Tersedianya data informasi kesehatan pasien	Persentase penurunan angka kematian ibu melahirkan	Asli		2019-2023
11	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan penanganan pasien gawat darurat	PSC SPGDT	Bidang Kesehatan	Inovasi PSC SPGDT Kabupaten Bangka terdiri dari 1) Layanan informasi kesehatan,2) Layanan dukungan ambulans dan fasilitas gawat darurat lengkap,3) Pelayanan rujukan ke rumah sakit, 4)Layanan Be Smart Family yaitu program tentang konsultasi masyarakat tentang masalah kegawatdaruratan agar masyarakat bisa melakukan tindakan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Tersedianya system informasi penanganan pasien gawat darurat	Persentase penurunan pasien yang tertangani dan sembuh	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				pertolongan pertama jika terjadi kegawatdaruratan di rumah dan lingkungannya, 5) Layanan informasi ketersediaan fasilitas tempat tidur di rumah sakit, 6) Layanan aplikasi Android untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan dengan cepat dan mudah								
12	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam donor darah	RANSEL SI DORA		Aplikasi Donor Darah berbasis WEB (SI DORA) secara online yang dilaunching tanggal 26 Januari 2018. Dengan digagasnya SI DORA, masyarakat yang membutuhkan informasi donor darah di Kabupaten Bangka dapat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Tersedianya aplikasi Web donor darah		Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				mengakses informasi tersebut secara cepat dan real time, dengan mengakses web sidora.bangka.go.id . SI DORA menyajikan informasi data Stok Darah di UTDRS Depati Bahrin dan Unit Donor Darah PMI Sungailiat, data pendonor yang siap donor, identitas dan nomor kontak pendonor di wilayah Kabupaten Bangka, form registrasi calon pendonor dan informasi singkat seputar donor darah.								
13	Rendahnya pengetahuan ibu hamil dalam bidang kesehatan	SMS BUNDA CERDAS		Bunda Cerdas ini dijalankan di masyarakat terkhusus untuk ibu hamil dan melahirkan yang bertujuan memberikan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Tersedianya informasi sistem kesehatan ibu hamil	Persentase penurunan kematian ibu yang melahirkan	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				edukasi informasi kepada ibu hamil agar mengetahui informasi – informasi tentang kehamilannya serta dapat mengetahui cara perawatan bayi baru lahir.								
14	Masih tingginya kematian ibu melahirkan	LADA PUTIH" RSUD DEPATI BAHRIN TURUNKAN AKI/AKB		Strategi all out berupa pelayanan publik yang komprehensif guna percepatan penurunan kematian ibu dan bayi resiko tinggi. Inovasi pelayanan publik tersebut penggabungan antara Program kegiatan yaitu "Lada Putih" yang didukung dengan Aplikasi "SiLada Putih" berbasis android yang terkoneksi dengan Command Center Kebidanan 24 jam. Aplikasi "SiLada Putih" connecting	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Tersedianya aplikasi penurunan ibu dan bayi brereskо tinggi	Persentase penurunan kematian ibu yang melahirkan	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				dengan Command center kebidanan merupakan inovasi original yang belum pernah ada di Indonesia								
15	Masih tingginya resiko kematian ibu melahirkan	SI RESTI CIKAR	Bidang Kesehatan	SI RESTI CIKAR membantu memastikan Ibu hamil dengan faktor risiko dan risiko tinggi mampu untuk merencanakan persalinan dengan aman dan selamat mulai dari identifikasi risiko kehamilan, keluhan selama kehamilan, rujukan jika diperlukan, pelayanan ANC yang berkualitas, USG, calon pendonor, pendamping persalinan dan penolong persalinan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Tersedianya system persalinan terpadu	Persentase penurunan kematian ibu yang melahirkan	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
16	Masih rendahnya kepemilikan jamban	NYAMAN STOP BABS (BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN) DIBALIK KOCOKAN ARISAN "IBU"		Inovasi ini untuk mengatasi permasalahan jamban dengan menerapkan metode Community Lead Total Sanitations (CLTS) yaitu merupakan strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan menyeluruh dengan memfasilitasi masyarakat dan pada akhirnya bertujuan untuk mencapai status ODF (Open Defecations Free) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan.	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD/MASYARAKAT	Jumlah lokasi desa yang terbebas dari ODF	Persentase jumlah data bebas ODF	Asli		2019-2023
17	Belum teridentifikasi jumlah lansia dan tingkat pemberdayaan yang masih rendah	OJEG LANSIA		Inovasi "Ojek Lansia " bertujuan untuk menjemput lansia di wilayah desa Penagan untuk datang ke Posyandu dan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBD	Jumlah Lansia yang dilayani	Persentase jumlah lansia yang terlayani di bidang kesehatan	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				mengantarkan kembali pulang ke rumah setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia.								
18	Pelayanan public di bidang investasi masih belum berkualitas	PINTU KITE	BIdang Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi PINTU KITE terobosan dalam peningkatan pembuatan perizinan dan nilai investasi sehingga berdampak terciptanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka.	UPTSP	UPTSP	APBD	Tersedianya aplikasi kepengurusan investasi	Persentase peningkatan jumlah investasi	Asli		2019-2023
19	Rendahnya kualitas pelayanan public di bidang akte kependudukan	PORTCATWIN		Inovasi kemudahan dalam mendapatkan KTP, KK serta pindah jiwa bagi pasangan yang menikah di KUA melalui entry secara	UPTSP	Dinas DUKCAPIL	APBD	Tersedianya aplikasi data kependudukan	Persentase peningkatan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				online.Warga tidak perlu lagi datang ke Dinas Dukpencapil untuk mengurus KTP dan KK nya dikarenakan perubahan status di KTP dan KK nya.								
20	Rendahnya tingkat hunian hotel akibat Covid 19	Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel C-19	Bidang Perekonomian	Inovasi untuk mendorong terjadinya peningkatan kunjungan wisatawan	Industri Perhotelan	Dinas Pariwisata	APBD	SOP kunjungan wiasatawan masa pendemi Covid 19	Persentase peningkatan kunjungan wisata	Asli		2019-2023
21	Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan ke tempat wisata	Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Tempat Wisata C-19.	Bidang Perekonomian	Inovasi untuk mendorong terjadinya peningkatan kunjungan wisatawan	Masyarakat dan Industri Perhotelan	Dinas Pariwisata	APBD	SOP kunjungan wiasatawan masa pendemi Covid 19	Persentase peningkatan kunjungan wisata	Asli		2019-2023
22	Rendahnya tingkat antusis masyarakat dalam pelayanan publik	Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP C-19.	Pelayanan publik	Inovasi untuk mendorong peningkatan kuantitas masyarakat dalam pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Dinas UPTSP	APBD	SOP kunjungan masyarakat dalam pelayanan publik	Persentase peningkatan kunjungan masyarakat dalam pelayanan publik	Asli		2020-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
23	Keterbatasan akses kelompok disable dalam pelayanan publik	Inovasi Cafe Disabilitas Kabupaten Bangka	Pelayanan publik	Inovasi untuk mendorong peningkatan kuantitas masyarakat disabel dalam pelayanan publik	Masyarakat	Dinas Paariwisata	APBD	SOP pelayanan kepada kelompok disabel	Jumlah kunjungan kelompok disable ke fasilitas restoran/cafe	Asli		2020-2023
24	Keterbatasan akses pelayanan public di bidang UMKM	Pintu Kite (Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu pada DINPMP2KUKM)	Pelayanan Publik	Inovasi untuk meningkatkan akses pelayanan kepada UMKM	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	APBD	Digitalisasi pelayanan Koperasi dan UMKM	Persentase peningkatan jumlah UMKM dan koperasi	Asli		2018-2023
25	Updating data dan pola penularan penyakit malaria	Si Surtam (Survey Kontak Malaria, Eliminasikan Malaria Di Bangka)	Kesehatan	Inovasi untuk mengeliminasi penularan penyakit malaria	Masyarakat	Dinas Kesehatan	APBD	Sistem apdating dan pola penularan penyakit malaria	Peresentase penurunan penyakit malaria	Asli		2018-2023
26	Pelayanan RSUD belum menggunakan apilkasi Android	Pembangunan Sistem Aplikasi E-DPJP Berbasis Android di RSUD Sungailiat	Kesehatan	Inovasi untuk meningkatkan kemudahan dan aksess pelayanan publik	Masyarakat	RSUD	APBD	Sistem aplikasi Android	Peningkatan kepuasan pelayanan public RSUD	Asli		2018-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
27	Belum tersedianya Sistem Penatausahaan Berbasis WEB untuk Meningkatkan Pelayanan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungailiat	Pembangunan Sistem Penatausahaan Berbasis WEB untuk Meningkatkan Pelayanan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungailiat	Pendidikan	Sistem Penatausahaan Berbasis WEB untuk Meningkatkan Pelayanan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungailiat	Masyarakat	Dinas Pendidikan	APBD	Sistem pelayanan berbasis WEB	Peningkatan kepuasan pelayanan UPTD kecamatan	Asli		2018-2023
28	Belum tersedianya data base deteksi kualitas air	Aplikasi Database Kualitas Air	Kesehatan	Inovasi untuk mendukung ketersediaan informasi kualitas air	Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	APBD	Ketersediaan Database kualitas air	Peningkatan kepuasan pelayanan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat	Asli		2018-2023
29	Belum optimalnya tatakelola Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Melalui Sistem Informasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah (SI-INFORMANS'S BMD)	Optimaliasasi Penatakelolaan Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Melalui Sistem Informasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah (SI-	Pelayanan publik	Inovasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Melalui Sistem Informasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah (SI-INFORMANS'S BMD)	Masyarakat	DPPKAD	APBD	Ketersediaan Sistem Informasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah (SI-INFORMANS'S BMD)	Peningkatan kepuasan pelayanan Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah	Asli		2018-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
		INFORMANS'S BMD)										
30	Belum optimalnya Penyampaian Laporan Bulanan Sekolah Dasar Tepat Waktu Dan Terintegrasi	Optimalisasi Penyampaian Laporan Bulanan Sekolah Dasar Tepat Waktu Dan Terintegrasi Melalui Penerapan Sistem Aplikasi Pelaporan (Sape)	Pelayanan publik	Inovasi Penyampaian Laporan Bulanan Sekolah Dasar Tepat Waktu Dan Terintegrasi	Masyarakat	Dinas Pendidikan	APBD	Ketersediaan Sistem Aplikasi Pelaporan (Sape)	Penyampaian laopran teat waktu dan berkualitas serta terintegrasi	Asli		2018-2023
31	Belum optimalnya Penatausahaan Barang Persediaan di Kabupaten Bangka	Optimalisasi Penatausahaan Barang Persediaan Melalui Penggunaan Sistem Aplikasi Barang Persediaan Tepat Waktu (SIAP BANTU) di Kabupaten Bangka	Pelayanan publik	Inovasi Penatausahaan Barang Persediaan Melalui Penggunaan Sistem Aplikasi Barang Persediaan Tepat Waktu (SIAP BANTU) di Kabupaten Bangka	Seluruh OPD	Dinas Kearsipan	APBD	Aplikasi Barang Persediaan Tepat Waktu dan terintegrasi	Kepuasan pelayanan barang persediaan	Asli		2018-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
32	Belum Optimalnya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Optimalisasi Fasilitasi Kerja Sama Daerah Melalui Sistem Informasi Terpadu "Ksd Online" Di Kabupaten Bangka	Pelayanan publik	Inovasi Fasilitasi Kerja Sama Daerah Melalui Sistem Informasi Terpadu "Ksd Online" Di Kabupaten Bangka	Seluruh OPD	SETDA	APBD	Aplikasi kerjasama	Kepuasan pelayanan bidang kerjasama daerah	Asli		2018-2023
33	Belum optimalnya Pelayanan Pendaftaran Uji Kendaraan Bermotor	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Uji Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi "Silajuramor" (Sistem Layanan Uji Kendaraan Bermotor)	Pelayanan publik	Inovasi digitalisasi Pelayanan Pendaftaran Uji Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi "Silajuramor" (Sistem Layanan Uji Kendaraan Bermotor)	Masyarakat	Perhubungan	APBD	Aplikasi layanan uji kendaraan bermotor	Kepuasan pelayanan uji kendaraan bermotor	Asli		2018-22023
34	Belum optimalnya pelayanan Kesehatan Hewan	Optimalisasi pelayanan Kesehatan Hewan Melalui Pembentukan Puskeswan Keliling dan Puskeswan Online di	Pelayanan publik	Inovasi digitalisasi pelayanan Kesehatan Hewan Melalui Pembentukan Puskeswan Keliling dan Puskeswan Online di Kabupaten Bangka	Masyarakat	Dinas pertanian	APBD	Aplikasi online pelayanan kesehatan hewan	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan hewan	Asli		2018-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
		Kabupaten Bangka										
35	Belum tersedianya Pemetaan penerima rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) berbasis Poverty Mapping	Pemetaan penerima rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) berbasis Poverty Mapping di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat	Pelayanan publik	Inovasi Pemetaan penerima rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) berbasis Poverty Mapping di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat	Dinas Sosial, Kecamatan Sungailiat dan BAPPEDA	Kelurahan Jelitik	APBD	Peta kemiskinan	Ketersediaan data kemiskinan yang uptodate dan valid	Asli		2018-2023
36	Belum optimalnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi Di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan	Pelayanan publik	Inovasi Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi Di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan	Masyarakat	Dinas PU PR dan Perhubungan	APBD	Aplikasi pengujiaj kendaraan bermotor	Kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pengujian kendaraan bermotor	Asli		2018-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
		Ruang Dan Perhubungan										
37	Lambatnya respon palayanan bantuan kematian bagi masyarakat	INOVASI PELAYANAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN melalui "Bangka segera" di KABUPATEN BANGKA	Pelayanan publik	Inovasi yang dilakukan untuk meingkatkan kepuasan pelayanan bantuan kematian bagi masyarakat.	Masyarakat, Dinas Sosial, Keluranan, Kecamatan	SETDA	APBD	Data penerima bantuan sosial kematian	Kepuasan masyarakat penerima bantuan sosial kemagtian	Asli		2018-2023
38	Belum optimalnhya pelayanan Obat Terpadu Di UPTD Gudang Farmasi	Sistem Informasi Pengelolaan Obat Terpadu Berbasis Website Di Uptd Gudang Farmasi "Sporter Berdasi"	Pelayanan publik	Inovasi pelayanan Obat Terpadu Di UPTD Gudang Farmasi	Dinas Kesehatan	RSUD	APBD	Aplikasi pelayanan obat	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan obat	Asli		2018-2023
39	Belum optimalnya pelayanan pertanahan kepada publik	Sistem Informasi Pertanahan (SIPET)	Pelayanan Publik	Inovasi pelayanan yang secara digital untuk mempercepat pelayanan bidang	Kantor Pertanahan	SETDA	APBD	Aplikasi Pertanahan digital	Kepuasan pelayanan pertanahan kepada masyarakat	Asli		2018-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				pertanahan kepada masyarakat								
40	Belum Optimalnya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan	Inovasi Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Melalui Pembentukan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bangka	Pelayanan publik	Inovasi pelayanan public dengan pembentukan posko terpadu pelayanan pencegahan perusakan lingkungan	Masyarakat	Badan Lingkungan Hidup	APBD	Ketersediaan Posko Pelayanan dan Jumlah aduan	Penurunan kerusakan lingkungan hidup	Asli		2019-2023
41	Belum optimalnya pendapatan PBB	Warung PBB "MAS JEMPOL"	Pelayanan publik	Inovasi pelayanan yang mempermudah akses masyarakat dalam pembayaran pajak PBB	Perbankan dan Masyarakat	Badan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan	APBD	Jumlah pembayar pajar PBB	Peningkatan pajak PBB	Asli		2019-2023
42	Belum tersedianya Sistem Data Informasi Pelayanan Aseptor Keluarga Berencana	Sistem Data Informasi Pelayanan Aseptor Keluarga Berencana	Pelayanan publik	Inovasi digital pelayanan aseptor KB kepada masyarakat	Masyarakat	Dinas KBPP	APBD	Ketersediaaan sisitem informasi aseptor KB	Persentase peningkatan keikutsertaan KB	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
43	Belum optimalnha layanan Sosial Penyandang Disabilitas	inovasi Rumah Layanan Sosial Penyandang Disabilitas	Pelayanan publik	Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan sekaligus pemberdayaan kepada kelompok disable	Masyarakat	Dinas Sosial	APBD	Ketersediaan rumah disabilitas	Jumlah kelompok disaabilitas yang meningkat kesejahteraannya	Asli		2019-2023
44	Belum tersedianya Data Altit	Sistem Informasi Data Altit (Si-Abang)	Pelayanan publik	Inovasi penyediaan data atlit yang up to date di Kabupaten Bangka	Masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga	APBD	Ketersediaan sistem informasi data atlit	Jumlah Atlet yang terdata	Asli		2019-2023
45	Belum optimalnya si Pengelolaan Administrasi Umum "	Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Umum Melalui Aplikasi ":SISUMAKER"	Pelayanan publik	Inovasi peningkatan pengelolaan administrasi umum secara digital yang dapat meningkatkan pelayanan administrasi secara cepat dan terintegrasi	Masyarakat	SETDA	APBD	Ketersediaan system administrasi pelayanan umum	Jumlah data yang utodate dan kepuasan pelayanan pegawai	Asli		2019-2023
46	Pelayanan Penyaluran Dan Pencairan Apbdesa belum optimal	Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan Apbdesa Melalui	Pelayanan public	Inovasi peningkatan pelayanan penvcairan APBDES secara cepat dan	Masyarakat	Badan PEMDES	APBD	Ketersediaan Aplikasi Sepradik	Jumlah APDES yang tersalur secara cepat dan tepat	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
		Aplikasi "Sepradik"		transparan serta efektif								
47	Belum optimalnha pelayanan Pendapatan Sektor Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2)	Inovasi Peningkatan Pendapatan Sektor Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Dengan Kebijakan Pembayaran Tunggakan Tanpa Sanksi Administrasi/ Denda (Sunset Policy)	Pelayanan Publik	Inovasi peningkatan pelayanan Sektor Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2)	Masyarakat dan Perbankan	BPKKAD	APBD	Ketersediaan Aplikasi	Jumlah peningkatan pendapatan Sektor Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2)	Asli		2019-2023
48	Belum efisiensinya pengelolaan anggaran	Strategi efisiensi anggaran melalui SIM TERGARANG	Pelayanan publik	Inovasi peningkatan efisiensi anggaran melalui bantuan system informasi	Masyarakat dan DINKOMINFO	BPKKAD	APBD	Ketersediaan aplikasi	Efisiensi anggaran	Asli		2019-2023
49	Belum optimalnya Pembangunan sistem informasi cadangan pangan di Kabupaten Bangka	Pembangunan sistem informasi cadangan pangan di	Pelayanan publik	Inovasi peningkatan pelayanan cadangan pangan kepada masyarakat di Kabupaten	Masyarakat	Dinas Pangan	APBD	Ketersediaan aplikasi	Jumlah informasi pangan yang upto date dan kepuasaan peleyanan	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
		Kabupaten Bangka		Bangka melalui sisitem informasi dengan sangat mudah dan cepat serta berbiaya murah					informasi pangan			
50	Belum sinergisnya Program Layanan PAUD Kab. Bangka	Sinergitas Program Layanan PAUD Four In One berbasis Kemasyarakatan Kab.. Bangka	Pelayanan publik	Inovasi pelayanan PAUD berbasis kemasyarakatan dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan kualitas anak usia dini	Masyarakat	Dinas Pendidikan	APBD	Jumlah PAUD	APK dan APM anak usia dini	Asli		2019-2023
51	Pelayanan arsip masih bersifat parsial	Inovasi Sentralisasi Arsip	Pelayanan publik	Inovasi yang dilakukan dengan membentuk pelayanan secara sentralistik	Seluruh OPD	Kantor Arsip dan Perpustakaan	APBD	Jumlah arsip yang tersentralisasi	Kepuasan pelayanan kearsipan	Asli		2019-2023
52	Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Collaborative Action	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	Inovasi dilakukan dalam penyediaan rumah layak huni dan perekonomian masyarakat	Dinas PU, Dinsos, Kecamatan, Desa, Hbitat, Samsung	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Swasta	Ketersediaan rumah layak huni	Kesejaheraan Masyarakat	Asli		2019-2023
53	Belum optimalnhya Pengembangan sistem pelayanan perizinan online	Pengembangan sistem pelayanan perizinan	Pelayanan publik	Inovasi pelayanan public secara digital untuk memberikan	Seluruh UMKM dan KPTSP	Dinas UMKM	APBD	Ketersediaan sisitem informasi	Kepuasan kelempok UMKM	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
	(spion) pada dinas penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, koperasi usaha kecil dan menengah	online (spion) pada dinas penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, koperasi usaha kecil dan menengah		pelayanan kepada kelompok UMKM				pelayanan UMKM	terhadap pelayanan			
54	Pelayanan transaksional non tunai pembayaran retribusi harian pasar di Kabupaten Bangka yang masih tradisionalistik	Transaksional non tunai pembayaran retribusi harian pasar di kabupaten bangka	Pelayanan publik	Inovasi yang memberikan kemudahan pelayanan pembayaran retribusi harian pasar	KPT Pasar dan Perbankan	DPPKAAD	APBD	Jumlah aplikasi pelayanan	Peningkatan jumlah retibusi harian pasar	Asli		2019-2023
55	Rendahnya Penerapan Teknologi Budidaya Peternakan Sapi Melalui Budidaya Kelompok Peternak dan Sumberdaya Aparatur Peternakan di Kabupaten Bangka	Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Peternakan Sapi Melalui Budidaya Kelompok Peternak dan Sumberdaya Aparatur Peternakan di	Pelayanan publik	Inovasi peningkatan pelayanan melalaui penerapan Teknologi Budidaya Peternakan Sapi Melalui Budidaya Kelompok Peternak dan Sumberdaya Aparatur	KUPT Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian	APBD	Jumlah pemanfaatan teknologi	Kepuasan dan kemudahan pelayanan kelompok peternak	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
		Kabupaten Bangka		Peternakan di Kabupaten Bangka								
55	Data obat dan perbekalan yhang masih bersifat manual	Inovasi Sistem "Sipeda Farmasi (Aplikasi Pengelolaan Data Obat Dan Perbekalan Farmasi)	Pelayanan publik	Inovasi digital peningkatan pengelolaan data secara akurat dan up to date dalam bidang obat dan perbekalan farmasi	DINKES, PUSKESMAS	DINKES	APBD	Ketersediaan system informasi	Kepauasan pelayanan obat dan perbekalan farmasi	Asli		2019-2023
56	Peningkatan penyakit rabies di Kabupaten Bangka	Pencegahan Penyebaran Penyakit Rabies Dengan Pembentukan Kader Vasinator Rabies di Kabupaten Bangka	Bidang Kesehatan	Inovasi dilakukan terkait dengan upaya pemberatnasan penyakit rabies	Masyarakat	Dinas Kesehatan	APBD	Jumlah kader yang terbentuk	Penurunan penyakit rabies	Asli		2019-2023
57	Tatakelola pengendalian menara telekomunikasi belum optimal	Sinergitas tatalaksana sistem pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bangka	Bidang pelayanan publik	Inovasi pelayanan pengendalian brupaya untuk dilakukan penataan sesuai dengan katetruangan dan kebutuhan masyarakat	KPT, SATPOL PP	DISKOMINFO	APBD	Jumlah tindakan pengendalian	Persentase Konflik pendirian menara telekomunikasi	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
58	Belum optimalnya pelayanan posyandu	Inovasi Si Edu Bangka (Sistem Informasi E Posyandu)	BIdang Kesehatan	Inovasi untuk meningkatkan pelayanan posyandu secara integrative dan holistik	Puskesman, Posyandu, Desa, Kelurahan	Dinas Kesehatan	APBD	Jumlah e posyandu yang terbentuk	Kepuasan pelayanan masyarakat terhadap Posyandu	Asli		2019-2023
59	Belum optimalnya pelayanan kearsipan	Peningkatan pelayanan arsip pegawai melalui digitalisasi dokumen aparatur sipil negara Kabupaten Bangka	Bidang pelayanan publik	Inovasi untuk meningkatkan pelayanan arsip secara digital kepada masyarakat	Kominfo, seluruh OPD	Kantor Kearsipan	APBD	Aplikasi kearsipan	Jumlah arsip yang terdigitalisasi dan kepuasan pelayanan kearsipan	Asli		2019-2023
60	Pelayanan rumah sakit masih bersifat manualistik dan tradsionalistik	Pengembangan sistem informasi pelayanan rumah sakit umum daerah sungailiat menggunakan infromasi visual, grafis, online dan mobile	Bidang Kesehatan	Inovasi pelayanan dengan menggunakan sisitem informasi secara visual dan online serta metode geografis spasial	Puskesmas, DINKES	RSUD	APBD	Aplikasi sistem informasi geografis secara online	Kepuasan pelayanan masyarakat terhadap rumah sakit	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
61	Belum adanya Sistem Data Infrastruktur Berbasis Teknologi Informasi Pada Bappeda Kab. Bangka	Sistem Data Infrastruktur Berbasis Teknologi Informasi Pada Bappeda Kab. Bangka	Bidang Pelayanan Publik	Inovasi pelayanan public bidang infrastruktur berbasis teknologi informasi	Seluruh OPD	DINKES	APBD	Aplikasi system informasi infrastruktur	Kepuasan pelayanan bidang infrastruktur	Asli		2019-2023
62	Belum optimalnya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)	Optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan metode pola tabungan bayar pajak pakai sampah (BAYPAS)	Pelayanan Publik	Inovasi yang dilakukan dengan penerapan metode pola tabungan bayar yang memudahkan masyarakat sekaligus memberikan keringanan atas beban pembayaran pajak melalui pola angsuran	Kecamatan, kelurahan, desa, KPT	DPPKAD	APBD	Partisipasi masyarakat dalam metode pembayaran pajak pola tabungan	Peningkatan pendapatan pajak	Asli		2019-2023
63	Rendahnya disiplin PNS di Kabupaten Bangka	Pembinaan disiplin PNS di Kabupaten Bangka melalui kartu ningrat	Pelayanan publik	Upaya peningkatan kedispilinan pegawai melalusi system card	Seluruh OPD	BKPSDM	APBD	Partisipasi pegawai dalam keikutsertaan kartu ningrat	Penurunan tingkat kedisiplinan pegawai	Asli		2019-2023
64	Belum optimalnya pelayanan Pelayanan UPT Laboratorium	Inovasi Sistem Registrasi Dan Pelayanan Upt Laboratorium Dinas	Bidang Kesehatan	Inovasi peningkatan pelayanan laboratorium	DINKES, Puskesmas	RSUD	APBD	Kettersediaan system aplikasi pelayanan UPT Dinkes	Kepuasan pelayanan laboratorium	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka	Kesehatan Kabupaten Bangka										
65	Pengelolaan tata kelola pengaduan masih bersifat manualistik di bidang pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Melalui Pembentukan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Di Kab. Bangka	Bidang Lingkungan Hidup	Inovasi yang memfokuskan pada aspek pengendalian lingkungan hidup agar lebih mudah di monitoring melalui partisipasi masyarakat dengan membentuk pos pengaduan	Masyarakat	Dinas LH	APBD	Jumlah aduan	Penurunan kerusakan dan pencemaran lingkungan	Asli		2019-2023
66	KOflik batas wilayah meningkat di Kabupaten Bangka	Penataan Wilayah Berbasis Titik Koordinat Didesa Cengkong Abang Kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka	Bidsng pelayanan publik	Inovasi difokuskan pada pengendalian konflik tataruang berbasis titik koordinat	Bappeda, LH, KOMINFO, Kecamatan, Desa	Dinas PU	APBD	Desa yang memiliki titik koordinat	Penurunan konflik batas desa	Asli		2019-2023
67	Belum optimalnya kinerja pelaporan	Optimalisasi kinerja pelaporan melalui pengembangan standarisasi	Bidang pelayanan publik	Inovasi pelayanan kemudahan dalam bidang pelaporan	Seluruh OPD	BPSDM	APBD	Jumlah laporan yang valid dan tepat waktu	OPD yang menerpakan system pelaporan	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
		pelaporan pelaksanaan kegiatan di dinas pendidikan kabupaten bangka										
68	Belum optimalnya sistem Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bangka	Optimalisasi Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bangka	Bidang pelayanan publik	Inovasi untuk meningkatakn pelayanan bidang pelaoran pelayanan perpajakan	KPT	DPPKAD	APBD	Jumlah pelaporan yang valid dan tepat waktu	Peningkatan pengelolaan pajak yang oleh OPD terkait	Aali		2019-2023
69	Rendahnya Konsumsi Pangan Lokal Di Kabupaten Bangka	Gerakan Konsumsi Pangan Lokal Di Kabupaten Bangka	Bidang pangan	Inovasi gerakan sosial yang berbasis pada pemberdayaan komunitas dalam bidang konsusmsi pangan lokal	Masyarakat	Dinas Pangan	APBD	Peningkatan konsumsi pangan lokal	Peningkatan pendapatan petani	Asli		2019-2023
70	Belum optimalnya pelayanan Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (SIPARASDARA)	Inovasi Sistem Informasi Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (SIPARASDARA)	Pelayanan publik	Inovasi difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada kelompok kekerasan seksual	Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Sosial	Dinas KBPP	APBD	Jumlah pembinaan dan advokasi kekerasan terhadap perempuan	Penurunan kasus kekerasan perempuan	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
71	Belum optimalisasi pengelolaan data base base statistik pertanian untuk peningkatan program oada dinas pertanian dan peternakan kabupaten bangka	Optimalisasi pengelolaan data base base statistik pertanian untuk peningkatan program oada dinas pertanian dan peternakan kabupaten bangka	Pelayanan publik	Inovasi yang difokuskan dalam pengelolaan data statitik agar mudah di akses oleh masyarakat petani dan stakeholders lainnhya	BPS	Dinas Pertanian	APBD	Jumlah Data yang tersuply dan up date	Kepuasan pelayanan data bidang pertanian	Asli		2019-2023
72	Belum optimalnya pengelolaan Penatausahaan	Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan (SIPU)	Palayanan Publik	Inovasi difikuskan pada bidang penatusahaan	Seluruh OPD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	APBD	Ketersediaan system informasi	Kepuasan pelayanan tata usaha	Asli		2019-2023
73	Belum teraplikasinya pelayanan perpustakaan berbasis online	Aplikasi e-PUS	Pendidikan	Inovasi pelayanan perpustakaan yang berbasisi online. Pelacatan buku perpustakaan dengan cepat dan dapat dilakukan dari jarak jauh	Perpustakaan dan seluruh sekolah	Dinas Pendidikan	APBD	Jumlah perpustakaan yang menggunakan aplikasi online	Peningkatan literasi	Asli		2019-2023
74	Pelayanan Kependudukan	Inovasi Pelayanan	Pelayanan publik	Inovasi pelayanan kependudukan yang dilakukan secara elektornik	Masyarakat	DINDUKCAPIL	APBD	Kepuasan pelayanan kependudukan	Jumlah masyarakat yang memiliki	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
	masih berbasis manual	Kependudukan ONLINE		sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan efektif					dokumen kependudukan			
75	Belum optimalnya Kerja Tim Koordinasi Kerjasama Daerah	Optimalisasi Kerja Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Melalui Group Decision Support Systems Berbasis IT	Pelayanan Publik	Inovasi untuk meningkatkan kinerja kerjasama daerah	Seluruh OPD	SETDA	APBD	Kepuasan pelayanan kerjasama	Peningkatan jumlah kerjasama	Asli		2019-2023
76	Belum optimalnya kegiatan Monitoring Data Pertanian	Optimalisasi Monitoring Data Pertanian Melalui Sistem Penyederhaan Laporan Statistik (Silapis)	Pelayanan publik	Inovasi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan monitoring data pertanian	Masyarakat	Dinas Pertanian	APBD	Keakuratan data pertanian dan updating data	Kepuasan pelayanan data pertanian	Asli		2019-2023
77	Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Matras	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Matras	Pelayanan publik	Inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan public di Kelurahan Matras	Masyarakat	Kelurahan Matras	APBD	Peningkatan kinerja pelayanan	Kepuasan peleyanan	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
78	layanan mutasi siswa masih berbasis manual	Layanan mutasi siswa berbasis teknologi informasi di kabupaten bangka	Pendidikan	Inovasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan mutasi siswa	Sekolah	Dinas pendidikan	APBD	Aplikasi mutasi	Kepuasan pelayanan sekolah bidang pemutasian	Asli		2019-2023
79	Pelayanan arsip masih bersifat manual	Inovasi Sistem Informasi Arsip Berbasis “Apel”	Kearsipan	Inovasi untuk meninbgkatkan kinerja pelayanan kearsipan melalui TI sehingga pelayanan lebih cepat dan efektif	Sekolah dan seluruh OPD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	APBD	Aplikasi TI kearsipan	Kepuasan pelayanan kearsipan	Asli		2019-2023
80	Belum optimalanya kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Ikprd) Untuk Proses Advice Planning Pada Penataan Ruang Daerah	Peningkatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Ikprd) Untuk Proses Advice Planning Pada Penataan Ruang Daerah Yang Efektif Dan Efisien	Ketataruangan	Inovasi untuk meningkatkan kinerja tim ketataruangan di Kab. Bangka	Seluruh OPD	Dinas PU	APBD	SOP proses active planning	Ketaatan penataan ketataruangan	Asli		2019-2023
81	Kurang optimalnya pembentukan belakar di Kabupaten Bangka	Pembentukan belakar dalam rangka liget bedesit di	Perdagangan dan investasi	Peningkatan pelayanan data bidang investasi dan perdagangan	OPD terkait	DINPERINDAGKOP	APBD	Data yang uptodate dan valid	Peningkatan nvestasi dan nilai perdagangan	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
		kabupaten bangka										
82	Beljum optimalnya Pelayanan Perizinan Kecamatan Merawang	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Kecamatan Merawang (Sipp Mang)	Pelayanan publik	Pelayanan perijinan berbasis online dengan standar SOP yang terukur	Masyarakat dan Seluruh OPD	Kec. Merawang	APBD	Sistem informasi	Peningkatan jumlah investasi	Asli		2019-2023
83	Belum tersedianya formula perhitungan Inflasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi	Pengembangan Perhitungan Inflasi Dalam Rangka Pengedalian Inflasi	Perdagangan	Formula petrhitungan pengendalian investasi yang berstandar dan valid	BAPPEDA	SETDA	APBD	Formula bersatndar	Ketersediaan formula dan keterkendalian inflasi	Asli		2019-2023
84	Pelayanan sertifikasi UMKM yang manualistik	"Smart-In Pirt" (Sistematis, Modern, Akuntabel, Responsif, Terpadu Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga)	Pelayanan publik	Pelayanan sertifikasi produk UMKM berbasis aplikasi android	UMKM	DINKES	APBFD	Aplikasi	Jumlah UMKM yang memiliki serttifikasi berstandar	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
85	Pelayanan Kependudukan masih manual dan tradisionalistik	Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan (Sipandu)	Pelayanan publik	Pelayanan kependudukan berbasis TI	Masyarakat	DINDUKCAPIK	APBD	Aplikasi	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Asli		2019-2023
86	Pelayanan obat masih bersifat manual	Inovasi Aplikasi Si Obat (Si Iso)	Kesehatan	Inovasi pelayanan obat berbasis TI	DINKES, Puskesmas	RSUD	APBD	Aplikasi	Kepuasan pelayanan obat	Asli		2019-2023
87	Belum optimalnya sarana Samapta Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Sarana Samapta Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Di Kabupaten Bangka	Pelayanan publik	Inovasi yang difokuskan untuk meninkatkan kinerja pelayanan kesamaptaan SATPOL PP dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Dinas LH	SATPOL PP	APBD	Ketersediaan sarana	Persentase enurunan kasus tindakan pengrusakan lingkungan hidup	Asli		2019-2023
88	Kurang akses permodalan bagi petani sawit	Intan Anggun	Pelayanan publik	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar perkebunan	DINPARPERTAN	DINPANPERTAN	APBD	Ketersediaa Akses permodalan yang lebih baik	Peningkatanpendapatan masyarakat	Asli		2016-2023
89	Berkurangnya hasil tangkapan ikan nelayan	Reklamasi Laut	Pelayanan public	Pengelolaan kualitas air laut, pencegahan dan penanggulangan terhadap abrasi	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	APBD	Penebaran Terumbu Karang	Ekosistem keanekaragaman hayati	Asli		2019-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				atau pendangkalan pantai, serta perlindungan keanekaragaman hayati					berkembang dengan baik			
90	Masih banyaknya danau berkas galian tambagn yang belum dimanfaatkan	PAK KASTAMA UNTUK BU IRTA	Pelayanan Publik	Pemanfaatan kolong bekas tambang timah untuk budidaya ikan air tawar	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	APBD	Meningkatnya pelaku usaha di bidang budidaya perikanan	Pendapatan pembudidaya bertambah	Asli		2019-2023
91	Masih rendahnya pemanfaatan Sagu Rumbia menjadi makanan yang bernilai tinggi	Industri Pangan Berkelanjutan Berbasis Sagu Rumbia: Inovasi Berbasis Digital, Halal dan Integral	Pelayanan Publik	Pengelolan Sagu Rumbia Menjadi Makanan yang bernilai tinggi	DINPARPERTAN	DINPANPERTAN	APBD	Ketersedianny a makanan berbahan sagu rumbiah	Meningkatnya pendapatan petani rumbia	Asli		2019-2023
92	Banyaknya pelaku UMKM yang mengalami	Subsidi Usaha Perorangan / Mikro Melalui Kredit Usaha Rakyat Bunga Nol Persen	Pelayanan Publik	Membantu Pelaku Usaha Perorangan atau Usaha Mikro guna menggerakan kembali roda perekonomian masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan	DINPMP2KUKM	DINPMP2KUKM	APBD	Ketersediaa Akses permodalan yang lebih baik	Meningkatnya pendapatan pelaku UMKM di KabuPaten Bangka	Asli		2021-2023

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				ekonomi di Kabupaten Bangka								
93	Masih tinggginya kasus kesalahan penggunaan obat dari rumah sakit	ATOK KEPO (**A**yo **T**anya **O**bat & **K**onsultasi **Ke** A**po**teker)	Pelayanan Publik	Menyediakan layanan konsultasi obat yang mudah diakses oleh pasien guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin	RSUD Depati Bahrin	RSUD Depati Bahrin	APBD	Berkurangnya kasus kesalahan penggunaan obat karena adanya konsultasi langsung dengan apoteker	Mengurangi insiden efek samping yang tidak diinginkan dan interaksi obat yang berbahaya, sehingga meningkatkan keselamatan pasien	Asli		2023-sekarang
94	Masih banyak kasus di mana ibu hamil terlambat melakukan kunjungan awal kehamilan, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan bayi	BAKULAN (Bersama Atasi Keterlambatan Kunjungan Awal Kehamilan),	Pelayanan Publik	Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan awal kehamilan dan manfaatnya bagi kesehatan ibu dan bayi.	RSUD Sjafrie Rachman, Puskesmas, Pustu, Masyarakat	RSUD Sjafrie Rachman	APBD	Mengurangi jumlah kasus komplikasi kehamilan yang dapat dicegah	Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Dengan memberikan akses yang lebih mudah dan dini terhadap pemeriksaan kehamilan awal.	Asli		2023-sekarang

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
95	Masih tingginya kasus bayi stunting di Kelurahan Matras, Kelurahan Sinar Baru dan Kelurahan Sinar Jaya, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung	"Kasihan Keramunting (Edukasi Pencegahan Dan Kolaborasi Pemberian Bahan Makanan Stunting)	Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat mengenai Permasalahan Kondisi Balita Stunting, dan meber edukasi Pencegahan Stunting dan Pemberian bahan Makanan Tambahan Stunting	Puskesmas Sinar Baru, Kader posyandu, msyarakat	Puskesmas Sinar Baru	APBD	Meningkatkan Pemahaman mengenai Kondisi Balita Stunting agar dapat Terhindar dari kondisi Balita Stunting	Menurunya balita kondisi stunting dalam wilayah Kelurahan Matras, Kelurahan Sinar Baru dan Kelurahan Sinar Jaya, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung	Asli		2023-sekarang
96	Masih kurangnya pengelolaan administrasi di Pemerintahan Desa khususnya Kabupaten Bangka	GREBEK DESA (Gerakan Berbenah Kinerja Pemerintahan Desa)	Tata kelola pemerintahan	Peningkatan kedisiplinan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan dasar hukum yang ditetapkan	DINPEMDES, PerangkatDesa , Perangkat BPBD.	DINPEMDES	APBD	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik, Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa, Meningkatkan kualitas pelaporan dan kedisiplinan	Menurunya terjadinya kesalahan adiminitrasi di pemerimtah desa di kabupaten bangka	Asli		2023-sekarang
97	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan dan pengelolaan	RESAM (Rumah Eksekusi Sampah)	Inovasi pelayanan publik	Upaya Kelurahan Matras dalam rangka membudayakan lingkungan bersih	Kelurahan matras, masyarakat, kelompok	Kelurahan masyarakat	APBD	Meningkatnya kesadaran dan partisipatif aktif masyarakat	Lingkugan keluraan matras mejadi bersih dan meningkatnya	Asli		2023-sekarang

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
	sampah secara tepat, dan ini sangat berpengaruh dengan kondisi lingkungan yang ada di Kelurahan Matras			yang akan mendatangkan energi ketenangan dan kekuatan serta kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun rohani disetiap lingkungan Kelurahan Matras serta memproduksi hasil sampah yang berpotensi menjadi nilai jual	sadar lingkugan			dalam penanganan sampah di Kelurahan Matras	pendapatan kelompok Karang Taruna di linkugan mastras			
98	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan penmbayaran pajak	**SEDULANG (**Sistem Dukungan dan Pelayanan Pajak Kabupaten Bangka)	Pelayanan Publik	Mendorong wajib pajak melakukan urusan perpajakan secara online, memberikan pelayanan serta informasi pajak daerah yang lebih optimal kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bangka serta Meningkatkan penerimaan 11 pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	BPPKAD Bangka, Kelurahan, Desa, perusahaan dan masyarakat	BPPKAD Bangka	APBD	Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaral pajak daerah	Meningkatkan penerimaan 11 pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah			2023-sekarang

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
99	Masihnya lamanya proses pembuatan surat keterangan tidak mampu bagi masyarakat	SIP SKTM JAMSOS (Sistem Peningkatan Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu Jaminan Sosial)	Pelayanan Publik	Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat yang Kurang Surat Keterangan Tidak Mampu wargadalam pengurusan persyaratan administrasi mulai dari Desa/Kelurahan, kecamatan, dan bermuara di Dinas Sosial Kabupaten Bangka	DINSOS, DINDUKCAPIL, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	DINSOS	APBD	Meningkatnya pelayanan surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten Bangka secara cepat, tidak berbelit-belit	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah	Asli		2023-sekarang
100	Masih lamanya pengurusan akte kematian di karenakan Jarak yang cukup jauh membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi dalam penyampaian laporan Kematian ke Dinas Dukpencapil Kabupaten Bangka	SI POKEMON (Sistem Pelaporan Kematian Online)	Pelayanan Publik	Memberikan kemudahan bagi penduduk yang ada di Kabupaten Bangka guna menurunkan biaya operasional dan waktu dalam pelaporan kematian menjadi lebih efisien. Desa/Kelurahan yang dahulunya harus datang ke Dinas Dukpencapil Kabupaten Bangka	DINDUKCAPIl, Kecamatan, Kelurahandan Desa	DINDUKCAPIL	APBD	Meningkatnya pelayanan terhadap pengurusan akte kematian	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah	Asli		2023-sekarang

NO	PERMASALAHAN	INOVASI	BIDANG INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PELAKSANA	SUMBER PEMBIAYAAN	OUTPUT	OUTCOME	KEASLIAN	REPLIKASI	PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN
				yang terletak di kota Sungailiat untuk menyampaikan laporan kematian dan menyerahkan berkas kelengkapan pembuatan akta kematian								
101	Masih lamanya waktu penanganan laporan masyarakat terkait permasalahan keamanan ketertiban dan konflik dimasyarakat bisa ditindaklanjuti dengan cepat, tanggap dan tepat	SI GESIT (Sistem Informasi Gerakan Seksama Intervensi Tertib),	Pelayanan Publik	System aplikasi pelayanan penyelesaian kasus dan tindaklanjut kejadian dengan adanya SI GESIT dapat memberikan solusi bagi kelurahan sungailiat dan masyarakat dalam penanganan laporan tindak kejahatan ataupun pengaduan lainnya.	Kelurahan sungailiat, babinkamtibmas, ormas,	Kelurahan sungailiat	APBD	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga, mengatasi tindak kejahatan dan konflik di masyarakat	Rendahnya tingkat kriminila di kelurahan sungailiat			2023-sekarang

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2025

Dengan berbagai inovasi tersebut, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka dapat lebih dipercepat dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien sehingga menghasilkan dampak yang lebih tepat dan bermanfaat. Selain hal itu, pemerintah daerah Kabupaten Bangka juga memberikan kesempatan sangat terbuka bagi perangkat daerah maupun ASN untuk melakukan inovasi di lingkup tugas masing-masing melalu regulasi Peraturan Bupati Bangka.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah daerah dalam penyelarasan dengan prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Pusat dan tujuan global SDG's dapat dilihat pada tebel berikut.

Tabel 4.38
Keterkaitan dan Supporting antara Inovasi Daerah Kabupaten Bangka dengan Prioritas Kabupaten Bangka, Prioritas Provinsi dan RKP 2026

NO	NAMA INOVASI	PRIORITAS KABUPATEN BANGKA	PRIORITAS PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS NASIONAL	TUJUAN SDGs
1	PORTCATWIN	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	PN 1. Memperkokok ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
2	LA REPUBLIKA (Laboratorim Inovasi Kabupaten Bangka)				
3	PINTU KITE				
4	OJEG LANSIA				
5	SI MAPAN (Sistem Perencanaan dan Penganggaran)				
6	NYAMAN STOP BABS (BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN) DIBALIK KOCOKAN ARISAN "IBU"	• Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial • Pembangunan SDM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	PN. 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

NO	NAMA INOVASI	PRIORITAS KABUPATEN BANGKA	PRIORITAS PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS NASIONAL	TUJUAN SDGs
7	SI RESTI CIKAR			Ketaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milineal dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
8	LADA PUTIH" RSUD DEPATI BAHRIN TURUNKAN AKI/AKB				Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
9	SMS BUNDA CERDAS				Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
10	RANSEL SI DORA				
11	PSC SPGDT				
12	SIMPANAN CANTIK				
13	BU RATU HIRI				
14	Majelis Sabtu				
15	BUNAKTUSLAH				
16	SI TUMBUH CERDAS (Aksi Kolaborasi Penurunan Stunting Agar Bayi Tumbuh Cerdas dan Sehat)				
17	SIM DATA AMPL BANGKA	Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan	PN. 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang

NO	NAMA INOVASI	PRIORITAS KABUPATEN BANGKA	PRIORITAS PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS NASIONAL	TUJUAN SDGs
		(ekonomi hijau dan biru)		yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	berkelanjutan untuk semua.
					Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
				PN. 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru)	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
					Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
18	Kebun Singkong Rakyat	Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan	PN. 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai di Dalam Negeri	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
19	Perkebunan Sawit Rakyat		Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan

NO	NAMA INOVASI	PRIORITAS KABUPATEN BANGKA	PRIORITAS PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS NASIONAL	TUJUAN SDGs
					yang layak untuk semua.
20	KEMBANG DESA (Kesejahteraan Masyarakat Bangka Dengan Sistem dan Aplikasi	Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun
21	GERBANG LESTARI (Gerakan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup)	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan	PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
					Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
					Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
					Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan

NO	NAMA INOVASI	PRIORITAS KABUPATEN BANGKA	PRIORITAS PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PRIORITAS NASIONAL	TUJUAN SDGs
					keanekaragaman hayati

Sumber : diolah dari Dokumen Laboratorium Inovasi Kabupaten Bangka (2025)

Tabel di atas menjelaskan bahwa inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah tahun 2026 memperhatikan 1) Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka, 2) Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 3) Prioritas Nasional RKP, dan 4) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs).

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan

Penentuan Rencana program dan kegiatan pada RKPD tahun 2026 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan memperhatikan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 20206. Untuk menyajian Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah, mempedomani Keputusan Menteri 900.1.12.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program prioritas dikelompokkan atas program penunjang urusanPemerintah Daerah, **program urusan pemerintahan wajib** baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, **program prioritas pada urusan pemerintahan pilihan** serta **program prioritas pada unsur penunjang urusan pemerintahan**, **unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.**

Program-program prioritas urusan wajib adalah program-program prioritas yang dilaksanakan pada Urusan Pemerintahan Wajib, dimana sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar** dan **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari Urusan : tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Selanjutnya **Urusan Pemerintahan Pilihan** sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari Urusan : kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi; Ayat (2) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; Ayat (3) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; serta Ayat (4) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas maka RKPD Tahun 2025 ini hanya akan mengatur perencanaan Program dan Kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/ atau yang urusannya dilaksanakan oleh Kabupaten. Selanjutnya masing-masing rencana program dan kegiatan prioritas menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk setiap urusan pemerintahan dijabarkan dalam program sebagai berikut :

1. Program Prioritas pada setiap Perangkat Daerah (PD)

Yang dimaksud dengan program prioritas pada setiap PD adalah program penunjang yang terdapat pada semua PD yang ada di Kabupaten Bangka, yaitu:

1.a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Prioritas pada Urusan Wajib

2.a. Program-program Prioritas pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:

2.a.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan wajib Pemerintahan Bidang Pendidikan ini diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga** mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

a) Program Pengelolaan Pendidikan
b) Program Pengembangan Kurikulum
c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
d) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

2.a.2, Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan wajib kesehatan ini diselenggarakan oleh **PD Dinas Kesehatan** mencakup pelaksanaan 4 (empat) program sebagai berikut:

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

2.a.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh **PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** mencakup 8 (delapan) program sebagai berikut :

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
e) Program Penataan Bangunan Gedung
f) Program Penyelenggaraan Jalan
g) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
h) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

2.a.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib Perumahan Dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh **PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

a) Program Pengembangan Perumahan
b) Program Kawasan Permukiman
c) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

2.a.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu :

1) **PD Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)** terdiri dari 2 (Dua) Program :
   a) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   b) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2) **PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** terdiri dari 1 (Satu) Program :
   a) Program Penanggulangan Bencana

2.a.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan wajib Pemerintahan Bidang Sosial diselenggarakan oleh **PD Dinas Sosial** mencakup 5 (lima) program sebagai berikut:

a) Program Pemberdayaan Sosial
b) Program Rehabilitasi Sosial

c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
d) Program Penanganan Bencana
e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2.b. Program-program Prioritas pada Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:

2.b.1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh **PD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut:

a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
b) Program Penempatan Tenaga Kerja
c) Program Hubungan Industrial

2.b.2 Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh **PD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** mencakup 5 (lima) program sebagai berikut:

a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
b) Program Perlindungan Perempuan
c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
d) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
e) Program Perlindungan Khusus Anak

2.b.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan diselenggarakan oleh **PD Dinas Pangan dan Pertanian,** mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
b) Program Pengawasan Keamanan Pangan

2.b.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan diselenggarakan oleh **PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** mencakup 4 (empat) program sebagai berikut:

a) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
b) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
c) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
d) Program Penatagunaan Tanah

2.b.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh **PD Dinas Lingkungan Hidup** mencakup 10 (sepuluh) program sebagai berikut :

a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
b) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
e) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
f) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
g) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
h) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
i) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
j) Program Pengelolaan Persampahan

2.b.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan oleh **PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** mencakup 3 (tiga) program yaitu:

a) Program Pendaftaran Penduduk
b) Program Pencatatan Sipil
c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.b.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh **PD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, yaitu :

a) Program Penataan Desa
b) Program Administrasi Pemerintahan Desa
c) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.b.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diselenggarakan oleh **PD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** mencakup 3 (tiga) program yaitu :

a) Program Pengendalian Penduduk
b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

2.b.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan diselenggarakan oleh **PD Dinas Perhubungan** mencakup 1 (satu) program yaitu:

a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.b.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh **PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** mencakup 2 (dua) program yaitu :

a) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
b) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

2.b.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh **PD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** mencakup 5 (lima) program yaitu :

a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
b) Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
c) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
e) Program Pengembangan UMKM

2.b.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh **PD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** mencakup 4 (empat) program yaitu :

a) Program Promosi Penanaman Modal
b) Program Pelayanan Penanaman Modal
c) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
d) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2.b.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh **PD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga** mencakup 2 (dua) program yaitu :

a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

2.b.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik diselenggarakan oleh **PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** mencakup 1 (satu) program yaitu :

a) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

2.b. 15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian diselenggarakan oleh **PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** mencakup 1 (satu) program yaitu :

a) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

2.b.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan diselenggarakan oleh **PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan** mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :

a) Program Pengembangan Kebudayaan
b) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

2.b.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang **Perpustakaan** diselenggarakan oleh **PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** mencakup 1 (satu) program yaitu:

a) Program Pembinaan Perpustakaan

2.b.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang **Kearsipan** diselenggarakan oleh **PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** mencakup 1(satu) program yaitu :

a) Program Pengelolaan Arsip

3. Program Prioritas pada Urusan Pemerintahan Pilihan

Program prioritas untuk Urusan Pemerintahan Pilihan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka mencakup 5 (lima) urusan sebagai berikut:

3.a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Mempedomani Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Karenanya Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka hanya menyelenggarakan bidang perikanan yang diselenggarakan oleh **PD Dinas Perikanan** dengan program prioritas mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3.b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pariwisata diselenggarakan oleh **PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
b) Program Pemasaran Pariwisata
c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh **PD Dinas Pangan dan Pertanian** dengan program prioritas mencakup 5 (lima) program sebagai berikut :

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

e) Program Penyuluhan Pertanian

3.d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perdagangan diselenggarakan oleh **PD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
c) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

3.e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Industri diselenggarakan oleh **PD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan** mencakup 1 (satu) program sebagai berikut :

a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

4. Program–program Prioritas pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

4.a. Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

Unsur Pendukung Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh PD Sekretariat Daerah melalui pelaksanaan 2 (dua) Program, yaitu :

a) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
b) Program Perekonomian dan Pembangunan

4.b. Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Unsur Pendukung Sekretariat DPRD diselenggarakan oleh PD Sekretariat DPRD melalui pelaksanaan1 (satu) Program, yaitu :

a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

5. Program–program Prioritas pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Program–program Prioritas pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri atas :

5.a. Perencanaan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan diselenggarakan oleh **PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan 2 (Dua) Program, yaitu :**

a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

5.b. Keuangan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang **Keuangan** diselenggarakan oleh **PD Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, yaitu :**

a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

5.c. Kepegawaian

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang **Kepegawaian** diselenggarakan oleh **PD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu :**

a) Program Kepegawaian Daerah

5.d. Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang **Pendidikan dan Pelatihan** diselenggarakan oleh **PD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu :**

a) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5.e. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang **Penelitian dan Pengembangan** diselenggarakan oleh PD **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu:**

a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

5 Program–program Prioritas pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh PD Inspektorat mencakup pelaksanaan 2 (dua) Program, yaitu :

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

7. Program–program Prioritas pada Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh PD Kecamatan mencakup pelaksanaan 4 (empat) Program, yaitu :

a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
d) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

8. Program–program Prioritas pada Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup pelaksanaan 5 (lima) Program, yaitu :

a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

5.2 Pendanaan Daerah

Pendanaan dareah terdiri dari 2 (Dua) jenis pendanaan dengan uraian, sebagai berikut :

1. Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2026

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang

memanfaatkan pendanaan lainnya bersumber dari CSR, dana umat, hibah, dan sebagainya.

Total pagu pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 sebesar Rp. 1.199.825.540.800,00 yang akan digunakan untuk pelaksanaan 5 (lima) Prioritas Daerah. Gambaran mengenai dukungan pendanaan daerah terhadap masing-masing prioritas pembangunan Kabupaten Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1.
Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan
Kabupaten Bangka Tahun 2026

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	754.051.076.545,00	Seluruh Perangkat Daerah
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI		
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	776.408.000,00	BAPPEDA
			Indeks Pemenuhan Data Pembangunan Daerah		

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti		
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	152.750.000,00	BAPPEDA
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah	221.620.000,00	BAPPEDA
			Indeks Inovasi Daerah		
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	574.585.000,00	INSPEKTORAT
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4.137.510.649,00	Sekretariat Daerah
			Persentase rumusan kebijakan di bidang kesra dan kemasyarakatan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Persentase produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
			persentase permasalahan hukum dan HAM yang terselesaikan		
			Persentase rumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	418.922.354,00	Sekretariat Daerah
			Persentase rumusan kebijakan dibidang pembangunan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
			Persentase Paket PBJ yang transparan, akuntabel dan tepat waktu		
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase Produk Hukum Daerah yang diselesaikan Tepat Waktu	23.035.545.008,00	Sekretariat Dewan
			Presentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat		
		Program Pengelolaan	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	983.540.000,00	DINKOMINFOTIK

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Informasi dan Komunikasi Publik			
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	2.176.045.000,00	DINKOMINFOTIK
			Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE		
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral yang terintegrasi	30.900.000,00	DINKOMINFOTIK
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	180.365.000,00	DINKOMINFOTIK
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Rencana kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan	933.185.000,00	BKPSDMD
			Persentase pengadaan ASN sesuai dengan Rencana Kebutuhan ASN		
			Persentase Penempatan SDM sesuai standar kompetensi		
			Persentase Data Kepegawaian yang Up to date, Akurat, Cepat, Tepat		
			Persentase Perangkat daerah dengan kinerja ASN sesuai ekspektasi		

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin		
			Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi kompetensi ASN	424.598.000,00	BKPSDMD
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Kapabilitas APIP	487.165.000,00	INSPEKTORAT
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD Tepat waktu	148.396.724.823,00	BPPKAD
			Persentase Layanan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah sesuai SOP		
			Penyusunan dan Penyampaian LKPD sesuai SAP Tepat Waktu		
			Persentase Layanan Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertangani		
			Persentase Layanan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertangani		
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan BMD	1.230.688.200,00	BPPKAD
			Persentase Penyusunan dan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu		

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	2.626.903.549,00	BPPKAD
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KIA	550.515.150,00	DINDUKPENCAPIL
			Persentase Penerbitan KK		
			Persentase Perekaman KTP EL		
		Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan penerbitan Akta Kematian	68.550.000,00	DINDUKPENCAPIL
			Persentase cakupan penerbitan Akta Perkawinan		
			Persentase cakupan penerbitan Akta Kelahiran		
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Instansi yang melakukan PKS pemanfaatan data	38.300.000,00	DINDUKPENCAPIL
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.020.000.000,00	BANKESBANGPOL
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	1.084.000.000,00	BANKESBANGPOL
			Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik		
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan	Persentase Ormas yang aktif	20.000.000,00	BANKESBANGPOL

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Organisasi Kemasyarakatan			
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	92.000.000,00	BANKESBANGPOL
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	98.000.000,00	BANKESBANGPOL
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	1.523.694.500,00	SATPOLPP
			Presentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan)	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	3.247.151.885,00	KECAMATAN
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	167.832.500,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Persentase Nilai Ketertiban Pelaksanaan Penyususstan Arsip		
			Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Statis		
			Persentase Nilai Aspek Prasarana dan Sarana Keasripan		

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Persentase Nilai Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan		
			Persentase Nilai Aspek Tenaga Kearsipan		
			Persentase Nilai Aspek Program Kearsipan		
			Persentase Nilai Aspek Kelembagaan		
JUMLAH PAGU PRIORITAS 1				**948.748.576.163,00**	
2	Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	943.150.000,00	DINSOS
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	1.071.847.500,00	DINSOS
		Program Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	3.161.277.377,00	DINSOS
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	70.000.000,00	DINSOS
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	70.000.000,00	DINAKERPERINDAG
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	30.000.000,00	DINAKERPERINDAG
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	124.600.000,00	DINAKERPERINDAG
		Program Administrasi	Persentase Desa yang Memiliki	1.599.180.379,00	DINPEMDES

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Pemerintahan Desa	Administrasi yang Baik		
			Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	460.107.300,00	DINPEMDES
		Program Penataan Desa	Desa yang Tertata Wilayahnya	26.500.000,00	DINPEMDES
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (8 Kec)	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	5.301.590.645,00	KECAMATAN
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan)	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga Trantibum	45.510.000,00	KECAMATAN
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	131.490.000,00	KECAMATAN
JUMLAH PAGU PRIORITAS 2				**13.035.253.201,00**	
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	89.028.207.987,00	DINDIKPORA
			APM AMP		
			Kualitas Pembelajaran Jenjang SD		
			Kualitas Pembelajaran Jenjang SMP		
			APM 5-6		

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan		
			Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG		
		Program Pengembangan Kurikulum	Kualitas pengelolaan kurikulum sekolah	70.336.850,00	DINDIKPORA
			Muatan Pengembangan Kurikulum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku		
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi GTK bersertifikat jenjang SD	108.465.850,00	DINDIKPORA
			Proporsi GTK bersertifikat jenjang SMP		
			Indeks Distribusi Guru		
			Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar pada Pendidikan Non Formal		
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Tingkat kepatuhan terhadap penyelenggara perizinan	27.336.298,00	DINDIKPORA
			Tingkat kepatuhan terhadap penyelenggara perizinan		
		Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kepuasan Pemustaka	273.774.985,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Persentase Masyarakat yang Gemar Membaca		

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persetase Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang Aktif	622.121.585,00	DINDIKPORA
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahrga dan Organisasi Olahraga	4.120.253.453,00	DINDIKPORA
			Persentase sarana dan prasarana olehraga yang memenuhi standar		
			Persentase atlet yang berprestasi		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan	83.018.772.697,00	DINKES
			Indeks Keluarga Sehat		
			Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas SDMK sesuai standar	1.115.934.000,00	DINKES
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minuman	Persentase pengawasan toko obat, apotek, dan keamanan pangan yang beredar sesuai standar	254.690.000,00	DINKES
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Indeks rumah tangga yang berPHBS	390.208.000,00	DINKES
		Program Peningkatan Diversifikasi dan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	104.556.430,00	DINPANPERTAN

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan kelancaran distribusi pangan		
			Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi Umbian		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Masyarakat	32.089.695,00	DINPANPERTAN
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	1.703.720.000,00	DP2KBP3A
			Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe		
			Jumlah Kelompok BKL yang Melaksanakan 7 (tujuh) dimensi Lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia		
			presentase balai penyuluh KB yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga		
		Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	89.499.000,00	DP2KBP3A
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Yang Terselesaikan	52.000.000,00	DP2KBP3A
		Program Peningkatan	Persentase Partisipasi	32.749.285,00	DP2KBP3A

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Kualitas Keluarga	Perempuan Dalam Kelembagaan		
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga PHA yang berkualitas	75.000.000,00	DP2KBP3A
		Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase Kasus Kekerasan Anak Yg Terselesaikan	351.161.000,00	DP2KBP3A
		Program Pengendalian Penduduk	ketersediaan kebijakan pengendalilan pendudukan yang disediakan sesuai dengan ketentuan	392.939.530,00	DP2KBP3A
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan penggunaan alat kontrasepsi MKJP	1.572.436.450,00	DP2KBP3A
			Cakupan Peserta KB Aktif		
JUMLAH PAGU PRIORITAS 3				**183.436.253.095,00**	
4	Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitasi untuk Pengembangan Produk IKM	3.186.500.000,00	DINAKERPERINDAG
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana distibusi yang direvitalisasi	1.108.028.260,00	DINAKERPERINDAG
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	191.867.000,00	DINAKERPERINDAG
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang	75.000.000,00	DINAKERPERINDAG
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Benih Unggul Pertanian	312.393.230,00	DINPANPERTAN

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Benih ternak Unggul		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Sapras Pertanian	292.275.600,00	DINPANPERTAN
		Program Pengendalian Kesehatan Masyarakat dan Veteriner	Persentase Penyakit Ternak Yang Ditangulangi	209.697.524,00	
		Program Pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian	Persentase Serangan OPT yang dapat dikendalikan	113.275.000,00	DINPANPERTAN
		Program Penyuluh Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian	830.036.340,00	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan (%)	798.694.800,00	DINPERKAN
			Persentase Nelayan yang Dilayani		
			Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih (%)		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan (%)	504.903.200,00	DINPERKAN
			Persentase Pembudidaya yang Dilayani		

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih (%)		
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi	40.000.000,00	DINPERKAN
			Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidaya ikan yang Diawasi		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan (%)	164.585.200,00	DINPERKAN
			Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
			Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih (%)		
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	9.895.650,00	DINPMP2KUKM
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	6.129.375,00	DINPMP2KUKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang mempunyai Kompetensi	40.000.000,00	DINPMP2KUKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha	47.449.375,00	DINPMP2KUKM

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	517.687.460,00	DINPMP2KUKM
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Investasi	45.084.360,00	DINPMP2KUKM
		Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Pelayanan Perizinan	224.608.340,00	DINPMP2KUKM
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian investor yang melakukan penanaman modal	85.000.000,00	DINPMP2KUKM
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola	10.427.980,00	DINPMP2KUKM
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Indeks Destinasi Pariwisata	338.408.925,00	DINPARBUD
		Program Pemasaran Pariwisata	Indeks Pemasaran Pariwisata	671.016.287,00	DINPARBUD
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks Kemitraan Pariwisata	89.100.000,00	DINPARBUD
		Program Pengembangan Kebudayaan	Indeks Perlindungan Budaya	916.116.900,00	DINPARBUD
			indeks pengembangan budaya		
			indeks pemanfaatan budaya		

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Indeks Perlindungan Budaya	370.633.100,00	DINPARBUD
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	% Jaringan Irigasi dalam kondisi yg baik	3.966.355.090,00	DPUPR
			% Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	% Rumah tangga yang menggunakan air minum	2.643.645.993,00	DPUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL	1.122.483.140,00	DPUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	% Drainase Dalam Kondisi Baik	515.000.000,00	DPUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Ketaatan terhadap Penataan Bangunan Gedung	308.375.000,00	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	19.024.287.518,00	DISHUB
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase SDM jasa kontruksi yang terlatih	50.000.000,00	DPUPR
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana yang Direkonstruksi	458.435.391,00	DINPERKPP
		Program Kawasan Pemukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani	1.164.838.309,00	DINPERKPP
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani	1.725.316.650,00	DINPERKPP

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Program Peningkatan Prasanan Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah yang Memiliki Akses Sarana dan Prasarana Perumahan yang Layak	242.424.500,00	DINPERKPP
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Membuka Tanah	40.000.000,00	DINPERKPP
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penurunan Konflik Pertanahan	50.000.000,00	DINPERKPP
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah yang Terselesaikan	80.000.000,00	DINPERKPP
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Lahan Pemda yang tersedia untuk kegiatan pembangunan	140.437.160,00	DINPERKPP
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pesentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum	6.221.355.328,00	DINHUB
			Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan		
JUMLAH PAGU PRIORITAS 4				**48.951.767.985,00**	
5	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan	237.219.900,00	DLH
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	277.253.890,00	DLH

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati yang dikelola	536.423.445,00	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Penghasil Limbah B3 yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan baik	27.936.000,00	DLH
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengawasan ketaatan pelaku usaha/kegiatan secara administrasi meupun tekni	67.993.875,00	DLH
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Perda tentang pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diselesaikan	67.924.300,00	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	75.716.000,00	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten	34.995.000,00	DLH

No	Prioritas Daerah	Program	Indikator Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pelayanan dan Fasilitasi pengaduan lingkungan Hidup	20.000.000,00	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	2.610.964.390,00	DLH
			Persentase Penanganan Sampah		
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang	310.438.505,00	DPUPR
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan darurat bencana yang dilaksanakan	189.233.051,00	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran	849.702.000,00	SATPOLPP
			Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi		
			Presentase Investigasi Kejadian Kebakaran		
		Program Penanganan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana	347.890.000,00	DINSOS
JUMLAH PAGU PRIORITAS 5				**5.653.917.541,00**	
JUMLAH PAGU				**1.199.825.540.800,00**	

5.2 Pendanaan Perangkat Daerah (PD) Dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026

Pendanaan rencana program prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 untuk tahun 2026. Seluruh rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2026 disediakan pendanaan dalam bentuk pagu indikatif yaitu batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penentuan pagu indikatif tidak lagi menggunakan pendekatan "*money follow function*", tetapi menggunakan pendekatan "*money follow priority programme*". Besaran pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 disajikan dalam Tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2.
Besaran Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DINDIKPORA)	391.183.754.930,00
2	Dinas Kesehatan (DINKES)	268.207.315.029,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPPR)	38.265.267.661,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DINPERKPP)	8.585.365.387,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP)	14.634.225.803,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	3.448.116.730,00
7	Dinas Sosial (DINSOS)	10.256.363.202,00
8	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan (DISNAKERPERINDAG)	13.762.404.989,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	10.190.444.867,00
10	Dinas Pangan dan Pertanian (DINPARPERTAN)	17.256.858.489,00
11	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	14.486.273.938,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL	5.997.525.094,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPEMDES)	7.860.170.247,00
14	Dinas Perhubungan (DISHUB)	11.645.656.664,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFOTIK)	8.729.143.855,00
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (DINPMP2KUKM)	6.727.745.322,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DINPARBUD)	7.934.960.326,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP)	4.903.643.122,00
19	Dinas Perikanan (DINPERKAN)	7.346.498.503,00
20	Sekretariat Daerah (SETDA)	41.635.888.989,00
21	Sekretariat Dewan (SETWAN)	54.450.065.089,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	6.943.644.080,00
23	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)	172.794.474.429,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	8.317.689.537,00
25	Inspektorat Daerah	15.362.280.657,00
26	Badan Kesatuan Bangka dan Politik (BADAN KESBANGPOL)	5.285.846.517,00
27	Kecamatan Sungailiat	19.298.960.732,00
28	Kecamatan Riau Silip	2.479.505.072,00
29	Kecamatan Puding Besar	2.651.076.779,00
30	Kecamatan Mendo Barat	2.937.576.052,00
31	Kecamatan Belinyu	8.788.722.279,00
32	Kecamatan Pemali	2.425.444.125,00
33	Kecamatan Bakam	2.389.430.042,00
34	Kecamatan Merawang	2.643.202.263,00
	TOTAL	**1.199.825.540.800,00**

Selanjutnya uraian program dan kegiatan yang dipandang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat yang disusun berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah disajikan sebaga berikut :

Tabel 5.3
Rumusan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			391.183.754.930,00							399.411.603.611,50	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN			386.441.379.892,00							388.466.689.293,80	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			386.441.379.892,00							388.466.689.293,80	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan perangkat daerah Nilai kinerja pelaporan perangkat daerah Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	26,52 10,18 0,00 71 4 100 %	297.207.032.907,00						-	233.028.368.493,80	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 % 100 %	85.759.660,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Satuan Pendidikan	-	791.945.000,00	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	70.899.660,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Satuan Pendidikan		625.570.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	14.860.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Satuan Pendidikan		166.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	295.165.119.507,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora Kabupaten Bangka	-	224.695.917.165,50	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3024 Orang/bulan	295.158.009.507,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora Kabupaten Bangka		224.529.542.165,50	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34 Laporan	7.110.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora Kabupaten Bangka		166.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 % 100 % 15,385 %	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora	-	12.844.150,00	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora		12.844.150,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di Perangkat Daerah	100 %	320.066.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora Kabupaten Bangka	-	532.400.000,00	
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.376.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora Kabupaten Bangka		133.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	245.690.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora Kabupaten Bangka		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	100 %	71.249.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora Kabupaten Bangka	-	166.375.000,00	
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	50.850.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora Kabupaten Bangka		99.825.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	20.399.400,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora Kabupaten Bangka		66.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	1.090.591.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora	-	5.983.702.178,30	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	276.705.450,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora		4.333.262.178,30	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	435.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora		625.570.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	378.885.890,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora		1.024.870.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	464.497.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora Kabupaten Bangka	-	845.185.000,00	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	224.607.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora Kabupaten Bangka		532.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	58.390.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora Kabupaten Bangka		113.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	181.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dindikpora Kabupaten Bangka		199.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD APM SMP Kualitas Pembelajaran Jenjang SD Kualitas Pembelajaran Jenjang SMP APM 5-6 Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG	96,00% 73,50% 2,49 2,51 57,10% 45% 25,61%	89.028.207.987,00						-	154.751.095.800,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana SD Proporsi Pemanfaatan Sumber Daya Sekolah untuk Peningkatan Mutu Jenjang SD	72 % 51,12 %	51.003.059.196,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan	-	97.008.903.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	562.340.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		2.640.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	160.690.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		522.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	600.840.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		501.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	122.190.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	67.100.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		302.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	161.735.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		786.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	19 Paket	1.199.084.290,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.980.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Peserta Didik	178.523.750,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200 Orang	5.225.722.055,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		32.744.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	6 Orang	76.552.640,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		998.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	183 Satuan Pendidikan	242.051.410,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		199.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	183 Satuan Pendidikan	34.379.694.891,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		40.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	366 Orang	123.350.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar											
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	287.235.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		2.871.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar											
							Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	102.190.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.760.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	183 Dokumen	43.960.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		133.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	375.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		927.973.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	1.230.460.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		2.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	424.235.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.752.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik											
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	183 Satuan Pendidikan	156.139.910,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	49 Ruang	4.278.470.250,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.727.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	600.840.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		876.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	404.655.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.597.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana SMP Proporsi Pemanfaatan Sumber Daya Sekolah untuk Peningkatan Mutu Jenjang SMP	85 % 50,00 %	25.112.522.393,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan	-	45.610.527.600,00	
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	151.950.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	177.190.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium											
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	285.735.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.430.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	152.235.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	1.085.297.925,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	120.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	102.190.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium											
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	150.690.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.303.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	100.690.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.457.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	324.531.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	360.735.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		422.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Peserta Didik	246.544.742,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		532.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	61 Orang	2.016.147.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang	69.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		865.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	50 Satuan Pendidikan	103.247.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		199.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	50 Satuan Pendidikan	18.527.015.201,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		19.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	56.800.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		133.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan	91.419.525,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		465.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	285.840.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.925.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	300 Paket	325.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		545.177.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	152.190.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		2.161.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	201.975.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Persentase Pendidik yang Berkualifikasi Minimal S1 / D4	41,41 % 83 %	11.650.998.733,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan	-	10.234.990.000,00	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	138.590.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		798.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD											
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	154.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		186.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2241 Orang	5.539.598.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	104 Orang	70.672.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		532.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	175 Satuan Pendidikan	143.559.435,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		665.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD											
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	175 Satuan Pendidikan	4.043.786.166,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA, DAK NON FISIK-BOP PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		5.590.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD											
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	175 Orang	35.400.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		199.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	180 Dokumen	39.865.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		66.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	825.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		665.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	300 Paket	135.840.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		798.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD											
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	9 Paket	449.688.132,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		332.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD											
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik yang Berkualifikasi S1/DIV Persentase Tenaga Kependidikan (Kepsek) yang Berkualifikasi S1/DIV Persentase NonFormal terakreditasi minimal C	74 % 97 % 82 %	1.261.627.665,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan	-	1.896.675.000,00	
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	46.259.440,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		199.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	1.039.560.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.064.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Orang	29.921.250,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		99.825.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	500 Peserta Didik	45.886.975,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan											
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	17 Paket	100.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		133.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kualitas pengelolaan kurikulum sekolah Muatan Pengembangan Kurikulum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	49,73 100 %	70.336.850,00						-	199.650.000,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	% dokumen kurikulum yang tersusun	100,00 %	34.946.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan	-	133.100.000,00	
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar											
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	34.946.850,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		133.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Satuan PAUD yang menyusun kurikulum mulok	70 %	35.390.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan	-	66.550.000,00	
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal											
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	35.390.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		66.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Proporsi GTK bersertifikat jenjang SD Proporsi GTK bersertifikat jenjang SMP Indeks Distribusi Guru Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar pada Pendidikan Non Formal	45% 32,39 % 0,87 % 98%	108.465.850,00						-	399.300.000,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemenuhan kebutuhan Guru SD Pemenuhan Kebutuhan Guru Pemenuhan kebutuhan Guru SMP	65,00 % 47,5 % 71,00 %	108.465.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASN Lingkup Dindikpora	-	399.300.000,00	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	51.465.850,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASN Lingkup Dindikpora		199.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	57.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASN Lingkup Dindikpora		199.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tingkat kepatuhan terhadap penyelenggara perizinan	100 %	27.336.298,00						-	88.275.000,00	
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	100 %	27.336.298,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan	-	88.275.000,00	
	1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	27.336.298,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		88.275.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.742.375.038,00							10.944.914.317,70	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			4.742.375.038,00							10.944.914.317,70	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang Aktif	41,05%	622.121.585,00						-	1.331.000.000,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Pemuda Pelopor Persentase Pemuda yang Berwirausaha Persentase Pemuda kader	20,00 % 77,03 % 20,52 %	259.121.585,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pemuda di Kabupaten Bangka	-	931.700.000,00	
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota											
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	150 Orang	52.784.630,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pemuda di Kabupaten Bangka		133.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota											
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	113.726.340,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pemuda di Kabupaten Bangka		266.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota											
							Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100 Orang	30.365.840,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pemuda di Kabupaten Bangka		266.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100 Orang	62.244.775,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pemuda di Kabupaten Bangka		266.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi	100 %	363.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pemuda di Kabupaten Bangka	-	399.300.000,00	
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota											
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	363.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pemuda di Kabupaten Bangka		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
7	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Persentase Atlet yang Berprestasi Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	92,50 % 100 % 100%	4.120.253.453,00						-	9.613.914.317,70	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Cabor Pendidikan yang dibina Persentase Sarana Prasarana Olahraga Pendidikan yang Berstandar	70 % 100 %	128.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Atlet, Pelatih, Official Cabang Olahraga di Kabupaten Bangka	-	133.100.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	128.250.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Atlet, Pelatih, Official Cabang Olahraga di Kabupaten Bangka		133.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan	20,67 %	1.054.149.058,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Atlet, Pelatih, Official Cabang Olahraga di Kabupaten Bangka	-	1.597.200.000,00	
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	72.119.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Atlet, Pelatih, Official Cabang Olahraga di Kabupaten Bangka		798.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga											
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	200 Orang	982.030.058,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Atlet, Pelatih, Official Cabang Olahraga di Kabupaten Bangka		798.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Cabor Prestasi yang dibina	100 %	121.150.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Atlet, Pelatih, Official Cabang Olahraga di Kabupaten Bangka	-	532.400.000,00	
	2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)											
							Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	67.340.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Atlet, Pelatih, Official Cabang Olahraga di Kabupaten Bangka		332.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota											
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	200 Orang	53.810.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Atlet, Pelatih, Official Cabang Olahraga di Kabupaten Bangka		199.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina	100 %	500.840.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Atlet, Pelatih, Official Cabang Olahraga di Kabupaten Bangka	-	2.384.714.317,70	
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.840.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Atlet, Pelatih, Official Cabang Olahraga di Kabupaten Bangka		2.384.714.317,70	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan Cabor Rekreasi yang dibina	100 %	2.315.864.395,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Atlet, Pelatih, Official Cabang Olahraga di Kabupaten Bangka	-	4.966.500.000,00	
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan											
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	2.315.864.395,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Atlet, Pelatih, Official Cabang Olahraga di Kabupaten Bangka		4.966.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
							J U M L A H	**391.183.754.930,00**								**399.411.603.611,50**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Kesehatan			**268.207.315.029,00**							125.282.881.247,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**268.207.315.029,00**							125.282.881.247,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**138.994.741.571,00**							125.282.881.247,00	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	**98.383.279.732,00**					-	105.798.308.689,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100 % 100 %	25.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707	-	487.204.242,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707		487.204.242,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangakat Daerah yang Sesuai Standar	100 Persen	96.404.020.170,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707	-	96.390.000.000,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	908 Orang/bulan	96.404.020.170,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707		96.390.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Persen 100 Persen 50 Persen	9.750.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707	-	12.387.375,00	
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707		12.387.375,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Di perangkat Daerah	100 Persen	225.863.409,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707	-	70.131.600,00	
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	225.863.409,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707		70.131.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	7 Persen	391.208.590,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707	-	705127500	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	23.120.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707		54.631.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	68.088.590,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707		650.496.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Di perangakat Daerah	100 Persen	762.589.145,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707	-	1.044.217.597,00	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	415.720.726,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707		698.775,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	330.057.799,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707		400.645.822,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.810.620,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707		642.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	5 Persen	564.848.418,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707	-	7.089.240.375,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	220.335.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707		485.331.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit	114.990.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707		63.525.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	229.523.418,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah Laki-laki 201 dan Perempuan 707		6.540.384.375,00	DINAS KESEHATAN
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**38.924.505.839,00**						-	18.449.889.213,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik	84 Persen 100 Persen 68 Persen 50 Persen 85 Persen	8.858.583.942,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	12.080.147.890,00	
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	1.163.323.200,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		4.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi											
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	58.030.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		525.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	69 Unit	173.947.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	7.404.350.042,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.353.877.390,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	15 Paket	58.933.700,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.270.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	30.023.981.897,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	5.331.679.823,00	
							Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	100 Persen									
							Status Gizi Kurang pada Balita	7,8 Persen									
							Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	9,88 Persen									
							Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular	40,50Persen									
							Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	90 Persen									
							Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure	100 Persen									
							Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS	100 Persen									
							Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan	100 Persen									
							Persentase Faskes yang Terakreditasi	69,23 Persen									
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5062 Orang	315.880.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		102.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4832 Orang	24.359.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		78.855.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2315 Orang	87.166.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		58.222.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25489 Orang	55.635.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		451.920.525,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57263 Orang	29.170.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		73.468.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	219239 Orang	35.188.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		43.349.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33910 Orang	262.250.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		126.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20444 Orang	23.480.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		11.442.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7219 Orang	23.480.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		13.931.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	654 Orang	25.270.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		32.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5306 Orang	28.680.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		188.263.687,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7186 Orang	177.330.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		73.152.131,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		118.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	56.297.250,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	10.307.725,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		25.785.616,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	258.108.750,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		66.235.260,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	20.480.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		68.822.985,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	65.560.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		100.546.950,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2936 Orang	3.600.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		27.347.880,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA											
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2936 Orang	15.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		56.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	409.309.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		101.694.739,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	27.614.247.172,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.940.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional											
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	170 Paket	7.920.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		58.968.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		249.847.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	105.824.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	984 Orang	15.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		35.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47 Orang	15.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		38.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	15.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.810.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	148.440.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		51.030.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Faskes yang menjalankan system informasi manajemen Faskes Persentase Rumah Sakit yang Menjalankan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)	100 perses 100 Persen	24.980.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	948.097.500,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	37 Dokumen	24.980.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		948.097.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	88,70 Persen	16.960.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	89.964.000,00	
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	19 Unit	16.960.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		89.964.000,00	DINAS KESEHATAN
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDMK Sesuai Standar	0,75%	**1.115.934.000,00**						-	438.584.790	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes dengan Jenis Tenaga Sesuai Standar	100 Persen	113.602.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	163.915.395,00	
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	113.602.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		163.915.395,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi	4,8 Persen	1.002.332.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	274.669.395,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	42 Orang	1.002.332.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		274.669.395,00	DINAS KESEHATAN
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengawasan Toko Obat, Apotek, dan Keamanan Pangan yang Beredar Sesuai Standar	91%	**254.690.000,00**						-	347.826.055,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri yang Memiliki Sertifikat PIRT	49 Persen	95.962.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	144.989.460,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	95.962.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		144.989.460,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan Pengawasan Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)	80 Persen	158.728.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	202.836.595,00	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak											
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	158.728.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		202.836.595,00	DINAS KESEHATAN
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	**316.332.000,00**						-	248.272.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100 Persen	217.451.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	196.927.500,00	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	217.451.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		196.927.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	98 Persen	98.881.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	51.345.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	98.881.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		51.345.000,00	DINAS KESEHATAN
						RSUD Depati Bahrin			68.722.798.051,00							70.988.219.167,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			68.722.798.051,00							70.988.219.167,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			68.722.798.051,00							70.988.219.167,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	**64.317.034.031,00**						-	48.619.738.312,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	64.317.034.031,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	48.619.738.312,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	64.317.034.031,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		48.619.738.312,00	RSUD DEPATI BAHRIN
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**4.405.764.020,00**						-	22.368.480.855,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik	50 Persen 100 Persen 68 Persen 84 Persen 100 Persen 67 Persen 67,67 Persen 85 Persen	2.199.996.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	6.701.100.000,00	
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		5.336.100.000,00	RSUD DEPATI BAHRIN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000.000,00	RSUD DEPATI BAHRIN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		210.000.000,00	RSUD DEPATI BAHRIN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	99.996.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		105.000.000,00	RSUD DEPATI BAHRIN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Status Gizi Kurang pada Balita Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Faskes yang Terakreditasi Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik	100 Persen 100 Persen 100 Persen 68 Persen 7,8 Persen 9,88 Persen 90,00 Persen 100 Persen 0,41 Persen 100 Persen 69,23 Persen 85 Persen 50 Persen	2.205.768.020,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	15.667.380.855,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	2.205.768.020,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.667.380.855,00	RSUD DEPATI BAHRIN
						RSUD DR. Eko Maulana Ali			**8.266.159.592,00**							15.271.671.729,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**8.266.159.592,00**	**8.266.159.592,00**						15.271.671.729,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**8.266.159.592,00**							15.271.671.729,00	
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	3.632.449.266,00	3.632.449.266,00					-	3.814.071.729,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	3.632.449.266,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	3.814.071.729,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.632.449.266,00	Kab. Bangka, Belinyu, Riding Panjang	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		3.814.071.729,00	RSUD DR. EKO MAULANA ALI
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**4.633.710.326,00**						-	11.457.600.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia	67 Persen 85 Persen 84 Persen 100 Persen 68 Persen 100 Persen 50 Persen 67,67 Persen	2.300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	3.360.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Riding Panjang	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000.000,00	RSUD DR. EKO MAULANA ALI
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Riding Panjang	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		210.000.000,00	RSUD DR. EKO MAULANA ALI
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	300.000.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Riding Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000.000,00	RSUD DR. EKO MAULANA ALI
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Status Gizi Kurang pada Balita Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	7,8 Persen 100 Persen 100 Persen 85 Persen 50 Persen 68 Persen 9,88 Persen 100 Persen 90,00 Persen 100 Persen	2.333.710.326,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	8.097.600.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular Persentase Faskes yang Terakreditasi Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS	0,41 Persen 69,23 Persen 100 Persen									
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	2.333.710.326,00	Kab. Bangka, Belinyu, Riding Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		8.097.600.000,00	RSUD DR. EKO MAULANA ALI
						RSUD Sjafrie Rachman			**5.607.196.304,00**							9.563.747.365,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**5.607.196.304,00**							9.563.747.365,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**5.607.196.304,00**							9.563.747.365,00	
10	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	**503.260.836,00**						-	528.423.865,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	503.260.836,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	528.423.865,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	503.260.836,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		528.423.865,00	RSUD SJAFRIE RACHMAN
11	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**5.103.935.468,00**						-	9.035.323.500,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar	67 Persen 68 Persen 100 Persen 84 Persen 85 Persen 50 Persen 67,67 Persen 100 Persen	3.070.270.800,00	3.070.270.800,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	4.368.073.500,00	
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.814.452.500,00	RSUD SJAFRIE RACHMAN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1.550.650.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		453.621.000,00	RSUD SJAFRIE RACHMAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	519.620.800,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000.000,00	RSUD SJAFRIE RACHMAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Status Gizi Kurang pada Balita Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	85 Persen 90,00 Persen 0,41 Persen 68 Persen 7,8 Persen 100 Persen 50 Persen 100 Persen 9,88 Persen 100 Persen	2.033.664.668,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	4.667.250.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Faskes yang Terakreditasi Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS	100 Persen 69,23 Persen 100 Persen									
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	2.033.664.668,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		4.667.250.000,00	RSUD SJAFRIE RACHMAN
						Puskesmas Kenanga			**4.242.409.536,00**							4.924.474.237,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**4.242.409.536,00**							4.924.474.237,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**4.242.409.536,00**							4.924.474.237,00	
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	**1.372.305.464,00**						-	1.440.920.737,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	1.372.305.464,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	1.440.920.737,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.372.305.464,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		1.440.920.737,00	PUSKESMAS KENANGA
13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**2.862.365.072,00**						-	3.478.303.500,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas	84 Persen 100 Persen 67,67 Persen 100 Persen 67 Persen 85 Persen 50 Persen 68 Persen	1.792.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	525.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	992.900.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		420.000.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	800.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		105.000.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Faskes yang Terakreditasi Status Gizi Kurang pada Balita Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	50 Persen 0,41 Persen 100 Persen 85 Persen 69,23 Persen 7,8 Persen 90,00 Persen 100 Persen 68 Persen 100 Persen 100 Persen 9,88 Persen 100 Persen	1.069.465.072,00	1.069.465.072,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	2.953.303.500,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	474 Orang	112.800.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	453 Orang	8.820.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		26.250.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246 Orang	13.740.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3011 Orang	95.840.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6752 Orang	46.550.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27150 Orang	950.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4609 Orang	8.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		52.500.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2572 Orang	2.970.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.625.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	908 Orang	3.800.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	97 Orang	4.900.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	418 Orang	5.650.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		42.000.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1121 Orang	1.040.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	111.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	400.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	12.250.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	21.400.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	345 Orang	5.725.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	135.797.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	451.517.072,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.672.428.500,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.754.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	500.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	19.300.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS KENANGA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	1.012.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS KENANGA
14	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	7.739.000,00						-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	98 Persen	7.739.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.739.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		5.250.000,00	PUSKESMAS KENANGA
						Puskesmas Belinyu			**5.110.438.366,00**							6.333.466.152,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**5.110.438.366,00**							6.333.466.152,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**5.110.438.366,00**							6.333.466.152,00	
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	**2.897.372.526,00**	**2.897.372.526,00**					-	3.042.241.152,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	2.897.372.526,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	3.042.241.152,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.897.372.526,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		3.042.241.152,00	PUSKESMAS BELINYU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**2.205.821.840,00**						-	3.285.975.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar	50 Persen 68 Persen 84 Persen 67,67 Persen 7 Persen 85 Persen 100 Persen 100 Persen	1.100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	684.600.000	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	300.000.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		420.000.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	800.000.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		264.600.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular Status Gizi Kurang pada Balita Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase Faskes yang Terakreditasi Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas	100 Persen 0,41 Persen 7,8 Persen 100 Persen 50 Persen 85 Persen 100 Persen 90,00 Persen 100 Persen 100 Persen 9,88 Persen 69,23 Persen 68 Persen	1.105.821.840,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	2.601.375.000,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	618 Orang	83.940.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Orang	15.030.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		26.250.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	262 Orang	10.190.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2326 Orang	17.430.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6547 Orang	25.900.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24713 Orang	13.800.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4955 Orang	3.662.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		52.500.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2403 Orang	860.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.625.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	849 Orang	960.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	67 Orang	3.000.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang	6.600.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		42.000.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	754 Orang	8.000.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	149.360.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	18.539.600,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	32.382.400,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	334 Orang	3.500.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	105.596.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	563.461.840,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.320.500.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.090.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	280.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	37.540.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS BELINYU
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	200.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS BELINYU
17	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	**7.244.000,00**						-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	98 Persen	7.244.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.244.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		5.250.000,00	PUSKESMAS BELINYU
						Puskesmas Gunung Muda			**3.304.474.437,00**							7.209.592.581,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**3.304.474.437,00**							7.209.592.581,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**3.304.474.437,00**							7.209.592.581,00	
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27,15	**608.704.581,00**						-	608.704.581,00	
							Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,15									
							Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0 %									
							Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64 %									
							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3									
							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	98,20 Persen									
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	608.704.581,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	608.704.581,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	608.704.581,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		608.704.581,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**2.692.651.856,00**						-	6.595.638.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik	84 Persen 67,67 Persen 67 Persen 68 Persen 100 Persen 100 Persen 85 Persen 50 Persen	2.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	5.090.820.000,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		4.559.520.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	800.000.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		105.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		426.300.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik	85 Persen	692.651.856,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	1.504.818.000,00	
							Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	9,88 Persen									
							Status Gizi Kurang pada Balita	7,8 Persen									
							Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	100 Persen									
							Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan	100 Persen									
							Kegawatgaruratan Pra RS										
							Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik	50 Persen									
							Persentase Faskes yang Terakreditasi	69,23 Persen									
							Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan	100 Persen									
							Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 Persen									
							Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	90,00 Persen									
							Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular	0,41 Persen									
							Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure	100 Persen									
							Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas	68 Persen									
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	177 Orang	54.720.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	169 Orang	7.585.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		26.250.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85 Orang	7.920.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	939 Orang	3.990.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2171 Orang	9.900.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8331 Orang	415.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1364 Orang	3.600.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		52.500.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	785 Orang	9.600.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.625.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	277 Orang	9.130.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	22 Orang	2.100.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	102 Orang	10.225.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		42.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang	2.590.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	172.825.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	625.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	7.410.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6.176.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	120 Orang	600.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	77.780.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	293.941.856,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.223.943.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	700.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	7.729.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
20	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	**3.118.000,00**						-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	98 Persen	3.118.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.118.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Gunung Muda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		5.250.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MUDA
						Puskesmas Sungailiat			**4.314.832.220,00**							4.479.307.505,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**4.314.832.220,00**							4.479.307.505,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**4.314.832.220,00**							4.479.307.505,00	
21	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	**2.056.787.148,00**					-	2.159.626.505,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	2.056.787.148,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	2.159.626.505,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.056.787.148,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		2.159.626.505,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**2.250.823.072,00**						-	2.314.431.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar	68 Persen 84 Persen 67,67 Persen 50 Persen 100 Persen 67 Persen 85 Persen 100 Persen	1.200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	840.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		420.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	800.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		105.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		315.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	100 Persen	1.050.823.072,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	1.474.431.000,00	
							Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	90,00 Persen									
							Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure	100 Persen									
							Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular	0,41 Persen									
							Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik	50 Persen									
							Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS	100 Persen									
							Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik	85 Persen									
							Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas	68 Persen									
							Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan	100 Persen									
							Status Gizi Kurang pada Balita	7,8 Persen									
							Persentase Faskes yang Terakreditasi	69,23 Persen									
							Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 Persen									
							Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	9,88 Persen									
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	504 Orang	129.792.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	481 Orang	11.330.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		26.250.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	507 Orang	370.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2945 Orang	2.029.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6430 Orang	26.550.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25340 Orang	280.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4693 Orang	1.800.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		52.500.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2075 Orang	3.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.625.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	801 Orang	420.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang	900.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1332 Orang	10.400.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		42.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	90.800.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	2.050.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	12.525.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	25.025.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	338 Orang	2.100.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	127.737.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	566.572.072,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.206.156.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.418.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	200.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	775.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
23	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	**7.222.000,00**						-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	98 Persen	7.222.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.222.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		5.250.000,00	PUSKESMAS SUNGAILIAT
						Puskesmas Baturusa			**3.567.652.133,00**							5.863.661.089,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**3.567.652.133,00**							5.863.661.089,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**3.567.652.133,00**							5.863.661.089,00	
24	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	**1.094.039.133,00**					-	1.148.741.089,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	1.094.039.133,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	1.148.741.089,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.094.039.133,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		1.148.741.089,00	PUSKESMAS BATURUSA
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**2.467.529.000,00**						-	4.709.670.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar	67 Persen 85 Persen 67,67 Persen 68 Persen 100 Persen 100 Persen 50 Persen 84 Persen	1.500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	2.831.325.000,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	300.000.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		420.000.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		315.000.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.096.325.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure	100 Persen	967.529.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	1878345000	
							Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas	68 Persen									
							Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik	85 Persen									
							Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik	50 Persen									
							Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	90,00 Persen									
							Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	100 Persen									
							Persentase Faskes yang Terakreditasi	69,23 Persen									
							Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan	100 Persen									
							Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 Persen									
							Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS	100 Persen									
							Status Gizi Kurang pada Balita	7,8 Persen									
							Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	9,88 Persen									
							Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular	0,41 Persen									
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	573 Orang	108.000.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	547 Orang	8.980.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		26.250.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	543 Orang	3.390.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2528 Orang	58.120.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5463 Orang	26.850.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19984 Orang	320.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2984 Orang	3.750.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		52.500.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1901 Orang	3.140.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.625.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	671 Orang	1.700.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	5.000.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	578 Orang	5.250.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		42.000.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	847 Orang	3.820.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	123.494.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.825.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	11.800.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	14.550.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	260 Orang	2.250.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	110.221.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	467.969.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.597.470.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	200.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	4.400.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	500.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
26	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	**6.084.000,00**						-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	98 Persen	6.084.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.084.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		5.250.000,00	PUSKESMAS BATURUSA
						Puskesmas Pemali			**3.132.000.035,00**							3.883.329.691,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**3.132.000.035,00**							3.883.329.691,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**3.132.000.035,00**							3.883.329.691,00	
27	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	**1.225.605.716,00**						-	1.286.886.001,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	1.225.605.716,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	1.286.886.001,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.225.605.716,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		1.286.886.001,00	PUSKESMAS PEMALI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**1.897.824.319,00**						-	2.587.873.690,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar	84 Persen 50 Persen 67 Persen 100 Persen 85 Persen 67,67 Persen 68 Persen 100 Persen	900.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	525.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	700.000.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		420.000.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		105.000.000,00	PUSKESMAS PEMALI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Status Gizi Kurang pada Balita Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan Persentase Faskes yang Terakreditasi Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik	7,8 Persen 90,00 Persen 100 Persen 100 Persen 69,23 Persen 9,88 Persen 100 Persen 0,41 Persen 100 Persen 85 Persen 100 Persen 68 Persen 50 Persen	997.824.319,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	2.062.873.690,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	441 Orang	122.760.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	421 Orang	4.430.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		26.250.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246 Orang	4.500.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2672 Orang	54.860.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang	21.400.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23640 Orang	800.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3146 Orang	1.800.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		52.500.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2170 Orang	2.460.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.625.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	766 Orang	18.590.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang	1.800.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350 Orang	6.800.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		42.000.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	733 Orang	4.995.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	115.286.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	375.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	43.129.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	296 Orang	15.100.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	76.292.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	473.301.319,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.781.998.690,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.762.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	200.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	7.400.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS PEMALI
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	1.184.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PEMALI
29	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	8.570.000,00						-	8.570.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	98 Persen	8.570.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.570.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		5.250.000,00	PUSKESMAS PEMALI
						Puskesmas Bakam			**3.136.095.536,00**							4.823.251.540,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**3.136.095.536,00**							4.823.251.540,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**3.136.095.536,00**							4.823.251.540,00	
30	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	**1.465.872.896,00**						-	1.539.166.540,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	1.465.872.896,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	1.539.166.540,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.465.872.896,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		1.539.166.540,00	PUSKESMAS BAKAM
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**1.662.556.640,00**	**1.662.556.640,00**					-	3.278.835.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas	67,67 Persen 84 Persen 100 Persen 100 Persen 67 Persen 85 Persen 50 Persen 68 Persen	600.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	525.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		420.000.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	400.000.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		105.000.000,00	PUSKESMAS BAKAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	1.062.556.640,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	2.753.835.000,00	
							Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	100 Persen									
							Persentase Faskes yang Terakreditasi	69,23 Persen									
							Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan	100 Persen									
							Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS	100 Persen									
							Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	9,88 Persen									
							Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik	50 Persen									
							Status Gizi Kurang pada Balita	7,8 Persen									
							Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	90,00 Persen									
							Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular	0,41 Persen									
							Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure	100 Persen									
							Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas	68 Persen									
							Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik	85 Persen									
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	323 Orang	91.692.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	309 Orang	40.820.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		26.250.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	141 Orang	19.054.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1612 Orang	14.495.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3317 Orang	18.400.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12680 Orang	3.120.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1588 Orang	1.500.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		52.500.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1156 Orang	3.640.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.625.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	408 Orang	3.120.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang	1.500.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang	3.750.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		42.000.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 Orang	18.300.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	171.954.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	625.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	7.925.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2.842.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	159 Orang	26.500.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	115.695.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	510.549.640,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.472.960.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	275.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS BAKAM
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	600.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS BAKAM
32	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	**7.666.000,00**						-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	98 Persen	7.666.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.666.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		5.250.000,00	PUSKESMAS BAKAM
						Puskesmas Riau Silip			**3.746.260.807,00**							4.449.169.089,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**3.746.260.807,00**							4.449.169.089,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**3.746.260.807,00**							4.449.169.089,00	
33	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	**1.628.803.895,00**						-	1.710.244.089,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	1.628.803.895,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	1.710.244.089,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.628.803.895,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		1.710.244.089,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**2.111.307.912,00**						-	2.733.675.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan	50 Persen 67,67 Persen 85 Persen 68 Persen 100 Persen 84 Persen 100 Persen 67 Persen	1.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	525.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	600.000.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		420.000.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	400.000.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		105.000.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS	100 Persen	1.111.307.912,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	2.208.675.000,00	
							Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	90,00 Persen									
							Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan	100 Persen									
							Persentase Faskes yang Terakreditasi	69,23 Persen									
							Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	100 Persen									
							Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik	85 Persen									
							Status Gizi Kurang pada Balita	7,8 Persen									
							Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	9,88 Persen									
							Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure	100 Persen									
							Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas	68 Persen									
							Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 Persen									
							Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik	50 Persen									
							Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular	0,41 Persen									
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470 Orang	76.776.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	448 Orang	7.690.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		26.250.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	228 Orang	12.915.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2182 Orang	15.240.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5080 Orang	26.900.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19566 Orang	285.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2665 Orang	1.800.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		52.500.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1801 Orang	5.535.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.625.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	636 Orang	9.200.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	57 Orang	5.700.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	184 Orang	7.650.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		42.000.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	541 Orang	2.600.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	163.642.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.125.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	20.495.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	253 Orang	1.100.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	103.183.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	633.057.912,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.927.800.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	425.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3.220.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	769.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
35	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	**6.149.000,00**						-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	98 Persen	6.149.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.149.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		5.250.000,00	PUSKESMAS RIAU SILIP
						Puskesmas Puding Besar			**3.738.011.694,00**							3.618.557.978,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**3.738.011.694,00**							3.618.557.978,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**3.738.011.694,00**							3.618.557.978,00	
36	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	**929.785.694,00**					-	976.274.978,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	929.785.694,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	976.274.978,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	929.785.694,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		976.274.978,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
37	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**2.803.133.000,00**					-	2.637.033.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar	67 Persen 67,67 Persen 85 Persen 68 Persen 50 Persen 84 Persen 100 Persen 100 Persen	2.150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	840.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		420.000.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	950.000.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		105.000.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		315.000.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Terakreditasi Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS Status Gizi Kurang pada Balita Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular	69,23 Persen 68 Persen 100 Persen 100 Persen 7,8 Persen 100 Persen 85 Persen 50 Persen 9,88 Persen 90,00 Persen 100 Persen 100 Persen 0,41 Persen	653.133.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	1.797.033.000,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	358 Orang	73.320.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	341 Orang	17.700.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		26.250.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	143 Orang	3.280.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1726 Orang	20.850.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3482 Orang	16.750.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13316 Orang	545.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1736 Orang	2.200.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		52.500.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1219 Orang	4.510.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.625.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	3.270.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	6.800.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	437 Orang	7.150.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		42.000.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	385 Orang	12.225.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	110.190.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	2.448.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	16.950.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8.650.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	170 Orang	4.300.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	89.898.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	234.697.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.516.158.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	550.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	18.450.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	400.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
38	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	**5.093.000,00**						-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	98 Persen	5.093.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.093.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		5.250.000,00	PUSKESMAS PUDING BESAR
						Puskesmas Petaling			**4.755.457.870,00**							6.254.023.221,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**4.755.457.870,00**							6.254.023.221,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**4.755.457.870,00**							6.254.023.221,00	
39	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	**1.841.972.262,00**					-	1.934.794.325,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	1.841.972.262,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	1.934.794.325,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.841.972.262,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		1.934.794.325,00	PUSKESMAS PETALING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**2.906.726.608,00**						-	4.313.978.896,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik	84 Persen 100 Persen 100 Persen 67 Persen 67,67 Persen 68 Persen 85 Persen 50 Persen	1.600.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	525.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		420.000.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	1.400.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		105.000.000,00	PUSKESMAS PETALING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure Persentase Faskes yang Terakreditasi Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Status Gizi Kurang pada Balita	90,00 Persen 9,88 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 69,23 Persen 0,41 Persen 100 Persen 85 Persen 50 Persen 68 Persen 7,8 Persen	1.306.726.608,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	3.788.978.896,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	713 Orang	90.540.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	680 Orang	6.060.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		26.250.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	312 Orang	3.300.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3562 Orang	23.670.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7071 Orang	46.400.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26691 Orang	4.290.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3449 Orang	8.400.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		52.500.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2416 Orang	5.220.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.625.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	853 Orang	14.445.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	67 Orang	21.550.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	860 Orang	11.600.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		42.000.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	795 Orang	22.810.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	231.508.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	750.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	14.570.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	26.837.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	352 Orang	1.300.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	127.485.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	635.552.608,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		3.508.103.896,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	850.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	6.120.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS PETALING
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	1.469.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PETALING
41	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	6.759.000,00						-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	98 Persen	6.759.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.759.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		5.250.000,00	PUSKESMAS PETALING
						Puskesmas Sinar Baru			**1.853.528.425,00**							2.943.559.463,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1.853.528.425,00**							2.943.559.463,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**1.853.528.425,00**							2.943.559.463,00	
42	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,15 11,15 0 % 64 % 3 98,20 Persen	**587.242.905,00**					-	616.605.050,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	587.242.905,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	616.605.050,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	587.242.905,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		616.605.050,00	PUSKESMAS SINAR BARU
43	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**1.263.671.520,00**					-	2.321.704.413,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik	84 Persen 100 Persen 85 Persen 68 Persen 67 Persen 100 Persen 67,67 Persen 50 Persen	600.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	420.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	600.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		420.000.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Faskes yang Terakreditasi Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure	0,41 Persen 100 Persen 9,88 Persen 50 Persen 100 Persen 100 Persen 69,23 Persen 100 Persen	663.671.520,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	1.901.704.413,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Status Gizi Kurang pada Balita Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik	90,00 Persen 7,8 Persen 100 Persen 68 Persen 85 Persen									
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	211 Orang	58.320.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	202 Orang	6.860.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		26.250.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79 Orang	11.380.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1047 Orang	10.020.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2560 Orang	14.200.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9407 Orang	240.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1802 Orang	9.900.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		52.500.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	873 Orang	2.720.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.625.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	3.080.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	33 Orang	11.200.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	136 Orang	4.800.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		42.000.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	318 Orang	9.510.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	94.862.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	8.550.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	16.450.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	173 Orang	2.200.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	72.431.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	313.503.520,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.620.829.413,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.386.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	200.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	7.160.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	599.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
44	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	**2.614.000,00**						-	5.250.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	98 Persen	2.614.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	2.614.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		5.250.000,00	PUSKESMAS SINAR BARU
						Puskesmas Penagan			**3.353.155.380,00**							7.295.131.459,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**3.353.155.380,00**							7.295.131.459,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**3.353.155.380,00**							7.295.131.459,00	
45	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27,15	**733.194.247,00**						-	769.853.959,00	
							Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,15									
							Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0 %									
							Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64 %									
							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3									
							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	98,20 Persen									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	733.194.247,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	769.853.959,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	733.194.247,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		769.853.959,00	PUSKESMAS PENAGAN
46	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**2.614.343.133,00**						-	6.520.027.500,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar	84 Persen 67 Persen 85 Persen 50 Persen 67,67 Persen 100 Persen 68 Persen 100 Persen	1.900.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	4.305.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		4.200.000.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	800.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		105.000.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Faskes yang Terakreditasi Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Status Gizi Kurang pada Balita	90,00 Persen 100 Persen 50 Persen 9,88 Persen 68 Persen 100 Persen 69,23 Persen 100 Persen 85 Persen 7,8 Persen	714.343.133,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	2.215.027.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS	100 Persen 0,41 Persen 100 Persen										
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	63.118.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	191 Orang	5.400.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		26.250.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	12.230.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	939 Orang	22.890.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2097 Orang	18.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1191 Orang	1.220.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	691 Orang	1.500.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		52.500.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	678 Orang	2.730.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.625.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	2.120.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	27 Orang	12.300.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		7.875.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	257 Orang	6.175.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		42.000.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	228 Orang	3.100.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		12.600.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	121.642.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		10.500.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.725.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	12.100.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2.224.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	136 Orang	3.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	81.380.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		21.000.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	333.289.133,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.934.152.500,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		15.750.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	400.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.050.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	2.200.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.100.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
47	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	5.618.000,00						-	5.250.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelengaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	98 Persen	5.618.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	5.250.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.618.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		5.250.000,00	PUSKESMAS PENAGAN
						UPT Laboratorium Kesehatan			**1.241.646.000,00**							3.266.655.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1.241.646.000,00**							3.266.655.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**1.241.646.000,00**							3.266.655.000,00	
48	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27,15	**150.000.000,00**						-	157.500.000,00	
							Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,15									
							Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0 %									
							Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64 %									
							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3									
							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	98,20 Persen									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP Status	150.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	157.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	150.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		157.500.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**1.091.646.000,00**						-	3.109.155.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik	84 Persen 100 Persen 67,67 Persen 68 Persen 100 Persen 67 Persen 85 Persen 50 Persen	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	210.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		210.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Terakreditasi Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Status Gizi Kurang pada Balita	69,23 Persen 100 Persen 90,00 Persen 100 Persen 68 Persen 85 Persen 100 Persen 9,88 Persen 100 Persen 0,41 Persen 100 Persen 50 Persen 7,8 Persen	891.646.000,00	891.646.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	2.899.155.000,00	
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	891.646.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.899.155.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						UPTD SPGDT			**1.120.457.072,00**							3.465.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1.120.457.072,00**							3.465.000.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**1.120.457.072,00**							3.465.000.000,00	
50	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan Indeks Keluarga Sehat Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100 % 0,45 INDEKS 100%	**1.120.457.072,00**						-	3.465.000.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Memilki Sarana Sesuai Standar Persentase Faskes yg memilki Sarana sesuai Standar Persentase Faskes yang Memiliki Prasarana Sesuai Standar Persentase Keluarga yang Diintervensi Masalah Kesehatan Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang Tersedia Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik	100 Persen 100 Persen 84 Persen 67 Persen 85 Persen 68 Persen 67,67 Persen 50 Persen	300.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka	-	1.260.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kab.Bangka		210.000.000,00	UPTD SPGDT
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	100.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		1.050.000.000,00	UPTD SPGDT
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Fornas Status Gizi Kurang pada Balita Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular Persentase Faskes yang Terakreditasi Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatgaruratan Pra RS Persentase Pemenuhan Bahan Habis Pakai Sesuai dengan Kompodium Alkes Non Elektromedik Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedik Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	100 Persen 100 Persen 68 Persen 7,8 Persen 100 Persen 90,00 Persen 0,41 Persen 69,23 Persen 9,88 Persen 100 Persen 50 Persen 85 Persen 100 Persen	820.457.072,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka	-	2.205.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)											
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	820.457.072,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab.Bangka		2.205.000.000,00	UPTD SPGDT
									125.466.312.651,00								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
J U M L A H Total					**268.207.315.029,00**							**289.942.813.742,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			38.265.267.661,00							137.605.337.574,25	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			38.265.267.661,00							137.605.337.574,25	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			38.265.267.661,00							137.605.337.574,25	
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	0% 13.99 65,60 4 30.30 100 %	10.324.682.415,00						-	15.667.108.800,56	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 % 100 %	12.510.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR	-	105.407.516,80	
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	12.510.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		105.407.516,80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	9.022.002.275,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR	-	10.092.625.729,40	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	9.009.852.275,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		9.997.526.511,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	12.150.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		95.099.218,40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100 % 61,54 % 100 %	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR	-	144.000.000,00	
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		144.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	272.195.825,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR	-	432.000.000,00	
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	272.195.825,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		432.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	510.979.315,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR	-	3.279.761.600,68	
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	317.171.265,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		2.727.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	173.927.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		324.767.174,68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.881.050,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		227.994.426,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	95 %	497.245.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR	-	1.613.313.953,68	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	373.585.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		365.153.953,68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya											
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	30.450.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	43.210.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		108.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		290.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	% Jaringan Irigasi dalam kondisi yg baik % Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	67.73 % 63.67 %	3.966.355.090,00						-	5.680.791.094,39	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	% Infrastruktur Drainase Dalam Kondisi Baik	72.83 %	1.465.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	2.969.400.000,00	
	1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai											
							Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	4 KM	720.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		727.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing											
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,05 KM	200.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.212.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		242.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai											
							Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,2 KM	295.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		606.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya											
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		181.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	% Irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik	67%	2.501.355.090,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	2.711.391.094,39	
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan											
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.750 KM	1.391.299.090,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-LAYANAN DASAR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		606.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan											
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,250 KM	875.497.200,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-LAYANAN DASAR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		1.642.260.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	6 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		303.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa											
							Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	84.558.800,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-LAYANAN DASAR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		160.131.094,39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	% Rumah tangga yang menggunakan air minum	67.52	2.643.645.993,00						-	969.600.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR SPAM kabupaten dalam Kondisi Baik	19.796 SR SPAM	2.643.645.993,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	969.600.000,00	
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	182.514.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		181.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)											
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	515.555.993,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-LAYANAN DASAR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		484.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan											
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	5 Unit	1.945.576.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		303.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL	25,90	1.122.483.140,00						-	848.400.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan air limbah domestik dalam kondisi baik	250 Spal Perdesaan	1.122.483.140,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	848.400.000,00	
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja											
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	25 Rumah Tangga	127.117.090,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		181.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat											
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	30 Rumah Tangga	374.186.050,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		484.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	621.180.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		181.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	% Drainase Dalam Kondisi Baik	79,79 %	515.000.000,00						-	606.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Panjang drainase dalam kondisi baik	80,13 %	515.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	606.000.000,00	
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan											
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000 M	515.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		606.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Ketaatan terhadap penataan bangunan gedung	100 %	308.375.000,00						-	363.600.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Perizinan.	100 %	308.375.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	363.600.000,00	
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan												
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100 Dokumen	308.375.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		363.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	% Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	77.51 %	19.024.287.518,00						-	112.560.517.084,90	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	% jaringan jalan dalam kondisi baik % Jembatan dalam Kondisi Mantap	49,96 % 49,96 %	19.024.287.518,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	112.560.517.084,90	
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	469.377.750,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		667.735.853,97	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan											
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 Dokumen KM	500.840.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		590.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan											
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20 KM	2.642.005.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		6.472.710.227,88	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	0,8 KM	408.735.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		7.966.412.588,16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan											
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,3 KM	4.440.435.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB, DBH SAWIT, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		14.009.305.202,10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan											
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3 KM	9.966.642.518,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		72.040.948.212,79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	10 KM	129.517.250,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		177.255.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan											
							Panjang jembatan yang dibangun	3 Meter	466.735.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		10.635.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase SDM jasa kontruksi yang terlatih	100 %	50.000.000,00						-	180.605.594,40	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih	30 Orang	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	180.605.594,40	
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	30 Orang	50.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		180.605.594,40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	% Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang	100 %	310.438.505,00						-	728.715.000,00	
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan FPR untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	218.615.505,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	698.415.000,00	
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang											
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	218.615.505,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka		698.415.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penilaian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	91.823.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	30.300.000,00	
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang											
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	91.823.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka		30.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							J U M L A H		**38.265.267.661,00**							**137.605.337.574,25**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			8.585.365.387,00							7.406.355.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.274.928.227,00							7.036.355.000,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			8.274.928.227,00							7.036.355.000,00	
1	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	28,2 12,5 0,00 65,50 4 100	4.683.913.377,00						-	5.096.355.000,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan dan Perencanaan Kinerja yang Disusun sesuai Standar	100 persen	10.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	18.500.000,00	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		18.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar	100 persen	4.009.793.416,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	3.815.000.000,00	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 / 14 Orang/bulan	4.004.793.416,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		3.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap - Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 persen 50 persen	9.750.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	10.000.000,00	
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah	100 persen	160.190.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	200.000.000,00	
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	160.190.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	75.098.440,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	50.000.000,00	
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75.098.440,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	169.828.269,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	608.855.000,00	
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	102.609.174,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		455.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		69.917.436,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.219.095,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		83.937.564,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100 persen	249.253.252,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	394.000.000,00	
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	113.890.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		190.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	14.840.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	120.523.252,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		124.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang Direkonstruksi	98,48	458.435.391,00						-	555.000.000,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi	98,47 persen	20.690.391,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Rumah Korban yang Terkena Bencana	-	90.000.000,00	
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.690.391,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Rumah Korban yang Terkena Bencana		90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang di Rekontruksi	100 persen	105.460.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	-	-	150.000.000,00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana											
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	105.460.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Unit Rumah Susun/Rumah Khusus yang Terbina	100 persen	292.285.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Penghuni Rusun	-	275.000.000,00	
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	292.285.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Penghuni Rusun		275.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Kepatuhan Pengembang terhadap Site Plan	100 persen	40.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Pengembang Perumahan	-	40.000.000,00	
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	20 Laporan	40.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Pengembang Perumahan		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3	1	04	03			PROGRAM KAWASAN	Persentase Penurunan Luasan	100	1.164.838.309,00						-	875.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Layak Huni di dalam Kawasan Kumuh	100 persen	1.164.838.309,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Kawasan Permukiman Kumuh	-	875.000.000,00	
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	369.067.639,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Kawasan Permukiman Kumuh		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh											
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	13,82 Ha	591.006.275,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Kawasan Permukiman Kumuh		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4 Unit	204.764.395,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Kawasan Permukiman Kumuh		425.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN	Persentase Kawasan Kumuh yang	100	1.725.316.650,00						-	315.000.000,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	100 persen	1.725.316.650,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Kawasan Permukiman Kumuh	-	315.000.000,00	
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	43 Unit Rumah	1.640.316.650,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Kawasan Permukiman Kumuh		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Orang	85.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Kawasan Permukiman Kumuh		115.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Rumah yang Memiliki	100	242.424.500,00						-	195.000.000,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Memiliki PSU yang Layak	100 persen	242.424.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pengembang Perumahan	-	195.000.000,00	
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang											
							Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	39.910.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Pengembang Perumahan		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	202.514.500,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pengembang Perumahan		85.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN			310.437.160,00							370.000.000,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			310.437.160,00							370.000.000,00	
6	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN	Persentase Penyelesaian Konflik	100	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konflik-Konflik yang Diselesaikan	100 persen	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat yang diselesaikan masalah Sengketa Tanah	-	55.000.000,00	
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat yang diselesaikan masalah Sengketa Tanah		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN	Persentase Penyelesaian Ganti	100	80.000.000,00						-	75.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah yang di Ganti Rugi	1 Paket	80.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat yang mendapatkan ganti rugi	-	75.000.000,00	
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat yang mendapatkan ganti rugi		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
8	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Membuka Tanah	100	40.000.000,00						-	40.000.000,00	
	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Pemberian Izin Membuka Tanah	100 persen	40.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Berpeghasilan Rendah (MBR)	-	40.000.000,00	
	2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Berpeghasilan Rendah (MBR)		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
9	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan Pemda yang Tersedia untuk Kegiatan Pembangunan	90	140.437.160,00						-	200.000.000,00	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Tanah Pemda yang telah Disertifikasi	80 persen	140.437.160,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Tanah Pemda	-	200.000.000,00	
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	140.437.160,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Tanah Pemda		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
								J U M L A H	**8.585.365.387,00**							**7.406.355.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Satuan Polisi Pamongpraja			14.634.225.803,00							18.185.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.634.225.803,00							18.185.000.000,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			14.634.225.803,00							18.185.000.000,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,38 10,28 0,00 60,82 3,50 75,00%	12.260.829.303,00						-	14.540.000.000,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 % 100 %	7.320.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP	-	55.000.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.320.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100 % 100 %	11.428.824.933,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP	-	12.040.000.000,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340 (271 Lk, 69 Pr) Orang/bulan	11.421.144.933,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		12.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40 Laporan	7.680.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100 % 50 % 100 %	49.640.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP	-	220.000.000,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1 05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	18.290.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1 05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	21.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		190.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1 05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	134.344.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP	-	425.000.000,00	
	1 05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	116.044.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1 05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	18.300.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1 05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	331.280.370,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP	-	1.310.000.000,00	
	1 05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	67.474.260,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1 05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.387.995,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	171.418.115,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	309.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP	-	490.000.000,00	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	274.790.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		380.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	34.630.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak	4,00 % 96,00 %	1.523.694.500,00						-	2.425.000.000,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah yang dilayani Patroli Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Satlinmas Inti Persentase Kerjasama dalam Pengamanan dan Hari-hari Besar lainnya Persentase Personil Pol PP yang Mendapatkan Pelatihan Dasar	74,07 % 37,08 % 100 % 36 %	923.368.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP	-	1.350.000.000,00	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	80.240.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	720.920.500,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	62.160.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan											
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	72 laporan	32.980.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	02	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja											
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	400 Orang	27.068.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		215.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Masuk Ke Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Persentase Cakupan Sosialisasi Perda dan Perkada	1,5 % 100 %	587.920.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP	-	965.000.000,00	
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	565.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	22.420.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS	20 %	12.406.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP	-	110.000.000,00	
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	12.406.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
3	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi Presentase Investigasi Kejadian Kebakaran	85,00 % 100 % 100 %	849.702.000,00						-	1.220.000.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Damkar	100 % 55 %	835.902.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP	-	1.150.000.000,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	15.445.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	802.807.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		950.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	17.650.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Gedung Perkantoran yang Tersedia APAR	17,5 %	6.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP	-	35.000.000,00	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran											
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	6.900.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi yang Melibatkan Koordinasi Lintas Sektor	20 %	6.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP	-	35.000.000,00	
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran											
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	6.900.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN LINGKUP SATPOL PP		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
							J U M L A H	**14.634.225.803,00**								**18.185.000.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah			3.448.116.730,00							5.187.600.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.448.116.730,00							5.187.600.000,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			3.448.116.730,00							5.187.600.000,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	26,65 10,62 0,00 70,00 3,00 100,00%	3.258.883.679,00						-	4.270.000.000,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar Persentase pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 % 100 %	15.611.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka	-	40.000.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	15.611.300,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	2.640.493.809,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka	-	2.800.000.000,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	2.640.493.809,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka		2.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka	-	30.000.000,00	
			Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	50%									
			Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%									
	1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	58.844.016,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka	-	125.000.000,00	
	1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	58.844.016,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka		125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	100%	102.707.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka	-	440.000.000,00	
	1 05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel											
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	23.473.800,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	79.233.300,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka		290.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	299.097.454,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka	-	570.000.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	235.621.217,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.580.900,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka		55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.895.337,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	132.380.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka	-	265.000.000,00	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	114.920.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka		225.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	17.460.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana yang dilaksanakan	100%	189.233.051,00						-	917.600.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Bencana Kabupaten/Kota	100%	29.811.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	447.600.000,00	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)											
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500 Orang	29.811.500,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka		447.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Masyarakat Yang Berada di Daerah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	68.452.565,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	290.000.000,00	
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	68.452.565,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka		290.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pesentase Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	100%	66.605.486,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	100.000.000,00	
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	200 Orang	66.605.486,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penyelesaian Dokumen-Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/legal	100%	24.363.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka	-	80.000.000,00	
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota											
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	24.363.500,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
								J U M L A H	**3.448.116.730,00**							**5.187.600.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Sosial			10.256.363.202,00							10.016.313.500,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.256.363.202,00							10.016.313.500,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			10.256.363.202,00							10.016.313.500,00	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	28,00	4.662.198.325,00						-	5.864.913.500,00	
							Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13,50									
							Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0%									
							Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	68,00									
							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4									
							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%									
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Sosial Kab. Bangka (laki-laki 22 perempuan 35 orang)	-	35.000.000,00	
							Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 %									
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Sosial Kab. Bangka (laki-laki 22 perempuan 35 orang)		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	3.647.916.525,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka	-	3.879.280.000,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25/14 Orang/bulan	3.642.916.525,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka		3.859.280.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka		20.000.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 % 6,67 % 13,33 %	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka	-	50.000.000,00	
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	204.390.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka	-	253.830.090,00	
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	204.390.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka		253.830.090,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100 %	255.728.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka	-	250.000.000,00	
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	55.728.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100 %	315.181.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka	-	905.871.990,00	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	259.236.865,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka		780.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka		60.645.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.944.755,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka		65.226.990,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100 %	219.232.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka	-	490.931.420,00	
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	163.792.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka		270.931.420,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.440.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Sosial Kab. Bangka		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	85 %	943.150.000,00						-	1.490.000.000,00	
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian izin pengumpulan sumbangan	85 %	25.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	-	25.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	02	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	90 %	918.150.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	-	1.465.000.000,00	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Lembaga	60.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan											
							Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	11 Orang	79.650.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	89 Orang	548.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1.120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi											
							Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	40 Orang	230.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	58 %	1.071.847.500,00						-	390.000.000,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar	55 %	354.347.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial	-	215.000.000,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	56.847.500,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang											
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	135.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Orang	50.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial		40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	7.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial											
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	35.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat											
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.01 0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan												
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	5.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.01 0010	Pemberian Layanan Kedaruratan												
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.01 0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga												
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.01 0012	Pemberian Layanan Rujukan												
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.01 0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	50 %	717.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	175.000.000,00	
1 06 04 2.02 0003	Penyediaan Permakanan												
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Orang	585.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.02 0005	Penyediaan Alat Bantu												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	60.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial											
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	35.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	7.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan											
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	65 %	3.161.277.377,00						-	1.341.400.000,00	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang mendapat pemeliharaan	55 %	30.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	20.000.000,00	
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar											
							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Yang Dikelola	88 %	3.131.277.377,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	1.321.400.000,00	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	80000 Orang	50.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat											
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	510.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga											
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3450 Orang	2.046.277.377,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		351.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	19000 Usulan	25.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin											
							Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	500.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SAWIT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		495.000.000,00	DINAS SOSIAL
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN	Persentase Kesiapsiagaan dan	50 %	347.890.000,00						-	510.000.000,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapat Perlindungan Sosial	50 %	127.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	90.000.000,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	84.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	43.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	90 %	220.890.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	420.000.000,00	
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana											
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	220.890.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		420.000.000,00	DINAS SOSIAL
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase pengelolaan Taman	100 %	70.000.000,00						-	420.000.000,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terpelihara	100 %	70.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Taman Makam Pahlawan Nasional	-	420.000.000,00	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	70.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Taman Makam Pahlawan Nasional		420.000.000,00	DINAS SOSIAL
							J U M L A H		**10.256.363.202,00**							**10.016.313.500,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan			13.762.404.989,00							11.756.134.100,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.201.009.729,00							11.756.134.100,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			9.201.009.729,00							8.816.134.100,00	
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai kinerja perencanaan Perangkat	25,62	8.976.409.729,00						-	8.571.134.100,00	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 % 100%	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	-	65.000.000,00	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	7.475.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	14 Laporan	7.525.000,00	Kab. Bangka,	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi	Memperkuat sistem	ASN		25.000.000,00	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 %	7.940.563.206,00	7.940.563.206,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	-	6.350.000.000,00	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Org(LK 65& 48Pr) Orang/bulan	7.940.563.206,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		6.350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap	50 % 100 % 100 %	26.220.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	-	68.000.000,00	
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	16.470.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum di perangkat daerah	100 %	163.495.501,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	-	373.134.100,00	378.134.100,00
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	147.025.501,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		373.134.100,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	16.470.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		0,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah	100 %	724.611.022,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	-	1.380.000.000,00	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	184.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		1.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	501.352.652,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.508.370,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang dipelihara	75 %	106.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	-	335.000.000,00	
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Mobil, 13 motor Unit	91.440.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	15.080.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	60.00 %	70.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan	57,14 %	70.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pencari Kerja	-	100.000.000,00	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	30 Orang	70.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pencari Kerja		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	100 %	30.000.000,00						-	0,00	
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker	28 %	30.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pencari Kerja	-	0,00	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online											
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	70 dan 15 Orang	30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pencari Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	49.04 %	124.600.000,00						-	145.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	96.25 %	27.450.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Perusahaan	-	35.000.000,00	
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan											
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 Laporan	27.450.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Perusahaan		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	62.5 %	97.150.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Perusahaan,Pekerja, Serikat Kerja/Buruh	-	110.000.000,00	
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	16 Perkara	38.150.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Perusahaan,Pekerja, Serikat Kerja/Buruh		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	59.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Perusahaan,Pekerja, Serikat Kerja/Buruh		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.561.395.260,00							2.940.000.000,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.374.895.260,00							2.540.000.000,00	
5	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana distibusi yang direvitalisasi	70 %	1.108.028.260,00						-	2.300.000.000,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	87.5 %	1.108.028.260,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan	-	2.300.000.000,00	
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	1.108.028.260,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan		2.300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	100 %	191.867.000,00						-	160.000.000,00	
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	95 %	191.867.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan	-	160.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah (Provinsi/Kabupaten)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	156.867.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang	43,13%	75.000.000,00						-	80.000.000,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	65 %	75.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan	-	80.000.000,00	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang											
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1250 Unit	65.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal											
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500 Orang	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.186.500.000,00	3.186.500.000,00						400.000.000,00	
8	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitasi untuk Pengembangan Produk IKM	0.80 %	3.186.500.000,00						-	400.000.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	30 %	3.186.500.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	IKM	-	400.000.000,00	
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	3.186.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	IKM		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							J U M L A H	**13.762.404.989,00**								**11.761.134.100,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan			10.190.444.867,00							11.674.471.790,45	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN			9.908.303.867,00							11.392.330.790,45	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN			6.239.207.887,00							10.199.767.076,12	
1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	29,15 13,45 0 70 4 100	5.920.939.602,00						-	9.699.226.319,86	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 % 100 %	25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD	-	22.288.389,06	
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD		22.288.389,06	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 %	4.965.352.352,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup DP2KBP3A (Laki Laki 19 Perempuan 59)	-	4.914.589.787,73	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.965.352.352,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup DP2KBP3A (Laki Laki 19 Perempuan 59)		4.914.589.787,73	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100 % 100 % 30 %	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD	-	77.404.789,16	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD		77.404.789,16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	124.912.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD	-	127.787.500,00	
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.912.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD		127.787.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	94.763.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD	-	2.540.876.352,98	
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	43.027.500,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD		2.457.294.894,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	51.736.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD		83.581.458,98	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100 %	472.331.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD	-	1.611.745.239,49	
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	184.011.590,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD		1.246.305.423,16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	142.737.545,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD		58.277.954,60	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	145.582.615,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD		307.161.861,73	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	228.830.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD	-	404.534.261,44	
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	199.390.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD		371.101.677,85	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	29.440.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD		33.432.583,59	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	100 %	89.499.000,00						-	152.676.207,29	
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Yang Terlibat Dalam Kelembagaan	45,55 %	40.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	OPD dan Masyarakat	-	105.869.848,04	
	2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota											
							jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	15 orang	40.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	OPD dan Masyarakat		105.869.848,04	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PPPA Yang Terlatih	30 Orang	49.499.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	46.806.359,25	
	2	08	02	2.03	0007	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota											
							jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	3 Lembaga	49.499.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		46.806.359,25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan Yang Terselesaikan	100 %	52.000.000,00						-	92.580.396,06	
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Yang Aktif	100 %	52.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Lembaga Penyedia Layanan/ Masyarakat	-	92.580.396,06	
	2	08	03	2.03	0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	15 Lembaga	52.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Lembaga Penyedia Layanan/ Masyarakat		92.580.396,06	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan	40,15 %	32.749.285,00						-	92.580.396,06	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Yang Terbentuk	2 Kelompok	32.749.285,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kelembagaan dan Keluarga	-	92.580.396,06	
	2	08	04	2.03	0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota											
							Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	8 Orang	32.749.285,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kelembagaan dan Keluarga		92.580.396,06	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga PHA yang berkualitas	80 %	75.000.000,00						-	89.153.556,24	
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pembentukan Lembaga PHA	100 %	75.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Anak	-	89.153.556,24	
	2	08	06	2.02	0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
							jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	30 Orang	75.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Anak		89.153.556,24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Kasus Kekerasan Anak Yg Terselesaikan	100 %	69.020.000,00						-	73.550.200,61	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PPPA Yang Terampil	60 Orang	69.020.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	73.550.200,61	
	2	08	07	2.03	0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2 Lembaga	69.020.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		73.550.200,61	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			3.669.095.980,00							1.192.563.714,33	
7	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Ketersediaan kebijakan pengendalilan pendudukan yang disediakan sesuai dengan ketentuan	1 Kebijakan	392.939.530,00						-	172.502.534,11	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan	14 Sekolah	37.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	0,00	
	2	14	02	2.01	0030	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan											
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	15 Laporan	37.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Keluarga Yg Uptodate dalam Aplikasi SIGA Persentase keluarga yang didata	100 % 100 %	355.939.530,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat, OPD	-	172.502.534,11	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga											
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	10 Laporan	142.754.500,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat, OPD		142.754.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga											
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat, OPD		29.748.034,11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga											
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	10 Laporan	81.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat, OPD		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3 Dokumen	69.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat, OPD		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana											
							Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	2 Laporan	22.585.030,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat, OPD		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Penggunaan Alat Kontrasepsi MKJP Cakupan Peserta KB Aktif	15.15 % 75.1 %	1.572.436.450,00						-	615.159.538,45	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Presentase Penguatan KIE Bangga Kencana	100 %	518.898.356,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	247.679.723,44	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	124.510.950,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		33.432.583,59	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	144.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		89.153.556,24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)											
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	115.120.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		55.720.972,65	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang											
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6 Dokumen	95.867.406,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		27.860.486,33	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja											
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	32 Organisasi	38.800.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		41.512.124,63	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Presentase Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	20 %	446.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Penyuluh, Masyarakat	-	55.720.972,65	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)											
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	413 Orang	446.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Penyuluh, Masyarakat		55.720.972,65	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes Teregister Pendistribusian Alokon	100 %	477.998.094,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Faskes, Masyarakat	-	172.456.410,36	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17 Laporan	12.150.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Faskes, Masyarakat		31.760.954,41	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	572 Orang	451.793.094,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Faskes, Masyarakat		111.441.945,30	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9 Laporan	14.055.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Faskes, Masyarakat		29.253.510,65	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang terbentuk presentase kampung KB yang meningkat statusnya	25 Kampung KB 20 %	129.540.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	139.302.432,00	
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas											
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 Kampung	129.540.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		139.302.432,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe Jumlah Kelompok BKL yang Melaksanakan 7 (tujuh) dimensi Lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia Presentase balai penyuluh KB yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	164 keluarga 62 Kelompok 30 Kelompok 100 %	1.703.720.000,00						-	404.901.641,77	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan yang dibina untuk meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	54,32 %	192.320.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	354.501.641,77	
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)											
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	4 Laporan / Dokumen	31.320.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		31.320.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		222.883.891,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	13 Unit	91.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		100.297.750,77	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase lemabaga dan organisasi kemasyarakatan yang ikut serta dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 %	1.511.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kader dan Masyarakat	-	50.400.000,00	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)											
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	687.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kader dan Masyarakat		25.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)											
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	824.400.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kader dan Masyarakat		25.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			282.141.000,00							282.141.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN			282.141.000,00							282.141.000,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN			282.141.000,00							282.141.000,00	
10	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Kasus Kekerasan Anak Yg Terselesaikan	100 %	282.141.000,00						-	282.141.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilaksanakan	23 kali	52.001.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	52.001.000,00	
	2	08	07	2.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2 Kegiatan	52.001.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		25.302.934,37	UPTD PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Perlindungan Khusus Anak Yang Aktif	100 %	230.140.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	230.140.000,00	
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30 Orang	230.140.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		100.687.797,58	UPTD PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							J U M L A H	**10.190.444.867,00**								**11.674.471.790,45**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Pangan dan Pertanian			17.256.858.489,00							16.327.381.599,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.499.180.795,00							16.327.381.599,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			15.499.180.795,00							15.274.477.023,00	
1	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	30 Nilai 13.25 Nilai 0% 72 Indeks 4,00 Indeks 100%	15.362.534.670,00						-	15.136.480.898,00	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 % 100 %	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN dan Non ASN pada Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka	-	15.000.000,00	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN dan Non ASN pada Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka		10.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN dan Non ASN pada Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka		5.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar	100 %	14.391.277.158,00	14.391.277.158,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka	-	14.391.277.158,00	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175(87LK/88 PR) Orang/bulan	14.391.277.158,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka		14.391.277.158,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 % 100 % 50 %	19.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka	-	19.750.000,00	
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka		9.750.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka		10.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100 %	189.529.246,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka	-	180.880.000,00	
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	189.529.246,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka		180.880.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	20 %	80.833.530,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka	-	80.833.530,00	
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	80.833.530,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka		80.833.530,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	486.019.836,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka	-	448.740.210,00	
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	291.649.810,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka		291.650.050,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	157.090.160,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka		157.090.160,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.279.866,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	75 %	180.124.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka	-	0,00	
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit Kendaraan Rod Unit	163.530.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	16.594.900,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kelancaran distribusi pangan Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi Umbian Persentase Cadangan Pangan Daerah	87% 1.7% 45%	104.556.430,00						-	105.906.430,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Pedagang melaporkan Stok Bahan Pangan Persentase Pangan yang Harganya Stabil	95 % 90 %	22.871.380,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Bangka	-	24.221.380,00	
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	5.599.580,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Bangka		5.599.580,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya											
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	6 Laporan	7.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Bangka		9.100.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)											
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	9.521.800,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Bangka		9.521.800,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan Pangan Pemerintah	34 %	71.990.000,00	71.990.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat kurang mampu Kab. Bangka	-	71.990.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Ton	71.990.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat kurang mampu Kab. Bangka		71.990.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase KWT yang Mendapatkan Pengetahuan B2SA di masyarakat Persentase Peningkatan Jenis Olahan Pangan Lokal	85 % 76 %	9.695.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Bangka	-	9.695.050,00	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	9.695.050,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Bangka		9.695.050,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Masyarakat	90 %	32.089.695,00						-	32.089.695,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jenis Pangan Segar yang Diawasi	83 %	32.089.695,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Bangka	-	32.089.695,00	
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	12 Dokumen	32.089.695,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Bangka		32.089.695,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.757.677.694,00							1.052.904.576,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.757.677.694,00							1.052.904.576,00	
4	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Benih Unggul Pertanian	70 %	312.393.230,00						-	106.393.230,00	
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Unggul Pertanian yang Disediakan	85 %	206.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kab. Bangka	-	0,00	
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman											
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	206.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kab. Bangka		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan yang Dilakukan Pengawasan	80 %	106.393.230,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kab. Bangka	-	106.393.230,00	
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil											
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	106.393.230,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kab. Bangka		106.393.230,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
5	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Sapras Pertanian	90 %	292.275.600,00						-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	85 %	292.275.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kab. Bangka	-	0,00	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya											
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	292.275.600,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kab. Bangka		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
6	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penyakit Ternak Yang Ditangulangi	90 %	209.697.524,00						-	0,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengedalian Penyebaran Wabah dan Penyakit Peternakan	90 %	209.697.524,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kab. Bangka	-	0,00	
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	209.697.524,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kab. Bangka		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
7	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Serangan OPT yang dapat dikendalikan	75 %	113.275.000,00						-	113.275.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Teknologi Pengendalian OPT	75 %	113.275.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kab. Bangka	-	113.275.000,00	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	156 Ha	113.275.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kab. Bangka		113.275.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
8	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian	90 %	830.036.340,00						-	833.236.346,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan	90 %	830.036.340,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Penyuluh Pertanian di Kab. Bangka	-	833.236.346,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa											
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Unit	653.790.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Penyuluh Pertanian di Kab. Bangka		656.990.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian											
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	38 Orang	176.246.340,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Penyuluh Pertanian di Kab. Bangka		176.246.346,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
							J U M L A H	**17.256.858.489,00**							**16.327.381.599,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Lingkungan Hidup			14.486.273.938,00							21.039.347.300,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.486.273.938,00							21.039.347.300,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			14.486.273.938,00							21.039.347.300,00	
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	27,75 95 59,70 11,75 0 4	10.529.847.138,00						-	10.368.097.200,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun sesuai Standar Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun sesuai Standar	100 % 100 %	7.490.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)	-	161.500.000,00	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.490.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		104.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		57.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar	100 %	9.421.658.954,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)	-	6.741.747.200,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ bulan	9.414.166.454,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		6.711.647.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	7.492.500,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		10.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Objek Sumber Pendapatan yang Terdata	100%	8.950.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	-	15.000.000,00	
	2	11	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	8.950.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	28 % 100 % 100 %	24.900.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)	-	252.900.000,00	
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		215.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Budaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		17.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 (4L, 5P) Orang	15.150.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 (18L, 17P) Orang	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100 %	92.307.025,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)	-	414.000.000,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	92.307.025,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		69.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	17,9 %	396.344.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)	-	742.500.000,00	
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	367.964.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		342.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	133 Unit	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	28.380.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		265.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	414.996.608			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)	-	1.577.000.000	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	259.196.500,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		1.378.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.923.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		50.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	64.877.108,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		148.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	5 %	163.200.551,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)	-	463.450.000,00	
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	78.045.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		139.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	23.950.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		23.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	61.205.551,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 36, Perempuan 29)		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN	Persentase Pemenuhan	100	237.219.900,00						-	366.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan yang disusun sesuai dengan Ketentuan	1 Dokumen	237.219.900,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah	-	66.000.000,00	
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota											
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	237.219.900,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah		66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan yang disusun sesuai dengan Ketentuan	1 Dokumen	0,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha	-	300.000.000,0	
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang											
							Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase menurunnya	100 %	277.253.890,00						-	483.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	100 %	271.258.890,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha	-	381.000.000,00	
	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK											
							Jumlah dokumen data	1 Dokumen	7.291.250,00	Kab. Bangka,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Meningkatkan Daya	Pemerintah		42.000.000,00	DINAS
	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut											
							Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	5 Lokasi	72.291.655,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan											
							Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	18.086.750,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota											
							Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah											
							Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	38.208.775,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota											
							Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota											
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	135.380.460,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha		260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan	100 %	5.995.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah	-	102.000.000,00	
	2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	22,46 Ha	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah		101.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi											
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	5.995.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Keanekaragaman	100 %	536.423.445,00						-	2.041.600.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luasan RTH yang dikelola Persentase Luasan Kehati yang dikelola Persentase Dokumen Profil Kehati yang disusun Persentase Sarana dan Prasarana Kehati yang terpenuhi	100 % 100 % 100 % 100 %	536.423.445,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Perkantoran dan Sekolah	-	2.041.600.000,00	
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	10.450.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Perkantoran dan Sekolah		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30,75 Ha	472.689.095,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Perkantoran dan Sekolah		1.915.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
							Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	4 (2L, 2P) Orang	13.150.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Perkantoran dan Sekolah		26.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	350 Unit	15.810.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Perkantoran dan Sekolah		44.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan											
							Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	24.324.350,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Perkantoran dan Sekolah		45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Penghasil Limbah B3	100 %	27.936.000,00						-	20.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan standar/rincian teknis penyimpanan limbah B3	100 %	27.936.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha	-	10.000.000,00	
	2	11	05	2.01	0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3											
							Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	10 Usaha	27.936.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten dan Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang bukan kewenangan Kabupaten	100 %	0,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha	-	10.000.000,0	
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan											
							Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	0,00	Kab. Bangka,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Meningkatkan Daya	Pemerintah		10.000.000,00	DINAS
6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Pengawasan ketaatan	100 %	67.993.875,00						-	70.460.100,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha atau kegiatan	100 %	67.993.875,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha	-	70.460.100,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen	21.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup											
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 Badan Usaha	46.493.875,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha		60.460.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN	Persentase Perda tentang	100 %	67.924.300,00						-	10.000.000,00	
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Rancangan Perda yang disusun	1 Dokumen	67.924.300,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Adat	-	10.000.000,00	
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	67.924.300,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Adat		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Lembaga	100 %	75.716.000,00						-	109.200.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	100 %	75.716.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kelompok Peduli Lingkungan, Lembaga/Kelompok Masyarakat /Institusi	-	109.200.000,00	
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup											
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	41.535.400,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kelompok Peduli Lingkungan, Lembaga/Kelompok Masyarakat /Institusi		67.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup											
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	67 (34L, 33P) Orang	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kelompok Peduli Lingkungan, Lembaga/Kelompok Masyarakat /Institusi		14.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat											
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	34.180.600,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kelompok Peduli Lingkungan, Lembaga/Kelompok Masyarakat /Institusi		27.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN	Persentase Lembaga	100 %	34.995.000,00						-	36.200.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Penerima Penghargaan	2 Calon Penerima	34.995.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kelompok Peduli Lingkungan, Lembaga/Kelompok Masyarakat /Institusi	-	36.200.000,00	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup											
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	34.995.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kelompok Peduli Lingkungan, Lembaga/Kelompok Masyarakat /Institusi		36.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN	Persentase pelayanan dan	100 %	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase verifikasi pengaduan lingkungan hidup	100 %	20.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha	-	20.000.000,00	
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	4 Pengaduan	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Sanksi	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Penanganan Sampah	70 %	2.610.964.390,00						-	7.514.790.000,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Persampahan sesuai dengan ketentuan Persentase Prasarana dan Sarana Pengurangan Persampahan yang tersedia Persentase Sampah yang dikelola Persentase Kelompok Masyarakat yang mengelola persampahan Persentase Prasarana dan Sarana Penanganan Persampahan yang tersedia	0 Dokumen 100 % 100 % 65,00 % 100 %	2.610.964.390,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rumah Tangga, Sekolah, Kelompok Swadaya Masyarakat, Wajib Retribusi Persampahan, Perkantoran dan Fasilitas Umum	-	7.514.790.000,00	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan											
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	40 Kelompok	89.695.260,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rumah Tangga, Sekolah, Kelompok Swadaya Masyarakat, Wajib Retribusi Persampahan, Perkantoran dan Fasilitas Umum		144.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	25.590.360,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rumah Tangga, Sekolah, Kelompok Swadaya Masyarakat, Wajib Retribusi Persampahan, Perkantoran dan Fasilitas Umum		47.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	977 Unit	204.771.200,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rumah Tangga, Sekolah, Kelompok Swadaya Masyarakat, Wajib Retribusi Persampahan, Perkantoran dan Fasilitas Umum		1.364.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota											
							Jumlah dokumen kebijakan dan	1 Dokumen	35.819.810,00	Kab. Bangka,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Meningkatkan Daya	Rumah Tangga,		10.000.000,00	DINAS
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah											
							Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	20 Unit	1.544.410.260,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rumah Tangga, Sekolah, Kelompok Swadaya Masyarakat, Wajib Retribusi Persampahan, Perkantoran dan Fasilitas Umum		1.353.289.613,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah											
							Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100 Persentase	704.557.500,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rumah Tangga, Sekolah, Kelompok Swadaya Masyarakat, Wajib Retribusi Persampahan, Perkantoran dan Fasilitas Umum		4.575.100.387,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah											
							Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	6.120.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rumah Tangga, Sekolah, Kelompok Swadaya Masyarakat, Wajib Retribusi Persampahan, Perkantoran dan Fasilitas Umum		20.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			J U M L A H		**14.486.273.938,00**							**21.039.347.300,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.997.525.094,00							9.705.139.180,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.997.525.094,00							9.705.139.180,00	
1	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	3 Indeks 0 % 72 % 13.50 % 100 % 30 %	5.340.159.944,00					-	8.851.117.369,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 % 100 %	9.090.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)	-	89.563.441,00	
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.030.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		56.956.658,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	4.060.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		32.606.783,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	4.585.885.926,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)	-	5.694.153.300,00	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.580.235.926,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		5.688.873.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5.650.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		5.280.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 % 100 % 50 %	14.320.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)	-	66.433.268,00	
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	4.570.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		11.433.268,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase Pemenuhan Layanan Administasi Umum di Perangkat Daerah	100 %	172.593.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)	-	456.832.360,00	
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	107.823.248,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		337.767.326,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	4.570.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		36.565.034,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	60.200.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	421.510.770,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)	-	2.310.000.000,00	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	207.974.760,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		1.980.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.536.010,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	75 %	136.760.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)	-	234.135.000,00	
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 rd 4, 8 rd 2 Unit	113.890.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		157.135.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	22.870.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP DINDUKPENCAPIL (LAKI-LAKI = 33 ORANG, PEREMPUAN = 46 ORANG)		77.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan KK Persentase Penerbitan KIA Persentase Perekaman KTP-EL	100 % 65 % 99.50 %	550.515.150,00						-	475.310.550,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Layanan Pendaftaran Penduduk	5 Layanan	533.145.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	MASYARAKAT	-	400.037.550,00	
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	5.150.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	MASYARAKAT		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah (Provinsi/Kabupaten)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen	500.845.150,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	MASYARAKAT		272.778.550,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk											
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	27.150.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	MASYARAKAT		121.759.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yang terstandarisasi	5 Layanan	17.370.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	MASYARAKAT	-	75.273.000,00	
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan											
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	17.370.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	MASYARAKAT		75.273.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	70 % 100,00 % 99,00 %	68.550.000,00						-	256.778.500,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Layanan Pencatatan Sipil	10 Layanan	68.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	MASYARAKAT	-	256.778.500,00	
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil											
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	10 Layanan	68.550.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	MASYARAKAT		256.778.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Instansi yang melakukan PKS Pemanfaatan Data	20 OPD	38.300.000,00						-	121.932.761,00	
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Instansi yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)	16 OPD	38.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	MASYARAKAT	-	121.932.761,00	
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	27.150.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	MASYARAKAT		81.186.022,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan											
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8 Dokumen	11.150.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	MASYARAKAT		40.746.739,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							J U M L A H	**5.997.525.094,00**								**9.705.139.180,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			7.860.170.247,00							10.123.339.615,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.860.170.247,00							10.123.339.615,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			7.860.170.247,00							10.123.339.615,00	
1	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	26,52 13,50 0% 67,00 4,5 100%	5.774.382.568,00					-	5.311.590.523,00	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 % 100 %	7.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)	-	7.500.000,00	
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen Laporan	7.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)		7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	5.011.051.841,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)	-	3.946.409.520,00	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	5.003.551.841,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)		3.938.909.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40 Dokumen Laporan	7.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)		7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	50 % 100 % 100 %	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114(57 laki-laki dan 57bperempuan)	-	59.306.370,00	
	2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114(57 laki-laki dan 57bperempuan)		59.306.370,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	150.895.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 Laki-laki/ 57 Perempuan)	-	246.978.959,00	
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	137.848.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 Laki-laki/ 57 Perempuan)		153.718.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	13.047.800,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 Laki-laki/ 57 Perempuan)		93.260.959,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100 %	38.194.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)	-	48.994.350,00	
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	18.244.350,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)		18.244.350,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19.950.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)		30.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	394.110.577,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)	-	747.580.942,00	
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	264.825.415,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)		540.034.411,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	98.999.250,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)		95.216.212,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.285.912,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)		112.330.319,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	162.880.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)	-	254.820.382,00	
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	146.260.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)		180.475.977,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	16.620.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 114 orang (57 laki-laki dan 57 Perempuan)		74.344.405,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Desa yang Tertata Wilayahnya	41,94	26.500.000,00						-	55.368.351,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Tertata dengan baik	100 %	26.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan Sektor Ekonomi Unggulan, Industri, dan Pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa	-	55.368.351,00	
	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa											
							Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa	16.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan Sektor Ekonomi Unggulan, Industri, dan Pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		33.725.991,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan Sektor Ekonomi Unggulan, Industri, dan Pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		21.642.360,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi yang Baik Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik	42% 100%	1.599.180.379,00						-	1.664.172.959,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Desa yang Akuntabel Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desanya Baik Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Membangun Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	1.599.180.379,0			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa	-	1.664.172.959,00	
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	62 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		36.771.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	62 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		16.131.273,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	62 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		11.556.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	62 Dokumen	1.445.280.830,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		1.340.631.169,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	62 Orang	13.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		21.306.168,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	62 Laporan	13.894.360,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		26.265.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	62 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		42.074.912,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	62 Dokumen	20.775.965,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		39.397.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa											
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	62 Dokumen	7.046.310,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		17.317.735,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	62 Dokumen	12.376.510,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		32.199.232,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD											
							Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	62 Orang	12.250.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		33.245.370,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan											
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	8 Dokumen	27.806.404,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pemerintah Desa		47.277.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	100 %	460.107.300,00						-	3.092.207.782,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Lembaga Desa/Kelurahan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan/Dibina Persentase Fasilitasi Desa yang Memiliki Inovasi Teknologi Tepat Guna	100 % 100 % 70 %	460.107.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Lembaga Kemasyarakatan Desa	-	3.092.207.782,00	
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	10.616.980,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Lembaga Kemasyarakatan Desa		2.174.774.752,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	28.850.160,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Lembaga Kemasyarakatan Desa		53.845.351,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	62 Dokumen	414.510.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Lembaga Kemasyarakatan Desa		839.566.545,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing											
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	62 Keluarga	6.130.160,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Lembaga Kemasyarakatan Desa		24.021.134,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							J U M L A H		**7.860.170.247,00**							**10.123.339.615,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Perhubungan			11.645.656.664,00							24.355.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.645.656.664,00							24.355.000.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			11.645.656.664,00							24.355.000.000,00	
1	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	28 18 0 72 4 100 %	5.424.301.336,00						-	9.490.000.000,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar, Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 %	6.034.750,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	-	100.000.000,00	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	6.034.750,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	4.544.489.085,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	-	6.115.000.000,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4.535.793.945,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		6.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.454.250,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	6.240.890,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap, Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian, Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	49.138.150,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	-	545.000.000,00	
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4.388.150,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	35.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100 %	137.785.560,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	-	300.000.000,00	
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	137.785.560,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	75 %	7.143.750,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	-	45.000.000,00	
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	7.143.750,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	356.620.041,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	-	1.715.000.000,00	
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	244.383.797,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.236.244,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		235.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	85 %	323.090.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	-	670.000.000,00	
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	256.490.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		525.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	10.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	56.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Wilayah yang terlayani angkutan umum Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	77 % 85 %	6.221.355.328,00						-	14.865.000.000,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Jalan	1500 unit	5.777.355.328,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	-	14.000.000.000,00	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Unit	210.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4077 Unit	5.567.355.328,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		12.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	85 %	144.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	-	150.000.000,00	
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)											
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	144.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Diuji Secara Berkala	99 %	110.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	-	320.000.000,00	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2000 Unit	88.850.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	21.150.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Laporan	80.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	-	250.000.000,00	
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin yang Tersusun	1 Dokumen	30.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	-	45.000.000,00	
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 Laporan	80.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	-	100.000.000,00	
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
								J U M L A H	**11.645.656.664,00**							**24.355.000.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			8.729.143.855,00							8.018.121.065,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.729.143.855,00							8.018.121.065,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.517.878.855,00							7.882.198.975,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	30,00 13,50 0,00% 72,00 4,10 100,00%	5.358.293.855,00						-	5.502.623.955,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar. Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar.	100,00% 100,00%	14.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	66.100.000,00	
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	14.900.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		66.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100,00%	4.435.850.719,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	4.120.257.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4.435.850.719,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		4.120.257.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100,00% 100,00% 100,00%	55.174.926,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	50.350.000,00	
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		9.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	45.424.926,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		40.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah.	100,00%	266.843.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	357.835.160,00	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	266.843.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		357.835.160,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	4,31%	50.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	0,00	
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.450.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100,00%	228.035.210,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	671.852.655,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	81.580.260,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		421.800.435,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140.690.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		173.150.450,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.764.950,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		76.901.770,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	75,00%	307.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	236.229.140,00	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	113.890.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		174.657.140,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	42.460.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		36.572.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.690.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	95,00	983.540.000,00						-	280.125.000,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disampaikan melalui media Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti Persentase Informasi dan dokumentasi yang dikelola Persentase sapras pendukung informasi publik yang tersedia Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	983.540.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat	-	280.125.000,00	
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik											
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	92.700.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat		270.125.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik											
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	70 Media	890.840.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SPLP pada Cakupan Layanan SPBE Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	100,00% 100,00%	2.176.045.000,00						-	2.099.450.020,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Domain Layanan SPBE Nilai Domain Tata Kelola SPBE Persentase Ketersediaan Infrstruktur TIK dalam kondisi baik Nilai domain kebijakan internal	2.65 2.65 95,00% 2.65	2.176.045.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat	-	2.099.450.020,00	
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota											
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	1.840.960.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat		2.089.450.020,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan											
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Aplikasi	335.085.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			30.900.000,00							10.000.000,00	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang terintegrasi	100,00 %	30.900.000,00						-	10.000.000,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	100,00% 100,00%	30.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	10.000.000,00	
	2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral											
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	68 Orang	30.900.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			180.365.000,00							125.922.090,00	
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI	1	180.365.000,00						-	125.922.090,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Indeks KAMI Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi Nilai Teknologi Keamanan Informasi Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1 Kematangan 1 Nilai 1 Nilai 100,00%	180.365.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	125.922.090,00	
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	120.690.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	34 Perangkat Daerah	59.675.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		115.922.090,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
								J U M L A H	**8.729.143.855,00**							**8.018.121.065,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan			6.727.745.322,00							10.501.233.070,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.727.745.322,00							10.501.233.070,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			621.161.860,00							856.873.985,00	
1	**2**	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**	**50%**	**9.895.650,00**						-	**56.444.000,00**	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi	56,87 %	9.895.650,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMKM/Koperasi	-	56.444.000,00	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha	9.895.650,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMKM/Koperasi		56.444.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**2**	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	**50 %**	**6.129.375,00**						-	**36.139.085,00**	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian terhadap kesehatan koperasi	50,00 %	6.129.375,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMKM/Koperasi	-	36.139.085,00	
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	21 Unit Usaha	6.129.375,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMKM/Koperasi		36.139.085,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	**2**	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM koperasi yang mempunyai kompetensi**	**1,46 %**	**40.000.000,00**						-	**242.771.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Memiliki Pemahaman dan Pengetahuan dalam Pengelolaan koperasi	100 %	40.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMKM/Koperasi	-	242.771.000,00	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi											
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	70 Orang	40.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMKM/Koperasi		242.771.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	**2**	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha**	**3,76 %**	**47.449.375,00**						**-**	**114.669.900,00**	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.76 %	47.449.375			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMKM/Koperasi	-	114.669.900,00	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro											
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	7 Unit Usaha	7.449.375,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMKM/Koperasi		16.222.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan											

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	70 Orang	40.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMKM/Koperasi		98.447.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5	**2**	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro Naik Kelas**	**15,27 %**	**517.687.460,00**						-	**406.850.000,00**	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Modal Usaha dan Omset UMKM yang meningkat	69 %	517.687.460,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMKM/Koperasi	-	406.850.000,00	
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro												
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	84 Unit Usaha	517.687.460,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMKM/Koperasi		406.850.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			6.106.583.462,00								9.644.359.085,00	
6	**2**	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah** **Nilai kinerja pelaporan Perangkat Daerah** **Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik** **Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah** **Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI** **Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**26,47** **10,45** **78,00** **65,15** **0,00** **3,70**	**5.741.462.782,00**						-	**8.801.615.365,00**	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100,00%	7.352.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	23.339.800,00	
							Presentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100,00%										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.352.750,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		23.339.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	5.007.992.225,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	6.893.769.731,00	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 (23 LK / 35 PR) Orang/bulan	5.000.494.975	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		6.879.382.831,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	7.497.250,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		14.386.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap	100 %	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	19.965.000,00	
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		19.965.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	168.722.742,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	355.741.729,00	
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	164.091.417,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		318.851.249,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	4.631.325,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		36.890.480,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	15 %	8.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	82.233.140,00	
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		82.233.140,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	374.465.065,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1.137.956.875,00	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	129.408.165,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		909.742.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	236.230.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		143.466.125,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.826.900,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		84.748.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	164.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	288.609.090,00	
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 (14R2/4R4) Unit	113.430.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		177.371.150,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	30.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		66.439.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.650.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		44.798.820,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7	**2**	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Promosi Investasi**	**100 %**	**45.084.360,00**						-	**101.040.940,00**	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi Daerah	2 kali	45.084.360,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMK/NON UMK	-	101.040.940,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.084.360,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMK/NON UMK		101.040.940,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8	**2**	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**IKM Bidang Pelayanan Perizinan**	**90,00 %**	**224.608.340,00**						-	**631.908.090,00**	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan perizinan yang diselesaikan sesuai standar waktu	100 %	224.608.340,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha	-	631.908.090,00	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	218.823.920,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha		617.360.370,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	48 Pelaku Usaha	5.784.420,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha		14.547.720,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
9	**2**	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah**	**100 %**	**85.000.000,00**						**-**	**91.025.220,00**	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKPM yang diselesaikan	90 %	85.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMK/NON UMK	-	91.025.220,00	
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal											
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	85.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha UMK/NON UMK		91.025.220,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
10	**2**	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola**	**100 %**	**10.427.980,00**						**-**	**18.769.470,00**	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi online	100 %	10.427.980,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	18.769.470,00	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	10.427.980,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		18.769.470,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	J U M L A H				**6.727.745.322,00**							**10.501.233.070,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			7.934.960.326,00							8.173.594.304,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.836.435.114,00							6.754.134.644,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			6.836.435.114,00							6.754.134.644,00	
1	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	70 17,15 100 % 4 0 % 26,75	5.549.685.114,00						-	5.717.438.234,00	
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 % 100 %	9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinparbud Kab. Bangka (L = 32 Orang / P = 46 Orang)	-	20.500.000,00	
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinparbud Kab. Bangka (L = 32 Orang / P = 46 Orang)		10.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinparbud Kab. Bangka (L = 32 Orang / P = 46 Orang)		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	5.063.564.999,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinparbud Kab. Bangka (L = 32 Orang / P = 46 Orang)	-	5.141.148.081,00	
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	5.057.564.999,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinparbud Kab. Bangka (L = 32 Orang / P = 46 Orang)		5.121.148.081,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	3.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinparbud Kab. Bangka (L = 32 Orang / P = 46 Orang)		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinparbud Kab. Bangka (L = 32 Orang / P = 46 Orang)		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 % 100 % 50 %	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinparbud (L = 32 Orang / P = 46 Orang)	-	9.750.000,00	
	2	22	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket (pakaian olahraga 16 stel)	9.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinparbud (L = 32 Orang / P = 46 Orang)		9.750.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	128.520.980,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinparbud (L = 32 Orang / P = 46 Orang)	-	181.500.000,00	
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen	128.520.980,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinparbud (L = 32 Orang / P = 46 Orang)		181.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	209.423.235,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka	-	224.140.153,00	
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	85.913.235,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka		92.140.153,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka		82.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.510.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka		49.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	129.425.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka	-	140.400.000,00	
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	78.560.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka		82.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50.865.900,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka		58.400.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Indeks Pengembangan Budaya Indeks Pemanfaatan Budaya	75,70 73,70	916.116.900,00						-	629.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Objek Budaya yang Diinventarisir % Objek Budaya yang Direstorasi % Budaya yang Dilestarikan	78,00 % 75 % 81,30 %	421.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Adat, Seniman dan Budayawan, Lembaga Adat dan Lembaga Seni Budaya	-	495.900.000,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan											
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	19 Objek	421.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Adat, Seniman dan Budayawan, Lembaga Adat dan Lembaga Seni Budaya		495.900.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Kelompok Seni yang Berprestasi % Seni yang Dilestarikan	82,30 % 82,00 %	495.116.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Adat, Seniman dan Budayawan, Lembaga Adat dan Lembaga Seni Budaya	-	133.100.000,00	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya											
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	495.116.900,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Adat, Seniman dan Budayawan, Lembaga Adat dan Lembaga Seni Budaya		133.100.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Indeks Perlindungan Budaya	74,43	370.633.100,00						-	407.696.410,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	% Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	62,41 %	370.633.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Objek Kebudayaan dan SDM lembaga, dan pranata kebudayaan	-	407.696.410,00	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya											
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	13 Objek	370.633.100,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Objek Kebudayaan dan SDM lembaga, dan pranata kebudayaan		407.696.410,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.098.525.212,00							1.419.459.660,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.098.525.212,00							1.419.459.660,00	
4	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks Destinasi Pariwisata	77,8	338.408.925,00						-	408.359.660,00	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan Persentase Penilaian Wisatawan terhadap Atraksi Pariwisata	88 % 83 %	159.908.925,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Objek Daya tarik wisata Kabupaten Bangka	-	259.859.660,00	
	3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	6 Lokasi	159.908.925,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Objek Daya tarik wisata Kabupaten Bangka		259.859.660,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar Persentase Sarana yang Memenuhi Standar	77,12 % 54,11 %	178.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Objek Daya tarik wisata Kabupaten Bangka	-	148.500.000,00	
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Unit	178.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Objek Daya tarik wisata Kabupaten Bangka		148.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Indeks Pemasaran Pariwisata	65	671.016.287,00						-	757.000.000,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Ketertarikan atas Produk Wisata Persentase Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif Persentase Tindakan atas Produk Wisata	79.93 % 75,05 % 75,63 %	671.016.287,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Semua jenis wisatawan dan Objek Daya tarik wisata Kabupaten Bangka	-	757.000.000,00	
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	591.246.287,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Semua jenis wisatawan dan Objek Daya tarik wisata Kabupaten Bangka		647.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	79.770.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Semua jenis wisatawan dan Objek Daya tarik wisata Kabupaten Bangka		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
6	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Indeks Kemitraan Pariwisata	79	89.100.000,00						-	254.100.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Desa Wisata yang Atraktif Persentase Peningkatan Kelompok Sadar Wisata yang Aktif Persentase Peningkatan Serifikat Kompetensi Bidang Pariwisata Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	90,12 % 91,67 % 79,77 % 80,23 %	89.100.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata	-	254.100.000,00	
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif											
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	23.100.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata		231.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata											
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	2 Orang	55.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata		12.100.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	11.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata		11.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			J U M L A H	**7.934.960.326,00**								**8.173.594.304,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			4.903.643.122,00							6.970.800.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN			4.903.643.122,00							6.970.800.000,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			4.735.810.622,00							6.519.550.000,00	
1	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	26,00 13,79 0% 69,00 4,00 100%	4.462.035.637,00						-	5.986.050.000,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 % 100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka	-	58.000.000,00	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.600.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		33.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.400.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	3.785.139.797,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka	-	4.138.800.000,00	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/14 bulan (1 Orang/bulan	3.780.139.797,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		4.121.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		17.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap. Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	100 % 100 % 19,35 %	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka	-	9.750.000,00	
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		9.750.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di Perangkat Daerah	100 %	125.875.115,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka	-	165.000.000,00	
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	125.875.115,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		165.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	4,82 %	171.009.765,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka	-	260.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	73.530.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		195.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	97.479.765,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	272.592.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka	-	1.132.500.000,00	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	113.459.075,00	Kab. Bangka,	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi	Memperkuat sistem	Dinas Kearsipan dan		825.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.180.135,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		82.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.953.720,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		225.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	7,32 %	87.668.030,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka	-	222.000.000,00	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit (3 unit Kenda Unit	76.368.030,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		190.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	11.300.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		32.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN	Tingkat Kepuasan Pemustaka	70,00 %	273.774.985,00						-	533.500.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Persentase Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan yang Berkualifikasi Sesuai Standar. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Satuan Pendidikan yang dibina Persentase Pembinaan Perpustakaan Khusus di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional	75,00 % 100,00 % 4,25 : 1 77,73 % 66,67 %	199.781.920,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Bangka	-	408.000.000,00	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan											
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	192 Perpustakaan	22.503.460,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Bangka		35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perpustakaan yang	1	35.000.000,00	Kab. Bangka,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Meningkatkan sumber	Perpustakaan Tingkat		90.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	12.003.460,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Bangka		20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 orang (10 laki2, Orang	15.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Bangka		33.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan											
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	21500 Eksemplar	55.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Bangka		160.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik											
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	60.275.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Bangka		70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca	Persentase Satuan Layanan	54,35 %	73.993.065,00			Memperkuat	Meningkatkan sumber	Pemustaka	-	125.500.000,00	
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	25 Perpustakaan	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pemustaka		25.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	24 Orang	45.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pemustaka		82.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat											
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	40 Lokus	18.993.065,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya, dan berbudaya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pemustaka		17.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			167.832.500,00							451.250.000,00	
3	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Nilai Aspek Pengelolaan	50 %	167.832.500,00						-	451.250.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis Daerah Yang Terpelihara baik	70 %	61.982.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka	-	221.250.000,00	
							Persentase Arsip Dinamis inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya dibawah 10 th yang terdata dan tertata baik	70 %								
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis											
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2500 Berkas	17.220.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2500 Berkas	23.312.500,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		130.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	21.450.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		50.750.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah	Persentase Ruang Depot	50,50%	45.850.000,00			Memperkuat reformasi	Memperkuat sistem	Dinas Kearsipan dan	-	82.500.000,00	
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis											
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	200 Arsip	45.850.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		82.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan	Persentase Perangkat	45,55%	60.000.000,00			Memperkuat reformasi	Memperkuat sistem	Dinas Kearsipan dan	-	147.500.000,00	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN											
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	250 Pengguna	28.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		79.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	32.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka		68.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
							J U M L A H	**4.903.643.122,00**								**6.970.800.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Perikanan			7.346.498.503,00							8.673.559.500,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.346.498.503,00							8.673.559.500,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.346.498.503,00							8.673.559.500,00	
1	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat daerah dalam Kondisi Baik Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%) Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	28,65 4,25 60,85 72,50 0 11.05	5.838.315.303,00						-	6.880.259.500,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%) Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai Standar (%)	100 % 100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16, Perempuan 21)	-	95.000.000,00	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16, Perempuan 21)		95.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang Sesuai Standar (%)	100 %	5.214.287.132,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16, Perempuan 21)	-	4.743.059.500,00	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	37 (19 Laki-Laki dan 18 Perempuan)	5.209.287.132,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16, Perempuan 21)		4.725.559.500,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16, Perempuan 21)		17.500.000,00	DINAS PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%) Persentase Pegawai yang Menggunakan Atribut Lengkap (%) Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	100 % 100 % 10,81 %	42.595.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan(Laki-Laki 16, Perempuan 21)	-	124.500.000,00	
	3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan(Laki-Laki 16, Perempuan 21)		24.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12 Dokumen	7.395.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan(Laki-Laki 16, Perempuan 21)		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	25.450.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan(Laki-Laki 16, Perempuan 21)		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100 %	200.559.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan(Laki-Laki 16, Perempuan 21)	-	380.000.000,00	
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	187.509.240,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan(Laki-Laki 16, Perempuan 21)		355.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	13.050.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan(Laki-Laki 16, Perempuan 21)		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	71,86 %	19.049.376,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16 Perempuan 21)	-	69.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	19.049.376,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16 Perempuan 21)		69.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	81,78 %	248.744.555,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16, Perempuan 17)	-	1.204.000.000,00	
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	158.645.780,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16, Perempuan 17)		955.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	71.050.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16, Perempuan 17)		94.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19.048.775,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16, Perempuan 17)		155.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	80,00 %	103.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16, Perempuan 21)	-	264.700.000,00	
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit Mobil, 24 Unit Motor	88.420.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16, Perempuan 21)		212.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	14.660.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Perikanan (Laki-Laki 16, Perempuan 21)		52.700.000,00	DINAS PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Nelayan yang Dilayani Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan	83,00 1,20 24,00	798.694.800,00						-	600.000.000,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nelayan/KUB yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Tangkap Persentase Nelayan/KUB yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	2,55 % 21,45 %	15.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	-	50.000.000,00	
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan											
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Kelompok Usaha Bersama (KUB)		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan/KUB yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan/Pembiayaan, Kemitraan Usaha (%) Persentase KUB yang Terbentuk (%) Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan (%) Persentase KUB yang Dibina (%)	0,03 % 0,77 % 1,20 % 100 %	771.804.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	-	440.000.000,00	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil											
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	756.804.800,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Kelompok Usaha Bersama (KUB)		355.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil											
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3 Kelompok	15.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Kelompok Usaha Bersama (KUB)		85.000.000,00	DINAS PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Terlayani (%)	100 %	11.890.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	-	110.000.000,00	
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)											
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 Layanan	11.890.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Kelompok Usaha Bersama (KUB)		110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan (%) Persentase Pembudidaya yang Dilayani Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih (%)	9,62 83 25,42	504.903.200,00						-	725.000.000,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan (%) Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan dan Pembiayaan Usaha Persentase POKDAKAN yang Dibina Persentase POKDAKAN yang Naik Kelas Persentase POKDAKAN yang Terbentuk (%)	16,95 % 5,08 % 100 % 1,69 % 5,08 %	320.000.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	80.000.000,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil											
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	1 Kelompok	305.735.100,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Kelompok Pembudidaya Ikan		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil											
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3 Kelompok	14.265.100,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Kelompok Pembudidaya Ikan		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pembididaya Ikan yang Dibina Pesentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Pemanfaatan sir (%) Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Budidaya Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Budidaya Persante Pambudidaya Ikan yang Dibina Data Valid Perikanan Budidaya	1,69 % 8,47 % 6.78 % 2.84 % 1,69 % 4 Dokumen	184.903.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	645.000.000,00	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	169.903.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Kelompok Pembudidaya Ikan		605.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat											
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	8 Unit	15.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Kelompok Pembudidaya Ikan		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidaya ikan yang Diawasi	100 100	40.000.000,00						-	205.000.000,00	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang Taat Aturan (%) Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Taat Aturan (%)	100 % 100 %	40.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha	-	205.000.000,00	
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota											
							Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	35 Pelaku Usaha	40.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha		205.000.000,00	DINAS PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan (%) Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100 5 100	164.585.200,00						-	263.300.000,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pengolahan Pemasar Hasil Perikanan yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)	2 %	27.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha	-	65.000.000,00	
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko											
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1 Dokumen	27.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha		65.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pengolah dan Pemasar yang Telah Mengikuti Pelatihan (%)	0,05 %	137.085.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha	-	198.300.000,00	
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko											
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	137.085.200,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha		198.300.000,00	DINAS PERIKANAN
								J U M L A H	**7.346.498.503,00**							**8.673.559.500,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah (Provinsi/Kabupaten)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Inspektorat Daerah			15.362.280.657,00							15.643.000.000,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			15.362.280.657,00							15.643.000.000,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			15.362.280.657,00							15.643.000.000,00	
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	30,00 100 0,00 4,00 67,00 13,50	14.300.530.657,00						-	14.542.000.000,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 Persen 100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	102.000.000,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		51.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		51.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 Persen	11.075.861.114,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	11.040.000.000,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	11.070.861.114,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		11.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100% Persen 100% Persen 50% Persen	967.710.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	970.000.000,00	
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	957.960.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		960.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100 Persen	682.310.328,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	450.000.000,00	
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	682.310.328,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	3,93 Persen	966.107.595,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	1.000.000.000,00	
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	428.540.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		430.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	81 Unit	409.367.595,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		410.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	128.200.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		160.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 Persen	353.841.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	628.000.000,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	173.678.715,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		383.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	137.727.725,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		140.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.435.180,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		105.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	12,90 Persen	244.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)	-	352.000.000,00	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	167.090.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		170.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	25.960.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	51.650.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Inspektorat Bangka (Laki-laki 18 Orang, Perempuan 24 Orang)		152.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Hasil Kapabilitas APIP	Level 3	487.165.000,00						-	517.000.000,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	100%Pemantauan Persen	356.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung	-	382.000.000,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	23.970.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	11 Laporan	92.440.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		95.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja											
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	88.170.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan											
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	61.220.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	10 Laporan	26.050.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal											
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	19.650.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	45.450.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan tujuan tertentu	100% Persen	130.215.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, APH, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung	-	135.000.000,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah											
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	30.450.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, APH, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	99.765.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah, 62 Desa, BUMD, APH, BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Provinsi Bangka Belitung		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Level 3	574.585.000,00						-	584.000.000,00	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Jumlah Wajib LHKPN dan LHKAS yang telah melaporkan harta kekayaan Persentase Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penilaian mandiri RB Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	100% Persen 100% Persen 100% Persen 100% Persen	574.585.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah dan APH	-	584.000.000,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 perangkat daerah	189.650.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah dan APH		190.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 perangkat daerah	28.510.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah dan APH		32.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi											
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	328.875.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah dan APH		330.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 perangkat daerah	27.550.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	34 Perangkat Daerah dan APH		32.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							J U M L A H	**15.362.280.657,00**								**15.643.000.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			6.943.644.080,00							7.301.053.094,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.943.644.080,00							7.301.053.094,00	
	5	01				PERENCANAAN			6.722.024.080,00							7.057.271.094,00	
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	30 Nilai 15 Nilai 0 Persen 79,54 Indeks 4 Indeks 100 Persen	5.792.866.080,00						-	6.139.748.294,00	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 Persen	4.417.023.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	-	4.808.893.706,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/14 bulan	4.417.023.100,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)		4.808.893.706,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 Persen 100 Persen 50 Persen	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	-	56.450.000,00	
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)		56.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 Persen	425.640.423,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	-	468.204.465,00	
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350.040.423,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)		385.044.465,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	75.600.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)		83.160.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	4.56 Persen	523.334.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	-	113.813.940,00	
	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	428.490.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	94.844.950,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)		113.813.940,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 Persen	192.248.767,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	-	523.044.659,00	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	95.456.535,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)		371.826.680,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.871.100,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)		93.358.210,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.921.132,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)		57.859.769,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	75 Persen	224.868.840,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	-	169.341.524,00	
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	131.598.840,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)		145.405.524,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	21.760.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)		23.936.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	71.510.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah Indeks Pemenuhan Data Pembangunan Daerah Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100 Indeks 100 Indeks 100 Persen	776.408.000,00						-	702.802.800,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100 Persen 100 Persen 100 Persen	483.260.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	-	372.090.000,00	
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah											
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	24.150.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder		26.565.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya											
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	54.300.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder		59.730.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik											
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	39.060.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder		31.248.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	28.170.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder		30.987.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota											
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	114.590.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder		107.631.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	222.990.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder		115.929.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data tabular bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase ketersediaan data tabular bidang pemerintahan dan sumber daya manusia Persentase ketersediaan data tabular bidang ekonomi dan SDA	100 Persen 100 Persen 100 Persen	115.180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	-	134.948.000,00	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	59.700.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder		71.170.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	68 Orang	55.480.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder		63.778.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan Persentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100 Persen 100 Persen	177.968.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	-	195.764.800,00	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	136 Laporan	96.528.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder		106.180.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	81.440.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder		89.584.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah	100 Indeks	152.750.000,00						-	214.720.000,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	100 Persen	55.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	-	76.560.000,00	
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	55.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder		76.560.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	100 Persen	37.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bangka	-	56.430.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	37.050.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bangka		56.430.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	100 Persen	60.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bangka	-	81.730.000,00	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	60.200.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bangka		81.730.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			221.620.000,00							243.782.000,00	
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Indeks Inovasi Daerah	100 Persen 90,21 Indeks	221.620.000,00						-	243.782.000,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Dokumen Penelitian/ Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	100 Persen	108.030.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	-	118.833.000,00	
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan											
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	108.030.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder		118.833.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang Diterapkan	100 Persen	113.590.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	-	124.949.000,00	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	113.590.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder		124.949.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				J U M L A H	**6.943.644.080,00**							**7.301.053.094,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			172.794.474.429,00							199.041.939.096,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			172.794.474.429,00							199.041.939.096,00	
	5	02				KEUANGAN			172.794.474.429,00							199.041.939.096,00	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	29,53 13,00 0,00% 72,00 5 80%	20.540.157.857,00						-	27.344.909.505,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelapor Kinerja yang Disusun Sesuai Standar Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar	100 % 100 %	12.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD	-	42.042.000,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	12.450.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD		42.042.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	17.480.360.442,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai BPPKAD	-	22.467.648.840,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang-12Bulan Orang/bulan	17.467.860.442,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai BPPKAD		22.437.618.840,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	12.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai BPPKAD		30.030.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100 % 10 % 100 %	24.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai BPPKAD	-	44.444.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 stel (L/K)/ 1 Pak Paket	9.900.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai BPPKAD		14.414.400,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai BPPKAD		30.030.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	349.729.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD	-	630.630.000,00	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	334.729.340,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD		600.600.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD		30.030.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	5 %	281.440.060,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD	-	235.872.000,00	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	281.440.060,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD		235.872.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	1.805.678.215,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD	-	2.939.288.265,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	954.301.975,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD		1.060.605.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	654.401.330,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD		600.600.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	196.974.910,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD		1.278.083.265,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	75 %	585.599.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD	-	984.984.000,00	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14roda4/60roda2 Unit	315.935.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD		540.540.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75/ paket Unit	187.564.800,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD		234.234.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1GBPPKAD/8GUPTD Unit	82.100.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD BPPKAD		210.210.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat waktu Persentase layanan penatausahaan perbendaharaan Daerah sesuai SOP Penyusunan dan penyampaian LKPD sesuai SAP tepat waktu Persentase layanan penunjang kewenangan pengelolaan keuangan Daerah yang tertangani Persentase layanan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah yang tertangani	100% 100% 100% 100% 100%	148.396.724.823,00						-	162.693.345.360,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Alokasi Anggaran Belanja APBD Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Mandatory Spending)	55 %	1.062.474.825,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kab.Bangka	-	1.483.482.000,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS											
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	115.527.850,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kab.Bangka		186.186.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	115.527.850,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kab.Bangka		186.186.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD											
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	325.373.375,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kab.Bangka		498.498.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD											
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	388.943.875,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kab.Bangka		498.498.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran											
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	117.101.875,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kab.Bangka		114.114.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer Persentase SP2D yang diterbitkan Tepat waktu Persentase Pemenuhan Anggaran Kas Terhadap Belanja Daerah	97 % 100 % 100 %	710.444.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka	-	1.742.613.600,00	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	86.931.810,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		420.420.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	136(34OPDx4Tw) Dokumen	229.193.850,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		498.498.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12Dokumen/12Bulan Dokumen	69.140.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		250.723.200,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	25.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		66.066.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12Laporan/12Bulan Laporan	62.353.450,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		300.300.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait											
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12Dokumen/12Bulan Dokumen	63.120.090,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		30.030.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan											
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	82.726.850,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		54.054.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	68(L/P) Orang	91.378.050,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		122.522.400,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Sesuai SAP	100 %	601.221.948,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka	-	1.125.524.400,00	
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		90.090.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran											
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12LB/4LT/2LS Laporan	111.477.268,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		258.258.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1DRPerda/1DRPerbup Dokumen	319.740.680,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		480.480.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD											
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	20.270.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		36.036.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah											
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	23.334.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		138.138.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	68(L/P) Orang	96.400.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		122.522.400,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Anggaran Yang dialokasikan untuk Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Yang Berlaku	100 %	145.862.477.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Pelaku Usaha, OPD Lingkup Kab.Bangka, Desa Lingkup Kab.Bangka	-	158.035.419.360,00	
	5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi											
							Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	250.690.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Pelaku Usaha, OPD Lingkup Kab.Bangka, Desa Lingkup Kab.Bangka		1.179.360,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan											
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	126.428.751.900,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Pelaku Usaha, OPD Lingkup Kab.Bangka, Desa Lingkup Kab.Bangka		142.997.400.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	8.217.187.300,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Pelaku Usaha, OPD Lingkup Kab.Bangka, Desa Lingkup Kab.Bangka		5.896.800.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.965.848.300,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Pelaku Usaha, OPD Lingkup Kab.Bangka, Desa Lingkup Kab.Bangka		9.140.040.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Data Informasi Keuangan Daerah tersistematis berbasis IT	100 %	160.106.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka	-	306.306.000,00	
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	68(L/P) Orang	160.106.450,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		306.306.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Kinerja Pengelolaan BMD Persentase Penyusunan dan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100% 100 %	1.230.688.200,00						-	3.219.216.000,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah Disusun Tepat Waktu Persentase Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola yang dilakukan sesuai peraturan Persentase Barang Milik Daerah yang dilakukan pengamanan Persentase Laporaan Barang Pengguna (PD) yang disusun dan disampaikanTepat waktu	100 % 100 % 39,00 % 100 %	1.230.688.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka	-	3.219.216.000,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga											
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	69.790.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		210.210.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	47.443.200,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		54.054.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	93.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		102.102.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	73.310.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		611.520.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	287.235.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		282.282.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	105.675.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		1.406.496.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	58.350.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		90.090.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	495.385.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	OPD Lingkup Kabupaten Bangka		462.462.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	100 %	2.626.903.549,00						-	5.784.468.231,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	7,5 %	2.626.903.549,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Wajib Pajak Daerah	-	5.784.468.231,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	27.303.930,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Wajib Pajak Daerah		42.424.200,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	119.437.450,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Wajib Pajak Daerah		78.787.800,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	218.150.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Wajib Pajak Daerah		151.515.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	75 Unit	418.880.200,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Wajib Pajak Daerah		242.424.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	515.205.120,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Wajib Pajak Daerah		3.057.600.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	103.390.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Wajib Pajak Daerah		214.032.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)											
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10000 Obyek Pajak	107.821.954,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Wajib Pajak Daerah		151.515.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah											
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	119.025.400,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Wajib Pajak Daerah		428.064.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	720.939.495,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Wajib Pajak Daerah		1.012.046.031,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	61.050.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Wajib Pajak Daerah		66.666.600,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	168.200.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Wajib Pajak Daerah		272.727.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	47.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat/Wajib Pajak Daerah		66.666.600,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				J U M L A H	**172.794.474.429,00**							**199.041.939.096,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia			8.317.689.537,00							10.939.489.465,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.317.689.537,00							10.939.489.465,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN			7.893.091.537,00							10.359.757.323,00	
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan perangkat daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	25,00 13,00 0% 100,00 4 100,00	6.959.906.537,00						-	8.939.911.423,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 persentase 100 persentase	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KABUPATEN BANGKA (66 ORANG L=30 P=36)	-	75.776.689,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KABUPATEN BANGKA (66 ORANG L=30 P=36)		50.362.520,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KABUPATEN BANGKA (66 ORANG L=30 P=36)		25.414.169,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar	100 persentase	6.218.535.433,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup BKPSDMD	-	7.080.749.500,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54/14(25L/29P) Orang/bulan	6.218.535.433,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup BKPSDMD		7.080.749.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100 persentase 100 persentase 100 persentase	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup BKPSDMD	-	25.662.450,00	
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup BKPSDMD		25.662.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100 persentase	333.120.609,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KABUPATEN BANGKA (66 ORANG L=30 P=36)	-	422.230.861,00	
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	248.720.609,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KABUPATEN BANGKA (66 ORANG L=30 P=36)		367.594.511,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	84.400.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KABUPATEN BANGKA (66 ORANG L=30 P=36)		54.636.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 persentase	268.540.493,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KABUPATEN BANGKA (66 ORANG L=30 P=36)	-	1.134.451.373,00	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	176.227.873,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KABUPATEN BANGKA (66 ORANG L=30 P=36)		741.069.653,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63.674.440,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KABUPATEN BANGKA (66 ORANG L=30 P=36)		218.545.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.638.180,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KABUPATEN BANGKA (66 ORANG L=30 P=36)		174.836.320,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	20 persentase	114.960.002,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup BKPSDMD	-	201.040.550,00	
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2RD/3RE Unit	87.200.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup BKPSDMD		163.909.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	27.760.002,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup BKPSDMD		37.131.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Rencana kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan Persentase pengadaan ASN sesuai dengan Rencana Kebutuhan ASN Persentase Penempatan SDM sesuai standar kompetensi Persentase data kepegawaian yang Up to date, akurat, cepat, tepat Persentase Perangkat daerah dengan kinerja ASN sesuai ekspektasi Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS	100% 100,00% 74,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,49	933.185.000,00						-	1.419.845.900,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sesuai NSPK	100 persentase	199.690.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA	-	269.884.000,00	
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	77.180.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA		137.613.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	32.050.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA		68.271.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Laporan	90.460.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA		64.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN sesuai NSPK	100 persentase	170.435.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA	-	58.452.500,00	
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	170.435.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA		58.452.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Kebutuhan Organisasi	100 persentase	515.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA	-	921.509.400,00	
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN											
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	515.560.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA		921.509.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja apartur yang efektif sesuai ketentuan	100 persentase	47.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA	-	170.000.000,00	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	47.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA		170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			424.598.000,00							579.732.142,00	
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Dimensi Kompetensi ASN	35	424.598.000,00						-	579.732.142,00	
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100,00 persentase	424.598.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR KAB. BANGKA	-	579.732.142,00	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	424.598.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR KAB. BANGKA		579.732.142,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			J U M L A H		**8.317.689.537,00**							**10.939.489.465,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Bagian Keuangan dan Aset			**20.961.960.574,00**							**22.219.587.970,00**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**20.961.960.574,00**							**22.219.587.970,00**	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**20.961.960.574,00**							**22.219.587.970,00**	
1	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai kinerja perencanaan perangkat Daerah** **Nilai kinerja pelaporan perangkat Daerah** **Persentase Temuan pengelolaan Keuangan perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI** **Persentase Temuan pengelolaan Barang Milik daerah Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI** **Persentase BMD Perangkat daerah dalam Kondisi Baik**	**29,80** **12,75** **0,00%** **0,00%** **97,38**	**20.961.960.574,00**						**-**	**22.219.587.970,00**	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 % 100 %	40.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	41.872.500,00	
	4	*01*	*01*	*2.01*	*0001*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*6 Dokumen*	*15.000.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*15.750.000,00*	*BAGIAN KEUANGAN DAN ASET*
	4	*01*	*01*	*2.01*	*0004*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*4 Dokumen*	*15.170.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*15.758.500,00*	*BAGIAN KEUANGAN DAN ASET*
	4	*01*	*01*	*2.01*	*0006*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*12 Laporan*	*9.870.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*10.364.000,00*	*BAGIAN KEUANGAN DAN ASET*
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	19.075.434.254,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	20.241.434.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	*01*	*01*	*2.02*	*0001*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*299 Orang/bulan*	*19.020.194.254,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*20.183.054.000,00*	*BAGIAN KEUANGAN DAN ASET*
	4	*01*	*01*	*2.02*	*0003*	*Pelaksanaan Penatausahaan dan*											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*700 Dokumen*	*14.170.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*14.880.000,00*	*BAGIAN KEUANGAN DAN ASET*
	4	*01*	*01*	*2.02*	*0007*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*42 Laporan*	*41.070.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*43.500.000,00*	*BAGIAN KEUANGAN DAN ASET*
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset Setda yang disusun sesuai standar	100 %	140.604.920,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	147.636.000,00	
	4	*01*	*01*	*2.03*	*0001*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*2 Dokumen*	*30.000.000,00*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*31.500.000,00*	*BAGIAN KEUANGAN DAN ASET*
	4	*01*	*01*	*2.03*	*0006*	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*58 Laporan*	*110.604.920,00*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*116.136.000,00*	*BAGIAN KEUANGAN DAN ASET*
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kedinasan KDH/WKDH	100 %	1.705.881.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	1.788.645.470,00	
	4	*01*	*01*	*2.11*	*0001*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		*2 Orang/Bulan*	*1.153.991.400,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*1.211.690.970,00*	*BAGIAN KEUANGAN DAN ASET*
	4	*01*	*01*	*2.11*	*0002*	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	*1 Paket*	*50.450.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*52.972.500,00*	*BAGIAN KEUANGAN DAN ASET*
	4	*01*	*01*	*2.11*	*0003*	*Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*2 Orang*	*50.600.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*50.600.000,00*	*BAGIAN KEUANGAN DAN ASET*
	4	*01*	*01*	*2.11*	*0004*	*Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*											
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*2 Orang/Bulan*	*450.840.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*473.382.000,00*	*BAGIAN KEUANGAN DAN ASET*
						Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat			**3.820.189.489,00**							**4.011.198.962,00**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**3.820.189.489,00**							**4.011.198.962,00**	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**3.820.189.489,00**							**4.011.198.962,00**	
2	**4**	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rumusan kebijakan di bidang kesra dan kemasyarakatan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**	**100,00**	**3.820.189.489,00**						-	**4.011.198.962,00**	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	IKM terhadap fasilitasi pemberian bantuan hibah dan peringatan hari besar keagamaan Persentase usulan penerima dana hibah di bidang keagamaan dan kemasyarakatan sesuai kriteria	81,7 Nilai 100 %	3.820.189.489,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	4.011.198.962,00	
	4	*01*	*02*	*2.02*	*0001*	*Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*8 Dokumen*	*2.414.925.549,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA BAGI HASIL (DBH)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*2.535.671.826,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT*
	4	*01*	*02*	*2.02*	*0002*	*Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial*											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	*5 Dokumen*	*541.571.275,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*568.649.838,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT*
	4	*01*	*02*	*2.02*	*0003*	*Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat*											
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	*3 Dokumen*	*863.692.665,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA BAGI HASIL (DBH)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*906.877.298,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT*
						Bagian Administrasi Pemerintahan Umum			**154.651.160,00**							**155.765.620,00**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**154.651.160,00**							**155.765.620,00**	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**154.651.160,00**							**155.765.620,00**	
3	**4**	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**	**100,00**	**154.651.160,00**						**-**	**155.765.620,00**	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku Persentase kecamatan dengan kinerja baik Persentase rancangan kebijakan KSD, batas administrasi Kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang terselesaikan sesuai juknis	100 % 100 % 100 %	92.322.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	93.436.620,00	
	4	*01*	*02*	*2.01*	*0002*	*Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*3 Dokumen*	*22.289.200,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*23.403.660,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM*
	4	*01*	*02*	*2.01*	*0003*	*Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*3 Dokumen*	*70.032.960,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*70.032.960,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM*

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	*01*	*02*	*2.04*		*Fasilitasi Kerja Sama Daerah*	*Persentase kerjasama daerah yang memiliki manfaat dalam kebijakan pemerintah*	*100 %*	*62.329.000,00*			*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*	-	*62.329.000,00*	
	4	*01*	*02*	*2.04*	*0001*	*Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*4 Dokumen*	*62.329.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*62.329.000,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM*
						Bagian Hukum			**162.670.000,00**							**170.803.500,00**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**162.670.000,00**							**170.803.500,00**	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**162.670.000,00**							**170.803.500,00**	
4	**4**	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan** **Persentase permasalahan hukum dan HAM yang terselesaikan**	**100,00** **100,00**	**162.670.000,00**						-	**170.803.500,00**	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase draf produk hukum daerah yang siap untuk proses penetapan Persentase kasus/permasalahan hukum yang didampingi dan memenangkan perkara Persentase produk hukum daerah yang terkodefikasi dan terdokumentasi dengan baik	100 % 100 % 100 %	162.670.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	170.803.500,00	
	4	*01*	*02*	*2.03*	*0001*	*Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah*											
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	*30 Dokumen*	*84.380.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*88.599.000,00*	*BAGIAN HUKUM*
	4	*01*	*02*	*2.03*	*0002*	*Fasilitasi Bantuan Hukum*											
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	*1 Kasus*	*36.025.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*37.826.250,00*	*BAGIAN HUKUM*
	4	*01*	*02*	*2.03*	*0003*	*Pendokumentasian Produk Hukum dan*											
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	*30 Dokumen*	*42.265.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*44.378.250,00*	*BAGIAN HUKUM*
						Bagian Administrasi Perekonomian			**135.925.450,00**							**142.721.722,00**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**135.925.450,00**							**142.721.722,00**	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**135.925.450,00**							**142.721.722,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**4**	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**	**100,00**	**135.925.450,00**						-	**142.721.722,00**	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja baik Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro dan mikro yang ditindaklanjuti	50 % 100 %	135.925.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	142.721.722,00	
	4	*01*	*03*	*2.01*	*0001*	*Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*1 Dokumen*	*68.107.725,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*71.513.111,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN*
	4	*01*	*03*	*2.01*	*0002*	*Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*6 Laporan*	*67.817.725,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*71.208.611,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN*
						Bagian Organisasi			**100.297.021,00**							**105.311.006,00**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**100.297.021,00**							**105.311.006,00**	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**100.297.021,00**							**105.311.006,00**	
6	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase rumusan kebijakan di Bidang Kelembagaan** **Persentase rumusan Kebijakan di Bidang Ketata Laksanaan** **Persentase rumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan AKIP**	**100 %** **100 %** **100%**	**100.297.021,00**						-	**105.311.006,00**	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IKM minimal 80 Persentase Perangkat Daerah yang AKIP-nya dibina Persentase Perangkat Daerah dengan nilai rata-rata komponen pengungkit minimal 14 Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan organisasi minimal bernilai sedang	100 % 100 % 100 % 100 %	100.297.021,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	105.311.006,00	
	4	*01*	*01*	*2.13*	*0001*	*Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*											
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*1 Dokumen*	*30.497.863,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*32.023.000,00*	*BAGIAN ORGANISASI*
	4	*01*	*01*	*2.13*	*0002*	*Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		*1 Laporan*	*36.596.295,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*38.425.000,00*	*BAGIAN ORGANISASI*
	4	*01*	*01*	*2.13*	*0003*	*Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*											
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		*1 Dokumen*	*33.202.863,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*34.863.006,00*	*BAGIAN ORGANISASI*
						Bagian Administrasi Keprotokolan			**70.669.787,00**							**74.204.000,00**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**70.669.787,00**							**74.204.000,00**	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**70.669.787,00**							**74.204.000,00**	
7	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan keprotokolan KDH/WKDH sesuai SOP**	**100 %**	**70.669.787,00**						-	**74.204.000,00**	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase data/informasi kegiatan kedinasan yang dipublikasi Persentase acara kedinasan yg terlaksana melalui keprotokolan sesuai standar	100 % 100 %	70.669.787,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	74.204.000,00	
	4	*01*	*01*	*2.14*	*0001*	*Fasilitasi Keprotokolan*											
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		*12 Laporan*	*53.637.787,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*56.320.000,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI KEPROTOKOLAN*
	4	*01*	*01*	*2.14*	*0003*	*Pendokumentasian Tugas Pimpinan*											
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		*12 Laporan*	*17.032.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*17.884.000,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI KEPROTOKOLAN*
						Bagian Umum dan Rumah Tangga			**15.946.528.604,00**							**16.418.453.500,00**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**15.946.528.604,00**							**16.418.453.500,00**	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**15.946.528.604,00**							**16.418.453.500,00**	
8	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Profesionalitas ASN perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Pelayanan jasa Internal Perangkat Daerah**	**67,00** **4,00**	**15.946.528.604,00**						-	**16.418.453.500,00**	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persentase pegawai yang menggunakan atribut lengkap	100 % 31,53 % 100 %	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	10.237.500,00	
	4	*01*	*01*	*2.05*	*0002*	*Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	*1 Paket*	*9.750.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*10.237.500,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di Perangkat Daerah	100 %	3.128.524.323,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	3.284.951.000,00	
	4	*01*	*01*	*2.06*	*0009*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*12 Laporan*	*3.128.524.323,00*	*Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*3.284.951.000,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset Perangkat Daerah	5,71 %	510.651.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	150.484.000,00	
	4	*01*	*01*	*2.07*	*0001*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*1 Unit*	*367.719.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*405.000,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
	4	*01*	*01*	*2.07*	*0005*	*Pengadaan Mebel*											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*10 Unit*	*71.832.300,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*75.424.000,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
	4	*01*	*01*	*2.07*	*0006*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*15 Unit*	*71.100.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*74.655.000,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah	100 %	9.147.703.080,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	9.631.393.000,00	
	4	*01*	*01*	*2.08*	*0001*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*12 Laporan*	*281.110.375,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*300.416.000,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
	4	*01*	*01*	*2.08*	*0002*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*12 Laporan*	*1.733.377.116,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*1.841.100.000,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
	4	*01*	*01*	*2.08*	*0004*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*12 Laporan*	*7.133.215.589,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*7.489.877.000,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	2,70 %	1.852.820.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	1.979.453.000,00	
	4	*01*	*01*	*2.09*	*0002*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*130 Unit*	*1.103.360.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*1.158.528.000,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
	4	*01*	*01*	*2.09*	*0006*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*157 Unit*	*148.500.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*155.925.000,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
	4	*01*	*01*	*2.09*	*0009*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*34 Unit*	*600.960.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*665.000.000,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan RT KDH, WKDH, dan Sekretaris Daerah yang dipenuhi	100 %	1.297.079.901,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	1.361.935.000,00	
	4	*01*	*01*	*2.12*	*0001*	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah*											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	*1 Paket*	*640.847.326,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*672.890.000,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
	4	*01*	*01*	*2.12*	*0002*	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah*											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	*1 Paket*	*380.735.741,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*399.773.000,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
	4	*01*	*01*	*2.12*	*0003*	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah*											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	*1 Paket*	*275.496.834,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*289.272.000,00*	*BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA*
						Bagian Administrasi Pengadaan Barang Jasa			**230.808.904,00**							**239.697.000,00**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**230.808.904,00**							**239.697.000,00**	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**230.808.904,00**							**239.697.000,00**	
9	**4**	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase paket PBJ yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu**	**100,00**	**230.808.904,00**						-	**239.697.000,00**	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai SOP Persentase SDM PBJ yang mengikuti diklat PBJ Persentase tatakelola LPSE yang memenuhi standarisasi	100,00 100,00 100,00	230.808.904,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	239.697.000,00	
	4	*01*	*03*	*2.03*	*0001*	*Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*4 Dokumen*	*146.940.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*154.287.000,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG JASA*
	4	*01*	*03*	*2.03*	*0002*	*Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik*											
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*4 Dokumen*	*53.060.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*53.060.000,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG JASA*
	4	*01*	*03*	*2.03*	*0003*	*Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*2 Orang*	*30.808.904,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*32.350.000,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG JASA*
						Bagian Administrasi Pembangunan			**52.188.000,00**							**54.797.400,00**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**52.188.000,00**							**54.797.400,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**52.188.000,00**							**54.797.400,00**	
10	**4 01 03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rumusan kebijakan dibidang pembangunan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**	**100,00**	**52.188.000,00**						-	**54.797.400,00**	
	4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan pekerjaan fisik sesuai target Persentase Penyusunan Program Pembangunan Daerah yang difasilitasi	100,00 100,00	52.188.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka	-	54.797.400,00	
	4 01 03 2.02 0001	*Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan*											
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	*1 Dokumen*	*13.000.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*13.650.000,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*
	4 01 03 2.02 0002	*Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*											
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*4 Laporan*	*20.500.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*21.525.000,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*
	4 01 03 2.02 0003	*Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*											
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*12 Laporan*	*18.688.000,00*	*Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Aparatur Lingkup Setda Kab. Bangka*		*19.622.400,00*	*BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*
			J U M L A H	**41.635.888.989,00**								**43.592.540.680,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Sekretariat DPRD			54.450.065.089,00							71.979.587.224,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			54.450.065.089,00							71.979.587.224,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			54.450.065.089,00							71.979.587.224,00	
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik Persentase Layanan Administrasi Bagi DPRD	26,32 Nilai 11,18 Nilai 0 Persen 64,50 Nilai 4 Nilai 100 Persen 100 Persen	31.414.520.081,00						-	38.674.763.749,00	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 Persen	6.059.793.861,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah	-	5.480.754.000,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121/14 Orang/bulan	6.059.793.861,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah		5.480.754.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 Persen 100 Persen 42,86 Persen	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD	-	38.841.000,00	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD		38.841.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 Persen	1.102.525.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah	-	2.750.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	325.735.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah		220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	776.790.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah		2.530.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	13,58 Persen	121.212.680,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah	-	880.000.000,00	
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	22.200.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah		330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	99.012.680,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah		550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 Persen	1.139.892.640,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah	-	4.325.028.499,00	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	516.611.200,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah		2.754.034.536,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah		770.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	273.281.440,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah		800.993.963,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	2,42 Persen	525.230.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah	-	770.000.000,00	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	183.210.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah		330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	38.530.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah		220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	303.490.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah		220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diselenggarakan sesuai SOP	100 Persen	21.775.275.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD	-	23.990.140.250,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD											
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35/14 Orang/Bulan	21.304.930.900,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD		23.384.835.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	419.745.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD		429.305.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	50.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD		176.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Kebutuhan Ruman Tangga DPRD	100 Persen	680.840.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD	-	440.000.000,00	
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	680.840.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD		440.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Produk Hukum Daerah yang diselesaikan Tepat Waktu Presentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	100 Persen 100 Persen	23.035.545.008,00						-	33.304.823.475,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Layanan Legislasi DPRD	100 Persen	1.044.120.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat	-	711.386.500,00	
	4	02	02	2.0	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	18 Dokumen	1.044.120.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat		711.386.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Layanan Budgeting DPRD	100 Persen	168.890.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat	-	330.000.000,00	
	4	02	02	2.0	0003	Pembahasan APBD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	168.890.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat		330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Layanan Pengawasan DPRD	100 Persen	61.850.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat	-	440.000.000,00	
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	61.850.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat		440.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase layanan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	100 Persen	1.687.950.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat	-	2.760.593.000,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	1.111.960.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat		1.760.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	25.150.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat		110.759.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	550.840.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat		889.834.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase Laporan Apirasi Anggota DPRD yang Tersusun Tepat Waktu Presentase Laporan Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen	772.337.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat	-	2.662.843.975,00	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	2 Laporan	50.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat		66.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses											
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	721.737.500,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat		2.596.843.975,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Presentase Pelaporan Rekomendasi Yang dihasilkan dari kunjungan Kerja DPRD	100 Persen	19.300.397.508,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat	-	26.400.000.000,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	19.300.397.508,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Anggota DPRD, Pemkab.Bangka, dan Masyarakat		26.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
							J U M L A H	**54.450.065.089,00**								**71.979.587.224,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			5.285.846.517,00							10.073.678.822,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			5.285.846.517,00							10.073.678.822,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			5.285.846.517,00							10.073.678.822,00	
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	26,00 12,00 0,00 64,82 3,15 100 %	2.971.846.517,00						-	5.353.894.774,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan KInerja yang disusun sesuai standar	100 % 100 %	10.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka	-	56.346.420,00	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka		56.346.420,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	2.586.875.143,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka	-	4.255.801.879,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.581.875.143,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka		4.208.158.129,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka		47.643.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengenakan atribut lengkap Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 % 100 % 43,48%	9.750.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka	-	57.108.975,00	
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka		57.108.975,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	86.325.971,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka	-	254.100.000,00	
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	86.325.971,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka		254.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan aset perangkat daerah	17.57 %	35.748.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka	-	158.812.500,00	
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	35.748.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka		158.812.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	162.186.635,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka	-	539.962.500,00	
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	64.832.149,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	-		381.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.249.600,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka		57.172.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.104.886,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka		101.640.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	37,84%	80.960.768,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka	-	31.762.500,00	
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 R4/5R2 Unit	73.710.768,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.250.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Lingkup Badan Kesbangpol Kab. Bangka		31.762.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	100,00	1.020.000.000,00						-	1.494.776.718,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Koordinasi bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilakukan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 % 100 % 33,33 %	1.020.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pelajar dan Pegawai Kabupaten Bangka	-	1.494.776.718,00	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pelajar dan Pegawai Kabupaten Bangka		60.673.593,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka											
							Jumlah Paskibraka	30 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pelajar dan Pegawai Kabupaten Bangka		1.434.103.125,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik Persentase pemilih Pemula disatuan Pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	100,00 98,00%	1.084.000.000,00						-	1.608.883.426,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Verifiaksi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol Persentase satuan Pendidikan menengah yang siswanya mendapatkan pendidikan Politik	100,00 100 %	1.084.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Parpol	-	1.608.883.426,00	
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Orang	1.084.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Parpol		1.608.883.426,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	100,00	20.000.000,00						-	66.189.375,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan diawasi	33,33	20.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Ormas	-	66.189.375,00	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40 Orang	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Ormas		66.189.375,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100,00	92.000.000,00						-	1.003.872.187,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan Persentase Oraganisasi kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	100,00 33,33	92.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	FKUB dan Pelajar	-	1.003.872.187,00	
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80 Orang	92.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	FKUB dan Pelajar		1.003.872.187,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	100,00	98.000.000,00						-	546.062.342,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan Persentase cakupan Desa/Keluarahan yang dilakukan Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan	100,00 12,35	98.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Orang asing dan Desa/Kelurahan	-	546.062.342,00	
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	16 Orang	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Orang asing dan Desa/Kelurahan		165.473.437,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	18.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Orang asing dan Desa/Kelurahan		82.736.718,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Orang asing dan Desa/Kelurahan		165.473.437,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Orang asing dan Desa/Kelurahan		132.378.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								J U M L A H	**5.285.846.517,00**							**10.073.678.822,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kecamatan Merawang			2.643.202.263,00							5.209.976.383,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.643.202.263,00							5.209.976.383,00	
	7	01				KECAMATAN			2.643.202.263,00							5.209.976.383,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai kinerja pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	26,25 12,50 0 % 62,50 4 90 %	2.598.412.263,00						-	4.836.705.033,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 % 100 %	11.121.915,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang	-	20.687.550,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	11.121.915,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang		20.687.550,00	KECAMATAN MERAWANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar	100 %	2.193.374.019,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang	-	2.598.223.250,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2.190.324.019,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang		2.563.744.000,00	KECAMATAN MERAWANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42 Laporan	3.050.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang		34.479.250,00	KECAMATAN MERAWANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	44 %	19.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang	-	126.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	19.750.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang		126.000.000,00	KECAMATAN MERAWANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100 %	133.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang	-	260.639.183,00	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	117.050.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang		219.264.083,00	KECAMATAN MERAWANG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	16.470.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang		41.375.100,00	KECAMATAN MERAWANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	7 %	80.660.390,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Barang Inventaris di Kecamatan Merawang	-	670.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	29.916.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Barang Inventaris di Kecamatan Merawang		470.000.000,00	KECAMATAN MERAWANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.744.390,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Barang Inventaris di Kecamatan Merawang		200.000.000,00	KECAMATAN MERAWANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa Penunjang di Perangkat Daerah	90 %	120.935.939,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang	-	1.024.829.400,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	79.847.985,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang		859.329.000,00	KECAMATAN MERAWANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang		62.062.650,00	KECAMATAN MERAWANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.087.954,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Merawang sejumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 24 orang		103.437.750,00	KECAMATAN MERAWANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	9 %	39.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Barang Inventaris di Kecamatan Merawang	-	136.325.650,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	29.850.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Barang Inventaris di Kecamatan Merawang		96.541.900,00	KECAMATAN MERAWANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	9.200.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Barang Inventaris di Kecamatan Merawang		39.783.750,00	KECAMATAN MERAWANG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	2.510.000,00						-	50.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	2.510.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Merawang	-	50.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.510.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Merawang		50.000.000,00	KECAMATAN MERAWANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 % 100 %	36.000.000,00						-	158.604.550,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/kel/kecamatan	100 % 100 %	36.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Merawang	-	158.604.550,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	70 Lembaga Kemasyarakatan	7.190.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Merawang		20.687.550,00	KECAMATAN MERAWANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	28.810.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Merawang		137.917.000,00	KECAMATAN MERAWANG
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100 %	1.910.000,00						-	25.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100 %	1.910.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Merawang	-	25.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	1.910.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Merawang		25.000.000,00	KECAMATAN MERAWANG
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	4.370.000,00						-	139.666.800,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev	100 %	4.370.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Merawang	-	139.666.800,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	140 Dokumen	2.510.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Merawang		55.166.800,00	KECAMATAN MERAWANG
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1.860.000,00	Kab. Bangka, Merawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Merawang		84.500.000,00	KECAMATAN MERAWANG
							J U M L A H	**2.643.202.263,00**								**5.209.976.383,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kecamatan Pemali			2.425.444.125,00							3.616.847.400,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.425.444.125,00							3.616.847.400,00	
	7	01				KECAMATAN			2.425.444.125,00							3.616.847.400,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persetanse Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	25,19 11,39 0 % 63,80 3,5 90%	2.288.234.125,00						-	3.361.847.400,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 % 100 %	9.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Pemali	-	10.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Pemali		10.000.000,00	KECAMATAN PEMALI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan PD yang sesuai standar	100 %	2.019.985.326,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Pemali	-	2.490.300.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15/14 Orang/bulan	2.019.985.326,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Pemali		2.490.300.000,00	KECAMATAN PEMALI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 % 100% 47%	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Pemali	-	95.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Pemali		95.000.000,00	KECAMATAN PEMALI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	106.140.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Pemali	-	107.547.400,00	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	106.140.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Pemali		107.547.400,00	KECAMATAN PEMALI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	31 %	12.872.640,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD pada Kantor Camat Pemali	-	40.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	12.872.640,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD pada Kantor Camat Pemali		40.000.000,00	KECAMATAN PEMALI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	94.706.159,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Pemali	-	530.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	43.488.150,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Pemali		400.000.000,00	KECAMATAN PEMALI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.584.814,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Pemali		40.000.000,00	KECAMATAN PEMALI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.633.195,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kantor Camat Pemali		90.000.000,00	KECAMATAN PEMALI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	39 %	35.180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD pada Kantor Camat Pemali	-	89.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	28.250.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD pada Kantor Camat Pemali		70.000.000,00	KECAMATAN PEMALI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.930.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD pada Kantor Camat Pemali		19.000.000,00	KECAMATAN PEMALI
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	5.050.000,00						-	55.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	5.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat desa di wilayah Kecamatan Pemali	-	55.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.050.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat desa di wilayah Kecamatan Pemali		55.000.000,00	KECAMATAN PEMALI
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100,00 % 100,00 %	119.820.000,00						-	120.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrebang desa/kel/kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100 % 100 %	119.820.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pemali	-	120.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	42 Lembaga Kemasyarakatan	5.100.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pemali		10.000.000,00	KECAMATAN PEMALI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	114.720.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pemali		110.000.000,00	KECAMATAN PEMALI
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100 %	5.050.000,00						-	20.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksanaya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100 %	5.050.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat desa di wilayah Kecamatan Pemali	-	20.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	5.050.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat desa di wilayah Kecamatan Pemali		20.000.000,00	KECAMATAN PEMALI
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	7.290.000,00						-	60.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev	100 %	7.290.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat desa di wilayah Kecamatan Pemali	-	60.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	140 Dokumen	7.290.000,00	Kab. Bangka, Pemali, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat desa di wilayah Kecamatan Pemali		60.000.000,00	KECAMATAN PEMALI
							J U M L A H	**2.425.444.125,00**								**3.616.847.400,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kecamatan Bakam			2.389.430.042,00							3.318.460.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.389.430.042,00							3.318.460.500,00	
	7	01				KECAMATAN			2.389.430.042,00							3.318.460.500,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai kinerja pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	27,00 11,75 0 % 62,50 4 90 %	2.274.820.042,00						-	3.069.460.500,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 % 100 %	4.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)	-	30.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.950.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)		30.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	1.932.121.591,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	PNS Kecamatan Bakam (15 orang Laki dan 5 Perempuan)	-	2.224.239.800,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	1.927.021.591,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	PNS Kecamatan Bakam (15 orang Laki dan 5 Perempuan)		2.194.239.800,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.550.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	PNS Kecamatan Bakam (15 orang Laki dan 5 Perempuan)		15.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42 Laporan	2.550.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	PNS Kecamatan Bakam (15 orang Laki dan 5 Perempuan)		15.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100 % 40 % 100 %	13.210.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)	-	95.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	13.210.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)		95.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di Perangkat Daerah	100 %	79.220.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)	-	110.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	79.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)		110.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	31 %	62.642.445,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)	-	145.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	26.638.665,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)		35.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	16.559.550,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)		50.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	19.444.230,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)		60.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan penunjang di Perangkat Daerah	100 %	116.156.006,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)	-	346.790.700,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	71.365.500,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)		241.790.700,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.335.200,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)		40.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.455.306,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)		65.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	7 %	66.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)	-	118.430.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	57.600.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)		103.430.000,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	8.920.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Bakam (18 orang Laki dan 11 Perempuan)		15.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	8.750.000,00						-	35.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Bakam	-	35.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.750.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Bakam		35.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100 % 100 %	70.790.000,00						-	121.500.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/kel/kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100 % 100 %	70.790.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Bakam	-	121.500.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	63 Lembaga Kemasyarakatan	7.940.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Bakam		11.500.000,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	62.850.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Bakam		110.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100 %	7.870.000,00						-	25.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100 %	7.870.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Bakam	-	25.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	7.870.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Bakam		25.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	27.200.000,00						-	67.500.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev	100 %	27.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Bakam	-	67.500.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	209 Dokumen	18.500.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Bakam		52.500.000,00	KECAMATAN BAKAM
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	8.700.000,00	Kab. Bangka, Bakam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Bakam		15.000.000,00	KECAMATAN BAKAM
							J U M L A H	**2.389.430.042,00**								**3.318.460.500,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kecamatan Puding Besar			**2.651.076.779,00**							**3.579.071.400,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.651.076.779,00**							**3.579.071.400,00**	
	7	**01**				**KECAMATAN**			**2.651.076.779,00**							**3.579.071.400,00**	
1	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah** **Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah** **Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI** **Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah** **Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**26,84** **11,43** **0%** **62,75** **4** **100%**	**2.511.576.779,00**						**-**	**3.334.391.400,00**	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 Persentase 100 Persentase	9.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Puding Besar (22 Orang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan)	-	20.000.000,00	
	7	*01*	*01*	*2.01*	*0001*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*6 Dokumen*	*4.750.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Pegawai Kecamatan Puding Besar (22 Orang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan)*		*10.000.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
	7	*01*	*01*	*2.01*	*0006*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*4 Laporan*	*4.700.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Pegawai Kecamatan Puding Besar (22 Orang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan)*		*10.000.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar	100 Persentase	2.146.848.397,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Puding Besar (12 Orang Laki-laki dan 4 Orang Perempuan)	-	2.374.477.200,00	
	7	*01*	*01*	*2.02*	*0001*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*24 Orang/bulan*	*2.146.848.397,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Pegawai Kecamatan Puding Besar (12 Orang Laki-laki dan 4 Orang Perempuan)*		*2.374.477.200,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Persentase 100 Persentase 52,94 Persentase	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Dikecamatan Puding Besar (12 Orang Laki-laki dan 4 Orang Perempuan)	-	40.350.000,00	
	7	*01*	*01*	*2.05*	*0002*	*Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	*1 Paket*	*9.750.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Pegawai Dikecamatan Puding Besar (12 Orang Laki-laki dan 4 Orang Perempuan)*		*40.350.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100 Persentase	66.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Puding Besar (22 Orang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan)	-	165.000.000,00	
	7	*01*	*01*	*2.06*	*0009*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*14 Laporan*	*66.550.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Pegawai Kecamatan Puding Besar (22 Orang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan)*		*165.000.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 Persentase	180.883.382,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Puding Besar (22 Orang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan)	-	602.114.200,00	
	7	*01*	*01*	*2.08*	*0001*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*12 Laporan*	*95.933.830,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Pegawai Kecamatan Puding Besar (22 Orang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan)*		*474.392.790,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
	7	*01*	*01*	*2.08*	*0002*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*12 Laporan*	*33.379.700,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Pegawai Kecamatan Puding Besar (22 Orang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan)*		*40.021.410,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
	7	*01*	*01*	*2.08*	*0004*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*12 Laporan*	*51.569.852,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Pegawai Kecamatan Puding Besar (22 Orang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan)*		*87.700.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	18,91 Persentase	98.095.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Puding Besar (22 Orang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan)	-	132.450.000,00	
	7	*01*	*01*	*2.09*	*0002*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*5 Unit*	*47.185.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Pegawai Kecamatan Puding Besar (22 Orang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan)*		*89.000.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
	7	*01*	*01*	*2.09*	*0006*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*15 Unit*	*10.110.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Pegawai Kecamatan Puding Besar (22 Orang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan)*		*18.450.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
	7	*01*	*01*	*2.09*	*0009*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*1 Unit*	*40.800.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Pegawai Kecamatan Puding Besar (22 Orang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan)*		*25.000.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP**	**100 persentase**	**9.940.000,00**						-	**15.000.000,00**	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 Persentase	9.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Puding Besar	-	15.000.000,00	
	7	*01*	*02*	*2.02*	*0003*	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*12 Laporan*	*9.940.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*	*Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi*	*Masyarakat di Kecamatan Puding Besar*		*15.000.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
3	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang** **Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 persentase** **100 persentase**	**107.100.000,00**						-	**117.530.000,00**	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrebang desa/kel/kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100 persentase 100 persentase	107.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Puding Besar	-	117.530.000,00	
	7	*01*	*03*	*2.01*	*0001*	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*49 Lembaga Kemasyarakatan*	*6.440.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.*	*Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial*	*Masyarakat di Kecamatan Puding Besar*		*10.000.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
	7	*01*	*03*	*2.01*	*0003*	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*26 Laporan*	*100.660.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.*	*Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial*	*Masyarakat di Kecamatan Puding Besar*		*107.530.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
4	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum**	**100 persentase**	**6.700.000,00**						-	**14.150.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksanaya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100 Persentase	6.700.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Puding Besar	-	14.150.000,00	
	7	*01*	*04*	*2.01*	*0002*	*Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*12 Laporan*	*6.700.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.*	*Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial*	*Masyarakat di Kecamatan Puding Besar*		*14.150.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
5	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa**	**100 persentase**	**15.760.000,00**						**-**	**98.000.000,00**	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Monev	100 Persentase	15.760.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Puding Besar	-	98.000.000,00	
	7	*01*	*06*	*2.01*	*0003*	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*140 Dokumen*	*6.700.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.*	*Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial*	*Masyarakat di Kecamatan Puding Besar*		*78.000.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
	7	*01*	*06*	*2.01*	*0009*	*Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*											
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*1 Dokumen*	*4.530.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.*	*Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial*	*Masyarakat di Kecamatan Puding Besar*		*10.000.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
	7	*01*	*06*	*2.01*	*0017*	*Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*1 Laporan*	*4.530.000,00*	*Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.*	*Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial*	*Masyarakat di Kecamatan Puding Besar*		*10.000.000,00*	*KECAMATAN PUDING BESAR*
								J U M L A H	**2.651.076.779,00**							**3.579.071.400,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kecamatan Mendo Barat			2.937.576.052,00							4.463.439.289,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.937.576.052,00							4.463.439.289,00	
	7	01				KECAMATAN			2.937.576.052,00							4.463.439.289,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	26,00 12,25 0 % 75,00 3,70 87 %	2.770.191.052,00					-	4.168.439.289,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 % 100 %	6.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat	-	35.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.900.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat		35.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	2.275.092.147,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat	-	2.470.180.800,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.266.992.147,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat		2.430.180.800,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	8.100.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat		40.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 % 100 % 67 %	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat	-	85.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat		85.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100 %	75.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat	-	251.607.411,00	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	75.900.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat		251.607.411,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	22 %	90.306.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat	-	100.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	30.003.820,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat		45.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	60.303.030,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat		55.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	213.222.055,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat	-	1.096.651.078,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	180.732.900,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat		979.616.395,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.094.059,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat		35.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.395.096,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat		82.034.683,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	11 %	99.020.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat	-	130.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	57.200.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat		105.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	6.020.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat		25.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.800.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat		0,00	KECAMATAN MENDO BARAT
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	6.000.000,00						-	12.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang Tepat Waktu	100 %	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Mendo Barat	-	12.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Mendo Barat		12.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 % 100,00%	114.075.000,00						-	187.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang Desa/Kel/Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina	100 % 100 %	114.075.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mendo Barat	-	187.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	105 Lembaga Kemasyarakatan	21.260.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mendo Barat		35.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	92.815.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mendo Barat		152.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100 %	8.860.000,00						-	17.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100%	8.860.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mendo Barat	-	17.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	8.860.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mendo Barat		17.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	38.450.000,00						-	79.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Monev	100 %	38.450.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mendo Barat	-	79.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	317 Dokumen	23.850.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mendo Barat		60.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	7.300.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mendo Barat		9.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	7.300.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mendo Barat		10.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
							J U M L A H		**2.937.576.052,00**							**4.463.439.289,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kecamatan Riau Silip			2.479.505.072,00							2.479.505.072,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.479.505.072,00							2.479.505.072,00	
	7	01				KECAMATAN			2.479.505.072,00							2.479.505.072,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30) Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik Nilai Kinerja pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15) Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	30,00 4 90 11,70 0 64,00	2.378.787.922,00						-	2.378.787.922,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 persen 100 persen	6.220.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)	-	6.220.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.110.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		3.110.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.110.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		3.110.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.030.363.436,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)	-	2.030.363.436,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.024.143.436,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		2.024.143.436,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.110.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		3.110.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42 Laporan	3.110.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		3.110.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 persen 46,67 persen 43 persen	28.202.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)	-	28.202.040,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		9.750.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	3.410.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		3.410.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	15.042.040,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		15.042.040,00	KECAMATAN RIAU SILIP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daaerah	100 persen	72.877.493,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)	-	72.877.493,00	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65.227.493,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		65.227.493,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	7.650.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		7.650.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset Perangkat Daerah	9 persen	78.665.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)	-	78.665.850,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	33.022.350,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		33.022.350,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	14.940.720,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		14.940.720,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	30.702.780,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		30.702.780,00	KECAMATAN RIAU SILIP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 persen	127.809.103,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)	-	127.809.103,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	107.189.965,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		107.189.965,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.450.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		12.450.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.169.138,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		8.169.138,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	100 persen	34.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)	-	34.650.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	28.950.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		28.950.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	5.700.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Riau Silip (Laki-Laki 17 perempuan 18)		5.700.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 persen	6.170.000,00						-	6.170.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 persen	6.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Riau Silip	-	6.170.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.170.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Riau Silip		6.170.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 persen 100 persen	68.097.150,00						-	68.097.150,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrebang desa/kel/kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100 persen 100 persen	68.097.150,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Riau Silip	-	68.097.150,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	63 Lembaga Kemasyarakatan	6.290.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Riau Silip		6.290.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	61.807.150,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Riau Silip		61.807.150,00	KECAMATAN RIAU SILIP
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100 persen	6.770.000,00						-	6.770.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksanaya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100 persen	6.770.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Riau Silip	-	6.770.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 Laporan	6.770.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Riau Silip		6.770.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 persen	19.680.000,00						-	19.680.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev	100 persen	19.680.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Riau Silip	-	19.680.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	207 Dokumen	7.160.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Riau Silip		7.160.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	6.260.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Riau Silip		6.260.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	6.260.000,00	Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kecamatan Riau Silip		6.260.000,00	KECAMATAN RIAU SILIP
							J U M L A H	**2.479.505.072,00**								**2.479.505.072,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kecamatan Belinyu			6.506.103.639,00							8.039.173.943,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			6.506.103.639,00							8.039.173.943,00	
	7	01				KECAMATAN			6.506.103.639,00							8.039.173.943,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	26,73 Nilai 11,60 Nilai 0 % 74,50 Nilai 3,50 Nilai 90 %	6.383.303.639,00						-	7.804.001.814,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 % 100 %	10.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu	-	31.406.132,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	10.100.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu		31.406.132,00	KECAMATAN BELINYU
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	100 %	5.973.975.256,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu	-	6.507.874.944,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	5.969.075.256,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu		6.502.974.944,00	KECAMATAN BELINYU
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.900.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu		4.900.000,00	KECAMATAN BELINYU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 % 100 % 50 %	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu	-	27.197.362,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu		27.197.362,00	KECAMATAN BELINYU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100 %	99.475.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu	-	220.655.483,00	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	99.475.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu		220.655.483,00	KECAMATAN BELINYU
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	7,11 %	64.475.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu	-	145.469.750,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	6.187.500,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu		30.469.750,00	KECAMATAN BELINYU
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	58.288.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu		115.000.000,00	KECAMATAN BELINYU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	139.679.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu	-	541.861.945,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	35.846.268,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu		339.757.380,00	KECAMATAN BELINYU
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.216.574,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu		68.081.035,00	KECAMATAN BELINYU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.616.733,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu		134.023.530,00	KECAMATAN BELINYU
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	10,34 %	85.848.308,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu	-	329.536.198,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	47.910.768,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu		118.248.600,00	KECAMATAN BELINYU
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	11.570.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu		27.679.190,00	KECAMATAN BELINYU
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.367.540,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kecamatan Belinyu		183.608.408,00	KECAMATAN BELINYU
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	11.250.000,00						-	37.652.500,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	11.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Belinyu	-	37.652.500,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.250.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Belinyu		37.652.500,00	KECAMATAN BELINYU
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 % 100 %	93.210.000,00						-	142.213.301,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrebang Desa/Kecamatan	100 % 100 %	87.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Belinyu	-	135.247.061,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga Kemasyarakatan	7.050.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Belinyu		12.074.816,00	KECAMATAN BELINYU
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	80.550.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Belinyu		123.172.245,00	KECAMATAN BELINYU
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase RT yang Mendapatkan Bantuan Sarpras Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrebang Kelurahan/Kecamatan	100 % 100 %	5.610.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Belinyu	-	6.966.240,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21 Lembaga Kemasyarakatan	5.610.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Belinyu		6.966.240,00	KECAMATAN BELINYU
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga Trantibum	100 %	8.350.000,00						-	24.381.840,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksanaya Koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100 %	8.350.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Belinyu	-	24.381.840,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	8.350.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Belinyu		24.381.840,00	KECAMATAN BELINYU
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Desa	100 %	9.990.000,00						-	30.924.488,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Monev	100 %	9.990.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Belinyu	-	30.924.488,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	115 Dokumen	9.990.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Belinyu		30.924.488,00	KECAMATAN BELINYU
						Kelurahan Kuto Panji			363.260.768,00							861.402.220,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			363.260.768,00							861.402.220,00	
	7	01				KECAMATAN			363.260.768,00							861.402.220,00	
6	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	86.880.768,00						-	661.402.220,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	86.880.768,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Belinyu	-	661.402.220,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	86.880.768,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Belinyu		661.402.220,00	KELURAHAN KUTO PANJI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 % 100 %	276.380.000,00						-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrebang Kelurahan/Kecamatan Persentase RT yang Mendapatkan Bantuan Sarpras	100 % 100 %	276.380.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Kuto Panji	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	276.380.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Kuto Panji	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Kuto Panji		200.000.000,00	KELURAHAN KUTO PANJI
						Kelurahan Bukit Ketok			326.192.160,00							893.186.448,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			326.192.160,00							893.186.448,00	
	7	01				KECAMATAN			326.192.160,00							893.186.448,00	
8	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	68.052.160,00						-	693.186.448,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	68.052.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kelurahan Bukit Ketok	-	693.186.448,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	68.052.160,00	Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kelurahan Bukit Ketok		693.186.448,00	KELURAHAN BUKIT KETOK
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 % 100 %	258.140.000,00						-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrebang Kelurahan/Kecamatan Persentase RT yang Mendapatkan Bantuan Sarpras	100 % 100 %	258.140.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Bukit Ketok	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	258.140.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Bukit Ketok		200.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KETOK
						Kelurahan Air Jukung			333.790.000,00							853.653.640,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			333.790.000,00							853.653.640,00	
	7	01				KECAMATAN			333.790.000,00							853.653.640,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	81.410.000,00						-	653.653.640,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	81.410.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Air Jukung	-	653.653.640,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	81.410.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Air Jukung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kelurahan Air Jukung		653.653.640,00	KELURAHAN AIR JUKUNG
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 % 100 %	252.380.000,00						-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrebang Kelurahan/Kecamatan Persentase RT yang Mendapatkan Bantuan Sarpras	100 % 100 %	252.380.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Air Jukung	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	252.380.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Air Jukung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Air Jukung		200.000.000,00	KELURAHAN AIR JUKUNG
						Kelurahan Air Asem			297.935.392,00							999.867.250,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			297.935.392,00							999.867.250,00	
	7	01				KECAMATAN			297.935.392,00							999.867.250,00	
12	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	89.115.392,00						-	799.867.250,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	89.115.392,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kelurahan Air Asem	-	799.867.250,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	89.115.392,00	Kab. Bangka, Belinyu, Air Asam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kelurahan Air Asem		799.867.250,00	KELURAHAN AIR ASEM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 % 100 %	208.820.000,00						-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrebang Kelurahan/Kecamatan Persentase RT yang Mendapatkan Bantuan Sarpras	100 % 100 %	208.820.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Air Asem	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	208.820.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Air Asam	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Air Asem		200.000.000,00	KELURAHAN AIR ASEM
						Kelurahan Belinyu			375.434.160,00							810.391.770,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			375.434.160,00							810.391.770,00	
	7	01				KECAMATAN			375.434.160,00							810.391.770,00	
14	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	80.694.160,00						-	610.391.770,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	80.694.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kelurahan Belinyu	-	610.391.770,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	80.694.160,00	Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kelurahan Belinyu		610.391.770,00	KELURAHAN BELINYU
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 % 100 %	294.740.000,00						-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase RT yang Mendapatkan Bantuan Sarpras Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrebang Kelurahan/Kecamatan	100 % 100 %	294.740.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Belinyu	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	294.740.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Belinyu		200.000.000,00	KELURAHAN BELINYU
						Kelurahan Remodong Indah			297.336.160,00							821.518.026,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			297.336.160,00							821.518.026,00	
	7	01				KECAMATAN			297.336.160,00							821.518.026,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	81.916.160,00						-	621.518.026,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	81.916.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kelurahan Belinyu	-	621.518.026,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	81.916.160,00	Kab. Bangka, Belinyu, Remodong Indah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kelurahan Belinyu		621.518.026,00	KELURAHAN REMODONG INDAH
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 % 100 %	215.420.000,00						-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrebang Kelurahan/Kecamatan Persentase RT yang Mendapatkan Bantuan Sarpras	100 % 100 %	215.420.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Remodong Indah	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	215.420.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Remodong Indah	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Remodong Indah		200.000.000,00	KELURAHAN REMODONG INDAH
						Kelurahan Mantung			288.670.000,00							812.612.580,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			288.670.000,00							812.612.580,00	
	7	01				KECAMATAN			288.670.000,00							812.612.580,00	
18	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	79.010.000,00						-	612.612.580,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	79.010.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kelurahan Mantung	-	612.612.580,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	79.010.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Mantung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai di Kelurahan Mantung		612.612.580,00	KELURAHAN MANTUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 % 100 %	209.660.000,00						-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrebang Kelurahan/Kecamatan Persentase RT yang Mendapatkan Bantuan Sarpras	100 % 100 %	209.660.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Mantung	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	209.660.000,00	Kab. Bangka, Belinyu, Mantung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Mantung		200.000.000,00	KELURAHAN MANTUNG
							J U M L A H		**8.788.722.279,00**							**14.091.805.877,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kecamatan Sungailiat			19.298.960.732,00							25.961.009.520,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.298.960.732,00							25.961.009.520,00	
	7	01				KECAMATAN			13.778.195.352,00							15.237.492.375,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai kinerja pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	26,00 12,20 0 % 61,50 3,50 99 %	13.682.848.992,00						-	14.877.523.150,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 % 100 %	23.283.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat	-	53.214.300,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	11.550.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat		26.321.500,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	11.733.900,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat		26.892.800,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	12.855.222.528,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat	-	12.989.081.875,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	12.855.222.528,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat		12.989.081.875,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	89 % 100 % 100 %	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat	-	143.051.600,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat		143.051.600,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	65.166.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat	-	242.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	65.166.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat		242.000.000,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	20 %	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat		0,00	KECAMATAN SUNGAILIAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	213.986.564,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat	-	1.029.553.250,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	164.026.855,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat		866.470.000,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.184.916,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat		72.883.250,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.774.793,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat		90.200.000,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	16 %	315.440.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat	-	420.622.125,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	46.920.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat		102.997.125,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	12.520.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat		33.825.000,00	KECAMATAN SUNGAILIAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	256.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Sungailiat		283.800.000,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	9.637.865,00						-	65.113.125,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	9.637.865,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Sungailiat	-	65.113.125,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.637.865,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Sungailiat		65.113.125,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 % 100%	76.958.495,00						-	239.063.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100 % 100 %	76.958.495,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Sungailiat	-	239.063.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	91 Lembaga Kemasyarakatan	20.200.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Sungailiat		24.563.000,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	56.758.495,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kecamatan Sungailiat		214.500.000,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
4	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100%	8.750.000,00						-	55.793.100,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev	100 %	8.750.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerintahan Desa dan Kelurahan	-	55.793.100,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	8.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pemerintahan Desa dan Kelurahan		55.793.100,00	KECAMATAN SUNGAILIAT
						Kelurahan Sungailiat			922.004.248,00							1.281.446.100,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			922.004.248,00							1.281.446.100,00	
	7	01				KECAMATAN			922.004.248,00							1.281.446.100,00	
5	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	422.004.248,00						-	1.072.446.100,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	422.004.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Sungailiat	-	1.072.446.100,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	422.004.248,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Sungailiat		1.072.446.100,00	KELURAHAN SUNGAILIAT
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 % 100%	500.000.000,00						-	209.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lingkungan Kelurahan yang mendapatkan bantuan sarpras	100 %	500.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Sungailiat	-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	500.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Sungailiat		209.000.000,00	KELURAHAN SUNGAILIAT
						Kelurahan Parit Padang			640.810.000,00							930.805.700,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			640.810.000,00							930.805.700,00	
	7	01				KECAMATAN			640.810.000,00							930.805.700,00	
7	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	240.810.000,00						-	721.805.700,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	240.810.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Parit Padang	-	721.805.700,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	240.810.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Parit Padang		721.805.700,00	KELURAHAN PARIT PADANG
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 % 100%	400.000.000,00						-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lingkungan Kelurahan yang mendapatkan bantuan sarpras	100 %	400.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Parit Padang	-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	400.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Parit Padang		209.000.000,00	KELURAHAN PARIT PADANG
						Kelurahan Srimenanti			611.520.000,00							1.014.407.900,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			611.520.000,00							1.014.407.900,00	
	7	01				KECAMATAN			611.520.000,00							1.014.407.900,00	
9	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	411.520.000,00						-	805.407.900,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	411.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Srimenanti	-	805.407.900,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	411.520.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Srimenanti		805.407.900,00	KELURAHAN SRIMENANTI
10	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 % 100%	200.000.000,00						-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lingkungan Kelurahan yang mendapatkan bantuan sarpras	100 %	200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Srimenanti	-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Srimenanti		209.000.000,00	KELURAHAN SRIMENANTI
						Kelurahan Sinar Baru			356.620.000,00							824.703.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			356.620.000,00							824.703.000,00	
	7	01				KECAMATAN			356.620.000,00							824.703.000,00	
11	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	156.620.000,00						-	615.703.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	156.620.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Sinar Baru	-	615.703.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	156.620.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Sinar Baru		615.703.000,00	KELURAHAN SINAR BARU
12	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 % 100%	200.000.000,00						-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lingkungan Kelurahan yang mendapatkan bantuan sarpras	100 %	200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Sinar Baru	-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Sinar Baru		209.000.000,00	KELURAHAN SINAR BARU
						Kelurahan Kenanga			385.913.648,00							841.567.100,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			385.913.648,00							841.567.100,00	
	7	01				KECAMATAN			385.913.648,00							841.567.100,00	
13	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	185.913.648,00						-	632.567.100,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	185.913.648,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Kenanga	-	632.567.100,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	185.913.648,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Kenanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Kenanga		632.567.100,00	KELURAHAN KENANGA
14	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 % 100%	200.000.000,00						-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lingkungan Kelurahan yang mendapatkan bantuan sarpras	100 %	200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Kenanga	-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Kenanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Kenanga		209.000.000,00	KELURAHAN KENANGA
						Kelurahan Kuday			421.947.320,00							814.506.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			421.947.320,00							814.506.000,00	
	7	01				KECAMATAN			421.947.320,00							814.506.000,00	
15	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	221.947.320,00						-	605.506.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	221.947.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Kuday	-	605.506.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	221.947.320,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Kuday		605.506.000,00	KELURAHAN KUDAY
16	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 % 100%	200.000.000,00						-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lingkungan Kelurahan yang mendapatkan bantuan sarpras	100 %	200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Kuday	-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Kuday		209.000.000,00	KELURAHAN KUDAY
						Kelurahan Bukit Betung			413.690.712,00							857.846.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			413.690.712,00							857.846.000,00	
	7	01				KECAMATAN			413.690.712,00							857.846.000,00	
17	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	213.690.712,00						-	648.846.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	213.690.712,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Bukit Betung	-	648.846.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	213.690.712,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Bukit Betung		648.846.000,00	KELURAHAN BUKIT BETUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 % 100%	200.000.000,00						-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lingkungan Kelurahan yang mendapatkan bantuan sarpras	100 %	200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Bukit betung	-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Bukit betung		209.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BETUNG
						Kelurahan Sinar Jaya Jelutung			379.685.236,00							886.734.200,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			379.685.236,00							886.734.200,00	
	7	01				KECAMATAN			379.685.236,00							886.734.200,00	
19	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	179.685.236,00						-	677.734.200,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	179.685.236,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Sinar Jaya Jelutung	-	677.734.200,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	179.685.236,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Sinar Jaya Jelutung		677.734.200,00	KELURAHAN SINAR JAYA JELUTUNG
20	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 % 100%	200.000.000,00						-	209.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lingkungan Kelurahan yang mendapatkan bantuan sarpras	100 %	200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Sinar Jaya Jelutung	-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Sinar Jaya Jelutung		209.000.000,00	KELURAHAN SINAR JAYA JELUTUNG
						Kelurahan Lubuk Kelik			303.785.128,00							709.983.560,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			303.785.128,00							709.983.560,00	
	7	01				KECAMATAN			303.785.128,00							709.983.560,00	
21	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	103.785.128,00						-	500.983.560,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	103.785.128,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Lubuk Kelik	-	500.983.560,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	103.785.128,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Lubuk Kelik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Lubuk Kelik		500.983.560,00	KELURAHAN LUBUK KELIK
22	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 % 100%	200.000.000,00						-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lingkungan Kelurahan yang mendapatkan bantuan sarpras	100 %	200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Lubuk Kelik	-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Lubuk Kelik	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Lubuk Kelik		209.000.000,00	KELURAHAN LUBUK KELIK
						Kelurahan Matras			386.210.000,00							868.472.660,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			386.210.000,00							868.472.660,00	
	7	01				KECAMATAN			386.210.000,00							868.472.660,00	
23	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	186.210.000,00						-	659.472.660,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	186.210.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Matras	-	659.472.660,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	186.210.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Matras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Matras		659.472.660,00	KELURAHAN MATRAS
24	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 % 100%	200.000.000,00						-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lingkungan Kelurahan yang mendapatkan bantuan sarpras	100 %	200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Matras	-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Matras	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Matras		209.000.000,00	KELURAHAN MATRAS
						Kelurahan Surya Timur			377.459.088,00							873.529.250,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			377.459.088,00							873.529.250,00	
	7	01				KECAMATAN			377.459.088,00							873.529.250,00	
25	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	177.459.088,00						-	664.529.250,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	177.459.088,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Surya Timur	-	664.529.250,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	177.459.088,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Surya Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Surya Timur		664.529.250,00	KELURAHAN SURYA TIMUR
26	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 % 100%	200.000.000,00						-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lingkungan Kelurahan yang mendapatkan bantuan sarpras	100 %	200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Surya Timur	-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Surya Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Surya Timur		209.000.000,00	KELURAHAN SURYA TIMUR
						Kelurahan Jelitik			321.120.000,00							819.515.675,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			321.120.000,00							819.515.675,00	
	7	01				KECAMATAN			321.120.000,00							819.515.675,00	
27	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	121.120.000,00						-	610.515.675,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	121.120.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Jelitik	-	610.515.675,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	121.120.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Jelitik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kelurahan Jelitik		610.515.675,00	KELURAHAN JELITIK
28	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 % 100%	200.000.000,00						-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lingkungan Kelurahan yang mendapatkan bantuan sarpras	100 %	200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Jelitik	-	209.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Jelitik	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Masyarakat di Kelurahan Jelitik		209.000.000,00	KELURAHAN JELITIK
								J U M L A H	**19.298.960.732,00**							**25.961.009.520,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian sasaran dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025 dalam RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 disajikan pada Tabel 6.1, sementara IKK Kabupaten Bangka disajikan pada Tabel 6.2.

Selain 2 (dua) indikator di atas ditampilkan juga target capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal dan indikator kinerja yang berpedoman pada sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja Strategis yang menjadi prioritas di setiap Perangkat Pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang pada tahun 2026 mengacu kepada RPD Kabupaten Bangka 2024-2026.

Rencana Pembangunan Tahun 2026 merupakan Program tahun ketiga RPD Kabupaten Bangka 2024-2026. Tujuan dan Sasaran Pembangunan untuk tahun 2026 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 yang diukur dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah. Setiap Perangkat Daerah wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD.

Indikator Kinerja Utama dirumuskan dan ditetapkan dari sasaran strategis RPD 2024-2026, yang diturunkan dari tujuan RPD 2024-2026 dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Dari 5 (lima) tujuan dalam RPD 2024-2026, telah dirumuskan dan ditetapkan lebih lanjut ke dalam 13 (tiga belas) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat
4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
5. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
6. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
7. Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak
8. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur
9. Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
11. Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan
12. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan
13. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Penetapan Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tahun 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPD (2022)	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026	RUMUS PENGHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori/ Nilai	BB (71,31)	BB (71,53)	BB (72,65)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Bangka oleh Kementerian PAN dan RB	Kementerian PAN dan RB
		Indeks SPBE	Nilai	1,85	2,80	2,90	Hasil Evaluasi SPBE Terdiri dari Komponen Indeks Domain Kebijakan, Indeks Domain Tata Kelola dan Indeks Domain Layanan	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	63,86	65,14*	78,21	Hasil Pengukuran Nilai Standar Profesionalitas ASN yang terdiri dari 4 dimensi yakni a) Kualifikasi; b) Kompetensi; c) Disiplin; dan d) Kinerja	BKPSDMD Kabupaten Bangka
2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP	WTP	WTP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	BPK RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	84,06	85,29	86,37	Hasil pengukuran oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi	Bappelitbangda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPD (2022)	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026	RUMUS PENGHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,13	83,67	88,21	Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat	Bappeda Kabupaten Bangka
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,45	8,49	Jumlah Tahun yang digunakan oleh Penduduk dalam Menjalani Pendidikan Formal $RLS = \frac{1}{n} x \sum_{i=1}^{n} xi$ Dimana : RLS = Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas xi = Lama Sekolah Penduduk ke-i yang berusia 25 Tahun n = Jumlah Penduduk Usia > 25	BPS
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,80	13,12	13,23	Lamanya Sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh Anak pada Umur tertentu di Masa Mendatang	BPS
5.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,37	73,24	73,31	Rata-Rata Tahun Hidup yang masih akan dijalani oleh Seseorang yang telah berhasil Mencapai Umur X, Pada Suatu Tahun tertentu, dalam Situasi Mortalitas yang berlaku di Lingkungan Masyarakatnya	BPS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPD (2022)	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026	RUMUS PENGHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
		Angka Stunting	%	1,34	0,99	0,95	$=\frac{Jumlah\ Baduta\ Stunting}{Jumlah\ Baduta}\ x\ 100\%$ Penilaian Hasil Pengukuran Antropometri terhadap Tinggi Badan (Usia 2 Tahun atau Lebih) dengan 2 Macam Alat Ukur : ▪ *Baby Length Board* ▪ *Vertical Measures* Analisis Hasil Pengukuran Antropometri dengan Menggunakan Nilai Skor – Z atau SD	Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) pada aplikasi e-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)
6.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total	Anak	2,33	1,84	2,00	Jumlah Anak yang akan dipunyai Seorang Wanita Selama Masa Reproduksinya per 1000 Wanita $\text{TFR} = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$ TFR = *Total Fertility Rate* (Angka Kelahiran Total) ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	BPS
7.	Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	88,84	89,07	89,55	$IPG = \frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki - Laki}$ IPG = Indeks Pembangunan Gender IPM = Indeks Pembangunan Manusia	BPS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPD (2022)	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026	RUMUS PENGHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
		Status Kabupaten Layak Anak	Status/ Nilai	Madya/ 611	Nindya/ 794	Utama/ 815	Hasil Penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian PPPA
8.	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Nilai	0,189	0,187	0,185	$\sqrt[5]{akses\ jalan\ x\ akses\ air\ x\ akses\ sanitasi\ x\ akses\ telekomunikasi\ x\ akses\ listrik\ x\ 100}$	Bappeda Kabupaten Bangka
		Indeks Williamson	Nilai	0,182	0,219	0,173	$IW = \frac{\sqrt{\Sigma(Yi - Y)^2 - Fi/n}}{Y}$ Keterangan: IW = Indeks Williamson Yi = PDRB perkapita di Kabupaten/kota i Y = PDRB perkapita di Provinsi i Fi = Jumlah penduduk di Kabupaten/kota i n = Jumlah penduduk di Provinsi	BPS
9.	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,87	-0,44	4,33	$PE = \frac{PDRBt - PDRBt\text{-}1}{PDRBt\text{-}1} \times 100\%$ Ket : PE = Pertumbuhan Ekonomi PDRB t = Nilai PDRB periode tahun berjalan PDRB t-1 = Nilai PDRB periode tahun sebelumnya	BPS
		Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	12.863	13.205	13.961	Nilai Pengeluaran Perkapita dan Paritas Daya Beli $Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{PPP}$ Dimana : Y_t^{**}= Rata-rata pengeluaran per	BPS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPD (2022)	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026	RUMUS PENGHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
							kapita disesuaikan Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan *PPP* = Paritas daya beli wilayah	
		Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku)	Ribu Rupiah	19.445	20.494	21.724	Hasil Survey SUSENAS Rumah Tangga oleh BPS	BPS
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persentase	4,26	4,24	4,13	Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Rumah Tangga oleh BPS	BPS
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	5,39	4,91	4,49	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	BPS
11.	Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	*Spending of Money Tourism*	Miliar Rupiah	154,28	197,96	232,69	*Spending of money* = Rata-Rata Nilai Belanja Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka
12.	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	Nilai	0,219	0,211	0,202	$GR = 1 - \sum [Fp_i \times (Fe_i + Fe_{i-1})]$ Fp_i : Frekuensi penduduk kelas pengeluaran ke-i Fe_i : Frekuensi kumulatif jumlah pengeluaran di kelas pengeluaran ke-$_i$.Fe_{i-1} : Frekuensi kumulatif jumlah pengeluaran di kelas pengeluaran ke-$_{i-1}$	BPS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPD (2022)	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026	RUMUS PENGHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
13.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	64,91	64,76	66,38	$IKLH = (30\% \times IPU) + (30\% \times IPA) + (40\% \times ITH)$ Dimana: IPU = Indeks Pencemaran Udara IPA = Indeks Pencemaran Air ITH = Indeks Tutupan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks Ketahanan Bencana Daerah	Nilai	0,29	0,50	0,55	Hasil Penghitungan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BNPB

6.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Pengelompokan Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah *(middle line)*, Dinas Daerah *(operating core)*, Badan/fungsi penunjang *(technostructure)*, dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti *(operating core)* yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang *(technostructure)* yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti *(operating core)*.

Gambaran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat dapat diketahui melalui capaian kinerja makro dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan. Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum dengan menggunakan indikator-indikator kinerja makro sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia;
2. Angka Kemiskinan;
3. Angka Pengangguran;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pendapatan per Kapita; dan
6. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*).

Sedangkan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah merupakan gambaran keberhasilan Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan ini disebut sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dijabarkan berdasarkan urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu :

1. **Urusan Pemerintahan Wajib,** terdiri atas:
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. perumahan dan kawasan permukiman;
   e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
   f. sosial;
   g. tenaga kerja;
   h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   i. pangan;
   j. pertanahan;

k. lingkungan hidup;
l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
o. perhubungan;
p. komunikasi dan informatika;
q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
r. penanaman modal;
s. kepemudaan dan olah raga;
t. statistik;
u. persandian;
v. kebudayaan;
w. perpustakaan; dan
x. kearsipan.

2. **Urusan Pemerintahan Pilihan**, terdiri atas :
   a. kelautan dan perikanan;
   b. pariwisata;
   c. pertanian;
   d. perdagangan; dan
   e. perindustrian.

3. **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah,** terdiri atas:
   a. sekretariat Daerah; dan
   b. sekretariat DPRD.

4. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** terdiri atas:
   a. perencanaan;
   b. keuangan;
   c. kepegawaian;
   d. pendidikan dan pelatihan; dan
   e. penelitian dan pengembangan.

5. **Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah,** terdiri atas:
   a. inspektorat daerah.

6. **Urusan Kewilayahan**, terdiri atas:
   a. kecamatan.

Penetapan target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) baik IKK makro dan IKK *Outcome* Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Penetapan Target Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2026

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
I.	**Capaian Kinerja Makro**							
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	72,95	74,66		74,87	74,87	IPM = $^1/_3$ [$X_{(1)}$ + $X_{(2)}$ + $X_{(3)}$] Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $^2/_3$(indeks melek huruf) + $^1/_3$(indeks rata-rata lama sekolah) $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak Indeks $X_{(i)}$= $X_{(i)}$ - $X_{(i)min}$ / [$X_{(i)maks}$ - $X_{(i)min}$] Dimana: $X_{(1)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$ $X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$ Angka Melek Huruf 100 0 global (UNDP) Rata-rata lama sekolah 15 0 Sesuai standar global (UNDP) Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996 732.720 a) 300.000 b) UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan
2.	Angka Kemiskinan	Angka	4,26	4,24		4,13	4,13	Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Rumah Tangga oleh BPS
3.	Angka Pengangguran	%	5,39	4,91		4,49	4,49	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} x100\%$
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,87	-0,44		4,33	4,33	PE = $\frac{\text{PDRBt - PDRBt-1}}{\text{PDRBt-1}}$ x 100% Ket :

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
								PE = Pertumbuhan Ekonomi PDRBt = Nilai PDRB periode tahun berjalan PDRBt-1 = Nilai PDRB periode tahun sebelumnya
5.	Pendapatan per kapita	Juta rupiah	52,57	58,48		60,93	60,93	Pendapatan perkapita = PDRB / Jumlah penduduk
6.	Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)	Indeks	0,219	0,211		0,202	0,202	$G = 1 - \sum_{i=1}^{k} P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi
II	**Capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah**							
A.	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**							
1.	**Pendidikan**							
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	53,73	90,75		54,03	54,03	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan x 100%
1.2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,18	98,79		95,48	95,48	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar / Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan x 100%
1.3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang	%	76,45	99,74		76,75	76,75	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
	berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama							jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan
1.4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	26,21	49,35		40,10	40,10	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan / Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan x 100%
2.	**Kesehatan**							
2.1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,26	2,60		0,28	0,28	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan / Jumlah penduduk di Kabupaten x 100%
2.2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten / kota yang terakreditasi	%	71,43	100		100	100	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi / Jumlah RS di Kabupaten x 100%
2.3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	87,69	85,37		98,00	98,00	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah ibu hamil di Kabupaten x 100%
2.4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	97,23	88,53		100	100	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan / Jumlah ibu bersalin di Kabupaten x 100%
2.5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	%	100	89,00		100	100	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
	kesehatan bayi baru lahir							Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten x 100%
2.6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	94,15	68,69		98,00	98,00	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah balita di Kabupaten x 100%
2.7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100		100	100	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten x 100%
2.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	71,32	89,90		73,50	73,50	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten x 100%
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	95,09	88,17		97,50	97,50	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah warga negara usia 60 tahun di Kabupaten x 100%
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	71,47	100		73,00	73,00	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100		100	100	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita DM di Kabupaten x 100%
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100		100	100	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten x 100%
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100		100	100	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita TBC di Kabupaten x 100%
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100		100	100	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi HIV sesuai standar / Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten x 100%
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
3.1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	56,35	47,26		49,25	49,25	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha) / Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
3.2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	2,20	17,88		17,88	17,88	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha) / Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) x 100%
3.3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	96,93	89,04		89,04	89,04	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasi dan pelihara (ha) / luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota x 100%
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	87,61	92,04		94,00	94,00	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota / Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut X100%
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,32	95,54		97,00	97,00	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki samb. rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di kabupaten/ kota x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
3.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	%	100	100		100	100	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya / Jumlah IMB yang berlaku x 100%
3.7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	73,83	79,33		79,71	79,71	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap / Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota x 100%
3.8.	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	27,93		100	100	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis / Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kabupaten/kota x 100%
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100		100	100	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi / jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x 100%
4.	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**							
4.1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	0		100	100	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 / jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani tahun 2020 x 100%
4.2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	100		100	100	Rumah tangga (RT) penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+ RT penerima subsidi uang sewa+rumah tangga x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
								penerima penyediaan rumah layak huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan
4.3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	8,30	19,19		100	100	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) / Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100%
4.4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,29	2,69		100	100	Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah kabupaten/kota x 100%
4.5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	7,41	0,08		100	100	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / Jumlah unit perumahan kabupaten/kota x 100%
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**							
5.1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100		100	100	Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100		100	100	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
5.3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	87.188	9.385		226.317	226.317	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
5.4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	153.229	105		150	150	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
5.5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	1.389	110		200	200	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5.6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	54,29		100	100	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah / Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
5.7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	40	13,5		15	15	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran
6.	**Sosial**							
6.1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	75	100		100	100	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasanya di luar panti / Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantardan gelandangan pengemis x 100%
6.2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%	30,65	100		100	100	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran / populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota x 100%
B.	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**							
1.	**Tenaga Kerja**							
1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1,66	60		1,75	1,75	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
1.2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	4,35	2,10		4,50	4,50	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%
1.3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	71,63	106,63		72,45	72,45	PDRB tahun berjalan (ADHK) / Jumlah tenaga kerja x 100%
1.4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	26,71	29,01		27.00	27.00	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah perusahaan x 100%
1.5.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	15,96	50,97		16,63	16,63	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
2.1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,08	9,73		13,13	13,13	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung di APBD x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
2.2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0,025	100		0,021	0,021	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi / Jumlah anak (penduduk usia <18 tahun) x 100%
2.3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	rasio	0,010	17,81		0,008	0,008	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah penduduk perempuan x 100%
3.	**Pangan**							
3.1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	30,15	96,58		70,00	70,00	Jumlah cadangan pangan / Jumlah kebutuhan pangan x 100%
4.	**Pertanahan**							
4.1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100		100	100	Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi / Seluruh luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi x 100%
4.2.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	0	100		40	40	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
								Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
4.3.	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100	100		100	100	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi / Luas izin lokasi yang diterbitkan x 100%
4.4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	28,09		0	0	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha / Jumlah pemerima tanah obyek landreform x 100%
4.5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100		100	100	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah / luas izin membuka tanah yang diterbitkan x 100%
4.6.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100		100	100	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengketa tana garapan x 100%
5.	**Lingkungan Hidup**							
5.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	64,91	64,76		65,5	65,5	**IKLH = (0,376 x IKA)+(0,405 x IKU)+ (0,219 x IKL)** Ket : IKA = Indeks kualitas air IKU = Indeks kualitas udara IKL = Indeks kualitas lahan

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
5.2.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	%	62,86	58,95		100	100	Total volume sampah yang dapat ditangani / Total volume timbunan sampah kabupaten/kota x 100%
5.3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	70,00	31,43		74	74	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota / usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100%
6.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
6.1.	Perekaman KTP Elektronik	%	100	98,73		100	100	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman / Jumlah penduduk wajib KTP-el x 100%
6.2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	53,76	70,22		70	70	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%
6.3.	Kepemilikan akta kelahiran	%	96,82	98,27		100	100	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%
6.4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	48,48	58,82		80	80	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama / Jumlah OPD x 100%
7.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
7.1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100		100	100	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun / Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n) x 100%
7.2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	16,12	100		85	85	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun / Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n) x 100%
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
8.1	Angka Kelahiran Total / *Total Fertility Rate (TFR)*	Angka	2,33	1,84		2,28	2,28	**TFR** = $5 \sum_{i=1}^{7}$ ASFRi
8.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	73,42	75,21		77,95	77,95	Jumlah peserta KB aktif modern / Jumlah pasangan usia subur x 100%
8.5.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,68	14,99		9,00	9,00	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%
9.	**Perhubungan**							
9.1.	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	rasio	0,8	100		100	100	Rasio konektivitas kabupaten atau kota = IK 1 x bobot angkutan jalan)+(IK 2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
9.2.	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	rasio	0,17	2,73		2,8	2,8	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
10.	**Komunikasi dan Informatika**							
10.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	76,47	100		100	100	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo / Jumlah OPD x 100%
10.2.	Persentase Layanan Publik yang secara online dan terintegrasi	%	96,56	100		100	100	Jumlah layanan publik secara online dan terintegrasi / Jumlah layanan publik x 100%
10.3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemkab/Kota	%	79,36	10,49		10,42	10,42	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabn/kota / Jumlah penduduk 17 tahun ke atas x 100%
11.	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**							
11.1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	90,04	53,15		50	50	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset / Jumlah seluruh koperasi x 100%
11.2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	77		69	69	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%
12.	**Penanaman Modal**							
12.1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	133,01	358,28		2,15 Trilyun	2,15 Trilyun	(jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di Kabupaten/kota x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
								jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota
13.	**Kepemudaan dan Olahraga**							
13.1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	4,69	4,80		4,80	4,80	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota / Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota x 100%
13.2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,415	0,248		0,30	0,30	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota / Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota x 100%
13.3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah medali	5	6		8	8	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional
14.	**Statistik**							
14.1.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100		100	100	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah OPD x 100%
14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100		100	100	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah OPD x 100%
15.	**Persandian**							

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
15.1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	n/a	-		10	10	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian x 100%
16.	**Kebudayaan**							
16.1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	11,86	84		62,41	62,41	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya yang terdata x 100%
17.	**Perpustakaan**							
17.1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	61,81	81,81		62,80	62,80	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
17.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	64,48	84,29		64,60	64,60	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)
18.	**Kearsipan**							
18.1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional		56,72	54,62		69,00	69,00	**T = (a + i + s + j) / 4** Ket : T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuat daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalan SIKN melalui JIKN

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
18.2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		45,00	100		70,00	70,00	**T = (m + b + g + a + c + i) / 6** Ket : T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dgn NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelematan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kab/kota dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK
C.	**Urusan Pilihan**							
1.	**Perikanan**							
1.1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	30.765,05	30.749,58		31.789,05	32.301,05	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota. (sumber data : one data KKP)
2.	**Pariwisata**							
2.1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	n/a	231,25		232	232	(jumlah wisman tahun n - jumlah wisman tahun n-1) / jumlah wisman tahun n-1 x 100%
2.2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke	%	7,16	7,16		7,25	7,25	(jumlah wisnu tahun n - jumlah wisnu tahun n-1) / x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
	Kabupaten/Kota							jumlah wisnu tahun n-1
2.3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	15,01	10,75		11	11	Jumlah kamar yang terjual / Jumlah kamar yang tersedia x 100%
2.4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	n/a	16,29		17,50	17,50	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku / Total PBRB harga berlaku x 100%
2.5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,441	2,53		2,75	2,75	Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata / Jumlah total PAD x 100%
3.	**Pertanian**							
3.1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	10,40	1.025,67		10,60	10,60	Produktivitas pertanian per Ha per tahun / Luas Panen x 100%
3.2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	0	-24,61		82,00	82,00	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) / Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%
4.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
4.1.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	%	0	0		0	0	Jumlah perusahaan pemanfaaatan panas bumi yang memiliki ijin / Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
5.	**Perdagangan**							
5.1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100		100	100	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota x 100%
5.2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	28,04	80,83		37,37	37,37	Realisasi pupuk / Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) x 100%
5.3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	77,78	93,84		97,87	97,87	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan / Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota x 100%
6.	**Perindustrian**							
6.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten/Kota	%	15,90	10,63		26,40	26,40	(jumlah IKM tahun n - IKM tahun n-1) / jumlah IKM tahun n-1 x 100%
6.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	94,94	52,5		99,71	99,71	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
6.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	6,09	10,46		7,98	7,98	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%
6.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IPUI Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	Tertulis : tidak perlu diisi	Tertulis : tidak perlu diisi		Tertulis : tidak perlu diisi	Tertulis : tidak perlu diisi	Ket : Di normalisasi oleh kemendagri
6.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0		0	0	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%
6.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	125	100		100	100	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
D.	**Fungsi Penunjang**							
1.	**Perencanaan dan Keuangan**							
1.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	13,03	12,65		11,50	11,50	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
								Total belanja APBD
1.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	13,27	15,28		16,26	16,26	Jumlah PAD / Jumlah APBD Non Migas x 100%
1.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3		3	3	Tingkat Mauritas SPIP
1.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3		3	3	Tingkat Kualitas APIP
1.5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	68,26	71,16		68,50	68,50	jumlah belanja urusan pemerintahan - tranfer expenditures / jumlah belanja APBD x 100%
1.6.	Opini Laporan Keuangan	%	WTP*	WTP		WTP	WTP	Opini Laporan Keuangan
2.	**Pengadaan**							
2.1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00		0,00	0,00	Jumlah kontrak infrasrtuktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama Tahun x / Jumlah kontrak keseluruhan tahun x x 100%
2.2.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	45,00	75,50		70,00	70,00	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah keseluruhan pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif x 100%

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
2.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	58,66	46,01		68,00	68,00	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan / Total belanja langsung x 100%
3.	**Kepegawaian**							
3.1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	77,25	78,63		75,23	74,66	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi keatas / Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah x 100%
3.2.	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	28,28	30,40		21,91	20,79	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) / Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100%
3.3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	36,07	0,83		75,60	97,34	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi / Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100%
4.	**Manajemen Keuangan**							
4.1.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	2,33	5,44		2,50	2,50	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi / Total belanja APBD dikurangi satu x 100%
4.2.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	30,81	23,98		31,50	31,50	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi / Total PAD dalam APBD dikurangi satu x 100%
4.3.	Assets Management	Ya	Ya	Ya		Ya	Ya	Total Assets Management

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026 Hasil Rakortekbang	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Rumus
								1. Apakah ada daftar asset Tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset Tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
4.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	10,69	3,30		9,75	9,75	Nilai realisasi SiLPA / Total belanja anggaran tahun sebelumnya x 100%
5.	**Transparansi dan partisipasi publik**							
5.1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	95,00	94,55		94,55	94,55	belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda / realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda x 100%
5.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100		100	100	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda / Total jumlah dokumen yang telah dirinci x 100%

6.3. Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal

Salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah menyediakan pelayanan dasar yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

SPM ditetapkan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas :

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial

Selanjutnya jenis pelayanan dasar yang ditetapkan untuk daerah kabupaten/kota berdasarkan bidang Urusan Pemerintahan terdiri atas:

a. Urusan Bidang Pendidikan, terdiri dari:
   1) pendidikan anak usia dini;
   2) pendidikan dasar;
   3) pendidikan kesetaraan;

b. Urusan Bidang Kesehatan, terdiri dari:
   1) pelayanan kesehatan ibu hamil;
   2) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
   3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
   4) pelayanan kesehatan balita;
   5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
   6) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
   7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
   8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
   9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
   10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12) pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus);

c. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

d. Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:

1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

e. Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

1) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2) pelayanan informasi rawan bencana;
3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

f. Urusan Bidang Sosial, terdiri dari:

1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Penetapan target capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3.
Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2026

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar/Indikator Layanan Dasar	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
I.	**Bidang Pendidikan**						
1.	Pendidikan Dasar	%	100%	98,79	99,52	99,52	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga
	a. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Orang	54.583	37.266	38.383	38.383	
	b. Rata-rata kemampuan Literasi dan siswa SD/MI berdasarkan asesmen nasional	Nilai	1,81	64,44	69,66	69,66	
	c. Rata-rata kemampuan Numerasi siswa SD/MI berdasarkan asesmen nasional	Nilai	1,71	53,48	59,28	59,28	
	d. Rata-rata kemampuan Literasi dan siswa SMP/MTs berdasarkan asesmen nasional	Nilai	1,75	75,01	77,21	77,21	
	e. Rata-rata kemampuan Numerasi siswa SD/MTs berdasarkan asesmen nasional	Nilai	1,75	64,25	67,25	67,25	
2.	Pendidikan Kesetaraan	%	100%	49,35	60	60	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga
	a. Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	Orang	1.079	1.179	1.218	1.218	
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	%	100%	90,75	95	95	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga
	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	7.034	10.679	10.999	10.999	
II.	**Bidang Kesehatan**						Dinas Kesehatan
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100%	84.41%	100%	100%	
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	5.778	4.443	6.161	6.161	

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar/Indikator Layanan Dasar	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100%	89.80%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	5.516	4.607	5.882	5.882	
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100%	90.10%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	5.253	4.573	5.601	5.601	
4.	Pelayanan kesehatan balita	%	100%	94.36%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	26.399	19.690	29.272	29.272	
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100%	99.90%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	56.955	57.281	59.166	59.166	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100%	91.44%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	213.150	197.097	210.894	210.894	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100%	92.41%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	33.045	29.238	27.920	27.920	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	69.772	19.641	66.534	66.534	
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Jumlah Warga Negara penderira diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	6.573	6.693	6.937	6.937	
10.	Pelayanan kesehatan ODGJ	%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat	Orang	619	654	631	631	

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar/Indikator Layanan Dasar	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
	yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	5.102	7.033	7.702	7.702	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	7.462	7.336	9.487	9.487	
III.	**Bidang Pekerjaan Umum**						
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	92,04	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	SR	73.258	73.670	74.548	74.548	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	%	100%	40,20	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	SR	32.120	32.175	32.520	32.520	
IV.	**Bidang Perumahan Rakyat**						
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Orang	0	15	50	50	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak	Orang	0	42	10	10	

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar/Indikator Layanan Dasar	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
	huni						
V.	**Bidang Trantibumlinmas**						
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	Orang	155	49	155	155	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	%	100%	4%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	87.500	9.385	226.317	226.317	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	490	105	150	150	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1.660	250	200	200	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	33	16	33	33	
VI.	**Bidang Sosial**						Dinas Sosial
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%	100%	97.94%	100%	100%	Dinas Sosial
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	290	300	320	320	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi	Orang	54	90	69	69	

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar/Indikator Layanan Dasar	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
	sosial di luar panti						
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	180	200	210	210	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	%	100%	90%	100%	100%	Dinas Sosial
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Orang	10	6	17	17	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Orang	300	17	330	330	

6.4. Penetapan Sasaran Pokok, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045.

Adapun sasaran pokok, indikator sasaran dan target kinerja sasaran tahun 2026 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.4
Sasaran Pokok, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2026 yang Berpedoman Pada RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
Sasaran 1 : Mewujudkan pelayanan kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,31
	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Orang	118
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	17,5
	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)	%	67,45
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)	%	91,84
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,08
Sasaran 2 : Mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan daya saing SDM	Persentase kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	- Literasi Membaca	%	58,03-72,32
	- Numerasi	%	3,57-16,97
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	- Literasi Membaca	%	56,01-58,01
	- Numerasi	%	30,61-32,59
	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 tahun	Tahun	8,49
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,79
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	66,37
Sasaran 3 : Mewujudkan ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya	Tingkat Kemiskinan	%	4,13
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	%	39,31
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	53,44

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
Sasaran 4 : Mewujudkan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	21,99-22,14
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,53
	Jumlah Tamu Wisatawan (nusantara & wisman)	Orang	8,57
	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	n/a
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	12,94
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	%	3,58
	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	6,32
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0,77
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	1,96
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	4,49
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	52,81
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	51,57
	Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (persen PDB) Indeks Kapabilitas Inovasi	%	3,28
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	86,27
Sasaran 5 : Menerapkan Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	71,67
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	29,06
Sasaran 6 : Mewujudkan Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,99
Sasaran 7 : Mewujudkan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Kecamatan*	%	5,12
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	25,42
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	34,63
Sasaran 8 : Mewujudkan Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi atau Nasional (%)	%	20,25
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	37,27
	Persentase Desa Mandiri	%	9,1
Sasaran 9 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan	Indeks Kualitas kebijakan (Indeks Reformasi Birokrasi)	%	71,36
	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	n/a
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,65

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
Inovatif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,90
	Opini Pengawasan Pelayanan Publik dari Ombudsman	Opini	97,31
	Indeks Integritas Daerah (Skor MCP dari KPK)	Nilai	74,99
Sasaran 10 : Mewujudkan Kondusivitas Daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	71,88
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	66,25
	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	71,88
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	66,99
	Indeks Demokrasi	Kategori	Sedang
Sasaran 11 : Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,65
	Tingkat Inflasi	%	2,60-3,28
	Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB	%	28,73
	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	1,28
	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Miliar Rupiah	7.600.577,14
	Total Kredit/PDRB	%	18,6
	Inklusi Keuangan	%	86,79
Sasaran 12 : Mewujudkan Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan	Asia Power Index (Diplomatic Influencer) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama	-	n/a
	Asia Power Index (Military Capability) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama	-	n/a
Sasaran 13 : Mewujudkan Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	59,83-59,90
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	77,12-77,17
Sasaran 14 : Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Inklusivitas Masyarakat yang Berbudaya	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	69,87-69,88
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,447-0,446
Sasaran 15 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,529
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,38
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,86

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	12,75
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	54,06
Sasaran 16 : Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	kWh	1.261
	Intensitas Energi Primer	(SBM/ Rp milyar)	156,5
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	11,21
	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,65
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	30,04
Sasaran 17 : Mewujudkan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	116,06
	Persentase Penurunan Emisi GRK		
	a. Kumulatif	%	19,16
	b. Tahunan	%	30,55

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan mempedomani RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Setelah dilakukan penyelarasan tema pembangunan Tahun 2026 yaitu "Inovasi dan Hilirisasi Sektor Ekonomi Unggulan secara Berkelanjutan" dan prioritas (1) Penguatan Kapasitas Birokrasi; (2) Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial (3) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (4) Penguatan Sektor Ekonomi Unggulan Industri dan Pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru) ; dan (5) Pengelolaan Llingkungan Hidup. Tema dan prioritas ditetapkan agar lebih fokus dalam mencapai target indikator makro pada tahun 2026. Penyusunan RKPD dilakukan dengan menselaraskan dengan dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.

Sasaran dan kegiatan strategis pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 juga mengacu dan memperhatikan: (1) tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026; (2) hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024; (3) Prioritas Nasional dalam Rencana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026; (4) Prioritas Provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026; dan (5) Kerangka Ekonomi Daerah serta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2026; (6) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs); dan (7) Kebijakan terkait Anak dan Gender.

Setelah dilakukan penetapan terhadap RKPD Tahun 2026, diharapkan Perangkat Daerah dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 mempedomani RKPD Tahun 2026, dengan melaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan keselarasan pelaksanaan dengan perangkat daerah lainnya,

2. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2026 sesuai target capaian yang sudah ditetapkan, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
3. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan perundangan lainnya

Pada akhirnya, komitmen serta sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan Kabupaten Bangka yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangka mengajak semua *stakeholder* dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

LAMPIRAN

KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

KABUPATEN : BANGKA

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB**			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB**				
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.52	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	26.52	SESUAI	DINDIKPORA
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10.18		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10.18	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	71.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	71	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	SESUAI	
	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	96.00%	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	96%	SESUAI	DINDIKPORA
		APM SMP	73.50%		APM SMP	73.5	SESUAI	
		Kualitas Pembelajaran Jenjang SD	2.49		Kualitas Pembelajaran Jenjang SD	2.49%	SESUAI	
		Kualitas Pembelajaran Jenjang SMP	2.51		Kualitas Pembelajaran Jenjang SMP	2.51%	SESUAI	
		APM 5-6	57.10%		APM 5-6	57.10%	SESUAI	
		Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan	45.00%		Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan	45%	SESUAI	
		Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG	25.61%		Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG	25.62%	SESUAI	
	Program Pengembangan Kurikulum	Kualitas pengelolaan kurikulum sekolah	49.73	Program Pengembangan Kurikulum	Kualitas Pengelolaan Kurikulum Sekolah	49.73	SESUAI	DINDIKPORA
		Muatan Pengembangan Kurikulum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	100.00%		Muatan Pengembangan Kurikulum Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku	100%	SESUAI	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi GTK bersertifikat jenjang SD	45.00%	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi GTK Bersertifikat Jenjang SD	45%	SESUAI	DINDIKPORA
		Proporsi GTK bersertifikat jenjang SMP	32.39%		Proporsi GTK Bersertifikat Jenjang SMP	32.39%	SESUAI	
		Indeks Distribusi Guru	0.87%		Indeks Distribusi Guru	0.87	SESUAI	
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar pada Pendidikan Non Formal	98.00%		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar pada Pendidikan Non Formal	98%	SESUAI	
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Tingkat kepatuhan terhadap penyelenggara perizinan	100.00%	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Tingkat Kepatuhan terhadap Penyelenggara Perizinan	100%	SESUAI	DINDIKPORA
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27.15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27.15	SESUAI	DINKES
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.15		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.15	SESUAI	

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.00%		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.00%	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	98,20%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	98,20%	SESUAI	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan	100%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan	100%	SESUAI	DINKES
		Indeks Keluarga Sehat	0,45 Indeks		Indeks Keluarga Sehat	0,45 Indeks	SESUAI	
		Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100.00%		Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	100.00%	SESUAI	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas SDMK sesuai standar	0.75%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDMK Sesuai Standar	0,75 Persen	SESUAI	DINKES
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase pengawasan toko obat, apotek, dan keamanan pangan yang beredar sesuai standar	91.00%	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengawasan Toko Obat, Apotek, dan Keamanan Pangan yang Beredar Sesuai Standar	91 Persen	SESUAI	DINKES
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0,75	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0.75	SESUAI	DINKES
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				DPUPR
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30.00		Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	30.30%	REALISASI CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA SUDAH MELEBIHI TARGET	
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.99		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.99%	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	65.60		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	65.60%	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4%	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	SESUAI	
	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	% Jaringan Irigasi dalam kondisi yg baik	67.73%	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	% Jaringan Irigasi dalam Kondisi yang Baik	67.73%	SESUAI	DPUPR
		% Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	63.67%		% Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	63.67%	SESUAI	
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	% Rumah tangga yang mempunyai akses air minum aman	67.52	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	% Rumah Tangga yang menggunakan air minum	67.52%	SESUAI	DPUPR
	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	12.35	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional			Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional tidak ada dalam RKPD 2026	DPUPR
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL	25.90	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki SPAL	25.90%	SESUAI	DPUPR

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	% Drainase Dalam Kondisi Baik	79.79%	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	% Drainase dalam Kondisi Baik	79.79%	SESUAI	DPUPR
	Program pengembangan permukiman	Cakupan pengembangan infrastruktur permukiman	100.00%	Program pengembangan permukiman			Program pengembangan permukiman tidak ada dalam RKPD 2026	DPUPR
	Program penataan bangunan gedung	Ketaatan terhadap penataan bangunan gedung	100.00%	Program penataan bangunan gedung	Ketaatan terhadap Penataan Bangunan Gedung	100%	SESUAI	DPUPR
	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	100.00%	Program penataan bangunan dan lingkungannya			Program penataan bangunan dan lingkungannya tidak ada dalam RKPD 2026	DPUPR
	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	77.51%	Program penyelenggaraan jalan	% Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	77.51%	SESUAI	DPUPR
	Program pengembangan jasa konstruksi	Presentase SDM jasa kontruksi yang terlatih	100.00%	Program pengembangan jasa konstruksi	Presentase SDM Jasa Konstruksi yang Terlatih	100%	SESUAI	DPUPR
	Program penyelenggaraan penataan ruang	% Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang	100.00%	Program penyelenggaraan penataan ruang	% Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%	SESUAI	DPUPR
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	28,20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	28.2	SESUAI	DINPERKPP
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.50		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.50	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	65.50		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	65.50	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100	SESUAI	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana yang Direkonstruksi	98.48	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang Direkonstruksi	98,48 persen	SESUAI	DINPERKPP
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	100.00%	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	100 persen	SESUAI	DINPERKPP
	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	100.00%	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	100 persen	SESUAI	DINPERKPP
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah yang Memiliki Akses Sarana dan Prasarana Perumahan yang Layak	100.00%	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah yang Memiliki Akses Sarana dan Prasarana Perumahan yang Layak	100 persen	SESUAI	DINPERKPP
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27.38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	27.38	SESUAI	DINAS SATPOL PP
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10.28		Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	10.28	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	60.82		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	60.82	SESUAI	

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.50		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.50	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	75.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	75.00%	SESUAI	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.65	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.65	SESUAI	BPBD
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10.62		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10.62	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70.00	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	SESUAI	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	4.00%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	4%	SESUAI	DINAS SATPOL PP
		Presentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak	96.00%		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak	96%	SESUAI	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan darurat bencana yang dilaksanakan	100%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana yang dilaksanakan	100%	SESUAI	BPBD
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran	85.00%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran	85%	SESUAI	DINAS SATPOL PP
		Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi	100.00%		Persentase Korban Kebakaran yang Diselamatkan dan Dievakuasi	100%	SESUAI	
		Presentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100.00%		Presentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100.00%	SESUAI	
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	28.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	28	SESUAI	DINAS SOSIAL
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.50		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.5	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	68.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	68.00	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	SESUAI	
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	85.00%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	85%	SESUAI	DINAS SOSIAL
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	58.00%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	58%	SESUAI	DINAS SOSIAL
	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	65.00%	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	65%	SESUAI	DINAS SOSIAL
	Program Penanganan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana	50.00%	Program Penanganan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana	50%	SESUAI	DINAS SOSIAL

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100.00%	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	SESUAI	DINAS SOSIAL
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				DINAKERINDAG
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	25.62	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	25.62	SESUAI	
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.17		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.17	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.65		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.65	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	SESUAI	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Daerah	88.00%				Program tidak ada dalam RKPD 2026	DINAKERINDAG
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	60.00%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	60.00 %	SESUAI	DINAKERINDAG
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	100.00%	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	100 %	SESUAI	DINAKERINDAG
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	49.04%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	49.04 %	SESUAI	DINAKERINDAG
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	29.15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	29.15	SESUAI	DP2KBP3A
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.45		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.45	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70.00	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	SESUAI	
	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	100.00%	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang Menerapkan PPRG	100%	SESUAI	DP2KBP3A
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Yang Terselesaikan	100.00%	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan yang Terselesaikan	100%	SESUAI	DP2KBP3A
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan	40.00%	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan	40.15%	REALISASI CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA SUDAH MELEBIHI TARGET	DP2KBP3A
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Profile Gender dan anak Kabupaten	1.00	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			Program tidak ada dalam RKPD 2026	DP2KBP3A
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	persentase lembaga PHA yang berkualitas	80.00%	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga PHA yang Berkualitas	80%	SESUAI	DP2KBP3A

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase Kasus Kekerasan Anak Yg Terselesaikan	100.00%	Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase Kasus Kekerasan Anak yang Terselesaikan	100%	SESUAI	DP2KBP3A
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30.00	SESUAI	DINPANPERTAN
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.25		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.25	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.00	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	SESUAI	
	Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang memiliki Lumbung Pangan	8.60%				Program tidak ada dalam RKPD 2026	DINPANPERTAN
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Daerah	45.00%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Daerah	45.00%	SESUAI	DINPANPERTAN
		Persentase peningkatan kelancaran distribusi pangan	87.00%		Persentase peningkatan kelancaran distribusi pangan	87.00%	SESUAI	
		Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi Umbian	1.70%		Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi Umbian	1.70%	SESUAI	
	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Peningkatan Penaganan Kerawanan Pangan	16.00%				Program tidak ada dalam RKPD 2026	DINPANPERTAN
	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Keamanan Pangan Masyarakat	90.00%	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Masyarakat	90 %	SESUAI	DINPANPERTAN
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							
	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase usaha yang memiliki izin lokasi	100.00%				Program tidak ada dalam RKPD 2026	DINPERKPP
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	100.00%	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100 persen	SESUAI	DINPERKPP
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah yang terselesaikan	100.00%	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah yang Terselesaikan	100 persen	SESUAI	DINPERKPP
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Lahan Pemda yang tersedia untuk kegiatan pembangunan	90%	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan Pemda yang Tersedia untuk Kegiatan Pembangunan	90 persen	SESUAI	DINPERKPP
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Membuka Tanah	100	Perubahan Nomenklatur Program pada SIPD	DINPERKPP
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27.75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	27.75	SESUAI	DLH
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.75		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.75	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	59.70		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	59.7	SESUAI	

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	95.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	95%	SESUAI	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan	100.00%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan	100%	SESUAI	DLH
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	100.00%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	SESUAI	DLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati yang dikelola	100.00%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	100%	SESUAI	DLH
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Penghasil Limbah B3 yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan baik	100.00%	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Penghasil Limbah B3 yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 dengan Baik	100%	SESUAI	DLH
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengawasan ketaatan pelaku usaha/kegiatan secara administrasi maupun teknis	100.00%	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengawasan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Secara Administrasi Maupun Teknis	100%	SESUAI	DLH
	Program pengakuan keberadaan masyarkat hukum adat (HMA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Perda tentang pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diselesaikan	100.00%	Program pengakuan keberadaan masyarkat hukum adat (HMA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Perda tentang pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH yang Diselesaikan	100%	SESUAI	DLH
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	100.00%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	100%	SESUAI	DLH
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten	100.00%	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mendapatkan Penghargaan Tingkat Kabupaten	100%	SESUAI	DLH
	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pelayanan dan fasilitasi pengaduan lingkungan hidup	100.00%	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Pelayanan dan Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	SESUAI	DLH
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah	30%	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	30%	SESUAI	DLH
		Persentase Penanganan Sampah	70%		Persentase Penanganan Sampah	70%	SESUAI	
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	30.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	30.00	SESUAI	DINDUKPENCAPIL
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	13.50		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	13.50	SESUAI	
		Persentase temuan pengelolaan keuangan dalam LHP BPK-RI	0.00%		Persentase temuan pengelolaan keuangan dalam LHP BPK-RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	72.00		Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	72.00	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.00	SESUAI	
		Presentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Presentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	SESUAI	
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KIA	65.00%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	65%	SESUAI	DINDUKPENCAPIL
		Persentase Penerbitan KK	100.00%		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100.00%	SESUAI	
		Persentase Perekaman KTP-EL	99.50%		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	99.50%	SESUAI	
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100.00%	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%	SESUAI	DINDUKPENCAPIL
		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	70.00%		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	70%	SESUAI	

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	99.00%		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	99%	SESUAI	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Instansi yang melakukan PKS pemanfaatan data	20 OPD	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Instansi yang melakukan PKS Pemanfaatan Data	20 OPD	SESUAI	DINDUKPENCAPIL
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.52	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	26.52	SESUAI	DINPEMDES
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.50		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.5	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	67.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	67%	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.50		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.5	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	SESUAI	
	Program Penataan Desa	Desa yang Tertata Wilayahnya	41.94	Program Penataan Desa	Desa yang Tertata Wilayahnya	41.94%	SESUAI	DINPEMDES
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi yang Baik	42.00%	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi yang Baik	42%	SESUAI	DINPEMDES
		Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik	100.00%		Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik	100%	SESUAI	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	100.00%	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	100%	SESUAI	DINPEMDES
8	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
	Program Pengendalian Penduduk	ketersediaan kebijakan pengendalilan pendudukan yang disediakan sesuai dengan ketentuan	1 Kebijakan	Program Pengendalian Penduduk	Ketersediaan Kebijakan Pengendalilan Pendudukan yang Disediakan Sesuai dengan Ketentuan	1 kebijakan	SESUAI	DP2KBP3A
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	cakupan penggunaan alat kontrasepsi MKJP	15.15	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Penggunaan Alat Kontrasepsi MKJP	15.15%	SESUAI	DP2KBP3A
		Cakupan Peserta KB Aktif	75.1		Cakupan Peserta KB Aktif	75.10%	SESUAI	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	164	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Keluarga yang Melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter	164 Keluarga	SESUAI	DP2KBP3A
		Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	62		Jumlah PIK Remaja dan BKR yang Mendapat Pembinaan GenRe	62 Kelompok	SESUAI	
		Jumlah Kelompok BKL yang Melaksanakan 7 (tujuh) dimensi Lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia	30		Jumlah Kelompok BKL yang Melaksanakan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia	30 kelompok	SESUAI	
		presentase balai penyuluh KB yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	100.00%		Persentase Balai Penyuluh KB yang Melaksanakan Kegiatan Usaha ekonomi keluarga	100%	SESUAI	
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	28.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	28.00	SESUAI	DINHUB
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	18.00		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	18.00	SESUAI	

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.00	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	SESUAI	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Wilayah yang terlayani angkutan umum	77.00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Wilayah yang terlayani angkutan umum	77.00%	SESUAI	DINHUB
		Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	85.00%		Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	85.00%	SESUAI	
10	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30	SESUAI	DINKOMFOTIK
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.50		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.5	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.10		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.1	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	SESUAI	
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	95.00	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	95	SESUAI	DINKOMFOTIK
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	100.00%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase SPLP pada Cakupan Layanan SPBE	100%	SESUAI	DINKOMFOTIK
		Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE	100.00%		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	100.00%	SESUAI	
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**							
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang aktif	50.00%	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang aktif	50.00%	SESUAI	DINPMP2KUKM
	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	50.00%	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	50 %	SESUAI	DINPMP2KUKM
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	1.46%	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang mempunyai kompetensi	1,46 %	SESUAI	DINPMP2KUKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha	3.76%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha	3,76 %	SESUAI	DINPMP2KUKM
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	15.27%	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	15,27 %	SESUAI	DINPMP2KUKM
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.47	SESUAI	DINPMP2KUKM
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10.45		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10.45	SESUAI	

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	65.15		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	65.15	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.70		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.70	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	78.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	78.00%	SESUAI	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Peluang Investasi	55.00%				Program tidak ada dalam RKPD 2026	DINPMP2KUKM
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Investasi	100.00%	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Investasi	100.00%	SESUAI	DINPMP2KUKM
	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Pelayanan Perizinan	90.00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Bidang Pelayanan Perizinan	90,00 %	SESUAI	DINPMP2KUKM
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian investor yang melakukan penanaman modal	100.00%	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah	100 %	SESUAI	DINPMP2KUKM
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola	100.00%	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola	100 %	SESUAI	DINPMP2KUKM
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang Aktif	41.05%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang Aktif	41.05%	SESUAI	DINDIKPORA
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	% Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahrga dan Organisasi Olahraga	92.50%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	% Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahrga dan Organisasi Olahraga	92.50%	SESUAI	DINDIKPORA
		% sarana dan prasarana olehraga yang memenuhi standar	100.00%		Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	100%	SESUAI	
		% atlet yang berprestasi	100.00%		% Atlet yang Berprestasi	100%	SESUAI	
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral yang terintegrasi	100.00%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral yang terintegrasi	100%	SESUAI	DINKOMFOTIK
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	1	SESUAI	DINKOMFOTIK
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				
	Program Pengembangan Kebudayaan	indeks pengembangan budaya	75.70	Program Pengembangan Kebudayaan	indeks pengembangan budaya	75.70	SESUAI	DINPARBUD
		indeks pemanfaatan budaya	73.70		indeks pemanfaatan budaya	73.70	SESUAI	
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Indeks Perlindungan Budaya	74.43	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Indeks Perlindungan Budaya	74.43	SESUAI	DINPARBUD
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.00	SESUAI	DKP
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.79		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.79	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	69.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	69.00	SESUAI	

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	SESUAI	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kepuasan Pemustaka	70.00%		Tingkat Kepuasan Pemustaka	70.00%	SESUAI	DKP
		Persentase Masyarakat yang Gemar Membaca	50.87%		Persentase Masyarakat yang Gemar Membaca	50.87%	SESUAI	
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	50.00%	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	50 %	SESUAI	DKP
		Persentase Nilai Ketertiban Pelaksanaan Penyususan Arsip	65.00%		Persentase Nilai Ketertiban Pelaksanaan Penyususan Arsip	65.00%	SESUAI	
		Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Statis	50.50%		Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Statis	50.50%	SESUAI	
		Persentase Nilai Aspek Prasarana dan Sarana Keasripan	55.00%		Persentase Nilai Aspek Prasarana dan Sarana Keasripan	55.00%	SESUAI	
		Persentase Nilai Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	62.35%		Persentase Nilai Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	62.35%	SESUAI	
		Persentase Nilai Aspek Tenaga Kearsipan	53.35%		Persentase Nilai Aspek Tenaga Kearsipan	53.35%	SESUAI	
		Persentase Nilai Aspek Program Kearsipan	55.35%		Persentase Nilai Aspek Program Kearsipan	55.35%	SESUAI	
		Persentase Nilai Aspek Kelembagaan	55.35%		Persentase Nilai Aspek Kelembagaan	55.35%	SESUAI	
II	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				DINPERKAN
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	28.65	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	28.65	SESUAI	
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.05		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.05	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.20		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.50	REALISASI CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA SUDAH MELEBIHI TARGET	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.25		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.25	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	60.85%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	60.85%	SESUAI	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan (%)	24.00%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan (%)	24.00%	SESUAI	DINPERKAN
		Persentase Nelayan yang Dilayani	83.00%		Persentase Nelayan yang Dilayani	83.00%	SESUAI	
		Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih (%)	1.20%		Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih (%)	1.20%	SESUAI	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan (%)	9.62%	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan (%)	9.62%	SESUAI	DINPERKAN
		Persentase Pembudidaya yang Dilayani	83.00%		Persentase Pembudidaya yang Dilayani	83.00%	SESUAI	
		Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih (%)	25.42%		Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih (%)	25.42%	SESUAI	

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi	100.00%	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi	100.00%	SESUAI	DINPERKAN
		Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidaya ikan yang Diawasi	100.00%		Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidaya ikan yang Diawasi	100.00%	SESUAI	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan (%)	100.00%	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan (%)	100.00%	SESUAI	DINPERKAN
		Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.00%		Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.00%	SESUAI	
		Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih (%)	5.00%		Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih (%)	5.00%	SESUAI	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.75	Pada RKPD 2026 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diinput pada urusan Kebudayaan	DINPARBUD
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	17.15		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	17.15	Pada RKPD 2026 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diinput pada urusan Kebudayaan	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	Pada RKPD 2026 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diinput pada urusan Kebudayaan	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70.00	Pada RKPD 2026 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diinput pada urusan Kebudayaan	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	Pada RKPD 2026 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diinput pada urusan Kebudayaan	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	Pada RKPD 2026 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diinput pada urusan Kebudayaan	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Indeks Destinasi Pariwisata	77.80	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Indeks Destinasi Pariwisata	77.80	SESUAI	DINPARBUD
	Program Pemasaran Pariwisata	Indeks Pemasaran Pariwisata	65,00	Program Pemasaran Pariwisata	Indeks Pemasaran Pariwisata	65,00	SESUAI	DINPARBUD
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks Kemitraan Pariwisata	79,00	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks Kemitraan dan ekonomi kreatif bidang Pariwisata	79,00	SESUAI	DINPARBUD
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Benih Unggul Pertanian	70.00%	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Benih Unggul Pertanian	70 %	SESUAI	DINPANPERTAN
		Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Bibit/Benih ternak Unggul	70.00%					
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Sapras Pertanian	90.00%	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Sapras Pertanian	90 %	SESUAI	DINPANPERTAN

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Pengendalian Kesehatan Masyarakat dan Veteriner	Persentase Penyakit Ternak Yang Ditangulangi	90.00%	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penyakit Ternak Yang Ditangulangi	90 %	SESUAI	DINPANPERTAN
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Serangan OPT yang dapat dikendalikan	75.00%	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Serangan OPT yang dapat dikendalikan	75 %	SESUAI	DINPANPERTAN
	Program Penyuluh Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian	90.00%	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian	90 %	SESUAI	DINPANPERTAN
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Peternakan yang Memiliki Izin	91.00%				Program tidak ada dalam RKPD 2026	DINPANPERTAN
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan	80.00%				Program tidak ada dalam RKPD 2026	DINAKERINDAG
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana distibusi yang direvitalisasi	70.00%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana distibusi yang direvitalisasi	70 %	SESUAI	DINAKERINDAG
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	100.00%	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	100 %	SESUAI	DINAKERINDAG
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang	100.00%				Program tidak ada dalam RKPD 2026	DINAKERINDAG
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang	43.13%	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang	43.13%	SESUAI	DINAKERINDAG
	Program Pengguna dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase fasilitasi promosi terhadap pelaku usaha yang menggunakan dan memasarkan Produk Dalam Negeri	75.00%				Program tidak ada dalam RKPD 2026	DINAKERINDAG
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI**							
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitasi untuk Pengembangan Produk IKM	0.80%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitasi untuk Pengembangan Produk IKM	0.80 %	SESUAI	DINAKERINDAG
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui OSS	40%				Program tidak ada dalam RKPD 2026	DINAKERINDAG
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS	20.00%				Program tidak ada dalam RKPD 2026	DINAKERINDAG
III	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							
1	**SEKRETARIAT DAERAH**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	29.80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	29.80	SESUAI	SETDA
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.75		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.75	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	67.00		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah	67,00 NILAI	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	97.38%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	97.38%	SESUAI	
		Persentase Layanan keprotokolan KDH/WKDH sesuai SOP	100.00%		Persentase Layanan keprotokolan KDH/WKDH sesuai SOP	100.00%	SESUAI	

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase rumusan kebijakan di Bidang Kelembagaan	100.00%		Persentase rumusan kebijakan di Bidang Kelembagaan	100.00%	SESUAI	
		Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Ketata Laksanaan	100.00%		Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Ketata Laksanaan	100.00%	SESUAI	
		Percentase Rumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan AKIP	100.00%		Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan AKIP	100 %	SESUAI	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100.00%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100.00%	SESUAI	SETDA
		Persentase rumusan kebijakan di bidang kesra dan kemasyarakatan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100.00%		Persentase rumusan kebijakan di bidang kesra dan kemasyarakatan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 %	SESUAI	
		Persentase produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100.00%		Persentase produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100.00%	SESUAI	
		persentase permasalahan hukum dan HAM yang terselesaikan	100.00%		persentase permasalahan hukum dan HAM yang terselesaikan	100 %	SESUAI	
		Persentase rumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100.00%		Persentase rumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 %	SESUAI	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100.00%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 %	SESUAI	SETDA
		Persentase rumusan kebijakan dibidang pembangunan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100.00%		Persentase rumusan kebijakan dibidang pembangunan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 %	SESUAI	
		Persentase Paket PBJ yang transparan, akuntabel dan tepat waktu	100.00%		Persentase paket PBJ yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu	100 %	SESUAI	
2	**SEKRETARIAT DPRD**			**SEKRETARIAT DPRD**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.32	SESUAI	SEKRETARIAT DPRD
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.18		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.18	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.50		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.50	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	SESUAI	
		Persentase layanan Administrasi bagi DPRD	100.00%		Persentase layanan Administrasi bagi DPRD	100.00%	SESUAI	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase Produk Hukum Daerah yang diselesaikan Tepat Waktu	100.00%	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase Produk Hukum Daerah yang diselesaikan Tepat Waktu	100.00%	SESUAI	SEKRETARIAT DPRD
		Presentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	100.00%		Presentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	100.00%	SESUAI	
IV	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
1	**PERENCANAAN**							

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30.00	SESUAI	BAPPEDA
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	15.00		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	15.00	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.00	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	SESUAI	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah	100.00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 Indeks	SESUAI	BAPPEDA
		Indeks Pemenuhan Data perencanaan pembangunan daerah	100.00		Indeks Pemenuhan Data perencanaan pembangunan daerah	100.00	SESUAI	
		Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100.00%		Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100.00%	SESUAI	
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah	100.00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah	100 Indeks	SESUAI	BAPPEDA
2	**KEUANGAN**			**KEUANGAN**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	29.53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	29.53	SESUAI	BPPKAD
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.00		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.00	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.00	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	5.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	5.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	80.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	80.00%	SESUAI	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD Tepat waktu	100.00%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD Tepat waktu	100.00%	SESUAI	BPPKAD
		Persentase layanan penatausahaan perbendaharaan Daerah sesuai SOP	100.00%		Persentase layanan penatausahaan perbendaharaan Daerah sesuai SOP	100.00%	SESUAI	
		Penyusunan dan penyampaian LKPD sesuai SAP tepat waktu	100.00%		Penyusunan dan penyampaian LKPD sesuai SAP tepat waktu	100.00%	SESUAI	
		Persentase layanan penunjang kewenangan pengelolaan keuangan Daerah yang tertangani	100.00%		Persentase layanan penunjang kewenangan pengelolaan keuangan Daerah yang tertangani	100.00%	SESUAI	
		Persentase layanan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah yang tertangani	100.00%		Persentase layanan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah yang tertangani	100.00%	SESUAI	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan BMD	100.00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan BMD	100.00	SESUAI	BPPKAD
		Persentase Penyusunan dan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100.00%		Persentase Penyusunan dan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100.00%	SESUAI	

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	100.00%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	100.00%	SESUAI	BPPKAD
3	**KEPEGAWAIAN**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	25.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	25.00	SESUAI	BKPSDMD
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.00		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.00	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.00	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	SESUAI	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Rencana kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan	100.00%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Rencana kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan	100.00%	SESUAI	BKPSDMD
		Persentase pengadaan ASN sesuai dengan Rencana Kebutuhan ASN	16.09%		Persentase pengadaan ASN sesuai dengan rencana kebutuh ASN	100.00%	REALISASI CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA SUDAH MELEBIHI TARGET	
		Persentase Penempatan SDM sesuai standar kompetensi	74.00%		Persentase Penempatan SDM sesuai standar kompetensi	74.00%	SESUAI	
		Persentase Data Kepegawaian yang Up to date, Akurat, Cepat, Tepat	100.00%		Persentase data kepegawaian yang Up to date, akurat, cepat, tepat	100.00%	SESUAI	
		Persentase Perangkat daerah dengan kinerja ASN sesuai ekspektasi	100.00%		Persentase Perangkat daerah dengan kinerja ASN sesuai ekspektasi	100.00%	SESUAI	
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin	100.00%		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin	100.00%	SESUAI	
		Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS	0.49%		Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS	0.49%	SESUAI	
4	**PENDIDIKAN DAN LATIHAN**							
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi kompetensi ASN	35.00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Dimensi Kompetensi ASN	35 nilai	SESUAI	BKPSDMD
5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah	100.00%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah	100.00%	SESUAI	BAPPEDA
		Indeks Inovasi Daerah	90.21		Indeks Inovasi Daerah	90.21	SESUAI	
V	**UNSUR PENGAWASAN UNSUR PEMERINTAHAN**			**UNSUR PENGAWASAN UNSUR PEMERINTAHAN**				
1	**INSPEKTORAT DAERAH**			**INSPEKTORAT DAERAH**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30.00	SESUAI	INSPEKTORAT
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.50		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13.50	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	67.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	67.00	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00	SESUAI	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Kapabilitas APIP	Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Kapabilitas APIP	Level 3	SESUAI	INSPEKTORAT
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Level 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Level 3	SESUAI	INSPEKTORAT
VI	**UNSUR KEWILAYAHAN**							
1	**KECAMATAN PUDING BESAR**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.84	SESUAI	KECAMATAN PUDING BESAR
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.43		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.43	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62.75		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62.75	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	SESUAI	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	SESUAI	KECAMATAN PUDING BESAR
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100.00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100.00%	SESUAI	KECAMATAN PUDING BESAR
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%	SESUAI	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100.00%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100.00%	SESUAI	KECAMATAN PUDING BESAR
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100.00%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100.00%	SESUAI	KECAMATAN PUDING BESAR
2	**KECAMATAN PEMALI**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	25.19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	25.19	SESUAI	KECAMATAN PEMALI
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.39		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.39	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	63.80		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	63.80	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.50		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.50	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90.00%	SESUAI	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	SESUAI	KECAMATAN PEMALI

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100.00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100 %	SESUAI	KECAMATAN PEMALI
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%	SESUAI	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100.00%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100 %	SESUAI	KECAMATAN PEMALI
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100.00%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	SESUAI	KECAMATAN PEMALI
3	**KECAMATAN MENDO BARAT**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.00	SESUAI	KECAMATAN MENDO BARAT
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.25		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.25	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.00	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.70		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.70	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	87.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	87.00%	SESUAI	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	SESUAI	KECAMATAN MENDO BARAT
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100.00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kel yang Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang	100 %	SESUAI	KECAMATAN MENDO BARAT
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%	SESUAI	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100.00%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang Berperan Aktif dalam Menjaga Trantibum	100.00%	SESUAI	KECAMATAN MENDO BARAT
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100.00%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Desa	100.00%	SESUAI	KECAMATAN MENDO BARAT
4	**KECAMATAN MERAWANG**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.25	SESUAI	KECAMATAN MERAWANG
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.50		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.50	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62.50		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62.50	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90.00%	SESUAI	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	SESUAI	KECAMATAN MERAWANG
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100.00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100.00%	SESUAI	KECAMATAN MERAWANG
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%	SESUAI	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100.00%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100.00%	SESUAI	KECAMATAN MERAWANG
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100.00%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100.00%	SESUAI	KECAMATAN MERAWANG
5	KECAMATAN RIAU SILIP							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30.00	SESUAI	KECAMATAN RIAU SILIP
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.70		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.70	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.00	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90.00%	SESUAI	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	SESUAI	KECAMATAN RIAU SILIP
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100.00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100.00%	SESUAI	KECAMATAN RIAU SILIP
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%	SESUAI	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100.00%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100.00%	SESUAI	KECAMATAN RIAU SILIP
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100.00%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100.00%	SESUAI	KECAMATAN RIAU SILIP
6	KECAMATAN BAKAM							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27.00	SESUAI	KECAMATAN BAKAM
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.75		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.75	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62.50		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62.50	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4.00	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90.00%	SESUAI	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	SESUAI	KECAMATAN BAKAM
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100.00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100.00%	SESUAI	KECAMATAN BAKAM
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100.00%	SESUAI	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100%	SESUAI	KECAMATAN BAKAM
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100%	SESUAI	KECAMATAN BAKAM
7	**KECAMATAN BELINYU**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.73%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.73%	SESUAI	KECAMATAN BELINYU
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.60%		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11.60%	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	63.00		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	63.00	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.50		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.50	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90.00%	SESUAI	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	SESUAI	KECAMATAN BELINYU
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100.00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang	100.00%	SESUAI	KECAMATAN BELINYU
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%	SESUAI	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100.00%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga Trantibum	100.00%	SESUAI	KECAMATAN BELINYU
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100.00%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Desa	100.00%	SESUAI	KECAMATAN BELINYU
8	**KECAMATAN SUNGAILIAT**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.00%	SESUAI	KECAMATAN SUNGAILIAT

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.20		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.20	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	61.50		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	61.50	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.50		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.50	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	99.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	99.00%	SESUAI	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100.00%	SESUAI	KECAMATAN SUNGAILIAT
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100.00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100.00%	SESUAI	KECAMATAN SUNGAILIAT
		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100.00%		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100.00%	SESUAI	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100.00%				Program tidak ada dalam RKPD 2026	KECAMATAN SUNGAILIAT
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100.00%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100.00%	SESUAI	KECAMATAN SUNGAILIAT
VII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Badan Kesbangpol	26.00	SESUAI	BADAN KESBANGPOL
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.00		Nilai Kinerja Pelaporan Badan Kesbangpol	12.00	SESUAI	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0.00%	SESUAI	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.82		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64.82	SESUAI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.15		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.15	SESUAI	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00%	SESUAI	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	100.00%	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	100.00%	SESUAI	BADAN KESBANGPOL
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	100.00%	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	100.00%	SESUAI	BADAN KESBANGPOL
		Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	98.00%		Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	98.00%	SESUAI	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif	100.00%	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif	100.00%	SESUAI	BADAN KESBANGPOL

NO	URUSAN/PROGRAM (RPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100.00%	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100.00%	SESUAI	BADAN KESBANGPOL
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	100.00%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	100.00%	SESUAI	BADAN KESBANGPOL

Sungailiat, Juli 2025

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKA

Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661214 199203 1 004

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN

RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahyang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori/Nilai)	Kategori/ Nilai	B (63,40)	Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahyang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori/Nilai)	Kategori/ Nilai	B (63,40)	-
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori/ Nilai	BB (72,65)	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori/ Nilai	BB (72,65)	-
		Indeks SPBE	Nilai	2,65		Indeks SPBE	Nilai	2,90	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 2,80 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 2,85. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
		Indeks Profesionalita ASN	Nilai	64,87		Indeks Profesionalita ASN	Nilai	78,21	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 76,31 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 77,83. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP	-
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	85,25		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	86,37	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 85,29 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 85,55. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
	Sasaran1.3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,09	Sasaran1.3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,21	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 86,35 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 87,54. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.

NO	RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Tujuan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,17	Tujuan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,17	-
	Sasaran 2.1 : MeningkatnyaKualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,33	Sasaran 2.1 : MeningkatnyaKualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,49	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 8,45 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 8,47. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,86		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 13,12 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 13,20. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,47	Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,31	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 73,24 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 73,28. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
		Angka Stunting	Persentase	1,31		Angka Stunting	Persentase	0,95	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 0,99 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 0,97. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
	Sasaran 2.3 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total	Anak	2,28	Sasaran 2.3 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total	Anak	2,00	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 1,84 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 2,00. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
	Sasaran 2.4 : Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	88,97	Sasaran 2.4 : Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	89,55	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 89,42 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 89,52. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.

NO	RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Status Kabupaten Layak Anak	Status/ Nilai	Madya (653)		Status Kabupaten Layak Anak	Status/ Nilai	Utama (815)	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 794/Nindya (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 804/Utama. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
3	Tujuan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah	Nilai	85,55	Tujuan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah	Nilai	85,55	-
	Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Nilai	0,185	Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Nilai	0,185	-
		Indeks Williamson	Nilai	0,173		Indeks Williamson	Nilai	0,173	-
4	Tujuan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah	Nilai	71,17	Tujuan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah	Nilai	71,17	-
	Sasaran 4.1 : Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,33	Sasaran 4.1 : Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,33	-
		Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	12.958		Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	13.961	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 13,205 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 13.714. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
		Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku)	Ribu Rupiah	21.724		Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku)	Ribu Rupiah	21.724	-
	Sasaran 4.2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persentase	4,21	Sasaran 4.2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persentase	4,13	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 4,24 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 4,23. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	5,33		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,49	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 4,91 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 4,77. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.

NO	RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran 4.3: Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan	Spending of Money Tourism	Milyar Rupiah	185,76	Sasaran 4.3: Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan	Spending of Money Tourism	Milyar Rupiah	232,69	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 197,96 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 218,12. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
	Sasaran 4.3 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	Nilai	0,213	Sasaran 4.3 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	Nilai	0.202	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 0,211 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 0,207. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
5	Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Nilai)	Nilai	65,5	Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Nilai)	Nilai	65,5	-
	Sasaran 5.1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	65,5	Sasaran 5.1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	66,38	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 64,76 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 65,95. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.
		Indeks KetahananBencana Daerah	Nilai	0,35		Indeks KetahananBencana Daerah	Nilai	0,55	Target RKPD 2026 lebih besar bila dibandingan dengan target 2026 di RPD 2024-2026. Hal ini karena realisasi tahun 2024 = 0,50 (melampauai target RPD). Target dalam P-RKPD 2025 = 0,53. Sudah melampaui target 2026 dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 RPD Tahun 2024-2026 dan Tabel 4.5 RKPD Kab Bangka Th 2026

Sungailiat, 25 Juni 2025

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKA

Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661214 199203 1 004

FORM 2

KESELARASAN KESEPATAN RAKORTEKRENBANG TAHUN 2025 DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang	Dokumen		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam
							1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		300	
							1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam RKPD 2026
							1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam RKPD 2026
							1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam RKPD 2026
2	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang	Unit		1	
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		4	Dinas Kesehatan, RSUD Depati Bahrin, RSUD DR. EKO MAULANA ALI, dan RSUD SJAFRIE RACHMAN
							1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen		234	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas
							1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		12	
							1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		312	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam RKPD 2026
3	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM		0,75	
							1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM		0,25	
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam RKPD 2026
							1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam RKPD 2026
			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam
							1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam

4	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah		43	
							1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam RKPD 2026
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	-	-		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam RKPD 2026
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi		1	
5	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB	Dokumen		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam
							1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam RKPD 2026
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	Laporan		72	
							1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan		12	
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		-	Sub Kegiatan tidak digunakan dalam RKPD 2026
6	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga		11	
							1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		89	
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	Orang		41	
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		3450	
7	2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang		30	

			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
8	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	-	2	
							2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
9	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
10	2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
11	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi		5	

							2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase		100	
							2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
12	2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
13	2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	-	62	
14	2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	Laporan	-	9	
							2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan

			penyandang disabilitas disabilitas.		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat	Laporan /Dokumen		4	
							2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaj (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL),Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
15	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	-	100	
							2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	-	1	
			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
16	2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif ,Keuangan,dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan		12	
							2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	-	70	
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaa tkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah	Layanan	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan

			memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-	5	
							2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	-	-	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	-	-	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
17	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	Unit Usaha	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	-	70	
18	2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan	Kegiatan Usaha	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,	Kegiatan Usaha	-	50	
19	2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	-	150	
							2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	-	-	-	-
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet daerah yang diseleksi	-	-	-	-
							2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	orang	-	200	
							2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	-	-	-
20	2,20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	-	-	-	-	-
					2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	orang	-	68	-

21	2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	-	34	-
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
22	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek	-	19	-
							2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	-	-	-	-
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	-	-	-	-
							2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	-	-	-	-
23	2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar	Perpustakaan	-	10	-
							2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah	Jumlah Masyarakat yang berperan dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran				
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan Pengembangan, Pengolahan dan pengalihmediaan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				
24	2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	12	-
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa			2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	-	250	-
25	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	orang	-	50	-

		BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	dan Perikanan yang Berkelanjutan		PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	kelompok	-	3	-
							3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan	-	-	-	-
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	-	35	-
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	-	-	-
							3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	-	-	-
							3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	-	-	-	-
26	3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan	Dokumen	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan

							3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
27	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	-	4	
							3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
28	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
29	3,29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
30	3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2	Laporan	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
31	3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	-	2	

					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
32	3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan	Orang	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
							3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
					3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	-	-	Sub Kegiatan tidak digunakan
33	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Orang	-	40	

			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	-	40	

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka

Ir. Pan Budi Khurnoto, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661214 199203 1 004

FORM 5

DAFTAR KESELARASAN SASARAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

NAMA KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BANGKA

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2.30 - 3.30	2.35 - 3.59	4,33	Target lebih tinggi dari target Provinsi
2.	PDRB Per Kapita (juta)	n.a	n.a	63,95	
3.	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	n.a	n.a	19,9	
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	4.79 - 4.84	4.68 - 4.75	4,13	Mempertimbangkan capaian Tahun 2024, Target lebih tinggi dari target Provinsi
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.38 - 5.08	4.34 - 5.34	4,49	Target pada kisaran target Provinsi
6.	Rasio Gini	0.237 - 0.247	0.235 - 0.245	0,202	Mempertimbangkan capaian Tahun 2024, Target lebih tinggi dari target Provinsi
7.	Indeks Modal Manusia *)	n.a	n.a	n.a	
8.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	49.29 - 54.63	n.a	34,19	Target lebih rendah dari target Provinsi
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,97	67,59	66,05	Mempertimbangkan Kondisi keuangan dan capaian Tahun 2024

**) untuk indikator Indeks Modal Manusia (IMM), penetapan indikator proxynya dapat disesuaikan dengan kebijakan Provinsi*

Sungailiat, 25 Juni 2025

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKA,

Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661214 199203 1 004

FORM 6

DAFTAR KESELARASAN
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74.68	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73.31	
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:		
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	109	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	118	
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17.5	
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk	252	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk	-	
	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	67.45	
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91.84	
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98.7	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98.08	
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:		
	a) Rata-rata Nilai PISA		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	a-i Membaca	396	- Literasi membaca	58,03-72,32	
	a-ii Matematika	404	- Numerasi	3,57-16,97	
	a-iii Sains	416			
	b) Rata-rata nilai asesmen nasional		b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada		
	- Literasi membaca	65.89	- Literasi membaca	56,01-58,01	
	- Numerasi	58.86	- Numerasi	30,61-32,59	
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9.45	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8.49	
	d) Harapan Lama Sekolah	13.36	d) Harapan Lama Sekolah	13.23	
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	34.92	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8.79	
7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	68.5	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66.37	
8	Tingkat kemiskinan (%)	6,5-7,5	Tingkat kemiskinan (%)	4.21	
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34.99	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	39.31	
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	10.4	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%),	53.44	
			diusulkan untuk menggunakan proksi:		
			a) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	-	
			b) Proxy: Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	-	
11	Produktivitas Industri dan Pertanian		Produktivitas Industri dan Pertanian		
	a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	21.2	a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	21,99-22,14	
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3.33	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		

NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata		
	a) Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60-4,70	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3.53	
	b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,00–24,70	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	8.57	
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,40-8,00	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional (%)	n/a	
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	3.15	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)		
			a-i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	12.94	
			a-ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	3.58	
	b) Rasio kewirausahaan (%)	3.18	b) Rasio kewirausahaan daerah (%)	6.32	
	c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1.12	c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	0.77	
	d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3.26	d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	1.96	
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
	a) Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,44-4,96	a) Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.72	
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37.95	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	52.81	
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	56,40-59,31	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	51.57	
17	Tingkat penguasaan IPTEK		Tingkat penguasaan IPTEK		
	a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0.31	Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (persen PDB) Indeks Kapabilitas Inovasi	3.28	
	b) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	52	Indeks Inovasi Daerah	86.27	
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a) Indeks Ekonomi Hijau	71.01	b) Indeks Ekonomi Hijau	71.67	
	c) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	d) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	29.06	
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	41	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.99	
20	Biaya Logistik (% PDB)	13.3	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	5.12	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29.44	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25.42	
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22, 7	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	34.63	
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		
	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44.58	b) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	20.25	
	c) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	68.66	d) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	37.27	
	e) Persentase Desa Mandiri (%)	23,91d)	f) Persentase Desa Mandiri (%)	9.1	
24	Indeks Materi Hukum		Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	n/a	
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.9	
26	Indeks Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	3.65	
27	Anti Korupsi		Anti Korupsi		
	ii. Indeks Integritas Nasional	89,17a)	Indeks Integritas Nasional	74.99	
	iii. Indeks Persepsi Korupsi	40			
28	Indeks Pembangunan Hukum	0.7	Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:		
			a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	71.88	

NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6
			b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	66.25	
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	68	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	66.99	
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82,12 – 85,66	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	
31	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,45-11,40	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	1.65	
32	Tingkat Inflasi (%)	2,50 ± 1,00	Tingkat Inflasi (%)	2,60-3,28	
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a) Aset Perbankan/PDB (%)	64.51	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28.73	
	b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7.63	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1.28	
	c) Aset Asuransi/PDB (%)	9.3			
	d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	59.9	c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	7,600,577.14	
	e) Total Kredit/PDB (%)	38.46	d) Total Kredit/PDRB (%)	18.6	
34	Inklusi Keuangan (%)	91.5	Inklusi Keuangan (%)	86.79	
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	65.8	Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:		
			Jumlah kerja sama provinsi/kabupaten/kota kembar/bersaudara (Sister Province/ Sister City)	n/a	
36	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	17	Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks – Military Capability)	n/a	
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58.99	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,83-59,90	
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77.14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,12-77,17	
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73.83	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,87-69,88	
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.421	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,447-0,446	
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0.47	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0.529	
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup		
	a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66.38	
	a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)				
	a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)				
	a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)				
	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	17	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	8.86	
	c) Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	28 (17 terdaur ulang)	c) Pengelolaan Sampah		
			- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	12.75	
			- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	54,06	
43	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
	i. Ketahanan Energi		a) Ketahanan Energi		
	- Indeks Ketahanan Energi	6.82	- Konsumsi Listrik per kapita (kWh)	1,261	
	ii. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	6.55	- Intensitas energi primer (SBM/ RP milyar)	156,5	
			b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	11.21	

NO	RKP 2026		RKPD 2026 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA *)		KETERANGAN
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6
	iii. Ketahanan Air	3,5	c) Ketahanan Air		
	- Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	60,16	- Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	0,65	
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	42,24	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	30,04	
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB	0,136	Indeks RIsiko bencana (IRB) (untuk level provinsi)	116,06	
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	a) Kumulatif	19,07	b) Kumulatif	19,16	
	c) Tahunan	27,35	d) Tahunan	30,55	

**) Indikator Utama Pembangunan kabupaten/kota dapat disesuikan dengan kebijakan masing-masing provinsi.*

Sungailiat, 25 Juni 2025
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka

Ir. Pan Budi Marwoto, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661214 199203 1 004

Form 7

DAFTAR KESELARASAN KEGIATAN PRIORITAS UTAMA

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1.	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggungjawab, Edukatif, Jujur, objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	
			Sub Keg. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
2.	Prioritas Nasional 2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya		
		Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Kagiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
			Kagiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Kagiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Kagiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Kagiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
			Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Kagiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
			Kagiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
		Pembangunan pangan hewani	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
			Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Keci	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
		Peningkatan penyediaan energi		
		Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi		
		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan		
		Konservasi sumberdaya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
			Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
			Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Sub KegiatanOptimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
			Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat	
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
		Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
			Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Sub KegiatanPenguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Kegaiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan susut dan sisa pangan		
		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
			Sub KegiatanPengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
		Peningkatan kualitas ekosistem gambut		
		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
			Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
		Peningkatan pengumpulan dan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
		pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	Kegiatan Pengelolaan Sampah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut		
3.	Prioritas Nasional 3	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya		
		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	
		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur Yogyakarta-Prambanan		
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena		
		Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba		
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas labuhan Bajo		
		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim		
		Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			Pengembangan Usaha Mikro	
4.	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD	
			Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah berkualitas		
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul		
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g.pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi		
		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
		Penurunan Kematian ibu dan anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
		Pencegahan dan penurunan stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil. Ibu menyusui dan balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Sub Kegiatan Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
			Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
		Eliminasi penyakit kusta&Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		Investasi pelayanan kesehatan primer	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
			Pengembangan Rumah Sakit	
			Pengembangan Puskesmas	
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengembangan manajemen Talenta nasional (MTN) seni budaya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
		Pengembangan manajemen Talenta nasional (MTN) riset dan inovasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
		Pengembangan manajemen Talenta nasional (MTN) olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
			Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
5.	Prioritas Nasiomal 5	Pengembangan hilirisasi Nikel		
		Pengembangan hilirisasi Tembaga		
		Pengembangan hilirisasi Bauksit		
		Pengembangan hilirisasi Timah		
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Penanaman Modal	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Penanaman Modal	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengembangan hilirisasi Kelapa		
		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut		
		Pengembangan hilirisasi Kimia		
		Pengembangan industri semikonduktor		
		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil		
		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja		
		Pengembangan industri dirgantara		
		Pengembangan KEK Sei Mangkei		
		Pengembangan KIT Batang		
		Pengembangan KI Weda bay		
6.	Prioritas Nasiomal 6	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITATENAGA KERJA	
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
		Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
		Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke ibu Kota Nusantara		
		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	PROGRAM PENATAAN DESA	
			Penyelenggaraan Penataan Desa	
			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
7	Prioritas Nasional 7	Pencegahan tindak pidana korupsi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	
			Sub Keg.Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
			Sub Keg. Pengelolaan Promosi ASN	
		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMIUNIKASI PUBLIK	
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	
			Pelayanan Informasi Publik	
		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Sub.Keg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			Sub.Keg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			Sub.Keg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Sub.Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			Sub.Keg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Sub.Keg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Sub.Keg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			Sub.Keg Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			Sub.Keg Penagihan Pajak Daerah	
			Sub.Keg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Sub.Keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Sub.Keg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
		Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak		
8	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
			Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	
			Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
		Pemanfaatan khazanah budaya dan Pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub. Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub. Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
			Sub. Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			Sub. Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
			Sub. Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
			Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	

Sungailiat, 25 Juni 2025
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka

Ir. Pan Budi Marwoto, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661214 199203 1 004

FORM 8

DAFTAR KESELARASAN
INTERVENSI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

NAMA KABUPATEN : Kabupaten Bangka

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHTINTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
A1/A2	Kawasan Perkotaan Pangkalpinang (A1) dan Kawasan Pengembangan Industri Pangkalpinang-Sungailiat (A2): · Kota Pangkalpinang · Kab. Bangka	Preservasi jalan ruas Pangkalpinang–Sungailiat–Muntok dan Pangkalpinang– Koba–Toboali;	Kecamatan Merawang dan kecamatan sungailiat	**Program:** Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan/ **Kegiatan**: Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /**Sub Kegiatan:** Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Ruas Pangkalpinang Sungailiat merupakan kewenangan pemerintah pusat. Keterlibatan pemerintah daerah ialah dalam hal pembebasan lahan untuk pelebaran jalan
		Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Sungailiat.	Kecamatan Sungailiat, Kelurahan Jelitik	**Program:** Penyelenggaraan Jalan / **Kegiatan:** Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ **Sub Kegiatan:** Pemeliharaan Berkala Jalan	Memperbaiki akses menuju Pelabuhan perikanan sungailiat
				Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri/ **Kegiatan:** Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ **Sub Kegiatan :** Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Di Kawasan di sekitar PPN Sungailiat akan dibentuk UPTD Sentra Industri yang didalamya terdapat industry komoditas perikanan
				Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap/ **Kegiatan:** Pengelolaan dan Penyelenggaran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) /**Sub Kegiatan :** Pelayanan Penyelenggaraan TPI	Fasilitas Pendukung Jual Beli Komoditas Perikanan disekitar PPN Sungailiat
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Timah, Bauksit, dan Lada Bangka : · Kab. Bangka · Kab. Bangka Barat · Kab. Bangka Tengah · Kab. Bangka Selatan	Peningkatan tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri timah dan bauksit;	Kecamatan Sungailiat, Kelurahan Jelitik	**Program :** Perencanaan dan Pembangunan Industri/ **Kegiatan:** Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ **Sub Kegiatan :** Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Koordinasi Pengaktifan Kembali Kawasan Industri Semelter Jelitik dalam mendukung Hilirisasi Timah
		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (lada);	Kawasan Pertanian Lada Bangka	**Program:** Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ **Kegiatan:** Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme/ **Sub Kegiatan:** Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Bantuan Sarana Pertanian Pendukung Lada
				Program: Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian /**Kegiatan:** Pengembangan Prasarana Pertanian/ **Sub Kegiatan:** Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Bantuan Prasarana Pertanian Pendukung Lada
		Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (lada);	Kawasan Pertanian Lada Bangka	**Program:** Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian/ **Kegiatan:** Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian/ **Sub Kegiatan:** Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Bantuan Pengendalian OPT
		Peningkatan mutu produk pertanian (lada);	Kawasan Pertanian Lada Bangka	Program: Penyuluhan Pertanian/ Kegiatan: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/ Sub Kegiatan: Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Penyuluhan Peningkatan Produktivitas Pertanian Lada
E1	Kawasan Konservasi TN Gunung Maras: • Kab. Bangka · Kab. Bangka Barat	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Desa Berbura, Desa Dalil	**Program:** Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan/ **Kegiatan**: Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /**Sub Kegiatan:** Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk	Pembangunan Jalan Ruas Lumut – Maras Senang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang manjadi akses menuju. Kawasan TN gn. Maras. Keterlibatan pemerintah daerah ialah dalam hal pembebasan lahan untuk pelebaran jalan
				Program: Peningkatan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata/ Sub Kegiatan: Pengadaan /Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Bantuan Sarana Pendukung Wisata TN. Gunung Maras
				Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar/ Sub Kegiatan: Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Bantuan Pembentukan Kelembagaan Pengelola Wisata TN. Gunung Maras

Sungailiat, 25 Juni 2025
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka

IR. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661214 199203 1 004